SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 42 TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 1A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi Anggaran Semester I Tahun 2024 terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

(3) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dokumen perencanaan yang terdiri atas:

a. buku I memuat tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024, yang terdiri atas:
   1. bab I memuat tentang pendahuluan;
   2. bab II memuat tentang evaluasi hasil triwulan II Tahun 2024;
   3. bab III memuat tentang kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
   4. bab IV memuat tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
   5. bab V memuat tentang rencana kerja dan pendanaan daerah;
   6. bab VI memuat tentang penutup.
b. buku II memuat tentang program dan kegiatan prioritas.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dokumen Perencanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Juli 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 42

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 59 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024



PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK 2024

Peraturan Wali Kota Depok Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PENELITIAN DAERAH KOTA DEPOK

KATA **PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya Pemerintah Kota Depok telah dapat menyelesaikan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P RKPD) Tahun 2024 Dokumen P RKPD Tahun 2024 ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9), serta dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan program-program prioritas dan strategis nasional tahun 2024.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 memiliki peran yang penting, yaitu menjadi dasar bagi penyusunan perubahan renja perangkat daerah dan merupakan rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS P-APBD). Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 ini merupakan pedoman dalam menyiapkan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Depok yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan dokumen ini. Semoga Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera.

Depok, 30 Juli 2024

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN I -1

1.1 Latar Belakang ..... I -1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I - 2

1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ..... I - 5

1.4 Maksud dan Tujuan ..... I - 6

1.5 Sistematika ..... I - 7

1.6 Dasar Pertimbangan ..... I - 7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BELANJA DAERAH II - 1

2.1 Penjelasan Umum Evaluasi RKPD ..... II - 1

2.2 Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II - 2

2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan ..... II - 6

2.3.1 Tujuan Misi Ke- I ..... II - 6

2.3.2 Tujuan Misi Ke- II ..... II - 10

2.3.3 Tujuan Misi Ke- III ..... II - 12

2.3.4 Tujuan Misi Ke- IV ..... II - 18

2.3.5 Tujuan Misi Ke- V ..... II - 20

2.4 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II - 22

2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 . II - 39

2.6 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II - 48

2.7 Evaluasi Capaian Kinerja Realisasi Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota ..... II - 99

2.8 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ..... II - 109

2.9 Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) ..... II - 205

2.9.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan ..... II - 205

2.9.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan ..... II - 209

2.9.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum II - 227

2.9.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat ..... II - 231

	2.9.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ……..	II - 234
	2.9.6	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial ……..……	II - 241
2.10		Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ……..	II - 247
2.11		Penanggulangan Masalah Stunting ……...	II - 292
	2.11.1	Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ……	II - 294
2.12		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ……..	II - 326
BAB III		**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ……**	III - 1
3.1		Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ……...	III - 1
	3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023, Awal Tahun 2024 dan Prediksi Tahun 2025 ……	III - 1
	3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Global, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok ……...	III - 16
	3.1.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi ……..	III - 22
3.2		Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……	III - 27
	3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……	III - 30
	3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah ……	III - 33
	3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III - 35
	3.2.4	Kinerja Keuangan Daerah ……...	III - 37
3.3		Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah ……	III - 39
BAB IV		**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ……**	IV - 1
4.1		Tujuan dan Sasaran Pembangunan ……..	IV - 2
	4.1.1	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ……...	IV - 2
	4.1.2	Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat ...	IV - 5
	4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Depok ……	IV - 6
4.2		Prioritas Pembangunan ……	IV - 17
	4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional ……..	IV - 17
	4.2.2	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat ……..	IV - 19
	4.2.3	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD ……..	IV - 20
	4.2.4	Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2024 ……..	IV - 35
	4.2.5	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi ……..	IV - 64
	4.2.6	Tingkat Dukungan Program daerah Terhadap Kegiatan Prioritas pada Prioritas Nasional (PN) ……..	IV - 77
4.3		Kebijakan Pembangunan Kewilayahan ……..……..	IV - 115
4.4		Pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal ……..	IV - 119

4.5 Kebijakan Inovasi Daerah ..... IV - 161
4.5.1 Kebijakan Inovasi Daerah ..... IV - 161
4.5.2 Inovasi Pembangunan Daerah Kota Depok ..... IV - 161
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V - 1
BAB VI PENUTUP ..... VI - 1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1.	Realisasi Indikator Makro Kota Depok 2019-2023	II - 2
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Tujuan Kota Depok Tahun 2022-202	II - 5
Tabel 2.3.	Perubahan Kriteria dan Jumlah Pertanyaan Indeks Kota Layak Huni	II - 6
Tabel 2.4.	Pengukuran Indeks Kota Layak Huni Tahun 2023	II - 7
Tabel 2.5.	Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2023-2024	II - 11
Tabel 2.6	Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023	II - 11
Tabel 2.7	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2021-2022	II - 12
Tabel. 2.8	Indeks Konflik Sosial Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023	II - 15
Tabel 2.9	Keluarga Menurut Kategori dan Dimensi IPK (%)	II - 17
Tabel 2.10	Capaian Indikator Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok Tahun 2022-2023	II - 19
Tabel 2.11	Dimensi dan Skor Penilaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	II - 20
Tabel 2.12	Kesesuaian Program antara Dokumen RKPD dan APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024	II - 22
Tabel 2.13.	Perbandingan antara Jumlah Kegiatan pada Dokumen RKPD dengan Jumlah Kegiatan pada APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024	II - 25
Tabel 2.14	Perbandingan antara Jumlah Sub Kegiatan pada Dokumen RKPD dengan Jumlah Kegiatan pada APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024	II - 29
Tabel 2.15	Perbandingan antara Pagu Indikatif RKPD dengan APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024	II - 35
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Daerah Berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 40
Tabel 2.17	Capaian Indikator Kinerja Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024	II - 53
Tabel 2.18	Realisasi Janji Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 97
Tabel 2.19	Evaluasi Hasil RKPD Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 108
Tabel 2.20	Rekapitulasi Realisasi Kinerja Program Dibandingkan Realisasi Keuangan per Urusan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 159
Tabel 2.21	Realisasi Belanja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 161
Tabel 2.22	Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2024	II - 162
Tabel 2.23	Realisasi SPM Bidang Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 194
Tabel 2.24	Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 198
Tabel 2.25	Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II - 209
Tabel 2.26	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat s.d. Triwulan II Tahun 2024	II - 213
Tabel 2.27	Realisasi SPM Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat s.d. Triwulan II Tahun 2023	II - 216
Tabel 2.28	Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana s.d. Triwulan II Tahun 2022	II - 218
Tabel 2.29	Hasil Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran	II - 220
Tabel 2.30	Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial s.d Triwulan II Tahun 2023	II - 222
Tabel 2.31	Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023	II - 227
Tabel 2.32	Data Pegawai Dinas Sosial	II – 227
Tabel 2.33	Evaluasi Kinerja Pencapaian sasaran TPB/SDG's Tahun 2022	II – 229
Tabel 2.34	Rekapitulasi Pencapaian TPB/SDG's Kota Depok terhadap Target RAD Th. 2022	II – 248
Tabel 2.35	Identifikasi Permasalahan Pencapaian TPB/SDG's dan Rencana Tindak Lanjut	II – 250
Tabel 2.36	Capaian Cakupan Esensial Indikator Intervensi Stunting	II – 283
Tabel 3.1.	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023	III – 3
Tabel 3.2.	. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023	III - 3
Tabel 3.3.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, 2019-2023 (Juta Rupiah)	III - 6
Tabel 3.4.	IHK dan Inflasi Kota Depok bulan Desember 2023 dan Tahun Kalender 2023	III - 7
Tabel 3.5.	Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Depok, Tahun 2019 – 2023	III – 9
Tabel 3.6.	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu yang Termasuk Pengannggguran di Kota Depok Tahun 2019-2022	III - 10

Tabel 3.7.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2022 (Rp Juta)	III - 13
Tabel 3.8.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Persen)	III - 14
Tabel 3.9.	Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif Kota Depok Tahun 2019 – 2022 (Orang)	III - 15
Tabel 3.10.	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat	III - 19
Tabel 3.11.	Realisasi dan Target Indikator Makro Kota Depok	III - 21
Tabel 3.12.	Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2024	III - 21
Tabel 3.13.	Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024	III - 32
Tabel 3.14.	Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024	III - 35
Tabel 3.15.	Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024	III - 36
Tabel. 3.16.	Realisasi TJSL Kota Depok Tahun 2024	III - 39
Tabel. 4.1.	Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Depok dengan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026	IV - 8
Tabel 4.2.	Realisasi dan Target Tujuan Sasaran Pembangunan Kota Depok	IV - 10
Tabel 4.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Depok Tahun 2024	IV - 14
Tabel 4.4	Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2024	IV - 18
Tabel 4.5	Keselarasan Arah Kebijakan Nasional dan Isu Strategis Pembangunan Kota Depok Tahun 2024	IV - 37
Tabel 4.6.	Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	IV - 38
Tabel 4.7.	Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	IV - 39
Tabel 4.8.	Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan	IV - 40
Tabel 4.9.	Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	IV - 40
Tabel 4.10.	Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	IV - 41
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	IV - 42
Tabel 4.12.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik	IV – 46
Tabel 4.13.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggung jawab Pada Prioritas Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	IV - 46
Tabel 4.14.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	IV - 47
Tabel 4.15.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman	IV - 48
Tabel 4.16.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	IV – 49
Tabel 4.17.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	IV - 49
Tabel 4.18.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Penanganan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan	IV - 50
Tabel 4.19.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi	IV - 51
Tabel 4.20.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	IV - 54

Tabel 4.21.	Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	IV - 56
Tabel 4.22.	Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	IV - 60
Tabel 4.23.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok 2024 dengan Pembangunan Nasional 2024 dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024	IV - 64
Tabel 4.24.	Persandingan antara Sasaran Prioritas Nasional pada RKP 2024, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Jawa Barat 2024 dengan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Depok 2024	IV - 66
Tabel 4.25.	Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP 2024, Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Jawa Barat 2024 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Depok 2024	IV - 72
Tabel 4.26.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2024 (PN 01)	IV - 79
Tabel 4.27.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan RKP 2024 (PN 02)	IV - 90
Tabel 4.28.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2024 (PN 03)	IV - 95
Tabel 4.29.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024 (PN 04)	IV - 100
Tabel 4.30.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024 (PN 05)	IV - 103
Tabel 4.31.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2024 (PN 06)	IV - 106
Tabel 4.32.	Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RKP 2024 (PN 07)	IV - 112
Tabel 4.33.	Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2022	IV - 119
Tabel 4.34.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan	IV - 121
Tabel 4.35.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan	IV - 127
Tabel 4.36.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan PUPR	IV - 139
Table 4.37.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkim	IV - 142
Table 4.38.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan TRANTIBUMLINMAS	IV - 144
Table 4.39.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan TRANTIBUMLINMAS (Damkar)	IV - 149
Table 4.40.	Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial	IV - 154
Table 4.41.	Daftar Inovasi Tahun 2022 dan Tahun 2023	IV - 162
Table 4.42.	Kerangka Kerja Logis Inovasi DSW	IV - 182
Table 4.43.	Ringkasan Kerangka Kerja Logis Inovasi Simpel Kepok	IV - 185
Tabel 5.1	Ringkasan Program, Kegiatan Berdasarkan Urusan	V - 2
Tabel 5.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 Berdasarkan Perangkat Daerah	V - 9

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Indeks Layak Huni Kota Depok Tahun 2017, 2022 dan 2023	II - 8
Gambar 2.2	Indeks Layak Huni Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2023	II - 9
Gambar 2.3	Indeks Konflik Sosial Kota Depok per Aspek Tahun 2023	II - 14
Gambar 2.4	Peta Persebaran Klaster Indeks Potensi Konflik Sosial	II - 16
Gambar 2.5	Indikator Pembangunan Keluarga Kota Depok Tahun 2023	II - 12
Gambar 2.6	Indikator Pembangunan Keluarga pada Tingkat Kecamatan dan Kota Depok	II - 17
Gambar 2.7	Rekapitulasi status gizi Balita hasil Bulan Penimbangan Balita di bulan Februari 2023	II - 275
Gambar 2.8	Persentase status Gizi Balita berdasarkan Kecamatan pada Bulan Februari 2023	II - 275
Gambar 2.9	Distribusi Status Gizi Balita berdasarkan BB menurut TB pada balita stunting	II - 276
Gambar 2.10	Prevalensi Balita Stunting (Sangat Pendek dan Pendek) Berdasarkan Jumlah Balita Yang Diukur Tinggi Badannya Pada Kegiatan BPB Februari di Kota Depok Tahun 2019-2023	II - 285
Gambar 2.11	Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan di Kota Depok Tahun 2020-2023	II - 286
Gambar 2.12	Prevalensi Stunting Balita di Kecamatan Kota Depok Tahun 2023	II - 286
Gambar 2.13	Prevalensi Stunting Baduta Per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2023	II - 287
Gambar 2.14	Distribusi Balita Stunting Berdasarkan Masalah Gizi	II - 287
Gambar 2.15	Prevalensi Balita Stunting Berdasrkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	II - 290
Gambar 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023	III - 4
Gambar 3.2.	Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Tahun 2019 – 2023 (dalam juta rupiah)	III - 5
Gambar 3.3.	Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Depok Tahun 2019 – 2023	III – 6
Gambar 3.4.	Perkembangan Inflasi Tahun Kalender 7 Kota Di Jawa Barat Tahun 2023	III - 7
Gambar 3.5.	Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah dengan Nasional Tahun 2019 – 2023	III - 9
Gambar 3.6.	Perbandingan Tren Gini Rasio Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023	III - 11
Gambar 3.7	Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023	III - 12
Gambar 4.1.	Kerangka Pikir RKPD Kota Depok Tahun 2024	IV - 2
Gambar 4.2.	Visi dan Misi Kota Depok, 2021-2026	IV - 8
Gambar 4.3.	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Depok 2022-2042	IV - 117
Gambar 4.4	Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Depok, 2022-2042	IV - 115
Gambar 4.5	Aplikasi Depok Single Window	IV - 182

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan Daerah di Kota Depok dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 dan mengacu pada Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang juga diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2024 ini, Pemerintah daerah Kota Depok masih dihadapkan pada permasalahan Ketimpangan yang melebar, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dengan seiring dengan berjalannya upaya pemulihan ekonomi. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Depok selama paruh pertama tahun 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi pada saat penyusunan antara lain meliputi: perubahan asumsi makro, perubahan kapasitas fiskal daerah, kebijakan pusat serta proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka harus dilakukan perubahan terhadap RKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam kebijakan perencanaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Oleh karena itu, Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2020 Tentang Recana Tata Tuang dan Wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
29. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9);

35. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
37. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9).
40. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042;
41. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
42. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2024
43. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

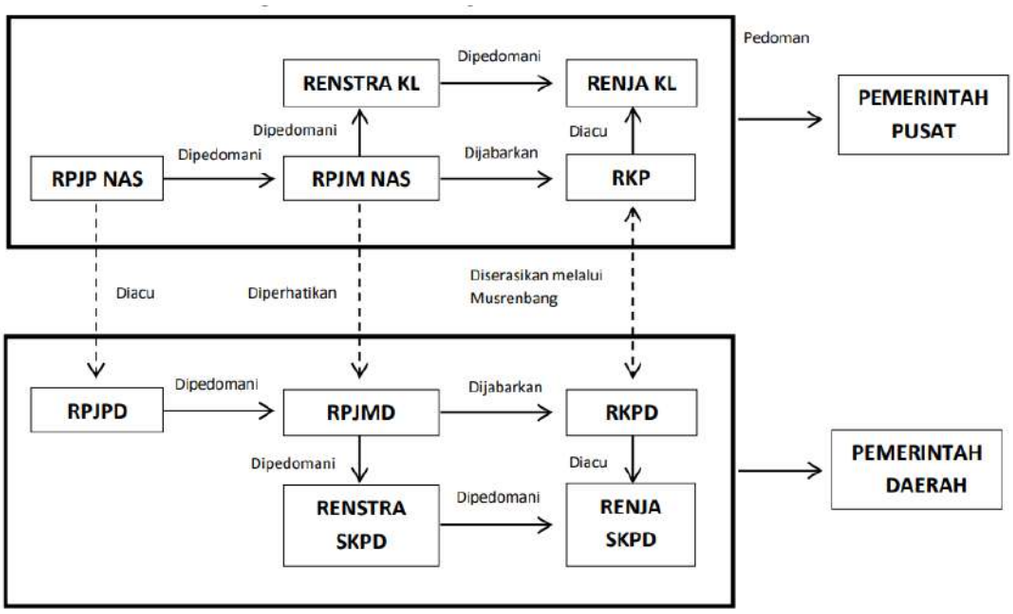
1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD telah disepakati digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja SKPD.

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan daerah sekitar, disamping sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian indikator keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP)

Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan



Secara substansi, RKPD Kota Depok Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022-2042, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 merupakan pedoman untuk menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P Renja-PD) dan penyusunan RKA PD Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Depok Tahun 2024 bertujuan sebagai berikut:

a. Merubah prioritas program/kegiatan/sub kegiatan daerah menyesuaikan dengan sasaran daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026;
b. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
c. Pedoman bagi Perubahan APBD Tahun 2024;
d. Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
e. Memberikan dasar hukum dalam penggunaan silpa untuk pendanaan kegiatan tahun 2024;

f. Memberikan dasar hukum dalam penambahan kegiatan/subkegiatan baru, perubahan indikator kinerja, target, lokasi dan pagu kegiatan.

g. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen P-RKPD Kota Depok Tahun 2024

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan perubahan, serta sistematika dokumen perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab ini menjelaskan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan (1) Arah kebijakan daerah, memuat kondisi perkembangan ekonomi global hingga daerah; (2) Arah kebijakan keuangan dengan menguraikan mengenai perubahan arah kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perubahan target anggaran, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berisi tujuan dan sasaran pembangunan serta Prioritas dan Sasaran pembangunan tahun 2024 yang diseleraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2024.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB VI. PENUTUP

Bab ini memuat penutup dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Depok tahun 2024.

1.6 Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Adanya perubahan kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka perubahan RKPD 2024 meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Penambahan/pengurangan program, kegiatan dan subkegiatan;
4. Perubahan pagu anggaran program / kegiatan /subkegiatan;
5. Perubahan target kinerja (IKD, IKU Renstra, IKK, Outcome dan Output);
6. Perubahan struktur anggaran daerah (pendapatan, belanja, dan Pembiayaan);
7. Penyesuaian output pada subkegiatan terkait DAK, dan DBH CHT; dan
8. Penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi terbaru;
9. Dukungan terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi tahun 2024 melalui fokus pada pelaksanaan arah kebijakan pembangunan nasional yang meliputi: (berdasarkan Permendagri 10/2023)

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Penjelasan Umum Evaluasi RKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:

a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah;
b. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
c. Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
d. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Evaluasi dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD lingkup Daerah. Penilaian sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengetahui :

a. Realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
b. Realisasi penyerapan dana program dan kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah.

2.2. Evaluasi Capaian Indikator Makro Pembangunan Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi capaian indikator makro sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum bisa dilakukan karena data belum tersedia**.** Perkembangan indikator makro pembangunan Kota Depok sampai dengan tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang baik, secara umum masih di atas rata-rata nasional dan Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1. Realisasi Indikator Makro Kota Depok 2019-2023

NO.	INDIKATOR KINERJA	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	80,82	80,97	81,37	82,02	82,53
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,74	-1,92	3,76	5,24	5,05
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,11	9,87	9,76	7,82	6,97
4	Persentase Penduduk Miskin (%)	2,07	2,45	2,58	2,53	2,38
5	Indeks Gini (poin)	0,343	0,344	0,367	0,394	0,402
6	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	3,28	1,64	1,92	1,79	1,55
7	Pendapatan Per Kapita (ribu rupiah)	30.079,00	34.356,00	35.655,00	38.225,81	40.816,92
8	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO_2/tahun)	NA	9,03	8,40	3,10	-32,37

Sumber : Bappeda, BPS Kota Depok, 2023

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan tabel di atas, nilai IPM Kota Depok Tahun 2023 adalah sebesar 82,53 mengalami peningkatan sebesar 0,51 poin (0,62%) dari nilai IPM 2022 (82,02). Kenaikan IPM ini didorong oleh naiknya nilai komponen-komponen penyusun IPM. Nilai IPM Kota Depok merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung (83,29) dan Kota Bekasi (83,06). Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Depok baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kelayakan hidup. Dari 11 Kecamatan di Kota Depok, tiga kecamatan tertinggi skor IPM-nya pada 2023 meliputi: Kecamatan Sukmajaya (88,03), Kecamatan Cinere (87,62), dan Kecamatan Cimanggis (85,74).

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok Tahun 2023 sebesar 5,05%. LPE tersebut menunjukkan kinerja ekonomi Kota Depok tahun 2023 sedikit melambat dari tahun 2022 dengan LPE sebesar 5,24%.. Melambatnya kinerja perekonomian tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Transportasi dan Pergudangan dari 10,52% pada tahun 2022 menjadi 5,62% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi kembali normalnya jumlah penumpang komuter line pada tahun 2023 dimana tahun sebelumnya terjadi lonjakan jumlah penumpang komuter line akibat dihapuskannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pasca Covid. Capaian tahun 2023 tersebut belum memenuhi atau melewati capaian laju pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 (2019) dengan LPE sebesar 6,74 persen.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kota Depok tahun 2023 sebesar 6,97% persen menurun dari tahun 2022 yang sebesar 7,82%. Penurunan tersebut menunjukkan perbaikan dalam pasar tenaga kerja dan ekonomi daerah. Faktor-faktor seperti peningkatan investasi, efektivitas program pelatihan dan pendidikan, migrasi tenaga kerja, serta kondisi makroekonomi yang membaik berkontribusi terhadap penurunan ini. Langkah-langkah strategis ke depan bisa difokuskan pada mempertahankan dan meningkatkan trend positif ini melalui kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengurangi pengangguran telah menunjukkan hasil yang signifikan, melalui program penciptaan wira usaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja seperti Peningkatan kompetensi tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, program padat karya dan bursa kerja online (BKOL).

d. Persentase Penduduk Miskin

Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kota Depok mencapai level terendah yaitu 2,07%. Namun adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 telah menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat kembali menjadi 2,45 persen dan 2,58 persen. Namun seiring membaiknya kondisi perekonomian, pada tahun 2022-2023, angka kemiskinan menurun sedikit menjadi 2,53% dan 2,38%. Dengan angka kemiskinan tersebut tetap menempatkan Kota Depok sebagai daerah peringkat ke-1 tingkat kemiskinan terendah di Jawa Barat dan Peringkat ke-4 di tingkat Nasional. Penurunan persentase angka kemiskinan Kota Depok didukung beberapa faktor yaitu:

1. Adanya sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Pendekatan Multidimensi dan multisektoral, yakni pelaksanaan program kegiatan dengan memperhatikan berbagai faktor dan sektor seperti keterkaitan kesetraraan gender, disabilitas, lansia dan kelompok rentan;
3. Adanya Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2022 tentang Parameter Penetapan Penduduk Miskin Kota Depok, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2022 tentang Kartu Depok Sejahtera dan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Depok sebagai instrument supaya program kegiatan pengentasan kemiskinan tepat sasaran, terpantau dan terkendali;
4. Koordinasi dan kerjasama melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melaksanakan evaluasi, koordinasi antar pemangku kepentingan, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan bekerjasama dengan melibatkan unsur nonpemerintahan.
5. Semua informasi (data dan program) yang terkait dengan pengentasan kemiskinan tersampaikan dan dapat diakses semua pihak.
6. Penerima program kegiatan pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

e. Rasio Gini

Capaian angka Koefisien Gini atau Indeks Gini Kota Depok tahun 2019-2023 menunjukkan tren peningkatan. Tahun 2019 indeks Gini sebesar 0,343 terus meningkat menjadi 0,402 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Depok semakin tinggi.

Beberapa kemungkinan penyebab makin tingginya indeks gini di Kota Depok adalah :

a) Ketimpangan Indeks Pembangunan manusia antar wilayah kecamatan masih cukup lebar;
b) Tingginya angka Upah Minimum Kota (UMK);
c) Belum terdapat kelembagaan yang khusus menangani kesenjangan atau gini ratio di Kota Depok;
d) Belum ada kerja sama tertulis dengan lembaga keuangan untuk menfasilitasi akses permodalan bagi usaha masyarakat berpendapatan rendah;
e) Belum optimalnya kebijakan fiskal yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat berpendapatan rendah;
f) Kurang koordinasi antar stakeholder terkait yang menangani kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g) Belum masifnya upaya untuk mengikutsertakan pihak swasta maupun masyarakat dalam rangka memberi akses bantuan atau memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah.

f. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk 2023 Kota Depok sebesar 1,55%. Capaian ini lebih rendah tahun 2022 yang sebesar 1,79%, namun pertumbuhan penduduk tersebut lebih tinggi dibandingkan tingkat nasional yang lajunya mencapai 1,13%. Laju pertumbuhan penduduk terbesar terjadi di Kecamatan Sawangan (3,59%) disusul Kecamatan Sawangan Bojongsari (2,91%). Sedangkan pertumbuhan terkecil di Kecamatan Cinere (-0,02%) dan Kecamatan Beji (-0,01%).

Pertumbuhan penduduk di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor demografi dan non-demografi. Faktor demografi yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok selain tingkat kelahiran, juga tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok. Kota Depok yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota negara dan perekonomian, menjadikan Depok sebagai wilayah yang sangat strategis untuk permukiman.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok juga dipengaruhi oleh faktor non demografi yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu pesatnya pertumbuhan Kota Depok sebagai daerah pemukiman menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduk di Kota Depok.

Makin rendahnya laju pertumbuhan penduduk Kota Depok pada tahun 2023 mengindikasikan keberhasilan program Keluarga Berencana di Kota Depok. Adapun beberapa program yang mendukung kesuksesan dalam pengurangan jumlah kelahiran (Program KB) adalah sebagai berikut: 1) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB dan Program Pengendalian Penduduk.dengan sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 2) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas

Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, 3) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, 4) Pembinaan IMP, dan 5) Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB.

g. Pendapatan Per kapita

Pendapatan per kapita Kota Depok pada tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang meningkat. Jika pada tahun 2019, pendapatan per kapita Kota Depok sebesar 30,1 juta rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 40,8 juta rupiah. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kota Depok setiap tahunnya. Dalam periode 2019-2023, pendapatan per kapita meningkat sebesar 10,7 juta rupiah, atau sekitar 35,5% dari nilai awal. Jika dihitung rata-rata, pendapatan per kapita meningkat sekitar 8% per tahun selama periode tersebut.

Dampak dari peningkatan PDRB per kapita antara lain: peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan konsumsi. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendapatan dan inflasi harus diatasi dengan strategi yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

h. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan memancarkan radiasi inframerah, yang mengakibatkan efek pemanasan pada atmosfer bumi. Gas-gas ini disebut gas rumah kaca karena mereka berperan dalam menjaga suhu bumi tetap hangat, mirip dengan cara kerja rumah kaca yang mempertahankan panas di dalamnya. Gas rumah kaca utama termasuk: Karbondioksida (CO2), Metana (CH_4), Dinitrogen oksida (N_2O), Gas rumah kaca lainnya: (hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorokarbon (PFCs), sulfur heksafluorida (SF_6), dan nitrogen trifluorida (NF_3).

Emisi gas rumah kaca berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim, yang memiliki berbagai dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Upaya global sedang dilakukan untuk mengurangi emisi ini melalui berbagai kebijakan dan teknologi ramah lingkungan.

Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Data penurunan intensitas emisi GRK sampai dengan triwulan II belum tersedia. Adapun data tahun 2023, penurunan intensitas emisi GRK di Kota Depok sebesar -32,37 Ton Co2e/2010 IDR miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa intensitas emisi GRK pada tahun 2023 melebihi baseline intensitas EGRK (BAU) dan lebih banyak emisi CO2 yg dihasilkan per unit output ekonomi. Hal ini menggambarkan masih kurangnya praktik pembangunan rendah karbon yang sudah dijalankan sehingga perlu dilakukan peningkatan yang jg perlu didukung dengan perencanaan dan regulasi yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan.

2.3. Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Penjabaran Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Kota Depok Tahun 2021-2026 terdiri dari 6 (enam) tujuan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja tujuan. Data capaian kinerja tujuan sampai pada triwulan II tahun 2023 belum tersedia karena pengukuran akan dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2023. Adapun capaian kinerja tujuan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut ini.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Tujuan Kota Depok Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Tujuan 1 Terwujudnya Infrastruktur Fisik dan Digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan				
1.	**Indeks kota layak huni**	65,4	67,7	**Meningkat**
Tujuan 2. Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien				
2.	**Indeks Reformasi Birokrasi**	64.78	82,14	**Meningkat**
Tujuan 3. Membangun masyarakat Kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga				
3.	**Persentase Pemajuan Kebudayaan**	28%	20%	**Menurun**
4.	**Indeks Pendidikan**	76,89	77,38	**Meningkat**
5.	**Indeks Konflik Sosial**	1,74	1,50	**Menurun**
6.	**Indeks Pembangunan Keluarga**	77.21	85,51	**Meningkat**
Tujuan 4.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri				
7.	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	5.24	5,05	**Menurun**
8.	**Gini Rasio**	0,394	0,402	**Meningkat**
Tujuan 4.2 Terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing				
9.	**Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok**	32%	34%	**Meningkat**
Tujuan 5 Membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib				
10.	**Indeks Kesehatan**	84,49	85,43	**Meningkat**
11.	**Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum**	74.67	76,55	**Meningkat**

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2023 (diolah)

2.3.1 Tujuan Misi Ke- I

Tujuan yang ingin dicapai pada misi Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur fisik dan digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks kota layak huni.

Target Indeks Kota Layak Huni pada tahun 2024 adalah 65 poin, sampai dengan Triwulan II tahun 2024 belum ada data karena pengukuran akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Sedangkan nilai indeks kota layak huni pada Tahun 2023 adalah 67,7 poin dengan tingkat Kota Layak Huni : Cukup Layak. Jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2023 maka capaian kinerja IKLH adalah 105.68% dari target sebesar 64 poin, dengan predikat kinerja SANGAT TINGGI.

Pada metode pengukuran terdapat perubahan kriteria dan jumlah pertanyaan indeks Kota layak Huni Tahun 2022 dan 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Perubahan Kriteria dan Jumlah Pertanyaan Indeks Kota Layak Huni

No.	Kriteria	Jumlah Pertanyaan		Keterangan
		2022	2023	
1	Politik Kota	2	2	Tidak ada perubahan
2	Kesehatan	2	6	Dirinci berdasarkan jenis fasilitas kesehatan
3	Fasilitas administrasi Pemerintah & Pelayanan Publik	1	4	Dirinci layanan offline & online
4	Jaringan Telekomunikasi	2	3	Ditambah wifi publik
5	Energi*	1	4	2020 kelistrikan ditambah BBM dan Gas
6	Keselamatan Kota	2	3	Ditambah rasa aman dari bencana alam dan wabah penyakit
7	Sektor Informal	2	2	Tidak ada perubahan
8	Ketahanan Pangan*	2	3	Ditambah kemudahan mendapatkan sembako
9	Informasi Pembangunan & Partisipasi Masyarakat	2	2	Tidak ada perubahan
10	Fasilitas Pendidikan	2	6	Ditambahkan berdasarkan tingkatan sekolah
11	Fasilitas Peribadatan	1	2	Ditambah kualitas pelayanan peribadatan/keagamaan
12	Fasiltas Taman Kota	2	4	Ditambahkan alun-alun
13	Fasilitas Olahraga	1	2	Ditambah kualitas fasilitas
14	Fasilitas Pejalan Kaki	1	2	Ditambah kualitas fasilitas
15	Pengelolaan Air Bersih	1	3	Ditambahkan kemudahan dan pasokan
16	Penataan Kota	2	3	Ditambahkan pemanfaatan dan penggunaan tanah
17	Keamanan Kota	3	4	Ditambahkan kualitas pelayanan keamanan
18	Kebersihan Kota	4	3	Persampahan menjadi kriteria sendiri
19	Persampahan	0	2	jumlah TPS dan kualitas pelayanan persampahan
20	Perekonomian Kota	4	5	Ditambah sentra UMKM
21	Fasilitas Kesenian & Budaya	2	3	Ditambah kualitas fasilitas
22	Fasilitas Rekreasi & Wisata	2	2	Tidak ada perubahan
23	Transportasi	4	5	Ditambah Ketersediaan infrastuktur transportasi (jalan, jembatan, dll)
24	Jaringan Drainase	1	2	Ditambah kualitas fasilitas
25	Fasilitas Kelompok Rentan	1	2	ditambahkan untuk jompo
26	Perumahan	3	2	pemanfaatan dan penggunaan tanah dipindah ke penataan kota
	Total	50	81	Penambahan 31 Pertanyaan/Isian

Perbandingan Hasil Indeks Kota Layak Huni 2022 dan 2023 :

Nilai indeks layak huni untuk Kota Depok pada tahun 2022 sebesar 65.4.

Nilai rataan tertinggi :

- Kriteria fasilitas peribadatan dengan nilai sebesar 4.07;
- Kriteria pengelolaan air bersih sebesar 3.87;
- Kriteria ketercukupan pangan sebesar 3.81.

Nilai rataan rendah :

Nilai indeks layak huni untuk Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 67.7 **meningkat 2.3**

Nilai rataan tertinggi :

- Kriteria Fasilitas peribadatan dengan nilai sebesar 3.73;
- Kriteria ketahanan pangan sebesar 3.71;
- Kriteria Kesehatan dengan nilai rataan sebesar 3.68.

Nilai rataan rendah :

- Kriteria keselamatan kota dengan nilai 2.86;
- Kriteria sektor informal sebesar 2,84;
- Kriteria transportasi sebesar 2.84.

Besaran Gap kepentingan dan Kinerja :

Nilai gap (perbedaan) antara kepentingan dan kinerja minimal 13 – 38 atau selisih 25 basis poin



- Kriteria transportasi dengan nilai 3.09;
- Kriteria persampahan sebesar 3.10;
- Kriteria jaringan drainase sebesar 3.11.

Besaran Gap kepentingan dan Kinerja:
Nilai gap (perbedaan) antara kepentingan dan kinerja minimal 9–30 atau selisih 21 basis poin **berkurang 4 poin**

Hasil Pengukuran Indeks Kota Layak Huni Kota Depok adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pengukuran Indeks Kota Layak Huni Tahun 2023

No	Kriteria	Rataan	Ket.
1	Politik Kota	3.55	Layak
2	Kesehatan	3.68	Layak
3	Fasilitas administrasi pemerintah dan pelayanan publik	3.56	Layak
4	Jaringan Telekomunikasi	3.57	Layak
5	Energi	3.59	Layak
6	Keselamatan Kota	3.42	Layak
7	Sektor informal	3.25	Cukup Layak
8	Ketahanan Pangan	3.71	Layak
9	Informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat	3.43	Layak
10	Fasilitas Pendidikan	3.38	Cukup Layak
11	Fasilitas Peribadatan/Pelayanan Keagamaan	3.73	Layak
12	Fasilitas Taman Kota	3.39	Cukup Layak
13	Fasilitas Olahraga	3.32	Cukup Laya
14	Fasilitas Pejalan kaki	3.27	Cukup Layak
15	Pengelolaan Air Bersih	3.54	Layak
16	Penataan Kota	3.24	Cukup Layak
17	Keamanan Kota	3.2	Cukup Layak
18	Kebersihan Kota	3.15	Cukup Layak
19	Persampahan	3.1	Cukup Layak
20	Perekonomian Kota	3.32	Cukup Layak
21	Fasilitas Kesenian dan Budaya	3.3	Cukup Layak
22	Fasilitas Rekreasi dan Wisata	3.31	Cukup Layak
23	Transportasi	3.09	Cukup Layak
24	Jaringan Drainase	3.11	Cukup Layak
25	Fasilitas kelompok rentan	3.17	Cukup Layak
26	Perumahan	3.34	Cukup Layak
Rataan Kota Depok		**3.39**	
Indeks Kota Layak Huni Kota Depok		**67.7**	
Tingkat Kelayakhunian		**(Cukup Layak)**	

Bila dibandingkan dengan nilai Indeks Kota Layak Huni pada Tahun 2022 yaitu sebesar 65,4 poin, maka terjadi peningkatan sebesar 2.3 basis poin. Sedangkan bila dibandingkan dengan Indeks Kelayakan Huni pada Tahun 2017 sebesar 61.8 (IAP,2017), maka terjadi peningkatan sebesar 5.9 basis poin.

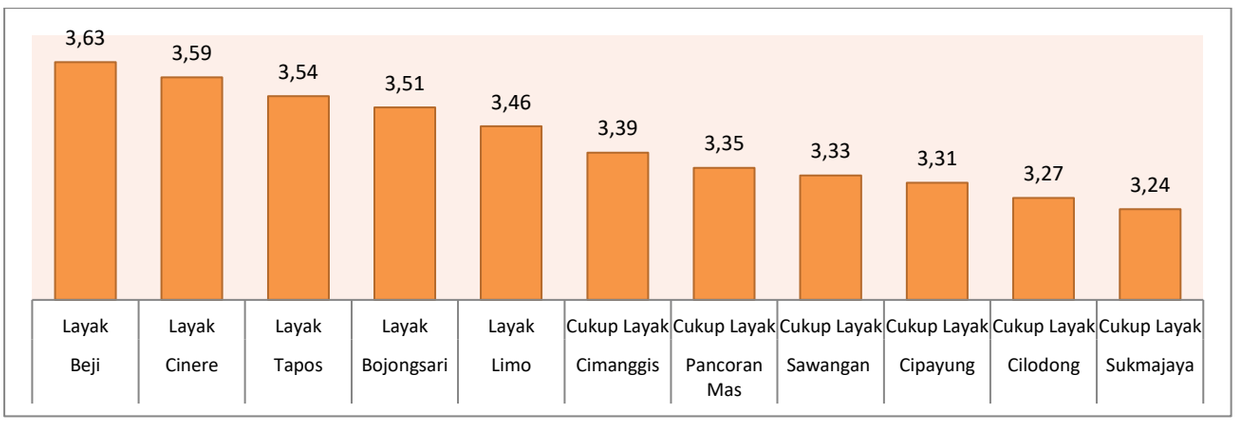
Gambar 2.1 Indeks Layak Huni Kota Depok Tahun 2017, 2022 dan 2023



Sumber : Disrumkim Kota Depok, 2023

Pengukuran Indeks Kota Layak Huni per Kecamatan Tahun 2023, sebagai berikut :

Gambar 2.2 Indeks Layak Huni Kota Depok Menurut Kecamatan Tahun 2023



Sumber : Disrumkim Kota Depok, 2023

Indeks Kota Layak Huni Kecamatan di Kota Depok termasuk pada kategori cukup layak dan layak dengan **nilai rataan mulai 3.24 sampai 3.63 atau indeks 64.9 – 72.6.**

Berdasarkan *Importance Performance Analisis* (IPA), strategi yang direkomendasikan dalam rangka peningkatan kelayakhunian Kota Depok Tahun 2024, sebagai berikut :

1) **Strategi Kriteria Utama yang harus ditingkatkan *(Primary Area to Improve)* :**

- Kuadran ini adalah wilayah yang memuat kriteria-kriteria yang dianggap penting oleh masyarakat, tetapi belum sesuai seperti yang diharapkan (tingkat kepuasan yang diperoleh masih rendah).
- Terdapat 9 (sembilan) **kriteria** yang termasuk pada kuadran ini yaitu: ***Perekonomian Kota, Keamanan Kota, Kebersihan Kota, Persampahan, Transportasi, Jaringan Drainase, Penataan Kota, Fasilitas Pejalan Kaki, dan Perumahan.***

2) **Strategi Kriteria yang Harus dipertahankan (*Primary Area to Maintain)***

- Kuadran ini adalah wilayah yang memuat kriteria yang dianggap penting dan sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat (tingkat kepuasannya relatif lebih tinggi). Kriteria yang termasuk dalam kudran ini harus tetap dipertahankan.

- Terdapat 8 (delapan) **kriteria** yang termasuk kuadran ini yaitu: ***Fasilitas Peribadatan, Ketahanan Pangan, Kesehatan, Energi, Jaringan Telekomunikasi, Pengelolaan Air Bersih, Keselamatan Kota Dan Fasilitas Pendidikan.***

3) **Strategi Kriteria yang Harus ditingkatkan (*Secondary Area to Improve)***

- Kuadran ini adalah wilayah yang memuat kriteria yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan pada kenyataannya kinerja tidak terlalu istimewa.
- Terdapat 5 (lima) **kriteria** yang termasuk kuadran ini yaitu: ***Sektor Informal, Fasilitas Kesenian dan Budaya, Fasilitas Rekreasi, Fasilitas Olahraga dan Fasilitas Kelompok Rentan.***

4) *Potential Advantages*

- Kuadran ini adalah wilayah yang memuat kriteria-kriteria yang dianggap sudah cukup penting oleh masyarakat dan dirasakan telah mendekati kepentingan.
- Terdapat 4 (empat) kriteria yang termasuk kuadran ini yaitu : **Politik Kota, Fasilitas Taman Kota, Informasi Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat, Fasilitas Administrasi Dan Pelayanan Publik.**

Rekomendasi

1) Untuk meningkatkan nilai Indeks Layak Huni Kota Depok diperlukan:
   a. Peningkatan pada program intervensi berbasis pada kriteria di kelompok prioritas I dan kemudian prioritas II;
   b. Mempertahankan program pada kelompok prioirtas III.
2) Diperlukan kajian mendalam pada masing-masing kriteria, khususnya:
   a. Persampahan;
   b. Transportasi dan moda transportasi;
   c. Drainase.
3) Perlu dilakukan sampling berbasis detail deomografi, khususnya:
   a. Kelurahan;
   b. Keterwakilan Isu-isu kemasyarakatan.

Kajian berikutnya dapat dilakukan dengan mengintegrasikan data sekunder ketersediaan infrastruktur.

2.3.2 Tujuan Misi Ke- II

Tujuan yang ingin dicapai pada misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Modern dan Partisipatif adalah terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi dengan *Roadmap* Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada tahun 2023 telah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 77 Tahun 2022 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023–2026. Perubahan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kota Depok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 060/242/Kpts/Org/Huk/2023 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah daerah Kota Depok Tahun 2023-2024.

Tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok tahun 2023-2024 mengacu kepada tujuan dan sasaran reformasi birokrasi nasional tahun 2023-2024, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Tujuan Dan Sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2023-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI NASIONAL		
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:				
		Opini BPK	WTP	100%	100%	100%
		Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%
		Indeks BerAKHLAK	67,142	100%	100%	100%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

Sumber : Bagian Organisasi, Setda Kota Depok

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023-2024, terdiri dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik. Target Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 64,9 poin, adapun data sampai Triwulan II belum tersedia.

Predikat yang diperoleh Kota Depok untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan nilai 82,14 poin adalah **A- Memuaskan dengan Catatan.** Hasil evaluasi reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023 oleh Kementerian PANRB disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023

No	Keterangan	Skor
1.	RB General	67,76
2.	RB Tematik	14,38
3.	Total Nilai	82,14
4.	Total Bobot RB General	100

No	Keterangan	Skor
5.	Bobot RB General Penyesuaian	100
6.	RB General Penyesuaian	67,76
7.	Indeks RB	82,14

Sumber : Sistem Informasi Lembar Kerja Evaluasi RB, Kementerian RB

Jika dibandingkan dengan target Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 sebesar 64,4 poin, maka capaian target Indeks Reformasi Birokrasi berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian PAN & RB sebesar 82,14 poin adalah 127,55%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2022 sebesar 64,78 poin, maka naik sebesar 17,36 poin. Namun tidak dapat dibandingkan karena berbeda komponen penilaiannya.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2021-2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
A.	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20.00	9.71	10.37
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10.00	5.64	7.02
	III. Reform	30.00	16.54	16.96
B.	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10.00	7.74	7.70
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8.10	8.20
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	8.03	8.20
4.	Kinerja Organisasi	10.00	7.37	6.31
Total Komponen Hasil		40.00	31.24	30.41
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100.00	63.13	64.78

Sumber : Pemerintah Propinsi Jawa Barat

2.3.3 Tujuan Misi Ke-III

Tujuan yang ingin dicapai pada misi Mewujudkan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan dan Ketahanan Keluarga adalah membangun masyarakat Kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga yang dapat dilihat atau diukur dari Capaian Persentase Pemajuan Kebudayaan, Indeks Pendidikan; Indeks Konflik Sosial; dan Indeks Pembangunan Keluarga.

1) Persentase Pemajuan Kebudayaan

Target Persentase Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2024 sebesar 20%, sampai dengan triwulan II tahun 2024 ini data capaian belum tersedia. Sedangkan capaian pada tahun 2023 adalah 20%, atau 105,26% dari target sebesar 19%. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi

budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Objek pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan, antara lain :

a. Tradisi lisan;
b. Manuskrip;
c. Adat istiadat;
d. Ritus;
e. Pengetahuan tradisional;
f. Teknologi tradisional;
g. Seni;
h. Bahasa;
i. Permainan rakyat; dan
j. Olahraga tradsional

Pengukuran persentase pemajuan kebudayaan tahun 2023 dilakukan melalui 2 jenis pemajuan kebudayaan, yaitu: seni (seni tari, seni musik dan seni rupa) dan tradisi lisan.

1. Seni
   a. seni tari yang dikembangkan yaitu tarian topeng cisalak. Topeng cisalak adalah kesenian teater khas betawi yang berasal dari Kampung Cisalak, Kota Depok. Tari Topeng Cisalak diciptakan oleh dua pelopor seni yaitu Djioen dan Mak Kinang. Dalam pementasannya, tari ini memiliki banyak gerakan dengan penggabungan antara tangan, kaki dan pinggul.
   b. seni musik yang dikembangkan oleh Tamude (Taman Musik Depok) meliputi pelatihan vokal, gitar, biola dan drum.
   c. seni rupa, bentuk pengembangan dengan melakukan workshop yg difasilitasi oleh Disporyata dengan melibatkan penggiat seni rupa sebagai narasumber. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah khasanah/pengetahuan teknis melukis dari Jepang.

2. Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah pesan atau kesaksian yang disampaikan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa contoh tradisi lisan yang sering digunakan antara lain:

a. Jangan duduk didepan pintu nanti garung.
b. Nyapu yang bersih biar kalau punya laki nggak berewokan.
c. Jangan duduk diatas meja nanti banyak hutang.

Salah satu bentuk pengembangan/pelestarian tradisi lisan ini adalah penyelenggaraan Lomba Berbalas Pantun Tingkat Kota dalam rangka HUT KORPRI Kota Depok yang diselenggarakan Disporyata Kota Depok.

2) Indeks Pendidikan

Target Indeks Pendidikan tahun 2024 sebesar 77,82 poin, sampai dengan Triwulan II tahun 2024 data capaian belum tersedia dari BPS. Sedangkan Target Indeks Pendidikan tahun 2023 sebesar 77,35 poin,

adapun realisasinya sebesar 77,38 poin, sehingga tingkat capaiannya 100,4%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 76,89 poin, Indeks pendidikan tahun 2023 meningkat 0,49 poin.

Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua angka tersebut merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah. Indeks pendidikan juga menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi indeks pendidikan suatu daerah, maka akan menaikkan nilai IPM daerah tersebut.

Indeks pendidikan pada tahun 2022 adalah 76,89 poin, atau 100% dari target sebesar 76,89 poin. Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua angka tersebut merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah. Indeks pendidikan juga menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi indeks pendidikan suatu daerah, maka akan menaikkan nilai IPM daerah tersebut.

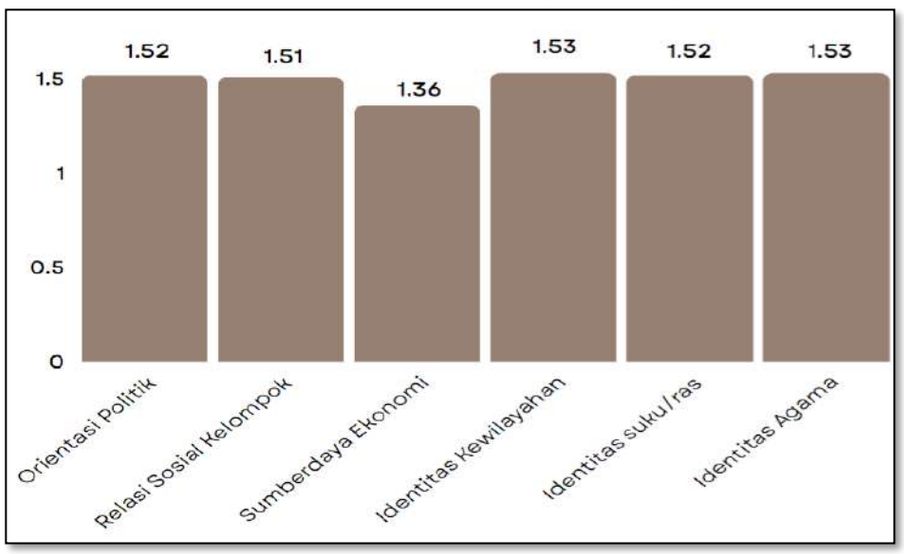
3) Indeks Konflik Sosial

Target Indeks Konflik Sosial pada tahun 2024 sebesar 1,6 poin, sampai Triwulan II ini data capaian belum tersedia dikarenakan survey akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024. Sedangkan Indeks Konflik Sosial pada Tahun 2023 adalah 1,50 poin, atau 107% dari target sebesar 1,66 poin, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

Pengukuran Indeks Konflik Sosial pada Tahun 2023 dilakukan melalui survey oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok bekerja sama dengan *LKP3 UI*.

Tinjauan setiap aspek Indeks Konflik Sosial Kota Depok Tahun 2023 tergambar pada grafik sebagai berikut ini.

Gambar 2.3 Indeks Konflik Sosial Kota Depok per Aspek Tahun 2023



Sumber : Laporan Potensi Konflik Sosial 2023, Bakesbangpol

Berdasarkan grafik diatas, lima aspek penyusun Indeks Konflik Sosial (Orientasi Politik, Relasi Sosial Kelompok, Identitas Kewilayahan, Identitas Suku/Ras, dan Identitas Agama) termasuk dalam kategori Cenderung Aman, dengan satu aspek, yakni Sumberdaya Ekonomi berada pada kondisi relatif aman karena berada pada skor dibawah 1,50 (1,36). Meski demikian, yang perlu diperhatikan ialah aspek Kewilayahan

dan aspek identitas agama yang memiliki skor paling tinggi dalam penyusun Indeks Konflik Sosial, yakni sebesar 1,53 yang termasuk ke dalam kategori Cenderung Aman (indikasi potensi konflik cenderung kecil).

Tinjauan Indeks Konflik Sosial Kota Depok Tahun 2023 berdasarkan Kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

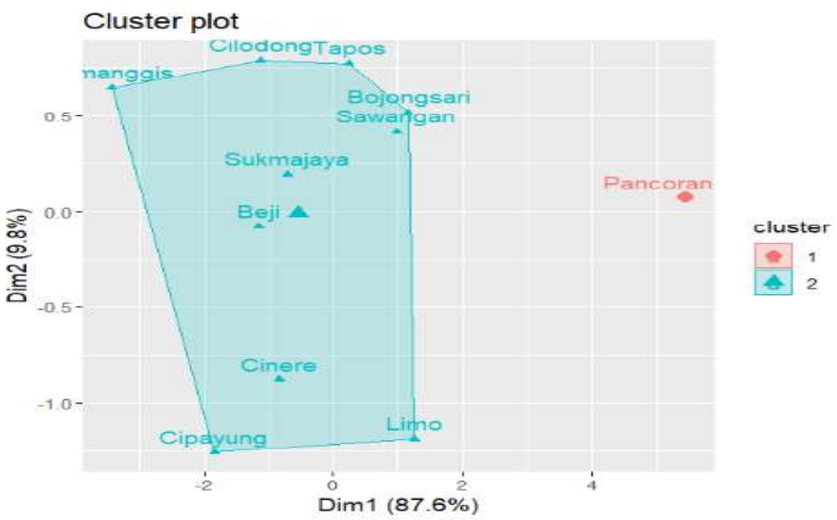
Tabel 2.7 Indeks Konflik Sosial Kota Depok Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Orientasi Politik	Relasi	Sumber daya Ekonomi	Identitas Kewilayahan	Identitas suku/ras	Identitas Agama/ kepercayaan	Indeks Konflik Sosial
Beji	1.49	1.42	1.2	1.44	1.44	1.46	1.41
Bojongsari	1.57	1.57	1.57	1.59	1.59	1.59	1.58
Cilodong	1.48	1.45	1.41	1.4	1.43	1.43	1.43
Cimanggis	1.22	1.32	1.17	1.31	1.29	1.29	1.27
Cinere	1.57	1.41	1.04	1.48	1.47	1.49	1.41
Cipayung	1.37	1.28	0.91	1.51	1.47	1.47	1.33
Limo	1.62	1.64	1.1	1.63	1.63	1.63	1.54
Pancoran Mas	1.9	1.88	1.83	1.86	1.86	1.87	1.87
Sawangan	1.58	1.6	1.51	1.59	1.57	1.55	1.57
Sukmajaya	1.47	1.44	1.32	1.48	1.48	1.49	1.45
Tapos	1.51	1.54	1.54	1.53	1.52	1.52	1.52
Depok	1.52	1.51	1.36	1.53	1.52	1.53	1.5

Sumber : Laporan Potensi Konflik Sosial 2023, Bakesbangpol

Dalam mengeksplorasi Indeks Potensi Konflik Sosial di 11 (sebelas) Kecamatan, analisis klaster dari 6 (enam) dimensi yang berbeda menjadi pemandu utama. Hal ini memungkinkan pemahaman mendalam mengenai dinamika kecenderungan sosial masing-masing wilayah dan elemen-elemen krusial yang memengaruhi tingkat potensi konflik di setiap kecamatan.

Gambar 2.4 Peta Persebaran Klaster Indeks Potensi Konflik Sosial



Sumber : Laporan Potensi Konflik Sosial 2023, Bakesbangpol

Berdasarkan hasil analisis klaster, dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) klaster yang membentuk kelompok dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- Klaster 1, yang terdiri dari Beji, Cinere, Cipayung, Limo, Cimanggis, Sawangan, Bojongsari, dan Sukmajaya, memiliki nilai yang relatif tinggi pada setiap dimensi. Orientasi Politik, Relasi Sosial

Kelompok, Sumberdaya Ekonomi, Identitas Kewilayahan, Identitas Suku/Ras, dan Identitas Agama/Kepercayaan memiliki nilai di atas rata-rata, menunjukkan tingkat kontribusi yang signifikan dari masing-masing dimensi terhadap klaster ini.

- Sementara itu, Klaster 2, yang hanya terdiri dari Pancoran Mas, memiliki nilai yang cenderung lebih rendah pada setiap dimensi. Meskipun demikian, nilai klaster ini masih cukup bervariasi, menunjukkan adanya perbedaan karakteristik didalamnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara klaster 1 dan klaster 2 dalam hal orientasi politik, relasi sosial kelompok, sumberdaya ekonomi, identitas kewilayahan, identitas suku/ras, dan identitas agama/kepercayaan. Analisis klaster ini dapat menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan karakteristik masing- masing klaster guna meningkatkan keseimbangan dan mengurangi potensi konflik sosial.

Selanjutnya Pemerintah Kota Depok dapat mendorong keberlanjutan peningkatan orientasi politik dan relasi sosial kelompok sebagai faktor kunci dalam menanggulangi potensi konflik. Kemudian Pemerintah Daerah dapat menjaga perubahan positif pada dimensi sumberdaya ekonomi untuk terus mendukung penurunan potensi konflik. Selain itu Fokus pada pengelolaan identitas agama/kepercayaan, identitas suku/ras, dan relasi sosial kelompok sebagai upaya pencegahan potensi konflik di masa mendatang. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan Kota Depok dapat mempertahankan status "Relatif Aman" dan terus bergerak menuju masyarakat yang lebih harmonis dan berdaya.

4) Indeks Pembangunan Keluarga

Target Indeks Pembangunan Keluarga pada tahun 2024 sebesar 64,2 poin. Sampai triwulan II tahun ini, data capaian belum tersedia karena pengukuran melalui survey dijadwalkan pada triwulan ke IV tahun 2024. Adapun IPK Kota Depok tahun 2023 sebesar 85,51 poin, atau 136,95% dari target tahun 2023 sebesar 66,4 poin, dengan predikat kinerja SANGAT TINGGI. Angka ini meningkat 8.30 poin dari Tahun 2022 yaitu 77,21 poin meliputi dimensi ketentraman dengan skor 92,54 poin (meningkat dari sebelumnya 71,62 poin); dimensi kemandirian dengan skor 77,06 poin (meningkat dari sebelumnya 75,98 poin); dan dimensi kebahagiaan dengan skor 89,77 poin (menurun dari sebelumnya 91.97 poin). Hasil analisis reliabilitas menunjukkan, kemajuan dibandingkan dengan hasil tahun sebelumnya, dengan instrumen iBANGGA yang memiliki nilai konsistensi keterandalan yang memenuhi kriteria yaitu 0,631. Perbaikan sensitivitas dan spesifisitas indikator masih diperlukan untuk meningkatkan reliabilitasnya.

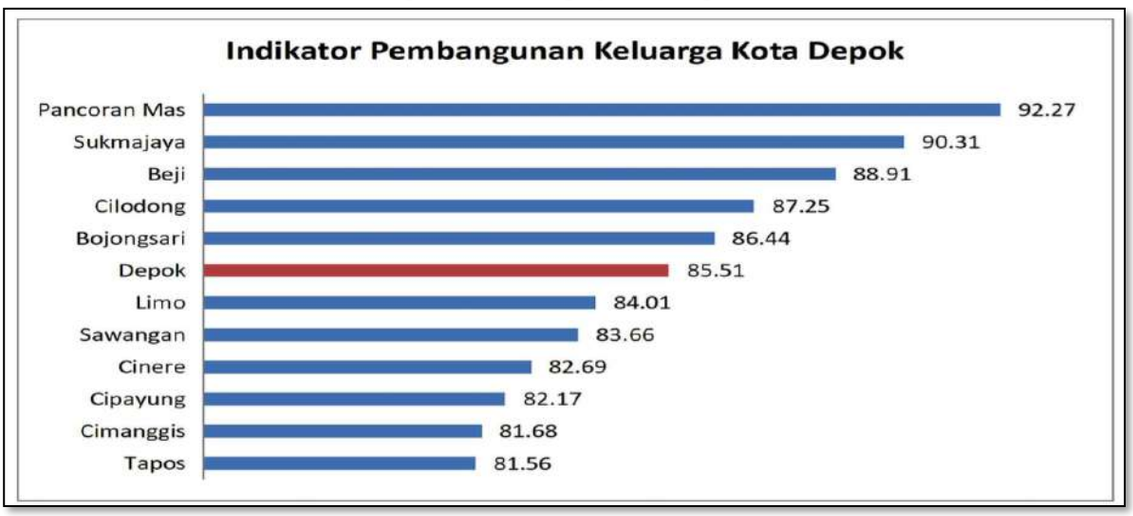
Indikator Pembangunan Keluarga di Kota Depok disajikan pada Gambar berikut. Hasil analisis menunjukkan rata-rata IPK sebesar 85,51 atau terkategori tangguh, dengan skor terendahnya pada dimensi kemandirian.

Gambar 2.5 Indikator Pembangunan Keluarga Kota Depok Tahun 2023



Sumber : Laporan IPK IKK Depok, 2023

Gambar 2.6 Indikator Pembangunan Keluarga pada Tingkat Kecamatan dan Kota Depok



Sumber : Laporan IPK IKK Depok, 2023

Gambar tersebut menunjukkan bahwa IPK di 11 (sebelas) Kecamatan Kota Depok memiliki kisaran yang lebar dari 81,56 (Kecamatan Tapos) sampai 92,27 (Kecamatan Pancoran Mas), yang berarti setiap kecamatan telah terkategori tangguh. Seluruh kecamatan telah terkategori tangguh dan mencapai skor di atas 80 serta terdapat 2 (dua) Kecamatan yang memperoleh skor di atas 90 yaitu Kecamatan Pancoran Mas dan Sukmajaya. Namun demikian pada setiap Kecamatan, masih terdapat nilai skor minimal yang rendah.

IPK dikategorikan menurut keluarga rentan (skor<40), keluarga berkembang (skor 40- 70) dan keluarga tangguh (skor >70) sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8 Keluarga Menurut Kategori dan Dimensi IPK (%)

Dimensi	Rentan (>40.00)	Berkembang (40.00-70.00)	Tangguh (>70.00)
Ketentraman	0,5	9,5	90,0
Kemandirian	3,8	19,7	76,5
Kebahagiaan	1,3	4,6	94,1
Pembangunan Keluarga	0,3	8,2	91,6

Sumber : Laporan IPK IKK Depok, 2023

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar keluarga sudah berada pada kategori tangguh yaitu sebesar 91,6 persen meskipun masih ada yang tergolong rentan yaitu sebesar 0,3 persen. Dimensi kemandirian memiliki persentase golongan tangguh terkecil (76,5%) dan memiliki persentase rentan terbesar (3,8%) dibanding dengan dimensi lainnya.

2.3.4 Tujuan Misi Ke- IV

Terdapat 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai pada misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing, yaitu :

Tujuan 4.1 : Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri

Tujuan 4.2 : Terciptanya masyarakat yang mandiri dan berdaya saing

Tujuan Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri yang dapat dilihat atau diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Gini Rasio. Sedangkan tujuan Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing dapat dilihat atau diukur dari Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok.

Capaian indikator kinerja tujuan misi ke IV sebagai berikut :

1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Target laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah 6,37%, adapun sampai dengan triwulan II tahun 2024 update LPE Kota Depok belum tersedia. Sedangkan LPE pada tahun 2023 sebesar 5,05%, atau 84,73% dari target sebesar 5,96% dengan predikat kinerja Tinggi.

LPE merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Dengan diketahuinya LPE suatu daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun strategi dan kebijakan yang tepat bagi daerahnya. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil mampu menjadi sebuah daerah yang maju. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

Rumus sederhana yang digunakan untuk menghitung Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah:

$$R = (PDBrt – PDBrt\text{-}1)/PDBt\text{-}1 \times 100\%$$

Keterangan:

R = laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen (%)

PDBrt = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun tertentu

PDBt-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan daerah riil) pada tahun sebelumnya

Perekonomian Kota Depok Tahun 2023 sebesar 5.05%, sedikit melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,24%. Melambatnya kinerja perekonomian tersebut dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Transportasi dan Pergudangan dari 10,52% pada tahun 2022 menjadi 5,62% pada tahun 2023. Hal ini dipengaruhi kembali normalnya jumlah penumpang komuter line pada tahun 2023 dimana tahun sebelumnya terjadi lonjakan jumlah penumpang komuter line akibat dihapuskannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pasca Pandemi Covid-19.

2) Rasio Gini

Target Rasio Gini pada tahun 2024 sebesar 0,392 poin, sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum ada angka terbaru dari BPS. Sedangkan Rasio Gini tahun 2023 sebesar 0,402 poin atau 98% dari target sebesar 0,393 poin dengan predikat kinerja Sangat Tinggi Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 0,394, realisasi rasio gini tahun 2023 meningkat 0,009 poin. Peningkatan rasio gini tersebut mengindikasikan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat semakin timpang meskipun masih termasuk kategori ketimpangan sedang. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan terus dilakukan dengan serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu, memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha.

3) Persentase Pembangunan Pemuda

Target persentase pembangunan pemuda pada tahun 2024 sebesar 36%. Data capaian sampai dengan triwulan II belum tersedia. Sedangkan Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV sebesar 34%, atau 100% dari target sebesar 34%, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Perhitungan realisasi kinerja Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok, sebagai berikut:

I. partisipasi aktif bidang kepemudaan :

(Kel + OPD + Pramuka + OKP) = 2.765

Target: 10.000

Bidang kepemudaan: 2.188 / 10.000 X100%

= 27,65%

II. Partisipasi aktif bidang olahraga= 195 / 500 X 100%= 39,5%

III. Partisipasi aktif bidang kebudayaan= 177 / 500 X 100% = 35,40%

Realisasi persentase pembangunan kepemudaan = (27,65%+ 39% + 35,40%) / 3 = 34%

Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok meningkat sebesar 2% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 32%. Berikut sandingan capaian kinerja antara 2022 dan 2023.

Tabel 2.9 Capaian Indikator Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok Tahun 2022-2023

No	Uraian	2022	2023
1	Partisipasi aktif bidang kepemudaan	29.59%	27.65%
2	Partisipasi aktif bidang olahraga	32.40%	39.5%
3	Parstisipasi aktif bidang kebudayaan	34.00%	35.40%
4	Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok	32.00%	34.18%

Sumber : Disporyata Kota Depok, 2024

2.3.5 Tujuan Misi ke V

Tujuan yang ingin dicapai pada misi Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman adalah Membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib yang dapat dilihat atau diukur dari Indeks Kesehatan Daerah dan Indeks Ketentraman dan Ketertiban.

1) Indeks Kesehatan

Target Indeks Kesehatan pada tahun 2024 sebesar 84,58 poin. Data capaian sampai dengan triwulan II belum tersedia. Sedangkan Indeks Kesehatan tahun 2023 adalah 85,43 poin, atau 109% dari target sebesar 84,34 poin, dengan predikat kinerja Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

2) Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Target Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2024 sebesar 76 poin. Data capaian sampai dengan triwulan II belum tersedia. Sedangkan Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2023 adalah 76,55 poin, atau 101,62% dari target sebesar 75,33 poin, dengan predikat kinerja SANGAT TINGGI. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan Indeks Ketentraman dan Ketertiban pada tahun 2022 yaitu 74,67 poin, atau 100% dari target sebesar 74,67 poin.

Pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pengukuran ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan logika deduktif untuk menguji teori (Bryman, 2012; Neuman, 2014). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan dari dimensi strategi, sumber daya manusia, dan teknis dengan Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), sebagai berikut :

a. Strategi (19,80%) : - Penegakan Perda
   - Penyelenggaraan Trantibum
b. Sumber Daya Manusia (49%) : - Pemberdayaan SDM
   - Peningkatan Kapasitas SDM
c. Sistem (31,20%) : - Sarana dan Prasarana
   - Perencanaan dan Anggaran
   - Akuntabilitas

Hasil perhitungan skor tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10 Dimensi dan Skor Penilaian Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

No	Dimensi	Skor
1	Strategi	14,822942
2	SDM	32,65
3	Sistem	29,079995
	Total Skor	**76,55**

Sumber : Laporan IPKKU 2023, Satpol PP

Dengan memperhatikan pentingnya cakupan informasi dalam rekomendasi sebagai fondasi pelaksanaan reformasi birokrasi, maka dibuatlah pedoman dan rekomendasi dengan harapan dapat mempermudah Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan reformasi birokrasi dibidang Tibumtranmas sesuai dengan karakteristik Kota Depok. Dalam melaksanakan perubahan reformasi birokrasi untuk tahun mendatang guna mencapai tujuan dan sasaran reformasi birokrasi serta pelayanan tertib umum dan ketenteraman masyarakat, Fokus Pemerintah Kota Depok diarahkan pada:

a) Strategi Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Timbutranmas

- Pada aspek penegakan Perda dapat ditingkatan melalui pembinaan dan sosialisasi terhadap produk hukum daerah yang berkaitan dengan Tibumtranmas, kepada stakeholder masyarakat, pelaku usaha, dan publikasi media guna mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Tibumtranmas di Kota Depok;
- Mengevaluasi produk hukum daerah, sehingga tepat guna, tepat sasaran serta memberikan dorongan percepatan *Sosial Engineering* Tibumtranmas di Kota Depok.

b) Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan SDM, dan Peningkatan Kapasitas SDM

- Pada aspek pemberdayaan SDM dapat dilakukan melalui *Assesment* terhadap seluruh pegawai, sebagai salah satu materi untuk menyusun profiling pegawai;
- Membuat konsep sistem pola karier, berdasarkan karakteristik daerah;
- Meningkatkan kualitas pegawai melalui pembinaan terhadap peraturan dibidang Tibumtranmas;
- Meningkatkan kapasitas terhadap jabatan struktural dan fungsional melalui diklat yang berkenaan dengan standar pelayanan prima pada pelaksanaan tugas dan fungsi Tibumtranmas kepada masyarakat guna menanamkan citra positif lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik;

- Promosi dan mutasi yang didasarkan pada kompetensi dan kinerja. **c) Sistem Sarana Prasarana, Perencanaan dan Anggaran, dan Akuntabilitas**
    - Pada aspek sarana dan prasarana, melakukan pemenuhan standar Sarana Prasarana minimal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Saran dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
    - Penataan dan penguatan organisasi di fokuskan pada penataan kelembagaan SATPOL PP sebagai perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dengan berlandaskan pada urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Penguatan dan peningkatan kapasitas organisasi secara struktur dan sdm diputuskan dengan memperhatikan kebutuhan riil di lapangan, serta disesuaikan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja personil yang ada.
    - Penguatan Kapasitas Anggaran untuk meningkatkan tugas fungsi berdasarkan kewenangan Daerah serta memenuhi standar Capaian terhadap kondisi Tibumtranmas di Kota Depok.

- Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui program peningkatan kapasitas pegawai.

Meningkatkan kualitas dokumentasi sebagai materi penyusunan laporan kinerja.

2.4. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD dilakukan untuk memastikan bahwa RKPD telah dijadikan sebagai dasar penyusunan APBD. Berdasarkan data dan informasi dari dokumen yang tersedia dan telah dilakukan konfirmasi dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Berikut diuraikan perbandingan jumlah dan pagu program, kegiatan dan subkegiatan. Konsistensi antara RKPD dan APBD Kota Depok sampai dengan Triwulan II sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Konsistensi Jumlah Program pada RKPD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024

Berdasarkan data yang telah diolah, diperoleh kesesuaian jumlah program antara RKPD Tahun 2024 dan APBD Tahun 2024 s.d Triwulan II sebagai berikut ini.

Tabel 2.11 Kesesuaian Program antara Dokumen RKPD dan APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program					% Jml Program APBD thd RKPD
		RPJMD	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(4-6)+(5-6)*	*8 (5/4)*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**34**	**35**	**35**	**35**	**0**	**100,00%**
1.01.	**Pendidikan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
1.01.1.06.0.00.01.	Dinas Pendidikan	3	3	3	3	0	100,00%
1.02.	**Kesehatan**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	5	5	5	5	0	100,00%
1.03.	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**10**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	11	11	11	0	100,00%
1.04.	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
1.04.2.10.1.03.30.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	5	5	5	5	0	100,00%
1.05.	**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	2	2	0	100,00%
1.05.0.00.0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3	3	3	3	0	100,00%
1.06.	**Sosial**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	6	6	6	6	0	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program					% Jml Program APBD thd RKPD
		RPJMD	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(4-6)+(5-6)*	*8 (5/4)*
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan**	**69**	**69**	**69**	**69**	**0**	**100,00%**
2.07.	**Tenaga Kerja**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	5	5	5	5	0	100,00%
2.08.	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	**7**	**7**	**7**	**7**	**0**	**100,00%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	7	7	7	7	0	100,00%
2.09.	**Pangan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	4	4	4	4	0	100,00%
2.10.	**Pertanahan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
2.10.1.04.2.10.1.01.01.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1	1	1	1	0	100,00%
2.11.	**Lingkungan Hidup**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**100,00%**
2.11.1.03.0.00.12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	10	10	10	10	0	100,00%
2.12.	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
2.12.0.00.0.00.03.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	5	5	5	0	100,00%
2.14.	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	3	3	3	0	100,00%
2.15.	**Perhubungan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	3	3	3	3	0	100,00%
2.16.	**Komunikasi Dan Informatika**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3	3	3	3	0	100,00%
2.17.	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	**8**	**8**	**8**	**8**	**0**	**100,00%**
2.17.0.00.0.00.17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	8	8	8	8	0	100,00%
2.18.	**Penanaman Modal**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
2.18.0.00.0.00.23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	6	6	0	100,00%
2.19.	**Kepemudaan Dan Olah Raga**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	4	4	4	4	0	100,00%
2.20.	**Statistik**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	1	1	0	100,00%
2.21.	**Persandian**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	1	1	0	100,00%
2.22.	**Kebudayaan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	4	4	4	4	0	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program					% Jml Program APBD thd RKPD
		RPJMD	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(4-6)+(5-6)*	*8 (5/4)*
2.23.	**Perpustakaan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1	1	1	1	0	100,00%
2.24.	**Kearsipan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	3	3	3	3	0	100,00%
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**19**	**19**	**19**	**19**	**0**	**100,00%**
3.25.	**Kelautan Dan Perikanan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	3	3	3	3	0	100,00%
3.26.	**Pariwisata**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	3	3	3	3	0	100,00%
3.27.	**Pertanian**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian DanPerikanan	4	4	4	4	0	100,00%
3.30.	**Perdagangan**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	6	6	6	6	0	100,00%
3.31.	**Perindustrian**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2	2	2	2	0	100,00%
3.32.	**Transmigrasi**	**1**	**1**	**1**	**1**	0	**100,00%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1	1	0	100,00%
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
4.01.	**Sekretariat Daerah**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	0	100,00%
4.02.	**Sekretariat Dprd**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat Dprd	2	2	2	2	0	100,00%
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**11**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
5.01.	**Perencanaan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	3	3	3	3	0	100,00%
5.02.	**Keuangan**	**4**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
5.02.2.16.0.00.05.	Badan Keuangan Daerah	4	4	4	4	0	100,00%
5.03.	**Kepegawaian**	**2**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	2	0	100,00%
5.04.	**Pendidikan Dan Pelatihan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	1	1	0	100,00%
5.05.	**Penelitian Dan Pengembangan**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Program					% Jml Program APBD thd RKPD
		RPJMD	RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7=(4-6)+(5-6)*	*8 (5/4)*
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	1	1	1	1	0	100,00%
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
6.01.	**Inspektorat**	**3**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	0	100,00%
7	**Unsur Kewilayahan**	**44**	**44**	**44**	**44**	**0**	**100,00%**
7.01.	**Kecamatan**						
7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Pancoran Mas	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Cilodong	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Sawangan	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.04.	Kecamatan Cinere	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.05.	Kecamatan Sukmajaya	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.06.	Kecamatan Limo	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Beji	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.08.	Kecamatan Tapos	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.09.	Kecamatan Bojongsari	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.10.	Kecamatan Cimanggis	4	4	4	4	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.11.	Kecamatan Cipayung	4	4	4	4	0	100,00%
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
8.01.	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
8.01.0.00.0.00.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	6	0	100,00%
	Jumlah	**191**	**192**	**192**	**192**	**0**	**100,00%**

Sumber : Bappeda Kota Depok 2024 (diolah)

Dari tabel diatas diperoleh gambaran konsistensi jumlah program antara RKPD dan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

a) Total program dalam RKPD 2024 adalah 192 program (jumlah pada kolom 4). Total program dalam APBD sampai dengan Triwulan II adalah 192 program (jumlah pada kolom 5). Dari jumlah program pada kedua dokumen tersebut 192 program seluruhnya sama-sama dimuat dalam kedua dokumen (jumlah pada kolom 7, tidak sesuai=0).

b) Terdapat selisih antara jumlah Program di RPJMD dengan RKPD 2024 dan APBD 2024. Urusan yang memiliki jumlah program yang tidak sama antara RPJMD dengan RKPD dan APBD yaitu :

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1 (satu) Program di RKPD berbeda nomenklatur dengan RPJMD dikarenakan proses pemutakhiran pada SIPD yaitu Program Pengembangan Permukiman

b. Konsistensi Jumlah Kegiatan

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara jumlah kegiatan antara Dokumen RKPD 2024 dengan APBD Tahun 2024 sampai denganTriwulan II sebagai berikut:

Tabel 2.12 Perbandingan antara Jumlah Kegiatan pada Dokumen RKPD dengan Jumlah Kegiatan pada APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**104**	**104**	**104**	**0**	**100,00%**
1.01.	**Pendidikan**	**13**	**13**	**13**	**0**	**100,00%**
1.01.1.06.0.00.01.	Dinas Pendidikan	13	13	13	0	100,00%
1.02.	**Kesehatan**	**21**	**21**	**21**	**0**	**100,00%**
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	21	21	21	0	100,00%
1.03.	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**22**	**22**	**22**	**0**	**100,00%**
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	22	22	22	0	100,00%
1.04.	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**	**13**	**13**	**13**	**0**	**100,00%**
1.04.2.10.1.03.30.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	13	13	13	0	100,00%
1.05.	**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**21**	**21**	**21**	**0**	**100,00%**
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	9	9	9	0	100,00%
1.05.0.00.0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	12	12	12	0	100,00%
1.06.	**Sosial**	**14**	**14**	**14**	**0**	**100,00%**
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	14	14	14	0	100,00%
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan**	**164**	**165**	**164**	**1**	**100,61%**
2.07.	**Tenaga Kerja**	**15**	**15**	**15**	**0**	**100,00%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	15	15	15	0	100,00%
2.08.	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	**16**	**17**	**16**	**1**	**106,25%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	16	17	16	1	106,25%
2.09.	**Pangan**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	11	11	11	0	100,00%
2.10.	**Pertanahan**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
2.10.1.04.2.10.1.01.01.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1	1	1	0	100,00%
2.11.	**Lingkungan Hidup**	**18**	**18**	**18**	**0**	**100,00%**
2.11.1.03.0.00.12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	18	18	18	0	100,00%
2.12.	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
2.12.0.00.0.00.03.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	11	11	11	0	100,00%
2.14.	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**8**	**8**	**8**	**0**	**100,00%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8	8	8	0	100,00%
2.15.	**Perhubungan**	**17**	**17**	**17**	**0**	**100,00%**
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	17	17	17	0	100,00%
2.16.	**Komunikasi Dan Informatika**	**7**	**7**	**7**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7	7	7	0	100,00%
2.17.	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	**14**	**14**	**14**	**0**	**100,00%**
2.17.0.00.0.00.17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	14	14	14	0	100,00%
2.18.	**Penanaman Modal**	**10**	**10**	**10**	**0**	**100,00%**
2.18.0.00.0.00.23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	10	0	100,00%
2.19.	**Kepemudaan Dan Olah Raga**	**13**	**13**	**13**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	13	13	13	0	100,00%
2.20.	**Statistik**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1	1	1	0	100,00%
2.21.	**Persandian**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2	2	2	0	100,00%
2.22.	**Kebudayaan**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	6	6	6	0	100,00%
2.23.	**Perpustakaan**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2	2	2	0	100,00%
2.24.	**Kearsipan**	**12**	**12**	**12**	**0**	**100,00%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	12	12	12	0	100,00%
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**31**	**31**	**31**	**0**	**100,00%**
3.25.	**Kelautan Dan Perikanan**	**5**	**5**	**5**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	5	5	5	0	100,00%
3.26.	**Pariwisata**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	4	4	4	0	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
3.27.	**Pertanian**	**7**	**7**	**7**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	7	7	7	0	100,00%
3.30.	**Perdagangan**	**12**	**12**	**12**	**0**	**100,00%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	12	12	12	0	100,00%
3.31.	**Perindustrian**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2	2	2	0	100,00%
3.32.	**Transmigrasi**	**1**	**1**	**1**	0	**100,00%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1	0	100,00%
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**31**	**31**	**31**	**0**	**100,00%**
4.01.	**Sekretariat Daerah**	**16**	**16**	**16**	**0**	**100,00%**
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	16	16	16	0	100,00%
4.02.	**Sekretariat DPRD**	**15**	**15**	**15**	**0**	**100,00%**
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	15	15	15	0	100,00%
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**39**	**39**	**39**	**0**	**100,00%**
5.01.	**Perencanaan**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	11	11	11	0	100,00%
5.02.	**Keuangan**	**12**	**12**	**12**	**0**	**100,00%**
5.02.2.16.0.00.05.	Badan Keuangan Daerah	12	12	12	0	100,00%
5.03.	**Kepegawaian**	**10**	**10**	**10**	**0**	**100,00%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10	10	10	0	100,00%
5.04.	**Pendidikan Dan Pelatihan**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	0	100,00%
5.05.	**Penelitian Dan Pengembangan**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	4	4	4	0	100,00%
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**9**	**9**	**9**	**0**	**100,00%**
6.01.	**Inspektorat**	**9**	**9**	**9**	**0**	**100,00%**
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Daerah	9	9	9	0	100,00%
7	**Unsur Kewilayahan**	**119**	**119**	**119**	**0**	**100,00%**
7.01.	**Kecamatan**					
7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Pancoran Mas	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Cilodong	10	10	10	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Sawangan	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.04.	Kecamatan Cinere	11	11	11	0	100,00%

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
7.01.0.00.0.00.05.	Kecamatan Sukmajaya	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.06.	Kecamatan Limo	10	10	10	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Beji	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.08.	Kecamatan Tapos	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.09.	Kecamatan Bojongsari	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.10.	Kecamatan Cimanggis	11	11	11	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.11.	Kecamatan Cipayung	11	11	11	0	100,00%
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
8.01.	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**	**11**	**11**	**11**	**0**	**100,00%**
8.01.0.00.0.00.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11	11	11	0	100,00%
	Jumlah	**508**	**509**	**508**	**1**	**100,20%**

Sumber : Bappeda Kota Depok. 2024 (diolah)

Dari tabel diatas diperoleh gambaran konsistensi jumlah kegiatan antara RKPD 2024 dengan APBD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

a) Jumlah total kegiatan dalam RKPD 2024 adalah 508 kegiatan (jumlah pada kolom 3) dan total kegiatan dalam APBD sampai dengan Triwulan II adalah 509 kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari jumlah kegiatan pada kedua dokumen tersebut 508 kegiatan seluruhnya sama-sama dimuat dalam kedua dokumen (jumlah pada kolom 5).

b) Terdapat selisih jumlah kegiatan antara RKPD 2024 dengan APBD 2024 yaitu 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

c. Konsistensi Jumlah Sub kegiatan

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan. diperoleh perbandingan antara jumlah sub kegiatan antara RKPD 2024 dengan APBD 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Perbandingan antara Jumlah Sub Kegiatan pada Dokumen RKPD dengan Jumlah Kegiatan pada APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**349**	**355**	**348**	**8**	**101,72%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
1.01.	**Pendidikan**	**91**	**92**	**91**	**1**	**101,10%**
1.01.1.06.0.00.01.	Dinas Pendidikan	91	92	91	1	101,10%
1.02.	**Kesehatan**	**81**	**84**	**80**	**5**	**103,70%**
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	81	84	80	5	103,70%
1.03.	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**54**	**55**	**54**	**1**	**101,85%**
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	54	55	54	1	101,85%
1.04.	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**	**25**	**25**	**25**	**0**	**100,00%**
1.04.2.10.1.03.30.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	25	25	25	0	100,00%
1.05.	**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**54**	**55**	**54**	**1**	**101,85%**
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	27	27	27	0	100,00%
1.05.0.00.0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	27	28	27	1	103,70%
1.06.	**Sosial**	**44**	**44**	**44**	**0**	**100,00%**
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	44	44	44	0	100,00%
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan**	**361**	**374**	**356**	**23**	**103,60%**
2.07.	**Tenaga Kerja**	**27**	**25**	**25**	**2**	**92,59%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	27	25	25	2	92,59%
2.08.	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	**26**	**29**	**26**	**3**	**111,54%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	26	29	26	3	111,54%
2.09.	**Pangan**	**24**	**24**	**24**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	24	24	24	0	100,00%
2.10.	**Pertanahan**	**1**	**1**	**1**	**0**	**100,00%**
2.10.1.04.2.10.1.01.01.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	1	1	1	0	100,00%
2.11.	**Lingkungan Hidup**	**38**	**38**	**38**	**0**	**100,00%**
2.11.1.03.0.00.12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	38	38	38	0	100,00%
2.12.	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**26**	**25**	**25**	**1**	**96,15%**
2.12.0.00.0.00.03.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	26	25	25	1	96,15%
2.14.	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**20**	**33**	**19**	**15**	**165,00%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	20	33	19	15	165,00%
2.15.	**Perhubungan**	**38**	**38**	**38**	**0**	**100,00%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	38	38	38	0	100,00%
2.16.	**Komunikasi Dan Informatika**	**27**	**27**	**27**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	27	27	27	0	100,00%
2.17.	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	**32**	**32**	**32**	**0**	**100,00%**
2.17.0.00.0.00.17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	32	32	32	0	100,00%
2.18.	**Penanaman Modal**	**21**	**21**	**20**	**2**	**100,00%**
2.18.0.00.0.00.23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21	21	20	2	100,00%
2.19.	**Kepemudaan Dan Olah Raga**	**28**	**28**	**28**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	28	28	28	0	100,00%
2.20.	**Statistik**	**4**	**4**	**4**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4	4	4	0	100,00%
2.21.	**Persandian**	**3**	**3**	**3**	**0**	**100,00%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	3	3	3	0	100,00%
2.22.	**Kebudayaan**	**9**	**9**	**9**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	9	9	9	0	100,00%
2.23.	**Perpustakaan**	**9**	**9**	**9**	**0**	**100,00%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	9	9	9	0	100,00%
2.24.	**Kearsipan**	**28**	**28**	**28**	**0**	**100,00%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	28	28	28	0	100,00%
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**66**	**66**	**66**	**0**	**100,00%**
3.25.	**Kelautan Dan Perikanan**	**8**	**8**	**8**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	8	8	8	0	100,00%
3.26.	**Pariwisata**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	6	6	6	0	100,00%
3.27.	**Pertanian**	**13**	**13**	**13**	**0**	**100,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	13	13	13	0	100,00%
3.30.	**Perdagangan**	**32**	**32**	**32**	**0**	**100,00%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	32	32	32	0	100,00%
3.31.	**Perindustrian**	**6**	**6**	**6**	**0**	**100,00%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	6	6	6	0	100,00%
3.32.	**Transmigrasi**	**1**	**1**	**1**	0	**100,00%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	1	1	1	0	100,00%
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**112**	**112**	**112**	**0**	**100,00%**
4.01.	**Sekretariat Daerah**	**51**	**51**	**51**	**0**	**100,00%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	51	51	51	0	100,00%
4.02.	**Sekretariat DPRD**	**61**	**61**	**61**	**0**	**100,00%**
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	61	61	61	0	100,00%
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**135**	**133**	**133**	**2**	**98,52%**
5.01.	**Perencanaan**	**41**	**41**	**41**	**0**	**100,00%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	41	41	41	0	100,00%
5.02.	**Keuangan**	**51**	**50**	**50**	**1**	**98,04%**
5.02.2.16.0.00.05.	Badan Keuangan Daerah	51	50	50	1	98,04%
5.03.	**Kepegawaian**	**32**	**32**	**32**	**0**	**100,00%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	32	32	0	100,00%
5.04.	**Pendidikan Dan Pelatihan**	**2**	**2**	**2**	**0**	**100,00%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	2	2	0	100,00%
5.05.	**Penelitian Dan Pengembangan**	**9**	**8**	**8**	**1**	**88,89%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	9	8	8	1	88,89%
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**25**	**25**	**25**	**0**	**100,00%**
6.01.	**Inspektorat**	**25**	**25**	**25**	**0**	**100,00%**
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Daerah	25	25	25	0	100,00%
7	**Unsur Kewilayahan**	**248**	**248**	**248**	**0**	**100,00%**
7.01.	**Kecamatan**					
7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Pancoran Mas	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Cilodong	22	22	22	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Sawangan	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.04.	Kecamatan Cinere	22	22	22	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.05.	Kecamatan Sukmajaya	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.06.	Kecamatan Limo	21	21	21	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Beji	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.08.	Kecamatan Tapos	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.09.	Kecamatan Bojongsari	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.10.	Kecamatan Cimanggis	23	23	23	0	100,00%
7.01.0.00.0.00.11.	Kecamatan Cipayung	22	22	22	0	100,00%
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**25**	**25**	**25**	**0**	**100,00%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Kegiatan				% Jml Kegiatan APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Sesuai	Tidak sesuai	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(3-5)+(4-5)*	*7=(4/3)*
8.01.	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**	**25**	**25**	**25**	**0**	**100,00%**
8.01.0.00.0.00.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	25	25	25	0	100,00%
	Jumlah	**1321**	**1338**	**1313**	**33**	**101,29%**

Sumber : Bappeda Kota Depok. 2024 (diolah)

Berdasarkan tabel tersebut, kesesuaian antara jumlah sub kegiatan dalam dokumen RKPD 2024 dan APBD Kota Depok Tahun 2024 s.d. Triwulan II, diperoleh data sebagai berikut:

a) Total sub kegiatan dalam RKPD 2024 adalah 1.321 sub kegiatan (jumlah pada kolom 3) dan total sub kegiatan dalam APBD s.d Triwulan II adalah 1.338 sub kegiatan (jumlah pada kolom 4). Dari jumlah sub kegiatan pada kedua dokumen tersebut terdapat 1.313 sub kegiatan di APBD yang sesuai dengan sub kegiatan di RKPD 2024 (jumlah kolom 5).
b) Terdapat 33 sub kegiatan yang tidak sesuai antara RKPD 2024 dengan APBD (jumlah kolom 6), terdiri dari :
    - 8 (tujuh) sub kegiatan ada di RKPD namun tidak dialokasikan di APBD antara lain :
        1) Sub kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya pada Urusan Kesehatan
        2) Sub keg. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, pada Urusan Tenaga Kerja (pada saat penyusunan anggaran tahun 2024 Perda disabilitas belum disyahkan).
        3) Sub kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan, pada Urusan Tenaga Kerja (rasionalisasi anggaran).
        4) Sub kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (rasionaliasi anggaran).
        5) Sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (rasionalisasi anggaran).
        6) Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pada Urusan Penanaman Modal (rasionalisasi anggaran);
        7) Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota pada Unsur Penunjang (Keuangan) dikarenakan pemenuhan terhadap penjadwalan ulang kegiatan tahun 2024, untuk kegiatan pembinaan dapat dilakukan secara bertahap di aula BKD dengan tidak menggunakan dana APBD (rasionaliasi anggaran).
        8) Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga pada Unsur Penunjang (Penelitian dan Pengembangan) (rasionaliasi anggaran).

    - 25 (duapuluh lima) sub kegiatan tidak ada di RKPD dialokasikan di APBD, terdiri dari :
        - 1 (satu) sub kegiatan pada Urusan Pendidikan, yaitu : sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, bersumber DAK;
        - 4 (empat) sub kegiatan pada Urusan Kesehatan, yaitu :

1) Sub kegiatan Pengembangan Rumah Sakit (RSUD KISA ditunjuk kemenkes sebagai RS Pengampuan jantung berupa alkes Cath lab. Diperlukan dukungan anggaran APBD untuk menyiapkan sarana pendukungnya. Diajukan pada saat RAPBD 2024).
2) Sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi (bersumber DAK).
3) Sub kegiatan Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak pada (bersumber DAK).
4) Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas (bersumber DAK)

- 1 (satu) sub kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu : sub kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (bersumber DAK)
- 1 (satu) sub kegiatan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yaitu : sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (perubahan penjabaran - BTT)
- 3 (tiga) sub kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, yaitu:
  1) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada (bersumber DAK Non Fisik-BOKB).
  2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (bersumber DAK Non Fisik-BOPPA).
  3) Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (bersumber DAK Non Fisik-BOPPA).
- 14 (empat belas) sub kegiatan pada Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yaitu :
  1) Sub kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
  2) Sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
  3) Sub kegiatan Pengendalian Program KKBPK
  4) Sub kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana
  5) Sub kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
  6) Sub kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
  7) Sub kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja;
  8) Sub kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

9) Sub kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

10) Sub kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya

11) Sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

12) Sub kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)

13) Sub kegiatan Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)

14) Sub kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran,baduta/balita)

- 1 (satu) sub kegiatan pada Urusan Penanaman Modal bersumber dari Dana Alokasi Khusus, yaitu : Subkegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

d. **Konsistensi Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran Program**

Berdasarkan data yang telah diolah dan disajikan, diperoleh perbandingan antara pagu indikatif RKPD 2024 dengan pagu APBD 2024 smpai dengan Triwulan II sebagai berikut ini.

Tabel 2.14 Perbandingan antara Pagu Indikatif RKPD dengan APBD s.d. Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Pagu			% Jml Pagu APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Selisih	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4/3)*
	Urusan Wajib	*2.799.368.182.210*	*3.282.222.252.460*	*482.854.070.250*	*117,25%*
1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**2.275.565.376.975**	**2.667.498.907.416**	**391.933.530.441**	**117,22%**
1.01.	**Pendidikan**	**779.119.500.540**	**999.933.676.150**	**220.814.175.610**	**128,34%**
1.01.1.06.0.00.01.	Dinas Pendidikan	779.119.500.540	999.933.676.150	220.814.175.610	128,34%
1.02.	**Kesehatan**	**660.547.670.230**	**776.376.798.322**	**115.829.128.092**	**117,54%**
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	660.547.670.230	776.376.798.322	115.829.128.092	117,54%
1.03.	**Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**	**425.368.770.391**	**455.948.319.813**	**30.579.549.422**	**107,19%**
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	425.368.770.391	455.948.319.813	30.579.549.422	107,19%
1.04.	**Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**	**311.138.250.639**	**333.707.276.862**	**22.569.026.223**	**107,25%**
1.04.2.10.1.03.30.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	311.138.250.639	333.707.276.862	22.569.026.223	107,25%
1.05.	**Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	**70.244.756.132**	**72.236.821.867**	**1.992.065.735**	**102,84%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Pagu			% Jml Pagu APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Selisih	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4/3)*
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	35.442.455.121	35.665.845.183	223.390.062	100,63%
1.05.0.00.0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	34.802.301.011	36.570.976.684	1.768.675.673	105,08%
1.06.	**Sosial**	**29.146.429.043**	**29.296.014.402**	**149.585.359**	**100,51%**
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	29.146.429.043	29.296.014.402	149.585.359	100,51%
2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan**	**523.802.805.235**	**614.723.345.044**	**90.920.539.809**	**117,36%**
2.07.	**Tenaga Kerja**	**14.841.511.812**	**19.197.363.100**	**4.355.851.288**	**129,35%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	14.841.511.812	19.197.363.100	4.355.851.288	129,35%
2.08.	**Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak**	**14.566.883.862**	**14.939.664.195**	**372.780.333**	**102,56%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	14.566.883.862	14.939.664.195	372.780.333	102,56%
2.09.	**Pangan**	**15.897.043.057**	**16.214.853.210**	**317.810.153**	**102,00%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	15.897.043.057	16.214.853.210	317.810.153	102,00%
2.10.	**Pertanahan**	**48.273.499.785**	**103.756.082.414**	**55.482.582.629**	**214,93%**
2.10.1.04.2.10.1.01.01.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	48.273.499.785	103.756.082.414	55.482.582.629	214,93%
2.11.	**Lingkungan Hidup**	**178.388.134.750**	**191.786.151.819**	**13.398.017.069**	**107,51%**
2.11.1.03.0.00.12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	178.388.134.750	191.786.151.819	13.398.017.069	107,51%
2.12.	**Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**	**23.998.995.350**	**23.922.388.653**	**(76.606.697)**	**99,68%**
2.12.0.00.0.00.03.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.998.995.350	23.922.388.653	(76.606.697)	99,68%
2.14.	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**	**5.230.388.700**	**18.649.889.400**	**13.419.500.700**	**356,57%**
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.230.388.700	18.649.889.400	13.419.500.700	356,57%
2.15.	**Perhubungan**	**87.192.414.800**	**87.385.702.989**	**193.288.189**	**100,22%**
2.15.0.00.0.00.01.	Dinas Perhubungan	87.192.414.800	87.385.702.989	193.288.189	100,22%
2.16.	**Komunikasi Dan Informatika**	**38.352.250.257**	**37.372.791.557**	**(979.458.700)**	**97,45%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	38.352.250.257	37.372.791.557	(979.458.700)	97,45%
2.17.	**Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah**	**32.676.618.974**	**34.465.295.974**	**1.788.677.000**	**105,47%**
2.17.0.00.0.00.17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	32.676.618.974	34.465.295.974	1.788.677.000	105,47%
2.18.	**Penanaman Modal**	**18.937.303.897**	**19.439.019.735**	**501.715.838**	**102,65%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Pagu			% Jml Pagu APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Selisih	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4/3)*
2.18.0.00.0.00.23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.937.303.897	19.439.019.735	501.715.838	102,65%
2.19.	**Kepemudaan Dan Olah Raga**	**26.825.903.687**	**27.039.207.782**	**213.304.095**	**100,80%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	26.825.903.687	27.039.207.782	213.304.095	100,80%
2.20.	**Statistik**	**1.177.177.350**	**1.096.044.250**	**(81.133.100)**	**93,11%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.177.177.350	1.096.044.250	(81.133.100)	93,11%
2.21.	**Persandian**	**573.633.850**	**572.993.500**	**(640.350)**	**99,89%**
2.16.2.20.2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	573.633.850	572.993.500	(640.350)	99,89%
2.22.	**Kebudayaan**	**2.587.112.400**	**2.519.429.650**	**(67.682.750)**	**97,38%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	2.587.112.400	2.519.429.650	(67.682.750)	97,38%
2.23.	**Perpustakaan**	**1.775.554.950**	**1.696.554.400**	**(79.000.550)**	**95,55%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.775.554.950	1.696.554.400	(79.000.550)	95,55%
2.24.	**Kearsipan**	**12.508.377.754**	**14.669.912.416**	**2.161.534.662**	**117,28%**
2.24.2.23.0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	12.508.377.754	14.669.912.416	2.161.534.662	117,28%
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**39.271.607.922**	**47.440.006.422**	**8.168.398.500,00**	**120,80%**
3.25.	**Kelautan Dan Perikanan**	**1.148.398.700**	**6.148.058.800**	**4.999.660.100**	**535,36%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	1.148.398.700	6.148.058.800	4.999.660.100	535,36%
3.26.	**Pariwisata**	**1.315.998.100**	**1.224.393.250**	**(91.604.850)**	**93,04%**
2.19.2.22.3.26.03.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	1.315.998.100	1.224.393.250	(91.604.850)	93,04%
3.27.	**Pertanian**	**3.039.163.400**	**7.244.697.800**	**4.205.534.400**	**238,38%**
2.09.3.25.3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	3.039.163.400	7.244.697.800	4.205.534.400	238,38%
3.30.	**Perdagangan**	**32.169.541.172**	**31.377.478.922**	**(792.062.250)**	**97,54%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	32.169.541.172	31.377.478.922	(792.062.250)	97,54%
3.31.	**Perindustrian**	**1.538.370.550**	**1.388.023.650**	**(150.346.900)**	**90,23%**
3.30.3.31.0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.538.370.550	1.388.023.650	(150.346.900)	90,23%
3.32.	**Transmigrasi**	**60.136.000**	**57.354.000**	**(2.782.000)**	**95,37%**
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	60.136.000	57.354.000	(2.782.000)	95,37%
4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**243.471.436.749**	**276.840.394.936**	**33.368.958.187**	**113,71%**
4.01.	**Sekretariat Daerah**	**126.440.118.158**	**127.205.385.180**	**765.267.022**	**100,61%**
4.01.0.00.0.00.01.	Sekretariat Daerah	126.440.118.158	127.205.385.180	765.267.022	100,61%
4.02.	**Sekretariat DPRD**	**117.031.318.591**	**149.635.009.756**	**32.603.691.165**	**127,86%**
4.02.0.00.0.00.01.	Sekretariat DPRD	117.031.318.591	149.635.009.756	32.603.691.165	127,86%
5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**222.877.402.989**	**197.160.651.078**	**(25.716.751.911)**	**88,46%**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan	Jumlah Pagu			% Jml Pagu APBD thd RKPD
		RKPD	APBD	Selisih	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=(4/3)*
5.01.	**Perencanaan**	**19.503.692.398**	**18.950.330.373**	**(553.362.025)**	**97,16%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	19.503.692.398	18.950.330.373	(553.362.025)	97,16%
5.02.	**Keuangan**	**161.155.315.902**	**139.140.261.395**	**(22.015.054.507)**	**86,34%**
5.02.2.16.0.00.05.	Badan Keuangan Daerah	161.155.315.902	139.140.261.395	(22.015.054.507)	86,34%
5.03.	**Kepegawaian**	**26.564.172.689**	**25.912.381.960**	**(651.790.729)**	**97,55%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.564.172.689	25.912.381.960	(651.790.729)	97,55%
5.04.	**Pendidikan Dan Pelatihan**	**15.123.440.000**	**12.677.303.400**	**(2.446.136.600)**	**83,83%**
5.03.5.04.0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.123.440.000	12.677.303.400	(2.446.136.600)	83,83%
5.05.	**Penelitian Dan Pengembangan**	**530.782.000**	**480.373.950**	**(50.408.050)**	**90,50%**
5.01.5.05.0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	530.782.000	480.373.950	(50.408.050)	90,50%
6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**22.636.722.419**	**22.611.458.019**	**(25.264.400,00)**	**99,89%**
6.01.	**Inspektorat**	**22.636.722.419**	**22.611.458.019**	**(25.264.400)**	**99,89%**
6.01.0.00.0.00.01.	Inspektorat Daerah	22.636.722.419	22.611.458.019	(25.264.400)	99,89%
7	**Unsur Kewilayahan**	**404.728.079.306**	**391.912.817.703**	**(12.815.261.603)**	**96,83%**
7.01.	**Kecamatan**				
7.01.0.00.0.00.01.	Kecamatan Pancoran Mas	40.141.025.497	39.308.991.167	(832.034.330)	97,93%
7.01.0.00.0.00.02.	Kecamatan Cilodong	31.840.438.854	30.665.365.552	(1.175.073.302)	96,31%
7.01.0.00.0.00.03.	Kecamatan Sawangan	41.405.373.000	41.063.552.850	(341.820.150)	99,17%
7.01.0.00.0.00.04.	Kecamatan Cinere	24.161.580.865	23.525.033.695	(636.547.170)	97,37%
7.01.0.00.0.00.05.	Kecamatan Sukmajaya	43.984.853.690	42.846.502.980	(1.138.350.710)	97,41%
7.01.0.00.0.00.06.	Kecamatan Limo	25.737.222.072	25.072.467.411	(664.754.661)	97,42%
7.01.0.00.0.00.07.	Kecamatan Beji	37.945.570.544	36.599.899.165	(1.345.671.379)	96,45%
7.01.0.00.0.00.08.	Kecamatan Tapos	43.840.915.798	42.134.363.181	(1.706.552.617)	96,11%
7.01.0.00.0.00.09.	Kecamatan Bojongsari	41.226.597.000	39.301.364.636	(1.925.232.364)	95,33%
7.01.0.00.0.00.10.	Kecamatan Cimanggis	43.132.403.066	41.416.013.866	(1.716.389.200)	96,02%
7.01.0.00.0.00.11.	Kecamatan Cipayung	31.312.098.920	29.979.263.200	(1.332.835.720)	95,74%
8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**110.917.628.092**	**92.228.523.058**	**(18.689.105.034,00)**	**83,15%**
8.01.	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**	**110.917.628.092**	**92.228.523.058**	**(18.689.105.034)**	**83,15%**
8.01.0.00.0.00.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	110.917.628.092	92.228.523.058	(18.689.105.034)	83,15%
	Jumlah	**3.843.271.059.687**	**4.310.416.103.676**	**467.145.043.989**	**112,15%**

Sumber : Bappeda Kota Depok. 2024 (diolah)

Keterangan :

Total pagu anggaran dalam RKPD adalah sebesar Rp3.843.271.059.687,00. Pagu anggaran APBD adalah pagu anggaran Belanja pada APBD Tahun 2024 s.d Triwulan II sebesar Rp4.310.416.103.676,00 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024.

Dari tabel diatas diperoleh data dan informasi antara lain :

1) Tidak ada satupun urusan yang memiliki pagu sama antara RKPD 2024 dengan APBD (kolom 6=100%).
2) Sebanyak 17 (tujuh belas) Urusan wajib, 2 (dua) urusan pilihan dan Unsur pendukung, memiliki anggaran APBD lebih besar dari pagu RKPD (kolom 7>100%), yaitu :
   a. Urusan Wajib : Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Kearsipan.
   b. Urusan Pilihan : Kelautan dan Perikanan, Pertanian.
3) Sebanyak 6 (enam) urusan wajib, 4 (empat) Urusan pilihan, Unsur penunjang, Unsur Pengawasan Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum memiliki anggaran APBD lebih kecil dari pagu RKPD (kolom 7<100%), yaitu :
   a. Urusan Wajib : Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Infomatika, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan,
   b. Urusan Pilihan : Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi.

Selisih pagu indikatif RKPD 2024 dan pagu anggaran pada APBD 2024 sampai dengan Triwulan II adalah (Rp467.145.043.989,00) atau pagu indikatif yang dapat direalisasikan dalam APBD sampai dengan Triwulan II sebesar 112,15%.

2.5 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2021-2026

Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Tingkat capaian Kinerja Daerah berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Capaian Kinerja Daerah Berdasarkan Misi RPJMD Tahun 2021-2026 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
Tujuan 1.1 Terwujudnya Infrastruktur Fisik dan Digital yang berkualitas serta berwawasan lingkungan	Indeks Kota Layak Huni				poin	61,8	n.a	65,4	67,7	65	na	0,00%	67	na	0,00%	BAPPEDA	Data Belum tersedia
		Sasaran 1.1.1 : Terwujudnya infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	1	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	poin	D (0,79)	D (0,79)	0,77	C (0.74)	C (0,72)	na	0%	C (0,68)	C (0.74)	0%	Dinas Perhubungan , PUPR	
			2	Moda Share Transportasi Umum	persen	17,10%	18,32%	14,46%	15,91%	19,00%	na	0,00%	20,00%	na	0,00%	Dinas Perhubungan	Data Belum tersedia
			3	Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun	persen	47,25%	35,91%	12,10%	6,83%	25,45%	6,83%	173,16%	20,00%	0,07	165,85%	Dinas PUPR	
			4	Ketaatan terhadap RTRW	persen	76,49%	75,24%	99,24%	99,24%	78,5%	80,80%	102,93%	79,50%	80,80%	101,64%	Dinas PUPR, Dinas PMPTSP, Bappeda	
		Sasaran 1.1.2 : Tersedianya infrastruktur digital yg berkualitas, aksesible, dan terintegrasi	5	Indeks SPBE	poin	3,39	2,99	3,42	3,70	3,20	na	0,00%	3,50	na	0,00%	Diskominfo, Setda	Data Belum tersedia
		Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya kualitas permukiman	6	Rasio Permukiman Layak	poin	0,9984	0,9984	0,9703	0,9992	0,9992	99,92%	100,00%	0,9997	1,00	99,95%	Dinas Rumkim	Capaian IKU 2024 TW II berdasarkan SK Kumuh 2015 masih sama dengan Capaian IKU

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																	TW IV di Tahun 2023
			7	Cakupan Akses Sanitasi Layak	persen	98,81%	99,12%	99,13%	99,37%	99,34%	99,37%	100,03%	99,69%	0,99	99,68%	PUPR, Kesehatan	
			8	Cakupan Akses Air Minum Layak	persen	88,78%	89,01%	85,99%	85,22%	90,24%	85,22%	94,44%	92,12%	0,85	92,51%	PUPR, Kesehatan	
		Sasaran 1.1.4 : Terwujudnya penyelenggaraan kota hijau	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	53,89	58,97	58,61	57,85	53,97	na	0,00%	54,01	na	0,00%	Dinas Rumkim, LHK, Kesehatan	TW2: Data Belum tersedia
			10	Cakupan Layanan Persampahan	persen	94,23%	96,83%	94,82%	94,06%	95,80%	na	0,00%	98%	na	0,00%	Dinas LHK	TW2: Data Belum tersedia
Tujuan 2.1. Terlaksananya reformasi birokrasi efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi				poin	62,9	63,13	64,78	82,14	64,9	na	0,00%	65,9	na	0,00%	SETDA	Data Belum tersedia
		Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya kapasitas dan kinerja birokrasi	11	Nilai SAKIP Kota	poin	67,78	67,78	67,10	67,32	69,78	na	0,00%	70,78	na	0,00%	Setda, Semua PD	Data Belum tersedia
			12	Opini BPK	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	0,00%	WTP	WTP	0,00%	BKD, Semua PD	
			13	Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	77,00	77,00	83,25	84,25	78,89	na	0,00%	80,03	na	0,00%	Setda, Diskominfo dan Semua PD pengampu Pelayanan	Data Belum tersedia
			14	Indeks Inovasi Daerah	poin	N.A	41.52	48,74 (inovatif)	51.12 (inovatif)	40 (inovatif)	na	0,00%	50 (inovatif)	na	102,24%	Bappeda	Data Belum tersedia

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1 Membangun masyarakat Kota Depok yang berbudaya berlandaskan nilai-nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga	Persentase Pemajuan Kebudayaan				persen	NA	NA	20%	20,00%	20%	na	0,00%	24%	na	0,00%	Disporparsenibud	
		Sasaran 3.1.1 : Terwujudnya pembangunan kebudayaan yang mengembangkan potensi lokal dan nilai-nilai Pancasila	15	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	persen	37,50%	50,00%	37,50%	37,50%	72,50%	37,50%	0,00%	87,50%	0,38	0,00%	Disporparsenibud	
			16	Persentase Ekpresi Budaya	jumlah / persen	20 kegiatan	26,80%	34,02%	29,90%	30%	12,37%	0,00%	30%	0,12	0,00%	Disporparsenibud	
			17	Indeks Kegemaran Membaca	poin	56,03	58,57	59,08	60,23	60,53	na	0,00%	62,73	na	0,00%	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan, Pendidikan	Data Belum tersedia
	Indeks Pendidikan				poin	76,27	76,89	76,89	77,38	77,82	na	0,00%	79,77	na	0,00%	Dinas Pendidikan	perhitungan dilakukan setahun
		Sasaran 3.1.2 : Terwujudnya ekosistem pendidikan yang baik dalam mewujudkan dan mendorong pembangunan	18	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Paket A	persen	108,17%	102,86%	104,61%	104,59%	109,17%	na	0,00%	109,67%	na	0,00%	Dinas Pendidikan, Rumkim	perhitungan dilakukan setahun

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*
		yang berkelanjutan	19	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SM PLB/Paket B	persen	92,64%	93,93%	94,06%	94,84%	93,64%	na	0,00%	94,14%	na	0,00%	Dinas Pendidikan, Rumkim	perhitungan dilakukan setahun
	Indeks Konflik Sosial				poin	1,7	1,84	1,74	1,5	1,6	na	0,00%	1,58	na	0,00%	Badan Kesbangpol	Survey di laksanakan pada TW IV
		Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat kota Depok berdasarkan nilai keagamaan dan kebhinekaan	20	Persentase PPKS yang tertangani	persen	87,74%	100,00%	41,89%	74,08%	93,74%	59,29%	63,25%	97,74%	0,59	0,00%	Dinas Sosial, Satpol.PP	Penanganan PPKS terlantar : Bimbingan, Permakanan, Sandang, Rujukan, Penelusuran, Reunifikasi, dan alat bantu. Jumlah PPKS terlantar yang ditangani Jan - Juni 2024:1908 PPKS Jumlah PPKS terlantar 2024 : 3.218 PPKS Perhitungan : 1.908/3.218x 100% = 59,29%

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			21	Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	3,08	n/a	3,26	3,6	3,4	na	0,00%	3,6	na	0,00%	Badan Kesbangpol, Setda	Survey di laksanakan pada TW IV
	Indeks Pembangunan Keluarga				poin	NA	73,73	77,21	85,51	64,2	85,51	133,19%	66,4	85,51	128,78%	DPPPAPPKB	Hasil Survey IPK dan IKK Tahun 2023
		Sasaran 3.1.4 : Penguatan ketahanan keluarga	22	Indeks Ketahanan Keluarga	poin	88,6	82,95	91,06	90,17	88,7	90,17	101,66%	88,75	90,17	101,60%	DPPPAPPKB	Hasil Survey IPK dan IKK Tahun 2023
Tujuan 4.1 Terciptanya pertumbuhan ekonomi kota yang maju, berdaya saing dan mandiri	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)				persen	-1,92%	3,76%	5,24%	5,05%	6,37%	na	0,00%	6,42%	na	0,00%		Data Belum tersedia
		Sasaran 4.1.1 : Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	23	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)	Milyar Rp	88.098,28	93.264,93	101.971, 97	111.087, 57	113.714,3 9	na	0,00%	132.636,4 6	na	0,00%	Dinas Dagin, KUKM, PMPTSP, Disporparsen ibud	Data konsumsi rumah tangga s.d TW II datanya belum tersedia, perhitungan dilakukan di akhir tahun

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			24	Nilai Investasi (milyar rupiah)	Milyar Rp	7.887,88	6.453,90	7.483,51	8.459,07	8.208,16	na	0,00%	8.373,14	na	0,00%	Dinas PMPTSP, Dagin, KUKM, Disporparsenibud, PUPR	Data Belum tersedia
	Gini Rasio				poin	0,342	0,367	0,394	0,402	0,392	na	0,00%	0,341	na	0,00%		Data Belum tersedia
		Sasaran 4.1.2 : Meningkatkan kesempatan kerja	25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	9,87%	9,76%	7,82%	6,97%	7,51%	na	0,00%	7,09%	na	0,00%	Indikator Makro,Perangkat Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Data belum tersedia
		Sasaran 4.1.3 : Menurunkan angka kemiskinan	26	Angka Kemiskinan	persen	2,45%	2,58%	2,53%	2,38%	2,50%	na	0,00%	2,32% - 2,34%	na	98,29%	Indikator Makro,Perangkat Daerah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Data belum tersedia
Tujuan 4.2 Terciptanya masyarakat	Persentase Pembangunan				persen	NA	NA	32%	34%	36%	12,93%	0,00%	40%	0,13	0,00%	Disporparsenibud	Data Belum tersedia

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
yang mandiri dan berdaya saing	Pemuda Kota Depok																
		Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan masyarakat berolahraga	27	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	persen	N.A	48,10%	42,70%	42,80%	48,00%	12,00%	0,00%	50,00%	0,12	0,00%	Disporparsenibud	
			28	Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	persen	N.A	51,94%	53,00%	53,91%	55,00%	13,78%	0,00%	58,00%	0,14	0,00%	Disporparsenibud	
Tujuan 5.1 Membangun kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok yang sehat, nyaman, aman, dan tertib	Indeks Kesehatan				poin	83,75	84,03	84,49	85,43	84,58	na	0,00%	85,14	na	0,00%	Dinas Kesehatan	Data Belum tersedia
		Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	29	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	jumlah	58,45	155,58	56,14	66,40	58,25	25,2	156,74%	58,15	25,20	156,66%	Dinas Kesehatan, DPPPPKB	Jumlah kasus kematian ibu sebanyak 8 kasus dengan 31.742 KH
			30	Persentase balita stunting	persen	5,31%	3,50%	3,48%	3,24%	4,75%	3,46%	127,16%	4,70%	3,46%	126,38%	Dinas Kesehatan, DPPPPKB	Jumlah balita stunting sebanyak 3463 balita
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum				poin	NA	74,19	74,67	76,55	76	na	0,00%	77,33	na	0,00%	Satpol.PP	Data Belum tersedia

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (Tahun 2020)	2021	2022	2023	2024			Kondisi Akhir Periode RPJMD			PD Penanggung Jawab	Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
							Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		5.1.2 : Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat serta keamanan dan kenyamanan lingkungan	31	Persentase Capaian SPM Trantibum	persen	N.A	65,50%	86,47%	89,38%	75,20%	65,50%	87,10%	76,00%	0,66	86,18%	Satpol.PP	
				Rata- rata capaian kinerja utama per tahun(%)								32,72%					
				Predikat kinerja								Sangat Rendah					

Sumber : Laporan Evaluasi hasil RKPD Kota Depok Triwulan II Th. 2024, Bappeda

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum pelaksanaan pembangunan Kota Depok berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, penilaian realisasi kinerja 31 indikator utama sebagai berikut :

1) Sangat tinggi, sejumlah 10 indikator atau 32,26% dari total jumlah 31 indikator utama;
2) Tinggi, sejumlah 2 indikator atau 6,45% dari total jumlah 31 indikator utama;
3) Sedang, sejumlah 0 indikator atau 0% dari total jumlah 31 indikator utama;
4) Rendah, sejumlah 1 indikator atau 3,23% dari total jumlah 31 indikator utama;
5) Sangat rendah, sejumlah 18 indikator atau 58,06% dari total jumlah 31 indikator utama.

2.6 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Tingkat capaian indikator kinerja daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Capaian Indikator Kinerja Daerah s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							**47,62%**	
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Pertumbuhan PDRB (persen)	-1,92%	3,76%	5,24%	5,05%	6,37%	-	0,00%	Data belum tersedia
2	Laju inflasi, (persen)	1,78%	1,81%	6,06%	2,49%	2,50%	2,22%	111,20%	
3	PDRB per kapita, (Juta Rp)	19,38	35,741	38,40	40,82	41,17	-	0,00%	Data belum tersedia
4	Indeks gini, (poin)	0,342	0,367	0,394	0,402	0,392	-	0,00%	Data belum tersedia
5	Persentese Penduduk diatas garis kemiskinan (persen)	97,55	97,42	97,47	97,62	97,62	-	0,00%	Data belum tersedia
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (poin)	80,97	81,54	82,02	82,53	82,43	-	0,00%	Data belum tersedia
7	Angka melek huruf,(persen)	99,6	99,34	99,42	99,19	99,6	-	0,00%	Data belum tersedia
8	Angka rata-rata lama sekolah, (tahun)	11,31	11,46	11,47	11,58	11,68	-	0,00%	Data belum tersedia
9	Angka usia harapan hidup, (tahun)	74,44	75,00	75,20	75,53	75,24	-	0,00%	Data belum tersedia
10	Persentase balita gizi buruk, (persen)	0,067	0,0571	0,0593	0,057	0,0495	0,057	84,85%	
11	Prevalensi balita gizi kurang: (persen)	3,30	2,28	3,00	2,39	3,2949	2,39	127%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
12	Cakupan desa siaga aktif, (persen)	100	100	100	100	100	100	100,00%	
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja, (persen)	63,96%	62,62	63,35%	62,76%	68,72%	0,6276	91,33%	Data DDA Tahun 2023
14	Tingkat pengangguran terbuka, (persen)	9,87%	9,76	7,82%	6,97%	7,51%	6,97%	107%	Data DDA Tahun 2023
15	Rasio penduduk yang bekerja,(persen)	90,13%	90,13	92,18%	93,03%	92,09%	93,03%	101,02%	Data DDA Tahun 2023
16	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja, (persen)	n.a	n.a	-1,20%	-1,20	-1,34	-	0,00%	Data DDA Tahun 2023
17	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun kerja ke atas, (persen)	57,65%	n.a	58,40%	62,76%	59,69%	58,39%	97,82%	Data DDA Tahun 2023
18	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri terhadap total kesempatan kerja. (persen)	21,90%	21,9	18,67%	19,66%	27,88%	7,32%	173,74%	Data DDA Tahun 2023
19	Proporsi tenaga kerja pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja. (persen)	8,15%	Pekerja Keluarga = 5.5% Pekerja Bebas = 2.7%	7,56%	6,73%	3,78%	3,77%	99,74%	Data DDA Tahun 2024
20	Indeks Kepuasan Masyarakat, (poin)	77	77,43	83,25	84,25	78,89	-	0,00%	Data belum tersedia

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
21	Presentase PAD terhadap pendapatan, (persen)	37,89	0,88	39,07	48,47	39,77	-	0,00%	Data belum terrsedia
22	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	Data belum terrsedia
23	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH):	85,6	93,1	89,00	89,3	80,02	0	0,00%	Perhitungan ada pada triwulan III
24	Penguatan cadangan pangan, (persen)	35,32	35,32	35,25	19,72	35,32	19,72	55,83%	data berdasarkan kondisi desember 2023, Penambahan cadangan pangan untuk tahun 2024 baru dilaksanakan pada triwulan III Sesuai anggaran Kas
25	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, (persen)	1,40%	1,37%	1,31%	1,31%	1,40%	0	0,00%	Hasil penghitungan BPS ada pada triwulan III
26	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, (persen)	0,08%	0,04%	0,00%	4,01%	1,50%	na	0,00%	Data belum tersedia
27	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB, (persen)	22,20%	21,18%	21,11%	21,11%	22,50%	na	0,00%	Data Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB s.d TW II datanya belum tersedia, perhitungan dilakukan di akhir tahun
28	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, (persen)	28,50%	29,19%	28,90%	28,86%	23,70%	na	0,00%	Data Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB s.d TW II datanya belum tersedia, perhitungan dilakukan di akhir tahun

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
29	Pertumbuhan Industri (persen)	-1,40%	3,04%	4,19%	7,21%	2,20%	2,88%	130,91%	Jumlah industri s/d Triwulan II Tahun 2024 sebanyak 2570 yang terdiri dari 2499 industri kecil, 19 industri menengah, dan 52 industri besar sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 2498
	Aspek Pelayanan Umum								
	Layanan urusan Wajib Dasar,								
	Pendidikan, meliputi:							0,00%	
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),	61,34%	54,54	42,34	65,09	62,34	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
	Angka partisipasi kasar,								
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	108,17%	102,86	104,61%	104,59%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	92,64%	93,93	94,06%	94,84%	93,64%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
	Angka Partisipasi Murni,			0,94					
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	100,95%	97,37	97,87%	94,20%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	75,03%	77,94	74,80%	80,02%	77%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
	Angka Putus Sekolah:								

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	0,001%	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	0,001%	0,00	0,00%	0,00%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
	Angka Kelulusan,								perhitungan dillakukan setahun
8	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100%	100%	100,00%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
9	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100%	100%	100,00%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
	Angka Melanjutkan (AM),								
10	Angka Melanjutkan SD/MI	112,13%	111	111,55%	100,00%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
11	Angka Melanjutkan SMP/MTS	123,76%	97,62	102,44%	113,00%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
12	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar,	30	337	30,00	27,91	32	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar,	409	9	307	815	400	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
14	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata,	41	1,19	1,25	39	40	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
15	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, (persen)	108%	100	75,41%	89,91%	100%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
16	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki, (persen)	99,88%	100	86,27%	99,83%	99,90%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
17	Penduduk yang berusia »15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara), (persen)	98,87%	98,96%	70,24%	96,53%	98,90%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
18	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / DIV. (persen)	85,62%	91,31	91,34%	86,06%	85,70%	-	0,00%	perhitungan dillakukan setahun
	Kesehatan, meliputi:							68,66%	
19	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup,	1,3	1,39	2,69	3,62	1,24	2,61	-10,87%	Jumlah kematian bayi adalah 62 dengan penyebab BBLR, asfiksia, sepsis/ infeksi dan kelainan kongenital
20	Angka kelangsungan hidup bayi,	998.70	998,61	997,31	996,38	998,76	997,39	99,86%	
21	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup,	1,35	0,38	0,12	3,98	1,24	2,77	-23,58%	Jumlah kematian balita sebanyak 3 dari 31.742 KH
22	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup,	1,01	1,05	2,39	1,92	1	2,21	-20,53%	Jumlah kematian neonatal sebanyak 52 dengan penyebab gangguan pernafasan dan kardiovaskular 19, BBLR 16, sepsis/ infeksi dan kelainan kongenital
23	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup,	58,45	155,58	56,14	66,40	58,25	56,71	102,65%	Penyebab Hipertensi dalam kehamilan (Preeklampsia) 5, komplikasi non obstetrik 2, komplikasi obstetrik 1
24	Rasio posyandu per satuan balita (per 1000 balita)	9,3	6,82	8,70	6,38	12,75	6,38	50,04%	Jumlah posyandu 1067 dengan jumlah balita 167.541

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
25	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk, - puskesmas (per 1000 penduduk)	0,09	0,1	0,15	0,19	0,09	0,18	195,74%	puskesmas 38, klinik pratama 260, klinik utama 44 Data jumlah penduduk DKB Sem 2 Tahun 2023 1.941.360
26	Rasio Rumah sakit per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	139,08%	Data jumlah penduduk DKB Sem 2 Tahun 2023 1.941.360 Jumlah TT RS 2024 = 3.901 TT
27	Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,65	1,04	0,58	0,65	0,72	0,79	109,03%	Jumlah dokter 1365, Data jumlah penduduk DKB Sem 2 Tahun 2023 1.941.360
28	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (per 1000 penduduk)	0,758	Perawat =233,81 Bidan = 121,60	1,34	1,55	0,77	1,81	234,94%	
29	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, (persen)	72,37	81,18	100,00	85,55	85	48,28	56,80%	
30	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, (persen)	100	98,29	100,13	100,01	100	49,08	49,08%	
31	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), (persen)	79,36	90,48	95,24	93,70	100	0,49	0,49%	
32	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan: (persen)	100	100	100,0	100,00	100	100,00	100,00%	
33	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak, (persen)	73,7	94,56	91,61	96,30	90	0,49	0,54%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
34	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, (persen)	2	2	1,71	4,76	2	1,34	66,87%	
35	Cakupan balita pneumonia yang ditangani, (persen)	7,35	8,83	61,73	20,76	80		0,00%	
36	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, (persen)	47,4	65,65	90,84	97,35	90	51,25	56,94%	
37	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk),	133	158	225,25	344	117	215,63	184,30%	
38	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk),	3,54	1,76	5,70	6,46	2,73	0,00	199,88%	
39	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS: (persen)	n.a	66	85,16	97,35	90	51,25	56,94%	
40	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, (persen)	n.a	86	59,77	80,36	85	51,57	60,67%	
41	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, (persen)	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,00%	
42	Penderita diare yang ditangani, (persen)	20,79	15,13	35,31	41,18	80	20,66	25,82%	
43	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi, (persen)	0,05	0,01	0,11	0,13	0,05	0,08	47,29%	
44	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat rniskin: (persen)	16,06	20,8	10,93	0,15	13	15,50	119,26%	kunjungan puskesmas /Rujukan = TW 1 = 284.063/ 43.759 TW 2 = 563.929 / 87.434

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
45	Cakupan kunjungan bayi (persen)	80,03	95,38	100,24	90,29	100	na	0,00%	
46	Cakupan puskesmas (persen)	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	345,45	100,00%	
47	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (persen)	94,91	96,31	98,96	99,52	100	49,36	49,36%	
48	Cakupan pelayanan nifas (persen)	97,38	96,46	100,00	99,86	100	48,86	48,86%	
49	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani (persen)	62,59	55,48	100,00	65,89	77,23	31,51	40,80%	
50	Cakupan pelayanan anak balita (persen)	50,75	96,73	100,00	96,27	100	na	0,00%	
51	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin (persen)	105,13	100	96,46	82,65	100	na	0,00%	
52	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (persen)	100	53,09	89,03	97,40	100	na	0,00%	
53	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (persen)	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00%	Pengajuan UHC = 2.348 orang Jumlah PBPU BP Pemda = 284.527
54	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) (persen)	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00%	
55	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (persen)	100	100	100	100,00	100	100,00	100,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pekerjaan umum dan penataan ruang. meliputi:							37,13%	
	Pekerjaan Umum, meliputi:								
56	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,	0,6611	0,692	0,6791	0,710	0,6713	0,71	105,76%	
57	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40KM /Jam), (persen)	67,63%	67,96%	67,00%	70,80%	68,68%	71,76%	104,48%	
58	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), (persen)	1,69%	2,52%	1,65%	na	1,71%	na	0,00%	
59	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar,	n.a	n.a	n.a	n.a	1,47%	na	0%	
60	Persentase rumah tinggal bersanitasi, (persen)	98,46%	98,73%	99,13%	98,93%	99,15%	na	0,00%	
61	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, (persen)	3.76%	18,28%	4,14%	n.a.	3.76%	na	0%	
62	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat: (persen)	85,97%	24,20%	91,50%	81,88%	80,52%	na	0,00%	
63	Tidak terjadi genangan »2 kali setahun (persen)	47,25%	35,91%	12,10%	93,19%	25,45%	na	0,00%	
64	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (persen)	42,34%	42,34%	42,34%	42,34%	42,34%	na	0,00%	
65	Rasio Jaringan Irigasi,	0,2109	0,2109	0,2109	0,2109	0,2109	na	0,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
66	Persentase penduduk berakses air minum, (persen)	95,51%	97,47%	85,99%	17,62%	97,27%	na	0,00%	
67	Persentase areal kawasan kumuh, (persen)	0,14%	0,14%	0,09%	0,09%	0,05%	0,06%	76,00%	Di TW II tahun 2024 capaian persentase areal kawasan kumuh masih sama dengan TW IV Tahun 2023 ; (Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah)*100% =(12,52/19998.48)*100 =0,062% ; setelah diinvetarisir konsultan CAP, sisa luas kawasan kumuh yg belum tertangani adalah 21,33 Ha (TAHUN 2021), dan sampai TW 4 2022 sudah diintervensi seluas 3,44 Ha, Sedangkan hingga TW 4 Tahun 2024 sudah terintervensi sebanyak 5,37 ha : 21,33 - 3,44 - 5,37= 12,52 Ha untuk diintervensi mulai 2024
68	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan, (persen)	17,63%	20,10%	20,90%	22,75%	19,50%	-	0,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
69	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, dan	168,18	203,36	203,09	203,093	159,74	203,09	127,14%	Realisasi TW II Tahun 2024 masih sama dengan TW IV Tahun 2023 yang didapatkan dari perhitungan ; Rasio = (Luas laham TPU dalam m2 / jumlah penduduk Kota depok tahun 2022) x 1000 Rasio = (431238/2123349) * 1000 = 203,093
70	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk.	0,87	0,88	1,1	1,09	0,94	1,08	114,89%	
71	Penataan Ruang, meliputi:								
72	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan, (persen)	36,16%	36,16%	36,16%	36,16%	34,16%	na	0,00%	Data belum tersedia
73	Ketaatan terhadap RTRW. (persen)	76,49%	75,24%	99,24%	99,24%	78,50%	80,80%	102,93%	
	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, meliputi:							91,63%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
74	Rasio rumah layak huni,	0,2084	0,209	0,209	0,220	0,22	0,22	100,00%	Di TW II Tahun 2024 masih sama dengan TW IV 2023 capaian Rasio Rumah Layak Huni ;Adanya rumah-rumah yang tidak lolos verfikasi sehingga gugur menjadi penerima manfaat RTLH TA.2023 (Jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk)=(457256(data dari DPTSP tahun 2022)+(1992+158+150+355+5) (RTLH Reguler +RTLH ABT+BSPS+Rutilahu+TMMD)/ 2085935 = 459916 / 2085935 = 0,22 ;tapi berdasarkan perhitungan metadata rasio rumah layak huni adalah = jumlah rumah layak huni/jumlah penduduk = 440615/1.927.867= 0,2285data jumlah rumah layak huni DPTSP dan jumlah penduduk dari Kemendagri tahun 2023Jumlah rumah layak huni adalah data jumlah rumah DPMPTSP + intervensi rumkim

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
75	Rasio permukiman layak huni,	0,9984	0,9984	0,9703	0,9992	0,9992	0,9992	100,00%	Di TW I Tahun 2024 masih sama dngn TW IV 2023 capaian Rasio Permukiman Layak Huni (luas permukiman layak huni/luas wilayah permukiman) =16002,48 /16015= 0,9992 ;berdasarkan SK Kumuh 2015 dan luas permukiman Kota Depok berdasarkan RTRW 2022 luas Kawasan kumuh yang tertangani s/d tahun 2023 berdasarkan SK kumuh 2015 = 120,2 Ha

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
76	Cakupan ketersediaan rumah layak huni, (persen)	95,50%	96,10%	96,27%	96,85%	98,36%	96,85%	98,46%	Di TW II 2024 masih sama dngn TWIV 2023 capaian Cakupan ketersediaan rumah layak huni Tahun 2023(Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu)*100%=((435264+(673+73)+(1992+158+150+355+5))/452917)*100% =(438670/452917)*100%=96,85% ; => (673+73(adalah jumlah penerima bansos RTLH 2022) +1992+158(RTLHtahun 2023) +(150BSPS+ 355RUTILAHU + 3 TMMD TA 2023)tapi berdasarkan perhitungan metadata cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah = jumlah rumah layak huni/jumlah rumah kota depok = 440615/457256*100%= 96,36%data jumlah rumah layak huni dan jumlah rumah kota Depok dari DPMPTSPJumlah rumah layak huni adalah data jumlah rumah DPMPTSP + intervensi rumkim

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									di RTLH , Rutilahu, BSPS, TMMD, CSR dan sejenisnya

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
77	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau, (persen)	9,96%	3,27%	3,51%	4,35%	10,86%	4,35%	40,06%	Di TW II 2024 masih sama dngn TWIV 2023 : capaian Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau di tahun 2022 + intervensi s.d di TW IV tahun 2023 Adanya rumah-rumah yang tidak lolos verfikasi sehingga gugur menjadi penerima manfaat RTLH. = (Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu/Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu)*100% =((10324+(673+73)+(1992+158+150+355+5) /315698)*100 % = 4,35 % => 673+73(adalah jumlah penerima bansos RTLH 2022)+(1992RTLH +158ABT + 150BSPS+355 RUTILAHU + 3 TMMD s.d TWIV tahun 2023) Untuk perhitungan TW selanjutnya data rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									tertentu ditambahkan intervensi RTLH dan sejenisnya

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
78	Persentase pemukiman yang tertata, (persen)	99,84%	99,84%	99,89%	99,93%	99,92%	99,93%	100,01%	Di TW II 2024 masih sama dngn TWIV 2023 capaiannya ;(Luas area permukiman tertata/luas area permukiman keseluruhan)*100%=(17125/17137.54)*100 = 99,93 %; Hasil konsultan CAP, luas kawasan kumuh belum tertangani s.d 2021 adl 21,33 Ha (sebelumnya 28,12 Ha shg ada selisih 6,79 Ha; Tahun 2022 intervensi 3,44 Ha dan sudah selesai di TW 3 2022; Tahun 2023 intervensi 5,37 Ha; shga total kumuh tertangani sd TW 4 2023 adl : 6,79Ha+3,44 Ha +5,37 ha= 15,6 Ha + luas area permukiman tertata sd 2021 adl 17109,4 Ha =17125 Ha .)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
79	Persentase lingkungan pemukiman kumuh, (persen)	0,14%	0,14%	0,09%	0,06%	0,05%	0,06%	80,00%	Di TW II 2024 masih sama dngn TWIV 2023 capaiannya berdasarkan SK Kumuh 2015 (Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah)*100% =(12,52/19998.48)*100 =0.06% ; setelah diinvetarisir konsultan CAP, sisa luas kawasan kumuh yg belum tertangani adalah 21,33 Ha, dan sampai TW 4 2022 sudah diintervensi seluas 3,44 Ha sehingga tersisa 21,33-3,44 Ha =17,89 ; intervensi s/d TW IV 2023 5,37 Ha sehingga 17,89-5,37 = 12,52 Ha (berdasarkan SK KUmuh 2015) tapi berdasarkan perhitungan metadata persentase lingkungan permukiman kumuh (berdasarkan SK Kumuh 2022) adalah = Luas lingkungan permukiman kumuh/luas wilayah)*100% = 12,52/16015*100%= 0,078%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
80	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, (persen)	78,83%	78,83%	86,60%	90,57%	92,80%	90,57%	102,40%	Di TW II 2024 masih sama dngn TWIV 2023 capaiannya , (Luas pemukiman kumuh yang tertangani/luas pemukiman kumuh)*100%=(120,2/132.72)* 100%=90,57% (berdasar sk 2015); pekerjaan penataan kawasan kumuh sudah selesai dilaksanakan pada TW3untuk perhitungan selanjutnya jika SK 2022 terverifikasi, menggunakan rumus = luas pemukiman kumuh yang tertangani/luas pemukiman kumuh)*100% berdasarkan SK kumuh 2022dengan luas permukiman kumuh yang tertangani adalah yang diintervensi pada tahun 2023 dan luas permukiman kumuh berdasarkan SK Kumuh 2022 (yg tertangani berdasarkan sk 2022 = 2,96 Ha) adalah 475,63 Ha (termasuk sisa luasan kumuh dari SK Kumuh 2015 : 132,72-120,2= 12,52 Ha

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
81	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, (persen)	4,50%	3,90%	3,90%	3,91%	4,13%	3,91%	105,25%	Di TW I 2024 masih sama dngn TWIV 2023 capaiannya + tahun 2022 Dari 746 unit RTLH (tahun 2022) yg diintervensi, hanya 30 unit rumah yang berada dalam kawasan kumuh SK 2015. Jumlah RTLH terlaksana pada 2022 di kawasan kumuh SK 2015 adalah 30 unit RTLH. sedangkan dari jumlah RTLH TW IV tahun 2023 sebesar 757, yang di intervensi yang berada dalam kawasan kumuh SK 2022 ada 39 unit RTLH (Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan/jumlah seluruh rumah)*100% =((17653+30+39)/452917)*100 % =3,913% tapi berdasarkan perhitungan metadata proporsi rumah tangga kumuh perkotaan adalah = jumlah rumah tangga kumuh perkotaan/jumlah seluruh rumah)*100% = 16641/457256*100%= 3,64%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
									Untuk perhitungan TW selanjutnya jumlah rumah tangga kumuh perkotaan 16641 dikurangi dengan jumlah intervensi RTLH dan sejenisnya di 2023
82	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU, (persen)	71,62%	71,31%	73,57%	76,59%	78,01%	76,83%	98,49%	TW II 2024 (Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu/jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu)*100% =((661+21+28+3)/928)*100 =76,83%
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:							40,11%	
83	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), (persen)	22%	27%	27,00%	22,78%	23,20%	24,39%	105,13%	Jumlah Petugas Linmas yang aktif (dibagi) Jumlah Petugas Linmas dalam 1 wilayah kerja Kab/Kota (dikali) 100
84	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keinda-han), (persen)	73,02%	100,00%	100,00%	74,88%	74,88%	42,79%	57,14%	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda x 100
85	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota, (persen)	100%	87,75%	100,00%	100%	100%	-	0,00%	Data belum tersedia

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
86	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), (persen)	84,00%	100,00%	77%	83,19%	84,80%	-	0,00%	Data belum tersedia
87	Persentase Penegakan PERDA. (persen)	87,32%	88%	88,00%	90,14%	90,14%	34,51%	38,28%	Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda / Jumlah Pelanggaran Perda x 100
	Sosial, meliputi:							134,02%	
88	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial, (persen)	53,57%	60,78%	38,00%	66,71%	50,50%	77,80%	154,06%	Jenis Bansos : PKH, Sembako:78.177 KK BPK= 2971 KK Bantuan Pendidikan Siswa Miskin SLTA = 1580 siswa Bantuan Perbaikan Rumah Tidal Layak Huni : 345 KK Pasar Murah : 1166 KK Pelatihan Keterampilan Kerja :235 KK Total Penerima Bansos sd. Juni 2024 = 84.474 KK Jumlah Data SITPAS per Juni 2024 = 108.579 KK Perhitungan = 84.474/108.579 x 100% = 77,79%

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
89	Persentase PPKS yang tertangani, (persen)	87,74%	70,92%	41,89%	74,08%	93,74%	59,29%	63,25%	Penanganan PPKS terlantar : Bimbingan, Permakanan, Sandang, Rujukan, Penelusuran, Reunifikasi, dan alat bantu. Jumlah PPKS terlantar yang ditangani Jan -Juni 2024:1908 PPKS Jumlah PPKS terlantar 2024 : 3.218 PPKS Perhitungan : 1.908/3.218x 100% = 59,29%
90	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, (persen)	68,68%	59,58%	25,51%	51,58%	48,02%	75,81%	157,87%	Jumlah PPKS yang menerima Bantuan Sosial berupa PKH, Sembako, Bansos Pangan Kota dan Pasar Murah /Jumlah Keluarga Miskin 2024 Perhitungan = ((78177+2971+1166)/108579)x 100% = 75,81% (Sumber : Data Linjamsos Juli 2024, Data SITPAS)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
91	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya, (persen)	n.a	n.a	17,65%	25,00%	5,130%	25,00%	487,33%	LKS (Panti Sosial) yang memiliki usaha/kelompok sosial ekonomi : 1. Muhammadiyah Sawangan (Hidroponik) 2. Al Amanah Sawangan (Peternakan) 3. Wisma Karya Bhakti Bojongsari (Hidroponik) 4. Bina Remaja Mandiri Tapos (Perikanan) 5. Darul Ilmi Beji (Konveksi) 6. Babussalam Cisalak (susu kurma) 7. Yayasan Muhammadiyah (paket usaha laundry) 8. Yayasan Al amanah (paket usaha breeding kambing) 9. Yayasan Al Hayya paket depot air minum isi ulang) 10. Yayasan Sakinah (air minum isi ulang) Total =10 LKS Jumlah LKS (Panti Sosial) = 40 LKS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
92	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial, (persen)	1,71	1,71	6%	7,50%	6,84%	7,50%	109,65%	Jumlah Panti yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan ada 3 Panti = 1. Al Amanah Sawangan 2. SLB Nusantara Beji 3. Yayasan saya Anak Negeri Indonesia , Sukmajaya Jumlah Panti = 40 Panti Perhitungan = 3 /40 x 100% = 7,5%
93	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat, (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	Jumlah Korban bencana yang menerima bantuan: 2180 orang Jumlah korban bencana bulan jan - Juni 2024 : 2180 orang
94	Persentase korban bencana vang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap, (persen)	40%	58,23%	100%	100%	70%		0,00%	
95	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah rnenerima jaminan sosial, (persen)	27,64%	58,85%	22%	30,28%	28,01%	0,00%	0,00%	Belum ada data
	Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, meliputi:								
	Tenaga kerja, meliputi:							110,20%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
96	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, (permil)	15,56	7,01	5,04	1,896	14,60	0,89	194%	Jumlah Perusahaan : 15.819, Jumlah Kasus: 16
97	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), (persen)	45,95%	40,00%	64,52%	40%	79%	100%	126,58%	1 kasus diselesaikan dengan PB BIPARTIT (Perjanjian Bersama), 2 kasus diselesaikan dengan anjuran 3 kasus sedang proses 8 Kasus dari total kasus tercatatkan 16 kasus
98	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan,	56,96%	43,42%	44,37%	42,39%	40%	38,39%	95,98%	
99	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek: (persen)	74,32%	66,14%	5,44%	52%	83%	25%	30,50%	Sumber : BPJS Ketenagakerjaan
100	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, (persen)	58,82%	73,00%	35%	62%	66%	31%	47,53%	
101	Besaran tenaga kerja yang meridapatkan pelatihan berbasis masyarakat, (persen)	100%	100%	100%	100%	60%	100%	166,67%	
	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meliputi:							194,10%	
102	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, (persen)	1,05%	1,17%	1,42%	0,19%	1,05%	0,19%	18,03%	Capaian 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
103	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR, (persen)	26%	26%	26%	26%	36%	28%	77,78%	DDA Tahun 2023 Jumlah Anggota DPRD Perempuan : 14 Jumlah Anggota DPRD Laki-laki : 36
104	Partisipasi perempuan di lembaga swasta, (persen)	3,12%	9,63%	48,53%	48,53%	3,15%	48,93%	1553,33%	Capaian 2023
105	Rasio KDRT:	0,021	0,00011	0,000250415	0,000215686	0,016		0,00%	Capaian 2023
106	Partisipasi angkatan kerja perempuan, (persen)	47,57%	47,92%	47,92%	47,92%	51,00%	47,92%	93,96%	DDA Tahun 2023
107	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu, (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Capaian 2023
108	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit, (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Capaian 2023
109	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu, (persen)	90%	111,11%	100%	100%	90%	100%	111,11%	Capaian 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
110	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, (persen)	100%	61,54%	25%	75%	100%	75%	75,00%	Capaian 2023
111	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum, (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Capaian 2023
112	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (persen)	1,83%	0%	0%	0%	100%	0%	0,00%	Capaian 2023
113	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	Capaian 2023
	Pangan, meliputi:							0,00%	
	Kabupaten/Kota, meliputi:								
1	Ketersediaan pangan utama	97	118	93,00	204214,9	271.013	0	0,00%	perhitungan baru diperoleh pada Triwulan III
2	Ketersediaan energi perkapita perkapita	2734,97	2779,04	2574,82	n.a		na		
	Ketersediaan protein perkapita	88,59	89,96	82,42	n.a		na		
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	100%	85,05%	95,00%	80%		0,00%	perhitungan baru diperoleh pada Triwulan II

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pertanahan, meliputi:							33,64%	
	Kabupaten/Kota, meliputi:								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	NA	NA	NA		NA	NA	0,00%	Data persentase luas lahan bersertifikat ada di BPN
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	NA	NA	NA		0	0		sengketa tanah dapat diselesaikan dengan berbagai cara, antara lain melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa maupun mediasi, serta melalui badan peradilan. Dengan ini kami sampaikan kaitan dengan Penanganan Sengketa Tanah Pemerintah Kota Depok tidak pernah menangani sengketa tanah.
3	Penyelesaian izin lokasi	NA	NA	NA		NA	NA		Data penyelesaian izin lokasi , KPPR (Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang wajib dipenuhi dalam rangka penerbitan izin suatu kegiatan/usaha, tupoksi berada di Dinas PUPR Kota Depok.

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Luas pengadaan lahan pemerintah	67 area	75 area	55 area		110	74	67%	1 area RTH, 2 area pendidikan, 71 area posyandu
	Lingkungan hidup, meliputi:							18,89%	
	Kabupaten/Kota, meliputi:								
114	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota,	ada	ada	ada	ada	ada	belum ada	0,00%	Masih melakukan review materi teknis RPPLH terlebih dahulu karena penyusunan materi teknis dilakukan pada TA 2022 sehingga perlu penyesuaian data dan ketentuan terbaru
115	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota,	ada	ada	ada	ada	ada	belum ada	0,00%	Menunggu surat edaran pedoman penyusunan dokumen dari KLHK
116	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air,	51,61	61,03	58,37	52,02	51,73	-	0,00%	Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) baru dapat dilakukan di akhir tahun
117	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara,	65,76 (cukup)	69,63	70,82	74,77	65,84	-	0,00%	Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU) baru dapat dilakukan di akhir tahun
118	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	35,873	35,88	36,44	36,51	35,877	-	0,00%	Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) baru dapat dilakukan di akhir tahun

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
119	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan.atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota, (persen)	48,00%	55,1%	51,20%	55,00%	70%	65%	92,86%	TW2 (target disesuaikan p-renstra)
120	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHyang di terbitkan oleh Pemerintah daerahKabupaten/ Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota. (persen)	60%	62%	100%	64,00%	68%	91%	133,82%	TW2 (target disesuaikan p-renstra)
121	Timbulan sampah yang ditangani, (persen)	76,60%	76,60%	76,10%	71,31%	76,30%	-	0,00%	Perhitungan persentase timbulan sampah yang ditangani baru dapat dilakukan di akhir tahun
122	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R (persen)	17,63%	20,10%	20,06%	22,75%	19,50%	-	0,00%	Perhitungan persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R baru dapat dilakukan di akhir tahun
123	Persentase cakupan area pelayanan, (persen)	76,60%	76,73%	76,50%	71,31%	76,30%	-	0,00%	Perhitungan persentase cakupan area pelayanan baru dapat dilakukan di akhir tahun
124	Persentase jumlah sampah yang tertangani, (persen)	76,60%	76,73	76,10%	71,31%	76,30%	-	0,00%	Perhitungan persentase jumlah sampah yang ditangani baru dapat dilakukan di akhir tahun
125	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota, (poin)	70	60	60	n.a	70	-	0,00%	Penilaian adipura diganti dengan penyusunan jakstrada

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi:							108,06%	
126	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk,	0,9988	0,9999	0,9972	0,9975	0,9940	0,9999	100,59%	Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2023
127	Rasio bayi berakte kelahiran,	0,9603	0,9775	0,9825	0,9800	0,9720	0,9800	100,82%	Berdasarkan Data Kemendagri 4 Januari 2024
128	Rasio pasangan berakie nikah,	0,4453	0,5381	0,5843	0,6912	0,4750	0,6912	145,52%	Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2023
129	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK,	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah	100,00%	
130	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), (persen)	99,88%	99,99%	99,72%	99,75%	99,40%	99,99%	100,59%	Berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2023
131	Cakupan penerbitan akta kelahiran. (persen)	96.03%	97,75%	98,25%	98,00%	97,20%	98,00%	100,82%	Berdasarkan Data Kemendagri 4 Januari 2024
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,meliputi:							40,00%	
132	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, (jumlah)	6	6	13	15	15	-	0,00%	Data belum tersedia
133	Persentase PKK aktif, (persen)	100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%	
134	Persentase Posyandu aktif, (persen)	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	
135	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masvarakat, (persen)	100%	100%	99,82%	39,51%	100%		0,00%	
136	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat. (persen)	80%	80%	67,24%	26,22%	80%		0,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi:							26,09%	
137	Laju pertumbuhan penduduk (LPP), (persen)	3,21%	1,64%	1,58%	1,55%	1,98%	-	200,00%	Sesnus Penduduk 2020 Long Form
138	Total Fertility Rate (TER); (poin)	2,069	2,04	1,99	1,99	2,1	-	200,00%	PK 2023
139	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB, (persen)	17,60%	50%	58%	59%	64%	-	0,00%	Data 2023
140	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk: persen)	n.a	0%	13%	13%	68,42%	-	0,00%	Data 2023
141	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Walikota) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk, (jumlah)	2	1	1	3	3	-	0,00%	Data 2023
142	Ratio Akseptor KB, (persen)	74,30%	74,98%	51,41%	58,05%	75,70%	-	0,00%	PK 23
143	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49: (persen)	74,30%	74,98	52,40%	58,05	75,45	-	0,00%	MCPR (Modern-Contraceptive Prevalence Rate) sumber PK 23
144	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	10,7	10,01	10,10	9,2	9,97	-	200,00%	PK 23

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
145	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), (persen)	9,09%	9,26%	31,91%	20,32%	8,60%	-	0,00%	PK 23
146	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (persen)	25,82	26%	40%	27,50%	29%	-	0,00%	PK 23
147	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi, (persen)	25,70%	33,38%	51,15%	27,50%	30%	-	0,00%	PK 23
148	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB, (persen)	73,63%	72,79%	58,23%	11,11%	74,00%	-	0,00%	
149	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB, (persen)	63,11%	62,92%	38,70%	8,20%	63,65%	-	0,00%	
150	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB, (persen)	44,36%	31,66%	5,32%	10,86%	44,78%	-	0,00%	
151	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan, (persen)	NA	9,09%	0%	9%	36,36%	-	0,00%	
152	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa, (persen)	0%	11,15%	69,90%	62,50%	72,72%	-	0,00%	
153	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri,	43,60%	86,12%	32%	44%	46%	-	0,00%	
154	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan, (persen)	20,73%	21,82%	100%	50%	24%	-	0,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
155	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa, (persen)	n.a	75%	100%	79,36%	80%	-	0,00%	
156	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS), (persen)	0%	0,0026%	NA	NA	0%	-		
157	Cakupan kelompok keciatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga, (persen)	99,20%	99,70%	95%	82,85%	99,60%	-	0,00%	
158	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, (persen)	76,35%	78,80%	6,89%	18,35%	81%	-	0,00%	
159	Rata-rata usia kawin pertama wanita, (tahun)	22	22	23	23,32	23	-	0%	PK 2023
160	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes.	2,00%	0,19%	0,25%	0,13%	2,60%	-	0,00%	
	Perhubungan, meliputi:							0,00%	
161	Jumlah arus penumpang angkutan umum, (orang)	21.609.727	18.509.715	29.561.242	36.973.038	35.000.000	-	0,00%	Data belum tersedia
162	Rasio ijin trayek,	0,0021	0,00205	0,0023	0,0015	0,0022	-	0,00%	Data belum tersedia
163	Jumlah uji kir angkutan umum,	10421	10949	10.025	10.099	13500	-	0,00%	Data belum tersedia

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
164	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/ Terminal Bis,	2	2	2	2	2	-	0,00%	Data belum tersedia
165	Persentase layanan angkutan darat, (persen)	0,03%	0,07%	0,01%	0,08%	0,04%	-	0,00%	Data belum tersedia
166	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum, (persen)	0,71%	0,52%	0,54%	0,43%	0,42%	-	0,00%	Data belum tersedia
167	Pemasangan Rambu-rambu, (persen)	60,96%	8,35%	9,08%	7,66%	7,23%	-	0,00%	Data belum tersedia
168	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan:	0,0014	0,0013	0,0017	0,0016	0,0011	-	0,00%	Data belum tersedia
169	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, dan	21.609.727	18.509.715	29.561.242	36.973.038	35.000.000	-	0,00%	Data belum tersedia
170	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun.	4.394.083	3.810.029	4.136.472	3.241.894	5.500.000	-	0,00%	Data belum tersedia
	Komunikasi dan informatika, meliputi:							0,00%	
171	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan, (persen)	100%	100%	100%		100%	-	0,00%	Data Belum tersedia

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Koperasi, usaha kecil dan menengah, meliputi							49,29%	
172	Persentase koperasi aktif, (persen)	34,70%	87,79%	88,20%	50,30%	87,90%	43,33%	49,29%	sampai dengan TW II total Koperasi Aktif sebanyak 91 Koperasi dari total 210 unit koperasi yang ada di Kota Depok
	Penanaman modal, meliputi:							-334%	
173	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA),	138	1.337	427	425	425	50	11,76%	Capaian masih Triwulan I, belum ada informasi capaian pada riwulan II tahun 2024
174	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA), (Milyar Rp)	7.887,88	6.453,90	7.483,51	8.459,07	8.208,16	2.495,05	30,40%	Capaian masih Triwulan I, belum ada informasi capaian pada riwulan II tahun 2024
175	Rasio daya serap tenaga kerja, (poin)	2,14	1,3	2,17	1,18	2,22	0,73	32,88%	Capaian masih Triwulan I, belum ada informasi capaian pada riwulan II tahun 2024
176	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (Persen).	-6,58%	-18%	15,95%	13,03%	5%	-70,50%	-1410%	Capaian masih Triwulan I, belum ada informasi capaian pada riwulan II tahun 2024
	Kepemudaan dan olahraga, meliputi:							37,11%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
177	Persentase organisasi pemuda yang aktif, (persen)	30%	84,00%	84,00%	91,14%	44,31%	-	0,00%	Data belum tersedia
178	Persentase wirausaha muda, (persen)	0,10%	2,94%	0,05%	1,50%	0,17%	-	0%	Data belum tersedia
179	Cakupan pembinaan olahraga, (persen)	90,69%	86,00%	91,00%	31%	91%	16%	17,58%	8 cabang olahraga (50 cabor di KONI)
180	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi, (persen)	50%	85,68%	71%	68%	60%		0,00%	Data belum tersedia
181	Cakupan pembinaan atlet muda, (persen)	8%	11,95%	15,69%	7%	10%		0,00%	Data belum tersedia
182	Jumlah atlet berprestasi (orang)	2 orang	166	10	28	5 orang	11	220,00%	
183	Jumlah prestasi olahraga (cabor)	7 cabor	16	12	15	9 cabor	2	22,22%	
	Statistik, meliputi:							33,33%	
184	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi,	ada	belum ada	ada	ada	ada	Ada	100,00%	
185	Buku "kabupaten dalam angka",	ada	ada	ada	Ada	ada	Belum ada	0,00%	
186	Buku "PDRB".	ada	ada	ada	Ada	ada	Belum ada	0,00%	
	Persandian, meliputi:							0,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
187	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah (persen)	2,6	2,6	2,6	100	42,11	0	0,00%	
	Kebudayaan, meliputi:							21,26%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
188	Penyelenggaraan festival seni dan budaya, (kali)	20 event	17	33	44	57 event	19	33,33%	1.Rakernas Kejaksaan Agung 2.Event PT JAC 3.Pagelaran tari, musik dan modelling 4.AP One angkatan I 5.Event hari tari sedunia 6.ajang kreatifitas seni Indonesia 7.lomba tari betawi 8.Pesta kebudayaan Bali 9.Ajang kreatifitas seni Indonesia 4 10.rakor kejaksaan Agung RI 11.pentas aneka tari daerah 12.Gathering sinar mas 13.HUT Ke12 Komisi Informasi Provinsi 14.Anniversary 53th Agung Sedayu 15.Pajak Award Badan Keuangan Daerah 16.Dinas Kebudayaan DKI Jakarta 17.Hari Bumi Kota Depok 18.HUT ke 25 Kota Depok 19.HUT KBUMN ke 26
189	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, (persen)	37,50%	75%	50%	37,50%	72,50%	37,50%	51,72%	
190	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi, (buah)	2 buah	3	3	4	4 buah	-	0,00%	Data belum tersedia

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
191	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu (unit)	3 unit	3	3	3	3 unit	-	0,00%	Data belum tersedia
	Perpustakaan, meliputi:							83,22%	
192	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, (rasio)	0,53	0,26	0,9392	1,29	0,89	0,68	76,40%	jumlah pengunjung sampai bulan Juni 32.834 orang, jumlah populasi yang harus dilayani 0.025 x 1.941.360 = 48.534
193	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, (rasio)	0,48	0,49	0,49	0,46	0,43	0,46	106,98%	jumlah judul buku perpustakaan umum kota depok sampai Juni 2024 = 33.418 Jumlah Koleksi buku perpustakaan sampai Juni 2024 = 73.036
194	Rasio perpustakaan persatuan penduduk,	0,34	0,4	0,26	0,39	0,33	0,38	115,15%	jumlah perpustakaan di Kota Depok 742; jumlah penduduk kota depok 1.941.360
195	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun,	27.345	13.167	48.280	62.385	52.000	32.834	63,14%	jumlah pengunjung sampai bulan Juni 32.834
196	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan,	22.863	25.376	27.594	33.118	24.500	33.418	136,40%	jumlah judul buku perpustakaan umum kota depok sampai Juni 2024 = 33.418
197	Jumiah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat. (persen)	50,00%	70,00%	76,92%	76,92%	61,54%	0,77%	1,25%	jumlah pustakawan 13, yang telah memiliki sertifikat 10

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Kearsipan, meliputi:							48,00%	
198	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, (persen)	100%	139,63%	100,0%	100%	100%	50%	50,00%	21 Berkas dari 2 PD
199	Peningkatan SDM pengelola kearsipan.	n.a	100	46	50	50 orang	23	46,00%	40 Berkas dari 5 PD
	Layanan Urusan Pilihan, meliputi:								
	Pariwisata, meliputi:							79,61%	
200	Kunjungan wisata,	50%	1841281	206,17%	184,03%	80%	70,9%	88,63%	
201	Lama kunjungan Wisata,	1.109.951 orang/tahun	0,5	0,5	2.300.392	1.300.000 orang/tahun	886.254,00	70,90%	
202	PAD sektor pariwisata. (Rp)	162.611.198.357	##########	##########	291.503.568.865	Rp229.597.520.443	182.070.731.364,00	79,30%	
	Pertanian, meliputi:							45,74%	
203	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB, (persen)	1,40%	1,37%	1,37%	1,31%	1,40%	0,00%	0,00%	Hasil penghitungan BPS ada pada triwulan III

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
204	Cakupan bina kelompok petani. (persen)	111,76%	100%	104,92%	102,13%	100%	91,48%	91,48%	
	Perdagangan, meliputi:							0,00%	
205	Ekspor Bersih Perdagangan (USD)	94.636.077	282.695.685	297.426.090	198.342.191	98.295.061	-	0,00%	Data diambil dari nilai ekspor Kota Depok berdasarkan data Surat Keterangan Asal (SKA) dan Data Deklarasi Asal Barang (DAB) dari Provinsi Jawa Barat masih dalam proses perhitungan
	Perindustrian, meliputi:								
	Jumlah pengawasan distribusi barang dan bahan pangan	24	48	-					
	Kontribusi PDRB Tersier	48,18	na	-			-		Data Kontribusi PDRB Tersier s.d TW I datanya belum tersedia, perhitungan dilakukan di akhir tahun
	Kelautan dan perikanan, meliputi:							12,12%	
206	Produksi perikanan (jumlah ekor benih ikan produksi)	46.730.356	49.102.535	50.406.960	50.303.778	54.667.905	13.253.220	24,24%	
207	Konsumsi ikan, (kg/kapita/thn)	17	20,2	24,78	28,05	20,2	0	0,00%	Hasil diperoleh pada Triwulan III

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Penunjang urusan, meliputi:								
	Perencanaan pembangunan, meliputi:							100,10%	
208	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA,	ada	-	-	ada	-	ada	100,00%	
209	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA,	-	ada	-	ada	-	ada	100,00%	
210	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA,	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100,00%	
211	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, (persen)	100%	n.a	99,47%	98,96%	100%	100,52%	101%	
212	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD, (persen)	100%	98,02%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	
	Keuangan, meliputi:							109,52%	
213	Opini BPK terhadap laporan keuangan,	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	
214	Persentase SILPA (persen)	9,26	15,93	15,00	7,629	9,43	6,21	65,85%	
215	Persentase SILPA terhadap APBD, (persen)	9,26	15,93	14,62	7,418	9,85	6,05	61,42%	
216	Persentase belanja pendidikan (20%),	29,61	0	23,12	21,51	20	27,55	137,75%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
217	Persentase belanja kesehatan (10%):	15,56	0	18,79	17,73	10	19,21	192,10%	
218	Penetapan APBD.	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100,00%	
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, meliputi:							239,97%	
219	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan,	n.a	0	18,08	26,56	20 Jam	147,67	738,35%	Diklat teknis Jumlah peserta 438 orang, 10.598 JP Diklat Struktural Jumlah peserta 88 orang, 79.724 JP PPPK Jumlah peserta 153 orang, 9.945 JP Diklat Fungsional Jumlah Peserta
220	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, (persen)	8,91	6,46	6,75	12,21	3,88	9,50	244,85%	Jumlah ASN per 30 Juni 2024 = 7144 orangASN yg mengikuti diklat formal = 438 orang (diklat teknis), 241 orang (diklat manajerial dan dasar)
221	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, (persen)	4,51	1,75	10,59	13,46	7,18	11,61	161,79%	Jumlah Pejabat Strukturtal = 758
222	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah,	28	30	32	31	29	31	106,90%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
223	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah, dan	2887	2756	2579	2172	2195	2143	97,63%	
224	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	3739	3658	3882	5014	5505	4970	90,28%	
	Penelitian dan pengembangan, meliputi:							0,00%	
225	Persentase implementasi rencana kelitbangan, (persen)	16%	100%	93%	35%	50%	-	0,00%	Data belum tersedia
226	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, (persen)	100%	92%	95%	70%	70%	-	0,00%	Data belum tersedia
227	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan SiDa, (persen)	NA	100%	100%	65%	70%	-	0,00%	Data belum tersedia
228	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Penerapan SIDa. (persen)	70%	78%	87%	70%	70%	-	0,00%	
	Pengawasan, meliputi:							408,89%	
229	Persentase tindak lanjut temuan, (persen)	90,64%	89,77%	88,78%	93,08%	91,80%	94,92%	103,40%	Pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan semester 2 tahun 2023
230	Persentase pelanggaran pegawai: (persen)	2,03	0,23	0,34	0,11	0,39	0,014	196,40%	Jumlah hukdis 1 (hukdis berat)Jumlah pegawai per 31 Maret 2024 = 7123

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
231	Jumlah temuan BPK.	20	11	21	7	22	20	109,09%	Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor : 28 B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024
	Sekretariat dewan, meliputi:							0,00%	
232	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota, (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	-	0,00%	
233	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan — Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perde, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	-	0,00%	
234	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dekumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. (persen)	100%	100%	100%	100%	100%	-	0,00%	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2020)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024			Keterangan (penjelasan singkat atas capaian kinerja)
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	Aspek Daya Saing Daerah							0,00%	
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (adhb) (milyar rupiah)	88.098,28	93.536,10	101.824	111.087,57	113.714, 39	-	0,00%	Data belum tersedia
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, (persen)	58,16		58,48	58,92	61,58	-	0,00%	Data belum tersedia
3	Rasio ketergantungan.	39,78	41,05	40,94	40,75	37,56	-	0,00%	

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Depok Triwulan II Th. 2023, Bappeda

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum pelaksanaan pembangunan Kota Depok berdasarkan capaian indikator kinerja daerah pada aspek pelayanan umum pada RPJMD Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, sebagai berikut :

a. Sangat tinggi : 5 urusan dan 4 unsur (25.71%) yaitu Urusan : Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Sosial; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Tenaga Kerja; Unsur: Perencanaan Pembangunan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan; Pengawasan;
b. Tinggi : 2 urusan (5,71%) yaitu : Urusan Perpustakaan dan Pariwisata;
c. Sedang : 1 urusan (2,86%), yaitu : Urusan Kesehatan.
d. Rendah : 1 Urusan (2,86%) , yaitu Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Sangat Rendah : 20 urusan dan 2 unsur (62,86%) yaitu; Urusan : Pendidikan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Kearsipan; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; Kelautan dan Perikanan.

   Unsur : Penelitian dan Pengembangan dan Sekretariat Dewan

;

2.7 Evaluasi Capaian Kinerja Realisasi Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Tingkat capaian realisasi Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14. Realisasi Janji Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terpilih Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
1	DANA 5 MILYAR PER-KELURAHAN	Program alokasi 5 Milyar per Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan sarana prasarana masyarakat kelurahan yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip swadaya masyarakat yang dilakukan dan diusulkan oleh stakholders lingkup kelurahan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat serta kegiatan yang bersifat top down yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dan Program sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	57 Kelurahan Kelurahan yg belum mencapai 5 M alokasi: 1. Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari 2. Kel.Sawangan Baru Kec. Sawangan 3. Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere 4. Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere 5. Kel. Beji Timur Kec. Beji 6. Kel. Cilodong Kec. Cilodong	63 kelurahan	49 kelurahan	77,78%	Urusan Kewilayahan	49 Kelurahan mencapai 5M alokasi 14 Kelurahan yg belum mencapai 5 M alokasi, yaitu : 1. Kel. Bojongsari Kec. Bojongsari 2. Kel. Bojongsari Baru Kec. Bojongsari 3. Kel. Curug Kec. Bojongsari 4. Kel. Krukut Kec. Limo 5. Kel. Pangkalan Jati Baru Kec. Cinere 6. Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung 7. Kel. Ratu Jaya Kec. Cipayung 8. Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung 9. Kel. Pondok Cina Kec. Beji 10. Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya 11. Kel. Cilodong Kec. Cilodong 12. Kel. Jatimulya Kec. Cilodong 13. Kel. Curug Kec. Cimanggis

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
									14. Kel. Leuwinanggung Kec. Tapos
2	5000 PENGUSAHA / STARTUP BARU DAN 1000 PEREMPUAN PENGUSAHA	Prioritas kegiatan untuk starup/Wira Usaha Baru dan perempuan kepala keluarga atau kurang mampu dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui kegiatan pelatihan dan fasilitasi oleh dinas terkait.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	2.114 orang	1800 WUB/Startup PP	1142 WUB/Startup PP	63,44%	Urusan KUKM, PPPA	
				(1764 orang Wirausaha Baru/ Startup; Pelatihan WUB yang sudah dilakukan adalah sosialisasi, pendaftaran pendamping dan peserta, seleksi pendamping dan peserta, pembekalan pendamping. Kendala yang dihadapi adalah tidak terinformasikannya pelatihan kepada masyarakat umum sehingga di awal pelaksanaan pelatihan menyebabkan kurangnya peserta namun tetap diupayakan menginformasikan kepada masyarakat melalui media dan para pendamping WUB sehingga jumlah peserta pelatihan dapat sesuai dengan target yang ditetapkan	1500	960	64%		sampai dengan TW II sudah dilaksanakan kegiatan Wirausaha Baru kepada 960 peserta WUB, Kegiatan WUB Startup akan dilaksanakan bulan Agustus
				350 orang Perempuan Pengusaha) Kegiatan P2WKSS sudah dilaksanakan pelatihan olahan pangan berbahan dasar ikan. Kegiatan P2WKSS berlokasi di	300	182	61%		sampai denga TW II sudah dilaksanakan kegiatan Wirausaha Baru kepada 182 peserta Perempuan Pengusaha (PP)

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
				Kelurahan Duren Seribu dan Bedahan. Jumlah peserta P2WKSS di Kel. Bedahan dan Kel. Duren Seribu masing-masing terdiri dari 25 peserta sebanyak 2 kelas; Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari. Kendala yang dihadapi adalah menentukan potensi wilayah yang ada di Kelurahan Bedahan. Berbeda dengan Kelurahan Duren Seribu potensinya sudah dapat diketahui diawal yaitu olahan ikan lele.					
			Program Pengembangan UMKM	1800 Unit Usaha	1150	0	0%		sampai dengan TW II dilaksanakan Kegiatan Gelar Produk yang terdiri dari HUT Depok, Lebaran Depok, dan APEKSI. Kegiatan pelatihan lanjutan dilaksanakan dibulan Juli (TW III)
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	93,47; 77,94			100,46% 104,13%		
			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100			#DIV/0!		

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
			Subkegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga memfasilitasi 350 orang anggota kelompok pekka menjadi calon wirausaha baru (perempuan pengusaha)			100%		
3	INSENTIF GURU HONORER DAN GURU SWASTA	Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta melalui pemberian honor setiap bulan kepada guru swasta dan honorer Sekolah Negeri yang merupakan kewenangan Pemda	Program Pengelolaan Pendidikan					Urusan Pendidikan	
			Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer						
			- Honor Guru Honorer SD	1.706	1.579	1.298	82%		TW II. Usulan dari setiap Satuan pendidikan belum lengkap
			- Honor Guru honorer SMP	1026	894	1138	127,29%		TW II. Usulan dari setiap Satuan pendidikan belum lengkap
			Peningkatan Kesejahteraan Guru swasta						TW II
			-Insentif Guru Swasta PAUD	5.632	6.056	5540	91,48%		TW II
			- Insentif Guru Kesetaraan	515	527	521	98,86%		TW II
			- Insentif Guru SD/MI swasta	3.850	4.160		0,00%		TW II.
			- Insentif Guru SMP/MTs swasta	2.452	3.280		0,00%		TW II.
4	ALUN-ALUN DI WILAYAH BARAT &	Pembangunan alun-laun berkonsep penghijauan atau hutan kota yang dapat	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1 unit konstruksi	1 Unit Konstruksi	-	97,60%	Urusan Lingkungan Hidup	2024 (TW2): mulai tahap pembangunan pondasi jembatan

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
	TAMAN HUTAN KOTA DI WILAYAH BARAT	dimanfaatkan untuk rekreasi, penelitian/observasi		1dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		TW2: supervisi 20% uang muka
5	INSENTIF PEMBIMBING ROHANI	Peningkatan kesejahteraan bagi para pembimbing rohani secara proporsional diberikan setiap bulan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para pembimbing rohani di Kota Depok dan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai keagamaan di Kota Depok	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	2000 Orang	2000 orang	2000 orang	25,00%	Pendukung Urusan/ Setda	Diberikan kepada 2000 orang sebanyak 4 kali dalam 1 Tahun (Per triwulan) Komposisi Pembimbing rohani : - Islam : : 1882 org (94,1%) - Kristen : 91 org (4,55%) - Katolik : : 16 org (0,80%) - Hindu : : 5 org (0,25%) - Budha : : 2 org (0,10%) - Konghuchu : : 4 org (0,20%) Pelaksanaan Pemberian Insentif pada Triwulan II belum dilaksanakan karena menindaklanjuti hasil dari BPK.
				- Islam : 1,880 org (94%)					
				- Kristen : 93 org (4,65%)					
				- Katolik : 16 org (0,80%)					
				- Hindu : 5 org (0,25%)					
				- Budha : 2 org (0,10%)					
				- Konghuchu : 4 org (0,20%)					
6	INSENTIF RT, RW DAN LPM	Peningkatan kesejahteraan dalam bentuk biaya operasional kepada RT, RW dan LPM SeKota Depok yang diberikan setiap bulan guna menunjang opersional RT, RW dan LPM dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kerja	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan				92,61%	Urusan Kewilayahan	pada tw 1 belum ada realisasi dari 5 Kecamatan (Bojongsari, Limo, Cinere, Cilodong, Tapos)
			RT	5382	5391	5030	93,30%		
			RW	928	930	860	92,47%		
			LPM	63	63	58	92,06%		
7	PUSAT OLAHRAGA DAN PUSAT UMKM	Pembangunan pusat olahraga disetiap Kecamatan yang diintegrasikan dengan sarana UMKM dengan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					Urusan Kepemudaan dan Olahraga,	Tahun 2024, pembangunan pusat olehraga dan UMKM tidak dialokasikan.

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
		meningkatkan fungsi sarana prasarana yang sudah tersedia serta mengintegrasikan dengan kegiatan ekonomi berupa sarana penunjang sarana olahraga yaitu sarana UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Rumkim, UMKM	
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)						
			Pembangunan Pusat Olahraga dan UMKM Wilayah 1					Disrumkim	
			Pembangunan Pusat Olahraga dan UMKM Wilayah 2					Disrumkim	
			Pembangunan Pusat Olahraga dan UMKM Wilayah 3					Disrumkim	
			Pembangunan Pusat Olahraga dan UMKM Wilayah 4					Disrumkim	
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan Pusat Olahraga dan UMKM Lapangan Irekap	1 unit (Lapangan Irekap-Cilodongi)				Disrumkim	
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan Pusat Olahraga dan UMKM Lapangan Kukusan	1 Unit (Lapangan Kukusan-Beji)				Disrumkim	

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan Pusat Olahraga dan UMKM Lapangan Pemuda	1 Unit (Lapangan Pemuda - Limo-Cinere)				Disrumkim	
8	WIFI GRATIS UNTUK MASYARAKAT	Pemasangan WiFi gratis disetiap RW sesuai kebutuhan masing-masing wilayah secara proporsional	Program Aplikasi Informatika	878 titik	1.110 titik	1.074 titik	96,76%	Urusan Kominfo	
9	SEKOLAH/MADRASAH NEGERI PER-KECAMATAN (SMPN/MTsN)	Pembangunan Sekolah/Madrasah Negeri pada setiap Kecamatan dengan upaya membangun sekolah baru atau meningkatkan kapasitas dan daya tampung sarana prasana yang tersedia sesuai kewenangan Pemda	Program Pengelolaan Pendidikan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Urusan Pendidikan dan Rumkim	
			Pengadaan lahan untuk gedung pendidikan	1 Area (Kec. Beji)	2 Area	2 Area	100,00%	Disrumkim	Gedung Pendidikan Wilayah Tapos dan Curug Cimanggis
			Pancoran Mas :						
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMPN 30 (Pancoran Mas)	1 unit bangunan Konstruksi				Disrumkim	
			Cipayung :						
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMPN 9 dan 29 (Cipayung)	1 Unit				Disrumkim	
			Cimanggis						
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMPN 27 (Cimanggis)	1 Unit				Disrumkim	

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
			Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Pemerintah dan Penataan Lingkungan Wilayah 2	1 Dokumen (perencanaan untuk pembangunan SMPN 13 Limo di tahun 2024)				Disrumkim	
			Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Pemerintah dan Penataan Lingkungan Wilayah 3	1 Dokumen (perencanaan untuk pembangunan SMPN 31 Cilodong di tahun 2024)				Disrumkim	
			Jasa Konsultansi Perencanaan Bangunan Pemerintah dan Penataan Lingkungan Wilayah 12	1 Dokumen (perencanaan untuk pembangunan SMPN 32 Sukmajaya di tahun 2024)				Disrumkim	
			Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas SMPN 13	1 Dokumen (kajian andalalin untuk pembangunan di tahun 2024)				Disrumkim	
			Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas SMPN 32	1 Dokumen (kajian andalalin untuk pembangunan di tahun 2024)				Disrumkim	
			Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas SMPN 34	1 Dokumen (kajian andalalin untuk pembangunan di tahun 2024)				Disrumkim	
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMPN 13 (Limo)		1 Unit	0 Unit	10,15%	Disrumkim	
			Pembangunan da Penataan Lingkungan SMPN 32 (Sukmajaya)		1 Unit	0 Unit	7,86%	Disrumkim	
			Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMPN 34 (Beji)		1 Unit	0 Unit	4,34%	Disrumkim	adanya uang muka

No.	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi 2023	Kinerja Tahun 2024			Penanggung Jawab	KETERANGAN
					Target	Realisasi	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	8 = (7/6)	*9*	*10*
10	POSYANDU DAN POSBINDU SETIAP RW	Pembangunan Posyandu disetiap RW difokuskan pada RW yang belum memiliki posyandu atau posyandu berlokasi di tempat tinggal Warga Masyarakat serta pemberian insentif kepada kader secara proporsional	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					Urusan Kewilayahan dan rumkim	
			Pengadaan Lahan Posyandu	112 area : 26 posyandu di Tapos,	107 Unit	71 Unit	48,60%	Disrumkim	71 Unit Posyandu : 18 Posyandu di Cimanggis
				12 Posyandu di sawangan 6 Posyandu di Bojongsari 7 posyandu di Sukmajaya 9 posyandu di Cimanggis 22 Posyandu di Cipayung 27 Posyandu di Pancoran Mas 2 Posyandu di Beji 2 Posyandu di Cilodong					17 Posyandu di Cilodong 8 Posyandu di Cinere 6 Posyandu di Beji 3 Posyandu di Bojongsari 5 Posyandu di Tapos 7 Posyandu di Cipayung 2 Posyandu di Pancoran Mas 2 Posyandu di Sawangan
			Pembangunan posyandu/posbindu (konstruksi/hibah)						3 Posyandu di Limo
			Insentif Kader Posyandu	10.460	10.490	2.464	23,49%	Kewilayahan	pada tw 1 belum ada realisasi dari 5 Kecamatan (Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cilodong, Tapos)
			Insentif Kader Posbindu	4.375	4.420	1.179	26,67%	Kewilayahan	pada tw 1 belum ada realisasi dari 5 Kecamatan (Bojongsari, Limo, Cinere, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cilodong, Tapos)

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kota Depok Triwulan II Th. 2023, Bappeda

Berdasarkan data pada tabel diatas, secara umum capaian kinerja pelaksanaan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yang terdiri dari 10 Janji, sebagai berikut :

1) Sangat tinggi : 4 janji (40%) dari jumlah total 10 janji;
2) Tinggi : 1 janji (10%) dari jumlah total 10 janji;
3) Sedang : 1 janji (10%) dari jumlah total 10 janji;
4) Rendah : 1 janji (10%) dari jumlah total 10 janji;
5) Sangat Rendah : 3 janji (30%), dari jumlah total 10 janji.

2.8 Evaluasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024, berdasarkan evaluasi Hasil RKPD Kota Depok s.d Triwulan II Tahun 2024 tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15 Evaluasi Hasil RKPD Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)		APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I		II											
							K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.381.852.231.283		779.119.500.540	2.667.498.907.416		153.046.290.361		655.643.294.546		808.689.584.907								
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					813.234.622.505		779.119.500.540	999.933.676.150		83.975.537.400		262.421.974.652,00		346.397.512.052				1.182.047.478.871				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									4.575.597.888.499			813.234.622.505			779.119.500.540	999.933.676.150		83.975.537.400		262.421.974.652,00		346.397.512.052		44,46%		1.995.282.101.376		44%		
1	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda*	100	%	2.243.602.643.457	91,05	%	378.192.164.115	100	%	411.667.629.840	535.725.914.150	2,30	64.801.166.671		155.911.305.941,00	2,30	220.712.472.612	2,30%	53,61%	2,30	979.311.858.898	2,30%	43,65%	Dinas Pendidikan	-
1	01	02			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Rata-rata capaian APM	89	%	2.329.224.823.517	88,25	%	434.973.930.390	88,5	%	367.318.889.800	464.074.781.100	7	19.174.370.729	22,00	106.501.568.711,00	29,17	125.675.939.440	32,96%	34,21%	29,17	1.015.408.276.817	33%	43,59%	Dinas Pendidikan	-
1	01	04			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	*Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV*	78	%	2.770.421.525	76	%	68.528.000	77	%	132.980.900	132.980.900	-	-	-	9.100.000,00	-	9.100.000	0,00%	6,84%	-	561.965.661	0,00%	20,28%	Dinas Pendidikan	-
					TOTAL DISDIK				1.248.547.257.350			813.234.622.505			779.119.500.540	999.933.676.150		83.975.537.400		262.421.974.652		346.397.512.052	11,75%	44,46%		1.994.436.589.436		160%		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.055.795.458.022			682.091.594.510			660.547.670.230	776.376.768.322		40.291.916.331		274.834.539.379,00		315.126.455.710		47,71%		994.085.155.176				
									3.055.795.458.022			682.091.594.510			660.547.670.230	776.376.768.322		40.291.916.331		274.834.539.379,00		315.126.455.710		47,71%		1.676.176.749.686		55%		
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota*	100	%	1.714.160.703.643	100	%	380.712.956.449	100	%	444.256.189.015	457.249.613.683	19,61	30.404.864.054	35,00	169.950.892.913,00	54,61	200.355.756.967	54,61%	45,10%	54,61	971.961.652.006	54,61%	56,70%	Dinas Kesehatan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	*Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar*	100	%	1.313.543.436.871	100	%	288.686.725.028	100	%	213.221.349.965	312.148.279.862	31	9.784.503.552	25	104.372.690.689,00	56,03	114.157.194.241	56,03%	53,54%	56,03	674.953.487.381	56,03%	51,38%	Dinas Kesehatan	Jumlah Layanan Kesehatan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan dibagi Layanan Kesehatan Minimal Bidang Kesehatan yang wajib disediakan di kali 100
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	*Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik Pemda sesuai standar*	90	%	5.590.028.586	69,34	%	1.780.526.140	80	%	729.047.600	2.517.994.900	65,40	34.318.600	44,00	106.883.200,00	109,40	141.201.800	136,75%	19,37%	109,40	12.434.014.581	121,56%	222,43%	Dinas Kesehatan	
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	*Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar*	73	%	4.160.662.281	59	%	854.667.402	64	%	520.654.200	516.854.200	59	47.503.485	10,00	80.867.600,00	69,00	128.371.085	107,81%	24,66%	69,00	1.467.674.037	94,52%	35,28%	Dinas Kesehatan	-
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	*Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat*	100	%	18.340.626.641	100	%	10.056.719.491	100	%	1.820.429.450	3.944.055.677	37	20.726.640	14	323.204.977,00	51,00	343.931.617	51,00%	18,89%	51,00	15.359.921.681	51,00%	83,75%	Dinas Kesehatan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						bidang kesehatan																								
					TOTAL DINKES				3.055.795.458.022			682.091.594.510			660.547.670.230	776.376.798.322		40.291.916.331		274.834.539.379		315.126.455.710	81,24%	47,71%		1.676.176.749.686				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							472.750.728.060			425.368.770.391	455.948.319.813		7.661.171.783		46.516.548.312,00		54.177.720.095				544.342.657.250				
									2.432.818.064.065			472.750.728.060			425.368.770.391	455.948.319.813		7.661.171.783		46.516.548.312,00		54.177.720.095		12,74%		1.017.093.385.310		42%		
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda*	100	%	260.357.386.298	99,998571	%	68.777.826.483	100	%	53.088.547.084	53.146.547.034	11,23	4.216.014.072	56	14.355.144.446,00	67,23	18.571.158.518	67,23%	34,98%	67	116.315.319.193	67,23%	44,68%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase genangan tertangani	80	%	353.337.452.703	69,1	%	73.525.503.580	74,55	%	75.936.996.202	77.234.468.194	-	1.129.868.866		7.046.274.177,00	-	8.176.143.043	0,00%	10,77%	-	164.225.803.307	0,00%	46,48%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Cakupan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	17,74	%	13.763.743.856	14,93	%	2.132.539.631	15,86	%	490.655.750	2.990.655.750	-	23.999.430	-	138.098.007,00	-	162.097.437	0,00%	33,04%	-	8.079.624.932	0,00%	58,70%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tinggal bersanitasi	99,6	%	108.268.675.505	98,93	%	25.573.755.245	99,15	%	5.580.104.000	7.494.524.600	-	408.514.760	0	1.718.893.526,00	-	2.127.408.286	0,00 %	38,12 %	-	43.675.559.930	0%	40,34%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase drainase dalam kondisi baik	90,14	%	453.587.086.652	94,614291	%	113.880.433.345	89,40	%	110.815.818.550	125.960.821.900	-	-		6.942.152.651,00	-	6.942.152.651	0,00 %	6,26%	-	220.094.531.659	0,00%	48,52%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	07			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	***Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi***	99,60	%	**18.510.874.236**				99,15	%	**13.267.316.750**	**13.295.716.750**	**-**	**-**	**14**	1.112.100.975,00	14,00	1.112.100.975	14,12%	8,38%	14,00	1.112.100.975	14,06 %	6,01%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	08			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase bangunan yang laik fungsi***	**68**	**%**	**1.265.126.250**	**-**	**%**	**-**	**64**	**%**	200.000.000	200.000.000	-	-		0	-	-	0,00 %	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	03	09			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	*Persentase Dokumen penataan bangunan yang dihasilkan*	100	%	2.500.000.000	50	%	396.300.000	60	%	465.000.000	465.000.000	-	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000	0,00 %		-	408.300.000	0,00%		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	-
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan dalam kondisi baik	69,2	%	1.205.050.785.880	71	%	184.974.752.482	68,68	%	160.846.538.905	170.485.530.417	-	1.839.342.728	71,00	14.585.108.331,00	71,00	16.424.451.059	103,38 %	10,21 %	71,00	453.681.126.214	102,60 %	37,65%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkualitas baik	85	%	12.057.096.188	63,529412	%	906.560.909	70	%	1.213.817.000	1.211.085.450	-	25.432.215	30	148.475.351,00	30,00	173.907.566	42,86%	14,33 %	30	2.477.664.351	35,29 %	20,55%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG**	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	74,66	%	22.630.710.733	99,24	%	2.583.056.385	73,66	%	3.463.976.150	3.463.969.718	-	17.999.712	45	458.300.848,00	45,00	476.300.560	61,09%	13,75%	45	7.023.354.749	60,27%	31,03%	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
					TOTAL PUPR				472.750.728.060			425.368.770.391			455.948.319.813		7.661.171.783		46.516.548.312		54.177.720.095	30,51%	12,74%		1.017.093.385.310				
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				320.426.323.883			311.138.250.639			333.707.276.862		4.717.327.316		37.066.486.683,00		41.783.813.999				236.057.870.361				
									1.627.319.501.832			320.426.323.883			311.138.250.639	333.707.276.862		4.717.327.316		37.066.486.683,00		41.783.813.999		13,43%		556.484.194.244		34%		
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda*	100	%	1.262.248.516.029	95,2	%	223.353.137.884	100	%	237.192.897.219	257.581.676.632	18,55	3.271.457.348	19,18	21.670.948.929,00	37,73	24.942.406.277	37,73%	10,52%	37,73	389.573.604.952	37,73%	30,86%	Dinas Perumahan Dan Permukiman	-
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana	1,71	%	3.718.460.000	0,185	%	921.951.881	1,24	%	1.058.987.850	1.058.987.850	0,185	124.495.174	0,195	299.945.833,00	0,195	424.441.007	15,69%	40,08%	0,19	2.390.507.532	11,37%	64,29%	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani	100	%	21.551.725.000	90,65	%	1.272.598.301	92,8	%	3.791.178.100	3.290.491.200	90,56	38.434.000	-	336.143.450,00	90,56	374.577.450	98%	9,88%	90,56	2.855.679.254	90,56%	13,25%	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase Jumlah RTLH yang tertangani	70,45	%	99.075.000.000	78,08	%	56.064.864.830	62,54	%	38.406.090.000	38.406.090.000	78,08	40.000.000	80,25	8.677.584.000,00	80,25	8.717.584.000	128,32%	22,70%	80,25	84.659.458.237	113,91%	85,45%	Dinas Perumahan Dan Permukiman	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani	100	%	240.725.800.803	57,45	%	38.813.770.987	71,57	%	30.689.097.470	33.370.031.180	58,03	1.242.940.794	63,64	6.081.864.471,00	63,64	7.324.805.265	88,91%	23,87%	63,64	77.004.944.269	63,64%	31,99%	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				564.284.834.785			134.669.267.478			48.273.499.785	103.756.082.414		77.778.657.124	-	10.682.304.643,00		88.460.961.767				184.831.168.162		33%		
									564.284.834.785			134.669.267.478			48.273.499.785	103.756.082.414		77.778.657.124	-	10.682.304.643,00		88.460.961.767		183,25%		319.500.435.640		57%		
2	**10**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	564.284.834.785	109,91	%	134.669.267.478	100	%	48.273.499.785	103.756.082.414	48,62	77.778.657.124	17,38	10.682.304.643,00	66,00	88.460.961.767	66,00%	183,25%	66,00	319.500.435.640	66,00%	56,62%	Dinas Perumahan Dan Permukiman	
					TOTAL RUMKIM							455.095.591.361			359.411.750.424	437.463.359.276		82.495.984.440		47.748.791.326		130.244.775.766		36,24%		875.984.629.884				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				249.675.944.965			65.899.246.217			35.442.455.121	72.176.821.867		12.252.773.320		24.800.605.058,00		37.053.378.378				100.270.597.970		40%		
									249.675.944.965			34.250.100.802			35.442.455.121	35.665.845.183		6.543.504.851		11.597.612.888,00		18.141.117.739		51,18%		85.943.320.051		34%		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda*	100	%	134.849.898.593	100	%	16.728.687.702	100	%	16.965.802.371	16.892.685.683	17	3.331.915.211	-	5.660.510.831,00	17,47	8.992.426.042	17,47%	53,00%	17,47	41.141.130.548	17,47%	30,51%	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	*Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	63,9	%	114.826.046.372	62,6	%	17.521.413.100	62,74	%	18.476.652.750	18.773.159.500	15,00	3.211.589.640	20,00	5.937.102.057,00	35,00	9.148.691.697	55,79%	49,51%	35,00	44.802.189.503	54,77%	39,02%	Satuan Polisi Pamong Praja	-
					TOTAL SATPOL PP				249.675.944.965			34.250.100.802			35.442.455.121	35.665.845.183		6.543.504.851		11.597.612.888		18.141.117.739		51,18%		85.943.320.051		34%		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										34.802.301.011														
									196.379.251.892			31.649.145.415			34.802.301.011	36.570.976.684		5.709.268.469		13.202.992.170,00		18.912.260.639		54,34%		80.226.524.136		41%		
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	**122.913.664.149**	100	%	19.871.759.347	100	%	22.159.795.411	24.243.432.134	85	3.934.193.926	0	8.467.650.316,00	84,60	12.401.844.242	52,24%	55,97%	84,60	50.797.518.385	84,60%	41,33%	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100	%	10.680.750.493	100	%	2.110.072.000	100	%	2.977.312.000	2.709.120.950	88	362.124.850	-	1.312.720.800,00	88,01	1.674.845.650	88,01%	56,25%	88,01	4.466.861.250	88,01%	41,82%	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHA PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Presentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%	62.784.837.250	100	%	9.667.314.068	100	%	9.665.193.600	9.618.423.600	96	1.412.949.693	-	3.422.621.054,00	95,61	4.835.570.747	95,61%	50,03%	95,61	24.962.144.501	95,61%	39,76%	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					TOTAL DAMKAR				196.379.251.892			31.649.145.415			34.802.301.011	36.570.976.684		5.709.268.469		13.202.992.170		18.912.260.639		54,34 %		80.226.524.136		41%		
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				102.591.111.766			27.310.396.626			29.146.429.043	29.296.014.402		4.147.564.211	-	10.003.140.462,00		14.150.704.673				41.832.166.376		41%		
									102.591.111.766			27.310.396.626			29.146.429.043	29.296.014.402		4.147.564.211	-	10.003.140.462,00		14.150.704.673		48,55 %		69.142.563.002		67%		
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan Pelayanan penunjang Urusan Pemda*	100	%	47.992.435.437	100	%	9.299.570.060	100	%	10.293.293.093	10.359.959.602	21	2.082.666.807	34	3.272.476.251,00	55,00	5.355.143.058	55,00%	52,03 %	55,00	22.412.395.104	55,00 %	46,70%	Dinas Sosial	-
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	*Persentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial*	95,73	%	11.354.989.882	94,02	%	2.251.291.900	94,2	%	1.810.299.550	1.708.688.500	92,42	214.295.890	94,10	644.197.010,00	94,10	858.492.900	99,89%	47,42 %	94,10	8.446.002.150	98,30 %	74,38%	Dinas Sosial	-
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	*Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar*	100	%	7.242.164.920	100	%	1.245.203.152	100	%	1.585.472.100	1.517.587.800	100,00	89.492.002	-	510.289.287,00	100,00	599.781.289	100,00 %	37,83 %	100,00	2.953.196.587	100,00 %	40,78%	Dinas Sosial	-
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	*Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial*	52,5	%	31.272.014.739	66,71	%	13.476.330.137	50,50	%	14.203.282.500	14.484.671.700	23,12	1.694.611.380	77,79	5.323.725.570,00	77,79	7.018.336.950	154,04 %	49,41 %	77,79	33.249.968.980	148,17 %	106,32 %	Dinas Sosial	-
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	*Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial*	100	%	3.790.583.038	100	%	759.853.504	100	%	988.162.000	961.837.000	100	31.256.776	-	177.845.560,00	100,00	209.102.336	100,00 %	21,16 %	100,00	1.581.172.832	100,00 %	41,71%	Dinas Sosial	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	**06**	**07**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Cakupan TMP yang terpelihara	100	%	938.923.750	100	%	278.147.873	100	%	265.919.800	263.269.800		35.241.356	100	74.606.784,00	100,00	109.848.140	100,00 %	41,31 %	100,00	499.827.349	100,00 %	53,23%	Dinas Sosial	-
					TOTAL DINSOS				102.591.111.766			27.310.396.626			29.146.429.043	29.296.014.402		4.147.564.211		10.003.140.462		14.150.704.673	101,49 %	48,55 %		69.142.563.002		67%		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							649.982.394.904			14.679.118.012	614.723.345.044		142.976.535.620	-	139.806.735.117,00		282.783.270.737								
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				84.931.787.359			12.681.499.023			14.841.511.812	19.197.363.100		2.096.023.289	-	4.603.215.641,00		6.699.238.930				42.943.309.851		51%		
									84.931.787.359			12.681.499.023			14.841.511.812	19.197.363.100		2.096.023.289	-	4.603.215.641,00		6.699.238.930		45,14 %		31.162.023.902		37%		
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	59.657.170.350	100	%	7.614.860.413	100	%	8.980.179.712	9.615.196.450		1.790.130.569	50	3.138.688.301,00	50,00	4.928.818.870	50,00%	54,89 %	50	20.239.645.494	50,00 %	33,93%	Dinas Tenaga Kerja	-
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100	%	674.221.800	140	%	42.830.000	100	%	110.875.750	110.875.600	-	-	-	0	-	-	0,00 %	0,00%	-	145.402.000	0,00%	21,57%	Dinas Tenaga Kerja	-
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	72	%	13.004.561.470	39,48	%	3.274.945.030	66	%	3.591.971.550	7.622.827.250	55	128.802.280	46,00	982.777.280,00	55,00	1.111.579.560	83,33%	30,95 %	55,00	6.092.177.478	76,39 %	46,85%	Dinas Tenaga Kerja	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan	40	40 %	7.034.334.024	44,64	%	1.166.809.222	40	%	1.123.285.250	968.269.800	-	33.671.080	38,39	217.046.620,00	38,39	250.717.700	95,98%	22,32 %	38,39	3.057.703.982	95,98 %	43,47%	Dinas Tenaga Kerja	
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Kasus yang diselesaikan	100	100%	4.561.499.715	100	%	582.054.358	100	%	1.035.199.550	880.194.000	-	143.419.360	60,00	264.703.440,00	60,00	408.122.800	60,00%	39,42 %	60,00	1.627.094.948	60,00 %	35,67%	Dinas Tenaga Kerja	-
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.166.045.600			82.707.880			60.136.000	57.354.000		-	-	0		-				399.015.040		0		
									1.166.045.600			82.707.880			60.136.000	57.354.000		-	-	0		-		0,00%		240.861.460		21%		
3	**32**	**03**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkat-kan	100	%	1.166.045.600	-	%	82.707.880	100	%	60.136.000	57.354.000	-	-	0	0	-	-	0,00 %	0,00%	-	240.861.460	0,00%	20,66%	Dinas Tenaga Kerja	
					TOTAL DISNAKER							12.764.206.903			14.901.647.812	19.254.717.100		2.096.023.289		4.603.215.641		6.699.238.930		44,96 %		31.402.885.362				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										14.566.883.862															
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				109.751.382.528			13.559.994.070			14.566.883.862	14.939.664.195		2.247.444.557	-	4.414.049.499,00		6.661.494.056				47.135.865.712		43%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									109.751.382.528			13.559.994.070			14.566.883.862	14.939.664.195		2.247.444.557	-	4.414.049.499,00		6.661.494.056		45,73 %		33.635.026.319		31%		
2	08	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan Pelayananan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	83.623.670.576	94,3	%	8.702.866.451	100	%	10.367.291.600	10.562.072.845	30	1.961.078.363	40	3.416.607.425,00	70,00	5.377.685.788	70,00%	51,87 %	70,00	22.413.713.835	70,00 %	26,80%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
2	08	02			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Indeks Pembangunan Gender;Indeks Pemberdayaan Gender	93,05 % (IPG); 75,2 % (IDG)		3.836.184.890	93.477 7.94	% (IPG); % (IDG)	993.603.299	93,0474,88	% (IPG); % (IDG)	735.652.400	734.094.400	-	75.957.650	93	198.279.750,00	93,00	274.237.400	102,31 %	37,28 %	93	2.054.987.424	0,00%	53,57%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
2	08	03			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan	100	%	1.630.658.206	100	%	328.969.500	100	%	297.432.150	465.229.150	-	17.033.500	18	118.234.500,00	18,00	135.268.000	18,00%	45,48 %	18	807.605.800	18,00 %	49,53%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**08**	**04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan	100	%	7.256.742.711	100	%	481.350.600	100	%	482.805.400	452.155.400	-	3.637.500	20	402.500,00	20,00	4.040.000	20,00%	0,84%	20,00	899.732.600	20,00%	12,40%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak	100	%	1.788.505.733	100	%	170.400.300	100	%	170.686.300	167.386.300	-	-	5	1.533.300,00	5,00	1.533.300	5,00%	0,90%	5,00	387.494.250	5,00%	21,67%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Pencapaian Strata Kota Layak Anak	Utama		4.909.899.554	Nindya	kategory	1.368.620.811	Nindya	Satuan	1.418.703.762	1.271.749.850	-	78.074.852	-	384.443.368,00	-	462.518.220	100,00%	32,60%	-	3.314.203.006	80%	67,50%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
2	**08**	**07**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100	%	6.705.720.858	100	%	1.514.183.109	100	%	1.094.312.250	1.286.976.250	100	111.662.692	-	294.548.656,00	100,00	406.211.348	100,00%	37,12%	100,00	3.757.289.404	100,00%	56,03%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				50.338.680.765			18.950.856.982			4.153.723.700	18.649.889.400		200.049.536	-	2.673.538.579,00		2.873.588.115						14.686.358.709		0		
									50.338.680.765			18.950.856.982			5.230.388.700	18.649.889.400	-	200.049.536	-	2.673.538.579,00		2.873.588.115		54,94 %		33.637.215.691		67%		
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Total Fertility Rate (TFR)	2,1		9.185.259.626	1,99	%	678.174.420	2,1	%	537.415.100	758.735.500	-	9.974.560	1,95	144.651.745,00	1,95	154.626.305	92,86%	28,77 %	1,95	1.630.012.075	107,14 %	17,75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Angka Perceraian	3000		23.790.591.562	2847	Angka	11.806.350.000	3000	Angka	3.433.103.400	13.436.779.700	578	127.375.416		1.763.542.124,00	578,00	1.890.917.540	19,27%	55,08 %	578	20.619.526.916	0,00%	86,67%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	belum rilis dari Pengadilan agama
					TOTAL DP3AP2KB							32.510.851.052			19.797.272.562	33.589.553.595		2.447.494.093		7.087.588.078		9.535.082.171		48,16 %		67.272.242.010				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										15.897.043.057															
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							13.862.908.326			15.897.043.057	16.214.853.210		3.429.767.718		5.150.042.042,00		8.579.809.760				21.348.689.427				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									83.688.011.582			13.862.908.326			15.897.043.057	16.214.853.210		3.429.767.718		5.150.042.042,00		8.579.809.760		53,97%		35.211.597.753		42%		
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda*	100	%	79.132.343.331	100	%	12.553.846.546	100	%	15.159.249.007	15.527.589.460	31,39	3.355.183.288	17,00	4.995.494.900,00	48,39	8.350.678.188	48,39%	55,09%	48,39	32.680.699.621	48,39%	41,30%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	90	%	4.085.989.595	89,3	%	1.267.944.880	90	%	637.532.200	587.018.750	-	73.944.430	-	113.687.142,00	-	187.631.572	0,00%	29,43%	-	2.363.709.882	0,00%	57,85%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100	%	248.653.406	100	%	24.500.000	100	%	33.822.850	33.806.000	-	-	0	0	-	-	0,00%	0,00%	-	69.275.000	0,00%	27,86%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase uji keamanan pangan	100	%	221.025.250	100	%	16.616.900	100	%	66.439.000	66.439.000	-	640.000		40.860.000,00	-	41.500.000	0,00%	62,46%	-	97.913.250	0,00%	44,30%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							39.363.946.769			4.187.562.100	47.440.006.422		5.555.715.289		12.113.388.746,00		17.669.104.035								
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.984.160.783			3.361.383.999			1.148.398.700	6.148.058.800		92.857.380		437.474.762,00		530.332.142		5.339.870.139		67%				
									7.984.160.783			3.361.383.999			1.148.398.700	6.148.058.800		92.857.380		437.474.762,00		530.332.142		46,18%		5.339.870.139		67%		
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN**	Persentase penyediaan data	100	%	55.256.313	100	%	10.017.000	100	%	10.016.900	10.016.900	25	2.000.000	25	3.200.000,00	50,00	5.200.000	50,00%	51,91%	50,00	38.863.100	50,00%	70,33%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					PERIKANAN TANGKAP																									
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase rata-rata (pertahun) peningkatan produksi perikanan	10,85	%	6.814.738.310	2,01	%	3.217.586.647	2	%	1.019.612.000	6.031.168.100	-	71.915.880	-	390.102.226,00	-	462.018.106	0,00 %	45,31 %	-	5.016.495.151	0,00%	73,61%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP	100	%	1.114.166.160	100	%	133.780.352	100	%	118.769.800	106.873.800	-	18.941.500		44.172.536,00	-	63.114.036	0,00 %	53,14 %	-	284.511.888	0,00%	25,54%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				26.240.197.901			5.075.262.303			3.039.163.400	7.244.697.800		436.400.761	-	1.014.436.062,00		1.450.836.823				11.266.719.634		#VALUE!		
									26.240.197.901			5.075.262.303			3.039.163.400	7.244.697.800		436.400.761	-	1.014.436.062,00		1.450.836.823		47,74 %		11.266.719.634		43%		
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1	%	3.270.884.379	0,97	%	1.484.701.355	1	%	461.938.950	758.838.700	-	7.097.000	0,00	182.411.262,00	-	189.508.262	0,00 %	41,02 %	-	2.752.990.729	0,00%	84,17%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase Layanan RPH	100	%	13.430.907.583	100	%	2.234.235.409	100	%	1.561.398.400	1.523.094.400	25	330.898.961	25	561.704.415,00	50,00	892.603.376	50,00%	57,17 %	50,00	4.957.400.973	50,00 %	36,91%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	100	%	5.570.464.064	100	%	979.932.334	100	%	720.844.000	663.505.000	25	88.881.100	25	261.460.385,00	50,00	350.341.485	50,00%	48,60%	50,00	2.499.343.543	50,00%	44,87%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
3	**27**	**06**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase dokumen yang tersusun	100	%	100.000.000	100	%	49.281.000									-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	100	49.500.000	100,00%	49,50%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase penambahan Jumlah Kelompok	100	%	3.867.941.875	64,3	%	327.112.205	62,96	%	294.982.050	4.299.259.700		9.523.700	-	8.860.000,00	-	18.383.700	0,00%	6,23%	-	958.203.389	0,00%	24,77%	Dinas Ketahanan Panga Pertanian Dan Perikanan	-
					TOTAL DKP3							22.299.554.628			20.084.605.157	29.607.609.810		3.959.025.859		6.601.952.866		10.560.978.725		52,58%		51.768.906.526				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				1.007.084.072.211			211.410.899.056			178.388.134.750	191.786.151.819		22.900.196.716		42.223.184.524,00		65.123.381.240				391.968.429.337		39%		
									1.007.084.072.211			211.410.899.056			178.388.134.750	191.786.151.819		22.900.196.716				22.900.196.716		12,84%		391.968.429.337		39%		
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	93.574.962.701	100	%	15.456.617.893	100	%	17.436.010.000	18.093.209.519	25	3.633.653.467	50	5.202.037.439,00	75,00	8.835.690.906	75,00%	50,67%	75,00	39.360.813.270	75,00%	42,06%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan Perencanaan LH	100	%	6.786.000.000	90	%	1.081.436.740	100	%	1.149.198.300	974.061.750	30	38.566.360	40	75.599.540,00	70,00	114.165.900	70,00%	9,93%	70,00	2.166.705.402	70,00 %	31,93%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Cakupan pemenuhan baku mutu	IKA = 51,79 IKU = 65,88	IKA = 51,67 IKU = 65,80	**18.228.715.200**	IKA = 52,02 IKU = 74,77		2.203.106.643	IKA = 51,73 IKU =65,84		2.497.738.000	2.203.865.000	-	175.099.145	-	401.148.934,00	-	576.248.079	107,73 %	23,07 %	-	4.963.508.132	110,10 %	27,23%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Nilai IKTL (indeks kualitas tutupan lahan)	35,879	35,875	**172.874.885.000**	36,512	poin	66.400.927.727	35,877	point	34.700.000.000	34.427.053.600	-	2.524.343.271		4.894.998.944,00	-	7.419.342.215	0,00 %	21,38 %	-	93.655.784.585	0,00%	54,18%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalianLB 3	52	%	12.610.510.000	55	Pelaku Usaha	299.755.220	50	%	502.700.000	381.907.900	12	40.464.700	35,00	99.436.270,00	47,00	139.900.970	94,00%	27,83 %	47,00	669.432.362	90,38 %	5,31%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan	90	%	1.734.700.000	70	%	258.209.960	80	%	399.849.000	267.248.000	20	7.996.890	65	112.856.335,00	85,00	120.853.225	106,25 %	30,22 %	85,00	660.060.985	94,44 %	38,05%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**11**	**08**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKA PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase komunitas aktif	87,27	%	6.577.875.000	86,8	%	732.203.040	86,23	%	1.143.999.250	972.600.950	12,98	141.117.030	76,00	104.820.545,00	88,98	245.937.575	103,19 %	21,50 %	88,98	2.049.335.875	101,96 %	31,15%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase peran serta masarakat dalam lomba bidang LH	31,15	%	825.750.000	28,57	%	459.742.000	27,87	%	400.000.000	390.500.000	-	23.850.000	19,00	240.615.000,00	19,00	264.465.000	68,17%	66,12 %	19,00	871.358.200	61,00 %	105,52 %	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase jumlah kasus yang tertangani	70	%	3.700.000.000	64	%	387.245.920	66	%	495.383.000	479.933.000	41	13.909.780	91	59.164.670,00	132,00	73.074.450	200,00 %	14,75 %	132,00	925.633.530	188,57 %	25,02%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase penanganan sampah	76,1	%	690.170.674.310	71,31	%	124.131.653.913	76,3	%	119.663.257.200	133.595.772.100	-	16.301.196.073		31.032.506.847,00	-	47.333.702.920	0,00 %	39,56 %	-	288.868.981.520	0,00%	41,85%	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	-
					TOTAL DLHK							211.410.899.056			178.388.134.750	191.786.151.819		22.900.196.716		42.223.184.524		65.123.381.240		36,51 %		434.191.613.861				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										23.998.995.350															
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				160.356.051.484			25.729.253.017			23.998.995.350	23.922.388.653		4.176.117.096		7.439.678.522,00		11.615.795.618				60.849.691.486		38%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									160.356.051.484			25.729.253.017			23.998.995.350	23.922.388.653		4.176.117.096		7.439.678.522,00		11.615.795.618		48,40%		60.849.691.486		38%		
2	12	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	129.543.347.047	100	%	19.056.616.620	100	%	18.521.141.200	18.585.643.953	35	3.756.627.281	18,00	5.419.256.857,00	52,70	9.175.884.138	52,70%	49,54%	52,70	45.370.741.597	52,70%	35,02%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
2	12	02			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan Identitas Kependudukan	98,9	%	12.782.632.974	85,37	%	3.857.513.094	89,7	%	2.861.494.900	2.720.389.900	85,96	195.821.020		1.300.213.730,00	85,96	1.496.034.750	95,83%	52,28%	85,96	9.100.046.984	86,92%	71,19%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
2	12	03			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Layanan Pencatatan Sipil	100	%	5.804.047.873	100	%	1.081.402.634	100	%	1.053.793.850	1.053.793.850	30,00	118.094.160	30	309.111.240,00	60,00	427.205.400	60,00%	40,54%	60,00	2.709.441.934	60,00%	46,68%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
2	12	04			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Optimalisasi SIAK Pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	%	11.533.283.388	100	%	1.634.000.670	100	%	1.462.565.400	1.462.560.950	27,33	105.574.635	21,00	411.096.695,00	48,33	516.671.330	48,33%	35,33%	48,33	3.457.933.122	48,33%	29,98%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
2	12	05			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok	100	%	692.740.202	100	%	99.719.999	100	%	100.000.000	100.000.000	-	-		0	-	-	0,00%	0,00%	-	211.527.849	0,00%	30,53%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-
					TOTAL DISDUKCAPIL				160.356.051.484			25.729.253.017			23.998.995.350	23.922.388.653		4.176.117.096		7.439.678.522		11.615.795.618	51,37%	48,40%		60.849.691.486				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										87.192.414.800																
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				#VALUE!			80.602.282.997			87.192.414.800	87.385.702.989		10.906.296.734		24.878.442.120,00		35.784.738.854				213.538.667.132		#VALUE!		
									#VALUE!			80.602.282.997			87.192.414.800	87.385.702.989		10.906.296.734		24.878.442.120,00		35.784.738.854		41,04 %		213.538.667.132		#VALUE!		
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	136,312,665,300	100	%	19.651.405.634	100	%	26.173.154.500	26.204.029.639	25	3.997.938.097		8.384.354.130,00	25,00	12.382.292.227	25,00%	47,31 %	25,00	52.211.741.719	25,00 %	#VALUE!	Dinas Perhubungan	-
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Kecepatan rata-rata	28	km/ja	366.358.167.463	26,86	km/ja	60.852.577.363	26,5	km/ja	60.919.525.300	61.082.490.200	25,91	6.908.358.637		16.494.087.990,00	25,91	23.402.446.627	97,77%	38,42 %	25,91	160.739.917.663	92,54 %	43,88%	Dinas Perhubungan	-
2	**15**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	Persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan perkeretaapian	100	%	700.000.000	100	%	98.300.000	100	%	99.735.000	99.183.150	25,00	-			25,00	-	25,00%	0,00%	25,00	587.007.750	25,00 %	83,86%	Dinas Perhubungan	-
					TOTAL DISHUB							80.602.282.997			87.192.414.800	87.385.702.989		10.906.296.734		24.878.442.120		35.784.738.854	61,39%	41,04 %		213.538.667.132				
2					URUSAN PEMERINTAHAN																									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				289.053.744.449			32.723.990.787			38.352.250.257	37.372.791.557		3.194.569.484		8.763.858.947,00		11.958.428.431				80.714.232.714		28%		
									289.053.744.449			32.723.990.787			38.352.250.257	37.372.791.557		3.194.569.484		8.763.858.947,00		11.958.428.431		31,18 %		80.714.232.714		28%		
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	84.932.225.349	100	%	9.803.145.103	100	%	12.775.781.677	13.152.692.377	25	2.622.829.324		4.222.364.432,00	25,00	6.845.193.756	25,00%	53,58 %	25,00	25.764.165.395	25,00 %	30,33%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
2	**16**	**02**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase aksesibilitas informasi publik	100	%	59.342.653.800	100	%	6.975.215.110	100	%	5.257.810.500	4.732.014.200	37,00	483.690.389		1.175.819.489,00	37,00	1.659.509.878	37,00%	31,56 %	37,00	13.864.951.988	37,00 %	23,36%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	Cakupan layanan teknologi informatika	100	%	144.778.865.300	100	%	15.945.630.574	100	%	20.318.658.080	19.488.084.980	25,00	88.049.771	50	3.365.675.026,00	75,00	3.453.724.797	75,00%	17,00 %	75,00	41.085.115.331	75,00 %	28,38%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				10.317.900.000			1.158.079.220			1.177.177.350	1.096.044.250		58.512.800		418.550.600,00		477.063.400				2.988.512.788		29%		
									10.317.900.000			1.158.079.220			1.177.177.350	1.096.044.250		58.512.800		418.550.600,00		477.063.400		40,53 %		2.988.512.788		29%		
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data sektoral yang tersedia	60	%	10.317.900.000	30	%	1.158.079.220	40	%	1.177.177.350	1.096.044.250	35,00	58.512.800	35,00	418.550.600,00	70,00	477.063.400	175,00 %	40,53 %	70,00	2.988.512.788	116,67 %	28,96%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				6.041.300.000			2.112.655.600			573.633.850	572.993.500		79.309.500		-		79.309.500				2.668.389.216		44%		
									6.041.300.000			2.112.655.600			573.633.850	572.993.500		79.309.500		-		79.309.500		13,83 %		2.668.389.216		44%		
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	100	%	6.041.300.000	70	%	2.112.655.600	80	%	573.633.850	572.993.500	25,00	79.309.500	70	-	95,00	79.309.500	118,75 %	13,83 %	95,00	2.668.389.216	95,00 %	44,17%	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-
					TOTAL DISKOMINFO							35.994.725.607			40.103.061.457	39.041.829.307		3.332.391.784		9.182.409.547		12.514.801.331		31,21 %		86.371.134.718				
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				162.098.759.334			29.231.216.957			32.676.618.974	34.465.295.974		2.080.019.078		6.346.635.398,00		8.426.654.476				27.830.092.728				
									162.098.759.334			29.231.216.957			32.676.618.974	34.465.295.974		2.080.019.078	-	6.346.635.398,00		8.426.654.476		25,79 %		57.061.309.685		35%		
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	56.587.533.834	99,37	%	7.837.758.545	100	%	10.145.556.874	10.074.952.724	19,82	1.555.889.558	44,00	2.951.915.459,00	63,82	4.507.805.017	63,82%	44,43 %	63,82	19.074.089.433	63,82 %	33,71%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	-
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	100	%	250.000.000		%		83,33	%	49.999.800	49.999.700	-	-	97	48.604.080,00	97,00	48.604.080	116,40 %	97,21 %	97,00	48.604.080	97,00 %	19,44%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Presentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	83,64	%	3.000.000.000	31,40	%	420.647.030	65,45	%	345.344.800	290.344.800		73.475.140	47,00	63.960.760,00	47,00	137.435.900	71,81%	39,80%	47,00	863.609.370	56,19%	28,79%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	-
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Presentase Tingkat Kesehatan Koperasi KSP USP	36,36	%	1.250.000.000	36,36	%	229.500.570	28,79	%	243.099.700	183.099.500	-	13.943.840	38,00	56.795.760,00	38,00	70.739.600	131,99%	29,10%	38	458.794.262	104,51%	36,70%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi berkualitas dibagi total jumlah koperasi.
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Presentase peserta pelatihan	100	%	3.550.000.000	100,00	%	532.994.450	100,00	%	1.049.999.950	549.999.350	21,21	106.194.920	26,00	41.807.880,00	47,21	148.002.800	47,21%	14%	47,21	1.675.781.403	47,21%	47,21%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	-
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase koperasi modern	15,15	%	14.257.236.000	1,21	%	1.585.269.810	9,09	%	2.865.338.850	1.480.338.400	-	75.069.200	14,00	141.774.260,00	14,00	216.843.460	154,02%	7,57%	14,00	3.220.717.059	92,41%	22,59%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	-
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase wirausaha baru	100	%	50.143.989.500	76,54	%	10.828.105.517	100	%	11.070.652.950	10.870.652.950	-	182.134.736	23	2.395.909.260,00	23,00	2.578.043.996	23,00%	23,29%	23,00	17.916.337.027	23,00%	35,73%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	
2	17	08			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase usaha mikro binaan yang naik omzet	15,81	%	33.060.000.000	15,24	%	7.796.941.035	15,26	%	6.906.626.050	10.965.908.550	-	73.311.684	6	645.867.939,00	6,00	719.179.623	39,32%	10,41%	6	13.803.377.051	37,95%	41,75%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	-
					TOTAL DKUM							29.231.216.957			32.676.618.974	34.465.295.974		2.080.019.078		6.346.635.398		8.426.654.476	75,88%	25,79%		57.061.309.685				
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				110.795.986.016			23.646.823.592			18.937.303.897	19.439.019.735		2.941.818.203		5.437.066.142,00		8.378.884.345				25.189.593.427		23%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									110.795.986.016			23.646.823.592			18.937.303.897	19.439.019.735		2.941.818.203		5.437.066.142,00		8.378.884.345		44,25%		48.836.417.019		44%		
2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	94.259.563.785	100	%	20.856.143.282	100	%	16.226.219.897	16.399.780.185	20	2.590.118.023	50	4.623.342.672,00	70,00	7.213.460.695	70,00%	44,46%	70,00	41.996.186.425	70,00%	44,55%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
2	18	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan	100	%	1.593.037.500	100	%	287.155.000	100	%	304.610.000	253.890.000	-	-	-	3.720.000,00	-	3.720.000	0,00%	1,22%	-	505.874.750	0,00%	31,76%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
2	18	03			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Jumlah investor PMDN	10	investor	1.481.407.813	21	investor	279.207.600	15	investor	294.345.000	291.614.500	6	107.048.900	-	130.827.000,00	6,00	237.875.900	40,00%	80,82%	6,00	843.715.618	60,00%	56,95%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
2	18	04			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi	100	%	3.686.283.781	100	%	341.330.150	100	%	468.150.000	431.950.000	-	-	50	102.000.000,00	50,00	102.000.000	50,00%	21,79%	50,00	1.005.299.296	50,00%	27,27%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
2	18	05			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	100	%	393.171.275	125,36	%	344.205.600	100	%	49.899.000	467.705.050	7,01	-	31	111.270.550,00	38,01	111.270.550	38,01%	222,99%	38,01	778.349.150	38,01%	197,97%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase sistem pelayanan data dan sistem	100	%	9.382.521.863	100	%	1.538.781.960	100	%	1.594.080.000	1.594.080.000	25,00	244.651.280	25	465.905.920,00	50,00	710.557.200	50,00%	44,57%	50,00	3.706.991.780	50,00%	39,51%	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
					TOTAL DPMPTSP							23.646.823.592			18.937.303.897	19.439.019.735		2.941.818.203		5.437.066.142		8.378.884.345	41,34%	44,25%		48.836.417.019				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										29.413.016.087															
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				108.492.628.876			28.914.043.457			26.825.903.687	27.039.207.782		8.167.430.990		11.670.049.968,00		19.837.480.958				48.727.084.406		45%		
									108.492.628.876			28.914.043.457			26.825.903.687	27.039.207.782		8.167.430.990		11.670.049.968,00		19.837.480.958		73,95%		77.641.127.863		72%		
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	53.690.962.764	100	%	6.867.242.763	100	%	8.212.728.487	8.370.446.632	31	1.645.706.443	19	2.636.586.122,00	50,00	4.282.292.565	50,00%	52,14%	50,00	17.836.725.102	50,00%	33,22%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0,25	%	11.257.173.004	0,33	%	824.142.350	0,23	%	830.173.750	807.330.750	-	211.873.100	-	139.018.678,00	-	350.891.778	0,00%	42,27%	-	2.888.700.528	0,00%	25,66%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Jumlah atlit berprestasi	5	orang	36.144.493.108	28	Orang	19.722.658.344	5	Orang	16.083.001.450	16.161.430.400	3,00	6.309.851.447	-	8.044.445.168,00	3,00	14.354.296.615	60,00%	89,25%	3	53.565.702.233	60,00%	148,20%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya	65	%	7.400.000.000	62,028267	%	1.500.000.000	63	%	1.700.000.000	1.700.000.000	-	-	-	850.000.000,00	-	850.000.000	0,00%	50,00%	-	3.350.000.000	0,00%	45,27%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	jumlah anggota pramuka yang mengikuti pelatihan sebanyak 129.600 orang dibagi dengan jumlah total anggota pramuka = 208.937 orang sehingga realisasnya 62,03%
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				13.283.821.789			3.198.096.050			2.587.112.400	2.519.429.650		21.481.600		582.505.350,00		603.986.950				3.153.510.623		24%		
									13.283.821.789			3.198.096.050			2.587.112.400	2.519.429.650		21.481.600		582.505.350,00		603.986.950		23,35%		6.351.606.673		48%		
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya	97	event	10.933.289.295	44	event	2.969.880.305	57	event	2.396.880.900	2.344.198.200	11	21.481.600	11	518.397.650,00	22,00	539.879.250	38,60%	22,52%	22	5.777.388.428	22,68%	52,84%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-
2	**22**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi	4	buah	506.723.300	4	buah	22.852.000	4	buah	22.951.800	22.951.800	-	-	-	4.297.800,00	-	4.297.800	0,00%	18,73%	-	96.941.800	0,00%	19,13%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
						dan inventarisasi																								
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase kegiatan pembinaan sejarah	100 %	%	505.948.013	100	%	19.883.746	100	%	59.810.000	59.809.950	-	-	-	59.809.900,00	-	59.809.900	0,00 %	100,00%	-	157.234.446	0%	31,08%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	unit	1.337.861.181	3	unit	185.479.999	3	unit	107.469.700	92.469.700	-	-		-	-	-	0,00 %	0,00%	-	320.041.999	0,00%	23,92%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										1.315.998.100															
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				7.225.078.800			1.317.491.039			1.315.998.100	1.224.393.250		30.721.050		143.961.165,00		174.682.215				1.375.241.115		19%		
									7.225.078.800			1.317.491.039			1.315.998.100	1.224.393.250		30.721.050		143.961.165,00		174.682.215		13,27 %		2.692.732.154		37%		
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase objek wisata yang dikembangkan	100	%	2.085.085.401	100	%	416.590.956	100	%	412.533.300	361.241.050	-	30.721.050	-	74.237.900,00	-	104.958.950	0,00 %	25,44 %	-	888.887.156	0,00%	42,63%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	jumlah kunjungan wisata	######	orang	2.884.314.629	2.300.392	Orang	795.018.133	1.300.000	Orang	796.894.900	773.267.650	772.070	-	-	69.723.265,00	772.070,00	69.723.265	59,39%	8,75%	772.070	1.349.263.798	55,15 %	46,78%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Kunjungan Wisata	90	%	2.255.678.770	184,03	%	105.881.950	80	%	106.569.900	89.884.550	-	-		-	-	-	0,00 %	0,00%	-	454.581.200	0%	20,15%	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					TOTAL DISPORYATA							33.429.630.546			30.729.014.187	30.783.030.682		8.219.633.640		12.396.516.483		20.616.150.123		67,09 %		86.685.466.690				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										14.283.932.704															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				9.736.492.576			4.603.382.465			1.775.554.950	1.696.554.400		214.082.569		518.962.793,00		733.045.362				6.021.731.615		62%		
									9.736.492.576			4.603.382.465			1.775.554.950	1.696.554.400		214.082.569		518.962.793,00		733.045.362		41,29 %		10.625.114.080		109%		
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	62,73		9.736.492.576	60,23	Poin	4.603.382.465	60,53	Poin	1.775.554.950	1.696.554.400		214.082.569		518.962.793,00	-	733.045.362	0,00 %	41,29 %	-	10.625.114.080	0,00%	109,13 %	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				70.874.047.167			12.927.145.827			12.508.377.754	14.669.912.416		2.484.758.626		4.004.650.349,00		6.489.408.975				18.093.606.755		26%		
									70.874.047.167			12.927.145.827			12.508.377.754	14.669.912.416		2.484.758.626		4.004.650.349,00		6.489.408.975		51,88 %		30.506.940.432		43%		
2	**24**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	62.831.891.667	99,25	%	9.314.887.645	100	%	10.407.556.504	12.639.278.266	22,34	2.133.324.862		3.146.643.769,00	22,34	5.279.968.631	22,34%	50,73 %	22,34	23.295.349.314	22,34 %	37,08%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	100	%	7.279.018.000	42,08	%	3.495.986.322	63,15	%	1.980.090.650	1.948.589.800	13,04	351.433.764	-	842.516.316,00	13,04	1.193.950.080	21 %	60,30 %	13,04	6.956.760.294	13,04 %	95,57%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2	**24**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungja waban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntu k kepentingan negara, pemerintaha pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	%	763.137.500	40	%	116.271.860	60	%	120.730.600	82.044.350	9,00	-	-	15.490.264,00	9,00	15.490.264	15,00%	12,83%	9	254.830.824	9,00%	33,39%	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	-
					TOTAL DISKARPUS				80.610.539.743			17.530.528.292			14.283.932.704	16.366.466.816		2.698.841.195		4.523.613.142		7.222.454.337		50,56%		41.132.054.512				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				140.927.751.600			28.058.606.689			32.169.541.172	31.377.478.922		4.911.665.698		10.046.182.207,00		14.957.847.905				44.331.171.552		31%		
									140.927.751.600			28.058.606.689			32.169.541.172	31.377.478.922		4.911.665.698		10.046.182.207,00		14.957.847.905		46,50%		72.389.778.241		51%		
3	**30**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	*Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda*	100	%	78.910.568.321	99,72	%	14.618.359.201	100	%	17.116.929.372	17.061.084.922	18,72	3.278.478.236	-	6.044.299.581,00	18,72	9.322.777.817	18,72%	54,47%	18,72	37.057.237.956	19%	46,96%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar yang ber SNI	100	%	45.340.111.209	66,67	%	10.691.877.421	100	%	11.736.856.700	11.314.083.150	66,67	1.389.443.919	66	3.043.728.008,00	132,67	4.433.171.927	132,67 %	37,77 %	132,67	28.658.130.380	132,67 %	63,21%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	%	4.087.461.460	100	%	669.926.350	100	%	705.208.150	643.780.150	100,00	20.600.000	-	243.361.250,00	100,00	263.961.250	100,00 %	37,43 %	100,00	1.636.071.262	100,00 %	40,03%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Persentase IKM yang siap ekspor	19,23	%	4.585.665.777	22	%	614.044.837	19,23	%	1.268.838.650	1.068.838.400	-	95.534.850	-	252.555.890,00	-	348.090.740	0,00 %	27,43 %	-	1.456.725.727	0,00%	31,77%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase Pelayanan Kemetrologian	100	%	4.528.898.270	100	%	**706.499.208**	100	%	**657.155.200**	605.145.200	100,00	98.736.653	-	197.340.898,00	100,00	296.077.551	100,00 %	45,05 %	100,00	1.724.507.831	100,00 %	38,08%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran	60	%	3.475.046.563	95	%	757.899.672	60	%	684.553.100	684.547.100	-	28.872.040	56,00	264.896.580,00	56,00	293.768.620	93,33%	42,91 %	56,00	1.857.105.085	93,33 %	53,44%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				8.966.949.750			1.468.494.859			1.538.370.550	1.388.023.650		84.070.400		471.334.550,00		555.404.950				1.663.350.995		19%		
									8.966.949.750			1.468.494.859			1.538.370.550	1.388.023.650		84.070.400		471.334.550,00		555.404.950		36,10 %		3.131.845.854		35%		
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Presentase indutri kecil yang terbina	100	%	8.966.949.750	100	%	1.364.935.409	100	%	1.389.001.500	1.268.654.650	-	35.917.300	95,00	409.139.450,00	95,00	445.056.750	95,00%	32,04 %	95,00	2.917.938.204	95,00 %	32,54%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
3	**31**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Persentase pengelolaan informasi industri	100	%	1.255.323.906	100	%	103.559.450	100	%	149.369.050	119.369.000	-	48.153.100	33	62.195.100,00	33,00	110.348.200	33,00%	73,88%	33	213.907.650	33,00%	17,04%	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-
					TOTAL DISDAGIN				29.527.101.548						33.707.911.722	32.765.502.572		4.995.736.098		10.517.516.757		15.513.252.855		46,02%		75.521.624.095				
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				271.601.690.498						126.440.118.158	276.840.394.936		53.943.929.499		79.277.957.178,00		133.221.886.677								
4	01				SEKRETARIAT DAERAH				703.142.251.482			143.397.589.949			126.440.118.158	127.205.385.180		23.476.772.931		44.138.897.460,00		67.615.670.391				182.385.721.081		26%		
									703.142.251.482			143.397.589.949			126.440.118.158	127.205.385.180		23.476.772.931	30	44.138.897.460,00		67.615.670.391		53,48%		325.783.311.030		46%		
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	494.718.308.512	100	%	102.102.083.997	100	%	92.997.798.958	94.249.672.280	19,27	19.181.606.490	26,00	31.349.166.718,00	45,27	50.530.773.208	45,27%	54,34%	45,27	236.776.088.990	45,27%	47,86%	Sekretariat Daerah	-
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Nilai LPPD	3,3		176.944.005.850	2,59		36.479.990.982	3,3		29.120.482.900	28.896.441.600	-	3.645.176.508	-	11.948.059.837,00	-	15.593.236.345	0,00%	53,55%	-	77.792.953.148	0,00%	43,96%	Sekretariat Daerah	-
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Prosentase Pembangunan yang Berkualitas	100	%	31.479.937.120	100	%	4.815.514.970	91	%	4.321.836.300	4.059.271.300	9,33	649.989.933	9,00	841.670.905,00	18,33	1.491.660.838	20,15%	34,51%	18,33	11.214.268.892	18,33%	35,62%	Sekretariat Daerah	-
					TOTAL SETDA				703.142.251.482			143.397.589.949			126.440.118.158	127.205.385.180		23.476.772.931		44.138.897.460		67.615.670.391	21,81%	53,48%		325.783.311.030				
4					UNSUR PENDUKUNG																									

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		K		K			
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					URUSAN PEMERINTAHAN																									
4	02				SEKRETARIAT DPRD				694.644.544.828			128.204.100.549			117.031.318.591	149.635.009.756		30.467.156.568		35.139.059.718,00		65.606.216.286				183.560.596.127		26%		
									694.644.544.828			128.204.100.549			117.031.318.591	149.635.009.756		30.467.156.568	21	35.139.059.718,00		65.606.216.286		56,06 %		311.764.696.676		45%		
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	416.647.192.330	99,69	%	69.258.747.641	100	%	69.583.054.677	72.295.978.556	31	15.967.370.227	21	18.295.493.098,00	52,00	34.262.863.325	52,00%	49,24 %	52,00	172.665.518.275	52,00 %	41,44%	Sekretariat Dprd	-
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	%	277.997.352.498	99,94	%	58.945.352.908	100	%	47.448.263.914	77.339.031.200	24,54	14.499.786.341	18	16.843.566.620,00	42,54	31.343.352.961	42,54%	66,06 %	42,54	139.099.178.401	42,54 %	50,04%	Sekretariat Dprd	-
					TOTAL SETWAN				694.644.544.828			128.204.100.549			117.031.318.591	149.635.009.756		30.467.156.568		35.139.059.718		65.606.216.286		56,06 %		311.764.696.676				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							169.541.128.764				197.160.651.078		21.583.988.680		51.962.412.162,00		73.546.400.842								
5	01				PERENCANAAN				95.202.128.766			16.749.876.159			19.503.692.398	18.950.330.373		3.571.270.651	12	5.713.455.759,00		9.284.726.410				23.029.702.823		24%		
									95.202.128.766			16.749.876.159			19.503.692.398	18.950.330.373		3.571.270.651		5.713.455.759,00		9.284.726.410		47,60 %		39.779.578.982		42%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	69.058.717.190	100	%	11.832.227.911	100	%	13.557.917.698	13.434.250.573	100	3.085.948.806	31	4.456.772.461,00	131,00	7.542.721.267	131,00 %	55,63 %	131,00	29.346.019.212	131,00 %	42,49%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	-
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi	92,82	%	14.944.881.536	96,842105	%	2.576.963.942	91,87	%	3.775.661.800	3.456.961.100	17,19	436.429.365	20,00	1.049.884.628,00	37,19	1.486.313.993	40,48%	39,37 %	37,19	5.995.870.535	40,06 %	40,12%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	Program berkinerja sangat tinggi = 27 ; Program berkinerja tinggi = 6; dari Jumlah total program = 192
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				7.917.526.373			897.114.416			530.782.000	480.373.950		10.935.220		114.759.840,00		125.695.060				854.811.455		11%		
									7.917.526.373			897.114.416			530.782.000	480.373.950		10.935.220		114.759.840,00		125.695.060		23,68 %		1.751.925.871		22%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan	80	%	7.917.526.373	35	%	897.114.416	50	%	530.782.000	480.373.950	-	10.935.220	-	114.759.840,00	-	125.695.060	0,00 %	23,68 %	-	1.751.925.871	0,00%	22,13%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	(Jumlah kelitbangan dan inovasi yang diimplementasikan)/(Jumlah hasil kelitbangan dan inovasi pada perangkat daerah) ×100% Kelitbangan = (101/109) x 100% = 93% inovasi = (145/166) x 100% = 87,35%= (93%+87,35 %)/2 = 90,175%
					TOTAL BAPPEDA				103.119.655.139			17.646.990.575			20.034.474.398	19.430.704.323		3.582.205.871		5.828.215.599		9.410.421.470		46,97 %		41.531.504.853				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										161.155.315.902															
5	02				KEUANGAN				934.713.338.702			126.190.331.385			161.155.315.902	139.140.261.395		14.699.698.246		37.392.708.951,00		52.092.407.197				177.036.585.726		19%		
									934.713.338.702			126.190.331.385			161.155.315.902	139.140.261.395		14.699.698.246		37.392.708.951,00		52.092.407.197		32,32 %		303.226.917.111		32%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	423.726.233.644	99,995	%	77.779.619.778	100	%	93.491.071.809	92.917.588.344	17	12.303.306.734		21.038.544.978,00	17,21	33.341.851.712	17,21%	35,66%	17,21	188.718.512.527	17,21%	44,54%	Badan Keuangan Daerah	-
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Status Laporan	WTP		462.604.495.666	WTP		36.995.506.055	WTP		52.955.324.850	32.262.473.008	10,23	1.305.069.450	-	13.537.504.483,00	10,23	14.842.573.933	100,00%	28,03%	10	91.925.186.745	100,00%	19,87%	Badan Keuangan Daerah	-
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	%	15.212.750.000	100	%	3.587.070.391	100	%	4.114.382.800	3.904.442.800	7,29	195.957.842	-	471.556.520,00	7,29	667.514.362	7,29%	16,22%	7,29	6.329.558.763	7,29%	41,61%	Badan Keuangan Daerah	-
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	40,5	%	33.169.859.392	48,47	%	7.828.135.161	39,77	%	10.594.536.443	10.055.757.243	48,18	895.364.220	47,00	2.345.102.970,00	95,18	3.240.467.190	239,33%	30,59%	95,18	16.253.659.076	235,01%	49,00%	Badan Keuangan Daerah	PAD =1.642.229.599.952, Total pendapatan = 3.664.657.171.699
					Total BKD				934.713.338.702			126.190.331.385			161.155.315.902	139.140.261.395		14.699.698.246		37.392.708.951		52.092.407.197		32,32%		303.226.917.111				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
5	03				KEPEGAWAIAN				264.679.584.970			20.159.869.420			26.564.172.689	25.912.381.960		2.932.167.564		5.300.756.998,00		8.232.924.562				32.614.590.170		12%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									264.679.584.970			20.159.869.420			26.564.172.689	25.912.381.960		2.932.167.564		5.300.756.998,00		8.232.924.562		30,99%		52.774.459.590		20%		
5	03	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	232.185.998.820	99,74	%	15.585.029.009	100	%	19.402.570.139	19.237.952.410	4	2.462.513.290	29,00	4.172.405.588,00	32,51	6.634.918.878	32,51%	34,20%	32,51	42.400.377.662	32,51%	18,26%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
5	03	02			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	90	%	32.493.586.150	94	%	4.574.840.411	87	%	7.161.602.550	6.674.429.550	87,25	469.654.274	-	1.128.351.410,00	87,25	1.598.005.684	100,29%	22,31%	87,25	10.374.081.928	96,94%	31,93%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				40.199.014.800			6.169.298.384			15.123.440.000	12.677.303.400		369.916.999		3.440.730.614,00		3.810.647.613				10.113.986.956		25%		
									40.199.014.800			6.169.298.384			15.123.440.000	12.677.303.400		369.916.999		3.440.730.614,00		3.810.647.613		25,20%		16.283.285.340		41%		
5	04	02			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial dan teknis	100	%	40.199.014.800	100	%	6.169.298.384	100	%	15.123.440.000	12.677.303.400	8,64	369.916.999	24,00	3.440.730.614,00	32,64	3.810.647.613	32,64%	25,20%	32,64	16.283.285.340	32,64%	40,51%	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber DayaManusia	Pelatihan Teknis 828 Orang, Pelatihan Fungsional 52 Orang, Pelatihan Manajerial 118 Orang
					TOTAL BKPSDM				304.878.599.770			26.329.167.804			41.687.612.689	38.589.685.360		3.302.084.563		8.741.487.612		12.043.572.175		28,89%		69.057.744.930				
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							18.343.251.840			22.636.722.419	22.611.458.019		4.207.513.527		7.118.735.239,00		11.326.248.766								

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	01				INSPEKTORAT DAERAH				108.504.539.028			18.343.251.840			22.636.722.419	22.611.458.019		4.207.513.527		7.118.735.239,00		11.326.248.766				26.005.475.202		24%		
									108.504.539.028			18.343.251.840			22.636.722.419	22.611.458.019		4.207.513.527		7.118.735.239,00		11.326.248.766		50,03 %		44.348.727.042		41%		
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	90.984.099.487	99,93	%	16.086.806.936	100	%	18.508.202.269	18.394.747.269	27,65	3.769.491.527	-	6.470.745.939,00	27,65	10.240.237.466	27,65%	55,33 %	27,65	39.537.658.941	27,65 %	43,46%	Inspektorat Daerah	-
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti Perangkat Daerah	92,8	%	13.207.676.541	93,08	%	897.231.177	91,8	%	2.396.002.850	2.477.340.850	94,92	325.398.500	-	326.644.500,00	94,92	652.043.000	103,40 %	27,21 %	94,92	2.441.904.924	102,28 %	18,49%	Inspektorat Daerah	-
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKA PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi	100	%	4.312.763.000	100	%	1.359.213.727	100	%	1.732.517.300	1.739.369.900	6,89	112.623.500	-	321.344.800,00	6,89	433.968.300	6,89 %	25,05 %	6,89	2.369.163.177	6,89%	54,93%	Inspektorat Daerah	-
					TOTAL INSPEKTORAT DAERAH				108.504.539.028			18.343.251.840			22.636.722.419	22.611.458.019		4.207.513.527		7.118.735.239		11.326.248.766		50,03 %		44.348.727.042				
7					UNSUR KEWILAYAHAN							372.295.227.214			40.141.025.497	391.912.817.703		31.572.161.697		104.979.453.381,00		136.551.615.078								
7	01				KECAMATAN				221.420.947.893			372.295.227.214			40.141.025.497	391.912.817.703		31.572.161.697		104.979.453.381,00		136.551.615.078				166.127.943.217		75%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									221.420.947.893			38.826.869.231			40.141.025.497	39.308.991.167		4.038.780.324		9.601.602.409,00		13.640.382.733		33,98%		82.043.580.103		37%		
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemda	100	%	79.968.845.811	99,4	%	11.239.722.276	100	%	13.038.903.537	13.557.800.507	-	2.495.258.643	-	4.512.384.017,00	-	7.007.642.660	0,00%	53,74%	-	29.083.235.448	0,00%	36,37%	Kecamatan Pancoran Mas	-
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Cakupan penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	57.355.164.731	100	%	6.397.940.270	100	%	4.213.151.610	4.163.272.610	11,00	372.743.888	-	469.705.012,00	11,00	842.448.900	11,00%	20,00%	11	9.836.693.048	11,00%	17,15%	Kecamatan Pancoran Mas	-
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	*Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai*	100	%	82.966.554.788	100	%	21.000.822.300	100	%	22.600.728.850	21.299.676.550	9,00	1.066.127.793	-	4.592.213.380,00	9,00	5.658.341.173	9,00%	25,04%	9	42.631.238.327	9,00%	51,38%	Kecamatan Pancoran Mas	
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.130.382.563	100	%	188.384.385	100	%	288.241.500	288.241.500	40,00	104.650.000	-	27.300.000,00	40,00	131.950.000	40,0 0%	45,78%	40	492.413.280	40,00%	43,56%	Kecamatan Pancoran Mas	-
					TOTAL KEC. PANCORAN MAS				221.420.947.893			38.826.869.231			40.141.025.497	39.308.991.167		4.038.780.324		9.601.602.409		13.640.382.733		33,98%		82.043.580.103				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				160.759.465.922			28.330.037.862			31.840.438.854	30.665.365.552		2.106.315.483				9.698.898.735				33.799.050.987		21%		
									160.759.465.922			28.330.037.862			31.840.438.854	30.665.365.552		2.106.315.483	24	7.592.583.252,00		9.698.898.735		30,46%		62.129.088.849		39%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100	%	66.131.299.331	96,42	%	9.838.157.387	100	%	11.785.744.204	12.110.540.752	23,14	1.945.495.251	22	3.506.307.675,00	45,14	5.451.802.926	45,14%	46,26%	45,14	24.533.373.817	45,14%	37,10%	Kecamatan Cilodong	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	27.589.087.606	96,39	%	2.146.214.380	100	%	2.316.902.850	2.316.902.850	49	160.820.232	16	730.138.406,00	65,47	890.958.638	65,47%	38,45%	65,47	4.696.277.182	65,47%	17,02%	Kecamatan Cilodong	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*% Pemberdayaan Masyarakat YangTercapai*	100	%	65.600.652.961	95	%	16.106.075.362	100	%	17.517.271.900	16.017.402.050	1	-	19	3.244.353.999,00	19,85	3.244.353.999	19,85%	18,52%	19,85	32.321.602.795	19,85%	49,27%	KecamatanCilodong	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	1.438.426.024	100	%	239.590.733	100	%	220.519.900	220.519.900	30	-	-	111.783.172,00	30,00	111.783.172	30,00%	50,69%	30,00	577.835.055	30,00%	40,17%	Kecamatan Cilodong	-
					TOTAL KEC. CILODONG				160.759.465.922			28.330.037.862			31.840.438.854	30.665.365.552		2.106.315.483		7.592.583.252		9.698.898.735		30,46%		62.129.088.849				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				195.692.787.686			38.744.675.327			41.405.373.000	391.912.817.703		1.605.124.256				14.349.899.919				47.576.040.444		24%		
									195.692.787.686			38.744.675.327			41.405.373.000	41.063.552.850,00		1.605.124.256		12.744.775.663,00		14.349.899.919		34,66%		86.320.715.771		44%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100	%	70.370.665.095	100	%	12.198.296.547	100	%	13.280.836.250	14.284.619.400,00	-	1.605.124.256	-	6.124.422.580,00	-	7.729.546.836	0,00%	58,20%	-	31.632.254.387	0,00%	44,95%	Kecamatan Sawangan	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase Capaian Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	15.032.302.591	100	%	4.782.131.885	100	%	4.512.542.700	4.469.655.500,00	15,8	-	-	1.251.610.241,00	15,81	1.251.610.241	15,81%	27,74%	15,81	8.749.974.730	15,81%	58,21%	Kecamatan Sawangan	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*	100	%	108.999.820.000	100	%	21.573.915.095	100	%	23.322.647.550	22.019.931.450,00	39	-	-	5.304.977.842,00	38,90	5.304.977.842	38,90%	22,75%	38,90	45.504.115.454	38,90%	41,75%	Kecamatan Sawangan	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100	%	1.290.000.000	95	%	190.331.800	100	%	289.346.500	289.346.500,00	22	-	-	63.765.000,00	22,26	63.765.000	22,26%	22,04%	22	434.371.200	22,26%	33,67%	Kecamatan Sawangan	-
					TOTAL KEC. SAWANGAN				195.692.787.686			38.744.675.327			41.405.373.000	41.063.552.850		1.605.124.256		12.744.775.663		14.349.899.919		34,66%		86.320.715.771				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				119.751.403.339			22.197.182.216			11.472.607.765							7.982.908.799				26.879.221.716		22%		
									119.751.403.339			22.197.182.216			11.472.607.765	23.525.033.695		2.223.818.175		5.759.090.624,00		7.982.908.799		69,58%		49.076.403.932		41%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemda	100	%	51.773.686.482	100	%	8.585.879.175	100	%	9.244.508.265	9.788.921.845	29	1.968.080.275	25	3.561.719.004,00	54,00	5.529.799.279	54,00%	59,82%	54,00	22.080.159.371	54,00%	42,65%	Kecamatan Cinere	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					KABUPATEN/ KOTA																									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	14.532.072.357	100	%	2.115.897.104	100	%	2.004.409.750	1.842.514.500	13,44	184.307.900	18	400.757.850,00	31,44	585.065.750	31,44%	29,19%	31	3.869.024.354	31,44%	26,62%	Kecamatan Cinere	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	100	%	51.994.632.000	100	%	11.339.314.937	100	%	12.688.973.100	11.676.207.600	-	-	15	1.728.597.520,00	15,00	1.728.597.520	15,00%	13,62%	15,00	22.676.642.507	15,00%	43,61%	Kecamatan Cinere	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.451.012.500	100	%	156.091.000	100	%	223.689.750	217.389.750	33	71.430.000	31	68.016.250,00	64,00	139.446.250	64,00%	62,34%	64,00	450.577.700	64,00%	31,05%	Kecamatan Cinere	-
					TOTAL KEC. CINERE				119.751.403.339			22.197.182.216			24.161.580.865	23.525.033.695		2.223.818.175		5.759.090.624		7.982.908.799		33,04%		49.076.403.932				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				198.395.409.975			39.641.951.313			43.984.853.690							13.458.324.248			47.557.409.306		24%		
									198.395.409.975			39.641.951.313			43.984.853.690	42.846.502.980		2.819.058.753	31	10.639.265.495,00		13.458.324.248		30,60%		87.199.360.619		44%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	67.925.153.690	88,08	%	11.720.931.607	100	%	13.949.172.140	14.366.710.930	-	2.509.793.749	72	4.817.960.569,00	72,00	7.327.754.318	72,00%	52,53%	72,00	29.865.135.348	72,00%	43,97%	Kecamatan Sukmajaya	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					KABUPATEN F2.9/KOTA																									
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai*	100	%	114.411.764.000	96,21	%	23.632.778.688	100	%	25.670.434.400	24.191.851.650	22,30	-	7	4.909.991.295,00	29,30	4.909.991.295	29,30%	19,13%	29,30	49.198.779.603	29,30%	43,00%	Kecamatan Sukmajaya	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.620.000.000	100	%	193.990.042	100	%	319.898.550	319.898.100	30	99.931.288	99	69.442.840,00	129,00	169.374.128	129,00%	52,95%	129,00	557.092.270	129,00%	34,39%	Kecamatan Sukmajaya	-
					TOTAL KEC. SUKMAJAYA				198.395.409.975			39.641.951.313			43.984.853.690	42.846.502.980		2.819.058.753		10.639.265.495		13.458.324.248		30,60%		87.199.360.619				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				124.221.155.270						25.737.222.072											20.252.387.634		16%		
									124.221.155.270			23.888.975.177			25.737.222.072	25.072.467.411		2.821.457.084		6.569.670.532,00		9.391.127.616		36,49%		53.532.490.427		43%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	50.836.198.670	94	%	9.229.039.249	70	%	9.192.928.772	9.421.115.361	35	2.240.969.369	26	3.196.662.179,00	61,00	5.437.631.548	87,14%	59,15%	61,00	22.796.702.130	61,00%	44,84%	Kecamatan Limo	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	9.338.524.600	100	%	2.501.229.428	80	%	2.932.508.800	2.925.525.100	25	239.037.715	10	311.409.103,00	35,00	550.446.818	43,75%	18,77%	35,00	4.641.261.827	35%	49,70%	Kecamatan Limo	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	100	%	62.739.520.000	100	%	12.051.413.250	100	%	13.274.256.500	12.388.637.250	-	228.550.000	80	3.055.844.250,00	80,00	3.284.394.250	80,00%	24,74%	80,00	25.728.248.720	80,00%	41,01%	Kecamatan Limo	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.306.912.000	92,39	%	107.293.250	100	%	337.528.000	337.189.700	8	112.900.000	80	5.755.000,00	88,00	118.655.000	88,00%	35,15%	88,00	366.277.750	88,00%	28,03%	Kecamatan Limo	-
					TOTAL KEC. LIMO				124.221.155.270			23.888.975.177			25.737.222.072	25.072.467.411		2.821.457.084		6.569.670.532		9.391.127.616		36,49%		53.532.490.427				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				191.875.693.571			36.170.852.410			37.945.570.544	36.599.899.165		4.169.529.595				14.919.313.899				43.622.789.497		23%		
									191.875.693.571			36.170.852.410			37.945.570.544	36.599.899.165		4.169.529.595		10.749.784.304,00		14.919.313.899		39,32%		79.793.641.907		42%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100	%	71.360.055.878	100	%	11.555.202.426	100	%	12.211.401.344	12.495.426.165	25	3.013.865.366	25	4.412.239.675,00	50,00	7.426.105.041	50,00%	60,81%	50,00	29.457.431.564	50,00%	41,28%	Kecamatan Beji	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	17.470.612.487	100	%	4.565.434.672	100	%	5.662.543.500	5.648.869.500	43	550.514.229	16,00	933.908.629,00	59,00	1.484.422.858	59,00%	26,21%	59,00	8.605.462.081	59,00%	49,26%	Kecamatan Beji	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*	100	%	102.464.833.925	100	%	19.844.148.512,00	100	%	19.761.139.200	18.145.117.000	7	464.700.000	26	5.372.876.000,00	33,00	5.837.576.000	33,00%	29,54%	33,00	41.248.766.162	33,00%	40,26%	Kecamatan Beji	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100	%	580.191.281	100	%	206.066.800	100	%	310.486.500	310.486.500	25	140.450.000	50	30.760.000,00	75,00	171.210.000	75,00%	55,14 %	75,00	481.982.100	75,00 %	83,07%	Kecamatan Beji	-
					TOTAL KEC. BEJI				191.875.693.571			36.170.852.410			37.945.570.544	36.599.899.165		4.169.529.595		10.749.784.304		14.919.313.899		39,32 %		79.793.641.907				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				231.687.205.223			40.332.826.399			43.840.915.798	42.134.363.181		3.793.568.506				13.900.113.563				48.882.830.006		21%		
									231.687.205.223			40.332.826.399			43.840.915.798	42.134.363.181		3.793.568.506		10.106.545.057,00		13.900.113.563		31,71 %		89.215.656.405		39%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	79.665.151.534	97	%	13.105.457.070	100	%	14.110.561.199	14.506.600.482	40	2.868.624.266	49	4.796.928.348,00	89,00	7.665.552.614	89,00%	54,32 %	89,00	32.527.107.605	89,00 %	40,83%	Kecamatan Tapos	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	14.777.034.251	100	%	3.774.769.355	100	%	3.469.543.550	3.349.556.800	43	635.148.100	12	400.035.150,00	55,00	1.035.183.250	55,00%	29,84 %	55,00	7.048.284.442	55,00 %	47,70%	Kecamatan Tapos	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentasepemberdayaanmasyarakat yangtercapai	100	%	136.159.000.000	100	%	23.367.669.674	100	%	26.074.108.699	24.091.503.549	3	222.426.540	22	4.858.151.559,00	25,00	5.080.578.099	25,00%	19,49 %	25,00	49.329.755.508	25,00 %	36,23%	Kecamatan Tapos	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.086.019.438	79,59	%	84.930.300	100	%	186.702.350	186.702.350	36	67.369.600	28,00	51.430.000,00	64,08	118.799.600	64,08%	63,63 %	64,08	310.508.850	64,08 %	28,59%	Kecamatan Tapos	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					TOTAL KEC. TAPOS				231.687.205.223			40.332.826.399			43.840.915.798	42.134.363.181		3.793.568.506		10.106.545.057		13.900.113.563		31,71 %		89.215.656.405				
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				208.584.278.992			37.097.710.262			41.226.597.000	39.301.364.636		2.505.525.606				12.834.523.140				45.867.835.451		22%		
									208.584.278.992			37.097.710.262			41.226.597.000	39.301.364.636		2.505.525.606	32	10.328.997.534,00		12.834.523.140		31,13 %		82.965.545.713		40%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	79.306.359.197	100	%	11.711.268.949	100	%	13.483.031.350	13.729.588.236		2.422.725.606	27	4.625.115.728,00	27,00	7.047.841.334	27,0 0%	52,27 %	27	29.855.203.935	27,00 %	37,65%	Kecamatan Bojongsari	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	20.446.644.124	100	%	4.244.199.978	100	%	4.590.937.550	4.500.420.550		82.800.000	26	1.123.628.856,00	26,00	1.206.428.856	26,0 0%	26,28 %	26,00	8.435.233.063	26,00 %	41,25%	Kecamatan Bojongsari	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	100	%	107.645.000.000	100	%	20.923.768.135	100	%	22.829.628.200	20.748.355.950		-	21	4.442.369.950,00	21,00	4.442.369.950	21,0 0%	19,46 %	21,00	44.111.506.965	21,00 %	40,98%	Kecamatan Bojongsari	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.186.275.671	100	%	218.473.200	100	%	322.999.900	322.999.900	-	-	42	137.883.000,00	42,00	137.883.000	42,0 0%	42,69 %	42,00	563.601.750	42,00 %	47,51%	Kecamatan Bojongsari	-
					TOTAL KEC. BOJONGSARI				208.584.278.992			37.097.710.262			41.226.597.000	39.301.364.636		2.505.525.606		10.328.997.534		12.834.523.140		31,13 %		82.965.545.713				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7					UNSUR KEWILAYAHAN																									
7	01				KECAMATAN				221.503.029.055			37.897.515.662			43.132.403.066	41.416.013.866		3.700.390.011				16.798.358.196				46.411.757.074		21%		
									221.503.029.055			37.897.515.662			43.132.403.066	41.416.013.866		3.700.390.011		13.097.968.185,00		16.798.358.196		38,95 %		84.309.272.736		38%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	69.681.632.305	100	%	13.948.512.288	100	%	14.061.370.205	14.060.292.205	31,91	3.177.951.594	28,00	5.092.209.724,00	59,91	8.270.161.318	59,91%	58,81 %	59,91	34.172.507.159	59,91 %	49,04%	Kecamatan Cimanggis	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	13.675.132.412	99,62	%	4.347.741.019	100	%	5.614.455.400	5.613.852.000	13,44	372.109.232	8,00	692.823.823,00	21,44	1.064.933.055	21,44%	18,97 %	21,44	7.894.556.549	21,44 %	57,73%	Kecamatan Cimanggis	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai	100	%	136.466.264.338	99,59	%	19.096.497.395	100	%	22.944.473.411	21.229.765.611	5,5	33.068.000	34	7.184.585.121,00	39,50	7.217.653.121	39,50%	31,46 %	39,50	41.325.879.416	39,50 %	30,28%	Kecamatan Cimanggis	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.680.000.000	100	%	504.764.960	100	%	512.104.050	512.104.050	30,8	117.261.185	19	128.349.517,00	49,80	245.610.702	49,80%	47,96 %	49,80	916.329.612	49,80 %	54,54%	Kecamatan Cimanggis	-
					TOTAL KEC. CIMANGGIS				221.503.029.055			37.897.515.662			43.132.403.066	41.416.013.866		3.700.390.011		13.097.968.185		16.798.358.196		38,95 %		84.309.272.736				
7					UNSUR KEWILAYAHAN										14.493.791.720															

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7	01				KECAMATAN				159.545.822.692			29.166.631.355			14.493.791.720	29.979.263.200		1.788.593.904				9.577.764.230				33.912.663.167		21%		
									159.545.822.692			29.166.631.355			31.312.098.920	29.979.263.200		1.788.593.904		7.789.170.326,00		9.577.764.230		30,59%		63.079.294.522		40%		
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda	100	%	66.534.322.832	95	%	10.608.710.206	100	%	10.803.793.570	11.108.654.650	11	1.193.233.006	48	5.003.388.266,00	59,00	6.196.621.272	59,00%	57,36%	59,00	26.393.484.027	59,00%	39,67%	Kecamatan Cipayung	-
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100	%	13.280.211.360	96,24	%	3.575.037.174	100	%	3.267.998.750	2.994.628.450	17,20	515.011.898	28	-	45,20	515.011.898	45,20%	15,76%	45,20	6.275.551.660	45,20%	47,25%	Kecamatan Cipayung	-
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang tercapai	100	%	78.170.288.500	90	%	14.619.488.275	100	%	16.818.307.200	15.549.183.400	-	12.000.000	23	2.785.782.060,00	23,00	2.797.782.060	23,00%	16,64%	23,00	29.858.514.135	23,00%	38,20%	Kecamatan Cipayung	
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban	100	%	1.561.000.000	99	%	363.395.700	100	%	421.999.400	326.796.700	21	68.349.000	17	-	38,00	68.349.000	38,00%	16,20%	38,00	551.744.700	38,00%	35,35%	Kecamatan Cipayung	-
					TOTAL KEC. CIPAYUNG				159.545.822.692			29.166.631.355			31.312.098.920	29.979.263.200		1.788.593.904		7.789.170.326		9.577.764.230		30,59%		63.079.294.522				
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				63.206.355.341			43.525.918.594			110.917.628.092	92.228.523.058		4.207.054.997	-	72.334.013.282,00		76.541.068.279				86.681.654.296		137%		
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				63.206.355.341			43.525.918.594			110.917.628.092	92.228.523.058		4.207.054.997	-	72.334.013.282,00		76.541.068.279				86.681.654.296		137%		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									63.206.355.341			43.525.918.594			110.917.628.092	92.228.523.058		4.207.054.997	10	72.334.013.282,00		76.541.068.279		69,01%		130.390.932.835		206%		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda	100	%	30.950.976.341	100	%	5.547.847.562	100	%	6.440.410.192	6.410.918.868	31	1.278.103.157	12	1.860.876.362,00	43,33	3.138.979.519	43,33%	48,74%	43,33	13.500.047.243	43,33%	43,62%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya	100	%	5.855.000.000	99,99	%	2.147.630.135	100	%	2.303.563.200	2.475.785.950	23	156.695.500	31,00	379.430.000,00	53,73	536.125.500	53,73%	23,27%	53,73	3.513.591.335	53,73%	60,01%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	100	%	11.667.935.000	100	%	25.835.420.597	100	%	95.173.022.200	76.317.469.190	10	509.350.800	-	69.603.297.240,00	9,83	70.112.648.040	9,83%	73,67%	10	98.070.710.037	9,83%	840,51%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Aktif dan Berkinerja	80	%	1.655.000.000	70	%	565.533.240	75	%	450.423.000	577.871.950	-	13.914.820	-	59.629.640,00	-	73.544.460	0,00%	16,33%	-	893.047.100	0,00%	53,96%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota Tahun lalu (n-2) (tahun 2023)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kab/Kota Tahun Berjalan (Tahun -1) yang dievaluasi (Tahun 2024)			APBD	Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ kota yang Dievaluasi		Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ kota s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
																	I		II											
							K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Indeks Kerukunan umat Beragama	3,6		8.867.314.000	3,6	poin	2.188.978.350	3,4	poin	1.454.217.000	1.419.961.850	-	546.126.000	-	71.375.600,00	-	617.501.600	0,00 %	42,46 %	-	4.383.055.250	0,00%	49,43%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Indeks Konflik Sosial	1,58	%	4.210.130.000	1,5	%	7.240.508.710	1,6	%	5.095.992.500	5.026.515.250	-	1.702.864.720	-	359.404.440,00	-	2.062.269.160	0,00 %	40,47 %	-	10.030.481.870	200,00 %	238,25 %	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-
					TOTAL KESBANGPOL				63.206.355.341			43.525.918.594			110.917.628.092	92.228.523.058		4.207.054.997		72.334.013.282		76.541.068.279		69,01 %		130.390.932.835		206,29 %		
															Rata-rata Capaian Kinetrja							**44,23%**							
															Predikat Kinetrja							**Sangat Rendah**							

Sumber : LRA Triwulan II 2024. BKD

Berdasarkan tabel evaluasi Hasil RKPD Kota Depok sampai denga Triwulan II Tahun 2024, sebagaimana terlampir pada dokumen laporan ini, rata-rata capaian kinerja program per urusan adalah 44,23% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sangat tinggi : 44 program (22,92%) dari jumlah total 192 program
2. Tinggi : 8 program (4,17%) dari jumlah total 192 program
3. Sedang : 11 program (5,73%) dari jumlah total 192 program
4. Rendah : 22 program (11,46%) dari jumlah total 192 program
5. Sangat Rendah : 107 program (55,73%) dari jumlah total 192 program

Kemudian untuk pencapaian kinerja kegiatan s.d Triwulan II, rata-rata capaian kinerja kegiatan per urusan adalah 55,74% dengan predikat kinerja Rendah, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sangat tinggi : 92 kegiatan (18,07%) dari jumlah total 509 kegiatan
2. Tinggi : 16 kegiatan (3,14%) dari jumlah total 509 kegiatan
3. Sedang : 47 kegiatan (9,23%) dari jumlah total 509 kegiatan
4. Rendah : 0 kegiatan (0%) dari jumlah total 509 kegiatan
5. Sangat Rendah : 354 kegiatan (69,55%) dari jumlah total 509 kegiatan

Sedangkan untuk pencapaian kinerja sub kegiatan, rata-rata capaian kinerja sub kegiatan per urusan adalah 23,24% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut :

1. Sangat tinggi : 311 sub kegiatan (23,24%) dari jumlah total 1.338 sub kegiatan
2. Tinggi : 37 sub kegiatan (2,77%) dari jumlah total 1.338 sub kegiatan
3. Sedang : 62 sub kegiatan (4,63%) dari jumlah total 1.338 sub kegiatan
4. Rendah : 61 sub kegiatan (4,56%) dari jumlah total 1.338 sub kegiatan
5. Sangat Rendah : 867 sub kegiatan (64,80%) dari jumlah total 1.338 sub kegiatan

Ringkasan capaian indikator kinerja program disandingkan dengan realisasi keuangan per urusan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.92 Rekapitulasi Realisasi Kinerja Program dibandingkan Realisasi Keuangan per Urusan s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	**URUSAN WAJIB**	**2.799.368.182.210**	**1.091.472.855.644**	**57,97**	**Rendah**	**38,99**	**Sangat Rendah**
1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**2.275.565.376.975**	**808.689.584.907**	**58,67**	**Rendah**	**35,54**	**Sangat Rendah**
1.01.	Pendidikan	779.119.500.540	346.397.512.052	11,75	Sangat Rendah	44,46	Sangat Rendah
1.02.	Kesehatan	660.547.670.230	315.126.455.710	81,24	Tinggi	47,71	Sangat Rendah
1.03.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.368.770.391	54.177.720.095	26,24	Sangat Rendah	12,74	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.04.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	311.138.250.639	41.783.813.999	73,65	Sedang	13,43	Sangat Rendah
1.05.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	70.244.756.132	37.053.378.378	57,62	Rendah	52,75	Rendah
1.06.	Sosial	29.146.429.043	14.150.704.673	101,49	Sangat Tinggi	48,55	Sangat Rendah
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**	**523.802.805.235**	**282.783.270.737**	**57,27**	**Rendah**	**53,99**	**Rendah**
2.07.	Tenaga Kerja	14.841.511.812	6.699.238.930	57,86	Rendah	45,14	Sangat Rendah
2.08.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.566.883.862	6.661.494.056	59,33	Rendah	45,73	Sangat Rendah
2.09.	Pangan	15.897.043.057	8.579.809.760	12,10	Sangat Rendah	53,97	Rendah
2.10.	Pertanahan	48.273.499.785	88.460.961.767	66,00	Sedang	183,25	Sangat Tinggi
2.11.	Lingkungan Hidup	178.388.134.750	65.123.381.240	95,13	Sangat Tinggi	36,51	Sangat Rendah
2.12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	23.998.995.350	11.615.795.618	51,37	Rendah	48,40	Sangat Rendah
2.14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.230.388.700	2.873.588.115	64,34	Rendah	54,94	Rendah
2.15.	Perhubungan	87.192.414.800	35.784.738.854	49,26	Sangat Rendah	41,04	Sangat Rendah
2.16.	Komunikasi dan Informatika	38.352.250.257	11.958.428.431	45,67	Sangat Rendah	31,18	Sangat Rendah
2.17.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	32.676.618.974	8.426.654.476	80,95	Tinggi	25,79	Sangat Rendah
2.18.	Penanaman Modal	18.937.303.897	8.378.884.345	41,34	Sangat Rendah	44,25	Sangat Rendah
2.19.	Kepemudaan dan Olahraga	26.825.903.687	19.837.480.958	27,50	Sangat Rendah	73,95	Sedang
2.20.	Statistik	1.177.177.350	477.063.400	175,00	Sangat Tinggi	40,53	Sangat Rendah
2.21.	Persandian	573.633.850	79.309.500	118,75	Sangat Tinggi	13,83	Sangat Rendah
2.22.	Kebudayaan	2.587.112.400	603.986.950	9,65	Sangat Rendah	23,35	Sangat Rendah
2.23.	Perpustakaan	1.775.554.950	733.045.362	0,00	Sangat Rendah	41,29	Sangat Rendah
2.24.	Kearsipan	12.508.377.754	6.489.408.975	19,33	Sangat Rendah	51,88	Rendah
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**39.271.607.922**	**17.669.104.035**	**38,43**	**Sangat Rendah**	**44,99**	**Sangat Rendah**
3.25.	Kelautan dan Perikanan	1.148.398.700	530.332.142	16,67	Sangat Rendah	46,18	Sangat Rendah
3.26.	Pariwisata	1.315.998.100	174.682.215	19,80	Sangat Rendah	13,27	Sangat Rendah
3.27.	Pertanian	3.039.163.400	1.450.836.823	25,00	Sangat Rendah	47,74	Sangat Rendah
3.30.	Perdagangan	32.169.541.172	14.957.847.905	74,12	Sedang	46,50	Sangat Rendah
3.31.	Perindustrian	1.538.370.550	555.404.950	95,00	Sangat Tinggi	36,10	Sangat Rendah
3.32.	Transmigrasi	60.136.000	0	0	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**243.471.436.749**	**133.221.886.677**	**34,54**	**Sangat Rendah**	**54,72**	**Rendah**
4.01.	Sekretariat Daerah	126.440.118.158	67.615.670.391	21,81	Sangat Rendah	53,48	Rendah
4.02.	Sekretariat DPRD	117.031.318.591	65.606.216.286	47,27	Sangat Rendah	56,06	Rendah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**222.877.402.989**	**73.546.400.842**	**56,10**	**Rendah**	**33,00**	**Sangat Rendah**
5.01.	Perencanaan	19.503.692.398	9.284.726.410	90,49	Tinggi	47,60	Sangat Rendah
5.02.	Keuangan	161.155.315.902	52.092.407.197	90,96	Tinggi	32,32	Sangat Rendah
5.03.	Kepegawaian	26.564.172.689	8.232.924.562	66,40	Sedang	30,99	Sangat Rendah
5.04.	Pendidikan dan Pelatihan	15.123.440.000	3.810.647.613	32,64	Sangat Rendah	25,20	Sangat Rendah
5.05.	Penelitian dan Pengembangan	530.782.000	125.695.060	0,00	Sangat Rendah	23,68	Sangat Rendah
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**22.636.722.419**	**11.326.248.766**	**45,98**	**Sangat Rendah**	**50,03**	**Sangat Rendah**
6.01.	Inspektorat	22.636.722.419	11.326.248.766	45,98	Sangat Rendah	50,03	Sangat Rendah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**404.728.079.306**	**136.551.615.078**	**45,08**	**Sangat Rendah**	**33,74**	**Sangat Rendah**
7.01.	Kecamatan	404.728.079.306	136.551.615.078	45,08	Sangat Rendah	33,74	Sangat Rendah
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**110.917.628.092**	**76.541.068.279**	**17,82**	**Sangat Rendah**	**69,01**	**Sedang**
8.01.	Urusan Bangsa dan Politik	110.917.628.092	76.541.068.279	17,82	Sangat Rendah	69,01	Sedang

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TOTAL	**3.843.271.059.687**	**1.540.329.179.321**	**44,23**	**Sangat Rendah**	**40,08**	**Sangat Rendah**

Keterangan : % Fisik adalah rata-rata capaian kinerja program per urusan

Dari tabel diatas. rata-rata capaian kinerja program per urusan adalah 44,23% dengan predikat kinerja Sangat Rendah, dengan uraian sebagai berikut :

a. Sangat tinggi : 5 Urusan (17,24%) dari jumlah total 29 Urusan dan 0 Unsur (0%) dari jumlah total 10 unsur ;
b. Tinggi : 2 Urusan (6,90%) dari jumlah total 29 Urusan dan 2 Unsur (20%) dari jumlah total 10 unsur ;
c. Sedang : 3 Urusan (10,34%) dari jumlah total 29 Urusan dan 1 Unsur (10%) dari jumlah total 10 unsur ;
d. Rendah : 5 Urusan (17,24%) dari jumlah total 29 Urusan dan 0 Unsur (0%) dari jumlah total 10 unsur ;
e. Sangat Rendah : 14 Urusan (48,28%) dari jumlah total 29 Urusan dan 7 Unsur (70%) dari jumlah total 10 unsur .

Realisasi Belanja Daerah (terhadap APBD 2024)

Realisasi Belanja Tahun 2024 sebesar Rp1.540.329.179.321,00 dari pagu Belanja Daerah pada APBD Kota Depok Tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.310.416.103.676,00 atau sebesar 35,74%, masuk kedalam klasifikasi Sangat Rendah. Realisasi belanja operasi (40,55%), belanja modal (19,29%), dan belanja tidak terduga (48,22%). Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.93 Realisasi Belanja s.d. Triwulan II Tahun 2024

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH/CAPAIAN	%
		Rp.	Rp.	Rp	
2.1	BELANJA OPERASI	3.293.747.243.376	1.335.600.439.625	(1.958.146.803.751)	40,55
2.2	BELANJA MODAL	986.927.172.542	190.387.012.639	(796.540.159.903)	19,29
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	29.741.687.758	14.341.727.057	(15.399.960.701)	48,22
Jumlah Belanja		**4.310.416.103.676**	**1.540.329.179.321**	**(2.770.086.924.355)**	**35,74**

Sumber : LRA Triwulan II 2024. BKD

Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan per Perangkat Daerah

Serapan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan per- Perangkat Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.94 Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun anggaran 2024

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.667.498.907.416,00	808.689.584.907,00	1.858.809.322.509,00	30,32
1.01.	Pendidikan	999.933.676.150,00	346.397.512.052,00	653.536.164.098,00	34,64
1.01.0.00.0.00.01.	Dinas Pendidikan	999.933.676.150,00	346.397.512.052,00	653.536.164.098,00	34,64
1.02.	Kesehatan	776.376.798.322,00	315.126.455.710,00	461.250.342.612,00	40,59
1.02.0.00.0.00.01.	Dinas Kesehatan	776.376.798.322,00	315.126.455.710,00	461.250.342.612,00	40,59
1.03.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	455.948.319.813,00	54.177.720.095,00	401.770.599.718,00	11,88
1.03.0.00.0.00.01.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	455.948.319.813,00	54.177.720.095,00	401.770.599.718,00	11,88
1.04.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	333.707.276.862,00	41.783.813.999,00	291.923.462.863,00	12,52
1.04.2.10.1.03.3.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	333.707.276.862,00	41.783.813.999,00	291.923.462.863,00	12,52
1.05.	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	72.236.821.867,00	37.053.378.378,00	35.183.443.489,00	51,29
1.05.0.00.0.00.01.	Satuan Polisi Pamong Praja	35.665.845.183,00	18.141.117.739,00	17.524.727.444,00	50,86
1.05.0.00.0.00.06.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	36.570.976.684,00	18.912.260.639,00	17.658.716.045,00	51,71
1.06.	Sosial	29.296.014.402,00	14.150.704.673,00	15.145.309.729,00	48,30
1.06.0.00.0.00.01.	Dinas Sosial	29.296.014.402,00	14.150.704.673,00	15.145.309.729,00	48,30
2.	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan	614.723.345.044,00	282.783.270.737,00	331.940.074.307,00	46,00
2.07.	Tenaga Kerja	19.197.363.100,00	6.699.238.930,00	12.498.124.170,00	34,90
2.07.3.32.0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	19.197.363.100,00	6.699.238.930,00	12.498.124.170,00	34,90
2.08.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan	14.939.664.195,00	6.661.494.056,00	8.278.170.139,00	44,59
2.08.2.13.2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dankeluarga Berencana	14.939.664.195,00	6.661.494.056,00	8.278.170.139,00	44,59
2.09.	Pangan	16.214.853.210,00	8.579.809.760,00	7.635.043.450,00	52,91

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.09.3.25. 3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian Dan Perikanan	16.214.853.210,00	8.579.809.760,00	7.635.043.450,00	52,91
2.10.	Pertanahan	103.756.082.414,00	88.460.961.767,00	15.295.120.647,00	85,26
1.04.2.10. 1.03.30.	Dinas Perumahan Dan Permukiman	103.756.082.414,00	88.460.961.767,00	15.295.120.647,00	85,26
2.11.	Lingkungan Hidup	191.786.151.819,00	65.123.381.240,00	126.662.770.579,00	33,96
2.11.1.03. 0.00.12.	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan	191.786.151.819,00	65.123.381.240,00	126.662.770.579,00	33,96
2.12.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.922.388.653,00	11.615.795.618,00	12.306.593.035,00	48,56
2.12.0.00. 0.00.03.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.922.388.653,00	11.615.795.618,00	12.306.593.035,00	48,56
2.14.	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	18.649.889.400,00	2.873.588.115,00	15.776.301.285,00	15,41
2.08.2.13. 2.14.08.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	18.649.889.400,00	2.873.588.115,00	15.776.301.285,00	15,41
2.15.	Perhubungan	87.385.702.989,00	35.784.738.854,00	51.600.964.135,00	40,95
2.15.0.00. 0.00.01.	Dinas Perhubungan	87.385.702.989,00	35.784.738.854,00	51.600.964.135,00	40,95
2.16.	Komunikasi Dan Informatika	37.372.791.557,00	11.958.428.431,00	25.414.363.126,00	32,00
2.16.2.20. 2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	37.372.791.557,00	11.958.428.431,00	25.414.363.126,00	32,00
2.17.	Koperasi. Usaha Kecil Dan Menengah	34.465.295.974,00	8.426.654.476,00	26.038.641.498,00	24,45
2.17.0.00. 0.00.17.	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	34.465.295.974,00	8.426.654.476,00	26.038.641.498,00	24,45
2.18.	Penanaman Modal	19.439.019.735,00	8.378.884.345,00	11.060.135.390,00	43,10
2.18.0.00. 0.00.23.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.439.019.735,00	8.378.884.345,00	11.060.135.390,00	43,10
2.19.	Kepemudaan Dan Olah Raga	27.039.207.782,00	19.837.480.958,00	7.201.726.824,00	73,37
2.19.2.22. 3.26.0 3.	Dinas Pemuda. Olah Raga. Kebudayaan Dan Pariwisata	27.039.207.782,00	19.837.480.958,00	7.201.726.824,00	73,37
2.20.	Statistik	1.096.044.250,00	477.063.400,00	618.980.850,00	43,53
2.16.2.20. 2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	1.096.044.250,00	477.063.400,00	618.980.850,00	43,53
2.21.	Persandian	572.993.500,00	79.309.500,00	493.684.000,00	13,84
2.16.2.20. 2.21.01.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	572.993.500,00	79.309.500,00	493.684.000,00	13,84
2.22.	Kebudayaan	2.519.429.650,00	603.986.950,00	1.915.442.700,00	23,97
2.19.2.22. 3.26.03.	Dinas Pemuda. Olah Raga. Kebudayaan Dan Pariwisata	2.519.429.650,00	603.986.950,00	1.915.442.700,00	23,97
2.23.	Perpustakaan	1.696.554.400,00	733.045.362,00	963.509.038,00	43,21

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
2.24.2.23. 0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	1.696.554.400,00	733.045.362,00	963.509.038,00	43,21
2.24.	Kearsipan	14.669.912.416,00	6.489.408.975,00	8.180.503.441,00	44,24
2.24.2.23. 0.00.02.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	14.669.912.416,00	6.489.408.975,00	8.180.503.441,00	44,24
3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	47.440.006.422,00	17.669.104.035,00	29.770.902.387,00	37,25
3.25.	Kelautan Dan Perikanan	6.148.058.800,00	530.332.142,00	5.617.726.658,00	8,63
2.09.3.25. 3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian Dan Perikanan	6.148.058.800,00	530.332.142,00	5.617.726.658,00	8,63
3.26.	Pariwisata	1.224.393.250,00	174.682.215,00	1.049.711.035,00	14,27
2.19.2.22. 3.26.03.	Dinas Pemuda. Olah Raga. Kebudayaan Dan Pariwisata	1.224.393.250,00	174.682.215,00	1.049.711.035,00	14,27
3.27.	Pertanian	7.244.697.800,00	1.450.836.823,00	5.793.860.977,00	20,03
2.09.3.25. 3.27.03.	Dinas Ketahanan Pangan. Pertanian Dan Perikanan	7.244.697.800,00	1.450.836.823,00	5.793.860.977,00	20,03
3.30.	Perdagangan	31.377.478.922,00	14.957.847.905,00	16.419.631.017,00	47,67
3.30.3.31. 0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	31.377.478.922,00	14.957.847.905,00	16.419.631.017,00	47,67
3.31.	Perindustrian	1.388.023.650,00	555.404.950,00	832.618.700,00	40,01
3.30.3.31. 0.00.08.	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.388.023.650,00	555.404.950,00	832.618.700,00	40,01
3.32.	Transmigrasi	57.354.000,00	0,00	57.354.000,00	0,00
2.07.3.32. 0.00.01.	Dinas Tenaga Kerja	57.354.000,00	0,00	57.354.000,00	0,00
4.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	276.840.394.936,00	133.221.886.677,00	143.618.508.259,00	48,12
4.01.	Sekretariat Daerah	127.205.385.180,00	67.615.670.391,00	59.589.714.789,00	53,15
4.01.0.00. 0.00.01.	Sekretariat Daerah	127.205.385.180,00	67.615.670.391,00	59.589.714.789,00	53,15
4.02.	Sekretariat DPRD	149.635.009.756,00	65.606.216.286,00	84.028.793.470,00	43,84
4.02.0.00. 0.00.01.	Sekretariat DPRD	149.635.009.756,00	65.606.216.286,00	84.028.793.470,00	43,84
5.	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	197.160.651.078,00	73.546.400.842,00	123.614.250.236,00	37,30
5.01.	Perencanaan	18.950.330.373,00	9.284.726.410,00	9.665.603.963,00	49,00
5.01.5.05. 0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	18.950.330.373,00	9.284.726.410,00	9.665.603.963,00	49,00
5.02.	Keuangan	139.140.261.395,00	52.092.407.197,00	87.047.854.198,00	37,44
5.02.2.16. 0.00.05.	Badan Keuangan Daerah	139.140.261.395,00	52.092.407.197,00	87.047.854.198,00	37,44
5.03.	Kepegawaian	25.912.381.960,00	8.232.924.562,00	17.679.457.398,00	31,77
5.03.5.04. 0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.912.381.960,00	8.232.924.562,00	17.679.457.398,00	31,77
5.04.	Pendidikan Dan Pelatihan	12.677.303.400,00	3.810.647.613,00	8.866.655.787,00	30,06

Kode	Urusan. Organisasi. Program. Kegiatan dan Sub kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran (Rp)	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
5.03.5.04. 0.00.01.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.677.303.400,00	3.810.647.613,00	8.866.655.787,00	30,06
5.05.	Penelitian Dan Pengembangan	480.373.950,00	125.695.060,00	354.678.890,00	26,17
5.01.5.05. 0.00.03.	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	480.373.950,00	125.695.060,00	354.678.890,00	26,17
6.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	22.611.458.019,00	11.326.248.766,00	11.285.209.253,00	50,09
6.01.	Inspektorat	22.611.458.019,00	11.326.248.766,00	11.285.209.253,00	50,09
6.01.0.00. 0.00.01.	Inspektorat Daerah	22.611.458.019,00	11.326.248.766,00	11.285.209.253,00	50,09
7.	Unsur Kewilayahan	391.912.817.703,00	136.551.615.078,00	255.361.202.625,00	34,84
7.01.	Kecamatan	391.912.817.703,00	136.551.615.078,00	255.361.202.625,00	34,84
7.01.0.00. 0.00.01.	Kecamatan Pancoran Mas	39.308.991.167,00	13.640.382.733,00	25.668.608.434,00	34,70
7.01.0.00. 0.00.02.	Kecamatan Cilodong	30.665.365.552,00	9.698.898.735,00	20.966.466.817,00	31,63
7.01.0.00. 0.00.03.	Kecamatan Sawangan	41.063.552.850,00	14.349.899.919,00	26.713.652.931,00	34,95
7.01.0.00. 0.00.04.	Kecamatan Cinere	23.525.033.695,00	7.982.908.799,00	15.542.124.896,00	33,93
7.01.0.00. 0.00.05.	Kecamatan Sukmajaya	42.846.502.980,00	13.458.324.248,00	29.388.178.732,00	31,41
7.01.0.00. 0.00.06.	Kecamatan Limo	25.072.467.411,00	9.391.127.616,00	15.681.339.795,00	37,46
7.01.0.00. 0.00.07.	Kecamatan Beji	36.599.899.165,00	14.919.313.899,00	21.680.585.266,00	40,76
7.01.0.00. 0.00.08.	Kecamatan Tapos	42.134.363.181,00	13.900.113.563,00	28.234.249.618,00	32,99
7.01.0.00. 0.00.09.	Kecamatan Bojongsari	39.301.364.636,00	12.834.523.140,00	26.466.841.496,00	32,66
7.01.0.00. 0.00.10.	Kecamatan Cimanggis	41.416.013.866,00	16.798.358.196,00	24.617.655.670,00	40,56
7.01.0.00. 0.00.11.	Kecamatan Cipayung	29.979.263.200,00	9.577.764.230,00	20.401.498.970,00	31,95
8.	Unsur Pemerintahan Umum	92.228.523.058,00	76.541.068.279,00	15.687.454.779,00	82,99
8.01.	Kesatuan Bangsa Dan Politik	92.228.523.058,00	76.541.068.279,00	15.687.454.779,00	82,99
8.01.0.00. 0.00.02.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	92.228.523.058,00	76.541.068.279,00	15.687.454.779,00	82,99
Jumlah		**4.310.416.103.676,00**	**1.540.329.179.321,00**	**2.770.086.924.355,00**	**35,74**

Sumber : LRA Triwulan II 2024. BKD

Realisasi Keuangan Perangkat Daerah sebagian besar masih belum memenuhi amanah SE Kemendagri dimana Realisasi Keuangan pada Triwulan I = 20%, II = 50%, III = 75%, dan IV = 95%.

Realisasi anggaran tertinggi pada urusan Pertanahan 85,26% dan yg terendah pada Urusan Transmigrasi yaitu 0,00 %

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja daerah Tahun anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II antara lain :

a. Kelemahan perencanaan kegiatan/sub kegiatan :
   - penyusunan target anggaran kas yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan ataupun jadwal pembayaran kegiatan yang bersifat pengadaan barang dan jasa. infrastruktur/fisik, sehingga terdapat penyimpangan (deviasi) penyerapan anggaran terhadap rencana anggaran kas;
   - kesalahan penyusunan uraian rincian belanja sub kegiatan sehingga diperlukan pergeseran / perubahan rincian belanja;
   - mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berbeda antara penyusunan KAK dengan pada saat pelaksanaan. sehingga diperlukan pergeseran dan kaji ulang RUP.
b. Keterlambatan penyusunan dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan:
   - kegiatan belanja hibah/bansos dalam proses verifikasi ulang terhadap para penerima hibah/bansos dan penerbitan SK Wali Kota;
   - keterlambatan penyiapan dan pengajuan tender ke UKPBJ.
c. Kendala pelaksanaan pengadaan barang melalui e purchasing. Mbiz. antara lain : ketersediaan barang dan kesesuaian harga.

Solusi yang telah diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

a. Melakukan *desk* evaluasi penyerapan anggaran oleh masing-masing asisten daerah terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasinya ynag dilaksanakan secara berkala setiap bulan;
b. Menyampaikan surat himbauan terhadap seluruh Perangkat Daerah untuk percepatan penyerapan anggaran dan penginputan realisasi fisik pada aplikasi Sistem Informasi dan Evaluasi Pelaporan (SIEP) secara berkala;

Melakukan evaluasi dan monitoring realisasi penyerapan anggaran setiap bulan melalui rapat koordinasi perangkat daerah yang dipimpin oleh KDH/WKDH/Sekda.

Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran

A. Faktor Pendorong :

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penunjang pencapaian kinerja sasaran adalah:

a. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Depok, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
b. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;

c. Adanya sistem kerja yang terstandar (SOP);
d. Adanya sarana prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
e. Semakin meningkatnya koordinasi antara badan/dinas/kantor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
f. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya;
g. Meningkatnya pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan SPIP.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan terdapat faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja program, antara lain:

a. Meningkatnya pemahaman dari para pengelola kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
b. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan evaluasi secara periodik.

Adapun faktor pendorong untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pendidikan:
   a. Pengembangan UPTD Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Wilayah Barat dan Timur;
   b. Pemberian Bantuan Pembiayaan Pendidikan (KDS Pendidikan);
   c. Banyaknya warga yang tempat tinggalnya berbatasan dengan Kota Depok memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta di Kota Depok;
   d. Penambahan 1 (satu) SMPN baru di wilayah Kecamatan Beji, yakni SMPN 34 Depok sehingga meningkatkan daya tampung lulusan SD;
   e. Inovasi Aplikasi Manajemen Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos dengan Aplikasi e-Hisos;
   f. Inovasi Belajar Bersama Dinas Pendidikan Kota Depok Propinsi Jawa Barat berupa Channel Youtube Disdik Kota Depok dengan tema "Belajar Bersama Dinas Pendidikan Depok Provinsi Jawa Barat".

2. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan kesehatan :
   a. Ketersedian sumber daya baik itu sumber daya manusia kesehatan dan non kesehatan;
   b. Adanya target perjanjian kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah. Serta Perjanjian Kinerja Seluruh pejabat struktural dan koordinator;
   c. Adanya Kebijakan–kebijakan dilevel Pusat dan Propinsi yang mendukung capaian kinerja;

d. Adanya kerjasama dan koordinasi lintas sektor dan program di berbagai level dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kesehatan;
e. Dukungan Penta Helix dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja;
f. Adanya kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan Sumber daya manusia kesehatan melalui pemanfaatan ilmu dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang baik dalam rangka mewujudkan capaian Indikator Dinas Kesehatan.
g. Penanganan Stunting:
    a) Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) mulai tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan yang melibatkan kolaborasi lintas program dan sektor dipimpin oleh Kepala Daerah;
    b) Peningkatan kapasitas kader tentang pelatihan konseling pemberian makanan bayi dan anak untuk intervensi 1000 hari pertama kehidupan, pelatihan kader terampil cegah stunting, pelatihan kesehatan keluarga, pelatihan duta stunting, pelatihan pemantauan pertumbuhnan dan perkembangan, pelatihan manajemen stunting;
    c) Pemberdayaan kelompok remaja melalui inovasi *Stunting Warrior* yang melibatkan Forum Genre sebagai konselor sebaya dalam pendampingan minum Tablet Tambah Darah Remaja Putri (TTD Rematri);
    d) Pelaksanaan Gerakan Masyarakat (Germas) untuk hidup sehat melaksanakan pola hidup sehat dan pola gizi seimbang.

3. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :
    a. Regulasi dan kebijakan terkait penyusunan perencanaan program pembangunan sudah cukup jelas, sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan;
    b. Keterlibatan dan kerjasama pihak akademisi (perguruan tinggi maupun Lembaga penelitian lainnya) dan pemerintah lainnya (kementerian dan pemda lainnya);
    c. Adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana;
    d. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
    e. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
    f. Penganan Genangan :
        a) Terdapatnya Satuan Petugas (Satgas) Sumber Daya Air (SDA) yang menangani banjir dan longsor untuk penanganan sementara kerusakan infrastruktur;

b) Cepatnya penyampaian informasi laporan kejadian banjir dan longsor ke Dinas PUPR Kota Depok melalui call center atau via komunikasi aktif;
c) Peran Masyarakat dan Legislatif dalam pengusulan kegiatan penanganan banjir dan longsor yang membantu pengurangan titik banjir;
d) Pembiayaan penanganan banjir didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

g. Ketaatan terhadap RTRW :
a) Telah disahkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042;
b) Meningkatnya kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
c) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mematuhi ketentuan dari Perda RTRW.

h. Cakupan akses sanitasi layak :
a) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terhadap sanitasi dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS);
b) Diperlukan dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses sanitasi untuk semua;
c) Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun, Kementerian PUPR memberikan perhatian dan fokus pada pendekatan Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi (OPOR), serta memfasilitasi bantuan Hibah Air Limbah setempat.

4. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perumahan dan permukiman:
a. Tersedianya kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
b. Adanya monitoring dan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja dan anggaran Dinas secara berkala;
c. Lelang Dini untuk beberapa pekerjaan konsultasi perencanaan.

5. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum :
a. Satuan Polisi Pamong Praja :
a) Peraturan Perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok;

b) Meningkatnya kebutuhan pelayananan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c) Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Satpol PP Kota Depok;
d) Tersusunnya SOP dibidang Trantibum yang meliputi SOP Bidang Gakda dan SOP Bidang Trantibum Pamwal.
e) Keterlibatan Satlinmas dalam pencegahan gangguan Trantibum, dilakukan tindakan pengamanan pelaksanaan penegakan Perda/Perkada, sehingga membantu tugas-tugas penertiban yang dilaksanakan Satpol PP.

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :
a) Disusunnya Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dengan Walikota Depok, yang diturunkan dalam perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV sebagai target dan tolak ukur dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan.
b) Disusunnya Indikator Kinerja Individu (IKI) yang memuat target kinerja setiap triwulan sehingga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan
c) Memasuki TW II, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menghimbau kepada KPA serta PPTK untuk melaksanakan kegiatan dengan mempedomani anggaran kas yang telah disusun, serta segera melakukan percapatan penyerapan maupun pelaksanaan fisik anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang mengalami keterlambatan pada triwulan sebelumnya.
d) Dilaksanakannya Monitoring dan Evaluasi atas Kinerja baik Fisik dan Keuangan secara berkala dalam bentuk rapat koordinasi.
e) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan selalu berupaya mengkomunikasikan kendala-kendala yang dalam pelaksanaan pekerjaan baik secara formal maupun komunikasi informal.
f) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menindaklanjuti hasil rekomendasi atas reviu yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Depok

6. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan sosial :
a. Adanya komitmen pimpinan dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan rencana kerja Dinas Sosial Kota Depok;
b. Adanya dukungan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder Dinas Sosial baik dari pihak pemerintah (seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial wilayah lain dan

perangkar daerah lain di lingkungan Kota Depok) maupun dari pihak non pemerintah (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial dan BAZNAS).

c. Proses persiapan pelaksanaan telah selesai, sehingga pada pelaksanaan hingga triwulan II ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.

7. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan tenaga kerja:
   a. Adanya komitmen pimpinan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok untuk terus memperbaiki tata kelola internal.
   b. Adanya evaluasi capaian kinerja setiap triwulan yang dimpimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan diikuti oleh semua bidang, minimal diwakili oleh PPTK dan Bendahara.
   c. Adanya aplikasi SIMPEL KEPOK sebagai sarana pendaftaran,monev pelatihan kerja dan media pelaporan LPK;
   d. Simple Lintas Sektor: LPK dan LSP;
   e. Peminat pendaftar peserta pelatihan cukup tinggi;
   f. Tersedianya peralatan kerja yang memadai;
   g. Adanya P3MI di Kota Depok yang berkualitas untuk menempatkan pencari kerja ke ke Luar Negeri;
   h. Sosialisasi untuk bekerja ke luar negeri;
   i. Adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara penempatan;
   j. Membuka jejaring kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dengan perusahaan;
   k. Laju pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat dikarenakan kondisi pandemi covid 19 sudah berangsur membaik;
   l. Adanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan Tenaga Kerja;
   m. Koordinasi antar bidang terkait intergrasi;
   n. Sosialisasi penggunaan BKOL melalui media sosial dan brosur;
   o. Komitmen pimpinan dan seluruh SDM internal Disnaker yang besar terhadap terselenggaranya pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan;
   p. Kolaborasi dengan lintas sektor terkait (Apindo, SP/SB, Dunia Usaha dan Dunia Industrial serta OPD terkait lainnya;
   q. Tersedianya SOP sebagai panduan dalam syarat kerja;
   r. Adanya pembinaan bagi Perusahaan secara berkesinambungan;

8. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak:
    a. Adanya regulasi pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga serta Perda Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Perwal Nomor 30 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, Perwal Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kota Layak Anak, Perwal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kota Depok;
    b. Pada misi ke-3 Walikota Depok yang tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 terdapat kebijakan yang mendukung terwujudnya ketahanan keluarga yaitu *Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga,* sehingga hal ini menjadi fokus utama beberapa stakeholder untuk mewujudkan tercapainya program tersebut.
    c. Komitmen Pimpinan dan seluruh SDM internal DP3AP2KB yang besar terhadap terselenggaranya seluruh kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan waktu yang direncanakan;
    d. Kolaborasi dengan lintas sektor terkait;
    e. Tersedianya anggaran untuk penyediaan sarana prasarana yang memadai dalam mendukung terselenggaranya kegiatan.

9. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan pangan :
    a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD sebagian besar sudah sesuai dengan jadwal;
    b. Pelaksanaan kegiatan berupa penyusunan dan pemutakhiran data (NBM/Neraca Bahan Makanan, PPH/Pola Pangan Harapan dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) telah dilaksanakan secara optimal;
    c. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sudah dilaksanakan secara optimal;
    d. Adanya dukungan Pimpinan untuk semua kegiatan sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

10. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup :
    a. Koordinasi antar unit kerja di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
    b. Ketepatan waktu antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan;
    c. Pembagian tugas/pekerjaan dalam tim kerja yang baik;
    d. Dukungan anggaran dan sarana kerja yang memadai.

11. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil :
    a. Regulasi dan kebijakan terkait penyusunan perencanaan program sudah cukup jelas, sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan;
    b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas dengan Wali Kota, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
    c. Terdapat komitmen yang baik dari seluruh pegawai Disdukcapil Kota Depok untuk melaksanakan layanan jemput bola;
    d. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
    e. Pelayanan yang diberikan bebas pungli, sesuai prosedur, tepat waktu, dan ramah;
    f. Terdapat layanan daring melalui 4 jalur yaitu Whatsapp, Website, link dan Aplikasi Depok Single Window.

12. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perhubungan :
    a. Komitmen Kepala Daerah dalam mengatasi kemacetan di Kota Depok;
    b. Usulan anggaran ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat (Kementerian Perhubungan);
    c. Mengintegrasikan perencanaan baik dari Dinas Perhubungan, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai Upaya mengurai kemacetan;
    d. Adanya Studi Kelayakan Pengembangan Transportasi Massal Berbasis Rel dalam upaya pengembangan Sistem Angkutan Umum Masal (SAUM);
    e. Terbentuknya Dewan Transportasi Kota Depok sebagai pendorong terlaksananya kebijakan urusan Perhubungan;
    f. Pelayanan Jalan :
        a) Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rencana Induk Perkeretaapian sebagai dasar perencanaan pengembangan transportasi kedepan;
        b) Adanya DED pembangunan terminal Sawangan untuk meningkatkan konektivitas transportasi;
        c) Adanya pembangunan jalan tol baru yang melewati Kota Depok;
        d) Adanya manajemen rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan untuk meningkatkan kinerja ruas jalan;
        e) Memiliki alat pemantau arus lalu lintas yang canggih yang dapat mengatur antrian dan tundaan di simpang-simpang secara adaptif.
    g. Modashare Transportasi Umum :
        a) Adanya RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) dari BPTJ yang dapat mendukung dan membantu pengembangan transportasi khususnya di Kota Depok;

b) Adanya Kerjasama dengan JRC dan JAC;
c) Telah beroperasinya LRT Harjamukti untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum oleh masyarakat;
d) Adanya kerjasama Pemerintah Kota Depok dengan BPTJ dengan Peluncuran Trans Depok " Biskita;
e) Reaktivasi Stasiun Pondok Rajeg;

13. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian:

Komunikasi dan Informatika :

a. Terdapat beberapa regulasi yang mendukung pengembangan TIK di Kota Depok seperti Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas dan Peraturan Wali Kota Depok No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
b. Telah terintegrasinya seluruh perangkat daerah, kelurahan dan puskesmas dalam jaringan intranet Pemkot Depok menggunakan *fiber optic*;
c. Terdapat ruang server yang dapat melayani seluruh aplikasi Perangkat Daerah;
d. Telah terintegrasinya seluruh perangkat daerah, kelurahan dan puskesmasdalam jaringan intranet Pemkot Depok menggunakan *fiber optic;*
e. Koordinasi yang cukup baik dengan stakeholder baik dari unsur akademisi,praktisi dan komunitas yang dapat mengawal implementasi TIK di Kota Depok;
f. Telah terpasangnya titik wifi dihampir semua RW yang ada di Kota Depok.
g. Terjalinnya kerja sama yang baik dengan berbagai media yang ada baik nasional maupun lokal.
h. Perkembangan transformasi digital yang pesat menjadikan perubahan pasar dari media konvensional menjadi media eletronik dan media online sebagai sebagai platform yang sangat membuka akses serta kecepatan diterimanya informasi dan reaksi langsung sebagai umpan balik dari pengguna media sosial yang dapatdijadikan sebagai strategi komunikasi.
i. Dukungan anggaran, regulasi dan sumber daya yang tidak terlepas dari capaian prestasi sumber daya komunikasi yang dikelola dengan baik .

Satistik :

a. Telah tersusunnya Peraturan Wali Kota Depok No. 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Di Kota Depok;
b. Telah tersusunnya SK Pembentukan Forum Satu Data Kota Depok;
c. Telah Tersusunnya SOP Pengumpulan, Pengolahan dan Pengendalian Akses Data;
d. Tersedianya Portal Satu Data Kota Depok (Sadepok) untuk berbagi pakai data;

e. Terjalinnya kerjasama yang baik dengan pembina dan produsen data dalam setiap proses penyelenggaraan satu data kota depok;
f. Telah ditunjuknya Petugas Pengelola Data pada tiap Perangkat Daerah;

Persandian :

a. Kerjasama dengan BSSN dan Perangkat Daerah di Kota Depok terjalin dengan baik;
b. Telah tersusunnya beberapa regulasi yang mendukung keamanan infromasiyaitu Peraturan Wali Kota Depok Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Persandian dalam Pengamanan Infromasi di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
c. Telah diimplementasikannya Jaring Komunikasi Sandi Internal di Pemerintah Kota Depok;
d. Telah diimplementasikannya Tanda Tangan Elektronik dilingkungan Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu bentuk pengamanan informasi;
e. Telah terintegrasinya beberapa aplikasi di OPD dengan tanda tangan elektronik.

14. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan koperasi dan usaha mikro:
    a. Tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan DKUM;
    b. Target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas;
    c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
    d. Adanya Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok periode 2021-2026, yaitu menciptakan 5000 Pengusaha /Start Up Baru dan 1000 Perempuan Pengusaha.

15. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan penanaman modal :
    a. Adanya penambahan dan perbaikan aplikasi perizinan online dan penambahan perizinan yang diselenggarakan secara online;
    b. Peningkatan fasilitas pada loket dan ruang tunggu;
    c. Berbagai kanal pengaduan (baik secara elektronik maupun secara tatap muka melalui loket) yang ditindaklanjuti petugas;
    d. Adanya sistem pelaporan yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat;
    e. Proses penanganan pengaduan yang cepat dan efisien untuk mencegah penumpukan kasus;
    f. Komunikasi yang jelas dan terbuka kepada pelapor mengenai status dan tindak lanjut pengaduan;
    g. Kolaborasi dengan dinas terkait untuk mendukung upaya penanganan pengaduan;
    h. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam proses penanganan pengaduan.

16. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan kebudayaan:
    a. Adanya target perjanjian kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan Walikota Depok, serta Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Esselon III dan IV;
    b. Adanya Regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
    c. Tersedianya ruang ekspresi (Alun-alun, Taman Musik Depok, Mall) dan Komunitas Seni dan Budaya;
    d. Meningkatnya partisipasi Kota Depok dalam event tingkat Provinsi dan Nasional;
    e. Makin meningkatnya minat seni budaya (sanggar, komunitas) di masyarakat;
    f. Tingginya tingkat partisipasi pemuda terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Kepemudaan;
    g. Tingginya kesadaran pemuda terhadap pentingnya berorganisasi dalam upaya peningkatan aktualisasi diri;
    h. Adanya potensi jumlah pemuda yang cukup besar;
    i. Adanya IT yang memudahkan untuk berkomunikasi dan berinteraksi;
    j. Terbukanya kesempatan berusaha / berbisnis bagi para pemuda karena kemudahan transportasi dan mendapatkan pangsa pasar / konsumen;
    k. Sarana prasarana olahraga, ruang terbuka publik, ketersediaan anggaran, peran serta stakeholder diantaranya KONI, KORMI dan NPCI, danberbagai komunitas olahraga lainnya serta bantuan tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga (SP3OR) yang saat ini ditempatkan di 2 (dua) kecamatan di Kota Depok yaitu Kec. Cipayung dan Kec. Tapos. Keberadaaan SP3OR ini dinilai cukup efektif mampu menaikkan angka partisipasi olahraga masyarakat. Salah satu tugas SP3OR adalah menyosialisasikan pentingnya olahraga di tingkat kewilayahan dan meningkatkan kesadaran masyakarat untuk berolahraga.

17. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan :
    a. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja RPJMD, Renstra, Renja, RKT dan RAK yang menjadi pedoman tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas;
    b. Adanya perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas dengan Wali Kota; perjanjian kinerja Pejabat Eselon 3 dan JFT ahli muda selaku koordinator serta perjanjian kinerja staf pelaksana;
    c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;

d. Meningkatnya ketersediaan fasilitas membaca dan pemanfaatan bahan bacaan serta terlaksananya seluruh kegiatan dengan baik dan output kegiatan juga tercapai.
e. Peningkatan koleksi buku-buku Perpustakaan;
f. Penyediaan buku elektronik yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat minat baca masyarakat.

18. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan Perikanan :
    a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Sebagian besar sudah sesuai dengan jadwal.
    b. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelayanan rutin sudah dilakukan secara optimal;
    c. Pembinaan, penyuluhan terkait penguatan dan pembentukan kelembagaan kelompok sudah dilakukan para Penyuluh Perikanan sesuai wilayah binaan masing-masing;
    d. Pemenuhan kebutuhan kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan menyediakan dan atau menyalurkan sarana dan prasarana sesuai dengan yang direncanakan;
    e. Tingginya dukungan Pimpinan untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan baik.
    f. Kualitas air di Kota Depok masih cocok untuk budidaya perikanan terutama untuk ikan hias.
    g. Ikan hias di Kota Depok memiliki keunggulan komparatif dari segi kualitas;
    h. Terdapat Kerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok untuk pengembangan teknologi dan inovasi di bidang perikanan di Kota Depok;
    i. Tingginya minat masyarakat Kota Depok terhadap produk pengolahan hasil perikanan.

19. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan Pertanian :
    a. Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Sebagian besar sudah sesuai dengan jadwal;
    b. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pelayanan rutin sudah dilakukan secara optimal;
    c. Pembinaan, penyuluhan penguatan dan pembentukan kelembagaan kelompok sudah dilakukan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai wilayah binaan masing-masing;
    d. Pemenuhan kebutuhan kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan menyediakan dan atau menyalurkan sarana dan prasarana sesuai dengan yang direncanakan;
    e. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG bersumber dari APBD Kota Depok sebagian besar sudah sesuai jadwal pelaksanaannya;
    f. Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG dengan Pelatihan Satwa Harapan dan pelayanan

IB/PKB untuk meningkatkan produksi peternakan sudah dilaksanakan secara optimal;

g. Pemenuhan kebutuhan kelompok tani di lokasi P2WKSS yang merupakan binaan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan dengan menyalurkan sarana dan prasarana budidaya satwa harapan sesuai dengan yang direncanakan;
h. Tingginya dukungan Pimpinan untuk semua program, kegiatan dan sub kegiatan dapat berjalan dengan baik.

20. Faktor pendorong pencapaian kinerja urusan perdagangan dan perindustrian:
    a. Tersedianya dokumen perencanaan kinerja RPJMD, Renstra, Renja, RKT dan RAK yang menjadi pedoman tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas;
    b. Adanya perjanjian kinerja yang disepakati antara Kepala Dinas dengan Wali Kota; perjanjian kinerja Pejabat Eselon 3 dan JFT ahli muda selaku koordinator serta perjanjian kinerja staf pelaksana;
    c. Mengevaluasi dan menyusun beberapa SOP sebagai pedoman pegawai dalam melaksanakan tugas;
    d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja secara rutin;
    e. Adanya dukungan kerjasama maupun kemitraan dengan stakeholder Dinas seperti Dekranasda, IPEMI, AIKD, PKK, DCW, KOMBAD, Hiswana Migas, Asparindo, Aprindo, Paguyuban Pedagang Pasar, Bank bjb, Bank Mandiri, BRI, Tokoku, serta beberapa perangkat daerah Kota Depok, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat; Kementerian Perdaganganserta Kementerian Perindustrian;
    f. Kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang sangat membantu dalam mendongkrak pemasaran produk IKM;
    g. Tersedianya Rumah Kemasan sebagai sarana konsultasi bagi para IKM dalam rangka meningkatkan daya saing produk melalui kemasan, sebagai sarana pengembangan usaha melalui desain kemasan dan peningkatan kualitas kemasan produk dengan mendatangkan tenaga ahli di bidang desain kemasan dan kemasan serta bekerjasama dengan Politeknik APP Jakarta yang berada dalam pengelolaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri dalam lingkungan Kementerian Perindustrian RI;
    h. Adanya penambahan SDM Penera pada UPTD Metrologi Legal;
    i. Adanya peningkatan frekuensi pengawasan metrologi legal;

21. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah):
    a. Perjanjian Kinerja dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan target yang telah diperjanjikan;
    b. Sekretariat Daerah menyusun rencana aksi yang memuat target kinerja setiap triwulan sehingga menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
    c. Sekretaris Daerah telah menghimbau kepada KPA serta PPTK untuk melaksanakan kegiatan dengan mempedomani anggaran kas yang telah disusun, serta segera melakukan percepatan penyerapan maupun pelaksanaan fisik anggaran terutama kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT);
    d. Sekretariat Daerah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap triwulan atas kinerja baik fisik maupun keuangan dalam bentuk rapat koordinasi;
    e. Sekretariat Daerah selalu berupaya mengkomunikasikan kendala-kendala yang dalam pelaksanaan pekerjaan baik secara formal maupun komunikasi informal;
    f. Sekretariat Daerah menindaklanjuti hasil rekomendasi atas reviu yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Depok.

22. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat DPRD):
    a. Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihak ke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
    b. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
    c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya;
    d. Optimalisasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.

23. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur penunjang (perencanaan, penelitian dan pengembangan):
    a. Adanya regulasi dan kebijakan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan;

b. Keterlibatan dan kerjasama pihak akademisi (perguruan tinggi maupun Lembaga penelitian lainnya) dan pemerintah lainnya (kementerian dan pemda lainnya);
c. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
d. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Wali Kota, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan pernyataan kinerja dalam SKP untuk seluruh pegawai Bappeda Kota Depok.
e. Adanya komitmen dari pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana;

24. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur penunjang (keuangan) :
    a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap kualitas pelayanan BKD;
    b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Walikota Depok, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
    c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja.

25. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur penunjang (kepegawaian, pendidikan dan pelatihan):
    a. Tersedianya sumber daya yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan;
    b. Komitmen PPTK terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan;
    c. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang memadai.

26. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pengawasan urusan pemerintahan (inspektorat daerah):
    a. Komitmen pimpinan dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja Perangkat Daerah;
    b. Adanya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 09 Desember 2022 kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia tentang Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah yang mengamanahkan agar mengedepankan pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah sejak tahap perencanaan dengan orientasi pencegahan, serta mengawal penyerapan APBD sesuai dengan target triwulanan;
    c. Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah peningkatan peran pengawas internal pemerintah;
    d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan melalui diklat substantif maupun diklat sertifikasi dan bimbingan teknis.

27. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur kewilayahan (Kecamatan):
    a. Adanya tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap pelayanan;
    b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Camat dengan Walikota Depok, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
    c. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
    d. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada kecamatan;
    e. Dukungan para *stakeholder* yang terkait perencanaan daerah cukup tinggi;
    f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
    g. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme kerja.

28. Faktor pendorong pencapaian kinerja unsur pemerintahan umum (urusan Bangsa dan Politik) :
    a. Regulasi dan kebijakan terkait penyusunan perencanaan program pembangunan sudah cukup jelas, sehingga dapat dipedomani dengan baik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan perencanaan;
    b. Adanya target Perjanjian Kinerja yang sudah disepakati antara Kepala Badan dengan Wali Kota, serta perjanjian Kinerja seluruh pejabat Eselon III dan IV;
    c. Terdapat pengawasan dan evaluasi internal secara berkala terkait pelaksanaan kegiatan;
    d. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target kinerja;
    e. Keterlibatan dan kerjasama dengan pihak terkait sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
    f. Kerukunan umat beragama : Kolaborasi antara Pemerintah Kota Depok bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan isu-isu agama.

B. Faktor Penghambat :

Pencapaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, secara umum terkendala oleh :

1) Kekurangcermatan pengelola kegiatan dalam penyusunan RKA/DPA sehingga membutuhkan pergeseran/perubahan penjabaran APBD;
2) Penundaan sebagian kegiatan, penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan;
3) Keterlambatan pengajuan Pengadaan Barang dan Jasa dari masing-masing PD;

4) Terdapat kegiatan bersumber dari DAK fisik dan Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat yang masih dalam proses pengadaan barang dan jasa;
5) Keterlambatan penyampaian pelaporan dari Perangkat Daerah, sehingga menghambat penyusunan dokumen pelaporan tingkat kota.

Kendala pencapaian kinerja pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

1. Kendala pencapaian kinerja pada urusan pendidikan :
   a. Adanya pergeseran anggaran BOS SD dan SMP;
   b. Insentif guru mengalami keterlambatan akibat terlambatnya proses verifikasi validasi (manual);
   c. Adanya keterlambatan pengajuan penganggaran untuk kegiatan yang bersumber dari DAK karena surat usulan diajukan;
   d. Adanya penyesuaian peralihan metode pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan rutin yang semula manual menjadi transaksi elektronik.
   e. Banyak anak usia 7-12 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke pesantren;
   f. Adanya batas usia minimal siswa yang akan masuk Sekolah Dasar. Tedapat aturan untuk dapat diterima di jenjang SD sederajat maka siswa berusia minimal 7 tahun.

2. Kendala pencapaian kinerja pada urusan kesehatan:
   a. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Program dalam melaksanakan kegiatan– kegiatan yang saling berkaitan;
   b. Adanya proses rotasi, mutasi serta belum semua SDM mendapatkan pelatihan sesuai dengan program yang dibutuhkan;
   c. Belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang bisa mengampu semua kebutuhan program dari berbagai level Fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta.

3. Kendala pencapaian kinerja pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :
   a. Di awal tahun masih dilakukan survey oleh tim teknis dan persiapan dokumen pengadaan barang dan jasa;
   b. Adanya pergeseran anggaran/nomenklatur di beberapa sub kegiatan;
   c. Pemeriksaan DED yang masih dilakukan di awal tahun;
   d. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dari bidang dalam penyelesaian proses perencanaan, seperti pengumpulan data dan laporan secara tepat waktu.

4. Kendala pencapaian kinerja pada urusan perumahan dan permukiman:
   a. Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang baru dilaksanakan pada pertengahan tahun, menyebabkan pekerjaan menumpuk pada akhir tahun;
   b. Jumlah SDM yang masih kurang;
   c. Sarana dan Prasarana yang belum memadai;
   d. Penyusunan Juklak dan Juknis oleh Bidang Perumahan untuk Program Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana yang belum selesai di Triwulan I;
   e. Adanya kebutuhan untuk melakukan pergeseran anggaran;
   f. Permukiman Layak :
      a) Adanya Perubahan luas kawasan permukiman di Kota Depok berdasarkan Perda RTRW terbaru;
      b) Bertambahnya jumlah penduduk Kota Depok yang menempati kawasan permukiman kumuh/mendekati kumuh sehingga memperluas kawasan kumuh dan memunculkan wilayah permukiman kumuh baru;
      c) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara sarana dan prasarana lingkungan.

5. Kendala pencapaian kinerja pada urusan ketentraman dan ketertiban umum :

   Satpol PP :
   a. Keterbatasan sarana dan prasarana minimal yang dimilki Satpol PP Kota Depok;
   b. Perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang tidak mengindahkan himbauan/peringatan hingga penertiban Satpol PP;
   c. Jumlah personil Satpol PP Kota Depok yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk Kota Depok;
   d. Lemahnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

   Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :
   a. Kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam penyusunan RKA maupun Anggaran Kas pada awal penyusunan Renja dan RKA sehingga pada saat pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian atau perubahan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran pada beberapa sub kegiatan dan berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan fisik kegiatan.
   b. Meskipun beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan, karena pergeseran pada akhirnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mampu melaksanakan program dan kegiatan dengan baik pada akhir Triwulan II dengan tercapainya target realisasi fisik.

c. Belum optimalnya koordinasi antar bagian lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sehingga berpengaruh pada kecepatan penghimpunan data baik data perencanaan maupun data pelaporan serta dalam hal pengambilan keputusan.

6. Kendala pencapaian kinerja pada urusan sosial :
   a. Terbatasnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Sosial, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi;
   b. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas seperti mobil pelayanan, Rumah Perlindungan Sosial dan Mako TAGANA;
   c. Kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat dan beragam. Disisi lain, ada jenis layanan yang tidak dapat diberikan dan keterbatasan anggaran.

7. Kendala pencapaian kinerja pada urusan tenaga kerja : kurang cermat dalam menyusun jadwal kegiatan dengan memperhitungkan SDM yang tersedia.

8. Kendala pencapaian kinerja pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
   a. Pencairan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal angkas;
   b. Terdapat pergeseran anggaran untuk kegiatan pelatihan PEKKA;
   c. Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria terlambat dilaksanakan karena memerlukan waktu dalam pemenuhan peserta calon akseptor KB Pria karena masih rendahnya partisipasi untuk KB pria.
   d. Masih adanya kasus-kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
   e. Kader pendukung di lapangan masih banyak yang multifungsi

9. Kendala pencapaian kinerja pada urusan pangan:

   Faktor penghambat internal meliputi:
   a. Kurang optimalnya perencanaan;
   b. Keberadaan aset tersebar baik di Dinas maupun di UPT serta Bangunan di luar Balaikota.

   Faktor penghambat eksternal meliputi:
   a. Tidak tersedianya data yang diperlukan untuk kegiatan;
   b. Data yang ada belum mewakili, misal data penyedia pangan belum semua sumber terdata
   c. Pengadaan langsung melalui Mbizmarket memerlukan ketekunan dan kesabaran dikarenakan sistem yang masih kurang stabil;

d. Belum semua penanggungjawab kendaraan dinas mengetahui bahwa pada Triwulan II sudah ada pelaksanaan kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
e. Kurangnya informasi data pemeliharaan yang tersedia;
f. Kurangnya tenaga yang dapat membantu proses pengadaan menyebabkan adanya paket pengadaan yang terlewat belum dilakukan pembelanjaan melalui Mbizmarket;
g. Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kolaborasi dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat (Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga) belum ditetapkan jadwal pelaksanaannya sehingga saat ini belum dapat dilaksanakan.

10. Kendala pencapaian kinerja pada urusan lingkungan hidup :
    a. Beberapa kegiatan memang belum dilaksanakan pada Triwulan II, karena direncanakan terjadwal dilaksanakan pada Triwulan berikutnya;
    b. Beberapa kegiatan sudah dilakukan pencapaian target fisiknya pada Triwulan II namun secara penyerapan anggaran masih rendah (begitupun sebaliknya) karena kegiatan masih dilakukan dan melintasi batas triwulan;
    c. Beberapa kegiatan mengalami penjadwalan ulang;
    d. Beberapa kegiatan akan dilakukan pergeseran dikarenakan adanya perubahan rencana dan/atau kebijakan;
    e. Belum adanya arahan/peraturan/petunjuk yang mendasari pelaksanaan kegiatan dari tingkat Pusat sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

11. Kendala pencapaian kinerja pada urusan kependudukan dan pencatatan sipil :
    a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa penting kependudukan;
    b. Masih terdapat masyarakat yang belum memahami persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
    c. Masih terdapat masyarakat yang belum dapat mengikukti perkembangan teknologi sehingga tidak bias mengajukan permohonan layanan melalui daring/online;
    d. Kurangnya jumlah SDM dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat lebih dari 10 ASN yang promosi/mutasi/pensiun/meninggal dan belum mendapatkan penggantian pada tahun tersebut;
    e. Terdapat Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang sudah diakomodir pada tahapan penetapan RKPD TA.2024, namun pada saat tahap penganggaran terdapat rasionalisasi anggaran sehingga terhadap sub kegiatan

tersebut dilakukan rasionalisasi dan menyebabkan sub kegiatan tersebut tidak mendapatkan pagu anggaran;

f. Dalam tahapan penatausahaan keuangan juga terdapat kendala :
   a) Jumlah uang persediaan masih belum memenuhi kebutuhan pencairan terlebih saat proses pencairan terjadi bersamaan sehingga menyebabkan antrian proses pembayaran;
   b) Saat proses penginputan SPJ pada SIPKD, SPD belanja belum tersedia di sistem sehingga proses penginputan realisasi terhambat.

12. Kendala pencapaian kinerja pada urusan perhubungan:
    a. Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi SDM Transportasi.
    b. Belum optimalnya sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan seperti crane, kendaraan operasional, kendaraan derek, ruang pelayanan UPT PKB dan lahan parkir PKB.
    c. Masih minimnya penggunaan teknologi dalam pelayanan perhubungan.
    d. Belum optimalnya Integrasi antar moda (kurangnya konektivitas) sehingga dapat mengefisiensikan biaya, tenaga dan waktu pengguna jasa transportasi.
    e. Kemacetan Lalu lintas dengan faktor yang mempengaruhi sebagai berikut :
       a) Kinerja jaringan jalan, kapasitas jalan dan simpang kurang memadai. Tingginya volume lalu lintas tidak sejalan dengan kapasitas jalan yang ada. Hal ini disebabkan jumlah kendaraan yang semakin meningkat tidak diimbangi dengan penambahan ruas jalan. Tidak bertambahnya kapasitas jalan kemudian bertambahnya hambatan samping seperti parkir di badan jalan, kendaraan yang berhenti di badan jalan dan kendaraan lambat menyebabkan semakin turunnya kinerja suatu jalan;
       b) Maraknya transportasi daring yang minim pengawasan dari pemerintah sehingga kinerja angkutan umum menurun. Dan juga pola hidup Masyarakat yang lebih senang menggunakan kendaraan pribadi;
       c) Transportasi publik kurang nyaman, sehingga tidak menjadi pilihan utama masyarakat;
       d) Perilaku pengguna jalan kurang tertib dan kurangnya fasilitas parkir. Masih maraknya praktik parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.
    f. Penghambat pencapaian modashare transportasi umum, antara lain :
       a) Belum terlaksananya Revitalisasi Angkutan Umum, menjadi alasan banyak masyarakat enggan menggunakan Angkutan Umum yang ada dengan pertimbangan waktu, kenyamanan dan trayek angkutan yang sulit dijangkau dari rumah. Revitalisasi angkutan umum sendiri bukan hal yang mudah dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang panjang mulai dari

perencanaan, implementasi, pembiasaan masyarakat menggunakan angkutan umum dan juga membutuhkan biaya yang besar;

b) Pelayanan angkutan umum massal yang layak, efisien dan ekonomis;
c) Belum terbentuknya integrasi dan konektivitas angkutan umum sehingga masyarakat menganggap masih kurang efisien contohnya belum terbangunnya terminal Sawangan dan Pondok Rajeg.
d) Alokasi anggaran Pemerintah Kota Depok untuk pengembangan transportasi masih minim, belum sepenuhnya menerapkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

13. Kendala pencapaian kinerja pada urusan komunikasi dan informatika, statistika dan persandian :

Komunikasi dan informatika :

a. SDM TIK belum tersebar merata di semua perangkat daerah;
b. Belum optimalnya strategis diseminasi/promosi aplikasi/layanan contoh *Depok Single Windows*, SIGAP
c. Belum optimalnya peran PPID pada setiap perangkat daerah;
d. Sosialisasi terkait regulasi yang sudah dibuat tidak segera dilakukan;
e. Rendahnya motivasi sumber daya komunikasi untuk mempelajari regulasi yang selalu mengalami perkembangan;
f. Lemahnya koordinasi internal karena kuantitas beban kerja tidak berimbang dengan kompetensi sumber daya komunikasi yang ada;

Statistik :

a. Belum semua perangkat daerah mempunyai pemahaman yang sama terkait Satu Data Kota Depok;
b. Belum dipenuhinya komitmen penyelenggaraan satu data oleh semua perangkat daerah;
c. Kurangnya SDM statistik;
d. Kurangnya pemahaman OPD terkait keterbukaan informasi public;
e. Kurangnya pemahaman tentang tata kelola data geospasial.

Persandian :

a. Kebutuhan anggaran yang cukup besar untuk penerapan keamanan komunikasi dan informatika;

b. SDM di bidang Keamanan Informasi yang belum memadai
c. Belum optimalnya pemanfaatan tanda tangan elektronik untuk sistem elektronik di Pemerintah Kota Depok
d. Kesadaran akan keamanan informasi yang masih rendah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok

14. Kendala pencapaian kinerja pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah :
    a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota belum berjalan karena Adanya Moratorium UU No. 25 Tahun 1992 terkait Izin Usaha dikarenakan banyaknya Izin Usaha Simpan Pinjam yang berkedok Koperasi;
    b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro mundur pelaksanaannya karena adanya perubahan mekanisme pengiriman menjadi Swakelola Tipe 1 sehingga dirinci berdasarkan kode rekening;
    c. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil mengalami perubahan tujuan lokasi APEKSI, adanya perubahan Swakelola menjadi Tipe 1 sehingga harus dirinci berdasarkan kode rekening, adanya penambahan Narasumber kegiatan;
    d. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor masih proses e-purchasing menyebabkan keterlambatan terkait kandungan TKDN.

15. Kendala pencapaian kinerja pada urusan penanaman modal yaitu belum optimalnya intermediasi antara kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan pencari kerja Kota Depok yang dapat dilaksanakan bersama antara stakeholder terkait.

16. Kendala pencapaian kinerja pada urusan kepemudaan olahraga, pariwisata dan kebudayaan :
    a. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia yang kompeten dibandingkan dengan beban kerja yang ada;
    b. Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja;
    c. Keterbatasan pelatih, instruktur kegiatan kepemudaan, olahraga, seni dan budaya;
    d. Masih minimnya objek wisata di Kota Depok;
    e. Masih kurang sosialisasi pentingnya Situs dan Cagar Budaya serta nilai kebermanfaatan Cagar Budaya demi pelestarian dan pelindungan Cagar Budaya;
    f. Belum adanya pembinaan terhadap Tim Ahli Cagar Budaya yang tersertifikasi, baik oleh Provinsi maupun pusat (Kemendikbud).

17. Kendala pencapaian kinerja pada urusan Perpustakaan dan Kearsipan :
    a. Pelaksanaan perpustakaan keliling tidak optimal dalam pelayanan pemustaka, namun begitu pelayanan perpustakaan melayani pembinaan bagi pengelola perpustakaan di sekolah;
    b. Kekurangan sarana dan prasarana dalam upaya pemindahan arsip dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor untuk penataan arsip; ;
    c. Belum adanya armada mobil kearsipan dalam rangka pelayanan kearsipan di masyarakat.

18. Kendala pencapaian kinerja pada urusan perikanan:
    a. Kurangnya Koordinasi dengan Pemerintahan Pusat dan Provinsi terkait kolaborasi yang akan dilakukan;
    b. Permasalahan dan kendala dalam Pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap maupun kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota adalah keterbatasan jumlah enumerator yang ditetapkan yang berimplikasi dengan keterbatasannya Data Sampling yang dihimpun;
    c. Alih fungsi lahan;
    d. Rendahnya minat generasi milenial untuk mengembangkan budidaya ikan, sehingga dikhawatirkan rendahnya terhambatnya proses regenerasi pelaku usaha perikanan;
    e. Masih Kurangnya informasi tetang perimintaan ikan dari luar negeri dan mekanisme ekspor ikan hias;
    f. Kurangnya indukan ikan hias dan ikan konsumsi yang berkualitas di Kota Depok;
    g. Kegiatan Sosialisasi Gemarikan Tahun 2024 diantaranya adalah Kurangnya Koordinasi dengan stakeholder (kader) terkait identifikasi peserta dalam pelaksanaan kegiatan.

19. Kendala pencapaian kinerja pada urusan pertanian:
    a. Budidaya Satwa Harapan belum menarik perhatian petani sebagai sumber penghasilan tambahan keluarga;
    b. Pelayanan IB (Inseminasi Buatan) PKB (Pemeriksaan Kebuntingan) terkendala petugas inseminator yang terbatas waktunya karena memiliki tugas ganda sebagai medis/paramedis di Puskeswan;
    c. Pelayanan IB PKB dibatasi harus yang bereartag nasional agar tercatat secara nasional.
    d. Berkurangnya populasi sapi yang ada di Kota Depok.

e. Perlunya sosialisasi satwa harapan yang bernilai ekonomis kepada petani/masyarakat yang bisa dilakukan di lahan yang terbatas.
f. Keterbatasan tenaga inseminator yang bisa siap 24 jam karena jauhnya tempat tinggal peternak dengan rumah inseminatornya, akibatnya masa birahi sapi tertunda.

20. Kendala pencapaian kinerja pada urusan perdagangan dan perindustrian:
    a. Tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap layanan Dinas, baik dalam hal pembinaan/pemberdayaan pelaku usaha perdagangan dan IKM; pengelolaan pasar rakyat disisi lain adanya keterbatasan anggaran yang tersedia;
    b. Beberapa pasar rakyat milik Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya dikuasai sehingga belum dapat ditata secara penuh (kendala asset) dan dapat diintervensi dengan anggaran;
    c. Adanya perubahan regulasi yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan;
    d. Belum tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) yang menjadi pedoman dalam pembangunan industri di Kota Depok;
    e. Terbatasnya kapasitas SDM Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
    f. Terbatasnya sarana dan prasarana Dinas, UPTD Pasar dan UPTD Metrologi Legal;
    g. Beberapa kegiatan Dinas melibatkan pihak ketiga/instansi lain sehingga dapat berpengaruh dalam proses penyelesaian output kegiatan yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan;
    h. Kurang cermat/kurang konsisten dalam penempatan anggaran kas kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

21. Kendala pencapaian kinerja pada Urusan Transmigrasi :

    Kota Depok tidak mendapatkan kuota pemberangkatan calon transmigran pada tahun 2023 disebabkan ketidaksesuaian tujuan transmigrasi yaitu sektor kelautan.

22. Kendala pencapaian kinerja pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah):
    a. Kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam penyusunan RKA maupun Anggaran Kas pada awal penyusunan Renja dan RKA sehingga pada saat pelaksanaan terdapat ketidaksesuaian atau perubahan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran pada beberapa sub kegiatan dan berdampak pada keterlambatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan fisik kegiatan;
    b. Beberapa kegiatan mengalami keterlambatan pelaksanaan karena pergeseran;

c. Belum optimalnya koordinasi antar bagian lingkup Sekretariat daerah sehingga berpengaruh pada kecepatan penghimpunan data baik data perencanaan maupun data pelaporan serta dalam hal pengambilan keputusan.

23. Kendala pencapaian kinerja pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Dewan):
    a. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian di Sekretariat DPRD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan sehingga target program dan kegiatan tidak tercapai;
    b. Kurangnya standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai bagian dari perencanaan;
    c. Hubungan struktural Sekretariat DPRD dengan pelaksana yang kurang harmonis dalam melaksanakan kegiatan;
    d. Kurang optimalnya proses koordinasi dengan pihak penyedia, terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya;
    e. Kurangnya kerjasama dengan pihak stakeholders maupun Perangkat Daerah terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan;
    f. Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang;
    g. Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD.

24. Kendala pencapaian kinerja pada unsur perencanaan dan penelitian pengembangan:
    a. Adanya keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa karena perubahan metode pengadaan;
    b. Adanya pergeseran anggaran pada beberapa sub kegiatan;
    c. Kurangnya konsistensi dan komitmen dari perangkat daerah dalam penyelesaian proses perencanaan, seperti pengumpulan data dan laporan secara tepat waktu.

25. Kendala pencapaian kinerja pada unsur keuangan :
    a. Masalah terkait pengadaan barang yaitu adanya perubahan metode pengadaan, kompetensi pejabat pengadaan, dan belum tersedianya sebagian barang di e- catalog;
    b. Kurang cermat dalam menentukan rekening belanja maupun uraian belanja sehingga beberapa sub kegiatan memerlukan pergeseran anggaran yang mengakibatkan penyerapan anggaran berjalan lambat;
    c. Kurang cermat dalam menempatkan anggaran kas.

26. Kendala pencapaian kinerja pada unsur kepegawaian :

a. Beberapa kegiatan jadwal pelaksanaan bergantung kepada instansi lain sebagai penyelenggara kegiatan dan pembuat kebijakan;
b. Kegiatan administrasi umum bergantung kepada pengajuan bidang dan kebutuhan;
c. Keterbatasan SDM untuk pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang bersamaan.

27. Kendala pencapaian kinerja pada unsur pengawasan :

a. Banyaknya agenda libur bersama pada periode triwulan II dan padatnya mandat pengawasan yang harus dilakukan, mengakibatkan penugasan pengawasan dilaksanakan secara bersamaan pada waktu yang sama (1 APIP melaksanakan 3-4 penugasan pada waktu yang bersamaan) sehingga dari sisi penyerapan anggaran tidak optimal;
b. Kurangnya ketersediaan SDM auditor/PPUPD dan SDM pada Sekretariat dimana jumlah SDM yang tersedia masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan sebagaimana rekomendasi BPKP melalui surat nomor: S-946/K/JF/2019 tanggal 6 November 2019 dan surat rekomendasi Itjen Kemendagri nomor: 871-29/1477/IJ tanggal 17 Juni 2022 terkait kebutuhan jumlah PPUPD;
c. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024, salah satu poinnya mengamanatkan pemenuhan kecukupan anggaran pengawasan sebesar 0,5% dari total belanja daerah. Belanja operasional pengawasan hanya sebesar Rp. 7.136.500.200 atau 0,17% dari Total Belanja Daerah (masih kurang dari 0,5% sesuai ketentuan pemenuhan anggaran).

28. Kendala pencapaian kinerja pada unsur kewilayahan:

a. Kurangnya konsistensi dalam menyusun perencanaan, yaitu judul kegiatan besertaindikator kinerja kegiatan, antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta DPAsehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
b. Terbatasnya jumlah SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Jumlah PNSD terbatas, jika SDM yang terbatas ini dipaksakan mengerjakan tugas-tugas yang semakin banyak, berpotensi menghasilkan output yang tidak optimal, sekaligus berpotensi menurunkan daya tahan bekerja pegawai (diantaranya masalah kesehatan fisik);
c. Adanya pandangan bahwa tugas perencanaan adalah tugas subag UPEP, unit kerja tidak memandangnya sebagai tugas unit kerja tersebut, padahal secara tusi tugas perencanaan adalah tugas semua unit kerja;

d. Perencanaan kegiatan tidak terdukung dengan data yang memadai;
e. Kurang optimalnya penyerapan anggaran karena kurang cermatnya pengelola kegiatan dalam menyusun DPA serta keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa;
f. Diberlakukannya tipe pengadaan dari penyedia ke swakelola pada kelurahan;
g. Standar Operasional Prosedur tidak merata disemua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
h. Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara optimal;
i. Pelaksanaan kegiatan fisik pada Perangkat Daerah Kecamatan (Dana Kelurahan), beberapa Kelurahan mengalami kendala karena terbatasnya Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang melaksanakan kegiatan fisik tersebut;
j. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa pada Kecamatan belum memaksimalkan transaksi elektronik.

29. Kendala pencapaian kinerja pada unsur pemerintahan umum (Kesatuan Bangsa dan Politik):
a. Adanya keterlambatan dalam pengadaan barang dan jasa karena perubahan metode pengadaan;
b. Kurang cermat dalam menempatkan anggaran kas;
c. Kurangnya SDM dibandingkan dengan beban kerja yang ada.

C. Tindaklanjut Bagi Pelaksanaan Triwulan/ RKPD Berikutnya

Upaya percepatan pencapaian kinerja baik pada tingkat sasaran, program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Banyaknya usulan perubahan penjabaran APBD terkait uraian belanja dan rincian perhitungan belanja kegiatan. Mengindikasikan perencanaan kegiatan yang kurang matang, pengelola kegiatan agar lebih cermat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. Menyegerakan pelaksanaan program kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan secara tepat waktu;
3. Percepatan persiapan dan pengajuan pengadaan barang dan jasa dari Perangkat Daerah ke UKPBJ pada triwulan berikutnya (Triwulan III Tahun 2024);
4. Menyegerakan proses pelaksanaan kegiatan bersumber dari DAK non fisik dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Triwulan III Tahun 2024;
5. Kepala Perangkat Daerah agar melaksanakan review kinerja internal secara periodik.

Tindak lanjut bagi pelaksanaan triwulan tahun berikutnya per Urusan sebagai berikut :

1. Urusan pendidikan:

a. Program sekolah penggerak dan guru penggerak dapat diimplementasikan disatuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri) dan masyarakat (sekolah swasta);
b. Dilakukannya rehabilitasi atau perbaikan sekolah-sekolah yang rusak;
c. Ditingkatkannya kualitas mengajar para pendidik;
d. Peningkatan capaian dari target RPJMD Kota Depok tahun 2021–2026 dibidang pendidikan, yakni meningkatnya akses layanan Pendidikan;
e. Meningkatkan kualitas SDM, relevansi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan didukung manajemen pelayanan pendidikan yang makin efisien dan efektif;
f. Melakukan sosialisasi Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum. dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi;
g. Pelacakan anak tidak sekolah. Kelurahan melakukan pendataan terhadap warganya yang ditemukan putus sekolah, kemudian Dinas Pendidian menindaklanjutinya;
h. Pengembangan UPTD Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Wilayah Barat dan Timur;
i. Mendorong masyarakat membuka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
j. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia sekolah maupun penduduk Kota Depok yang belum bersekolah. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang lembaga, maupun organisasi mitra melalui daring maupun luring.

2. Urusan kesehatan:
   a. Perlu adanya perbaikan dan penguatan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu, baik secara internal maupun eksternal organisasi;
   b. Optimalisasi pencapaian indikator kinerja program urusan kesehatan yang belum mencapai target dilakukan dengan :
      a) Identifikasi hal yang menjadi penghambat dan pendorong dalam mencapai target;
      b) Sosialisasi indikator kinerja dinas kesehatan Lintas program lebih intensif;
      c) Indikator pelayanan kesehatan ibu hamil ibu bersalin dan balita sesuai standar yang belum tercapai dilakukan upaya sebagai berikut:
         - Meningkatkan kerjasama lintas sektor terkait (BPJS, PMI, fasilitas Kesehatan lain, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat);
         - Meningkatkan cakupan penanganan komplikasi maternal dan neonatal yang belum mencapai target melalui penelusuran (validasi) kejadian di fasilitas pelayanan kesehatan swasta;

- Pelatihan kompetensi kebidanan;
- Meningkatkan jumlah SDM Kesehatan yang mengelola Program KIA baik ditingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas;
- Mengoptimalisasikan pelaporan dari semua fasilitas kesehatan yang ada;
- Meningkatkan sarana penunjang pelayanan KIA;
- Pembinaan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB) di RS se-Kota Depok;
- Pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi Puskesmas PONED;
- Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui skema Bansos, PBI dan non kuota PBI;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan Sistem Penanggulangan Kegawatdaruratan Terpadu (SPGDT) 119.

d) Indikator pelayanan kefarmasian sesuai standar yang belum mencapai target dilakukan upaya sebagai berikut:
- Meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian melalui pelatihan dan workshop;
- Meningkatkan mutu layanan kefarmasian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang :
   a. Melakukan koordinasi melalui rapat rutin antar bidang dalam upaya perbaikan capaian kinerja dan anggaran;
   b. Melakukan pergeseran anggaran dan penyesuaian target kinerja untuk memperbaiki capaian kinerja;
   c. Melakukan evaluasi setiap bulan terhadap pencapaian target dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan;
   d. Menetapkan jadwal kegiatan dengan mempedomani hasil evaluasi tahun sebelumnya.

4. Urusan perumahan dan permukiman :
   a. Menetapkan jadwal kegiatan dan anggaran kas dengan mempedomani hasil evaluasi tahun sebelumnya;
   b. Melaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan;
   c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana prioritas kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan;
   d. Melakukan antisipasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan sub kegiatan dilaksanakan;
   e. Permukiman Layak :

a) Mengidentifikasi kawasan permukiman kumuh prioritas yang harus segera ditangani;
b) Memaksimalkan peluang pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah yang bisa diakses untuk penanganan wilayah kumuh;
c) Menggali potensi swadaya masyarakat dan kolaborasi dengan stakeholder serta kelompok peduli dalam penanganan kumuh seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan dan lembaga non pemerintah lainnya;
d) Melakukan kajian dan menyusun dokumen perencanaan seperti Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dan DED Penataan Kawasan Kumuh.

5. Urusan ketentraman dan ketertiban umum :

Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Dilakukan koordinasi internal Satpol PP dan eksternal yakni dengan Bappeda Kota Depok terkait dengan Indikator Kinerja Satpol PP yang terkait langsung dengan RPJMD;
b. Dilakukan pemetaan kinerja berdasarkan Sasaran yang ditetapkan sesuai SOTK;
c. Dilakukan evaluasi kinerja pada setiap Triwulan melalui TIPEKIN;
d. Penyusunan konsep kebijakan pemberian "*reward and punishment";*
e. Dilakukan proses pengukuran Capaian IKU Triwulan II Tahun 2024.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

a. Segera melaksanakan penjadwalan ulang atas kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya;
b. Melakukan penyesuaian indikator dan target pada kegiatan yang mengalami pergeseran dan diinput pada RKPD Perubahan;
c. Mengutamakan pelaksanaan program/ kegiatan Prioritas yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bahan evaluasi pada penyusunan Renja selanjutnya;
e. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sebagai bahan perbaikan pada triwulan selanjutnya;
f. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

6. Urusan sosial :
    a. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder dari pihak pemerintah yang dapat mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial, khususnya untuk layanan kesejahteraan sosial yang ada di lingkup Provinsi dan Nasional;
    b. Membuka kerjasama dengan *stakeholder* dari pihak non-pemerintah melalui MoU seperti dengan BAZNAS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
    c. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin di lingkup Dinas Sosial Kota Depok;
    d. Mengusulkan penjadwalan ulang dan pergeseran anggaran Program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Dinas Sosial Kota Depok.

7. Urusan tenaga kerja :
    a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja minimal setiap 3 bulan, dalam waktu yang berbeda. Pelaksanaan monev dilakukan sebelum berakhirnya triwulan, sehingga masih dapat dilakukan upaya percepatan penyerapan anggaran pada triwulan tersebut;
    b. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan kegiatan;
    c. Lebih cepat dalam menyusun anggaran;
    d. Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Tenaga Kerja.

8. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :
    a. Melakukan perencanaan kinerja perubahan yang lebih baik Ketika menyusun RKA dan anggaran kas;
    b. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja;
    c. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan pejabat DP3AP2KB Kota Depok;
    d. Penyelenggaraan Sekolah Pra Nikah;
    e. Penyelenggaraan Sekolah Ayah Bunda;
    f. Penyelenggaraan RW Ramah Anak;
    g. Melaksanakan sosialisasi penguatan ketahanan keluarga melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) meliputi kegiatan bincang keluarga, *roadshow* puspaga, dan ceria bersama puspaga;
    h. Gerakan perlindungan anak dan parenting melalui kegiatan Sekolah Ayah Bunda, kampanye Gerakan Sayang Keluarga, talkshow sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan anak (SKPA) serta Sekolah Pranikah;
    i. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender yang berketahanan keluarga menekankan pada isu-isu gender dan pemahaman serta persepsi gender yang benar;

j. Pembinaan ekonomi produktif bagi keluarga rentan anggota kelompok PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga);
k. Kegiatan pembentukan dan pembinaan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa serta forum anak;
l. Melakukan kerjasama dengan lingkungan sekitarnya dalam pengasuhan dan pendidikan anak serta perlindungann anak dengan membangun komitmen bersama melalui Rukun Warga (RW) Ramah Anak dan Kampung KB serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang bertujuan menghidupkan 8 fungsi keluarga serta pemenuhan hak anak;
m. Memberikan perlindungan dan pelayanan terpadu melalui kegiatan di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berupa pelayanan tim respon cepat di nomor hotline 112 atau nomor HP. 08111186598, pelayanan bantuan pendampingan hukum, mediasi terhadap orang yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pendampingan oleh psikolog;
n. Memberikan edukasi kepada keluarga dengan tujuan penguatan ketahanan keluarga berupa tindakan preventif dan kuratif terhadap perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak dan dampaknya melalui:
    a) Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) di tingkat Rukun Warga (RW) yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk kelompok-kelompok kegiatan;
    b) Kegiatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) berfungsi sebagai One Stop Service/Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak. Dua jenis layanan yang dimiliki PUSPAGA adalah Layanan Konseling/ Konsultasi dan Layanan Informasi. Dalam menjalankan programnya layanan PUSPAGA dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor.
    c) Konseling kepada pelaku dan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak.

9. Urusan pangan:
    a. Melaksanakan evaluasi setiap bulan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan dalam upaya mencari solusi atau pemecahan masalah;
    b. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik;
    c. Melakukan koordinasi komprehensif di internal dan terhadap pihak eksternal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
    d. Dilakukan monitoring ke lokasi dimana aset berada secara berkala agar pengamanan terhadap aset;
    e. Penyusunan SOP Pengadaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebagai bentuk pengendalian internal;

f. Akan diinfokan pada TW III kepada semua penanggungjawab kendaraan dinas agar kendaraannya dapat dilakukan pemeliharaan;
g. Melakukan perencanaan kegiatan dengan baik;
h. Paket pengadaan yang terlewat di TW II akan diadakan di TW III;
i. Berkoordinasi dengan Bendahara Pengurus Barang terkait barang yang memerlukan pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan yang belum dilaksanakan akan dilakukan di TW III;
j. Seksi Penganekaragaman dan Keamanan Pangan senantiasa berkoordinasi dengan TP PKK Kota Depok maupun Direktorat Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kolaborasi dengan TP PKK Provinsi Jawa Barat (Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber Gizi Keluarga).

10. Urusan lingkungan hidup :
    a. Melaksanakan rapat rutin evaluasi kinerja dengan para pejabat struktural;
    b. Memperkuat koordinasi antar bagian atau bidang dalam upaya perbaikan capaian kinerja dan anggaran;
    c. Melakukan koordinasi dengan antar dinas, provinsi dan tingkat pusat dalam setiap persiapan pelaksanaan kegiatan;
    d. Melakukan pergeseran anggaran dan penyesuaian target kinerja guna penyempurnaan capaian anggaran dan kinerja;
    e. Melakukan penjadwalan kegiatan sesuai target yang direncanakan serta pencairan keuangan sesuai rencana kas.

11. Urusan kependudukan dan catatan sipil :
    a. Melakukan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil;
    b. Menerbitkan surat edaran Wali Kota Depok mengenai kebijakan-kebijakan administrasi kependudukan;
    c. Tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengajukan pelayanan melalui tatap muka karena tidak memahami teknologi informasi untuk mengajukan pelayanan online. Bersama itu dilakukan pendampingan pengajuan pelayanan online melalui *Handphone* pemohon;
    d. Bekerjasama dengan Lembaga/instansi vertikal untuk mewajibkan persyaratan dalam layanan yang mereka berikan berupa dokumen administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil yang terbaru;
    e. Melakukan optimalisasi pemberdayaan SDM yang ada melalui lembur dan menyediakan anggaran lembur;

f. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan agar lebih optimal dalam implementasi ilmu dan pengetahuan yang didapat dari pelaksanaan bimbingan teknis yang diikuti;
g. Menggunakan dan mempertimbangkan hasil evaluasi laporan sebagai acuan dalam meningkatkan capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan;
h. Melakukan optimalisasi penginputan SPJ oleh BPP sehingga perputaran uang persediaan lebih optimal;
i. Melakukan optimalisasi pada tahapan verifikasi dalam penatausahaan keuangan sehingga nota dinas pengajuan dana yang diterima sesuai dengan SPD yang sudah terdapat dalam SIPKD.

12. Urusan perhubungan :
    a. Mengajukan usulan kepada Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi *Buy The Service* (BTS) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
    b. Merencanakan *rerouting* trayek atau mendesain ulang jaringan trayek agar konektivitas antar simpul menjadi efektif dan efisien;
    c. Telah disusunnya *Masterplan* Transportasi dan Rencana Induk Perkeretaapian sebagai dasar perencanaan transportasi yang lebih komprehensif;
    d. Pembangunan gedung terminal direncanakan ulang untuk tahun 2024.
13. Urusan komunikasi dan informasi, statistik dan persandian:
    a. Meningkatkan layanan keamanan informasi dan komunikasi publik;
    b. Sosialisasi dan pendampingan kepada semua perangkat daerah terkait SPBE dan Satu Data Kota Depok;
    c. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus kepada pejabat PPID pada semua perangkat daerah agar perannya dapat lebih optimal.
14. Urusan koperasi dan usaha mikro :
    a. Rapat evaluasi pelaksanaan anggaran untuk mengidentifikasi serapan yang masih rendah;
    b. Melakukan identifikasi kendala/hambatan rendahnya realisasi kinerja;
    c. Perencanaan Anggaran Kas yang lebih tepat dan optimal;
    d. Perencanaan pengadaan Barang/Jasa yang lebih matang.
15. Urusan penamanan modal :
    a. Melakukan perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahunan yang lebih baik lagi melalui proses yang melibatkan seluruh komponen Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;

b. Melaksanakan evaluasi internal secara berkala atas capaian target kinerja yang telah ditetapkan.

16. Urusan kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata :
    a. Pembenahan tata kelola SDM untuk mengatasi ketersediaan Sumber Daya Manusia;
    b. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja;
    c. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin yang melibatkan pejabat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
    d. Meningkatkan koordinasi lintas OPD dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan;
    e. Melakukan sosialisasi ke Masyarakat baik berupa pertemuan maupun akses informasi lainnya (Media social / online);
    f. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Kementerian.

17. Urusan perpustakaan dan kearsipan :
    a. Melakukan pelaksanaan perpustakaan keliling minimal dalam 1 (satu) minggu dengan 2 (dua) kali beroperasional;
    b. Menambah sarana dan prasarana dalam upaya pemindahan arsip dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor untuk penataan arsip;
    c. Agar menyediakan armada mobil kearsipan dalam rangka pelayanan kearsipan di masyarakat;
    d. Mengutamakan Standar operasional Prosedur (SOP) dalam manajemen pemeritahan dan pelayanan yang efektif dan efisien.

18. Urusan Perikanan :
    a. Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi;
    b. Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah dan akademisi untuk mengembangkan alternatif cara budidaya ikan di lahan terbatas;
    c. Koordinasi dengan intansi pemerintahan dan professional terkait eksport ikan hias;
    d. Kerjasama secara intensif dengan kabupaten/kota lain yang merupakan sentra indukan ikan hias dan konsumsi;
    e. Masih diperlukannya pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap maupun Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota kedepannya menyesuaikan dengan Nomenklatur Program pada Renstra DKP3 Kota Depok yang telah ditetapkan;

f. Perlu dilakukannya penambahan Enumerator maupun Penyuluh Perikanan dalam rangka optimalnya pelaksanaan Program/Kegiatan.

19. Urusan pertanian :

a. Melaksanakan sosialisasi kepada petani mengenai Satwa Harapan yang bisa dibudidayakan di lahan terbatas tetapi bisa menguntungkan;
b. Perlu penambahan petugas inseminator yang tidah merangkap tugas di Puskeswan;
c. Meningkatkan pemasangan eartag nasional pada semua sapi betina yang ada di Kota Depok;
d. Meningkatkan koordinasi internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan;
e. Perlu dilaksanakan sosialisasi mengenai Satwa Harapan yang bernilai ekonomis dan bisa dibudidayakan di lahan sempit;
f. Perlu diadakan atau mengikuti diklat IB terampil bagi peternak agar masalah pelaksanaan Inseminasi pada ternak tidak tertunda dan effektif.

20. Urusan perdagangan dan perindustrian :

a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat terkait program nasional revitalisasi pasar;
b. Melaksanakan kajian dan *surveillance* bagi pasar rakyat yang belum memenuhi sertifikasi SNI dan pasar rakyat yang sudah ber-SNI;
c. Melaksanakan koordinasi terkait status Bangun Guna Serah (BGS) pasar rakyat dengan instansi terkait;
d. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan dan regulasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian;
e. Terus berupaya mengoptimalkan jalinan kemitraan yang sudah terbentuk dengan para *stakeholder* Dinas;
f. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Depok yang disesuaikan dengan RTRW Kota Depok sebagai pedoman pembangunan industri kota;
g. Mengusulkan penambahan SDM dan peningkatan kompetensi SDM kepada BKPSDM dan Kementerian;
h. Melaksanakan evaluasi internal secara rutin di lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
i. Mengusulkan pengurangan anggaran terhadap program/kegiatan yang berpotensi tidak diserap hingga akhir tahun dan/atau pergeseran anggaran terhadap program/kegiatan yang menunjang capaian kinerja Dinas;

j. Menjalin kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi IKM.

21. Urusan Transmigrasi :

    Koordinasi lebih lanjut dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Barat tentang kuota transmigran tahun 2024 untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan kuota tahun 2025 untuk penyusunan bahan Renja tahun 2025.

22. Unsur Sekretariat Daerah:
    a. Segera melaksanakan penjadwalan ulang atas kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya;
    b. Melakukan penyesuaian indikator dan target pada kegiatan yang mengalami perubahan dan atau *refocusing* dan diinput pada RKPD Perubahan;
    c. Mengutamakan pelaksanaan program/ kegiatan Prioritas yang mendukung pencapaian sasaran sekretariat daerah;
    d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bahan evaluasi pada penyusunan Renja selanjutnya;
    e. Menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi sebagai bahan perbaikan pada triwulan selanjutnya;
    f. Mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

23. Unsur Sekretariat Dewan:
    a. Penguatan tugas dan fungsi masing-masing bagian sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan;
    b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur yang detail bagi kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak terhadap tugas pokok dan fungsi DPRD;
    c. Pemanfaatan Bimbingan Teknis dan *Coaching Klinik* bagi Bagian-Bagian yang memiliki kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis;
    d. Percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bagian Umum yang masih kurang pada triwulan III Tahun Anggaran 2024;
    e. Peningkatan pemahaman tentang target-target yang akan dicapai oleh masing-masing Sub Bagian;
    f. Peningkatan pemahaman tentang proses perencanaan dan pertanggung jawaban yang akan dicapai oleh masing-masing Sub Bagian.

24. Unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan:
    a. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang jasa tepat waktu;
    b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara rutin tiap bulannya.

25. Unsur keuangan:
    a. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan pelaksanaan kegiatan;
    b. Menyusun perencanaan dan penganggaran lebih cermat;
    c. Meningkatkan kapasitas aparatur Badan Keuangan Daerah;
    d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi internal secara rutin setiap bulan..

26. Unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan:
    a. Menetapkan jadwal kegiatan dengan mempedomani anggaran kas dan hasil evaluasi triwulan sebelumnya;
    b. Melaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan;
    c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rencana prioritas kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja yang bersangkutan;
    d. Melakukan antisipasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan;

27. Unsur pengawasan :
    a. Percepatan pelaksanaan kegiatan pada sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, sehingga dapat menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai dan dapat menunjang meningkatnya kinerja maupun pelayanan aparatur Inspektorat meskipun dengan jumlah SDM yang terbatas;
    b. Pada triwulan II ini telah dilaksanakan pendampingan ke beberapa perangkat daerah terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat.

28. Unsur kewilayahan :
    a. Melakukan penyesuaian antara dokumen renstra dengan RKPD / Renja Kecamatan;
    b. Melakukan kaderisasi pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa;
    c. Melakukan perencanaan kinerja yang lebih baik ketika menyusun RKA dan anggaran kas;
    d. Pembenahan tata kelola SDM untuk mengatasi keterbatasan SDM;
    e. Mengutamakan penganggaran kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian sasaran kinerja;

f. Diperbolehkan penggunaan dana pendamping untuk Lurah dalam menjalankan kegiatan pengadaan tipe swakelola;
g. Permohonan pendampingan kepada perangkat daerah pengampu kebijakan;
h. Proses pelaksanaan kegiatan fisik di kelurahan mengoptimalkan Kelompok Masyarakat yang sudah terbentuk;
i. Belanja Pengadaan Barang dan Jasa pada Kecamatan diupayakan memaksimalkan transaksi elektronik.

29. Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik :
    a. Melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang jasa tepat waktu;
    b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara rutin tiap bulannya;
    c. Meningkatkan kapasitas aparatur Bakesbangpol;
    d. Menyusun perencanaan dan penganggaran lebih cermat.

2.9. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kota Depok Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yng berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan dasar dan Mutu pelayanan Dasarnya.

Indikator kinerja daerah salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

2.9.1 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan Dasar Jenis Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota

Depok berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota antara lain :

1. Pendidikan anak usia dini; Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan dasar; dan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. Pendidikan kesetaraan Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Tabel 2.19 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					94.89 %
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					98.44 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	37000	38694	-1694	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					18.44 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	92.22%
	1 Angka partisipasi sekolah	%	71.65	71.02	0.63000000000001	99.12 %
	2 Angka partisipasi murni		30	71.66	-41.66	100.00 %
	3 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		73.90	70.23	3.67	95.03 %
	4 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)		58	73.61	-15.61	100.00 %
	5 Rasio pengawas sekolah untuk PAUD		5	6.5	-1.5	100.00 %
	6 Kecukupan formasi guru ASN		2	2.03	-0.03	100.00 %
	7 Indeks distribusi guru		0.60	0.5	0.1	83.33 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	8 Proporsi PTK bersertifikat		35.00	59.89	-24.89	100.00 %
	9 Proporsi PTK penggerak*		0.04	0.021	0.019	52.50 %
2 .	Pendidikan Dasar					86.22 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	68.44 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	270700	231567	39133	85.54 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					17.79 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	88.94 %
	SD					89.07 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	98.94	1.06	98.94 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.5	99.68	-1.18	100.00 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	79.7	86.23	-6.53	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	60	74.2	-14.2	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.5	5.92	-2.42	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	2.12	0.88	70.67 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.47	74.31	-1.84	100.00 %
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.35	73.54	-3.19	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55.75	59.96	-4.21	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	13	2.03	10.97	15.62 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.3	0.29	0.01	96.67 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	43	32.67	10.33	75.98 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %
	SMP					100%
	1 . Angka partisipasi kasar	%	93.64	96.09	-2.45	100.00 %
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	98.5	97.56	0.94	99.05 %
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	79	87.14	-8.14	100.00 %
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	60	80.93	-20.93	100.00 %
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	3.5	7.33	-3.83	100.00 %
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	4.37	-1.37	100.00 %
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	72.47	72.04	0.42999999999999	99.41 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68.68	74.17	-5.49	100.00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56	58.950	-2.95	100.00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	13	0.84	12.16	6.46 %
	11 . Indeks distribusi guru	%	0.3	0.18	0.12	60.00 %
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	43	38.6	4.4	89.77 %
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00 %
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	13000	18781	-5781	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
	1 Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	100.00 %
	2 Angka partisipasi sekolah		15	32.52	-17.52	100.00 %
	3 Kemampuan literasi		58	58.59	-0.59	100.00 %
	4 Kemampuan numerasi		55	56.53	-1.53	100.00 %
	5 Perbedaan skor literasi		21	21.89	-0.89	100.00 %
	6 Perbedaan skor numerasi		5.5	6.62	-1.12	100.00 %
	7 Indeks iklim keamanan		69	69.64	-0.64	100.00 %
	8 Indeks iklim kebhinekaan		20	20.31	-0.31	100.00 %
	9 Indeks iklim inklusivitas		54	55.19	-1.19	100.00 %
	10 Kecukupan formasi guru ASN		0	0	0	100.00 %
	11 Indeks distribusi guru		0	0	0	100.00 %
	12 Proporsi PTK bersertifikat		0	0	0	100.00 %
	13 Proporsi PTK penggerak*		0	0	0	100.00 %

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW II Tahun 2024, Bag. Pemerintahan dan Kerjasama

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Bidang Pendidikan tahun 2024 triwulan II sebesar **19.90%**. Untuk di triwulan II ini memang ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan, dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah triwulan II. Kegiatan yang belum

dilaksanakan adalah pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial serta penyediaan alat bantu.

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan tahun 2024 Triwulan II di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Kesulitan dalam melakukan pendataan siswa Madrasah, dikarenakan tidak terintegrasinya aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dengan EMIS (Education Management Information System);
2. Kesulitan dalam melakukan pendataan siswa tidak bersekolah dan putus sekolah;
3. Kesulitan dalam menentukan target capaian dikarenakan untuk SPM Bidang Pendidikan ini tidak dapat menentukan target BNBA (*by name by address*) di awal tahun – pelaksanaan SPM disesuaikan dengan kebutuhan yang datang ke Dinas Pendidikan Kota Depok.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 Triwulan II di Kota Depok, yaitu:

1. Menggunakan data pendidikan dari Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Kemendikbudristek;
2. Kolaborasi dengan lembaga atau perangkat daerah lainnya;
3. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah (seperti Kementerian Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Pendidikan wilayah lain) dan pihak non-pemerintah (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial, Baznas dan LSM) untuk penanganan PPKS.

2.9.2 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri dari 12 jenis layanan dasar yaitu: 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; 6) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; 7) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM); 10) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; 11) Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan 12)

Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV.

Capaian SPM bidang kesehatan di Kota Depok dapat terlihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.20 Hasil Capaian SPM Bidang Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33.353	5.126	15,37	Vaksin Tetasus Difetri (Td)	26.574	13.029	49,03 %	51.71
						Tablet Tambah Darah	5.979.240	2.931.480	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	33.218	16.286	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	33.218	16.286	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	33.218	16.286	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	4.983	2.443	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Hepatitis B	33.218	16.286	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Sifilis	33.218	16.286	49,03 %	
						Alat deteksi resiko Ibu Hamil : HIV	33.218	16.286	49,03 %	
						Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	33.218	16.286	49,03 %	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	33.218	16.286	49,03 %	
						Media KIE	33.218	16.286	49,03 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Gel USG	2.215	1.086	49,03 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	120	120	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
						Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	33.218	16.286	49,03 %	
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	33.218	16.303	49,08	Formulir Partograf	33.218	16.303	49,08 %	54.74
						Kartu ibu (rekam medis)	33.218	16.303	49,08 %	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	33.218	16.303	49,08 %	
						Media KIE	33.218	16.303	49,08 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis	194	194	100,00 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Kebidanan dan Kandungan				
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	120	120	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.742	15.851	49,94	Vaksin Hepatitis BO	31.742	15.851	49,94 %	54.94
						Vitamin K1 Injeksi	31.742	15.851	49,94 %	
						Salep/Tetes Mata Antibiotik	31.742	15.851	49,94 %	
						Formulir Bayi Baru Lahir	31.742	15.851	49,94 %	
						Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	95.226	47.553	49,94 %	
						Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	31.742	15.851	49,94 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	31.742	15.851	49,94 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga	120	120	100,00 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku				
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	38	38	100,00 %	
						Kader Kesehatan	50	50	100,00 %	
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	167.541	75.208	44,8 9	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	167.541	75.208	44,89 %	49,14
						Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	167.541	75.208	44,89 %	
						Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	167.541	75.208	44,89 %	
						Vitamin A Biru	18.100	9.059	50,05 %	
						Vitamin A Merah	167.541	75.208	44,89 %	
						Vaksin imunisasi dasar: BCG	167.541	75.208	44,89 %	
						Vaksin imunisasi dasar: Polio tetes	167.541	75.208	44,89 %	
						Vaksin imunisasi dasar: IPV	167.541	75.208	44,89 %	
						Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	167.541	75.208	44,89 %	
						Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	167.541	75.208	44,89 %	
						Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib	167.541	75.208	44,89 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	167.541	75.208	44,89 %	
						Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	167.541	75.208	44,89 %	
						Peralatan Anafilaktik	38	38	100,00 %	
						Formula terapi gizi buruk				
						Tenaga kesehatan : Dokter	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	13.634	13.634	100,00 %	
						Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	5.645	5.645	100,00 %	
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	290.671	284.386	97,84	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku	289.117	277.240	95,89 %	95,88
						Form pencatatan/ Buku pemantauan kesehatan	1.554	391	25,16 %	
						Kuesioner Skrining Kesehatan	290.671	284.386	97,84 %	
						Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja	289.117	277.240	95,89 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						di Dalam Sekolah				
						Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	1.554	391	25,16 %	
						Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	42.175	28.043	66,49 %	
						Alat Pemeriksaan Hb	263	263	100,00 %	
						Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	14.989	14.255	95,10 %	
						Media promosi kesehatan	931	929	99,79 %	
						Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	104.642	87.735	83,84 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	120	120		
						Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	100,00 %	
						Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer conselor	13.634	13.634	100,00 %	
						Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	14.152	14.152	100,00 %	
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	571.688	190.297	33,29	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	190	190	100,00 %	42,62
						Alat: Alat ukur berat badan	114	114	100,00 %	
						Alat : Alat ukur tinggi badan	114	114	100,00 %	
						Alat : Alat ukur lingkar perut	114	114	100,00 %	
						Alat : Tensimeter	114	114	100,00 %	
						Alat : Glukometer	114	114	100,00 %	
						Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	114	114	100,00 %	
						Alat: Alat Pemeriksa Hb	114	114	100,00 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Reagen pemeriksaan Hb	114	114	100,00 %	
						Kit Opthalmologi Komunitas	114	114	100,00 %	
						Kuesioner PUMA (Deteksi dini PPOK)	114	114	100,00 %	
						Alat Pelayanan KB	114	114	100,00 %	
						Alat : Tes strip gula darah	571.688	190.297	33,29 %	
						Alat : Lancet	571.688	190.297	33,29 %	
						Alat : Kapas alkohol	571.688	190.297	33,29 %	
						Alat : KIT IVA Tes	571.688	190.297	33,29 %	
						Set Pemasangan dan Pencabutan AKDR	571.688	190.297	33,29 %	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	571.688	190.297	33,29 %	
						Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	571.688	190.297	33,29 %	
						Vaksin Tetanus Difteri (td)	22.772	10.524	46,21 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Tenaga kesehatan : Dokter	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	100,00 %	
						Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	38	38	100,00 %	
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	175.394	62.774	35,79	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	1.001	1.001	100,00 %	45,67
						Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	152	152	100,00 %	
						Alat pemeriksaan kolesterol	152	152	100,00 %	
						Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	175.394	62.774	35,79 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity daily living (ADL Barthel)	175.394	62.774	35,79 %	
						Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	175.394	62.774	35,79 %	
						Media KIE	38	38	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	100,00 %	
						Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	13.634	13.634	100,00 %	
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas	379.903	60.126	15,83	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	379.903	60.126	15,83 %	28,45

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Obat Hipertensi	379.903	60.126	15,83 %	
						Tensimeter	114	114	100,00 %	
						Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	379.903	60.126	15,83 %	
						Media promosi kesehatan	38	38	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	38	38	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	120	120	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	100,00 %	
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang	44.061	13.873	31,49	Obat Diabetes Melitus	44.061	13.873	31,49 %	42,03
						Fotometer atau Glukometer	76	76	100,00 %	
						Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah,	44.061	13.873	31,49 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Kapas Alkohol, Lancet				
						Formulir pencatatan dan pelaporan, aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), ASIK, SIMPUS	44.061	13.873	31,49 %	
						Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	114	114	100,00 %	
						Sarana dan Prasarana	38	38	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	120	120	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	50	50	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Teknis Medis (ATLM)	75	75	100,00 %	
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Jumlah warga negara dengan	2.017	1.166	57,81	Buku Pedoman Diagnosis Penggolonga	38	38	100,00 %	64,37

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				n Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)				
						Penyediaan Psikofarmaka	5	5	100,00 %	
						Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.017	1.166	57,81 %	
						Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.027	1.166	57,52 %	
						Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	76	76	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Dokter	38	38	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	38	38	100,00 %	
						Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	66	66	100,00 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Tenaga Profesional lainnya	2	2	100,00 %	
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulo-sis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31.868	10.173	31,92	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	38	38	100,00 %	40,09
						Reagen Zn TB	31.868	10.173	31,92 %	
						Masker bedah dan masker N95	31.868	10.173	31,92 %	
						Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	63.736	20.346	31,92 %	
						Catridge tes cepat molekuler	22.266	7.108	31,92 %	
						Formulir pencatatan dan pelaporan	31.868	10.173	31,92 %	
						Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	1	1	100,00 %	
						Tuberkulin	3.187	1.017	31,92 %	
						Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan :	120	120		

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Tenaga Kefarmasian				
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38		
						Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	75	75	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Radiografer	10	10	100,00 %	
						Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	38	38	100,00 %	
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemah-kan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemah-kan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38.063	26.087	68,54	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	38	38	100,00 %	73,57
						Tes cepat HIV (RDT) pertama	38.063	26.087	68,54 %	
						Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	38.063	26.087	68,54 %	
						Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana,	38	38	100,00 %	

NO	Jenis Layanan SPM	Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar				Indeks Pencapaian Per Indikator
		Indikator	Target	Realisasi	%	Indikator	Target	Realisasi	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Nomor KTP/NIK				
						Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	194	194	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Perawat	200	200	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Bidan	239	239	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	75	75	100,00 %	
						Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	38	38	100,00 %	
						Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	38	38	100,00 %	
IP SPM BIDANG KESEHATAN TW I TAHUN 2024										**53,60**

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW II Tahun 2024, Bag. Pemerintahan dan Kerjasama

Permasalahan serta solusi dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Kota Depok antara lain:

1. Pengumpulan Data

Permasalahan

a) Penghitungan sasaran program kesehatan bersumber Kementerian Kesehatan RI mengalami perubahan pada bulan februari tahun 2024 setelah sasaran pada rencana aksi SPM tingkat Kota Depok ditetapkan pada bulan Desember tahun 2023.
b) Pengumpulan data sudah didukung oleh sistem informasi namun masih sering terjadi kendala pada beberapa aplikasi

Solusi

a) Melakukan penyesuaian sasaran program kesehatan
b) Memaksimalkan upaya pengumpulan data secara rutin dan *continue* setiap bulan.

2. Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan kebutuhan sudah ditunjang dengan form penghitungan dari Kementerian Kesehatan yaitu Sistem Informasi Costing Bidang Kesehatan (SISCOBIKES). Siscobikes merupakan sebuah tools untuk membantu pemerintah daerah dalam menyusun rencana dan anggaran SPM Bidang Kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya beberapa puskesmas masih kesulitan dalam menghitung kebutuhan untuk SPM Kesehatan menggunakan tools ini. Untuk itu, Dinas Kesehatan memberikan workshop dan pelatihan tentang tatacara penghitungan kebutuhan dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan menggunakan Sistem Informasi Costing Bidang Kesehatan kepada puskesmas.

3. Perencanaan dan Penganggaran

Dukungan anggaran baik dari APBD maupun DAK sudah cukup diberikan oleh pemerintah. Namun, anggaran DAK baru bisa dilaksanakan pada triwulan II yang mempengaruhi realisasi anggaran pendukung SPM Kesehatan sehingga capaian layanan SPM Kesehatan pada triwulan II tahun 2024 masih berjalan.

4. Pelaksanaan

Permasalahan

a) Anggaran yang bersumber dari dana DAK baru bisa dilaksanakan pada triwulan II sehingga kegiatan masih berjalan.
b) Kader kesehatan belum semua mampu menginput data pada aplikasi terutama pada saat kegiatan luar Gedung
c) Beberapa aplikasi pencatatan pelaporan milik Kementerian Kesehatan dilakukan pembaharuan dan pengembangan sehingga mengakibatkan data lama tidak terbaca pada versi yang terbaru

Solusi

a) Memaksimalkan penggunaan anggaran dari sumber APBD dan lainnya serta berkolaborasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam pelaksanaan dan implementasi SPM Bidang Kesehatan

b) Memaksimalkan kegiatan pada triwulan berikutnya

c) Sosialisasi dan pelatihan kepada kader kesehatan

Memaksimalkan upaya pengumpulan data dari aplikasi pencatatan pelaporan secara rutin dan continue setiap bulan agar pelaporan terarsipkan dengan optimal.

2.9.3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

b. Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik

1. Capaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Depok dapat terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.21 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					23.75 %	
01.00	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					17.98 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80%	7.35%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1960	180	1780	9.18 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%	10.63 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	53.16 %	
	1 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum	Rumah Tangga	475	30	445	6.32 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM						
	2 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	475	30	445	6.32%	
	3 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	15	15	0	100 %	
	4 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa,	Rumah Tangga	15	15	0	100 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	tidak berbusa, tidak berbau						
02.00	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					29.52 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	26.05%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani		
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	23648	7700	15948	32.56%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				-20%	3.47 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	17.37 %	
	1 . Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1000	72	928	7.20%	
	2 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah	Rumah Tangga	4912	1853	3059	37.72 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T						
	3 . Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga					TUTUP MUTU

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW II Tahun 2024 (bag. Pemerintahan dan Kerjasama)

Permasalahan

a. Laju pertambahan penduduk lebih cepat dari pada tersedianya layanan akses air minum yang aman dan sistem pengelolaan air limbah yang tersedia.
b. Kurangnya database penduduk rawan air minum.
c. Belum adanya kelengkapan data potensi mata air di Kota Depok.
d. Dalam pelaksanaan kegiatan masih beberapa kali terjadi *overlap* dengan kegiatan PDAM.
e. Keterbatasan anggaran kegiatan serta wewenang dalam intervensi kegiatan.
f. Keterbatasan lahan di permukiman rawan sanitasi karena untuk kegiatan ini diperlukan lahan minimal 30 m^2 .

Solusi

a. Perlu dilakukan *updating* data secara berkala mengenai data penduduk rawan air minum.
b. Perlu dilakukan pendataan secara rinci mengenai data potensi sumber mata air di Kota Depok.
c. Perlu dilakukan pemetaan kegiatan antara PDAM dengan Dinas PUPR.

d. Perlunya rasionalisasi anggaran yang disesuaikan target *output* maupun *outcome* yang akan dicapaidan juga kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan dana bantuan seperti DAK atau lainnya..
e. Pemerintah menyiapkan lahan khusus untuk IPAL Komunal dan SPAM di lokasi permukiman padat penduduk.
f. Perlu disediakan anggaran lebih guna merubah sistem pengolahan IPAL dari anaerob menjadi aerob sehingga penerima manfaat lebih manfaat.

2.9.4 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Jenis-jenis pelayanan dasar pada Bidang Perumahan Rakyat terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yaitu :

a. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Depok sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22 Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat s.d. Triwulan II Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Spm Bidang Perumahan Rakyat							
		Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	(%)	Indikator	Target	Realisasi	(%)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	25	0	0%	Jumlah barang dan/jasa, terdiri dari :			
						1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	0 %
						2. Pembangunan kembali rumah bagikorban bencana	0	0	0 %
						3. Permukiman kembali bagi korban bencana	0	0	0 %
						4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah	Jumlah warga	NA	NA	NA	Jumlah barang dan/jasa, terdiri dari :			

No	Jenis Layanan	Spm Bidang Perumahan Rakyat							
		Penerima Layanan Dasar				Penyediaan Mutu Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Realisasi	(%)	Indikator	Target	Realisasi	(%)
	yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	negarayang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh				1. Fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan	NA	NA	NA
						a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	NA	NA	NA
						b. Proses sosialisasi kepada masyarakat: dan	NA	NA	NA
						c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatut dalam Rencana Aksi	NA	NA	NA
						d. Bantuan akses rumah Sewa Layak Huni	NA	NA	NA

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW. II Tahun 2023, Bag. Pemerintahan dan Kerjasama

Berdasarkan tabel capaian di atas, penerapan 2 (dua) jenis layanan SPM bidang urusan perumahan rakyat tahun 2024 masih difokuskan pada pendataan.

Untuk SPM **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**, pendataan masih dilakukan pada lokasi yang terkena bencana. Data sampai dengan Triwulan II tahun 2024, sudah ada 13 (tiga belas) laporan yang masuk ke Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan survei ke lokasi untuk dilakukan pendataan tingkat kerusakan dan kemudian dihitung nilai usulan bantuan yang akan diberikan. Saat ini sedang berproses penerbitan SK Wali Kota yang menjadi dasar pemberian bantuan bencana kepada warga yang terdampak.

Adapun untuk SPM **Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah** di lokasi rawan bahaya yaitu :

1. Pendataan rumah di Sempadan kali di 4 lokasi :
   a. Sempadan Kali ciliwung;
   b. Sempadan Kali Pesangrahan;
   c. Sempadan Kali Cab. Timur;
   d. Sempadan Kali Krukut;

2. Pendataan rumah di Sejajar rel;
3. Pendataan rumah di bawah sutet.

Data sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, pendataan yang telah selesai dilaksanakan adalah pendataan rumah yang berada di sempadan kali Ciliwung. Sedangkan pendataan rumah di lokasi lainnya akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2024, setelah dilakukan perubahan nomenklatur sub kegiatan, menyesuaikan dengan nomenklatur yang telah di tagging khusus untuk SPM Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi program pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 Triwulan II di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Prosedur Penyusunan SK Penetapan Status Bencana sebagai dasar penerapan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota masih memerlukan waktu yang panjang ;
b. Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
c. Belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Fasilitasi Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. Kurangnya pemahaman dari pelaksana dalam penerapan SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kondisi kota Depok.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 Triwulan II di Kota Depok, yaitu:

a. Melakukan penyelarasan tata naskah SK Penetapan Status Bencana dengan kondisi bencana yang terjadi di Kota Depok ;
b. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
c. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam penerapan SPM Fasilitasi Penyediaan rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d. Melakukan koordinasi ke Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Kemen

PUPR tentang tata cara merelokasi ke Rusunawa milik Pemerintah Kota Depok

2.9.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (SPM Trantibum) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang trantibum yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 2.23 Realisasi SPM Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat s.d. Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						100 %
01.00	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	18	18	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	46	46	0	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	dokumen	2	2	0	100.00 %

	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	126	126	0	100.00 %
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen	1	1	0	100.00 %

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW II Tahun 2023, bag. Pemerintahan & Kerjasama

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2024 Triwulan II sebesar **99.84%.**

Permasalahan

Pada Indikator SPM Trantibum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Kab/Kota tidak dilakukan penyerapan anggaran karena tidak adanya masyarakat yang terdampak.

Solusi

Perlunya mekanisme khusus pelaksanaan indikator SPM Trantibum terkait pelayanan kerugian materiil dan pelayanan pengobatan terutama pada aspek perencanaan dan penganggaran

Sub Urusan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota meliputi: a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel 2.24 Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana s.d. Triwulan II Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	SPM KEBENCANAAN							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pelayanan Informasi Rawan Benacana (Kebencanaan)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	1000	975	97,50 %	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan kajian risiko bencana	1	1	100%
						Identifikasi dan pementaan terhadap warga Negara di kawasan rawan bencana	1000	500	50%
						Melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi (KIE) rawan bencana	1000	500	50%
						Penyediaan dan Pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi public KIE per jenis bencana	1000	500	50%

NO	JENIS LAYANAN	SPM KEBENCANAAN							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		1000 orang	75	7.50%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Sarana Prasarana penanggulangan bencana	15	15	100%
						Peningkatan kapasitas personil/SDM	20	2	10%
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejdian bencana TIDAK ADA SK PENETAPAN STATUS BENCANA				Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari: (TAHAPAN			
						Pendataan			10.94%
						Daftar warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	-	-	-
						Daftar kerawanan tempat tinggal individu warga	-	-	-
						Rekapitulasi aparat dan warganegara berdasarkan kelompok kerawanan desa	-	-	-
						Daftar petugas operasi penanganan darurat bencana berdasarkan lokasi pengungsi	-	-	-

NO	JENIS LAYANAN	SPM KEBENCANAAN							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Rekapitulasi warga Negara wajib latih	-	-	-
						Ketersediaan peralatan pendukung operasi tanggap darurat bencana	-	-	-
						Ketersediaan stok logistic pengungsi	-	-	-
						Daftar warga Negara yang menjadi korban bencana (diisi diperbaharui setiap bencana)	-	-	-
						Daftar status korban bencana	-	-	-
						Daftar petugas aktif pada operasi tanggap darurat bencana	-	-	-
						Daftar kejadian bencana	-	-	-
						Perhitungan:			
						Perhitungan kebutuhan pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-

NO	JENIS LAYANAN	SPM KEBENCANAAN							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Rencana proyeksi kebutuhan pemenuhan pelayanan dan evakuasi korban bencana	-	-	-
						Perencanaan	-	-	-
						Rencana pemenuhan dan kerangka pendanaan untuk pelayanan informasi rawan bencana dan pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	-	-
						Rencana Proyeksi kebutuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	-	-

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW II Tahun 2023, Bag. Pemerintahan dan Kerjasama

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Sub Bidang Kebencanaan triwulan II tahun 2024 sebesar 40.15%. Pada triwulan II ini memang ada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah triwulan II.

Sub Urusan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar sub urusan ini yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran di Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut .

Tabel 2.25 Hasil Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

NO	JENIS LAYANAN	SPM SUB BIDANG KEBAKARAN							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	854 orang	60 orang	7,03 %	Jumlah barang/jasa dan sumber daya manusia, terdiri dari :			
						Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi	226	70	30,97%
						Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2	2	100%
						Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	65	65	100%
						Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia	276	152	91.25%
						Pelayanan pemadaman penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	226	70	30,97%
						Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	226	70	30,97%

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok TW II Tahun 2024, Bag. Pemerintahan dan Kerjasama

Berdasarkan capaian di atas, secara keseluruhan capaian SPM Sub Bidang Kebakaran triwulan II tahun 2024 sebesar **58,58%.** Pada triwulan II ini beberapa kegiatan belum dilaksanakan, dikarenakan rencana pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah triwulan II.

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran triwulan II tahun 2024 di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Dinas Pemadam kebakaran kota Depok melaksanakan dua (2) Sub bidang SPM, Kebakaran dan Kebencanaan, sehingga terdapat keterbatasan dalam pemenuhan Sub SPM tersebut;
b. Kesulitan dalam melakukan pendataan karena terdapat beberapa regulasi terkait pemberian data kependudukan yang tidak boleh diakses ke publik;
c. Adanya keterbatasan anggaran daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran;
d. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemenuhan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran;
e. Kesulitan dalam menentukan target capaian dikarenakan untuk SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran ini tidak dapat menentukan target BNBA (*by name by address*) awal tahun di Kota Depok;
f. Keterbatasan sumber daya manusia (SPM) dalam melakukan pelayanan.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran Triwulan I Tahun 2024 di Kota Depok, yaitu:

a. Perlu segera melakukan penguatan kelembagaan BPBD Kota Depok;
b. Menggunakan data pelaksanaan SPM Sub Bidang Kebencanaan dan Kebakaran yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai data dasar penentuan target;
c. Memaksimalkan pendataan sebagai data dasar penentuan target;
d. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah maupun pihak LSM/NGO dan INGO;
e. Perlu dukungan kebijakan dan anggaran untuk kegiatan pendataan agar data yang disajikan akurat (valid).

2.9.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) BIdang Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lingkup dan jenis pelayanan dasar urusan sosial meliputi :

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti;
3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Capaian SPM bidang sosial di Kota Depok sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat terlihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.26 Hasil Pencapaian SPM Bidang Sosial s.d Triwulan II Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	102	12	11.76%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	102	39	38.24
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	50	26	52.00
						Penyediaan permakanan	58	25	43.10
						Penyediaan sandang	58	26	44.83
						Penyediaan alat bantu	10	2	20.00
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	25	19	76.00
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	1	10.00
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	35	12	34.29

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	1	1	100.00
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layananpendidikan dan kesehatan	50	3	6.00
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	26	65.00
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35	14	40.00
						Layanan rujukan	60	24	40.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	64	7	10.94%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	64	30	46.88
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	15	15	100.00
						Penyediaan permakanan	27	22	81.48
						Penyediaan sandang	27	21	77.78
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	5	5	100.00
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	12	1	8.33
						Pemberian bimbingan sosial	40	10	25.00

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						kepada keluarga anak terlantar			
						Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	1	33.33
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	2	100.00
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	45	19	42.22
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40	14	35.00
						Layanan rujukan	25	13	52.00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	131	23	17.56%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	131	100	76.34
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	45	29	64.44
						Penyediaan permakanan	61	28	45.90
						Penyediaan sandang	61	30	49.18
						Penyediaan alat bantu	10	3	30.00
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	15	7	46.67
						Pemberian bimbingan fisik,	25	20	80.00

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						mental, spiritual dan sosial			
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	60	22	36.67
						Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2	1	50.00
						Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan	25	2	8.00
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	75	29	38.67
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	60	27	45.00
						Layanan rujukan	40	9	22.50
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	284	33	11.62%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Layanan data dan pengaduan	284	58	20.42
						Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	40	30	75.00
						Penyediaan permakanan	54	52	96.30
						Penyediaan sandang	54	23	96.30
						Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	10	7	70.00

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80	1	1.25
						Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	50	33	66.00
						Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2	2	100.00
						Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2	1	50.00
						Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	149	63	42.28
						Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	149	95	63.76
						Layanan rujukan	80	38	47.50
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah	3000	1074	35.80%	Jumlah barang, jasa dan SDM, terdiri dari:			
						Penyediaan permakanan	3000	2182	72.73
						Penyediaan sandang	1000	432	43.20
						Penyediaan tempat penampungan pengungsi	1	1	100.00

NO	JENIS LAYANAN	SPM SOSIAL							
		PENERIMA LAYANAN DASAR				PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			
		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	(%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota				Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	50	25.00
						Pelayanan dukungan psikososial	1	1	100.00

Sumber : Laporan penerapan SPM Kota Depok Tw. II Tahun 2024, Bag. Pemerintahan dan kerjasama

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Pada pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial tahun 2024 Triwulan II di Kota Depok terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

a. Kesulitan dalam melakukan pendataan PPKS (khususnya untuk gelandangan dan pengemis), dikarenakan kategori PPKS tersebut tidak menetap dalam satu kota (berpindah-pindah);
b. Kesulitan dalam melakukan pendataan baru PPKS dikarenakan kekurangan SDM untuk melakukan pendataan baru;
c. Keterbatasan dalam sarana dan prasarana penunjang pelayanan pemenuhan SPM bidang sosial;
d. Keterbatasan sumber daya manusia (SPM) dalam melakukan pelayanan.

Solusi

Solusi terhadap kendala yang dihadapi di atas dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 Triwulan II di Kota Depok, yaitu:

a. Menggunakan data pelaksanaan SPM bidang sosial yang dilakukan pada tahun 2023 sebagai data dasar penentuan target;
b. Memaksimalkan pendataan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) sebagai data dasar penentuan target;
c. Meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, baik dengan pihak pemerintah (seperti Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat maupun Dinas Sosial wilayah lain) dan pihak non-pemerintah (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial, Baznas dan LSM) untuk penanganan PPKS.

2.10. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6)

Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Pemerintah Kota Depok berupaya mencapai seluruh tujuan TPB tersebut. Dari ke-17 TPB, hanya 2 (dua) tujuan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Tujuan ke-7 : Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua; dan Tujuan ke -14 yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Hasil monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran TPB/SDG's tahun 2022 secara lengkap diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29 Evaluasi Kinerja Pencapaian sasaran TPB/SDG's Tahun 2022

1. TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	2.45	2.35 - 2.41	2.53	▼
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persentase	Total 438.761 jiwa (23,52%)	Total 460.803 jiwa (19,77%)	Total 1.767.018 jiwa (92,90%) Dengan rincian: PBI= 507.831 jiwa (26,82%) Non PBI= 1.259.187 jiwa (66,51%)	●
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Disnaker	Persentase	415833	64300 pekerja	NA	NA

	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Dinsos	Orang	225	286	336	
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinsos	Orang	31,463	21,374	30,693	
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								
1.4	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persentase	93,01% (43.438 orang)	97,2% (44.108 orang)	NA	NA
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Persentase	74,53% (34.057 orang)	94,69% (41.962 orang)	97,43% (42.087 orang)	
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPAPMK	Persentase	75.04%	75.15%	50.45%	
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan/ Dinas PUPR	Persentase	87,58% (2.107.875 jiwa)	87,22% (2.032.537 jiwa)	88,64%	
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Kesehatan/ Dinas PUPR	Persentase	91,99% (486.167 KK)	98.73%	99.13%	
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Dinas Rumkim	Persentase	NA	4%	3.64%	
	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	100.95%	98%	98.41%	
	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	75.03%	95.00%	93.02%	
	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Disdukcapil	Persentase	91,28%	96.40%	96.46%	
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								

1.5	**1.5.1***	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Dinas Damkar	Dokumen	Meninggal = 5 orang, luka ringan=63orang, TOTAL = 8 orang	Meninggal= 1 orang, luka ringan=10 orang , Total= 11 orang	Meninggal= 1 orang, luka ringan=10 orang , Total= 11 orang	●
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Dinas Damkar	Dokumen	NA	1 dokumen	NA	NA
	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Dinas Damkar	Dokumen	NA	1 dokumen	NA	NA
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dinas Damkar	Dokumen	1 Dokumen	1 dok	NA	NA
2. TANPA KELAPARAN								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.								
2.1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Persentase	5,52% (5.948 orang)	4,35% (5.435 orang)	5,46% (5.731 orang)	▼
	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DKP3	Presentase desa	NA	Kota Depok hanya di prioritas 2 dan 3 untuk 5 kelurahan (Bedahan, Pasir Putih, Pengasinan, Cipayung Jaya, Leuwinanggung)	NA	NA
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DKP3	Persentase	NA	0	NA	NA
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								
2.2	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di	Dinas Kesehatan	Persentase	5,31% (5.718 orang)	5,41% (6.751 orang)	3,48% (3.637 orang)	●

		bawah lima tahun/balita.						
	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Persentase	5,31% (5.718 orang)	5,41% (6.751 orang)	2,97% (952 orang)	
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Persentase	4,79% (5.156 orang balita gizi lebih dan obesitas; 3,31% (3.568 orang balita terkena wasting); 0,067% (72 orang balita sangat kurus/gizi buruk)	5,11% (6.386 orang balita terkena obesitas; 2,54% (3.171 orang) balita terkena wasting	1,96% (2.048 orang) balita terkena obesitas; 3,06% (3.203 orang) balita terkena wasting	
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Persentase	7,15% (3496/48.928 bumil)	(3.577 orang orang/47.550 orang)	8,22% (3.863 orang/47.022 orang)	
	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Persentase	68,49% (13.591 bayi)	63,4% (14.340 bayi)	74% (11.947/16.144 bayi)	
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DKP3	Persentase	85.6	80	89	
Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.								
2.3	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS	rupiah per tenaga kerja	NA	Rp. 122.354.897 per orang	Rp. 122.354.897 per orang (PDRB =Rp. 91.066.690.000.000,- jumlah tenaga kerja di sekor pertanian=8718 orang)	
2.3.2	2.3.2	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil, menurut jenis dan status adat.	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang me-ningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.								
2.04	2.4.1	Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Dinas PUPR	NA	NA	Berdasarkan kajian tahun 2013 dan 2027 tentang LP2B hasilnya tidak memungkinkan adanya LP2B di Kota Depok	NA	NA
Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian								
2.5	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas.	NA	Persentase	NA	5 varietas, Belimbing Dewa, Alpukat Miki, Nangka	1. Alpukat Pamtasa, 2. Alpukat Penjol Alde, 3. Nangka Kitubin, 4. Cempedak Perigi, 5. Anggur Mulyandari (pengajuan)	

3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								
3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	100.000/ kelahiran hidup	58,45/ 100.000 KH (26 per 44.480 kelahiran hidup)	58,35/ 100.000 KH	56,14/ 100.000 KH (24 kematian/42.747 kelahiran hidup)	
	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan	Persentase	93,02% (43.443 orang)	97.17% (44.108/47.550 x 100%)	100% (44.884/44.884 x 100%)	
	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Dinas Kesehatan	Persentase	93,01% (43.438 orang)	97.17% (44.108/47.550 x 100%)	100% (44.884/44.884 x 100%)	
Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.								

3.2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Persentase	1.35 per 1000 kelahiran hidup (60 kasus)	1.67 per 1000 kelahiran hidup (72 kasus)	2,81 per 1000 kelahiran hidup (120 kematian/42.747 kelahiran hidup)	▼
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	1000/ kelahiran hidup	1.01 per 1000 kelahiran hidup (45 kasus)	1,16 per 1000 kelahiran hidup (50 kasus)	2,39 per 1000 kelahiran hidup (102 kematian/42.747 kelahiran hidup)	▼
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	1000/ kelahiran hidup	1.19 per 1000 kelahiran hidup (53 kasus)	1.54/1 000 KH (67 kematian/43.227 kelahiran hidup)	2,69 per 1000 KH (115 kematian/42.747 kelahiran hidup)	▼
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan	Persentase	93,16% (IDL Kota Depok = 74,53%)	100% (IDL Kota Depok = 94,69%)	100% (IDL Kota Depok = 97,43%)	●
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.								
3.3	3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.	Dinas Kesehatan		220 orang	220 orang	327 orang	▼
	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan		219 orang	217 orang	324 orang	▼
	3.3.2	Kejadian TB per 1000 orang.	Dinas Kesehatan		1,33/1000 orang	1,63/1000 orang	3,13/1000 orang	▼
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan		133,28 orang/100.000 penduduk	163,02 orang/100.000 penduduk	313,96 orang/100.000 penduduk	▼
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan		0,08 (187 orang/1000 penduduk)	8 orang	0,11/1000 orang (209 kasus)	▼
	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan	Persentase	14 kasus filariasis42 kasus kusta	43 kasus filariasis35 kasus kusta	12 kasus filariasis34 kasus kusta	●
	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survey penilaian transmisi tahap I).	Dinas Kesehatan		1 Kota	1 Kota	1 Kota	●
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.								

3.4	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.	Dinas Kesehatan	Persentase	NA	NA	26,21% (Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2022)	
	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persentase	21,77% (139.331 orang)	22,13% (190.813 orang)	18,21% (379.903 orang / 2.085.935 pddk x 100)	
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persentase	NA	6,39% (19.693 orang)	0.01%	
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Kementrian Kesehatan	Kabupaten / Kota	1 Kota	1 Kota	1 Kota	
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5	3.5.1.(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	BNN	Persentase	NA	NA	NA	NA
	3.5.1.(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	BNN	Klien	NA	NA	NA	NA
	3.5.1.(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	BNN		NA	NA	NA	NA
	3.5.1.(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	BNN		NA	NA	NA	NA
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNN		NA	NA	NA	NA
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat	BPS	Persentase	NA	NA	NA	NA

		kontrasepsi metode modern.						
	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPAPMK	Persentase	NA	75.40	50.45%	
	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	DPAPMK	Persentase	NA	27.50	27.00	
	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).		Persentase	NA	NA	9,20% (Sumber Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 Kota Depok)	
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPAPMK	Persentase	2.07	2.10	1.99	
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.								
3.8	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	Persentase	NA	8.90	NA	NA
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Persentase	85.10%	53.98%	92,90% (1.767.018 jiwa)	
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan	Persentase	1.587.790 jiwa (85,10%)	1.257.828 jiwa (53,98%)	Total 1.767.018 jiwa (92,90%)Dengan rincian: PBI= 507.831 jiwa (26,82%)Non PBI= 1.259.187 jiwa (66,51%)	
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.								
3.a	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Persentase	NA	NA	26,21% (Sumber Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2022)	
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								

3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persentase	100%	NA	100% (38/38 puskesmas x 100)	●
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.								
3.c.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Rasio	Spesialis = 43,92 Umum = 21,54 Dokter umum +spesialis = 65,46 Dokter gigi = 6,12 Gigi spesialis = 4,75 Dokter gigi +spesialis gigi=10,87 Bidan= 28,50 Perawat= 124,02	Spesialis = 40,38 Umum = 33,08 Dokter umum +spesialis = 73,46 Dokter gigi = 12,79 Gigi spesialis = 3,13 Dokter gigi +spesialis gigi=15,92 Bidan= 75,92 Perawat= 123,59	Spesialis = 57,73 Umum = 70,25 Dokter umum +spesialis = 127,98 Dokter gigi = 26,78 Gigi spesialis = 6,29 Dokter gigi +spesialis gigi=34,07 Bidan= 62,22 Perawat= 186,97	●
4. PENDIDIKAN BERKUALITAS								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.								
4.1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Persentase	95.00%	100.00%	98.31%	▶
	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Persentase	97.00%	83.50%	98.70%	●
	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	108.17%	100.00%	104.61%	●
	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan	Persentase	92.64%	84.15%	94.06%	●
	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	BPS	tahun	11.28	11.43	11.47	●
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.								

4.2	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	Persentase	61.34%	86.10%	62.11%	▼
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.								
4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;	Dinas Pendidikan		100.95%	87.72%	NA	NA
		Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/sederajat;	Dinas Pendidikan		75.03%	64.72%	NA	NA
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Persentase	98.87%	100.00%	99.42%	▶
5. KESETARAAN GENDER								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPAPMK	dokumen	NA	40	81.00	●
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPAPMK	anak	122 anak	64 anak	86 anak	▶
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPAPMK	Persentase	100%	100%	100%	●
Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	BPS	Persentase	72	NA	NA	NA

	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	BPS	Persentase	22	NA	23.1%	●
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan	Persentase	10.7	NA	9%	●
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPAPMK	Persentase	26%	38%	26%	▶
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DPAPMK	Persentase	46.44%	Esselon II= 35% Esselon III= 40%	47%	▶
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	BPS	Persentase	9.07%	8.90%	26%	▼
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DPAPMK	Persentase	Penyuluhan PLKB/PKB =1052 kali KIE = 372 kali penyuluhan oleh TOGA	Penyuluhan PLKB/PKB=750 kali KIE = 335 kali penyuluhan oleh TOGA	Penyuluhan PLKB/PKB=5380 kali	●
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.			NA	NA	92,09%	●

6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1	**6.1.1**	**Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman. Ditemukan**	Dinkes	Persentase				

6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinkes / PUPR	Persentase	87,58% (2.107.875 jiwa)	87,22% (2.032.537 jiwa)	88,64%	
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PUPR	Jumlah	NA	NA	679 SR	
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinkes / PUPR		87,58% (2.107.875 jiwa)	87,22% (2.032.537 jiwa)	15,43% (Data Akses Aman Air Minum 2022)	
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan								
6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	PUPR	Persentase	98.81%	98.73%	99.14% (542.410 RT)	
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinkes	desa/kelurahan	63 kelurahan	63 kelurahan	63 kelurahan	
	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinkes	desa/kelurahan	17 kelurahan	12 kelurahan	63 kelurahan	
	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	PUPR	Kabupaten / Kota	NA	NA	1	
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	PUPR	Persentase	0.32%	0.34%	0,38% (Data Perhitungan IKK LPPD 2022)	
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.								
6.3	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	PUPR	Kabupaten / Kota	NA	89.55%	1	

	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	PUPR	KK	4083	4912	4493	

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	BPS	Persentase	-1.92%	5,30%-5,78%	5.24%	
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	34,356.00	24.10	38.23	
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Disnaker	Persentase	NA	NA	NA	NA
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	Persentase	NA	0.52%	N/A	N/A
	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	DKUM	Orang	11.11%	17.77%	20%	
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.								
8.5	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Disnaker	Rupiah	NA	N/A	N/A	N/A
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	9.87	8.85	7.82	
	8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	BPS	Persentase	NA	N/A	N/A	N/A
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.								
8.6	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Disnaker	Persentase	NA	N/A	N/A	N/A

Target 8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.								
8.8	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnaker	Perusahaan	NA	N/A	N/A	N/A
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Disporyata	orang per tahun	1.928 orang	N/A	N/A	N/A
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Disporyata	orang per tahun	1.108.023 orang	1,200,000	2,473,480	●
8.9.2*	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	NA	NA				
9. INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR								
Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.								
9.4.1*	9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9.4	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	NA	NA	NA	1%	NA	NA
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Diskominfo	Persentase	NA	NA	NA	NA
10. BERKURANGNYA KESENJANGAN								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1	10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	Persentase	0.344	0.360	0.394	▼
	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	2.45	2.35 - 2.41	2.53	▶

Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPS	Persentase	415,833	64350 pekerja	NA	NA

11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh.								
11.1	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Disrumkim	Persentase	NA	96.00%	73.78%	▶
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Disporyata	kota/ kawasan	NA	1	NA	NA
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLHK	Persentase	76.60%	76.50%	76.10%	▶

12.KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4	12.4.1.(a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	DLHK	Kegiatan / Usaha	16	16 Perusahaan	15 Perusahaan	●
	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	NA	NA	NA		**20.672 ton**	▶

Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.								
12.5	12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang.	DLHK	Unit	319	378 Bank Sampah; 27 UPS	391 Bank Sampah Unit 2 Bank Sampah Induk 28 UPS Organik	
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLHK	ton	168	168 ton	Bank Sampah = 5.51 ton UPS Organik = 64.19 ton	
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								
12.8	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	PD pelayanan publik		NA	NA	NA	NA

13.PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dinas Damkar	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	NA	NA
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.								
13.2	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	DLHK	Dokumen	NA	1 dokumen	1 dokumen	
	13.2.2.	Jumlah kota/kabupaten yang memiliki RAD-GRK	Bappeda/DLHK	Kab/Kota	NA	NA	NA	NA

15. EKOSISTEM DARATAN

Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLHK	Persentase	NA	NA	NA	NA

	15.1.2.	Luas taman kehati	DLHK		NA	NA	NA	NA
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
15.3	15.3.1	Proporsi lahan kritis terhadap luas lahan keseluruhan.	DLHK	Persentase	NA	NA	NA	NA
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DLHK	Persentase	NA	NA	NA	NA
Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.								
15.4	15.4.1.	Persentase Tutupan Hutan	DLHK	Persentase	NA	NA	NA	NA
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DPAPMK	NA	0.039%	NA	NA	NA
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.								
16.5	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Laporan Survei Penilaian Integritas Kota Depok Tahun 2021 (KPK-RI)	poin	NA	73	73.21	●
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	BKD	WTP	WTP	WTP	WTP	●

	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	SETDA (ORB)	Nilai (Predikat)	B	B (68.78)	B (67,10)	
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	SETDA (PBJ)	%	NA	92.41%	63.21%	
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota).	SETDA (Ortala)	Nilai (Kategori)	B (62,90)	B (63.9)	B (64.78)	
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Sekretariat DPRD	Persentase	22%	NA	NA	NA
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persentase	39.29%		38.71%	
16.7.2 .(b)	16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	BPS/ Kesbangpol	indeks	73.1	74.08	**74.08**	
	16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	Kesbangpol	indeks		N/A	NA	NA
	16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik.	Kesbangpol	indeks	71.64	78.16	78.16	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Disdukcapil	Persentase	93.60%		97.53%	

	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Disdukcapil	Persentase	91,28%	96.40%	96.46%	●
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10	16.10.2(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Diskominfo	orang	NA	NA	NA	NA
17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline2020)	Target SDGs	Capaian SDGs	Status Tahun 2022
						2022	2022	
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.								
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPS	Persentase	4.35	1.44	2.02	●
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BPS	Persentase	1.35	1.19	1.69	●
Target 17.8 Mengoperasi- onalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meingkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi								
17.8	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Diskominfo/ BPS	Persentase	83.15%	NA	NA	NA

Sumber : Data Monev TPB Th. 2022, Bappeda, diolah

Keterangan:

●	:	Tercapai (achieved)	Target tahun berjalan dapat tercapai.
▶	:	Akan tercapai/membaik (positive change)	Tren capaian naik dari tahun sebelumnya walaupun belum mencapai target tahun berjalan.
▼	:	Perlu perhatian khusus (negative change)	Tren capaian turun dari tahun sebelumnya dan target tahun berjalan tidak tercapai.

Dari data capaian TPB diatas, ringkasan pencapaian TPB di Kota Depok tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30 Rekapitulasi Pencapaian TPB/SDG's Kota Depok terhadap Target RAD Th. 2022

TUJUAN	JUMLAH TARGET	JUMLAH INDIKATOR	STATUS REALISASI INDIKATOR			
			TERCAPAI	AKAN TERCAPAI/ MEMBAIK	PERLU PERHATIAN KHUSUS	DATA TIDAK TERSEDIA
1. Tanpa Kemiskinan	4	18	9	2	2	5
2. Tanpa Kelaparan	5	14	7	1	1	5
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	10	33	16	2	9	6
4. Pendidikan Berkualitas	4	9	3	0	2	4
5. Kesetaraan Gender	6	11	6	3	1	1
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	3	10	9	1	0	0
7. Energi Bersih & Terjangkau						
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	6	11	4	1	0	6
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	2	3	0	0	0	3
10. Berkurangnya Kesenjangan	2	3	0	1	1	1
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3	3	0	2	0	1
12. Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	3	5	1	2	1	1
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	3	1	0	0	2
14. Ekosistem Lautan						
15. Ekosistem Daratan	3	5	0	0	0	5
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	5	13	8	1	1	3
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	2	3	2	0	0	1
Jumlah Total	60	144	66	16	18	44
Persentase			45.83%	11.11%	12.50%	30.56%

Sumber : Data Monev TPB Th. 2022, Bappeda, diolah

Status pencapaian TPB pada tahun 2022 pada 60 target dan 144 indikator, sebagai berikut :

1) Mencapai target : 66 indikator (45,83%) dari jumlah total 144 indikator;
2) Akan tercapai/membaik dari capaian tahun sebelumnya : 16 indikator (11.11%) dari jumlah total 144 indikator;
3) Perlu perhatian khusus (tidak tercapai/menurun dari capaian tahun sebelumnya) : 18 indikator (12.50%) dari jumlah total 144 indikator;
4) Data capaian tidak tersedia : 44 indikator (30,56%) dari jumlah total 144 indikator.

Secara umum kendala pencapaian :

1) Kesulitan perolehan data capaian dari Perangkat Daerah penanggung jawab.
2) Perbedaan rumus hitung antara indikator sesuai Metadata SDG's dengan rumus hitung capaian kinerja pada Permendagri 86 tahun 2017.
3) RAD TPB belum menjadi produk hukum tersendiri (perwal), RAD TPB yang sudah disusun merupakan bagian dari RAD TPB Prov. Jawa Barat.
4) Belum terbangunnya sistem kelembagaan untuk pelaksanaan rencana aksi daerah TPB/SDGs mulai organisasinya, standar operating procedure termasuk menentukan mekanisme pembiayaannya dimana untuk menyukseskan agenda TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran negara/daerah tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya baik swasta (filantropi) maupuan organisasi non-pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan terhadap pencapaian masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan beserta rencana tindak lanjutnya secara rinci dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31 Identifikasi Permasalahan Pencapaian TPB/SDG's dan Rencana Tindak Lanjut

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1. TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)	Sumber Daya Manusia	Terbatasnya jumlah SDM bidang sosial yang profesional dan berkualitas	Meningkatkan kemampuan SDM di bidang sosial untuk mewujudkan pelayanan yang optimal dalam rangka menangani masalah kemiskinan	Dinas Sosial
Target 1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah porsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional	Kelembagaan	Masing-masing bidang di Dinas Sosial bekerja sendiri-sendiri dalam penanganan masalah sosial / masalah kemiskinan	Menyatukan komitmen dalam pelayanan sosial untuk menangani masalah kemiskinan	Dinas Sosial
	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran untuk pembiayaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin	Membuat skala prioritas anggaran dan mengajukan penambahan pagu anggaran	Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah
	Regulasi	Peraturan yang ada saat ini belum sepenuhnya mempermudah masyarakat mengakses pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat;	Penyempurnaan regulasi terkait program perlindungan sosial, akses pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat	Dinas Sosial, Bagian Hukum Setda
	Operasional	Penggunaan data basis masyarakat miskin secara operasional belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai intervensi dalam program penanggulangan kemiskinan; Keterbatasan sistem/aplikasi yang digunakan untuk mendata masyarakat miskin/ yang berhak mendapat bantuan	Pengembangan aplikasi pendataan masyarakat miskin	Dinas Sosial
	Politik	Pergantian Kepala Daerah akan mempengaruhi berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan	Penyusunan program dan target dalam RPJMD yang berkesinambungan	Dinas Sosial, BAPPEDA

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Lainnya ...	Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan sehingga meningkatkan angka kemiskinan	Mendata masyarakat yang layak untuk mendapat bantuan sosial baik ari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;Mengadakan sosialisasi bagi masyarakat terkait akses pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar	Dias Sosial
1. Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun)	Sumber Daya Manusia	Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC), Kepesertaan JKN Kota Depok per 31 Desember 2022 sebesar 92,90%	Optimalisasi kebijakan pemerintah pusat dan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta jaminan kesehatan	Dinas Kesehatan
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Keuangan		Penambahan dana dari Bantuan Gubernur untuk membantu pembayaran premi BPJS untuk masyarakat miskin / PBI	Dinas Kesehatan
1. TANPA KEMISKINAN (MENGAKHIRI KEMISKINAN	Sumber Daya Manusia	Kekurangnya SDM untuk membantu keberhasilan pelayanan yang lebih prima dan berkualitas	Peningkatan kualitas SDM	Disdukcapil

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN)				
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Kelembagaan	N/A	N/A	
1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahundengan kepemilikan akta kelahiran.	Regulasi	Masih terdapat regulasi pemberlakuan denda keterlambatan pengurusan akta kelahiran	Pencabutan regulasi terkait pemberlakuan denda	Disdukcapil
	Operasional	Masih terdapat masyarakat tidak memahami tentang arti penting akta kelahiran	Sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran	Disdukcapil

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
2. TANPA KELAPARAN Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Sumber Daya Manusia	Masih rendahnya pengetahuan kader kesehatan mengenai tumbuh kembang anak	- Peningkatan kompetensi pada tenaga gizi yang ada di puskesmas- Melakukan pelatihan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita kepada Kader Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Keuangan	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk penyediaan PMT bagi Balita Gizi Kurang	1. Menyediakan alokasi anggaran untuk program peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi pada Dinas Kesehatan yang bersumber dari APBD 2. Menyediakan Dana Alokai Khusus (DAK) Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang digunakan untuk pelaksanakan teknis kegiatan Penanganan Masalah Gizi Masyarakat dan Pembinaan ASI Ekslusif di tingkat Puskesmas 3. Menyediakan biaya pendampingan untuk keluarga pasien dengan gizi buruk yang dirawat di TFC Rawat Inap 4. Menyediakan anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan bagi warga tidak mampu melalui skema PBI dan Bansos	Dinas Kesehatan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Regulasi	1. Masih ada wilayah tertentu yang menolak balita ditimbang di posyandu	Optimalisasi dalam implementasi kebijakan yang mendukung yaitu: 1) Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita (KIBBLA); 2) Perda Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Kota Layak Anak; 3) Perda Nomor 9 tahun 2017 Tentang Ketahanan Keluarga; dan 4) Perda Nomor 17 tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
	Operasional	1. Masih terdapat penyakit penyerta berupa penyakit menular pada balita gizi buruk yang memperberat kondisi dan menghambat pemulihan2. Masih terdapat masalah sosioekonomi yang menjadi variabel tidak langsung kejadian kasus gizi buruk	Melakukan kerjasama lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat	Dinas Kesehatan
2. TANPA KELAPARAN **Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun**				

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
a. Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Sumber Daya Manusia	Berdasarkan FSVA (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) tahun 2022 terdapat 1 (satu) kelurahan yaitu Kelurahan Leuwinanggung Kecamatan Tapos yang masuk daerah prioritas 2 (rentan pangan). Berkurangnya daerah rentan pangan karena adanya perbaikan indikator penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan tenaga kesehatan pada tahun 2022. Pada tahun 2022 terjadi penambahan untuk daerah agak rentan pangan dari 3 kelurahan (tahun 2021) menjadi 11 (pada tahun 2022) karena penyedia pangan berkurang saat pandemi dan masih dalam proses bangkit sebagai penyedia pangan di tahun 2022.	1. Interfensi kegiatan P2L (Pekarangan Pangan Lestari) dan RPL (Rumah Pangan Lestari) pada Kampung Caraka (Cerdas Ramah Keluarga) di 63 kelurahan se-Kota Depok 2. Menambah jumlah cadangan pangan yang disimpan dengan kerjasama bersama Bulog Sub Divre Cianjur	DKP3 dan Bulog Divre II Cianjur dan DisDagin
b. Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
c. Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.	Keuangan	Masih terbatasnya Alokasi Anggaran untuk DKP3	Mengusulkan alokasi anggaran untuk program yang mendukung peningkatan dan kewaspadaan pangan	
d. Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianeka-ragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian	Operasional	Keterbatasan sistem teknologi yang digunakan	Pengembangan aplikasi yang menunjang ketahanan pangan	

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Lainnya	Trend perkembangan Kota Depok adalah Kota untuk pemukiman sehingga tingginya alih fungsi lahan dan berkurangya lahan untuk budidaya pertanian, perikanan dan peternakan.	Menerapkan urban farming (pertanian perkotaan /sesuai dengan karakter Kota Depok)	
3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya	Sumber Daya Manusia	1. Belum semua SDM terampil dalam penanganan dan asuhan pra rujukan terutama Bidan Praktik Mandiri (BPM) yg lebih banyak menangani kasus persalinan dan melakukan rujukan; 2. Pengetahuan masyarakat tentang kehamilan dan persalinan yang aman masih perlu ditingkatkan, diantaranya kehamilan tidak diharapkan, menolak dirujuk 3. Tingginya tingkat migrasi di Kota Depok berimplikasi pada penyebaran penyakit menular, misalnya tingginya kasus beberapa penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/ wabah dan kematian seperti Demam Berdarah Dengue, Diare, ISPA, HIV/ AIDS, TBC dan masih adanya peyakit yang dapat menimbulkan kecacatan seperti Filariasis dan Kusta	1. Membuat Tim AMP, Tim Pembina Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi (RSSIB), serta Tim Pengawas Pelayanan KIBBLA yang telah ditetapkan melalui SK Walikota dan berkomitmen dalam optimalisasi upaya kesehatan ibu dan anak. 2. Peran aktif dan dukungan dari Praktik Mandiri Bidan dalam pelayanan KIA. 3. Peningkatan kompetensi teknis pada SDM Kesehatan, baik bersumber dana APBD II maupun dana BLUD Puskesmas 4. Peningkatan Kompetensi Kader Kesehatan untuk dapat melihat ibu hamil berisiko	Dinas Kesehatan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk	Keuangan	1. Masih terdapat status ekonomi masyarakat kurang, sehingga asupan gizi ibu kurang dan dapat menyebabkan ibu anemia dan BBLR; 2. Masih ada ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan	Meningkatkan alokasi anggaran untuk Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin melalui skema PBI dan diluar kuota PBI	Dinas Kesehatan
	Regulasi		1. Meningkatkan mekanisme pencatatan dan pelaporan dari semua fasilitas kesehatan yang ada, salah satunya melalui aplikasi Sistem Informasi Bidan Praktek Mandiri (SIBIMA);2. Meningkatkan pembinaan ke Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan swasta lainnya;3. Meningkatkan peran aktif dari fasilitas pelayanan kesehatan swasta terhadap kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas terkait program kesehatan ibu dan anak;4. Melaksanakan pembinaan standar pelayanan kesehatan ibu dan bayi di 38 Puskesmas;5. Implementasi kebijakan yang mendukung, diantaranya Perda KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru lahir, Bayi dan Aank Balita) , Perda Kota Layak Anak, Perda Ketahanan Keluarga, Perda Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan serta Perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD);6. Pelaporan dan pengumpulan data berbasis computer dan web sehingga mempermudah pencatatan dan pelaporan.	Dinas Kesehatan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga	Operasional	1. Masih ada kehamilan dengan 4T (terlalu muda dan terlalu tua) sehingga berisiko terjadinya kematian bayi; 2. Belum semua sasaran menjadi peserta BPJS atau siap jaminan kesehatan, sehingga kesulitan mencari RS yang dapat merawat bayi dengan kondisi kritis; 3. Pemberdayaan masyarakat, peran serta masyarakat dan peran lintas sektor masih belum optimal	1. Meningkatnya kerjasama lintas sektor terkait (BPJS Kesehatan, PMI, fasilitas pelayanan kesehatan lain, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat, dll); 2. Meningkatnya sarana penunjang pelayanan kesehatan, sehingga pelayanan lebih optimal; 3. Meningkatnya jumlah rumah sakit yang memberikan laporan kesehatan ibu dan anak, serta hasil pelacakan kematian ibu dan bayi	Dinas Kesehatan
	Lainnya …	1. Sarana pendukung / ketersediaan fasilitas rujukan terutama NICU dan ICU masih kurang;2. Belum semua PKM memiliki alkes dan sarpras sesuai standard Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas,	1. Menyediakan Bank Darah RS (4 RS);2. Menyediakan bahan medis pendukung screening kesehatan ibu hamil (Hemoglobin tes dan rapid HIV)3. Menyediakan obat untuk mendukung puskesmas mampu PONED.4. Terdapat 11 Puskesmas PONED di 11 Kecamatan5. Telah terdapat 23 dari 26 RS dan semua puskesmas sudah berkerjasama dengan BPJS Kesehatan 6. Menyediakan fasilitas rujukan 119 dan ambulance pada seluruh puskesmas di Depok	Dinas Kesehatan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
4. PENDIDIKAN BERKUALITAS	Sumber Daya Manusia	Masih adanya masyarakat yang belum melihat akan pentingnya sekolah jenjang dasar dan menengah	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sekolah jenjang dasar dan menengah	Pemerintah
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Kelembagaan	Masih ditemukannya lembaga pendidikan yang belum memenuhi syarat akreditasi	Melakukan sosialisasi,pembinaan, dan pendampingan pada lembaga	Pemerintah
	Keuangan	Keterbatasan biaya pendidikan pada masyarakat dari keluarga menengah kebawah	Memberikan bantuan pendidikan pada siswa miskin	Pemerintah
5. KESETARAAN GENDER	Sumber Daya Manusia	Budaya Patriarki di Masyarakat	Meningkatkan kuantitas/kualitas sumber daya keluarga dan akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga	
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	Kelembagaan	Peran perempuan di sektor ekonomi masih belum optimal	Memperkuat kelembagaan ketahanan keluarga berbasis masyarakat	

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Politik	Peran perempuan di sektor ekonomi dan politik masih belum optimal	Memperkuat Pengarusutamaan Gender pada sektor Politik	
6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semuaTarget 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan berbagai keputusan untuk mendapatkan pelayanan belum sesuai standar serta perilaku hidup bersih dan sehat belum diimplementasikan secara optimal2. Masih terdapat Kader Kesehatan yang belum mendapat pelatihan teknis bidang kesehatan		Dinas Kesehatan
	Kelembagaan		Kerjasama lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Keuangan		Menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif	Dinas Kesehatan
	Operasional		Menyediakan media KIE untuk melaksanakan upaya promotif, preventif dan kuratif	Dinas Kesehatan
6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat	Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan berbagai keputusan untuk mendapatkan pelayanan belum sesuai standar serta perilaku hidup bersih dan sehat belum diimplementasikan secara optimal 2. Masih terdapat Kader Kesehatan yang belum mendapat pelatihan teknis bidang kesehatan		Dinas Kesehatan
	Kelembagaan		Kerjasama lintas sektor antara Pemerintah Daerah dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Akademisi, LSM, pihak swasta dan masyarakat	Dinas Kesehatan
	Keuangan		Menyediakan anggaran yang cukup memadai untuk upaya promotif, preventif, kuratif serta rehabilitatif	Dinas Kesehatan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan	Operasional	1. Predikat Kota Sehat masih terkendala dengan adanya 4.435 KK yang belum memiliki Septictank 2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap air bersih perpipaan dan non perpipaan,cakupan air bersih perpipaan baru mencapai 22% sedangkan non perpipaan hanya 0,33%	Mengoptimalisasi Pengelolaan Air Limbah dan Air Minum secara berkelanjutan	-
	Lainnya …	1. Disrumkim tidak memiliki sumber data KK yang tidak berakses Septictank yang valid 2. Masih bnyak masyarakat yang menggunakan air tanah untuk kegiatan sehari - hari 3. Masih kurangnya jaringan PDAM ke wilayah pelosok di kota Depok	Melakukan pendataan ulang terhadap KK yang tidak berakses septictank	Disrumkim
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI;	Sumber Daya Manusia	a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur Disdagin; b. Kompetensi SDM pelaku usaha (IKM)	a. Menyusun Anjab dan ABK baru sebagai dasar usulan penambahan pegawai ke BKPSDM; b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi SDM di lingkungan dinas; c. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti bintek/diklat yang diselenggarakan oleh BKPSM, Propinsi maunpun Kementerian; d. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha (IKM).	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Kelembagaan	Dukungan OPD lain dan mitra Disdagin dalam upaya meningkatkan/mempertahankan pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar OPD dan dengan stake holder Disdagin	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Keuangan	Keterbatasan anggaran	Membuat skala prioritas pelaksanaan kegiatan terutama untuk kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, Memanfaatkan sumber pendanaan lainnya seperti Bantuan Keuangan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Regulasi	Adanya regulasi dari pemerintah pusat yang masih multi tafsir dalam pelaksanaannya di pemerintah daerah	Melakukan koordinasi secara rutin dengan pemerintah pusat terutama kementerian teknis dan pemerintah provinsi	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Adanya regulasi terkait alokasi penganggaran sekian persen APBD untuk urusan tertentu sehingga urusan pilihan dipandang menjadi kurang prioritas padahal sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Kota Depok'	Meningkatkan kordinasi intensif kepada TAPD	
	Operasional	Pelaku usaha (IKM) kurangnya memiliki daya saing produk	Memfasilitasi pelaku usaha untuk memperoleh setifikasi Halal; HKI; ISO, SNI	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang menguasai pengelolaan baik dari perencanaan, penatausahaan dan pendataan; Keterbatasan Sumberdaya Manusia yang memahami pengetahuan mengenai Koperasi dan Usaha Mikro; Keterbatasan Sumberdaya Manusia memiliki jiwa kepeimpinan dalam usahanya; Keterbatasan Sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dalam berusaha	Memberikan pelatihan-pelatihan kepada SDM yang memiliki keterbatasan dalam manajemen usaha dan keterampilan; Melakukan koordinasi dengan pihak yang kompeten sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM yang kurang terampil (SDM bukan bidang perkoperasian dan Usaha Mikro)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Lembaga keuangan
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro,	Kelembagaan	Kurang koordinasi dengan stakeholder terkait	Melakukan koordinasi yang intens dalam rangka mendukung kegiatan dan kebijakan bidang perkoperasian dan usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, lembaga keuangan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran; Sosialiasasi dan fasilitasi akses permodalan sudah dilaksanakan namun dibutuhkan peran yang lebih berdampak yaitu peningkatan kerja sama akses permodalan dengan lembaga terkait	Membuat skala prioritas anggaran dan mengajukan penambahan pagu anggaran, Melakukan koordinasi dengan pihak yang kompeten yang memberikan akses UMKM ke layanan keuangan/ lembaga keuangan; Merumuskan bentuk kerja sama yang dapat menyediakan skema permodalan yang lebih terukur dan tepat sasaran bagi target pelaku usaha mikro kota Depok	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, TAPD, lembaga keuangan
	Regulasi	Belum ada kerja sama tertulis dengan lembaga keuangan/perbankan;Kebijakan program Wirausaha Baru (WUB) masih belum mengakomodir kondisi - kondisi yang ada di wilayah;Belum adanya regulasi kewirausaahan yang bersifat sonergis dengan urusan perdagangan perindustrian dan ketenagakerjaan	Membuat MOU dengan lembaga keuangan, membuat kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang perkoperasian dan Wirausaha baru dalam rangka mendorong pertumbuhan dan kemajuan di Bidang Koperasi dan Usana Mikro;Penyusunan Raperda usaha mikro sebagai turunan UU Cipta Kerja dan PP 7 tahun 2021	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Lembaga Keuangan
	Operasional	Inisiatif koordinasi lintas sektoral terkait penciptaan kewirausahaan dan optimalisasi dan pertumbuhan usaha mikro sudah dilakukan namun diperlukan forum atau kelembagaan yang lebih mengikat dan berkelanjutan; Mindset/motivasi pelaku Wirausaha baru sehingga perlu lebih banyak dibutuhkan peran-peran yang lebih teknis dalam Adaptasi Teknologi yang kurang bagi pelaku usaha kategori usia tertentu dalam mengakses informasi dan mengembangkan bisnis secara digital	Dilaksanakan koordinasi secara rutin sebagai modal terbentuknya forum yang berkelanjutan dan sinergis dalam menyusun kebijakan perkoperasian dan usaha mikro; Merekrut lebih banyak pendamping dalam rangka mendukung dan memotivasi peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaku Wirausaha baru; Penerapan IT dalam tata laksana pengembangan usaha mikro disertai dengan sarana dan prasarana yang mendukung	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Lembaga Keuangan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR	Sumber Daya Manusia	- Keterbatasan jumlah SDM pengelola TIK, baik staf administrasi maupun staf teknis - Keterbatasan kompetensi SDM pengelola TIK	- Menyusun anjab dan abk baru sebagai dasar usulan penambahan pegawai pengelola TIK ke BKPSDM - Mengajukan usulan pengiriman peserta peningkatan kompetensi SDM pengelola TIK - Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM pengelola TIK - Mendorong SDM pengelola TIK untuk mengikuti sertifikasi pemenuhan kompetensi - Mencari dan menyebarluaskan informasi peningkatan kompetensi yang diselenggarakan instansi lain baik pemerintah maupun swasta	Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	Kelembagaan	Belum optimalnya kinerja Tim Koordinasi SPBE yang menjalankan fungsi untuk mengarahkan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kota Depok	- Mengefektifkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Depok - Meningkatkan keterlibatan Tim Transformasi Digital	Dinas Komunikasi dan Informatika, Bagian ORB Setda
	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran	Membuat skala prioritas pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan SPBE dan memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lainnya seperti dari Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Pusat atau program CSR.	Dinas Komunikasi dan Informatika, TAPD
	Regulasi	- Terdapatnya regulasi dari pusat yang masih multi tafsir atau Belum dipahami bentuk pelaksanaannya karena belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis- Belum tersedianya seluruh aturan turunan Perwal SPBE yang dibutuhkan dalam implementasi SPBE	- Memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota lain, Institusi Pendidikan, dan institusi terkait lainnya- Secara bertahap melakukan penyusunan aturan turunan Perwal SPBE oleh Perangkat Daerah penanggungjawab	Dinas Komunikasi dan Informatika , Bagian Hukum Setda, Bagian ORD Setda, Semua PD

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Operasional	- Belum lengkapnya data Arsitektur Perangkat Daerah sehingga belum dapat dihasilkan Peta Rencana SPBE yang dapat dijadikan sebagai standar acuan pengembangan SPBE - Belum dijalankan secara menyeluruhnya pedoman penyelenggaraan layanan TIK sesuai arahan Perwal SPBE - Belum terpadunya penyelenggaraan SPBE dengan seluruh Perangkat Daerah sejak tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi - Belum terdapatnya mekanisme pengelolaan layanan publik pada aplikasi DSW - Belum terintegrasinya layanan administrasi pemerintahan dalam aplikasi Teman Kerja	- Mendorong Perangkat Daerah untuk melengkapi data Arsitektur dengan mengacu pada Rencana Induk dan Arsitektur SPBE Nasional, serta RPJMD Kota Depok - Mendorong Perangkat Daerah untuk memahami proses bisnis yang dimiliki dan menyusun inovasi atas proses bisnis tersebut - Melakukan internalisasi terkait pedoman dan alur kerja disetiap level organisasi - Memperkuat koordinasi penerapan manajemen dan tata kelola SPBE bersama dengan Perangkat Daerah terkait - Menyusun mekanisme pengelolaan layanan publik pada aplikasi DSW yang memuat tugas dan tanggung jawab pemilik layanan dan pengelola aplikasi - Menyusun rencana integrasi layanan administrasi pemerintahan dalam aplikasi Teman Kerja dan tahapan implementasinya	Dinas Komunikasi dan Informatika , Bagian ORB Setda, Bappeda, BKD, Irda, TAPD, Semua PD
	Politik	Pergantian Kepala Daerah akan mempengaruhi arah kebijakan	- Menyelaraskan muatan penyelenggaraan SPBE dalam RPJMD dan memberikan kekuatan hukum pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE untuk menjaga keberlangsungan program	Dinas Komunikasi dan Informatika, BAPPEDA, Bagian Hukum
10. BERKURANGNYA KESENJANGAN	Sumber Daya Manusia	- Masih terdapat kesenjangan yang besar antar kecamatan pada nilai IPM, dimana IPM di 4 kecamatan berada di bawah 80. - Masih terdapat kesenjangan Indek pendidikan di tingkat kecamatan di Kota Depok	- upaya peningkatan IPM di 4 Kecamatan yang memiliki nilai IPM di bawah 80	- Bappeda - PD Lingkup Bidang Ekonomi - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	Kelembagaan	- Belum terdapat kelembagaan yang khusus menangani kesenjangan atau gini ratio di Kota Depok - Belum ada kerja sama tertulis dengan lembaga keuangan untuk menfasilitasi akses permodalan bagi usaha masyarakat berpendapatan rendah	- Meningkatkan koordinasi perangkat daerah yang terkait penanganan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan	- Bappeda - PD Lingkup Bidang Ekonomi- Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan
Indikator 10.1.1* Koefisien Gini.	Keuangan	- Belum optimalnya kebijakan fiskal yang dapat mendongkrak ekonomi masyarakat berpendapatan rendah	- Meninjau kembali program/kegiatan yang terkait dalam upaya peningkatan pendapatan bagi masyarakat masyarakat berpendapatan rendah - Mengkaji kemungkinan adanya program kredit usaha untuk peningkatan pendapatan masyarakat pendapatan rendah	- Bappeda - BKD - Dinas Sosial
	Regulasi	- Belum ada kerja sama tertulis dengan lembaga keuangan dalam rangka memberi akses permodalan bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk usaha	- Menggali kerjasama dengan lembaga keuangan - Menciptakan wadah atau lembaga atau memberdayakan wadah yang telah ada dimasyarakat agar terjadi interakdi antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan masyarakat berpenghasilan rendah.	- Bappeda - PD Lingkup Bidang Ekonomi - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan
	Operasional	- Kurang koordinasi antar stakeholder terkait yang menangani kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat - Belum masifnya upaya untuk mengikutsertakan pihak swasta maupun masyarakat dalam rangka memberi akses bantuan atau memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah	- Meningkatkan koordinasi perangkat daerah yang terkait penanganan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan ketimpangan kesejahteran - Mengoptimalkan peran CSR dalam pembangunan	- Bappeda - seluruh Perangkat Daerah
11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN	Sumber Daya Manusia	-	-	-

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Indikator 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Kelembagaan	-	-	-
	Keuangan	Dalam Pengelolaan Sampah masih terkendala dengan pembiayaan terutama untuk yang di TPA karena kondisi sekarang sudah over kapasitas	Sudah ada kajian (DED) Revitalisasi TPA, mengajukan bantuan baik ke Pusat maupun Swasta untuk Revitalisasi TPA	DLHK
	Lainnya	Keterbatasan Lahan TPA Cipayung	Bersurat ke Disrumkim untuk penyediaan lahan tambahan	Disrumkim
12. KOSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam. indikator : 12.8.1.(a) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Sumber Daya Manusia	Belum semua pegawai memiliki kompetensi sesuai penempatan jabatan, misal fungsional	Diusulkan unutk mengikuti bintek/pelatihan fungsional	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kelembagaan	Tidak Ada	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran	Membuat skala prioritas anggaran dan mengajukan penambahan pagu anggaran	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Regulasi	Perlu melakukan perubahan perda perizinan dan non perizinan No. 3 Tahun 2019 tsesuai amanat pusat dimana semua perizinan melali OSS dan SIMBG	Mengajuian perubahan/revisi perda dan membuat drafting terkait perubahan perda	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Operasional	Masih kurangnya sarana prasarana untuk pelayanan	mengajukan anggaran untuk sarpras pelayanan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Sumber Daya Manusia	-	-	-
Target: 16.5 : Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Indikator 16.5.1.(a) : Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Lainnya …	Survei Penilaian Integritas dilakukan secara langsung oleh KPK-RI. Inspektorat Daerah hanya bertindak sebagai fasilitator.	Tidak Ada	Tidak Ada
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan pegawai yang menguasai pengelolaan keuangan baik dari perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban	Penyusunan anjab dan abk sbaru ebagai dasar usulan penambahan pegawai ke BKPSDM	Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Kelembagaan	Target Opini WTP melibatkan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kota Depok	Meningkatkan koordinasi dan rekonsiliasi Data Keuangan setiap Bulan nya	Badan Keuangan Daerah, seluruh PD
indikator 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran	Membuat skala prioritas anggaran dan mengajukan penambahan pagu anggaran	Badan Keuangan Daerah, TAPD
	Regulasi	Perubahan aturan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah	Melakukan revisi terhadap PERDA Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan Daerah, DPRD Kota Depok, Bagian Hukum Setda

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Operasional	Keterbatasan sistem teknologi yang digunakan serta kendaraan operasional penunjang operasi	Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan baik SIPD, SIPKD, SIPKD Modul Aset	Badan Keuangan Daerah, DISKOMINFO Kota Depok
	Politik	Pergantian Kepala Daerah akan mempengaruhi kebijakan dalam hal Kegiatan dan Penganggarannya	Penyusunan Target Opini WTP dalam RPJMD yang berkesinambungan	Badan Keuangan Daerah, BAPPEDA Kota Depok
	Lainnya	Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan rekonsiliasi data keuangan dilakukan melalui Online sehingga terkadang terjadi adanya miskomunikasi data	Peningkatan sistem keuangan data dalam menunjang rekonsiliasi data secara online	Badan Keuangan Daerah
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Sumber Daya Manusia	Kurang Optimal Menerapkan Budaya Kerja dalam Mereviu Kinerja secara Berkala	Pelaksanaan Bimtek Budaya Kerja pada Lingkup Pemerintah Kota Depok	Setda dan Semua PD
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Kelembagaan	-		
Indikator: 16.6.1.(b): Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Keuangan	Penyerapan anggaran belum optimal karena sesuai perencanaan, kegiatan pengembangan aplikasi e-SAKIP baru dilaksanakan pada TW 3 dan kegiatan perjalanan dinas terkait SAKIP menyesuaikan agenda dari Provinsi yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran pada kategori LS dan uang saku perjalanan dinas.	1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan aplikasi e-SAKIP sehingga dapat terealisasi tepat waktu sesuai perjanjian LS;2. Melakukan monev terkait SAKIP ke Perangkat Daerah sebagai bahan koordinasi dengan Provinsi yang diharapkan dapat menjadi perbaikan.	Bag ORG Setda
	Operasional	Keterbatasan sistem teknologi yang digunakan serta kendaraan operasional penunjang operasi	Pengembangan aplikasi e-SAKIP baik modul, informasi yang perlu ditampilkan, dan menu yang user friendly	Setda dan Semua PD
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Sumber Daya Manusia	Kurang Optimal Menerapkan Budaya Kerja dalam Mereviu Kinerja secara Berkala	Pelaksanaan Bimtek DPRD dan Sekretariat DPRD pada Lingkup Pemerintah Kota Depok	Sekretariat DPRD
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif,	Kelembagaan			

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.				
	Operasional	Kurang Optimalnya Penerapan sistem untuk mengevaluasi permasalahan Internal	Pelaksanaan Rapat penerapan sistem Evaluasi internal secara Berkala	Sekretariat DPRD
16. PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan Pegawai yang menguasai pengelolaan PPID	Pelaksanaan Diklat bagi pegawai pengelola PPID	Dinas Komunikasi dan Informatika
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Kelembagaan	Belum diselenggarakannya sertifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bekerja sama dengan Kementrian Kominfo maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Rencana Penyelenggaraan sertifikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementrian Kominfo, Pemprov Jawa Barat
	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran	Membuat skala prioritas anggaran dan mengajukan penambahan pagu anggaran "	Dinas Komunikasi dan Informatika, TAPD
17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan jumlah petugas pajak di lapangan yang ada	Penyusunan anjab dan abk baru sebagai dasar usulan penambahan pegawai ke BKPSDM	Badan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia
Target : 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. Indikator : 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Kelembagaan	Tidak Ada	Tidak ada	Badan Keuangan Daerah, Bagian ORB Setda
	Keuangan	Keterbatasan jumlah anggaran	Membuat skala prioritas anggaran dan mengajukan penambahan pagu anggaran	Badan Keuangan Daerah, TAPD

TUJUAN SDGS	IDENTIFIKASI MASALAH		RENCANA TINDAK LANJUT	INSTITUSI PELAKSANA PEMERINTAH/ NON PEMERINTAH
	KATEGORI *	DESKRIPSI MASALAH		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
	Regulasi	Perubahan aturan mengenai Pajak Air Tanah	Melakukan revisi terhadap PERDA Pajak Air Tanah	Badan Keuangan Daerah, DPRD Kota Depok, Bagian Hukum Setda
	Operasional	Keterbatasan sistem teknologi yang digunakan serta kendaraan operasional penunjang operasi	Pengembangan aplikasi pajak baik SIMPAD maupun sistem PBB BPHTB serta aplikasi pembayaran online	Badan Keuangan Daerah, DISKOMINFO Kota Depok, Wajib Pajak
	Politik	Pergantian Kepala Daerah akan mempengaruhi kebijakan Peningkatan PAD	Penyusunan Target PAD dalam RPJMD yang berkesinambungan	Badan Keuangan Daerah, BAPPEDA Kota Depok
	Lainnya	Adanya pandemi Covid 19 mengakibatkan penurunan tajam Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah	Membuat strategi penagihan pajak daerah yang memenuhi protokol kesehatan serta membuat kebijakan kemudahan pembayaran bagi wajib pajak dan penghapusan denda	Badan Keuangan Daerah, Wajib Pajak

Sumber : Data Monev TPB Th. 2022, Bappeda, diolah

2.11 Penanggulangan Masalah Stunting

Menurut WHO definisi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan pekermbangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang terjadi dalam 1000 hari pertama kelahiran.

Indonesia merupakan negara dengan prevalensi kasus stunting yang cukup tinggi, berdasarkan data Survey Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022 prevalensi kasus stunting di Indonesia mencapai 21,6%, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 24,4%, walaupun menurun angka tersebut masih tinggi dari standar WHO yang menetapkan dibawah 20%.

Pemerintah pusat membuat kebijakan untuk mempercepat penurunan prevalensi penurunan stunting terintegrasi, holistik dan berkualitas dengan menerbitkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan sunting dengan taget penurunan sampai dengan tahun 2024 sebesar 14%. Stategi yang dilakukan melalui intervensi sensitif dan spesifk melalui lima pilar strategi nasional percepatan penurunan stunting dan juga melaui delapan aksi percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil pengukuran SSGI tahun 2022 prevalensi kasus stunting yang terjadi di Kota Depok sebesar 12,06% naik dari tahun 2021 sebesar 12%. Walaupun mengalami kenaikan tetapi masih dibawah target nasional. Akan tetapi berdasarkan SSGI Tahun 2023 kasus stunting di Kota Depok mengalami kenaikan menjadi 14,3%. Hal ini menjadi bentuk perhatian bahwa permasalahan stunting di Kota Depok belum selesai karena banyaknya faktor terutama masalah migrasi penduduk yang cukup tinggi. Angka prevalensi stunting di Kota Depok kedua terendah di Jawa Barat untuk tahun 2022 dan 2023.

Pada bulan Februari 2024 Dinas Kesehatan mencatat ada 3.463 balita atau 3,46% balita mengalami stunting, sedangkan sebelumnya pada bulan agustus 2023 terdapat 3.283 balita atau 3,24% balita mengalami stunting. Angka ini diperoleh berdasarkan hasil bulan penimbangan balita yang dihimpun oleh aplikasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat (EPPGBBM). Data tersebut menunjukan terdapat peningkatan angka stunting sebesar 0,22%.

Dari 3.463 balita terdapat 1.716 Balita (49,6%) yang masih stunting dari hasil pengukuran tahun 2023 dan 1.747 Balita (50,4%) yang merupakan stunting baru. Balita Stunting baru paling banyak ditemukan pada usia 12-23 bulan yaitu sebanyak 564 Balita. Selain itu tidak terjadi perubahan signifikan persentase Balita stunting pada 3 (tiga) kecamatan dengan persentase Stunting tertinggi yaitu Kecamatan Bojongsari, Sawangan dan Tapos.

Dari data yang diperoleh juga didapatkan informasi bahwa terdapat kenaikan persentase Balita Stunting Non DTKS. Pada Februari 2024 jumlah Balita Stunting Non DTKS sebanyak 2.708 Balita (78,2%) meningkat dari tahun 2023 yaitu sebayak 2.513 Balita.

Dalam rangka upaya penurunan stunting dan gizi buruk, Pemerintah Kota Depok menerapkan pendekatan intervensi secara konvergen yang melibatkan multisektor diberbagai tingkatan. program percepatan perbaikan gizi dapat mulai dilakukan dengan memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Program tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia. Oleh Karena itu anak-anak harus

memperoleh pelayanan kesehatan, gizi, air minum dan sanitasi. Selain itu juga anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang layak dan perlindungan sosial.

Percepatan perbaikan gizi anak harus dilakukan dengan baik dari segala aspek sehingga dapat memaksimalkan upaya mewujudkan *zero stunting*. Dinas Kesehatan juga melakukan intervensi spesifik dan sensitif dengan lintas sektor dengan melakukan pemberian makanan tambahan bagi balita kurang gizi dan ibu hamil. Hal tersebut juga didukung program makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

Dalam upaya untuk menurunkan prevalensi kasus stunting, Pemerintah Kota Depok telah mengadopsi kebijakan pemerintah pusat dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) melalui penerapan delapan aksi percepatan penurunan kasus stunting. Pelaksanaan Intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS).

Upaya penurunan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara terintegrasi atau terpadu dan dilaksanakan melalui (delapan) aksi, yaitu:

1. Analisis Situasi Program Penurunan Stunting;
2. Penyusunan Rencana Kegiatan;
3. Rembuk Stunting;
4. Peraturan Bupati/Walikota tentang Peran desa;
5. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia;
6. Sistem Manajemen Data Stunting;
7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting;
8. Reviu Kinerja Tahunan.

Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Depok antara lain:

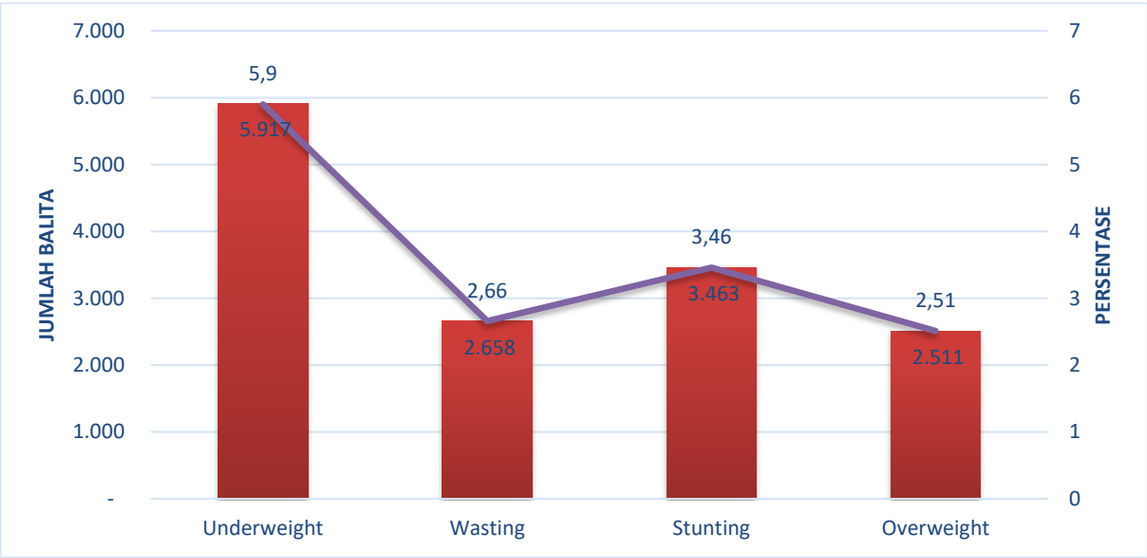
1. Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan dan Kelurahan;
2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi berkala setiap 3 bulan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
3. Melaksanakan Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan TPPS Kecamatan dan Kelurahan;
4. Melaksanakan penarikan data balita stunting di Bulan Penimbangan Balita bulan Februari Tahun 2023
5. Membentuk Tim Audit Kasus Stunting;
6. Melaksanakan Audit kasus stunting dimulai dari Kecamatan dengan angka balita stunting terbanyak pada semester II Tahun 2024;
7. Melaksanakan Diseminasi hasil Audit Kasus Stunting pada semester II;
8. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Forum Kemitraan Ziswaf terkait peran serta Ziswaf didalam percepatan penurunanan stunting di Kota Depok;
9. Melaksanakan Kunjungan silaturahmi ekspose data balita stunting yang dapat diintervensi oleh Lembaga Ziswaf menjadi Gerakan mendampingi anak stunting sejak dini;
10. Penginputan *master ansit* dan data aksi konvergensi stunting pada Web Monitoring Bangda Kemendagri.

2.11.1 Pelaksanaan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Status gizi balita di Kota Depok setiap tahunnya disampaikan berdasarkan hasil penimbangan balita bulan Februari dan Agustus. Data yang dikumpulkan meliputi identitas balita, data Berat Badan dan Tinggi Badan balita 0–59 bulan. Data tersebut dipilah berdasarkan usia 0-23 bulan dan 24-59 bulan dan 0-59 bulan, dengan Indikator status gizi yang di nilai digunakan adalah Berat badan menurut umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) dan Berat badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB).

Indikator Kinerja Program Gizi pada RPJMN untuk masalah status gizi balita menggunakan istilah *Wasting* untuk Indikator BB/PB atau BB/TB yaitu gizi kurang dan gizi buruk dalam RPJMD dikenal dengan istilah kurang gizi. Sedangkan untuk Stunting, indikator yang digunakan adalah PB/U atau TB/U (perawakan pendek dan sangat pendek), *serta underweight* untuk dan indikator BB/U (anak yang memiliki berat badan kurang dan sangat kurang menurut umurnya). Gambaran status gizi balita di Kota Depok tersebut dapat dillihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.7 Rekapitulasi Status Gizi Balita Hasil Bulan Penimbangan Balita Bulan Februari 2024

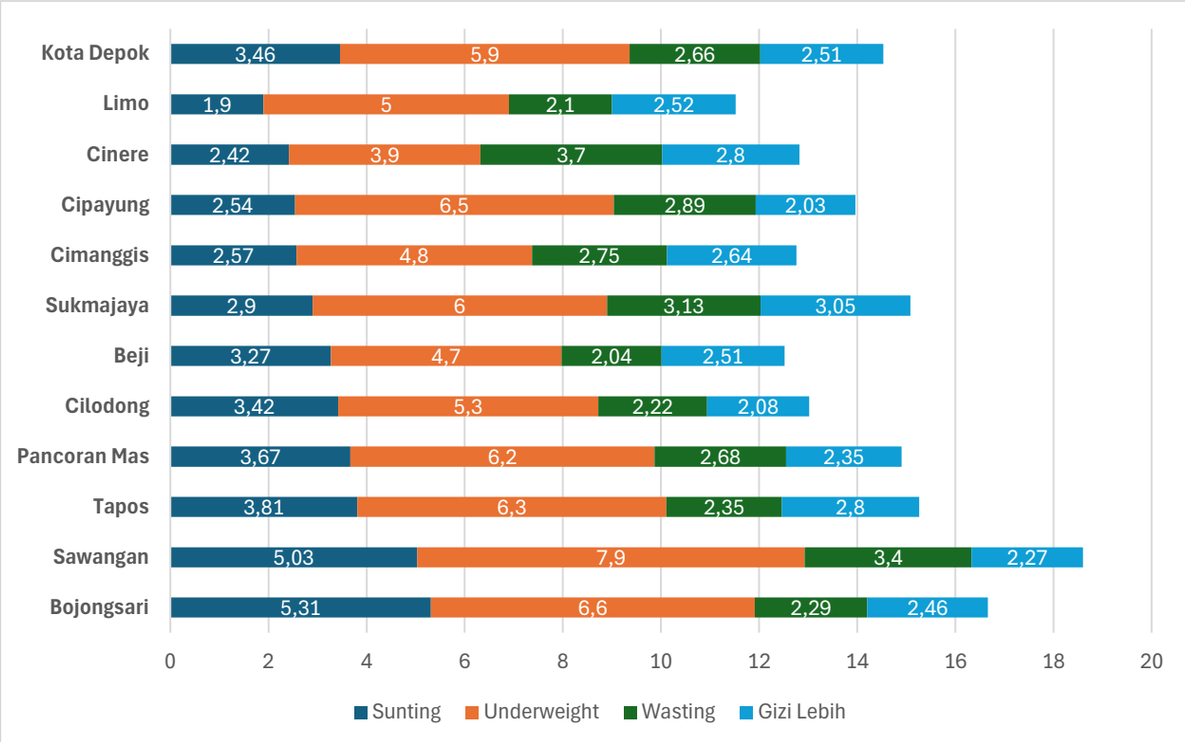


Sumber : E-PPGM, 2024

Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa masih terdapat 5.917 balita dengan status berat badan kurang dibandingkan umurnya *(underweight)*. Selain itu juga masih terdapat 3.463 balita yang stunting dari 103.241 Balita yang diukur. Namun indikator masalah gizi balita yaitu *Underweight*, Stunting dan *Wasting* masih berada dibawah ambang batas yang telah ditentukan setiap tahunnya dan berada di bawah target dari Kementerian Kesehatan RI.

Berdasarkan data prevalensi stunting dan hasil pengukuran EPPGBM bulan Februari Tahun 2024 menunjukan bahwa terdapat 1.716 Balita (49,6%) yang masih stunting dari hasil pengukuran tahun sebelumnya dan terdapat balita stunting baru sebanyak 1747 balita (50,4%) yang mana dari stunting baru tersebut ternyata 564 adalah baduta (12-23 bulan).

Gambar 2.8 Grafik Persentase Status Gizi Balita Berdasarkan Kecamatan Bulan Februari 2024



Sumber : E-PPGM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki kategori tertinggi untuk capaian persentase balita Underweight, Wasting dan Stunting dengan rincian sebagai berikut:

1. Persentase Balita *Underweight* tertinggi adalah Kecamatan Sawangan (7,9%);
2. Persentase Balita *Wasting* tertinggi adalah Kecamatan Cinere (3,70%);
3. Persentase Balita Stunting tertinggi adalah Kecamatan Bojongsari (5,31%);
4. Persentase Balita Gizi Lebih tertinggi adalah Kecamatan Sukmajaya (3,05%).

Indikator status gizi panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur (PB/U atau TB/U) menggambarkan keadaan gizi masa lalu terutama yang berkaitan dengan keadaan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kurang gizi serta keadaan lingkungan yang tidak baik, seperti perilaku tidak sehat yang bersifat menahun

Gambar 2.9 Distribusi Status Gizi Balita Berdasarkan BB Menurut TB Pada Balita Stunting



Sumber : E-PPGM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh informasi bahwa dari 3.463 Balita Stunting terdapat 2.280 Balita Stunting yang juga mengalami *Underweight (*kurang dan sangat kurang), 535 Balita Stunting juga mengalami *wasting (*Gizi kurang), 18 Balita Stunting mengalami risiko gizi lebih, 4 Balita Stunting juga mengalami obesitas dan 1 Balita merupakan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

Kondisi Gizi Lebih, Risiko Gizi lebih dan Obesitas pada anak stunting kemungkinan terjadi karena pola konsumsi kalori yang berlebih seperti karbohidrat dan lemak daripada protein (gizi tidak seimbang). Terdeteksinya anak yang mengalami masalah gizi dapat dilihat dari Grafik KMS pada Buku KIA. Pada balita stunting juga ada yang mengalami gizi buruk. Balita ini juga menjadi perhatian dan sudah mendapatkan penanganan dari Puskesmas.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam percepatan penurunan stunting dalam intervensi sensitive dan spesifik diantaranya:

1. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan dan non Kesehatan,
2. Peningkatan Kapasitan SDM Kesehatan tentang konseling pemberian makanan bayi dan anak untuk intervensi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
3. Peningkatan Kapasitas Kader berkenaan dengan 25 kompetensi kader, pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)
4. Pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk antropometri pada 1055 posyandu dan USG 2D bagi 38 Puskesmas.
5. Penyediaan dukungan anggaran di tiap kelurahan pada menu dana kelurahan.
6. Penguatan pelayanan kesehatan bagi balita mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian imunisasi dasar lengkap,pemberian kapsul Vitamin A 2 kali setahun.
7. Penyediaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita Kurang Gizi dan Bumil Kurang Energi Kronis (KEK),
8. Suplementasi Vitamin A, pemberian obat cacing bagi anak dan balita dan tablet penambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil.

9. Melakukan kegiatan kelas ibu hamil dan ibu balita sebagai sarana edukasi bagi Masyarakat untuk meningkatan pemahaman tentang gizi dan pelayanan Kesehatan bagi ibu hamil. Ibu bersalin, bayi dan balita.
10. Melatih tenaga kesehatan menjadi konselor menyusui sebagai upaya untuk meningkatkan cakupan ASI ekslusif dan mendukung pemberian ASI sampai 2 tahun atau lebih.
11. Kegiatan aksi bergizi dengan sasaran remaja putri bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pola hidup sehat, minum bersama tablet tambah darah Peningkatan sosialisasi dan melakukan Konseling Informasi Edukasi (KIE) secara luas melalui berbagai media dan dukungan lintas program dan sektor
12. Peningkatan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat untuk bayi balita, remaja putri, ibu hamil dan pemeriksaan calon pengantin tidak hanya pada Fasyankes Pemerintah, namun juga swasta.
13. Penyediaan fasilitas pelayanan Theurapetic Feeding Center (TFC) di puskesmas
14. Kegiatan bimbingan konseling bagi calon pengantin bekerja sama dengan Lembaga masyarakat terkait.
15. Melakukan kegiatan skrining anemia bagi remaja putri dan ibu hamil.
16. Optimalisasi pencatatan pelaporan pada e-ppgbm melalui link https://sigiziterpadu.kemkes.go.id..
17. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TPPS) baik tingkat Kota sd tingkat Kelurahan yang melibatkan kolaborasi lintas program dan sektor dipimpin oleh Kepala Daerah.
18. Mengadakan program peningkatan gizi yang melibatkan masyarakat sebagai intervensi sensitive yaitu program makanan B2SA (Beragam, bergizi seimbang dan aman), Gerakan Gemar Makan Ikan , pekarangan pangan lestari (P2L).
19. Peningkatan kapasitas kader tentang pelatihan konseling pemberian makanan bayi dan anak untuk intervensi 1000 hari pertama kehidupan, pelatihan kader terampil cegah stunting, pelatihan kesehatan keluarga, pelatihan duta stunting, pelatihan pemantauan pertumbuhnan dan perkembangan, pelatihan manajemen stunting.
20. Penyediaan sarana sanitasi dasar dan air bersih termasuk deklarasi 100% Open Defecation free (ODF). Depok ditandai dengan bertambahnya jumlah Kelurahan yang mendeklarasikan diri sebagai Kelurahan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (ODF = Open Defecation Free). Dari 17 Kelurahan di tahun 2020 menjadi 41 Kelurahan di tahun 2021 dan pada tahun 2022 Kota Depok telah mendeklarasikan 100% ODF. Selain itu juga dilakukan kegiatan untuk memotivasi masyarakat secara terus menerus agar melestarikan perilaku ODF.
21. Pembinaan yang dilakukan kepada institusi Pendidikan PAUD dalam rangka pemantauan tumbuh Kembang balita.
22. Pemberdayaan kelompok remaja melalui inovasi Stunting Warrior yang melibatkan Forum Genre sebagai konselor sebaya dalam pendampingan minum tablet tambah Darah pada remaja putri
23. Kolaborasi dengan IDAI dan RS Swasta dalam konsultasi pemberian terapi bagi balita dengan gangguan gizi.
24. Penguatan Upaya Kesehatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) diantaranya posyandu, posbindu, posmaja dalam upaya percepatan penurunan stunting.

25. Pelaksanaan Gerakan Masyarakat (Germas) untuk hidup sehat melaksanakan pola hidup sehat dan pola gizi seimbang.
26. Melakukan strategi Prevent, Detect dan Response, diantaranya:
    a. Prevent : Fokus pada sosialisasi dan intervensi perubahan perilaku;
    b. Detect : Fokus pada skrining dan surveilans secara berkala;
    c. Response : Melakukan pendampingan keluarga berisiko stunting dan One Stop Service Stunting.

Adanya Keputusan Wali Kota Depok tentang Penetapan Lokasi Kelurahan untuk Program Penurunan dan Pencegahan *stunting* di Kota Depok berimplikasi pada alokasi anggaran penanganan stunting menjadi 63 Lokasi Kelurahan sehingga pemanfaatan dana menjadi maksimal. Berbagai sumber anggaran dimanfaatkan untuk penanganan dan pencegahan stunting, baik dari sisi intervensi spesifik maupun intervensi sensitif.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam upaya penanganan *stunting* seperti, edukasi bagi keluarga dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pelatihan kader tentang pemantauan tumbuh kembang dan Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) serta pemberian konseling keluarga, Pemberian Makanan Tambahan bagi balita Kurang Gizi dan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu hamil KEK . Selain itu juga dilakukan usaha untuk optimalisasi kelas ibu hamil, kelas ibu balita dan kunjungan balita di posyandu, kelas PMBA untuk diberikan konseling gizi dan kesehatan kepada sasaran 1000 HPK. Seluruh kelas tersebut mencakup Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak usia 0 -23 bulan.

Pemberian paket makanan gizi seimbang bagi sasaran 1000 HPK (anak baduta yang stunting dan Ibu hamil) juga telah dilakukan sebagai salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program D'Sunting Menara (Depok Bebas Stunting Menuju Kota Depok Ramah Anak) yang diinisiasi oleh Ketua TP PKK Kota Depok. Pemberian paket makanan ini merupakan salah satu upaya untuk mengedukasi Ibu tentang pola makan sehat dan seimbang pada keluarga sehingga dapat mencegah terjadinya stunting. Penyediaan paket makanan ini tanpa menggunakan anggaran APBD tapi dengan melibatkan CSR dan sumber daya masyarakat lainnya.

Kelompok berisiko yang perlu mendapatkan perhatian antara lain remaja putri, calon pengantin, wanita usia subur, Ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir dan anak usia Bawah Dua Tahun (Baduta). Remaja Putri perlu disiapkan untuk menjadi calon pengantin pada usia idealnya, sehingga saat hamil dapat menjadi ibu hamil yang sehat dan berperilaku sehat, sehingga bayi yang dikandung pun dapat lahir dengan selamat, sehat dan cerdas. Bayi yang telah dilahirkan tersebut berhak untuk mendapatkan IMD, ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI serta makanan balita sesuai yang direkomendasikan yang sesuai sehingga pertumbuhan otaknya dapat optimal dan menjadi SDM berkualitas.

Dalam Upaya percepatan penanganan stunting dari hulu ke hilir Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Surat Edaran kepada KUA, Camat, Lurah yang menginformasikan terkait bilamana terdapat Catin (Calon pengantin) yang akan membuat rekomendasi menikah maka yang bersangkutan wajib terlebih dahulu melaksanakan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu serta melakukan input data

dalam aplikasi Elsimil dan dilakukan pendampingan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga). Selain itu juga adanya Surat Edaran ke sekolah khususnya sekolah menengah untuk pelaksanaan minum TTD (Tablet Tambah Darah) pada remaja putri.

Berdasarkan laporan pelaksanaan aksi konvergensi dan input data pada *Web Monitoring* Bangda Kemendagri pada umumnya pada pelaksanaan 8 (delapan) Aksi adalah sebagai berikut:

1. Master Ansit

Dalam master ansit terdapat beberapa sub diantaranya adalah:

a. Data sasaran

Data sasaran sampai dengan semester 2 sudah terisi lengkap dari 63 kelurahan yang memuat informasi sasaran jumlah keluarga berisiko stunting, jumlah balita pendek dan sangat pendek beserta nama puskesmas dan nama desa/kelurahan.

b. Data cakupan layanan

Data capaian program/kegiatan pada setiap indikator cakupan layanan (Essential) juga terisi 32 indikator dari 29 indikator data cakupan layanan esensial.

c. Data cakupan layanan *supply*

Data status pelaksanaan program indikator *supply* (baseline) berdasarkan urusan pada OPD dan TP2S terisi sebanyak 29-30 dari 35 (82-85%). Data yang belum terisi adalah:

1. Data supply agama: tidak terlaksananya Forum Komunikasi Perubahan, menjadi evaluasi untuk Tahun 2024
2. Perilaku dalam penurunan stunting lintas agama.
3. Data *Supply* Keluarga Berencana 1: tidak tersedianya Data Keluarga Risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga (siga) sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2023 data Keluarga Risiko Stunting hanya dilakukan 1 (satu) kali pendataan.
4. Data *Supply* Keluarga Berencana 1: tidak tersedianya Data Hasil Surveilans Keluarga Resiko Stunting (2 kali), p[ada tahun 2023 data hasil surveilans Keluarga Resiko Stunting hanya dilakukan 1 (satu) kali survey.
5. Data *Supply* Pangan: tidak tersedia Persentase Pengawasan Produk Pangan Fortifikasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Usaha, karena Kota Depok tidak memiliki BPOM sehingga tugas ini tidak bisa dilakukan.
6. Data S*upply* Kesehatan: belum terselenggaranya audit kasus stunting pada anak stunting di bawah dua tahun di seluruh kelurahan. Tahun 2023 Audit kasus stunting sudah dilaksanakan di 4 (empat) kelurahan oleh TPPS Kota, untuk tahun 2024 Audit Kasus Stunting telah menjadi kegiatan wajib bagi TPPS Kelurahan sehingga dapat dilakukan di 63 kelurahan.

d. Pemetaan Program

Data program kegiatan semua indikator pada tahun berjalan untuk mendukung percepatan penurunan stunting sudah terisi semua (100%). Data kegiatan dari semua indikator yang mendukung penurunan stunting tercatat dalam matrik pemetaan program baik bersumber dana APBD maupun DAK non fisik.

2. Aksi 1. Analisa Situasi

Analisa situasi program pencegahan dan penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kota yaitu sebaran keluarga berisiko stunting, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan. Analisis situasi dilakukan untuk mengenali permasalahan dalam integrasi intervensi gizi spesifik dan sensitif pada kelompok sasaran. Hasil analisis situasi merupakan dasar perumusan rekomendasi kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan integrasi intervensi gizi bagi kelompok sasaran.

Sasaran prioritas percepatan penurunan stunting meliputi 5 (lima) kelompok, yaitu: remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 – 59 bulan. Analisis ketersediaan program dan manajemen layanan dilakukan untuk mengidentifikasi program atau kegiatan pokok seperti Kesehatan ibu dan anak (KIA), program perbaikan gizi masyarakat termasuk kegiatan perubahan perilaku, program air minum dan sanitasi, perlindungan sosial, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta seluruh program bagi setiap sasaran prioritas percepatan penurunan stunting yang pendanaanya dapat bersumber dari APBD, APBD Provinsi termasuk DAK.

Dari hasil pelaksanaan analisa situasi maka Kota Depok telah menetapkan lokasi prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2023 berdasarkan data prevalensi stunting, jumlah kasus stunting dan keluarga berisiko stunting. Dikarenakan kondisi yang dinamis sehingga Tahun 2023 semua 3kelurahan (63 kelurahan) menjadi sasaran lokus percepatan penurunan stunting. Dalam aksi 1. analisa situasi terdapat 3 sub diantaranya:

1.1 Rekomendasi daftar lokasi prioritas (fokus penanganan)

Pada tahun 2023,2024 dan 2025, lokasi prioritas penanganan stunting berada di seluruh Kelurahan Kota Depok dikarenakan sampai dengan hasil pengukuran EPPGBM bulan Februari 2024 belum ada kelurahan yang dinyatakan bebas stunting.

1.2 Rekomendasi Daftar Intervensi yang Memerlukan Prioritas Penanganan

Dari hasil input, didapatkan hasil bahwa Indikator intervensi yang memerlukan prioritas penanganan adalah:

a. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
b. Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
c. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur;

d. Pasangan Usia Subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;

e. Pasangan Usia Subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai.

1.3 Hasil Identifikasi Permasalahan dan Rekomendasi

Dari indikator yang menjadi prioritas ditemukan permasalahan diantaranya :

a. Permasalahan keluarga berisiko stunting yang belum mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri adalah sistem komunikasi, informasi dan edukasi yang tidak komprehensif dan kontinu oleh seluruh *stakeholder* yang ada;
b. Permasalahan Keluarga berisiko stunting yang belum mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi karena belum terpetakan dengan baik pekarangan yang wilayahnya dekat dengan lokus keluarga berisiko stunting baik melalui program DKP3 maupun Program P2L Menu Wajib Kelurahan, belum terhimpun data keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. Adapun rekomendasi yang diusulkan adalah menggerakan PPL untuk menghimpun data, melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mensinergikan data Posyandu yang terintegrasi P2L;
c. Permasalahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan Baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur adalah karena terjadinya perubahan skema bantuan menjadi bantuan tunai sehingga rekomendasi yang diusulkan adalah dengan menghimbau KPM untuk membelanjakan bantuan yang diterima dengan variasi kebutuhan pokok;
d. Permasalahan Pasangan Usia Subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat capaiannya masih rendah karena terjadinya perbedaan data pribadi penerima antara Dukcapil/DTKS dengan Data Bank sehingga rekomendasi yang diusulkan adalah memvalidasi data penerima di Dukcapil/DTKS dengan data bank;
e. Permasalahan Pasangan Usia Subur dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai masih rendah karena terjadinya perbedaan data pribadi penerima antara Dukcapil/DTKS dengan Data Bank sehingga rekomendasi yang diusulkan adalah memvalidasi data penerima di Dukcapil/DTKS dengan data bank.
f. Terdapat Definisi Operasional penerima intervensi adalah PUS (Pasangan Usia Subur) yang sebelumnya kategori tersebut tidak terdapat dalam DTKS peneriman bantuan sehingga perlu adanya pemetaan Pasangan Usia Subur dari data DTKS maupun keluarga resiko stunting.

3. Aksi 2 Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan merupakan tindak lanjut dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari Analisa situasi. Rencana ini berisikan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Derah (OPD) untuk meningkatkan cakupan layanan intervensi dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Program percepatan penurunan stunting telah masuk dalam RPJMD Kota Depok sehingga tercantum pula didalam 10 Program Prioritas Kegiatan. Didalam Indikator Kinerja Daerah urusan Kesehatan dan juga Rencana Strategis Dinas Kesehatan pun telah tercantum. Selain itu di dalam Menu Kelurahan kegiatan intervensi Stunting menjadi menu wajib yang harus dilaksanakan oleh kelurahan dan telah dianggarkan di setiap kelurahan. Hasil rencana kegiatan ini sekaligus melengkapi data Analisa Situasi sebagai bahan kegiatan Rembuk Stunting di Tingkat Kota, sehingga dapat dipastikan menjadi prioritas dalam penganggaran.

Beberapa Kegiatan di menu Wajib Kelurahan antara lain:

1. Kampung Caraka (Cerdas Ramah Keluarga)
   Yang terdiri dari :
   a. Posyandu multi fungsi digital;
   b. Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integratif (PAUD HI);
   c. Penguatan Pusat informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
   d. RW Ramah Anak;
   e. Kampung KB;
   f. Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan atau Rumah Pangan Lestari (RPL);
   g. Pelatihan Pemilahan Sampah Posbindu.
2. Kelurahan Layak Anak
3. PKDRT
4. Pencegahan dan Penanggulangan stunting
5. Pelatihan kesehatan keluarga kader Kesehatan
6. Penyelenggaraan Kelurahan Sehat
7. Pelaksanaan PHBS
8. Pusat Kesejahteraan Sosial
9. Pembinaan Pokja Lansia
10. Pengembangan sumber daya dan pengembangan PSKS
11. Pelatihan produk lokal olahan
12. Pembuatan IPAL komunal
13. Pemelihaaan taman RW
14. Pembangunan drainase lingkungan
15. KRPL
16. Sumur Resapan

4. Aksi 3 Rembuk Stunting

Rembuk stunting merupakan salah satu Langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan. Intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara terintegrasi di beberapa Perangkat Daerah penanggung jawab layanan, Lembaga non pemerintah dan masyarakat serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting, secara bersama- sama melakukan konfirmasi, sinkronisasi dan sinergi. Rembuk Stunting Tingkat Kota Depok dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2024 dengan Tema Optimalisasi Pangan Lokal Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting bertempat di Hotel Bumi Wiyata Kota Depok.

5. Aksi 4. Peraturan Bupati/Walikota yang Mendukung Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Kota Depok telah menerbitkan beberapa peraturan yang mendukung percepatan penurunan stunting sebagai berikut:

a. Perda Kota Depok No 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026;
b. Perda Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
c. Perda Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga;
d. Perda Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan KLA;
e. Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Balita;
f. Perda Kota Depok Nomor 2 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
g. Peraturan Wali Kota Nomor 99 tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Depok;
h. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Sehat;
i. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
j. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Depok;
k. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembentukan PUSPAGA serta Penyrelenggaraan;
l. SE Wali Kota Depok Nomor 440/48-Dinkes Tahun 2021 tentang upaya percepatan penurunan stunting di Kota Depok;
m. SE Wali Kota Depok Nomor 440/21-Dinkes Tahun 2023 tentang Pemantuan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita dan Pemanfaatan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM);
n. SE Wali Kota Depok tentang Dukungan Pelaksanaan Pemberian TTD pada Rematri dan WUS;
o. SE Wali Kota Depok tentang Gerakan Bersama Lindungi dan Cegah Stunting dengan Makan Bersama Keluarga;
p. SK Pembentukan Tim Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga Tingkat Kota Depok Tahun 2023;

q. SE Wali Kota Nomor 440/363-Dinkes tentang Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Kota Depok Tahun 2024;

r. SE Wali Kota Nomor 441/31-Dinkes Tahun 2024 tentang Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Penyuluhan Berbahan Pangan Lokal di Kota Depok.

6. Aksi 5. Pembinaan Pelaku dan Pemerintahan Kelurahan

Beberapa Lembaga kemasyarakatan yang ikut berperan dalam upaya percepatan penurunan stunting diantaranya :

a. Kader Pembina BKB

Pembinaan yang terhadap kader BKB dalam bentuk Webinar Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT) selama 7 (tujuh) pertemuan kerjasama dengan BKKBN perwakilan Provinsi Jawa Barat.

b. Tim Pendamping Keluarga (TPK)

Pembinaan dalam bentuk Orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) kerjasama dengan BKKBN Provinsi Jawa Barat sehingga TPK mempunyai bekal dalam melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan baduta.

c. Tim Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Setiap 3 (tiga) bulan di adakan rapat koordinasi untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan peran serta dalam upaya penurunan stunting.

d. Forum Generasi Berencana (Genre) Kota Depok

e. Duta Generasi Berencana (Genre) Kota Depok

Duta Genre Putri Kota Depok yang menjadi Juara 1 Duta Genre Putri Jawa Barat dan Duta Genre Putra terpilih sebagai Duta Genre Putra Favorite Jabar pada Apresiasi Duta Genre dan Jambore Kreatifitas Generasi Berencana Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 dan 2023.

f. Forum Generasi Berencana (Genre) Kecamatan

Pembinaan kepada Genre Kecamatan seperti kegiatan Gumbira (Genre Ulin Babarengan Jeng Remaja) dengan narasumber dari BNN dan Ketua Genre Kota Depok sehingga mereka mempunyai bekal dalam memberikan edukasi terhadap remaja di wilayah Kecamatan masing-masing.

g. Forum Anak Kota Depok

Pembinaan yang diberikan dalam Pelatihan Pelopor dan Pelapor, Publik Speaking, LDK, FGD Forum anak dan Musrenbang anak. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas forum anak dan juga berkontribusi dalam perencanaan pembangunan daerah.

c. TPPS Kelurahan dan Kecamatan.

7. Aksi 6. Sistem Manajemen Data Stunting

Sistem manajemen data intervensi pencegahan dan penurunan stunting adalah tatanan pengelolaan data di tingkat kota sampai dengan tingkat kelurahan yang akan digunakan untuk mendukung

pelaksanaan dan pengelolaan program atau kegiatan pencegahan dan penurunan stunting. Sistem manajamen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data. Capaian cakupan esensial indikator intervensi stunting di Kota Depok dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.32 Capaian Cakupan Esensial Indikator Intervensi Stunting

No	Cakupan Esensial	Capaian		
		2022	2023	2024 (Semester I)
1.	Remaja Putri yang mengkonsumsi TTD	46,48%	61,56%	Sedang berlagsung
2.	Remaja Putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (Hb)	46,41%	91%	94%
3.	Calon pengantin/calon ibu yang menerima TTD	52,50%	83%	83,51%
4.	Calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	88,10%	84%	30,08%
5.	Cakupan PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah	88,10%	84%	30,08%
6.	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	88,12%	84%	30,08%
7.	Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat	52,63%	48,79% (13.554/27.781)	Sedang berlangsung
8.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang maslah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai	50,27%	n/a (karena tidak ada data BNBA)	n/a
9.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	42,97%	98,41%	Sedang berlagsung

No	Cakupan Esensial	Capaian		
		2022	2023	2024 (Semester I)
10.	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	95%	96%	68,95%
11.	Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet selama kehamilan	99,15%	99,21%	91,55%
12.	Persentase Unmet Need Pelayanan KB	25,62%	53.308 PUS (18,35%).	Sedang berlangsung
13.	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	14,28%	600 kehamilan (19,02%).	Sedang berlangsung
14.	Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI Ekslusif	74%	74,9%	66,43%
15.	Anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)	85,75%	84,65%	87%
16.	Anak usia 5 tahun balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	100%	100%	100%
17.	Anak usia dibawah 5 tahun (blita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	100%	93%	85,66%
18.	Anak berusia dibawah 5 tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	54,90%	98,5%	85,57%
19.	Balita yang memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap	94,50%	95,52%	43,32%
20.	Persentase keluarga yang setop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	100%	100%	100%
21.	Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	75,70%	77,53%	Sedang berlagsung
22.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikandalam negeri	4,70%	500 orang (100%)	Sedang berlangsung
23.	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	84,36%	55,2%	Sedang berlagsung
24.	Cakupan keluarga berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan	47,58%	32.774 Keluarga (47,84%).	Sedang berlangsung
25.	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manffat sumber	N/A (DKP3)	1714	Sedang berlangsung

No	Cakupan Esensial	Capaian		
		2022	2023	2024 (Semester I)
	daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi		Keluarga (59%).	
26.	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	90,27%	100%	100%
27.	Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah) domestik layak	97,68%	100%	100%
28.	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang menikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan	92,11%	21.814 kelompok (78,52%).	Sedang berlangsung
29	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, Baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	14,48%	15,20% (4224/27.781)	Sedang berlangsung

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok, 2024

Beberapa cakupan layanan masih belum dilakukan input data pada aksi ini. Beberapa kendala yang terjadi diantaranya adalah data yang tersebar dibeberapa unit kerja di seluruh wilayah Kota Depok sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk merekapitulasi yang belum selesai. Selain itu terkait manajemen data juga dibutuhkan untuk pelaporan per semester melalui Ran Pasti yang diampu oleh BKKBN terkait beberapa indikator yang ada dalam 5 pilar. Belum semua indikator baik dalam aksi Bangda dan indikator dalam Ran Pasti tersedia datanya.

8. Aksi 7. Pengukuran dan Publikasi Data Stunting

Pengukuran dan publikasi *stunting* adalah upaya pemerintah kabupaten/kota untuk memperoleh data prevalensi *stunting* terkini pada skala layanan puskesmas, kecamatan, dan kelurahan. Hasil pengukuran tinggi badan anak bawah lima tahun serta publikasi angka *stunting* digunakan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam gerakan pencegahan dan penurunan *stunting*. Tata cara pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita tetap berpedoman pada regulasi Kementerian Kesehatan atau kebijakan lainnya yang berlaku.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan Kota Depok setiap tahun mengeluarkan data prevalensi balita stunting yang diperoleh dari hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) yang dilaksanakan pada bulan Februari dan Agustus. BPB merupakan bagian dari pelaksanaan surveilans gizi. Dasar pelaksanaan surveilans gizi adalah Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi dan PMK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak.

Pengukuran dilakukan dengan menyesuaikan kondisi wilayah. Selanjutnya hasil pengukuran diinput ke Sistem Informasi Gizi Terpadu yaitu elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e–PPGBM). Data yang dihasilkan lebih akurat karena mempunyai tingkat sensitivitas data yang lebih tinggi sehingga intervensi dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

HASIL PENGUKURAN DATA STUNTING

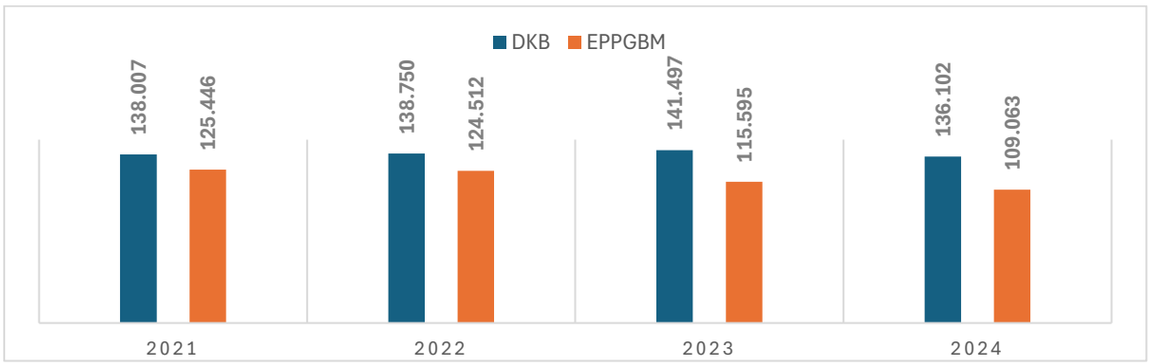
Pada semester 1 tahun 2024 dilakukan Publikasi Data Stunting berdasarkan hasil pengukuran EPPGBM bulan Februari 2024.

Adapun hasil dari pengukuran BPB Balita adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Balita Kota Depok Tahun 2021-2024

Perbandingan sasaran Balita di Kota Depok Tahun 2021-2024 berdasarkan data pada EPPBGM dan DKB diilustrasikan pada gambar berikut ini.

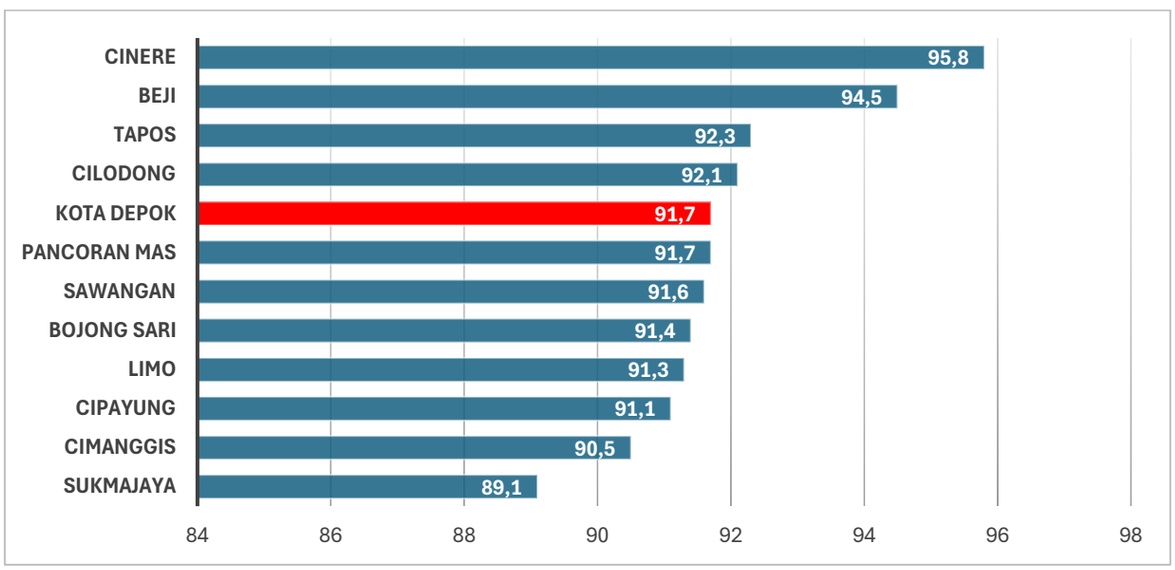
Gambar 2.10 Grafik Data Sasaran Tahun 2021 – 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, terdapat perbedaan jumlah data sasaran berdasarkan data DKB Disdukcapil dan data sasaran pada EPPBGM. Data sasaran pada EPPBGM berdasarkan data D/S yang artinya data Balita datang ke Posyandu dibandingkan sasarannya.

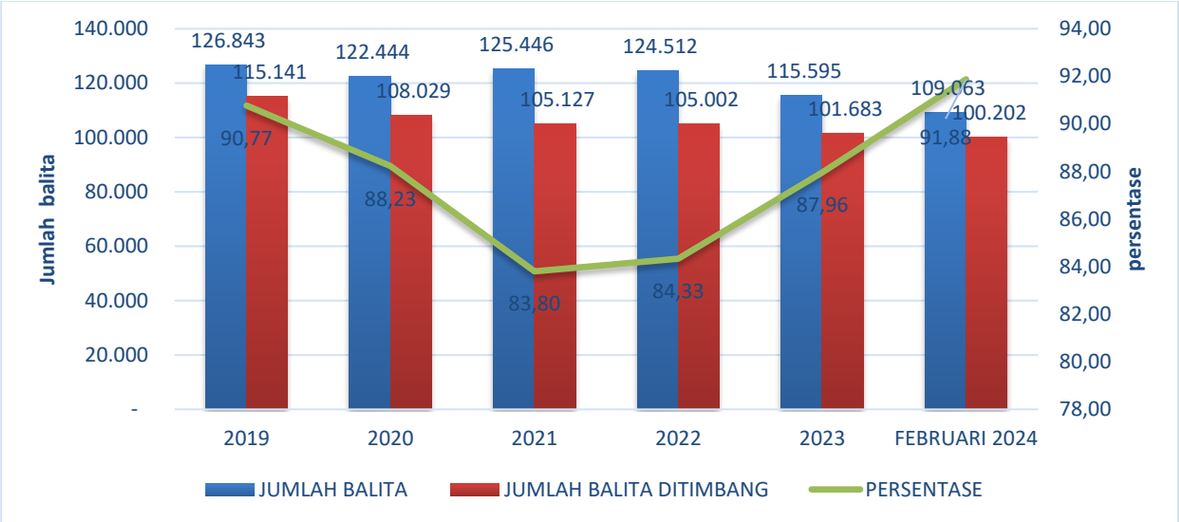
Gambar 2.11 Distribusi Persentase Balita Ditimbang menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Distribusi Persentase Balita Ditimbang menurut Kecamatan berdasarkan sasaran yang diinput ke e-PPGBM (D/S) hasil pengukuran bulan Februari tahun 2024 menunjukkan bahwa 10 (sepuluh) Kecamatan sudah melebihi target nasional yaitu 90% dan 1 (satu) Kecamatan yang belum mencapai target nasional yaitu Kecamatan Sukmajaya sebesar 89,1%.

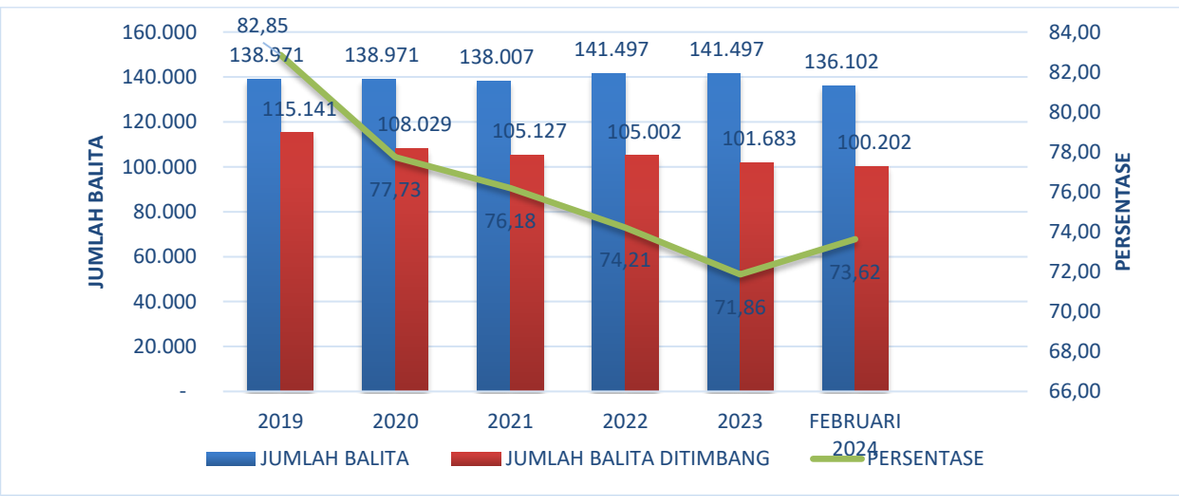
Gambar 2.12 Grafik Balita Ditimbang Berat Badannya Menurut Sasaran Balita Posyandu (D/S) Hasil Pengukuran BPB Tahun 2019- Februari 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, terjadi peningkatan persentase D/S dari periode penimbangan sebelumnya, namun secara absolut terjadi penurunan jumlah balita yang datang ke Posyandu dan jumlah sasaran setiap tahunnya. Sedangkan data balita ditimbang berdasarkan sasaran Balita terdata di DKB Disdukcapil (D/S) hasil pengukuran Februari – Agustus di Kota Depok Tahun 2019 sampai dengan Februari 2024 terjadi penurunan persentase D/S dari periode penimbangan sebelumnya. Secara absolut terjadi penurunan jumlah Balita yang datang ke Posyandu. Hal tersebut diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13 Grafik Balita Ditimbang Berat Badannya Menurut Sasaran Balita Terdata DKB Disdukcapil (D/S) Hasil Pengukuran BPB Tahun 2019- Februari 2024



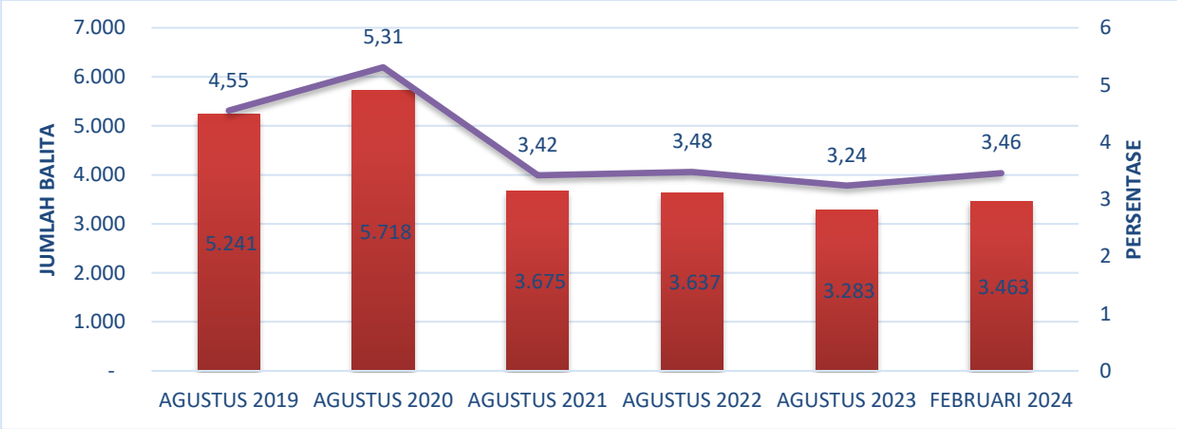
Sumber : E-PPGBM, 2024

Perbandingan Persentase Balita ditimbang Kota Depok berdasarkan sasaran yang diinput ke E-PPBGM dibandingkan dengan persentase Balita ditimbang Kota Depok berdasarkan sasaran DKB-Disdukcapil yaitu berdasarkan data E-PPBGM 91,8% balita ditimbang, sedangkan berdasarkan data DKB 73,6% balita ditimbang. D/S kota Depok berdasarkan data DKB masih di bawah target nasional (90%).

b. Prevalensi Stunting Pada Balita

Tren prevalensi stunting pada Balita periode 2019–Februari 2024 tercantum pada gambar berikut.

Gambar 2.14 Grafik Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Jumlah Balita yang Diukur Tinggi Badannya Pada Kegiatan BPB Februari di Kota Depok Tahun 2019- Februari 2024

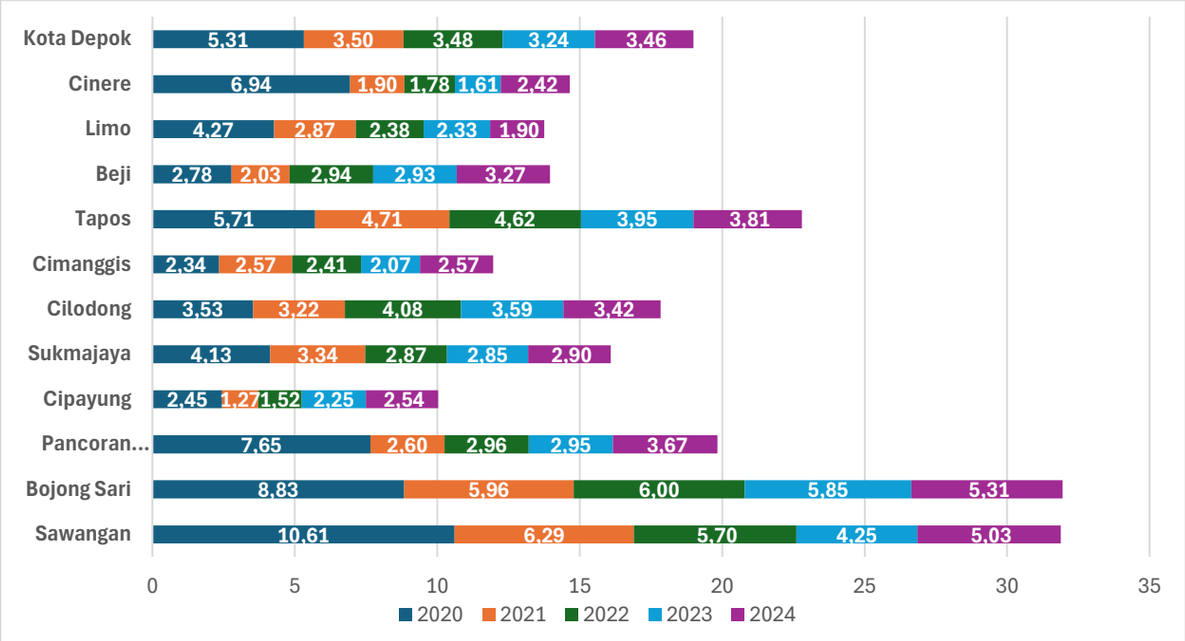


Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, bila dibandingkan capaian tahun 2023, prevalensi stunting hasil BPB bulan Februari 2024 mengalami peningkatan sebanyak 0,22%. Prevalensi stunting hasil BPB bulan Februari 2024 sebesar 3,46% (3.463 balita) sedangkan pada tahun 2023 persentase stunting 3,24% (3.283 balita).

Tren Prevalensi Stunting pada Balita berdasarkan Kecamatan Tahun 2020–Februari 2024 diilustrasikan pada gambar berikut ini.

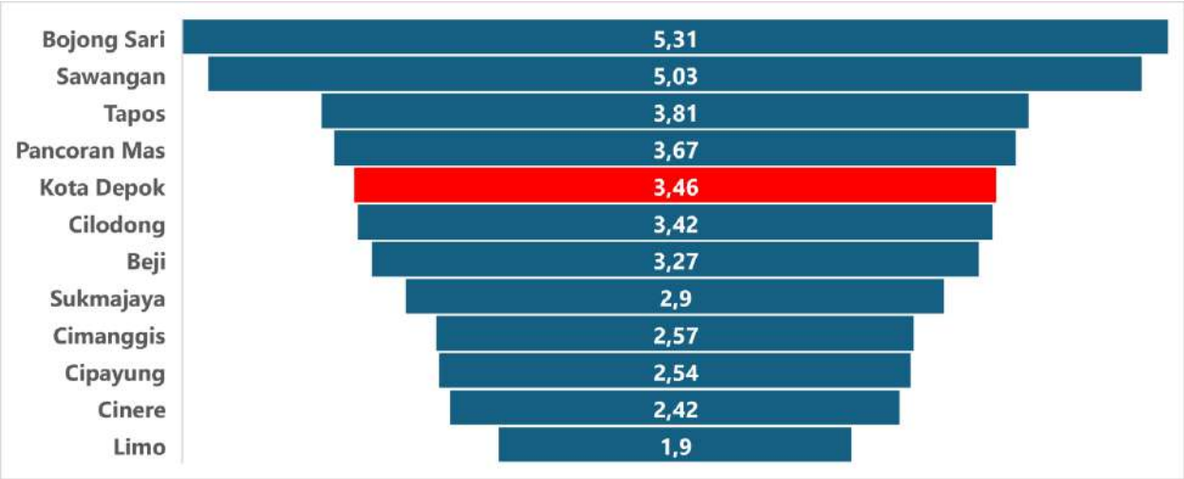
Gambar 2.15 Grafik Prevalensi Stunting Tingkat Kecamatan di Kota Depok Tahun 2020- Februari 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Dari grafik tersebut dapat diperoleh informasi bahwa capaian Prevalensi Stunting tingkat kecamatan dari tahun 2020-2024 bulan februari bersifat fluktuatif. Berdasarkan BPB bulan Februari 2024 terdapat 6 (enam) Kecamatan yang mengalami kasus peningkatan Prevalensi stunting jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu Kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Beji, Sukmajaya, Cimanggis, Cipayung, dan Cinere. Prevalensi Stunting Balita berdasarkan Kecamatan Hasil BPB Bulan Februari 2024 diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.16 Grafik Prevalensi Balita Stunting di Kota Depok pada BPB Februari Tahun 2024

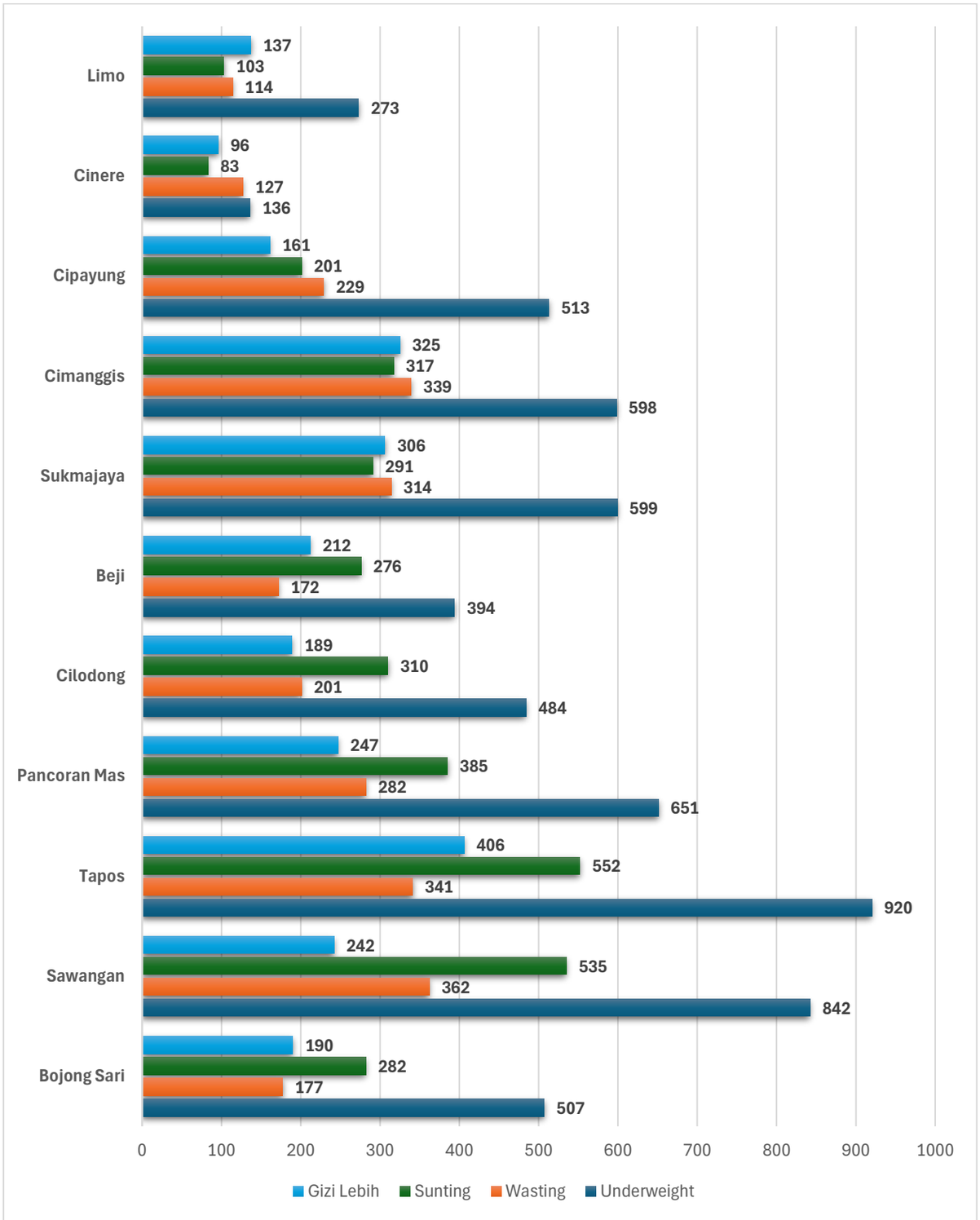


Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan Gambar 2.17 Kecamatan dengan prevalesi stunting tertinggi adalah Kecamatan Bojongsari (5,31%) dan Kecamatan dengan Prevalensi Stunting terendah adalah Limo (1,90%). Selain itu terdapat 4 (empat) kecamatan dengan prevalensi stunting melebihi rata-rata Kota Depok Yaitu Kecamatan Pancoran Mas (3,67%), Kecamatan Tapos (3,81%), Kecamatan Sawangan (5,03%) dan Kecamatan Bojongsari (5,31%).

Jumlah Balita Bermasalah Gizi berdasarkan Kecamatan Kota Depok Hasil BPB Februari 2024 diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17 Grafik Jumlah Balita Bermasalah Gizi berdasarkan Kecamatan Kota Depok Hasil BPB Februari Tahun 2024

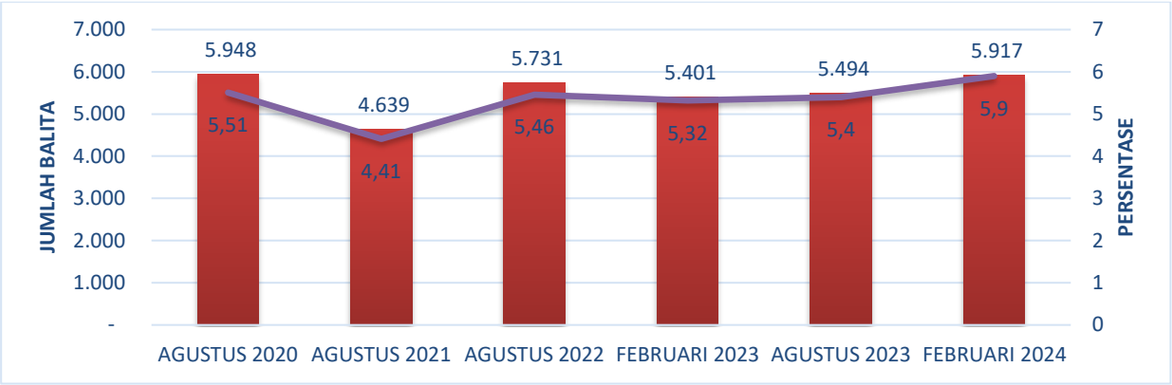


Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar terrsebut, jumlah balita Underweight, Wasting Dan Stunting tertinggi berada Kecamatan Tapos dan jumlah gizi lebih tertinggi Kecamatan Cimanggis.

Prevalensi balita *Underweight* (BB sangat Kurang dan BB Kurang) berdasarkan jumlah balita yang ditimbang berat badannya menurut umur tahun 2020-2024 tertera pada gambar berikut ini.

Gambar 2.18 Grafik Tren Prevalensi Balita Underweight Tahun 2020-2024

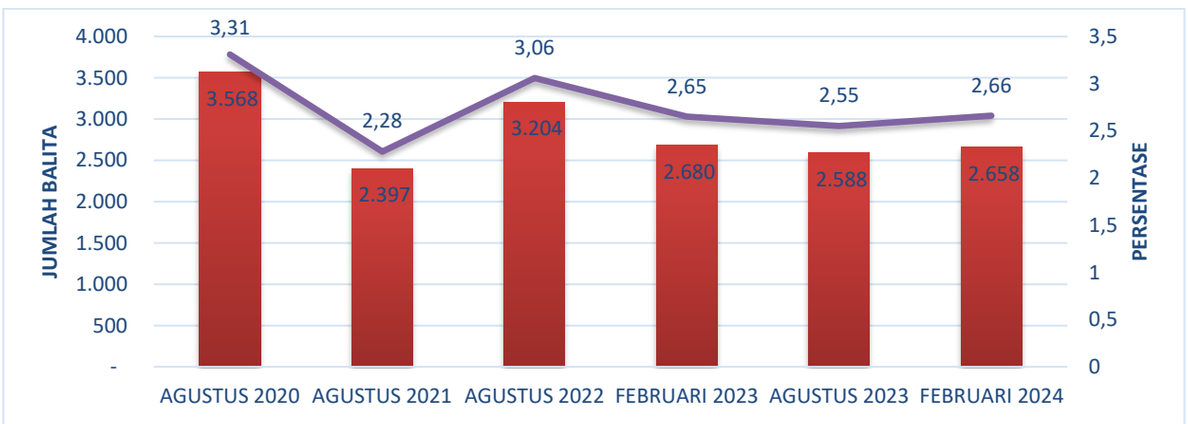


Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar 2.19 capaian balita *Underweight* berdasarkan BPB Februari tahun 2024 tercapai 5,9% (5.917) balita, berdasarkan kategori WHO adalah kategeri sedang.

Prevalensi Balita Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) berdasarkan Jumlah Balita yang ditimbang dan diukur tinggi badannya pada Bulan Penimbangan Balita Periode 2020-2024 tertera pada gambar berikut ini.

Gambar 2.19 Grafik Tren Prevalensi Balita *Wasting* Tahun 2020-2024



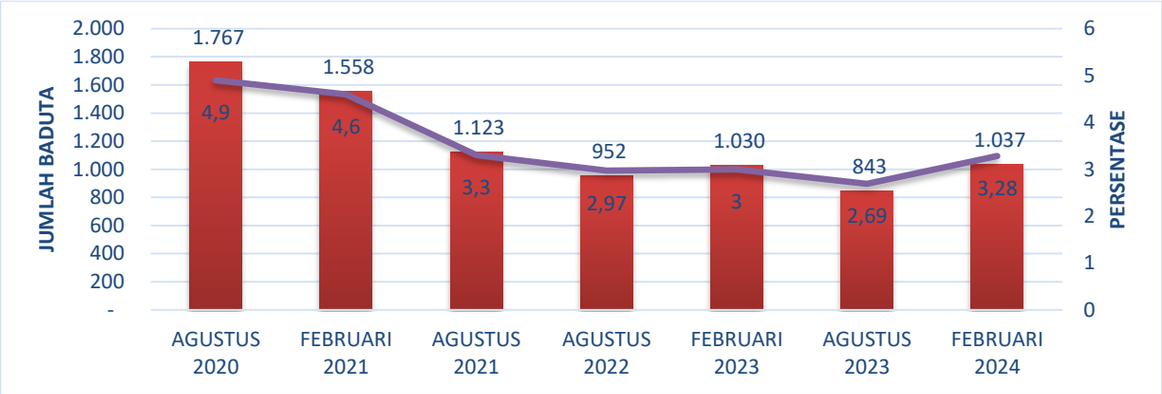
Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, prevalensi balita *Wasting* hasil Bulan Penimbangan Balita Februari tahun 2024 tercapai 2,66%, masuk kategori rendah.

c. Data Prevalensi Stunting Baduta Hasil BPB Februari 2024

Prevalensi Baduta Stunting (Sangat Pendek dan Pendek) berdasarkankan jumlah Baduta yang diukur tinggi badannya pada pengukuran Bulan Penimbangan Balita Februari dan Agustus di Kota Depok Tahun 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.20 Grafik Prevalensi Baduta Tahun 2020-2024 di Kota Depok Berdasarkan BPB Bulan Februari Tahun 2024

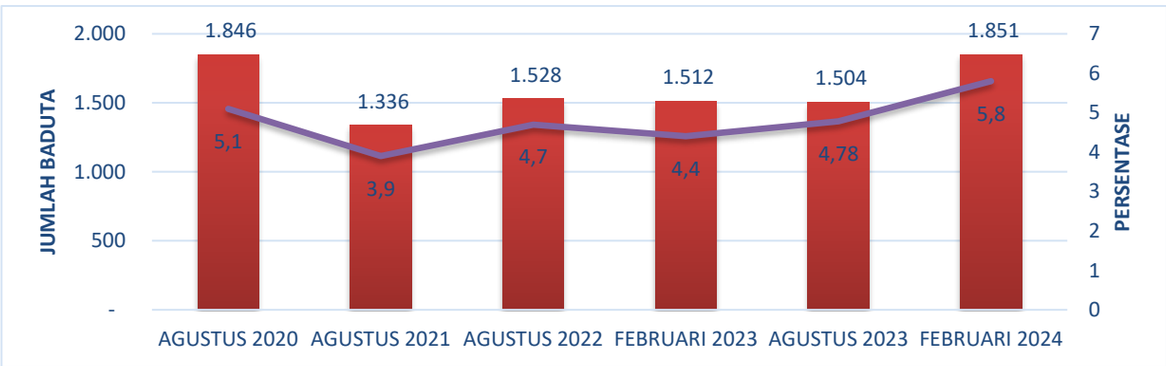


Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, prevalensi baduta stunting berdasar BPB Februari tahun 2024 di Kota Depok adalah 3,28 % (1.037 baduta) masuk ke kategori rendah dan masih berada dibawah target RPJMD 4,75% dan RPJMN 14%.

Prevalensi Baduta *Underweight* (BB sangat kurang dan BB kurang) berdasarkan jumlah baduta yan ditimbang berat badannya menurut umur pada Bulan Penimbangan Balita periode tahun 2020-2024 fluktuatif. Capaian Bulan Februari 2024, prevalensi sebesar 5.8% (1.851 baduta). Berdasarkan kategori WHO, angka tersebut masuk kategori sedang. Data secara rinci tercantum pada gambar berikut ini.

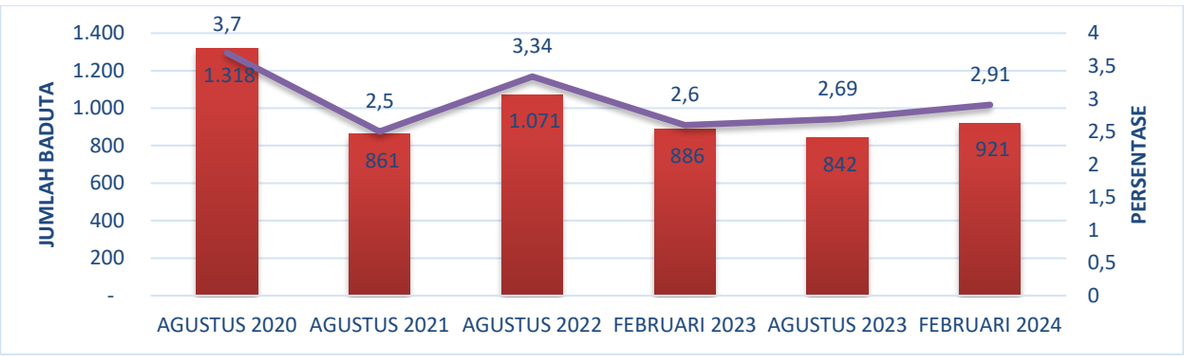
Gambar 2.21 Grafik Prevalensi Baduta *underweight* Tahun 2020-2024 di Kota Depok berdasar BPB Bulan Februari Tahun 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Prevalensi Baduta *Wasting* (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) tertera pada gambar berikut ini.

Gambar 2.22 Grafik Prevalensi Baduta *Wasting* Tahun 2020-2024 di Kota Depok berdasar BPB Bulan Februari Tahun 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan Gambar 2.2 prevalensi baduta *Wasting* di Kota Depok hasil BPB Februari 2024 tercapai 2,91% (921 baduta). Secara nilai batas untuk Kesehatan Masyarakat berdasarkan WHO masuk kategori rendah.

Data prevalensi Stunting untuk anak dibawah 2 tahun (Baduta) menurut kecamatan tersaji pada gambar berikut ini.

Gambar 2.23 Grafik Prevalensi Baduta Stunting Per Kecamatan di Kota Depok Berdasarkan BPB Bulan Februari Tahun 2024



Sumber : E-PPGBM, 2024

Berdasarkan gambar tersebut, kecamatan dengan prevalensi Stunting pada Kelompok Baduta tertinggi adalah Kecamatan Sawangan sebesar 4,89% dan yang terendah di Kecamatan Limo sebesar 1,64%. Selain itu terdapat 6 (enam) kecamatan dengan prevalensi stunting pada Baduta melebihi rata-rata Kota Depok Yaitu Kecamatan Sawangan (4,89%), Kecamatan Cinere (4,10%), Kecamatan Bojongsari (4,05%), Kecamatan Tapos (3,75%), Kecamatan Pancoran Mas (3,34%) dan Kecamatan Cipayung (3,34%).

2.11.2 Pelaksanaan Intervensi Prioritas Gizi Spesifik dan Sensitif

Cakupan intervensi gizi spesifik yang perlu ditingkatkan adalah remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah serta balita gizi kurang yang mendapatkan Pemberian makanan Tambahan. Beberapa program yang cakupannya sudah baik adalah balita diare memperoleh suplementasi zinc, balita 6 - 59 bulan memperoleh Vitamin A dan Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.

Intervensi stunting terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan, yaitu: Intervensi Sensistif dan Intervensi Spesifik)

1. Intervensi Sensitif (70%)

Intervensi sensitif diarahkan untuk mengetahui penyebab tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mendukung intervensi spesifik. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh lembaga non kesehatan termasuk oleh kelurahan. Program Kegiatan yang dilakukan seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi, bedah rumah sehat dan bantuan kepada keluarga miskin.

Program kegiatan Intervensi sensitif antara lain:

a. Keluarga Berencana pasca persalinan;
b. Penurunan kehamilan tidak diinginkan;
c. Calon Pengantin melakukan pemeriksaan kesehatan;
d. Penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
e. Penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
f. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional bagi rumah tangga berpenghasilan rendah;
g. Pendampingan bagi keluarga berisiko stunting;
h. Bantuan Tunai Bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan;
i. Pemberian pemahaman tentang stunting;
j. Bantuan pangan bagi keluarga miskin dan rentan;
k. Desa/Kelurahan tanpa Buang Air Besar Sembarangan/BABS.

2. Intervensi Spesifik (30%)

Interfensi spesifik diutamakan untuk mengatasi penyebab langsung. Interfensi spesifik Lebih banyak dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti konseling gizi, pemeriksaan ibu hamil, pemberian makanan tambahan pemulihan dan pengobatan penyakit.

Intervensi spesifik diberikan kepada:

1. Remaja, intervensi yang dilakukan berupa:
   - Remaja Putri Minum Tablet Tambah Darah (TTD)
   - Pemeriksaan darah Hb untuk mengetahui status anemia remaja putri
2. Ibu hamil, intervensi yang dilakukan berupa:
   - Minum Tablet Tambah Darah (TTD)
   - Mengikuti kelas ibu hamil
   - Melakukan ANC secara rutin dan sesuai standar
   - Khusus ibu hamil KEK mengkonsumsi PMT
3. Balita, intervensi yang dilakukan berupa:
   - Bayi 0-6 bulan mendapat ASI EKSLUSIF
   - Bayi 6-24 bulan mendapat MP ASI
   - Balita terpantau status gizi, baik pertumbuhan dan perkembangan
   - Pemberian Vitamin A pada balita
   - Balita mendapat Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Lanjutan
   - Pemberian obat cacing
   - Tatalaksana Gizi buruk
   - Imunisasi dasar lengkap

4. Calon pengantin, intervensi yang dilakukan berupa:
    - Minum Tablet Tambah Darah (TTD)
    - Mengikuti kelas catin
5. Ibu bersalin, intervensi yang dilakukan berupa:
    - Minum Tablet Tambah Darah (TTD) dan Vitamin A
    - Mendapat pelayanan Bulin sesuai standar
    - Mengikuti kelas ibu balita
    - Memberikan ASI EKSLUSIF

Strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kota Depok melalui:

a. *Prevent,* yaitu Perubahan Perilaku Pencegahan dan Penanganan Stunting. Perubahan perilaku dimulai dari individu sampai masyarrakat dengan bentuk nasihat contohnya dalam kampanye informasi melalui berbagai media dan tenaga promotor. pada semester 1 tahun 2023 Kota Depok melalui dana keluarahan dan kecamatan beberapa wilayah sudah melaksanakan pelatihan kesehatan keluarga dengan narasumber dari dinas kesehatan. Selain itu juga sudah dilaksanakan kampanye simpatik kawasan tanpa rokok dalam rangka pencegahan stunting.

b. *Detect*, yaitu Skrining dan Surveilans Status Gizi Balita yang berisiko Stunting.

c. *Response*, yaitu penanganan kasus terintegrasi stunting, baik kasus baru maupun lama, dengan konsep *One Stop Service Stunting* melalui Kerjasama Dinkes Kota Depok dengan RSUI. Strategi ini dilakukan dengan kerjasama dengan Rumah sakit se Kota Depok melalui tindakan yang kemudian dilakukan pencatatan balita stunting pada pelita kesmas sigizi terrpadu.

Penguatan pada sisi input melalui:

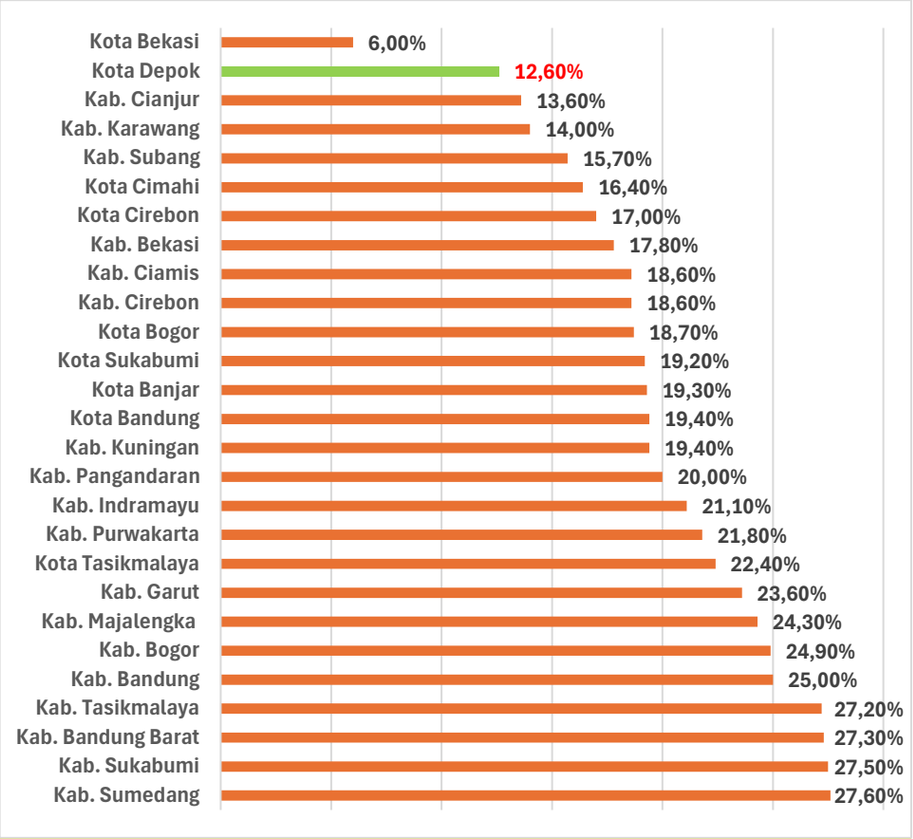
1) Manajemen data dan informasi berupa:
    - Penguatan data based BNBA kasus stunting dan berisiko stunting;
    - Optimalisasi kanal informasi
    - Pemilahan data BNBA disandingkan dengan DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera) dan data KIA (Kartu Identitas Anak)
2) Peningkatan SDM: Penambahan jumlah dan jenis SDM dalam menyelenggarakan strategi Prevent, Detect and Response.
3) Pemenuhan sarpras:
    - Pemenuhan sarpras Posyandu dan antropometri sesuai standar;
    - Penyiapan kebutuhan obat dan BMHP.

2.11.3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah Kota Depok menaruh perhatian besar terhadap kasus stunting. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kota Depok dalam menurunkan kasus stunting. Berdasarkan hasil SSGI Tahun 2022, kasus stunting di Kota Depok menempati posisi kedua terendah di Provinsi Jawa Barat dengan nilai 12,60% dan masuk kategori rendah. Akan tetapi berdasarkan SSGI Tahun 2023 kasus stunting di Kota

Depok mengalami kenaikan menjadi 14,3%. Hal ini menujukkan bahwa permasalahan stunting di Kota Depok belum selesai karena banyaknya faktor terutama masalah migrasi penduduk yang cukup tinggi.

Gambar 2.24 Prevalensi Stunting Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2022 Berdasarkan SSGI



Sumber : SSGI, 2024

Adapun Prevalensi Stunting Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.33 Prevalensi Stunting Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2018-2023

No.	Kota/Kabupaten	Survey						Selisih 2023-2022	Keterangan
		Riskesdas		SGGBI & SSGI			SKI		
		2013	2018	2019	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Kab. Sumedang	41,1	32,22	24,43	22	27,6	14,4	-13,2	Turun
2	Kab. Sukabumi	37,1	41,35	21,93	24,2	27,5	27	-0,5	Turun
3	Kab. Bandung Barat	52,5	36,69	32,12	29,6	27,3	25,1	-2,2	Turun
4	Kab. Tasikmalaya	41,7	33,8	34,97	24,4	27,2	20,7	-6,5	Turun
5	Kab. Bandung	40,7	35,21	27,87	31,1	25	29,2	4,2	Naik
6	Kab. Bogor	28,3	32,86	34,96	28,6	24,9	27,6	2,7	Naik
7	Kab. Majalengka	29,8	36,62	28,53	23	24,3	24,1	-0,2	Turun
8	Kab. Garut	37,8	34,64	27,03	35,2	23,6	24,1	0,5	Naik
9	Kota Tasikmalaya	30,7	25,73	24,75	28,9	22,4	27,1	4,7	Naik
10	Kab. Purwakarta	33,9	41,01	23,42	20,6	21,8	24	2,2	Naik
11	Kab. Indramayu	36,1	33,99	29,12	14,4	21,1	18,4	-2,7	Turun
12	Kab. Pangandaran		32,71	21,35	22,7	20	23,9	3,9	Naik
13	Kab. Kuningan	42	28,67	18,06	18,7	19,4	23,4	4	Naik

No.	Kota/Kabupaten	Survey						Selisih 2023-2022	Keterangan
		Riskesdas		SGGBI & SSGI			SKI		
		2013	2018	2019	2021	2022	2023		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
14	Kota Bandung	32,2	21,74	28,12	26,4	19,4	16,3	-3,1	Turun
15	Kota Banjar	39,2	27,89	26,21	23,9	19,3	23,6	4,3	Naik
16	Kota Sukabumi	41,9	28,99	15,6	19,1	19,2	26,9	7,7	Naik
17	Kota Bogor	29,8	27,79	21,33	16,9	18,7	18,2	-0,5	Turun
18	Kab. Cirebon	42,5	33,71	25,06	26,5	18,6	22,9	4,3	Naik
19	Kab. Ciamis	41,4	33,39	24,21	16	18,6	25,4	6,8	Naik
20	Kab. Bekasi	30,3	26,37	20,93	21,5	17,8	23,2	5,4	Naik
21	Kota Cirebon	28,4	31,18	22,04	30,6	17	19,9	2,9	Naik
22	Kota Cimahi	28,2	21,06	34,29	19,9	16,4	24,5	8,1	Naik
23	Kab. Subang	40,4	28,64	25,73	18,1	15,7	18,7	3	Naik
24	Kab. Karawang	34,9	33,11	24,01	20,6	14	17,1	3,1	Naik
25	Kab. Cianjur	41,7	33,51	27,52	33,7	13,6	11,4	-2,2	Turun
26	**Kota Depok**	**25,7**	**23,21**	**16,09**	**12,3**	**12,6**	**14,3**	**1,7**	**Naik**
27	Kota Bekasi	26,6	16,75	20,03	13,8	6	10,3	4,3	Naik
28	Jawa Barat	35,3	31,1	26,2	24,50	20,2	21,7	1,5	Naik

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Depok, 2024

Berdasarkan hasil Bulan Penimbangan Balita pada Bulan Februari tahun 2024 Prevalensi stunting di Kota Depok 3,46%. Angka ini masih dibawah RPJMD tahun 2024 yaitu sebesar 4,7%, akan tetapi terjadi kenaikan dengan munculnya balita stunting baru sebanyak 1.747 Balita.

Salah satu upaya untuk mendukung strategi tersebut adalah melaksanakan Audit (Pengkajian) Kasus Stunting (AKS). Audit kasus stunting ini diperlukan untuk mencari penyebab terjadinya kasus Stunting di tiap–tiap wilayah sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

Sistem manajamen data adalah bagian dari pengelolaan sumber informasi yang mencakup semua kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan data, pengumpulan data hingga pemanfaatan data untuk memastikan informasi yang akurat dan mutakhir. Kegiatan sistem manajemen data bersinggungan dengan aspek kebijakan, menggunakan dan mendukung mekanisme yang telah berjalan di kabupaten/kota sesuai dengan alur pelaksanaan, serta tidak terlepas dari dukungan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Kebutuhan data yang akan digunakan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi disesuaikan dengan kegiatan pada setiap tingkatan pemerintahan, yaitu:

a. Pada tingkat kelurahan, data digunakan untuk analisis situasi tingkat desa, proses perencanaan, penentuan sasaran program, pemantauan pelaksanaan kegiatan intervensi, dan penilaian kinerja;
b. Pada tingkat kecamatan, data digunakan untuk sosialisasi dan advokasi kepada Kepala Desa, penentuan target desa, dan pemantauan kemajuan kegiatan
c. Pada tingkat kabupaten/kota, masing-masing OPD yang membidangi sektor yang memerlukan data untuk melakukan perencanaan kegiatan seperti dalam Analisis Situasi, melihat dan melakukan reviu capaian layanan program mereka/kinerja program, dan mengambil keputusan untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program.

Aksi 7.3 Pelaksanaan Audit Kasus Stunting

Audit Kasus stunting (AKS) semester I (satu) Tahun 2023 telah dilaksanakan di Kelurahan Cilangkap dan Kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos Kota Depok dari 5 (lima) sasaran dengan 4 (empat) kasus stunting yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan dan baduta. Audit Kasus Stunting (AKS) semester 2 (dua) Tahun 2023 dilaksanakan di kelurahan Pancoran Mas dan Kelurahan Depok Jaya dengan 6 (enam) sasaran yaitu 1 (Satu) Catin, 1 (Satu) Bumil, 1 (Satu) Bufas dan 3 (Tiga) Baduta.

Berikut tahapan Audit Kasus stunting (AKS) Semester I (satu) dan Semester II Tahun 2023:

1. 05 Mei 2023 Identifikasi Kasus Berisiko Stunting dengan 2 Kelurahan Cilangkap dan kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos.
2. 10 Mei 2023 Seleksi dan Kunjungan Lapangan Sasaran Audit Kasus Stunting di Kelurahan Cilangkap dan kelurahan Cimpaeun Kecamatan Tapos.
3. 12 Mei 2023 Konsultasi Tim pakar dan Pengisian Kertas Kerja Tim teknis.
4. 29 Mei 2023 Rekomendasi Hasil Kajian Audit Kasus Stunting (AKS) Semester 1Untuk Menjadi Rencana Tindak Lanjut oleh berbagai Lintas Sektor Dalam Tim Percepatan Stunting (TPPS) Di Kota Depok.
5. 08 Juni 2023 Diseminasi AKS 1 dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting Semester 2 Tahun 2022.
6. 9 Agustus 2023 pemilihan dan penetapan data AKS hasil verifikasi validasi dari setiap sasaran audit.
7. 21 Agustus 2023 Seleksi data lapangan Audit Kasus Stunting 2 Kecamatan Pancoran Mas.
8. 22 Agustus 2023 Kunjungan lapangan tim teknis dan tim pakar pada sasaran AKS 2 wilayah kelurahan Pancoran Mas dan Kelurahan Depok Jaya.
9. 22 Agustus 2023 Konsultasi tim pakar dan pengisian kertas kerja tim teknis.
10. 15 September 2023 Rekomendasi hasil kajian Audit Kasus Stunting (AKS) semester 2 untuk menjadi rencana tindak lanjut oleh berbagai lintas sektor dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Depok.
11. 26 September 2023 Pelaksanaan Diseminasi AKS semester 2 Tahun 2023.

Aksi 8 Reviu Kinerja Tahunan

Reviu Kinerja Tahunan adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting selama satu tahun terakhir. Reviu dilakukan untuk:

1. Membandingkan antara rencana dan realisasi capaian output (target kinerja), capaian outcome, penyerapan anggaran, dan kerangka waktu penyelesaian;
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target kinerja output dan outcome;
3. Merumuskan tindak lanjut perbaikan agar target kinerja dapat dicapai pada tahun berikutnya.

Reviu kinerja tahunan bertujuan untuk:

1. Mendapatkan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan pencegahan dan penurunan stunting;
2. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan Rencana Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting yang telah disepakati pada Rembuk Stunting;
3. Mengidentifikasi pembelajaran dan merumuskan masukan perbaikan sebagai umpan balik untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan prioritas, penetapan lokasi fokus, serta desain dan upaya perbaikan penyampaian layanan pada tahun berikutnya.

Reviu kinerja tahunan dilaksanakan pada awal bulan Desember setiap tahunnya.

2.11.4 Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Upaya monitoring konvergensi percepatan penurunan stunting semester 2 tahun 2023 dilaksanakan untuk memastikan:

a. Intervensi gizi spesifik dan sensitif berdasarkan pada pemetaan hasil dari analisa situasi dan cakupan layanan yang harus di intervensi dengan lebih maksimal.
b. Pemantauan secara terpadu terhadap hal-hal temuan yang mendukung *zero new stunting*.
c. Sistem manajemen data untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan yang akan diinput oleh masing-masing operator di Perangkat Daerah serta data–data yang masih belum ada ataupun belum tercatat dengan baik.
d. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah/instansi dan Lembaga non pemerintah dalam berkolaborasi untuk percepatan penurunan stunting.
e. Melaksanakan koordinasi dengan Kemendagri terkait beberapa Definisi Operasional yang terdapat dalam Aksi Bangda dimana tidak terdapat data indicator tersebut.
f. Merencanakan menyusun target 29 cakupan layanan dan indicator yang terdapat dalam 5 (lima) pilar di tahun 2024 serta merevisi Peraturan Walikota No 99 Tahun 2022 Tentang Penanganan Stunting di Kota Depok.

2. Evaluasi Kegiatan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi semester 2 tahun 2023 ditemukan beberapa hal :

a. Percepatan penurunan stunting perlu memaksimalkan peran dari TPPS Kecamatan dan Kelurahan.
b. Adanya kenaikan *prevalensi stunted* di beberapa wilayah harus menjadi perhatian bagi masing-masing TPPS baik kelurahan maupun kecamatan. Pendataan dan pemetaan kembali harus dilakukan sehingga intervensi spesifik akan lebih maksimal.
c. Pendataan dan pemetaan kembali harus dilakukan baik balita yang dinyatakan masih stunting, penambahan stunting baru dan keluarga beresiko stunting sehingga intervensi spesifik akan lebih maksimal.

d. Dalam intervensi spesifik maupun sensitif diperlukan kolaborasi dengan Lembaga non pemerintah baik CSR maupun Ziswaf.
e. Peran Orang tua asuh anak stunting khususnya bagi Keluarga rawan stunting dari keluarga miskin perlu dimaksimalkan
f. Audit kasus stunting masih sangat terbatas kuantitas sasarannya, sehingga perlu penambahan sasaran.
g. Untuk tahun 2024 intervensi dillakukan dari hulu ke hilir dengan sasaran Keluarga beresiko stunting (remaja, Catin, Bumil, Bufas, Balita/Baduta) dan sasaran balita dengan status gizi *underweight, wasting*, stunting dan *overweight.*

3. Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil monitoring dan evaluasi, beberapa tindak lanjut yang direkomendasikan adalah:

a. Penguatan TPPS baik tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan melalui Rapat Koordinasi, Bimbingan Teknis dan Workshop.
b. Rapat Koordinasi TPPS Kota Minimal dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali untuk mengevaluasi pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan oleh 7 Aktor Pembangunan khususnya Perangkat Daerah terkait baik Intervensi Spesifik maupun Sensitif terhadap penanganan stunting.
c. Perbaikan sistem manajemen data melalui pelaksanaan rapat koordinasi terbatas tim input data 8 (delapan) aksi konvergensi pada Web Bangda Kemendagri.
d. Kerjasama dilakukan dengan Lembaga-lembaga Akademisi, Lembaga Ziswaf dan juga Perbankan untuk turut menjadi Orang Tua Asuh Balita Stunting.
e. Pelaksanaan implementasi menjadi orang tua Asuh Balita Stunting yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.
f. Melaksanakan Intervensi Spesifik dengan prioritas utama Baduta Stunted terlebih dahulu.
g. Sasaran intervensi baik *sensitive* dan *spesifik* yaitu berasal dari keluarga resiko stunting dan keluarga yang memiliki balita stunting, *underweight, wasting, overweight.*

2.11.5 Inovasi Penurunan Stunting

Dalam melaksanakan program penurunan stunting Pemerintah Kota Depok melakukan beberapa inovasi yaitu:

1. GEBER HBRING (Gerakan Bersama Hayuk Berantas Stunting mewujudkan Anak Sehat Jiwa dan Raga)

Kegiatan inovasi ini berasal dari Dinas Kesehatan yaitu gerakan yang mendorong Perangkat Daerah dan Lintas Sektor melakukan kegiatan secara konvergen baik intervensi spesifik maupun sensitif dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Depok.

2. D' SUNTING MENARA

Langkah yang dilakukan TP PKK Kota Depok dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan meluncurkan program D'Sunting Menara. Strateginya yaitu mengoptimalkan seluruh Kader PKK dari tingkat Kota sampai RT dan lintas sektor (*Penta Helix*) secara bersama-sama berperan aktif menurunkan angka stunting di Kota Depok.

Bentuk kegiatan D'Sunting Menara (Depok Sukses Bebas Stunting, Mewujudkan Kota Ramah Anak) antara lain:

a. OCAN BANANAS (Ojek Cantik Membawa Makanan Balita Stunting);
b. CANTING SURGA (Gerakan Cepat Cegah Stunting bersama Tutor Keluarga);
c. MPOK SUKMA BAWA CANTING (Masyarakat Depok Suka Makanan B2SA Cegah Stunting), programnya antara lain:
    1) Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dengan hatinya PKK;
    2) Workshop pemilihan bahan pangan segar;
    3) Workshop memasak yang benar untuk menjaga kandungan gizinya;
    4) Lomba cipta menu cegah stunting;
    5) Optimalisasi Budikdamer.
d. CAWAN KASIH (Capai Keluarga Rawan dengan Tanda Kasih);
e. DORA MASA KINI (Dongeng Orang Tua Agar Gemar makanan Sehat untuk Menghindari Stunting Anak Usia Dini);
f. DAWIS SAHABAT TP PKK (Dasawisma Satu Hati Bersama Pendamping Keluarga).

Deklarasi komitmen upaya percepatan penurunan stunting dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan dipimpin oleh Lurah, Camat, Ketua TP PKK Kelurahan dan Kecamatan pada sebagian kelurahan di Kota Depok.

3. SEKOLAH AYAH BUNDA

Kegiatan inovasi ini diluncurkan oleh DP3AP2KB. Sekolah ini diperuntukan bagi sosok ayah dan ibu (pasangan suami istri) usia dibawah 45 tahun yang telah memiliki anak. Edukasi yang disampaikan memiliki beberapa tujuan diantaranya :

a. Menciptakan keluarga yang Bahagia dan Sejahtera;
b. Mampu melakukan pengasuhan yang positif;
c. Melahirkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Berkualitas dan Berkarakter;
d. Menjadikan putra putri yang dapat membangun bangsanya.

4. SEKOLAH AYAH BUNDA SPESIAL

Kegiatan Inovasi ini dibuat oleh DP3AP2KB untuk pasangan suami istri yang memiliki anak berkebutuhan khusus.

5. SEKOLAH PRA NIKAH (SPN)

Menyadari pentingnya kesiapan berkeluarga maka edukasi tentang pernikahan dan keluarga menjadi penting. Sekolah Pra-Nikah yang dicetuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersinergi dengan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) merupakan salah satu cara untuk memberikan wawasan, dan keterampilan bagaimana membangun keluarga bahagia dan sejahtera.

Metode pembelajaran sekolah pra nikah (SPN) yaitu tatap muka dengan tenaga profesional. Salah satunya mengundang psikolog dari Puspaga dan praktisi yaitu dr. Boyke. Pada tahun 2020 diawal pandemi metode pembelajaran menjadi daring dengan media *zoom*. Sampai tahun 2021 sudah ada 18 angkatan yang berarti sudah ada sekitar 900 peserta penerima manfaat dari penyelenggaraan SPN.

Pada tahun 2020 diawal Pandemi Covid-19, proses pembelajaran secara daring dengan media *zoom meeting* dan tahun 2022 sebanyak 500 peserta. Sampai Tahun 2023 telah dilaksanakan Sekolah Pra Nikah sebanyak 40 angkatan

Tujuan dari Sekolah Pra Nikah adalah:

a. Memberikan pemahaman tentang konsep keluarga dan persiapan yang perlu dilakukan sebelum berkeluarga;
b. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang pengenalan diri, pasangan sehingga memiliki kematangan yang memadai;
c. Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tentang peran orang tua sebagai sekolah utama bagi anak-anak

6. SIMORA (Sistem Edukasi Mobil Ramah Anak)

Kota Depok sedang berupaya menuju Depok Kota Layak Anak. Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat Implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum (Ningrum, 2015). Perhatian serius ini sejalan dengan program SIMORA. Mobil Keliling dengan Sistem Edukasi Anak dan orang tua memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan orang tua. **SIMORA atau sistem edukasi mobil ramah anak** adalah mobil keliling berbasis edukasi permainan tradisional dan literasi serta jasa konsultasi bagi para orang tua muda dalam mendukung tumbuh kembang anak.

Mobil keliling berbasis permainan tradisional ini adalah salah satu upaya untuk mengajak kembali anak-anak Indonesia khususnya anak Kota Depok agar lebih aktif bermain pada usianya. Bermain menjadi salah satu metode yang tepat digunakan dalam proses pembelajaran terutama bermain permainan tradisional. Kegiatan ini juga merupakan salah satu pelestarian budaya Indonesia. Masalah-masalah yang timbul dari permainan menuntut anak untuk menggunakan kecerdasan dalam pemecahan masalah, sehingga kreativitas anak akan berkembang. Pada aspek social, anak juga akan ikut berkembang seperti kemampuan toleransi, kerjasama, menghormati, jujur, saling percaya, dan sebagainya.

SIMORA memiliki tujuan, antara lain:

a. Mengupayakan pemenuhan hak-hak anak dalam seluruh Klaster Hak Anak KHA;

b. Mengoptimalkan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang telah dibangun;
c. Meningkatkan dan mempromosikan Forum Anak Depok;
d. Menciptakan lingkungan yang lebih hidup dan ramah bagi anak.

7. NGAKAK (Ngobrol Kecil Tapi Asik Bareng Duta Genre Kota Depok)

Manfaat dan tujuan NGAKAK adalah:

a. Untuk mengaplikasikan kemampuan *public speaking* kepada remaja kota Depok. Kegiatan yang dilakukan melalui *live instagram* ini berpeluang besar untuk dapat memasifkan penyebaran program generasi berencana dan dapat tepat sasaran sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini.
b. Melalui *live instagram* yang dilakukan sebagai media edukasi, sehingga program ini diharapkan dapat tersampaikan secara menyeluruh kepada remaja di Kota Depok sehingga remaja-remaja di kota Depok tetap bisa produktif dan dapat memafaatkan media sosial dengan bijak.

8. KONSELING EDUKASI CLUB (KECE)

KECE adalah sebuah inovasi konseling edukasi club yang tercipta sebagai suatu sarana pembelajaran bagi orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan. KECE dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap konseling dan edukasi yang dilakukan oleh puspaga. KECE diharapkan mampu membangun kemampuan Keluarga dalam mengelola sumber daya keluarga dan meningkatkan pengetahuan ayah dan bunda dalam mendampingi anak dan memberi pengasuhan terbaik bagi anak sehingga tercipta generasi tangguh, kuat dan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan menjaga dirinya.

9. D'LASTING (Disdik Lawan Stunting)

D'Lasting atau Dinas Pendidikan lawan Stunting merupakan inovasi Dinas Pendidikan Kota Depok dalam rangka melawan stunting yang terdiri atas berbagai rangkaian kegiatan yaitu :

a. Peningkatan Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
b. Pembinaan Kurikulum PAUD dengan memasukan konten terkait stunting dan upaya pencegahan dan penanganannya.
c. Koordinasi Lintas sektor dalam penanganan stunting.
d. Sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting bagi tenaga pendidik.
e. Penguatan Lembaga PAUD dengan mengimplementasikan pengendalian stunting (PMT, PMBA, pengukuran tinggi badan dan berat badan secara rutin).
f. Mendorong Lembaga PAUD untuk penyelenggaraan PAUD HI.
g. Pembinaan oleh pengawas dan penilik ke Lembaga PAUD.

10. GEMINI (Gerakan Masyarakat damping anak stunting sejak Dini)

Kegiatan ini diluncurkan oleh Bappeda Kota Depok tahun 2022 sebagai salah satu bentuk komitmen Heptahelix dalam mengupayakan orang tua asuh, baik itu dari perorangan maupun secara kelembagaan, dalam pendampingan anak stunting terutama dari keluarga tidak mampu. Dalam

hal ini yang telah dilakukan yaitu dengan menggandeng Lembaga Ziswaf di Kota Depok melakukan pendampingan baik intervensi spesifik maupun sensitif terhadap keluarga dengan balita stunting.

11. Start Up Stunting

Bappeda Kota Depok sebagai bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Depok membuat inovasi *Start Up Stunting* yang merupakan Sinergi antara Pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menemukan Solusi, Inovasi dan Rekomendasi terbaik dalam menurunkan isu stunting melalui inovasi digital dan sosial diantaranya :

a. *Digital product* : Portal Informasi Edukatif, Alat deteksi dini, Teknologi Telemedicine dll
b. *Social Initiativ*e : Pembangunan Fasilitas Sanitasi Publik, Penyedia Suplement Makanan Bergizi dll.
c. *Business Idea* : Sebuah Bisnis yang Sustainable yang fokusnya menurunkan angka stunting dan lainnya

Berdasarkan SK Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok Nomor : 188.4/1447/Kep/Bapp/2022 diperoleh hasil :

a. Peringkat I : Start Up Genia dengan Inovasi SAKTI (Stunting Dapat Kita Atasi) dalam akselerasi upaya menuju *Depok Free Stunting* Tahun 2023
b. Peringkat II : Start Up Bonita dengan Inovasi *Conversational Artificial Intelegence Chatbot For Stunting*
c. Peringkat III : Start Up Saga Sehat dengan Inovasi Tranformasi Digital Posyandu melalui Antropometri dan Aplikasi

2.12 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca adalah pelepasan gas-gas tertentu ke atmosfer yang memiliki kemampuan untuk menangkap panas dari sinar matahari, sehingga menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses di mana atmosfer bumi menangkap sebagian panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi setelah diserap dari sinar matahari, sehingga menjaga suhu bumi tetap hangat dan layak huni.

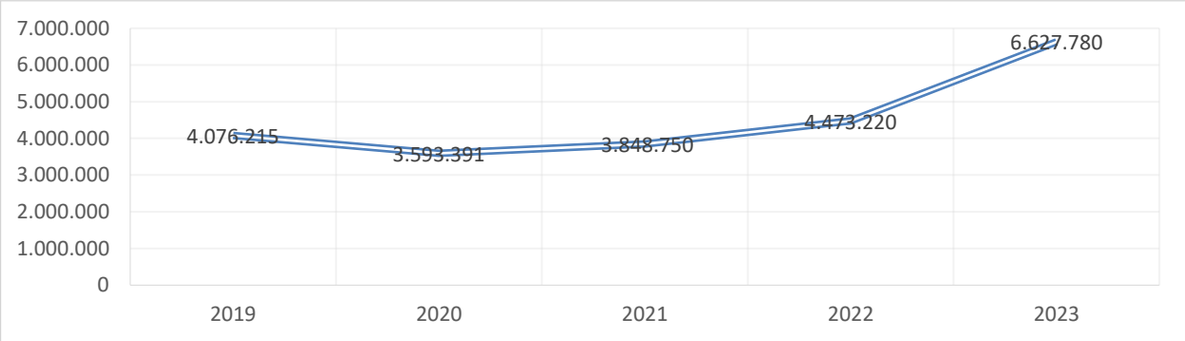
Gas-gas rumah kaca yang paling umum meliputi:

a. Karbon dioksida (CO_2): Dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
b. Metana (CH_4): Dihasilkan dari proses pencernaan hewan ternak, dekomposisi sampah organik, dan produksi serta transportasi gas alam.
c. Dinitrogen oksida (N_2O): Dihasilkan dari aktivitas pertanian dan penggunaan pupuk.
d. Gas-gas lainnya: Seperti gas fluorokarbon (CFCs) yang digunakan dalam refrigeran dan beberapa proses industri.

Meskipun gas rumah kaca bermanfaat mendukung kehidupan dan melindungi bumi dari radiasi ultraviolet, konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama akibat aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan deforestasi, berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Depok menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Emisi GRK tahun 2019-2023 terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.25 Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Depok Tahun 2019-2023 (Ton CO2e)



Sumber : DLHK Kota Depok, 2024

Pada tahun 2019, emisi GRK tercatat sebesar 4.076.215 Ton CO2e. Pada tahun 2020, terjadi penurunan emisi menjadi 3.593.391 Ton CO2e. Penurunan ini mungkin terkait dengan berkurangnya aktivitas industri dan transportasi selama pandemi COVID-19, yang menyebabkan penurunan sementara dalam emisi GRK.

Pada tahun 2021, terjadi sedikit peningkatan emisi menjadi 3.848.750 Ton CO2e . Kenaikan ini bisa disebabkan oleh pemulihan sebagian aktivitas ekonomi dan industri setelah pandemi. Pada tahun 2022, emisi GRK meningkat lebih lanjut menjadi 4.473.220 Ton CO2e dan melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi 6.627.780 Ton CO2e. Peningkatan ini bisa mencerminkan peningkatan aktivitas industri, penggunaan energi fosil yang lebih tinggi, atau penurunan efektivitas upaya mitigasi emisi.

Secara umum grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan emisi pada awal periode, emisi GRK kembali meningkat secara signifikan, terutama pada tahun 2022 dan 2023. Ini menekankan pentingnya melanjutkan dan memperkuat kebijakan serta tindakan pengurangan emisi GRK untuk mencegah lonjakan emisi di masa depan.

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merujuk pada upaya untuk mengurangi jumlah gas-gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas ini berperan dalam menangkap panas di atmosfer bumi, yang menyebabkan peningkatan suhu global atau pemanasan global.

Upaya penurunan emisi GRK melibatkan berbagai tindakan, seperti:

a. Pengurangan Penggunaan Energi Fosil: Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara, yang menghasilkan banyak CO2 saat dibakar.
b. Pengembangan Energi Terbarukan: Meningkatkan penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik.
c. Efisiensi Energi: Meningkatkan efisiensi penggunaan energi dalam industri, transportasi, dan rumah tangga untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.
d. Reboisasi dan Konservasi Hutan: Menanam pohon dan melindungi hutan yang ada, karena pohon menyerap CO2 dari atmosfer selama fotosintesis.

e. Pengelolaan Limbah: Mengurangi emisi metana dari pembusukan limbah organik dengan mengelola limbah lebih efektif atau menggunakan teknologi seperti penangkapan gas metana.

Penurunan emisi GRK adalah bagian penting dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mencegah dampak negatif lebih lanjut pada ekosistem, ekonomi, dan kesehatan manusia.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menurunkan Emisi GRK. Untuk Tahun 2024, berbagai upaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34 Kegiatan Inti dan Kegiatan Pendukung Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2024

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	SEKTOR AIR LIMBAH							
1	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman dan Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Pembangunan septiktank kedap	1000 rumah tangga	72 rumah tangga
		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Pelayanan penyedotan lumpur tinja	4912 rumah tangga	1853 rumah tangga
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Pemeliharaan sarana prasarana Instalasi Pengolah Lumpur Tinja	30 unit	8 unit
2	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PENGELOLAAN SAMPAH**	Pengelolaan Sampah	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Pengangkutan sampah ke TPA Cipayung /TPPAS Nambo	300.000 ton	128.220 ton

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
						Pengadaan gerobak motor sampah terpilah	24 unit	
				Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Operasional unit pengolah sampah organik	25.200 ton	13.970 ton
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rehabilitasi TPS dan Unit Pengolah Sampah (UPS)	7 bangunan	-
						Pengadaan dan pemeliharaan sarpras pengelolaan persampahan	245 unit	240 unit
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atauTPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Pengelolaan sampah di TPA	300.000 ton	173.950 ton
		PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yangmeningkat	Pelatihan Bank Sampah	11 kali	-
						Pembinaan Bank Sampah	132 kali	55 kali

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Pelatihan pengurangan sampah	5 kali	-
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Sosialisasi pemilahan sampah	1.540 orang	660 orang
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi yang dinilai kinerjanya dalm rangka PPLH	Sosialisasi dan pembinaan sekolah Adiwiyata	9 kali	6 kali
						Lomba 3R	1 kali	1 kali
	SEKTOR TRANSPORTASI							
3	**URUSAN PERHUBUNGAN**	**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan kajian jalur sepeda	1 dokumen	1 dokumen
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penambahan unit kamera *Area Traffic Control System* (ATCS)	9 unit	9 unit
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kabupaten/kota yang terbangun	Pembangunan halte angkutan umum	2 unit	-

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pemeliharaan CCTV *Area Traffic Control System* (ATCS)	49 unit	11 unit
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Pemeliharaan halte angkutan umum	10 unit	-
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor	20.000 unit	7.814 unit
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor	13 unit	-
						Kalibrasi alat PNBP	1 paket	-
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabpaten/kota	Penyusunan kajian kinerja angkutan penumpang umum	1 paket	-
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota	Pemeliharaan halte angkutan massal	2 unit	1 unit

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang tersedia	Operasional dan pemeliharaan Bus Sekolah	1 unit	1 unit
						Penyusunan kajian jaringan lintas angkutan barang	1 paket	-
						Penyusunan kajian jaringan lintas angkutan sekolah	1 paket	-
						Penyusunan kajian moda share	1 paket	-
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan operasional BRT Biskita	6 bulan	2 bulan
			Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penindakan penertiban parkir liar	11 bulan	5 bulan

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan sosialisasi tertib lalu lintas	6 kali	-
						Pelaksanaan penertiban lalu lintas	18 kali (3 kali x 6 bulan)	15 kali
		PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk perkeretaapian	Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	80 orang	-
4	**URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**PENYELENGGARAAN JALAN**	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	Pembangunan jalur pejalan kaki	2 lokasi	-
	SEKTOR ENERGI							
5	**URUSAN PERHUBUNGAN**	**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	Pengadaan dan pemasangan PJU dengan LED	596 unit	-
						Rehabilitasi jaringan PJU (Retrofit)	70 unit	-

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan	Pengadaan armatur lengkap LED untuk pemeliharaan dan rehabilitasi	105 unit	105 unit
	SEKTOR KEHUTANAN DAN LAHAN							
6	**URUSAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Sosialisasi dan verifikasi lapangan kegiatan Proklim	3 kali	1 kali
						Penyusunan Perwal Perlindungan Pohon	1 dokumen	1 dokumen
						Pemeliharaan taman arboretum	1 lokasi	1 lokasi
						Inventarisasi Emisi GRK	1 dokumen	-
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Pembangunan taman kelurahan	1 lokasi	-

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
						Pemeliharaan taman kelurahan	5 lokasi	-
7	**URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Operasional dan pemeliharaan TPU	13 lokasi (12 bulan)	13 lokasi (6 bulan)
	SEKTOR PERTANIAN/PETERNAKAN							
8	**URUSAN PERTANIAN**	**PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewanyang dibangun, direhabilitasidan dipelihara sertaberoperasi	Operasional dan pemeliharaan IPAL RPH	12 bulan	6 bulan
		PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	Sosialisasi dan penyediaan bibit Pekarangan Pangan Lestari (P2L)	4 kali	
						Pelatihan budi daya pertanian	1 lokasi	

No.	Urusan Pemerintahan/ Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Uraian Kegiatan Inti dan/atau Pendukung	Target	Realisasi s/d TW 2
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			Pasokan dan Harga Pangan					
		PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Pelatihan Pekarangan Pangan Lestari	14 orang	
		PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pelatihan teknologi pertanian	3 kali	

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2024

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk Tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan awal Tahun 2024, prospek serta tantangan perekonomian. Pada awal Tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat kondisi ekonomi global memburuk yang memberikan dampak juga pada terkontraksinya kondisi ekonomi. Implikasi pandemi COVID-19 telah merenggut korban jiwa serta kerugian material sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun kondisi ini terus membaik pada tahun 2021 seiring dengan perbaikan pengendalian pandemi, peningkatan jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan derajat kesehatan masyarakat serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat terdampak saat pandemi sehingga diprediksi membaik sehingga perekonomian diperkirakan sudah mulai bangkit.

Berdasarkan misi pertama yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025, yaitu perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi, tujuan pembangunan ekonomi Kota Depok diarahkan untuk :

1. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang layak, dengan penekanan pada sektor niaga, jasa, dan ekonomi kreatif.
2. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
3. Meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2024

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok

Ekonomi global yang mengalami perlambatan hingga tahun 2023 secara tidak langsung memberikan dampak kepada perekonomian di Indonesia zermasuk Kota Depok. Ada resiko ekonomi akibat ketidakpastian sektor finansial seiring dengan adanya kebijakan bank sentral yang menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi yang relatif tinggi di tahun 2022. Hal ini memberikan pengaruh terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis yang tercermin dari daya beli serta pertumbuhan bisnis baik lokal maupun nasional.

Kondisi ini juga yang mempengaruhi kinerja ekspor luar negeri di Kota Depok. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok, realisasi ekspor luar negeri pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Disamping itu El Nino yang terjadi sejak April 2023 juga berdampak pada perekonomian Kota Depok. Meskipun basis perekonomian Kota Depok bukanlah pada kategori pertanian, namun peningkatan harga komoditas pertanian juga turut dirasakan pada tahun 2023.

Struktur Ekonomi

Struktur perkonomian menunjukkan peranan setiap lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah dari usahausaha didalamnya. Kategori-kategori lapangan usaha dalam perekonomian yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) kategori Industri Pengolahan masih menjadi penopang utama perekonomian di Kota Depok. Kemudian diikuti oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Konstruksi. Secara serentak ketiga kategori tersebut memiliki peranan sebesar 70,90 persen terhadap total PDRB Kota Depok Tahun 2023.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Depok tahun 2023 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan yaitu sebesar 28,86 persen. Selanjutnya secara berturut-turut dicapai oleh kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,11 persen, dan Konstruksi sebesar 20,93 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Mencermati struktur perekonomian di Kota Depok, ada pola hubungan yang saling berkaitan antara lapangan usaha yang memiliki peranan dominan. Kegiatan perdagangan memperdagangkan hasil dari Industri Pengolahan, membutuhkan dukungan insfrastruktur (konstruksi) dan juga dari aktivitas jasa keuangan serta bergantung pada kondisi bidang transportasi dan pergudangan untuk memenuhi kebutuhan barang.

Pada Tahun 2023 terdapat peningkatan kontribusi dari beberapa sektor Lapangan Usaha di Kota Depok yang seperti kategori Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuman Jasa Perusahaan. Peningkatan aktivitas kategori Konstruksi didukung oleh penyelesaian pembangunan proyek infrastruktur LRT (Light Rail Transit). Selain itu juga didukung oleh proyek konstruksi gedung dan bangunan sipil. Pada tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan PSN (Proyek Strategis Nasional) yang menyentuh Kota Depok diantaranya pembangunan jalan tol Depok-Antasari, tol Cinere-Jagorawi, tol Cimanggis-Cibitung, dan LRT (Light Rail Transit) Jakarta-BogorDepok-Bekasi. Sementara untuk kegiatan non PSN diantaranya pembangunan underpass dan infrastruktur jalan, rekonstruksi jalan, pembangunan atau pembangunan jembatan, pengembangan infrastruktur air bersih, pembangunan taman alun-alun dan hutan Kota Depok, penataan pusat olahraga dan usaha mikro kecil, pembangunan kantor kelurahan dan gedung puskesmas.

Tabel 3.1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 – 2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	**Sektor Primer**	**1,34**	**1,37**	**1,34**	**1.31**	**1.31**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,34	1,37	1,34	1.31	1.31
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
B	**Sektor Sekunder**	**49,90**	**49,90**	**50,40**	**50.19**	**50,16**
3	Industri Pengolahan	28,69	28,89	29,18	28,90	28,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
6	Konstruksi	20,85	20,64	20,84	20,92	20,93
C	**Sektor Tersier**	**48,75**	**48,72**	**48,31**	**48.50**	**48.51**
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,12	21,21	21,18	21.11	21.11
8	Transportasi dan Pergudangan	4,28	4,36	4,21	4,44	4,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,09	4,13	3,93	4.01	4,02
10	Informasi dan Komunikasi	1,78	2,35	2,37	2,32	2,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,98	4,08	4,25	4,31	4,31
12	Real Estat	1,62	1,69	1,76	1,82	1,82
13	Jasa Perusahaan	0,20	0,19	0,20	0.20	0.21
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,55	2,38	2,20	2,19
15	Jasa Pendidikan	3,09	3,41	3,33	3,29	3,28
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,16	1,13	1,13
17	Jasa lainnya	3,78	3,69	3,54	3,67	3,67
Produk Domestik Regional Bruto		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2024 (data diolah)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,57	0,56	0,32	4,46	3,63
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
3	Industri Pengolahan	3,37	- 1,33	3,04	4,19	4,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,22	- 2,26	9,78	5,37	6,83
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,22	10,45	6,93	4,93	9,40
6	Konstruksi	9,99	- 2,36	5,61	4,99	4,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,22	- 7,43	4,25	4,80	4,82
8	Transportasi dan Pergudangan	5,81	- 1,24	0,28	10,52	5,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,20	- 1,39	- 1,72	9,92	7,59

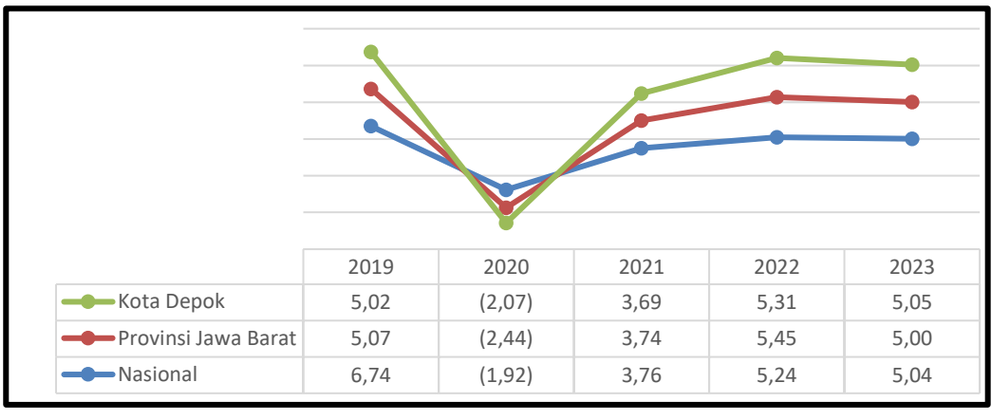
No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
10	Informasi dan Komunikasi	8,98	30,36	7,68	7,99	7,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	1,33	5,87	1,59	5,88
12	Real Estat	10,84	1,97	9,95	9,48	6,17
13	Jasa Perusahaan	3,85	- 10,94	8,57	8,40	7,13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,51	- 7,24	- 2,33	0,93	2,93
15	Jasa Pendidikan	6,18	7,52	0,16	4,91	3,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,77	-3,38	8,08	5,43	5,40
17	Jasa lainnya	9,82	- 4,87	1,42	9,73	7,84
Produk Domestik Regional Bruto		**6,74**	**-1,92**	**3,76**	**5,24**	**5,05**

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2024

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Depok pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai produksi pada beberapa lapangan usaha setelah menghilangkan pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Depok tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 55,22 triliun rupiah. Angka tersebut naik sebesar 2,66 triliun rupiah dari 52,56 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi peningkatan kinerja ekonomi sebesar 5,05 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya saja peningkatan yang terjadi tidak sebesar peningkatan pada tahun 2022 yang sebesar 5,24 persen.

Meningkatnya kinerja ekonomi Kota Depok pada tahun 2023 disebabkan karena terjadinya peningkatan kinerja di semua lapangan usaha. Meskipun demikian, tidak semua kategori lapangan usaha mengalami percepatan laju pertumbuhan. Kategori lapangan usaha di Kota Depok yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,40 persen. Kategori lapangan usaha yang juga mengalami pertumbuhan tertinggi selanjutnya adalah Informasi dan Komunikasi yang mencapai 7,98 persen; Jasa Lainnya sebesar 7,84 persen; Jasa Perusahaan sebesar 7,13 persen ; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,83 persen dan Real Estat sebesar 6,17 persen. Sementara kategori yang mengalami peningkatan kinerja terendah adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib sebesar 2,93 persen.

Gambar 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023



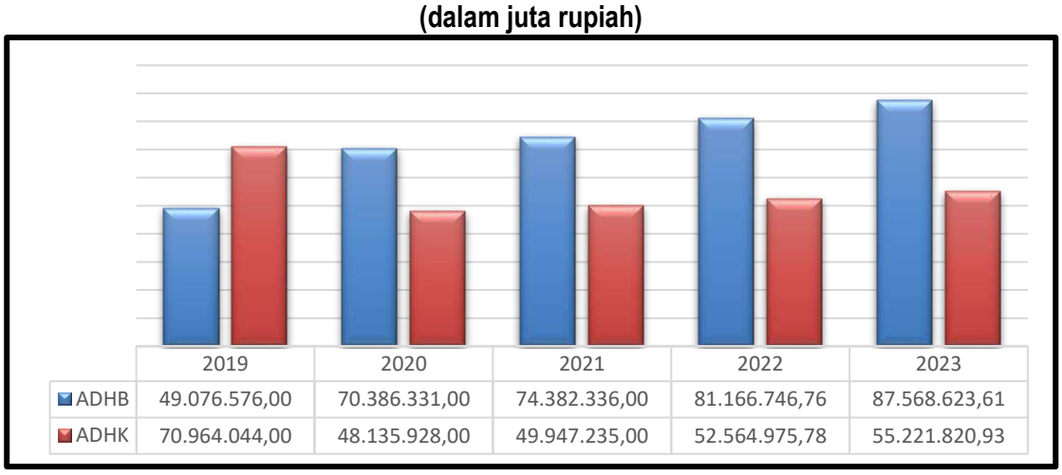
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Depok	5,02	(2,07)	3,69	5,31	5,05
Provinsi Jawa Barat	5,07	(2,44)	3,74	5,45	5,00
Nasional	6,74	(1,92)	3,76	5,24	5,04

Sumber: BPS Tahun 2024 (data diolah)

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam kurun 5 tahun (2019 – 2023) dapat dilihat pada grafik diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kota Depok telah menuju ke arah tren yang positif. Setelah sempat pada tahun 2022 capaian tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok berada bawah Provinsi Jawa Barat dan nasional, maka pada tahun 2023 nilai pertumbuhan ekonomi Kota Depok Kembali ke tren awal yaitu secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional.

Perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Nilai PDRB dapat memberikan gambaran kemampuan perekonomian suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto tersaji dalam dua besaran, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah gambaran PDRB Kota Depok dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Gambar 3.2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Depok Tahun 2019 – 2023 (dalam juta rupiah)



	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	49.076.576,00	70.386.331,00	74.382.336,00	81.166.746,76	87.568.623,61
ADHK	70.964.044,00	48.135.928,00	49.947.235,00	52.564.975,78	55.221.820,93

Sumber: BPS Tahun 2023 (data diolah)

Nilai PDRB merupakan cerminan kemampuan potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah. Nilai PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 sebesar 87,57 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 6,40 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 81,17 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 52,56 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 55,22 triliun rupiah pada tahun 2023. Sehingga selama tahun 2023 Kota Depok mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian di Kota Depok pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Kota Depok atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Tabel 3.3. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Depok, 2019-2023 (Juta Rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
ADHB	29,53	34,36	35,66	38,40	40,82
ADHK	20,39	24,50	23,94	24,87	25,74

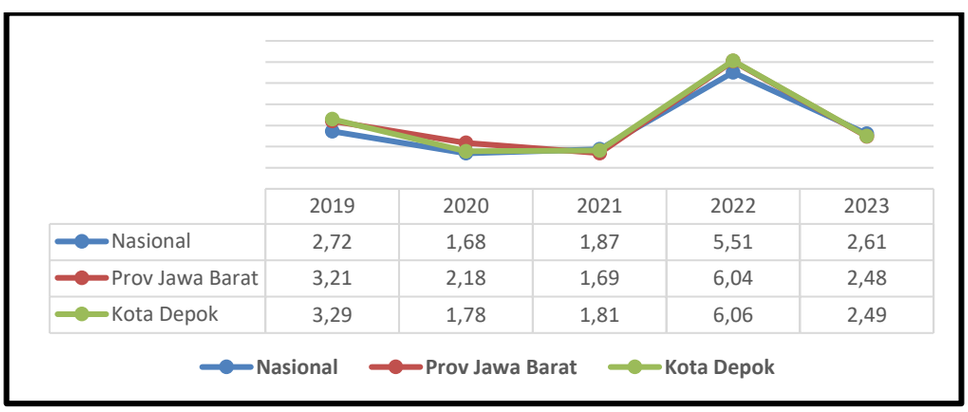
Sumber: *BPS Tahun 2024 (data diolah Bappeda)*

Tahun 2023 PDRB per kapita Kota Depok sebesar 40,82 juta rupiah. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang nilainya sebesar 38,40 juta rupiah. Jika menghilangkan pengaruh inflasi, PDRB per kapita atas harga konstan mengalami peningkatan sebesar 3,50 persen. PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik dari 24,87 juta rupiah pada tahun 2022 menjadi 25,74 juta rupiah pada tahun 2023.

3.1.1.2 Inflasi

Indeks Harga Konsumen merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Inflasi Kota Depok dihitung berdasarkan Survei Harga Konsumen. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Harga Konsumen Kota Depok yang dihitung berdasarkan perhitungan Survei Biaya Hidup tahun dasar 2018=100 selama Tahun 2023.

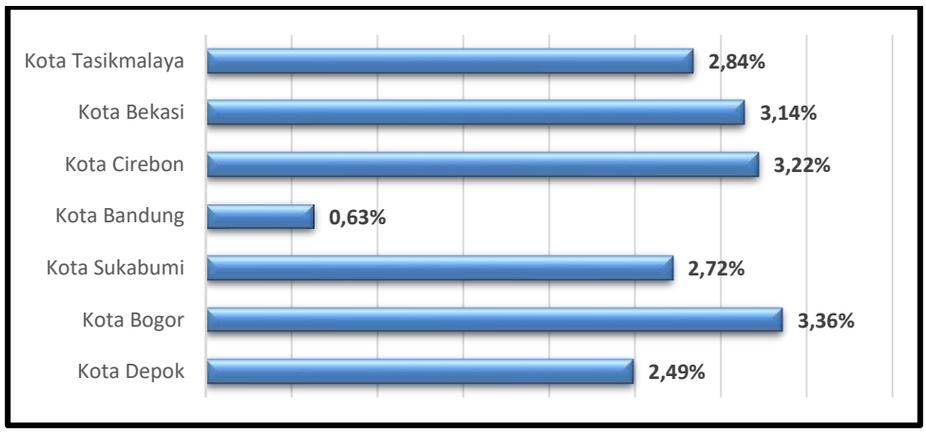
Gambar 3.3. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender Kota Depok Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2023, (data diolah)

Gambar diatas menunjukkan dinamika inflasi tahunan di Kota Depok, Jawa Barat dan Nasional pada rentang waktu 2019 –2023. Inflasi Kota Depok tahun kalender selama 2023 mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2022. Inflasi tahun kalender tahun 2022 sebesar 6,06 persen sedangkan tahun 2023 sebesar 2,49 persen. Inflasi tahun kalender Jawa Barat sebesar 2,48 persen lebih rendah dari inflasi tahun kalender Nasional yakni sebesar 2,61 persen.

Gambar 3.4. Perkembangan Inflasi Tahun Kalender 7 Kota Di Jawa Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2023, (data diolah)

Di Provinsi Jawa Barat, inflasi tahun kalender Kota Depok menjadi yang terendah kedua setelah Kota Bandung yang mencatatkan inflasi tahun 2023 sebesar 0,63 persen. Angka inflasi di semua Kota di Provinsi Jawa Barat masih dalam target yang diberikan Bank Indonesia 3±1 persen. Hanya saja Kota Bandung yang berada di bawah target.

Inflasi Sepanjang Tahun 2023

Salah satu yang menjadi sorotan selama 2023 adalah kenaikan harga beras. Beras memberikan sumbangan utama terjadinya inflasi sepanjang tahun 2023 disebabkan factor cuaca. Curah hujan yang meningkat turut mempengaruhi kualitas beras. Sehingga penggilingan padi memerlukan biaya yang lebih besar untuk melakukan pengeringan.

Tabel 3.4. IHK dan Inflasi Kota Depok bulan Desember 2023 dan Tahun Kalender 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Inflasi Bulan Desember 20223	Laju Inflasi Tahun Kalender 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Umum	108,34	114,9	117,76	0,27	2,49
Makanan, Minuman & Tembakau	111,63	119,91	126,32	0,94	5,35
Pakaian & Alas Kaki	99,12	99,56	99,97	0,00	0,41
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya	102,98	109,32	112,01	0,00	2,46
Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,71	120,98	121,84	0,11	0,71
Kesehatan	105,21	109,83	110,20	-0,02	0,34
Transportasi	106,40	117,35	117,71	0,00	0,31

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2021	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Inflasi Bulan Desember 20223	Laju Inflasi Tahun Kalender 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	98,02	97,58	98,21	0,13	0,65
Rekreasi, Olahraga & Budaya	107,68	109,54	111,96	0,11	2,21
Pendidikan	112,48	118,79	121,35	0,00	2,16
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	118,55	121,8	123,22	0.00	1,17
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	110,88	117,39	123,36	0,35	5,09

Sumber: BPS Kota Depok Tahun 2023, (data diolah)

Sepanjang tahun 2023 terjadi inflasi di semua kelompok pengeluaran. Makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok komoditas yang mengalami inflasi tertinggi Inflasi Kota Depok 2023. Komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya inflasi. Sepanjang tahun 2023 di Kota Depok adalah beras, cabai merah, sewa rumah, kontrak rumah, sewa rumah, rokok kretek filter, emas perhiasan, bawang putih, biskuit, akademi/perguruan tinggi, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas utama yang memberikan sumbangan terbesar terjadinya deflasi adalah telur ayam ras, bensin, tomat, kopi bubuk, minyak goreng, solar, baju muslim anak, baja ringan, pembasmi nyamuk spray, dan telepon seluler.

Sepanjang tahun 2023, beras memberikan andil kenaikan inflasi sebesar 0,3307 persen. Hampir sama dengan beras, harga cabai merah juga memberikan andil yang cukup besar terhadap angka inflasi Kota Depok. Penyebab kenaikan harga cabai merah dikarenakan oleh faktor cuaca. Sepanjang tahun 2023, cabai merah yang termasuk ke dalam bahan makanan memberikan andil kenaikan inflasi sebesar 0,2681 persen. Pemerintah sebenarnya sempat beberapa kali menaikan harga BBM, namun juga sempat menurunkan harganya, sehingga sepanjang tahun 2023

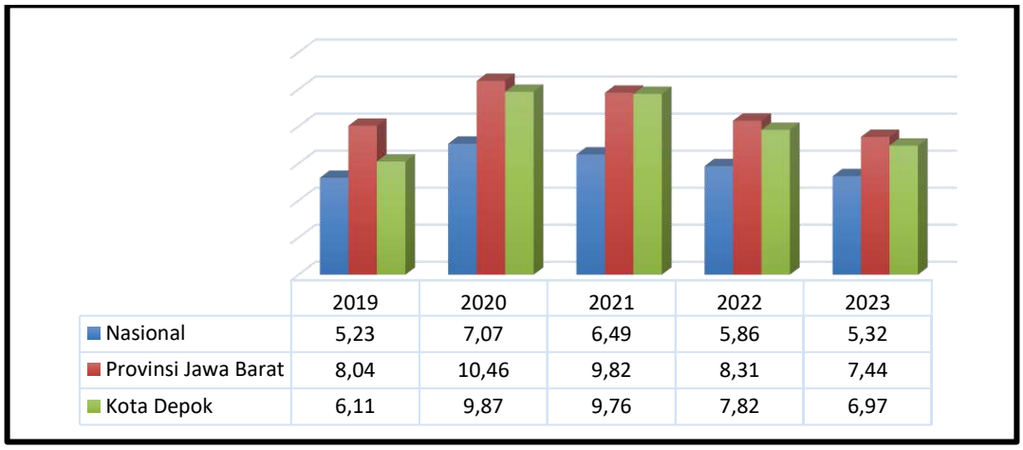
3.1.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

TPT Kota Depok hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 6,97%. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,85% dibandingkan dengan Agustus 2022 (7,82%). TPT yang mengalami kenaikan pada 4 (empat) tahun terakhir jika dibandingkan tahun 2019, disebabkan dampak dari pandemi Covid - 19 yang berpengaruh sangat kuat terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat.

Pada tahun 2023 pun masih terjadi sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum Pandemic, namun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dalam rangka mengurangi pengangguran telah menunjukkan hasil yang signifikan. Program pelatihan kerja, pelatihan produktivitas tenaga kerja, dan program penciptaan wira usaha baru maupun program-program pada urusan tenaga kerja sangat mendukung capaian ini.

Gambar 3.5. Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah dengan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber :BPS Kota Depok Tahun 2023, (data diolah)

TPT Kota Depok hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 6,97 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,85 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022 (7,82 persen).

Grafik di atas menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 penurunan angka TPT Kota Depok lebih besar dibandingkan nasional maupun Provinsi Jawa Barat, namun dampak pandemi telah menyebabkan peningkatan TPT Kota Depok lebih besar dari nasional maupun Provinsi Jawa Barat dan hal ini berlanjut hingga tahun 2021 dimana penurunan TPT lebih kecil. Tetapi sejak tahun 2022 dan 2023, penurunan TPT Kota Depok Kembali ke tren semula yaitu lebih besar dibanding nasional maupun Provinsi Jawa Barat, dengan kebijakan pemulihan ekonomi Kota Depok dalam pengendalian pengangguran, pertumbuhan jumlah penganggur di Kota Depok dapat lebih ditekan penurunannya dibandingkan nasional maupun Provinsi Jawa Barat.

Tabel 3.5. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Depok, Tahun 2019 – 2023

Status keadaan Ketenagakerjaan	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	1.821,62	1.869,32	1.927,76	1.986,88	1.646,30
Angkatan Kerja	1.184,68	1.195,63	1.207,11	1.258,74	1.033,24
Bekerja	1.112,36	1.077,60	1.089,30	1.160,31	961,194
Pengangguran	72,325	118,03	117,81	98,43	72,043
Bukan Angkatan Kerja	636,94	673,69	720,65	728,14	613,059

Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Depok. Penduduk usia kerja pada Tahun 2023 sebanyak 1.646,30 ribu orang, turun sebanyak 340,58 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2022. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.033,24 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 613,059 ribu orang.

Tabel 3.6. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu yang Termasuk Pengangguran di Kota Depok Tahun 2019-2022

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2020	2021	2022	2023
SD ke Bawah	12,13	11,11	5,18	16,43
SMP / Sederajat	9,47	7,82	11,56	12,11
SMA / SMK / Sederajat	54,24	67,06	65,59	53,49
DI / II /III Akademi / Universitas	24,16	14,01	17,67	17,97

Sumber : *BPS Kota Depok Tahun 2024, (data diolah)*

Pada Tabel dibawah terlihat bahwa penduduk Kota Depok berumur 15 Tahun Ke Atas yang termasuk pengangguran dengan pendidikan tamat SLTP/sederajat, cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2020-2023. Sebaliknya penduduk Kota Depok berumur 15 Tahun Ke Atas yang termasuk pengangguran dengan pendidikan SLTA cenderung mengalami penurunan dari tahun 2021-2023.

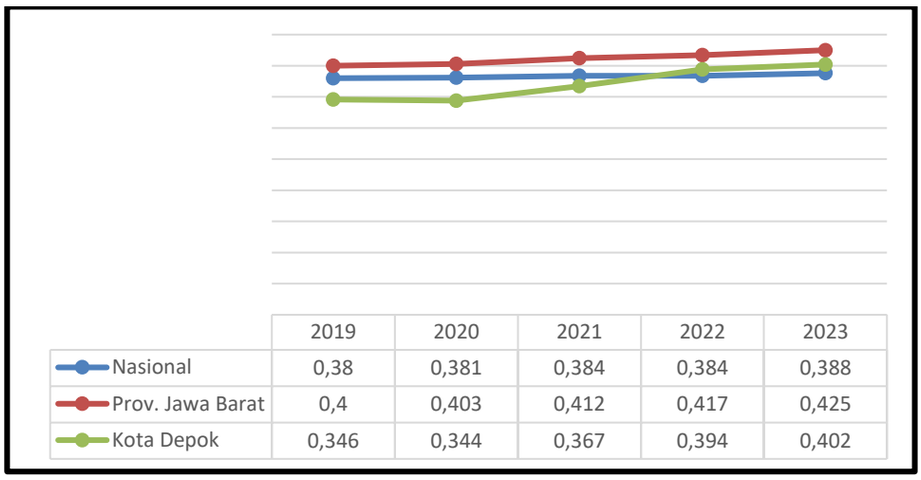
3.1.1.4. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata dapat menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan pendapatan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam. Suatu besaran yang menggambarkan seberapa besar ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu wilayah pada suatu waktu adalah Gini Rasio atau Koefisien Gini. Nilai Gini Rasio (GR) berkisar antara 0 hingga 1 dengan klasifikasi ketimpangan rendah (GR<0,3), ketimpangan sedang (0,3<GR<0,5) dan ketimpangan tinggi (GR>0,5).

Berdasarkan grafik di bawah, gini rasio Kota Depok sepanjang tahun 2017 –2023 mengalami fluktuasi. Sebelumnya pada tahun tahun 2016 mencapai 0,401 dan sejak tahun 2017 hingga 2022 tidak melampaui poin 0,400. Bahkan pada tahun 2019 ketimpangan tersebut menyempit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pada tahun 2023 indeks gini Kota Depok kembali melampaui poin 0,400 yaitu 0,402. Jika dibandingkan tahun 2022, capaian indeks gini tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,008 poin. Kenaikan ini lebih kecil dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya.

Seperti tersaji pada Gambar di bawah ini, Pada awal masa pandemi yaitu tahun 2020 angka gini rasio di Kota Depok tidak terjadi perubahan, namun pandemi terus berlanjut hingga tahun 2022 dan angka gini rasio Kota Depok menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana tahun 2021 indek gini naik 6,69% dan pada tahun 2022 naik kembali sebesar 7,36%. Jika gini rasio di Kota Depok dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa tren dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, baik Kota Depok, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional mengalami kenaikan gini rasio dan Kota Depok cenderung fluktuatif. Dampak pandemi terhadap ketimpangan di Kota Depok pada tahun 2020 belum terlihat, namun sejak tahun 2021 terus meningkat.

Gambar 3.6 Perbandingan Tren Gini Rasio Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	0,38	0,381	0,384	0,384	0,388
Prov. Jawa Barat	0,4	0,403	0,412	0,417	0,425
Kota Depok	0,346	0,344	0,367	0,394	0,402

Sumber : *BPS Kota Depok Tahun 2023, (data diolah)*

Peningkatan angka ketimpangan ini menggambarkan semakin lebarnya kesenjangan kesejahteraan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Hal ini perlu direspon dengan tepat agar stabilitas sosial ekonomi masyarakat Kota Depok dapat tetap terjaga. Upaya pendekatan terus dilakukan antara lain melalui upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik, memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan publik yang mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan kemudahan investasi serta peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Upaya pemerintah dan masyarakat dalam menurunkan angka kesenjangan terus dilakukan meskipun dampaknya belum secara optimal dirasakan.

Upaya Pemerintah Kota Depok terus diberikan pada golongan masyarakat yang hingga saat ini belum merasakan dampak positif dari hasil pembangunan. Upaya-upaya inovatif dan inklusif terus dilakukan dan menjadi landasan dalam setiap langkah kebijakan, sehingga setiap warga dapat ikut serta dalam kemajuan Kota Depok. Demikian halnya fokus pada pembangunan yang lebih inklusif, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi secara umum.

3.1.1.5. Tingkat Kemiskinan

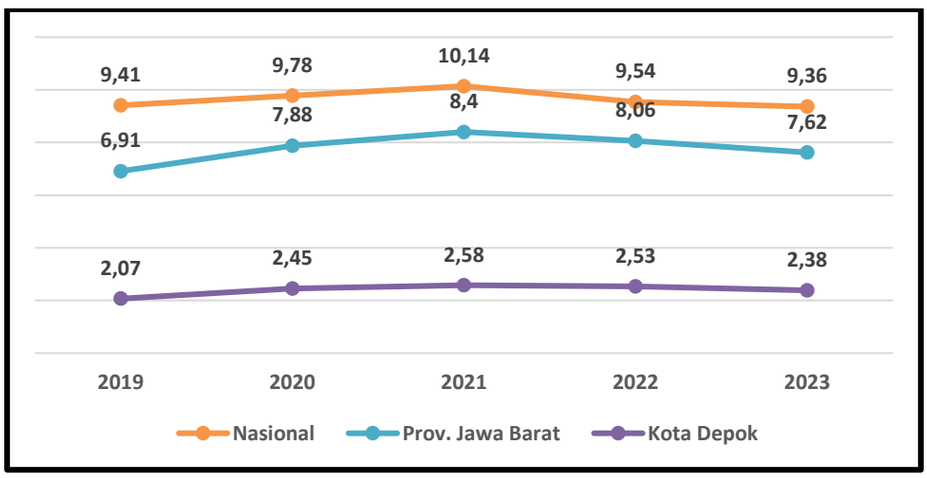
Untuk mengukur angka kemiskinan di Kota Depok digunakan angka persentase penduduk miskin Kota Depok yang bersumber dari BPS Kota Depok. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Kota Depok adalah jumlah penduduk Kota Depok yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Kota Depok dikali 100%. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimun yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Depok relatif lebih stagnan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional yaitu di kisaran 2%. Pada tahun 2023, angka kemiskinan di Kota Depok adalah sebesar 2,53% atau diperkirakan sebesar 61,95 ribu orang. Nilai ini turun dari tahun 2022 yakni

sebesar 2,53% atau 64,36 ribu orang. Persentase penduduk miskin turun 0,15% atau berkurang 2,41 ribu orang. Tingkat kemiskinan di Kota Depok terendah di Provinsi Jawa Barat dan peringkat ke-4 terendah di level nasional.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan peningkatan persentase penduduk miskin baik nasional, regional maupun Kota Depok. Seiring dengan pulihnya laju pertumbuhan ekonomi, Kota Depok lebih mampu mengendalikan kerentanan laju pertumbuhan penduduk miskin dibanding Provinsi Jawa Barat seperti ditampilkan pada gambar di bawah. Artinya secara umum persentase penduduk miskin di Kota Depok jauh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan Provinsi Jawa Barat dan nasional. Angka kemiskinan nasional baru mencapai single digit pada tahun 2018, sedangkan Kota Depok sudah mencapainya sejak pertama kali dihitung tahun 2004.

Gambar 3.7 Perbandingan Persentase Angka Kemiskinan
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber : *BPS Kota Depok Tahun 2023, (data diolah)*

3.1.1.6. Ekonomi Kreatif

Indonesia pun mulai melihat bahwa ekonomi kreatif ini merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan, karena jika dilihat dari sumber daya yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia, kreativitas masyarakat Indonesia dapat disejajarkan dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu maka Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan mengingat sektor ini memiliki sumber daya yang sifatnya tidak terbatas, yaitu berbasis pada intelektualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini diperlukan kolaborasi aktif dari cendekiawan (intelektual), bisnis, dan pemerintah. Tanpa adanya kolaborasi ketiga elemen ini, maka dikhawatirkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan selaras, efisien, dan saling tumpang tindih. Hal ini karena setiap elemen memiliki peran yang signifikan, namun juga memerlukan kontribusi dari elemen lainnya.

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2015, telah menetapkan 16 subsektor ekonomi kreatif secara nasional, yaitu meliputi: (1) Arsitektur; (2) Desain Interior; (3) Desain Komunikasi visual; (4) Desain Produk; (5) Film, animasi, dan video; (6) Fotografi; (7) Kriya; (8) Kuliner; (9) Musik; (10) Fashion; (11) Aplikasi dan Game Developer; (12) Penerbitan; (13) Periklanan; (14) Televisi dan Radio; (15) Riset dan Pengembangan; dan (16) Seni Rupa.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif

Sektor ekonomi kreatif di Kota Depok mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini terlihat dari nilai PDRB setiap sub sektor ekonomi kreatif menunjukan tren peningkatan selama periode 2018-2021, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2019, Nilai PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 10.934,66 miliar dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp 9.895,59 milyar. Sementara itu pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi sebesar Rp 10.925,43 milyar, dan kembali meningkat pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi menjadi sebesar Rp 11.220,73 milyar.

Sementara itu nilai PDRB Ekonomi Kreatif Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan seiring dengan adanya pemulihan ekonomi wilayah akibat pandemi Covid-19. PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2021 sebesar Rp 7.368,60 miliar meningkat dibanding tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp 7.272,58 miliar atau tumbuh sebesar 1,32 persen. Sementara itu PDRB Ekonomi Kreatif tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 6.675,26 milyar dan Rp 7.385,20 milyar. Kondisi ini menggambarkan prospek perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kota Depok cukup menjanjikan, meski mengalami kontraksi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Tabel 3.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Ekonomi Kreatif Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 - 2022 (Rp Juta)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Arsitektur	27,862	26,643	27,258	30,992
2	Desain Interior	1,576	1,507	1,542	1,753
3	Desain Komunikasi Visual	1,002	958	981	1,115
4	Desain Produk	4,701	4,495	4,599	5,229
5	Film, Animasi, Video	40,518	37,286	40,856	46,597
6	Fotografi	31,577	30,196	30,893	35,125
7	Kriya	1,735,453	1,733,590	1,849,632	1,998,581
8	Kuliner	6,920,778	6,928,636	6,966,685	7,525,592
9	Musik	23,528	23,503	25,076	25,280
10	Fashion	1,700,715	1,698,8901	1,812,609	1,853,714
11	Aplikasi dan Game Developer	149,157	142,634	145,924	165,916
12	Penerbitan	199,203	198,989	212,309	214,037
13	Periklanan	20,087	18,485	20,255	23,101
14	Televisi dan Radio	12,705	16,699	17,737	18,956
15	Seni Pertunjukkan	44,093	42,164	43,137	49,047

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
16	Seni Rupa	21,706	20,756	21,235	24,145
	PDRB Ekonomi Kreatif	**10,934,662**	**10,925,433**	**11,220,727**	**12,019,180**

Sumber : Diskominfo Kota Depok, (data diolah 2024)

Struktur Ekonomi Kreatif

Sektor Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB wilayah. Pada tahun 2022, Sektor Ekonomi Kreatif memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB ADHB Kota Depok sebesar 14,81% atau sedikit lebih rendah dibanding tahun 2021 yang mencapai 15,09%. Hal ini disebabkan proporsi peningkatan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif masih lebih rendah dibanding peningkatan PDRB sektor ekonomi lainnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu memberikan perhatian lebih pada sector Ekonomi Kreatif untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai sektor andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 3.8. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2022 (Persen)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Arsitektur	0,25	0,24	0,24	0,26
2	Desain Interior	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Desain Komunikasi Visual	0,01	0,01	0,01	0,01
4	Desain Produk	0,04	0,04	0,04	0,04
5	Film, Animasi, Video	0,37	0,34	0,36	0,39
6	Fotografi	0,29	0,28	0,28	0,29
7	Kriya	15,87	15,87	16,48	16,63
8	Kuliner	63,29	63,42	62,09	62,61
9	Musik	0,22	0,22	0,22	0,21
10	Fashion	15,55	15,55	16,15	15,42
11	Aplikasi dan Game Developer	1,36	1,31	1,30	1,38
12	Penerbitan	1,82	1,82	1,89	1,78
13	Periklanan	0,18	0,17	0,18	0,19
14	Televisi dan Radio	0,12	0,15	0,16	0,16
15	Seni Pertunjukkan	0,40	0,39	0,38	0,41
16	Seni Rupa	0,20	0,19	0,19	0,20
	PDRB Ekonomi Kreatif	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : Diskominfo Kota Depok, 2024

Secara umum, struktur Ekonomi Kreatif berdasarkan komposisinya terhadap pembentukan PDRB relatif tidak mengalami perubahan selama periode 2018-2022. Tiga sub sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Kota Depok ADHB adalah sub sektor Kuliner, sub sector Kriya dan sub sektor Fashion.

Pada Tabel diatas menunjukan bahwa sub sektor kuliner adalah sub sektor yang paling mendominasi perekonomian kreatif di Kota Depok, berkontribusi sekitar 62,61 persen dari total PDRB Sektor Ekono*mi Kreatif ADHB tahun 2022. Sub sektor Kuliner merupakan kegiatan persiapan,

pengolahan,penyajian produk makanan dan minuman yang menjadikan unsur kreativitas, estetika, tradisi, dan/atau kearifan lokal; sebagai elemen terpenting dalam meningkatkan cita rasa dan nilai produk tersebut, untuk menarik daya beli dan memberikan pengalaman bagi konsumen. Sektor lainnya yang berkontribusi besar adalah sub sektor kriya dan fashion. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sub sektor tersebut yaitu kuliner, kriya dan fashion perlu mendapatkan perhatian khusus, karena terjadinya fluktuasi pada ketiga sub sektor ini akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi kreatif bahkan perekonomian Kota Depok secara umum.

Tenaga Kerja Sektor Ekonomi Kreatif

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi di Kota Depok adalah mengatasi pengangguran disamping pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jumlah tenaga kerja yang terserap oleh Sektor Ekonomi Kreatif pada tahun 2022 sejumlah 114.992 orang lebih tinggi dibanding tahun 2021 yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 109.108 orang (Tabel 5). Peningkatan penyerapan jumlah tenaga kerja ini disebabkan adanya pemulihan ekonomi di Kota Depok akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, dimana seluruh sub sektor Ekonomi Kreatif mengalami penurunan, khususnya penurunan pada tiga sub sektor yang berkontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja yaitu sub sektor kuliner, kriya dan fashion.

Tabel 3.9. Jumlah Tenaga Kerja di Sektor Ekonomi Kreatif Kota Depok Tahun 2018 – 2022 (Orang)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Arsitektur	118	111	114	120
2	Desain Interior	115	108	111	117
3	Desain Komunikasi Visual	119	112	115	123
4	Desain Produk	148	140	143	147
5	Film, Animasi, Video	1.089	911	991	1.075
6	Fotografi	1.679	1.584	1.619	1.703
7	Kriya	13.543	12.540	12.335	12.840
8	Kuliner	80.195	57.645	57.961	60.489
9	Musik	846	783	786	826
10	Fashion	26.086	24.154	25.771	27.900
11	Aplikasi dan Game Developer	1.221	1.152	1.178	1.239
12	Penerbitan	3.051	2.825	2.833	2.976
13	Periklanan	361	302	330	359
14	Televisi dan Radio	189	136	146	158
15	Seni Pertunjukkan	3.059	2.886	2.951	3.105
16	Seni Rupa	1.787	1.686	1.723	1.813
Jumlah Tenaga Kerja		**133.606**	**107.075**	**109.108**	**114.992**

Sumber : Diskominfo Kota Depok, (data diolah 2024)

Sementara itu, jumlah unit usaha Ekonomi Kreatif pada tahun 2022 sebanyak 45.807 unit usaha lebih banyak dibanding tahun 2021 sebanyak 43.542 unit usaha (Tabel 6). Adanya kebijakan pelonggaran terhadap mobilitas penduduk dan social distancing untuk mengurangi dampak covid-19 pada tahun 2021 dibanding periode awal Covid-19 di tahun 2020, bahkan di tahun 2022 tidak ada lagi pembatasan mobilitas penduduk, berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya peningkatan aktivitas usaha di Sektor Ekonomi Kreatif, terutama sub sektor kuliner dan fashion yang memiliki jumlah unit usaha paling banyak dalam struktur Ekonomi Kreatif di Kota Depok. Secara keseluruhan daya serap tenaga kerja usaha sektor ekonomi kreatif di Kota Depok tahun 2022 menyerap sekitar 3-5 orang tenaga kerja per unit usaha.

Selanjutnya dari sisi produktivitas tenaga kerja, pada tahun 2022 produktivitas tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp 67,57 juta per tanaga kerja. Artinya setiap tenaga kerja rata-rata menghasilkan output atau nilai tambah sebesar Rp 67,57 juta per tenaga kerja. Sektor yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi adalah sub sektor arsitektur, televisi dan radio, dan aplikasi game developer masing-masing menghasilkan nilai tambah per tenaga kerja sebesar Rp 196,58 juta, Rp 127,01 juta dan Rp 111,58 juta.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Global, Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok

Dalam era ekonomi terbuka seperti saat ini, keadaan ekonomi Kota Depok Tahun 2024 tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi periode sebelumnya dan pengaruh perkembangan lingkungan eksternal baik perekonomian global, nasional, maupun kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat.

3.1.2.1 Tantangan Ekonomi Global

Pemerintah menilai ekonomi Indonesia ke depan akan dipenuhi tantangan besar. Indonesia tampaknya akan menghadapi tantangan besar, baik terkait iklim, maupun pertumbuhan produktivitas masyarakat. Dari sisi risiko ekonomi global dalam mendatang yang telah dipetakan Bappenas, setidaknya ada sembilan risiko global yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, termasuk di domestik. Di antaranya dari yang risiko tinggi sampai terendah, yakni risiko kegagalan climate action, cuaca ekstrem seiring perubahan iklim, deglobalisasi, krisis lapangan kerja, krisis utang, konfrontasi geoekonomi, risiko kegagalan cybersecurity, biodiversity loss, hingga asset bubble burst atau peningkatan harga aset secara cepat. Penerapan standar keberlanjutan atau sustainability yang tinggi di level globa, produk Indonesia harus mulai berorientasi ramah lingkungan supaya bisa bersaing di tingkat global, serta tantangan transisi energi. Isu pembangunan jangka panjang. Hal ini terkait dengan masalah dari produktivitas ekonomi domestik. Isu ini tercermin dari total factor productivity (TFP) Indonesia yang tertinggal jauh dari negara Asia lainnya, dan trennya terus menurun sejak 1998 ke arah 0,30. Padahal, negara Asia lain seperti China, India, baru merosot ke level 1,30 pada 2018, bersamaan dengan Jepang, dan Thailand. Sedangkan Vietnam, Turki, dan Korea Selatan masih konsisten naik TFP hingga 2020 ke arah 1,30.

Dalam laporan outlook ekonomi dan keuangan di Tahun 2024, disebutkan di tengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global, perekonomian Indonesia tercatat tetap kuat dan

stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai sebesar 5,17% (yoy)[1]. Pemerintah tetap optimis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5% hingga penghujung tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi tersebut salah satunya didukung oleh kondisi sektor keuangan tahun 2023 yang dinilai stabil dan resilien tercermin dari pertumbuhan sektor pasar modal, perbankan dan industri keuangan non bank. Di sektor pasar modal, IHSG posisi 30 November 2023 tercatat menguat sebesar 3,36% secara ytd ke level Rp7.080,74. Untuk sektor perbankan, kinerja intermediasi perbankan posisi Oktober 2023 tetap terjaga dengan nominal penyaluran kredit sebesar Rp6.902,98 triliun (tumbuh 8,99% secara yoy) dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai sebesar Rp8.198,80 triliun (tumbuh 3,43% secara yoy). Adapun untuk sektor keuangan non bank, akumulasi pendapatan premi Perusahaan Asuransi posisi Oktober 2023 mencapai sebesar Rp264,23 triliun (tumbuh 3,54% secara yoy) dan dari industri Perusahaan Pembiayaan, piutang pembiayaan mencapai Rp463,12 triliun (tumbuh sebesar 15,02% secara yoy)[2]. Capaian pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sektor keuangan tahun 2023 di atas, tentu patut kita syukuri bersama. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dan kuat di tengah perlambatan perekonomian serta tingginya ketidakpastian global.

Menjelang datangnya tahun 2024, perekonomian dunia diperkirakan masih terus dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi China dan Amerika yang melemah, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia[3]. Berdasarkan laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan IMF pada 10 Oktober 2023, pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9% turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%[4]. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Berdasarkan proyeksi dari beberapa Lembaga, sebagian besar memprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil dikisaran 5%, lebih tinggi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global di atas yang mencapai sebesar 2,9%. Beberapa Lembaga yang telah memproyeksikan besaran pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2024 antara lain World Bank sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0% serta OECD sebesar 5,2%[5]. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%[6].

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, selain menyiapkan langkah antisipatif atas kondisi eksternal yaitu ketidakpastian global, kita juga harus mewaspadai tantangan dari dalam negeri/domestik. Tantangan tersebut antara lain kenaikan suku bunga dalam negeri, ketahanan pangan nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, dan kondisi politik dalam negeri menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

3.1.2.2 Tantangan Ekonomi Nasional

Statistik tahun 2022 mencatat, Indonesia mengalami 3.544 bencana alam, 98 persen bersifat hidrometeorologi, yang merenggut 3.183 nyawa dan berdampak pada 18 juta orang selama satu dekade terakhir. Di dunia, proyeksi penurunan curah hujan 1-4 persen di 2020-2034 akan memicu kekeringan dan konflik alokasi air. “Indonesia, sebagai negara kepulauan, berada di garis depan krisis global ini,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat berbicara tentang “Freshwater: The True Value of Resilience” di World Economic Forum, Davos, Swiss.

Dalam 10th World Water Forum yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 mendatang, Indonesia akan membahas prioritas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, konservasi sumber daya air, sistem manajemen air cerdas, dan green-grey infrastructure untuk manajemen bencana air. “Forum ini akan memberikan hasil konkret dan tindakan kolektif tentang air untuk masa depan yang berkelanjutan bagi planet,” tutur Menteri Suharso.

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045, Indonesia membidik pertumbuhan ekonomi 6–7 persen, salah satunya melalui ekonomi biru. Indonesia telah meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru, mengembangkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia, hingga menginisiasi Forum Ekonomi Biru ASEAN 2023 di Belitung serta Forum Ekonomi Biru ASEAN 2024 di Bali, pada pertengahan tahun. “Melalui upaya membangun Ekonomi Biru, Indonesia berkomitmen meningkatkan kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB, dari 7,92 persen pada 2022 menjadi 15 persen pada 2045,” papar Menteri Suharso.

Sebagai Co-Chairman Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC), Indonesia akan melaksanakan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships GPEDC di Juli 2024, untuk membahas peningkatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular, salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Pembahasan juga meliputi wirausaha, rantai pasok global, hingga perdagangan dan investasi.

3.1.2.3 Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Megatren global akan mengubah cara kita memandang pembangunan global, mendorong implementasi kebijakan yang mendukung lingkungan, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas wilayah yang lebih berkelanjutan, dan adopsi sistem finansial digital.

Tantangan Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi :

1. Demografi

   Tahun 2030 Jawa Barat akan mengalami Bonus Demografi dan masa keemasan di tahun 2045
2. Persaingan Sumber Daya Alam

   Daya dukung sumber daya alama, lahan hutan, lahan sawah, diperkirakan akan terus menerus
3. Penduduk Kelas Menengah

   Pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah
4. Keuangan Internasional

Dominasi mata iangan dunia bergeser dari Dolar AS menjadi multi currencies

5. Urbanisasi

   Urbanisasi yang semakin massif, arah pembangunan perkotaan perlu diarahkan kearah green development dan transportasi yang berkelanjutan

6. Perubahan Iklim

   Zona Megathrust Pantai Selatan, sehingga perlu Mitigasi Risiko Bencana dan Iklim Berbasis Digital

7. Geopolitik dan Geoekonomi

   Peningkatan peran china, kerentanan di wilayah timur tengah, kawasan indo pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru

8. Perdagangan Internasional

   Tantangan peluang pasar ekspor produk dari Jawa Barat ke Negara-negara potensial

9. Disrupsi Teknologi

   Pemerataan infrastruktur digital yang berkualitas dan transformasi digital berkelanjutan

Tabel 3.10 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat

No.	Indikator Makro	Satuan	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	74,14
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5,67
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	8,01
4	Persentase Penduduk Miskin	persen	7,34
5	Indeks Gini	Poin	0.394
6	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,42
7	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	57,28

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Barat TA.2024

3.1.2.4 Tantangan Ekonomi Kota Depok

Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Depok Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tantangan dan prospek perekonomian Kota Depok tidak dapat lepas dari kondisi perkembangan perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Barat. Dalam perkembangannya Kota Depok masih akan dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai berikut :

1. Kondisi perekonomian kedepan tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi akibat dari Covid-19 yaitu penanganan dampak pada sektor ketenagakerjaan. Sektor yang menyerap tenaga kerja seperti industri, UMKM dan pariwisata yang tidak dapat berusaha menghasilkan efek domino bagi kondisi ketenagakerjaan;
2. Perubahan struktural ekonomi dari kontribusi sektor primer yang semakin mengecil, dan meningkatnya peran sektor tersier dan sekunder, ditambah dengan belum diikuti penyerapan tenaga kerja pada kedua sektor tersebut dalam jumlah yang optimal, serta semakin menipisnya ketersediaan lahan untuk kegiatan sektor primer terdesak oleh meningkatnya kebutuhan untuk hunian maupun industri dan pergudangan;

3. Jumlah sumberdaya manusia yang sesuai dengan perkembangan sektor industri belum optimal, baik sebagai pelaku maupun sebagai pembina;
4. Masih tingginya angka pengangguran;
5. Tingginya angka pertumbuhan penduduk yang lebih banyak disebabkan oleh faktor kelahiran;
6. Ketimpangan pendapatan antar wilayah;
7. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal;
8. Pentingnya iklim (daya tarik) investasi dan regulasi yang lebih mendukung perkembangan UMKM;
9. Masih terbatasnya infrastruktur ekonomi, antara lain jalan, pasar, hotel, dan lainnya;
10. Peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk pembangunan daerah;
11. Produktivitas UKM-K (Usaha Kecil Menengah, Koperasi) yang masih rendah, termasuk pertanian. Selain itu juga perlunya diversifikasi produk serta sarana pemasaran atau tempat usaha UMKM;
12. Belum optimalnya sektor pariwisata dan industri kreatif.
13. Infrastruktur fisik yang belum terintegrasi dan berkelanjutan
    a. Perlunya peningkatan jaringan dan kapasitas jalan serta transportasi publik yang ada
    b. Perlunya integrasi perencanaan kawasan dengan pengembangan transpotasi publik
14. Permukinan dan lingkungan hidup yang belum layak huni
    a. Perlunya peningkatan luas kawasan kumuh ringan akibat kurangnya upaya pencegahan kumuh baru
    b. Perlunya peningkatan akses aman air limbah
    c. Kapasitas TPA Cipayung telah terlampaui, sementara volume timbulan sampah yang dapat dibuang ke TPPAS regional terbatas
    d. Meningkatnya limpasan permukaan akibat meningkatnya lahan terbangun dan perubahan iklim belum diikuti dengan ketersediaan jaringan drainase dan pengendali banjir yang memadai
15. Pentingnta kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan sejahtera
    a. Perlunya penanganan stunting dengan intervensi sepenuhnya ditujukan pada kelompok sasaran prioritas yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, anak bawah dua tahun (baduta), ibu menyusui dan balita
    b. Perlunya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem
    c. Perlunya pembangunan SDM berkelanjutan untuk menangani percepatan pembangunan manusia dan penanganan masalah sosial
16. Reformasi Birokrasi dan Akuntablitas Kinerja (Digital Governance)
    a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan pendukung pelayanan publik
    b. Perlunya peningkatan kemampuan merencanakan, memonitor dan mengevaluasi keterkaitan perencanaan perangkat daerah dengan perencanaan kinerja perangkat daerah melalui penerapan teknologi informasi.

Tabel 3.11. Realisasi dan Target Indikator Makro Kota Depok

No.	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun		
				2024	2024 Perubahan *	2024 Perubahan**
1	Indeks Pembangunan Manusia	poin	82.53	82.43		82,98
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.58	11.68		11.71
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.96	13.96		13.97
4	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.53	75.24		75.79
5	Rata-rata Pengeluaran yang disesuaikan	(Rp/Kapita/tahun)	16.279	16.173		16.543
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.05	6.37	5.8	5.28
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.97	7.51	2.04	2.18
8	Persentase Penduduk Miskin	persen	2.38	2.50	5.50	5.28
9	Indeks Gini	Poin	0,402	0.392	0.343	0.398
10	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	40.817	41.17		41.17

Sumber :
*Shadow Target Kota Depok
**Proyeksi Indikator Makro Kota Depok

Depok merupakan salah satu kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Transformasi ekonomi di Kota Depok melibatkan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti industri kreatif, pendidikan, dan teknologi informasi. Penumbuhan sektorsektor ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti pusat perbelanjaan, pusat bisnis, dan zona industri dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat perekonomian lokal. Terkait dengan pemindahan IKN, perlu dilakukan beberapa respon yang terkait dengan transformasi ekono berupa diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing. Kota Depok perlu mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang dapat berkembang sejalan dengan pemindahan Ibu Kota Negara. Fokus pada sektor-sektor seperti pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif dapat menciptakan peluang ekonomi baru. Kota Depok juga perlu meningkatkan daya saingnya sebagai pusat bisnis dan investasi. Ini melibatkan peningkatan infrastruktur, pelayanan publik yang efisien, dan penciptaan lingkungan bisnis yang kondusif.

Jika dilihat prospek perekonomian daerah Kota Depok tahun 2024 di antara nasional dan Provinsi Jawa Barat maka proyeksi indikator makro masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Target Indikator Makro Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
			Nasional	Prov Jawa Barat RKPD	Kota Depok P RKPD
1.	Indeks Pembangunan Manusia	poin	73.99 -74.02	74,14	82,98
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5.3 – 5.7	5,67	5.28
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5.0 – 5.7	8,01	6.47
4.	Persentase Penduduk Miskin	persen	6.5 – 7.5	7,34	2.18
5.	Indeks Gini	Poin	0.374 – 0.377	0.394	0.398
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen		1,42	41.17
7.	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah		57,28	5.28

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2024, data diolah

3.1.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok mengacu pada RKP 2024. Arah kebijakan Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan trajectory jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

Fokus Kebijakan Makro Tahun 2024 :

a. Percepatan Transformasi Ekonomi Percepatan transformasi ekonomi diarahkan untuk menciptakan ekosistem dalam upaya untuk memperkuat struktur perekonomian yang bernilai tambah tinggi. Upaya percepatan transformasi dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, serta penguatan daya saing usaha.
b. Pembangunan Inklusif Pembangunan inklusif diarahkan untuk menciptakan peningkatan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat serta mampu mengurangi kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah. Upaya pembangunan inklusif dilakukan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
c. Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan perlu memperhatikan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan sumber daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Upaya pembangunan berkelanjutan diarahkan pada pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim dan menjaga daya saing ekonomi.
d. Mewujudkan Stabilitas Ekonomi Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2024, diperlukan stabilitas ekonomi yang mampu menciptakan terjaganya iklim ekonomi yang kondusif serta mengurangi ketidakpastian. Upaya mewujudkan stabilitas ekonomi diarahkan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang aman dan kondusif

Pengembangan wilayah pada tahun 2024 ditujukan untuk percepatan transfomasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Startegi pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk (1) memantapkan pertumbuhan ekonomi Wilayah Jawa bagian utara dan Bali bagian selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk yang berorientasi ekspor; (2) menjaga daya dukung lingkungan hidup serta menerapkan prinsip ekonomi hijau melalui pembangunan rendah karbon; (3) mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah ke arah Jawa bagian selatan dan Bali bagian utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif; (4) meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan ketahanan bencana; serta (5) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui

pemenuhan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

Sasaran nasional dalam pengembangan wilayah Tahun 2024 yaitu Wilayah Jawa-Bali memiliki sasaran utama pengembangan berupa (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah, (2) menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan, serta (3) meningkatnya kesempatan kerja khususnya di perkotaan. RKPD Kota Depok Tahun 2024 | III - 30

a) Peningkatan Produktivitas Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.
b) Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.
c) Pembangunan yang Berkelanjutan Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim

3.1.3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok tahun 2024 juga mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 menjadi arah kebijakan pembangunan di kabupaten dan kota Tahun 2024 yang terdiri dari 6 (Enam) Prioritas Pembangunan Daerah 1) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan serta Pengembangan Pariwisata; 2) Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama; 3) Penguatan Sistem Kesehatan Daerah. 4) Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana; 5) Pengembangan Infrastruktur

Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa; dan 6) Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Secara umum, arah kebijakan pembangunan kabupaten dan kota tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

a. Aspek Sosial

1) Peningkatan akses dan mutu pendidikan formal, informal, serta pendidikan inklusi; 2) Transformasi layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital; 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah; 4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar; 5) Peningkatan minat baca masyarakat; 6) Optimalisasi pendidikan vokasi yang mendukung pengembangan wilayah; 7) Transformasi layanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital; 8) Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan; 9) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja; 10) Peningkatan Pelayanan Penyakit Menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif; 11) Percepatan Penurunan Stunting Dalam Mencapai Jabar Zero New Stunting; 12) Pemenuhan tenaga kesehatan/SDMK; 13) Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif; 14) Penguatan Pembiayaan Kesehatan; 15) Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi; 16) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Berolahraga; 17) Pemberdayaan perempuan serta perlindungan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak; 18) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan; 19) Peningkatan potensi mitigasi dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana; 20) Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat; 21) Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi; 22) Perlindungan jaminan layanan sosial bagi masyarakat keluarga ekonomi tidak mampu; 23) Pembangunan pusat pelayanan publik dalam meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat; 24) Percepatan penurunan stunting; 25) Optimasi potensi olah raga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup; dan 26) Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda; 27) Pengendalian pertumbuhan penduduk; 28) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup; 29) Memberdayakan masyarakat miskin dan mencegah terjadinya kemiskinan baru 30) Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan memperkuat rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial; 31) Reformasi Perlindungan Jaminan kesejahteraan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; RKPD Kota Depok Tahun 2024 32) Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi; 33) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi; dan 34) Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah

b. **Aspek Ekonomi**

1) Pembentukan dan pengembangan kawasan/sentra/klaster produksi sektor pertanian, kehutanan,

perikanan dan kelautan; 2) Pengelolaan konservasi kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan secara terpadu; 3) Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; 4) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM pertanian; 5) Meningkatkan cakupan dan pelayanan infrastruktur irigasi, khususnya pada lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura 6) Memperbaiki Tata Kelola Pangan dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan; 7) Meningkatkan ketersediaan pangan melalui penguatan produksi kebutuhan pangan mandiri, khususnya bahan pokok penting; 8) Meningkatkan akses pangan melalui penyediaan infrastruktur wilayah serta penyederhanaan sistem logistik dan distribusi; 9) Pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah dan; 10) Membangun sistem satu data pangan yang terintegrasi. 11) Pengembangan industri manufaktur dan sektor jasa; 12) Peningkatan substitusi bahan baku impor; 13) Penerapan link and match industri kecil-industri besar; 14) Penerapan industri hijau dan ekonomi sirkular mengembangkan sarana prasarana industri melalui sistem informasi dan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung kolaborasi antara industri besar dan IKM. 15) Optimalisasi perdagangan dalam dan luar negeri serta perbaikan sarana prasarana; 16) Percepatan digitalisasi ekonomi sektor perdagangan peningkatan inovasi dan perbaikan iklim investasi dalam pencapaian target penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. 17) Peningkatan kompetensi kewirausahaan pada KUMKM di Jawa Barat; 18) Perwujudan ekosistem lembaga keuangan yang ramah dan mendukung terhadap pengembangan KUMKM di Jawa Barat; 19) Percepatan transformasi dan digitalisasi pada KUMKM; 20) Pembentukan wirausaha baru. 21) Pengembangan dan pengelolaan daya Tarik wisata, atraksi wisata dan amenitas wisata RKPD Kota Depok Tahun 2024 terintegrasi berskala Nasional dan Internasional; 22) Pembangunan aksesibilitas pariwisata; 23) Pengembangan promosi pariwisata. 24) Penguatan kelembagaan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; 25) Pengembangan kemitraan industri pariwisata dan ekonomi kreatif; 26) Penciptaan daya saing produk industri pariwisata dan ekonomi kreatif. 27) Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasional yang bersertifikasi sesuai dengan kebutuhan kerja; 28) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja; 29) Peningkatan kapasitas harmonisasi hubungan industrial. 30) Perluasan akses terhadap pasar kerja melalui job fair/job expo dan sistem informasi ketenagakerjaan; dan 31) Pengembangan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dunia Industri dan UMKM dalam rangka penempatan tenaga kerja.

c. **Aspek Infrastuktur**

Arah kebijakan aspek infrastruktur disusun dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah poin (5) yaitu “Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa”. Dengan demikian, kebijakan kabupaten/kota diarahkan pada penyediaan dan peningkatan kualitas infrastuktur untuk mendukung peningkatan konektivitas wilayah (antarwilayah dalam kabupaten/kota dan lintas kabupaten/kota), mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup, serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan perdesaan melalui: 1) Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan terutama di kawasan utara dan selatan Jawa Barat yang dilengkapi fasilitas perlengkapan jalan yang memadai; 2) Peningkatan infrastruktur pengelolaan

persampahan yang berorientasi penanganan di hulu melalui pengembangan TPS3R dan TPST; 3) Peningkatan prasarana pengelolaan air limbah di kawasan permukiman dan kawasan industri; 4) Peningkatan infrastruktur pengendalian banjir baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan melalui pembangunan embung/kolam retensi dan optimalisasi jaringan drainase; 5) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan; 6) Peningkatan infrastruktur jaringan irigasi untuk pertanian melalui pembangunan embung/situ dan pengelolaan DAS; 7) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) 8) Prioritas yaitu DAS Citarum, Cilamaya dan Kali Bekasi; 9) Peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah; 10) Pengembangan Sistem Angkutan Massal Perkotaan Berbasis Jalan dan/atau Rel yang ramah lingkungan serta didukung pemanfaatan teknologi informasi; RKPD Kota Depok Tahun 2024 | III - 34 11) Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah; 12) Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup; 13) Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 14) Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis; dan 15) Pengembangan potensi konservasi energi baru dan terbarukan. Selain arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan 3 (tiga) aspek di atas, juga terdapat beberapa arah kebijakan yang bersifat khusus, diantaranya: 1) Kemiskinan Ekstrim 2) Petani Milenia 3) Renaksi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 4) Penanganan Penurunan Stunting 5) Peningkatan APM SMA/SMK/Sederajat 6) Peningkatan APM SMA/SMK/Sederajat 7) Produktivitas Tani dan Ketahanan Pangan 8) Peningkatan Sarana Prasarana dan Kemandirian Pesantren 9) Pengelolaan Air, Sanitasi, Sampah, dan Limbah 10) Pengelolaan dan Peningkatan Daya Tarik Wisata 11) Peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur Desa 12) Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan

3.1.3.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kota Depok

Arah kebijakan perekonomian Kota Depok tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Selaras dengan kebijakan itu, pada tahun 2024 RKPD Kota Depok mengangkat tema Memantapkan Kehidupan Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera melalui Peningkatan Pelayanan Dasar. Dengan memperhatikan misi RPJMD Kota Depok, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Depok adalah:

1. Pemenuhan Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
2. Program tematik pembangunan
3. Mengembangkan ekonomi kreatif bidang media arts yang menjadi lokomotif pengembangan sub sektor ekonomi kreatif lainnya melalui Jaringan Kota Kreatif UNESCO (The UNESCO Creative Cities Network (UCCN))
4. Mendorong perusahaan/industri untuk melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor
    a. Penyelesaian mismatch antara angkatan kerja dan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, kerjasama kemitraan dalam kurikulum pendidikan yang berorientasi pasar kerja, penempatan kerja melalui forum fasilitasi, dan pemagangan;

b. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, standarisasi dan sertifikasi kompetensi melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi atau sekolah kejuruan, serta perluasan pendayagunaan tenaga kerja lokal;
c. Peningkatan sarana dan prasarana, perluasan promosi serta akses pemasaran produk UMKM guna peningkatan daya serap tenaga kerja;
d. Percepatan digitalisasi UMKM berbasis ekosistem melalui kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder;
e. Mendorong perusahaan/industri untuk melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor.

5. Penguatan daya saing daerah melalui ekonomi kreatif, urban farming dan pariwisata
   a. Mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming) yang berorientasi ekologi dan ekonomi berbasis teknologi melalui kolaborasi komunitas sesuai potensi wilayah untuk peningkatan nilai ekonomi maupun potensi agrowisata;
   b. Mengembangkan pertanian perkotaan (urban farming) yang berorientasi ekologi dan ekonomi berbasis teknologi melalui kolaborasi komunitas sesuai potensi wilayah untuk peningkatan nilai ekonomi maupun potensi agrowisata;
   c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan peran serta pelaku ekonomi kreatif dan pengembangan kawasan wisata terpadu perkotaan (urban tourism) yang mengintegrasikan permukiman dan destinasi wisata;
   d. Pengembangan pasar dalam dan luar negeri dengan memantapkan festival ekonomi kreatif;
6. Menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya industri non polutan;
7. Mengoptimalkan penerimaan PAD dan sumber pendanaan lain, serta kerjasama pembangunan melalui pendanaan dari APBN, APBD Provinsi, CSR, Forum Kemitraan dan pemanfaatan aset daerah, serta pembangunan BUMD Kota Depok

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan yaitu: 1) Ruang fiskal APBD masih terbatas, terbatasnya kemampuan daerah didalam menghasilkan pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak sebanding dengan belanja pemerintah, kondisi ini diperparah dengan masih berlanjutnya pandemi covid-19 yang berdampak pada semakin menurunnya pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat semakin rendah dan pada akhirnya akan menurunkan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak; 2) APBD semakin terbebani *Mandatory Spending* yang semakin membesar, sebagai konsekuensi ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti keharusan anggaran belanja pendidikan 20 persen dari APBD, belanja Kesehatan sebesar 10 persen dan dana kelurahan 5 persen; 3) Efisiensi dan efektifitas belanja terkait dengan kinerja pemerintahan masih ditemukan belanja daerah yang tidak mempunyai dampak peningkatan kesejahteraan maupun peningkatan kualitas

layanan publik.

Menjawab permasalahan tersebut maka Kebijakan keuangan Kota Depok Tahun 2023 diprioritaskan untuk mendorong reformasi struktural sehingga dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi pada jalurnya. Agar kebijakan tersebut dapat dicapai, maka Keuangan daerah diarahkan untuk: 1) Dapat menopang proses pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yakni pertumbuhan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-environment*. sebagai tindaklanjut pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat yang mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19: 2) Keuangan daerah diharapkan dapat menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat; 3) Keuangan daerah dapat meninimalkan risiko fiskal sehingga kesinambungan anggaran daerah dapat terjamin.

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan yang tercermin dalam struktur APBD. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, serta Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menyesuaikan nilai retribusi daerah. Berkaitan dengan pengelolaan asset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya.

Penentuan target pendapatan daerah telah menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan tersebut telah mengamanatkan terdapat 7 (tujuh) obyek pendapatan yang tidak boleh dipungut retribusinya yaitu : 1) Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat, 2) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, 3) Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, 4) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, 5) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, 6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, 7) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal. Semnetara itu terdapat dua obyek pendapatan yang berdasarkan perhitungan yang diamanatkan undang-undang tersebut akan mengalami penurunan yaitu : 1) Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan 2) Pajak Parkir yang diperkirakan akan mengalami penurunan menjadi hanya sepertiga dari tahun sebelumnya. .Maka diperkirakan pada tahun 2024 kenaikan pendapatan dari obyek pendapatan lainnya sebagain dipergunakan untuk menutup pengurangan obyek pendapatan diatas dan hanya sebagaian kecil dapat mendongkrak pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal Pemerintah Daerah dan proses penganggaran. Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif. Anggaran yang disusun dialokasikan lebih banyak ke program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah Daerah yaitu pada program dan kegiatan infrastruktur yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastuktur yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan kebijakan belanja diatas, maka pada prinsipnya pengelolaan Belanja Daerah mengikuti prinsip *money follow programs*. Kegiatan yang mendapat alokasi anggaran adalah kegiatan yang menghasilkan *outcome* sesuai tujuan dari visi dan misi kepala daerah. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas, dengan demikian belanja APBD diarahkan salah satunya untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan fokus tematik RKPD Tahun 2023 mengenai "Memantapkan Kehidupan Kota Depok Yang Maju Berbudaya Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar". Hal ini diharapkan mampu menjaga perekonomian tetap stabil dan mampu bertahan dari berbagai krisis yang terjadi.

Selain itu Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan penggunaan dana kelurahan untuk mendorong pemulihan ekonomi masyarakat tingkat kelurahan. Agar tujuan tersebut dapat dicapai maka kegiatan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas di kelurahan adalah pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu menggunakan sumberdaya sendiri dalam pengembangan usaha mikro, mendapatkan pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan peningkatan aktivitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

Kebijakan belanja daerah lainnya adalah untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan belanja tidak terduga (BTT) untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam maupun non alam (Covid-19) serta pemulihan dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mendanai kegiatan prioritas yang bersumber dari pinjaman daerah. Selain itu juga difokuskan pada belanja untuk mendukung pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) , pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi Jawa barat.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutup defisit anggaran dengan menentukan target pembiayaan yang rasional. Penentuan target pembiayaan memperhatikan realisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah juga diarahkan untuk mengalokasikan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah, penyertaan modal kepada PDAM Tirta Asasta. Arah dan Kebijakan keuangan daerah diuraikan secara rinci dibawah ini mencakup Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun yang termasuk sumber pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaa Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
b. **Pendapatan Transfer**, terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari : dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Transfer antar daerah terdiri dari: pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.
c. **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**, terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan.

Komponen pendapatan daerah yang utama adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini sebagai pertanda untuk segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (limitative).

Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah tidak sebanding dengan peningkatan belanja daerah yang ditandai dengan masih adanya defisit anggaran. Artinya kebutuhan belanja untuk mendanai pembangunan di Kota Depok masih jauh lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan asli daerah. Pada sisi lainnya pendapatan bersumber dari pendapatan transfer menunjukkan kecenderungan menurun.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, meningkatkan penerimaan piutang pajak, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, Pemerintah Daerah akan terus mengoptimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada satu sisi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pada sisi lainnya

Penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pendapatan serta memperhitungkan realisasi semester pertama serta ekspektasi laju pertumbuhan ekonomi pada semester kedua. Berdasarkan tabel Indikator Makro sebagaimana disebutkan pada Bab III, laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok tahun 2024 mengalami perlambatan dibandingkan dengan target awal pada APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga Pendapatan Asli Daerah sebagaian besar sesuai dengan proyeksi sebelumnya, dengan beberapa penyesuaian pada jenis pendapatan Pajak, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Sah dan Lain-lain PAD yang sah. Penyesuaian Pajak Daerah terjadi pada obyek Pajak Jasa Makanan dan/atau Minuman, Pajak Jasa Parkir, Pajak Tenaga Listrik, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penyesuaian Retribusi daerah dilakukan pada retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penyewaan bangunan serta retribusi pada BLUD Puskesmas, RSUD KISA, dan RSUD ASA. Penyesuaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Sah terjadi pada deviden perseroan daerah. Secara keseluruhan penyesuaian tersebut menaikan target pendapatan asli daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2024 :

Pendapatan transfer secara umum diproyeksikan mengalami kenaikan. Obyek pendapatan tansfer dari Pemerintah Pusat yang mengalami kenaikan bersumber dari obyek pendapatan Dana Alokasi Khusus, sedangkan untuk obyek pendapatan dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak mengalami perubahan. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan untuk alokasi bantuan keuangan. Secara rinci kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan transfer termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana BOSP dan Dana Bagi Hasil dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan alokasi dan kebijakan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 4. Menyesuaikan perubahan target Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah serta hasil evaluasi semester pertama APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2024.

Tabel. 3.13. Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4,1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**1.682.920.944.312**	**1.762.303.928.855**	**1.842.719.828.045**
4.1.01	Pajak Daerah	1.447.945.518.565	1.477.582.180.716	1.527.582.684.411
4.1.02	Retribusi Daerah	38.327.943.307	246.921.597.724	261.564.697.453
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.016.816.722	19.016.816.722	19.016.816.722
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	197.647.482.440	18.783.333.693	34.555.629.459

KODE	URAIAN	RKPD 2024	APBD Tahun 2024	Perubahan RKPD Tahun 2024
4,2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.707.152.002.905**	**2.088.630.954.380**	**2.417.344.040.930**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.121.414.425.943	1.454.613.867.800	1.716.328.380.025
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	585.737.576.962	634.017.086.580	701.015.660.905
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	0	0	0
	Jumlah Pendapatan	**3.391.072.947.217**	**1.762.303.928.855**	**4.260.063.868.975**

Sumber : BKD Tahun 2024, diolah

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah pada Tahun 2024 antara lain :

a. Peningkatan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, termasuk retribusi IMB;
b. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
c. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan;
d. Peningkatan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah antara lain melalui peningkatan kualitas loket pembayaran, pendaftaran dan pembayaran secara online/ ATM/ *internet banking*, *market place* pemasangan spanduk/ baliho/ billboard dan sosialisasi pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (pajak kendaraan bermotor dan pajak air tanah) dan Perangkat Daerah penghasil;
f. Penyempurnaan *database* obyek Pajak PBB termasuk penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penyesuaian harga komponen bahan bangunan;
g. Pengembangan sistem PBB/BPHTB dan SIMPAD;
h. Peningkatan ketaatan Wajib Pajak (WP) melalui kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi berbagai peraturan perpajakan;
i. Peningkatan kesadaran dan motivasi wajib pajak melalui pemberian penghargaan dan hadiah bagi wajib pajak daerah.
j. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh Pasal 25 dan 29, PPh Pasal 21) sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
k. Kewajiban untuk mendaftarkan NPWP Cabang/lokasi bagi penyedia barang/jasa yang mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.
l. Pertukaran data dengan BPN dan KPP Pratama untuk kepentingan perpajakan.
m. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam perhitungan alokasi Dana Transfer.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri dari: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Sedangkan urusan pilihan terdiri dari: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta fungsi penunjang pemerintahan atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tiap-tiap urusan tersebut, terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan oleh RPJMD dengan fokus pada isu yang berkembang serta dengan memperhatikan prioritas program Pemerintah dan Provinsi Jawa Barat.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023, sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan anggaran harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan sub kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Dengan demikian pemerintah Kota Depok dalam menyusun belanja daerah berdasarkan pada pendekatan kinerja (*performance budgeting*), yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja menggunakan prinsip disiplin anggaran, kemandirian anggaran yaitu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 diatas belanja daerah diklasifikasikan menjadi: belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja Operasi terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal dirinci atas jenis belanja modal

sesuai dengan kode rekening berkenaan. Belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Belanja transfer dirinci atas jenis belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Permasalahan yang selalu terjadi dalam menentukan kebijakan belanja adalah kebutuhan belanja yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah Kota Depok perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kota Depok mengambil kebijakan untuk melakukan penambahan kegiatan secara terbatas yaitu:

1. Mengalokasikan kekurangan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok 33 dan fungsi Perangkat Daerah seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;
3. Mengalokasikan dana Bagi Hasil Sawit untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi;
4. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk tiga bidang yaitu: a) Bidang kesejahteraan masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk mendanai Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi; sebagian alokasi anggaran pada bidang ini dialihkan untuk kebutuhan sesuai prioritas daerah yaitu untuk Bantuan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja non Penerima upah yaitu pekerja P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim); b) Bidang kesehatan; dan c) Bidang penegakan hukum untuk program Sosial Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
5. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
6. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah

Mempedomani hasil evaluasi belanja pada semester pertama tahun 2024, maka pada perubahan anggaran tahun 2024 akan dilakukan penyesuaian belanja menjadi sebesar Rp 4.428.296.412.231,32 atau

bertambah sebesar Rp 269.710.131.105,32 dari anggaran pada APBD murni Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp 4.158.586.281.126,00. Penambahan tersebut terjadi pada tahapan pergeseran anggaran untuk alokasi dana transfer DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 151.829.822.550,00 dan penambahan anggaran pada rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Alokasi penambahan belanja pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah untuk penambahan Belanja BLUD, pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan publik, pembayaran pekerjaan tahun 2023, penyesuaian belanja pegawai untuk Tunjangan hari raya dan gaji ke tiga belas, pemanfaatan SiLPA DBHCHT dan DBH Sawit serta penambahan belanja rutin dan mengikat. Pada tabel dibawah ini diperlihatkan penambahan anggaran pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Tabel. 3.14. Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2023	APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2023
5	**BELANJA DAERAH**	**3.843.271.059.687**	**4.158.586.281.126,00**	**4.428.296.412.231,32**
5,1	**BELANJA OPERASI**	**3.029.800.705.923,00**	**3.188.806.393.051,00**	**3.362.533.429.769,66**
	Belanja Pegawai	1.249.779.134.414	1.393.019.448.136,00	1.282.944.400.571,66
	Belanja Barang dan Jasa	1.536.612.504.050	1.571.838.449.416,00	1.719.904.768.699,00
	Barang Subsidi		1.800.000.000,00	100.000.000,00
	Barang HIbah	165.594.667.459	145.832.295.499,00	285.472.460.499,00
	Barang Bantuan Sosial	77.814.400.000	76.316.200.000,00	74.111.800.000,00
5,2	**BELANJA MODAL**	**763.470.353.764,00**	**924.423.137.312,00**	**1.029.077.603.711,66**
	Belanja Modal Tanah	39.880.847.785	95.426.433.414.00	127.475.073.414,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.906.943.538	147.352.505.404,00	195.858.807.011,66
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.582.536.069	250.721.600.939,00	262.428.996.886,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigas	359.394.683.637	394.295.699.255,00	406.721.369.100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.511.342.735	36.626.898.300,00	36.593.357.300,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	194.000.000	0	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**50.000.000.000,00**	**45.356.750.763,00**	**36.685.378.750,00**
	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000.00	45.356.750.763,00	36.685.378.750,00
	Total Belanja	**3.843.271.059.687**	**4.158.586.281.126,00**	**4.428.296.412.231,32**

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang bertujuan untuk menutupi defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran, yang dirinci menurut sumber pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Aset Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan terdiri atas: Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Penyusunan rencana SiLPA tidak didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya tetapi mengacu pada perkiraan efisiensi belanja, *over target* pendapatan dan alokasi dana *earmark* yang belum dibelanjakan, sedangkan realisasi SiLPA sudah menghitung efisiensi belanja, *over target* pendapatan dan alokasi dana *earmark* ditambah dengan SiLPA dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, kegiatan yang gagal lelang serta kegiatan yang mengalami *cut off* sehingga nilai realisasi SiLPA selalu lebih tinggi dari rencana SiLPA. Penerimaan SiLPA (pembiayaan) ini menjadi sesuatu yang diperlukan karena dapat dipergunakan sebagai penutup defisit anggaran, namun disisi lain juga menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila melihat sumber dari penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA).

Ditinjau lebih lanjut, sumber SiLPA ini dapat berasal dari *over target* pendapatan daerah, efisiensi penggunaan anggaran serta kegiatan lanjutan yang harus/perlu dianggarkan kembali sebagai akibat belum selesainya atau tidak dapat dilaksanakannya suatu program/kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya dikarenakan sesuatu hal. Perlu menjadi perhatian khusus apabila SiLPA ini berasal dari program/kegiatan yang belum/tidak dapat dilaksanakan meskipun SiLPA yang berasal dari *over target* pendapatan dan dari penghematan anggaran juga perlu mendapatkan perhatian karena mengindikasikan penyusunan dan perencanaan dan penganggaran yang kurang tepat dan akurat. Pada Tahun 2023 penyertaan modal kepada PDAM Tirta Asasta.

Tabel. 3.15. Pembiayaan Daerah pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024

KODE	URAIAN	RKPD 2023	APBD Tahun 2023	Perubahan RKPD Tahun 2024
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6,1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**502.571.195.282**	**422.003.092.987,00**	**282.584.238.352,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	502.571.195.282	422.003.092.987,00	282.584.238.352,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**69.850.505.084**	**114.351.695.096,00**	**114.351.695.096,00**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	69.850.505.084	114.351.695.096,00	114.351.695.096,00
	Pembiayaan Netto	**432.720.690.198**	**307.651.397.891,00**	**168.232.543.256,32**

Sumber : BKD Tahun 2024, diolah

Kebijakan lainnya adalah yang berkaitan dengan pembiayaan daerah. Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2023 pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 422.003.092.987,00 yang terdiri dari rencana SiLPA pada kas daerah sebesar Rp 383.986.573.083,00 dan rencana SiLPA diluar kas daerah sebesar Rp 38.016.519.904,00. Berdasarkan data rekening kas dari Bank BJB per tanggal 31 Desember 2023 bahwa saldo pada kas daerah sebesar Rp 220.633.478.737,00; dan saldo pada kas bendahara berdasarkan hasil audit BPK sebesar Rp 8.345.899.368,10; sehingga terjadi defisit penganggaran SiLPA sebesar Rp 155.007.194.977,90. Defisit tersebut akan ditutupi pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui pengurangan belanja yang tidak prioritas dan penyesuaian pendapatan daerah. Sementara itu jumlah

realisasi SiLPA Tahun 2023 di luar kas daerah sebesar Rp 53.341.740.225,00, sehingga terjadi surplus sebesar Rp 15.325.220.321,00; yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan BLUD dan untuk dana BOS digunakan untuk kebutuhan operasional satuan pendidikan.

Secara umum, kebijakan Pembiayaan Daerah pada tahun anggaran 2024 diarahkan Dalam berdasarkan data rekening kas dari Bank BJB per tanggal 31 Desember 2023 bahwa terjadi defisit penganggaran SiLPA antara rencana SiLPA pada kas daerah yang tercatat pada APBD dengan saldo real pada kas daerah, dimanfaatkan untuk penambahan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, serta penyertaan modal/investasi pemerintah daerah. Defisit akan ditutupi pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui pengurangan belanja yang tidak prioritas dan penyesuaian pendapatan daerah. Sementara itu jumlah realisasi SiLPA di luar kas daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2023 akan dimanfaatkan untuk kegiatan BLUD di Puskesmas dan RSUD Kota Depok serta untuk kebutuhan dana BOS

3.2.4. Kinerja Keuangan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber– sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya dalam merencanakan pembangunan di Kota Depok. Anggaran Pembangunan Kota Depok selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa DAK, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil; pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Barat berupa Dana Bagi Hasil Daerah dan Bantuan Keuangan.

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu kolaborasi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Depok adalah dalam pengelolaan persampahan yang akan dilaksanakan secara terintegrasi melalui metode RDF (Refuse Derived Fuel) yang akan dikerjasamakan antara Pemerintah dan Pemerintah Kota Depok. Kolaborasi lainnya adalah kerjasama transportasi angkutan masal antara Kementerian Pehubungan dengan Pemerintah Kota Depok yang telah berjalan mulai bulan Juli tahun ini.

Beberapa catatan penting mengenai pembangunan daerah adalah realisasi kinerja fisik dan keuangan dari program/kegiatan yang telah dibuat. Apabila realisasi kinerja tidak berjalan sesuai dengan harapan maka dapat 41 dipastikan bahwa masyarakat tidak dapat segera menikmati hasil-hasil pembangunan seperti infrastruktur jalan dan jembatan, sekolah, puskesmas dan lain-lain.

Beberapa pemasalahan yang masih dihadapi diantaranya adalah:

a. Belum optimalnya perencanaan kegiatan sehingga pada tahun pelaksanaan masih banyak perangkat daerah yang mengajukan pergeseran anggaran, dampaknya adalah pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat;

b. Belum optimalnya perencanaan anggaran kas pada setiap perangkat daerah, penyusunan anggaran kas tidak memperhitungkan waktu pelaksanaan anggaran, akibatnya anggaran kas yang disusun tidak dipedomani dalam pelaksanaan anggaran sehingga pengajuan pencairan menumpuk pada akhir tahun;
c. Belum optimalnya perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan karena menunggu dokumen perencanaan yang sedang disusun atau menunggu pembebasan lahan, sehingga terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadi cut off di akhir tahun;
d. Terkendala dalam persiapan dan proses pengadaan barang dan jasa dengan jumlah petugas terbatas tidak sebanding dengan jumlah paket yang akan diproses melalui UPBJ;
e. Belum optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan;
f. Kendala teknis dilapangan (masalah sosial seperti penolakan dari masyarakat, kendala lahan, permasalahan hukum, hambatan cuaca);
g. Kendala kebijakan alokasi anggaran dari Pusat dan Provinsi yang terlambat (Petunjuk Teknis terlambat ditetapkan oleh kementerian/lembaga/provinsi);

Untuk menyikapi berbagai permasalahan tersebut, beberapa solusi yang dapat ditempuh Pemerintah Kota Depok diantaranya adalah:

a. Menyusun perencanaan secara tepat sasaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Setiap tahapan dilakukan melalui proses verifikasi rincian belanja, sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan dalam menyusun perencanaan;
b. Penyusunan anggaran Kas disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan; sebagai pengendaliannya adalah anggaran kas yang telah diajukan tetapi tidak dilaksanakan/ tidak diserap akan ditangguhkan, perangkat daerah yang membutuhkan anggaran dapat mengajukan kembali kembali usulan kebutuhan angaran kas;
c. Penjadwalan kegiatan secara seksama dan pengendalian yang ketat terhadap pelaksanaan rencana kegiatan, melalui optimalisasi tugas pengendalian oleh pimpinan OPD dan sistem evaluasi pembangunan daerah (e-controlling);
d. Belanja yang diperkirakan tidak akan diserap karena alasan tertentu seperti gagal lelang yang tidak memungkinkan dilaksanakan sampai akhir tahun, atau DED/kajian belum siap atau adanya permasalahan lain maka akan dihapus dan diganti dengan belanja prioritas;
e. Peningkatan Optimalisasi LPSE dan Bagian Layanan Pengadaan dan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog dan toko daring; peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan;
f. Peningkatan monitoring dan evaluasi setiap trwiulan serta pemberian reward and punishment terkait dengan capaian kinerja kegiatan;
g. Peningkatan peran aktif pihak ketiga dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
h. Mewajibkan pelaksanaan swakelola, khususnya untuk dana kelurahan

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan dan terbatasnya sumber–sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kota Depok untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya dalam membangun Kota Depok. Anggaran Pembangunan Kota Depok selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh perangkat daerah.

Selain APBN pendanaan pembangunan non APBD lainnya adalah seperti Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL dan PKBL dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kota Depok, serta pembiayaan lain yang bekerjasama dengan lembaga non pemerintah seperti lembaga zakat. Pembiayaan non APBD akan di tuangkan dalam dokumen RKPD Non APBD atau RKPD Kemitraan yang menjadi bagian dalam dokumen rencana pembangunan Daerah.

Sumber pendanaan lainnya adalah Kolaborasi APBD Kota dengan APBD Provinsi Jawa Barat dan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan sejalan dan sinergis antara pemerintah kota dengan provinsi, sehingga dapat bekerjasama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

Sumber pendanaan lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dan memerlukan kajian adalah berupa pinjaman kepada lembaga keuangan yang menjadi mitra Kementerian Keuangan. Pembiayaan ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk membiayai proyek strategis yang memerlukan biaya besar.

Tabel 3.16 Realisasi TJSL Kota Depok Tahun 2024

No	Program	Partisipasi	Perusahaan
1.	Pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing	Oke Sobat - Olah kembali sampah organik menjadi magot bersama BRBIH Kota Depok	Savero
		Program Pemagangan bekerja sama dengan BLK Disnaker Kota Depok. Savero memberikan pelatihan bidang tata boga / kitchen	Savero
		De'lia Keren - Depok Lindungi Pekerja Rentan (BPJS Rentan) sebanyak 40 warga sekitar, efektif awal Februari 2023 sampai sekarang	Savero
2.	Pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan	Memajukan UMK Kota Depok, dengan menyediakan space kios UMK di lobby Hotel Savero Depok	Savero

No	Program	Partisipasi	Perusahaan
3.	Pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga	Membangun fasilitas sarana Posyandu RT01/08 Kel Kedaung Sawangan	PT Mido Indonesia
		Pemberantasan ODF dengan pembuatan septic tank untuk 40 KK	PT Energizer Indonesia
		Sumur Bersih untuk Warga	PT Enzym Bioteknologi Internusa
		Membantu kegiatan Korvei warga dengan partisipasi dana untuk pembelian bahan bangunan	PT Enzym Bioteknologi Internusa
5.	Pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara	Program membagikan sajadah & peralatan kebersihan bagi Marbot ke masjid sekitar Kota Depok	Savero
		Pemberian Parsel setiap lebaran	PT Enzym Bioteknologi Internusa
		Berqurban dengan kambing	PT Enzym Bioteknologi Internusa
		Berpartisipasi dalam kegiatan HUT RI dilingkungan	PT Enzym Bioteknologi Internusa
6.	Penanggulangan bencana		
7.	Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial		

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

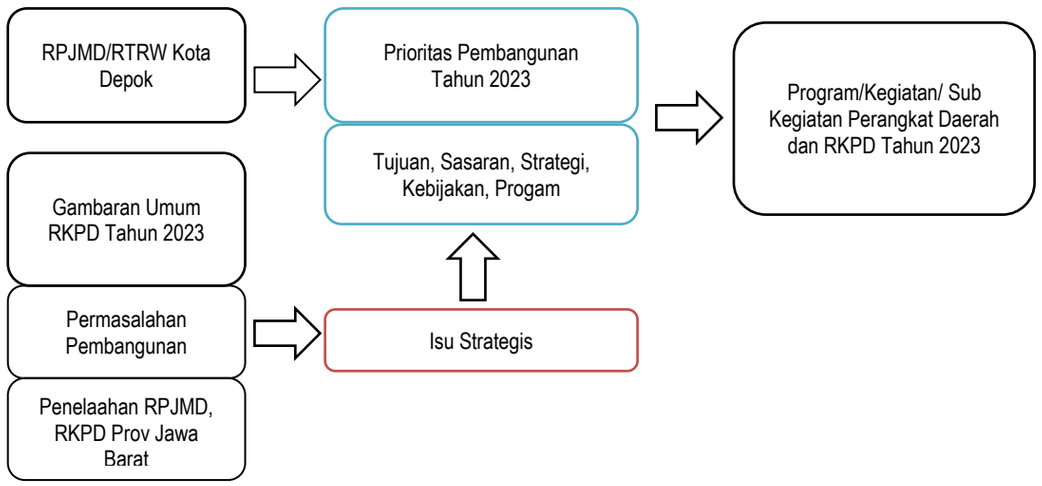
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan daerah Kota Depok pada tahun 2023 menggunakan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pembahasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan, selain berfokus pada RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, juga mencakup penelaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maupun pembangunan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah, perencanaan pembangunan Kota Depok dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif *stakeholder* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, antar lain melalui APBD Kota Depok, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN, CSR dan pembiayaan lain sesuai ketentuan perundangan, memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas berbasis program dan mejaga kesinambungan antar dokumen perencanaan melalui 10 (sepuluh) prioritas pembangunan tahun 2024.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Depok tahun 2024 mengacu dan memperhatikan : (1) Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 ; (2) Hasil Evaluasi Kinerja TW II RKPD Tahun 2023; (3) Agenda Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024; (4) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional ; (5) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan Pembangunan Tahun 2024; dan (6) RTRW Kota Depok Tahun 2022-2042. Pembangunan daerah Pemerintah Kota Depok Tahun 2024 untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Kota Depok sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2024-2046. Selain pengembangan program, juga dilakukan upaya-upaya transformasi pembangunan dengan memperhatikan upaya-upaya pemulihan dan pemantapan ekonomi Kota Depok setelah masa pandemi COVID-19 melalui program-program pembiayaan dana kelurahan, penciptaan pengusaha/*startup* baru dan perempuan pengusaha, pemberian insentif kepada guru honorer dan swasta, pembangunan alun-alun dan taman hutan kota, pemberian insentif kepada pembimbing rohani, pemberian insentif kepada RT/RW dan LPM, pembangunan pusat olahraga dan UMKM secara terpadu, penyediaan Wi-fi Gratis bagi masyarakat, pembangunan sekolah atau madrasah negeri, dan pemberian insentif kepada kader posyandu/posbindu serta pembangunan posyandu/posbindu, pengembangan wilayah utuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan, penyelesaian isu-isu komprehensif seperti kemiskinan, stunting dan iklim investasi. Upaya

penerapan arah kebijakan dilakukan melalui program dan kegiatan perangkat daerah, yang diharapkan dapat memberi kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.1 Kerangka Pikir RKPD Kota Depok Tahun 2024



Sumber: Hasil Analisa Bappeda, Tahun 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh, serta berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rencana pembangunan nasional tahun keempat dilaksanakan melalui 4 pilar, sebagai berikut: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Major Project.

Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah terintegrasi dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut:

1. Agenda Pembangunan ke-1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Tercapainya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkeadilan.Peningkatan dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kuat dan berkelanjutan dan untuk

menyejahterakan secara adil dan merata (inklusif). Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

2. Agenda Pembangunan ke-2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kuat dan pemenuhan pelayanan dasar yang merata dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Distribusi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
   e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Agenda Pembangunan ke-3 : Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
   Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif untuk menjadikan sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju
   d. cakupan kesehatan semesta;
   e. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   f. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   g. Pengentasan kemiskinan; dan
   h. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Agenda Pembangunan ke-4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
   Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam kerangka pembangunan nasional untuk mewujudkan bangsa yang maju, modern, unggul, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui:
   a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;

b. Memajukan kebudayaan;
c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Agenda Pembangunan ke-5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

   Penguatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional dengan peningkatan investasi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur berdasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan;
   c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Agenda Pembangunan ke-6 : Membangun Lingkungan Hidup,

   Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana,pada wilayah-wilayah yang rentan dalam menghadapi perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
   c. Pembangunan rendah karbon.

7. Agenda Pembangunan ke-7 : Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

   Negara wajib hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta memberikan hak-hak asasi manusia dengan pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi, dan tata kelola keamanan siber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut ditranslasikan menjadi tujuh prioritas nasional dalam RKP Tahun 2024.

4.1.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai Tahun 2025.

Misi Satu : Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang berbudaya ilmu dan teknologi, produktif dan berdaya saing

Misi Dua : Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan berbasis potensi daerah

Misi Tiga : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari;

Misi Empat : Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik;

Misi Lima : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan;

Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026. Penyusunan tema pembangunan RPD Tahun 2024-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran RPD, prioritas pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan, isu strategis, dan kebijakan nasional terkini. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 " Peningkatan perekonomian dengan mengoptimalkan SDM dan infrastruktur yang berdaya saing " untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia,

dengan sasaran :

a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat
d. Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta Pembangunan Pemuda
e. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk

Tujuan 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah

dengan sasaran :

a. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
b. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
c. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha serta Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja;
d. Meningkatnya Kinerja Pariwisata Berkelas Dunia dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

dengan sasaran:

a. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan;
b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
c. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah

Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang Didukung oleh Inovasi Daerah, dengan sasaran:

a. Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
b. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
c. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Depok

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Depok maka penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2023 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kota Depok Periode Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) Pendekatan perencanaan teknokratik, (2) Pendekatan perencanaan politik, (3) Pendekatan perencanaan partisipatif, (4) Pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) Pendekatan perencanaan dari atas (*top down*). Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Depok dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Depok sebagaimana RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Tingkat Nasional.

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 selaras dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Depok Tahun 2006–2025 untuk pembangunan daerah tahap ketiga. Perumusan visi dan misi ini dilakukan untuk menjawab

permasalahan umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah yang diperkirakan akan berlaku.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka **Visi Kota Depok Tahun 2021–2026** yang hendak dicapai dalam tahapan ke-empat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah:

"Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera"

Kota Depok, didefinisikan sebagai:
Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Depok dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu.
Maju, didefinisikan sebagai:
Dengan berbagai capaian Pembangunan Infrastruktur, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Depok akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik khususnya meningkatkan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur fisik dan infrastruktur digital, serta memastikan pembangunan daerah dilakukan dengan pertimbangan keseimbangan dan dampak terhadap kualitas lingkungan. Tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik dengan dukungan SDM aparatur dan sistem pelayanan yang modern akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi publik, yang berorientasi memberikan kemudahan, pelayanan yang prima serta terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat di berbagai bidang.
Berbudaya, didefinisikan sebagai:
Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Depok yang berkualitas baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual, maka aspek pendidikan dan pembangunan masyarakat didorong untuk terwujudnya masyarakat Depok yang berbudaya, dengan mengintegrasikan nilai nilai keagamaan, kebhinekaan dan ketahanan keluarga. Kesatuan elemen ini diharapkan dapat menjadi dasar pengokohan dan penguatan modal sosial di Kota Depok.
Sejahtera, didefinisikan sebagai:
Kesejahteraan yang ingin diwujudkan adalah kesejahteraan lahir dan batin yang meliputi berbagai aspek tidak hanya dalam konteks materi melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti keseimbangan, kemandirian serta peningkatan daya saing, dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Depok termasuk kaitannya Dimensi kualitas kesehatan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat. Keterpaduan antara dimensi tersebut diharapkan melahirkan kesejahteraan yang paripurna, serta membentuk kebanggaan yang tinggi bagi warga Depok untuk melahirkan masa depan yang cerah, adil, makmur dan sejahtera.

Sebagai penjabaran visi Kota Depok diatas disusunlah misi pembangunan Kota Depok 2021–2026 dalam rangka mewujudkan visi "**Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera"** dengan rincian sebagai berikut:

1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif;
3) Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga;
4) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing; dan
5) Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Gambar 4.2. Visi dan Misi Kota Depok, 2021-2026



Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara misi RPJPD dengan misi RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4.1. Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Depok dengan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

MISI RPJPD 2006 – 2025		MISI RPJMD 2021 – 2026	
Misi 4	Menyediakan sarana dan prasarana kota dalam jumlah dan kualitas memadai dan diselaraskan dengan rencana tata ruang	Misi 1	Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan
Misi 2	Memanfaatkan dan mengelola secara optimal seluruh letak geografis sesuai daya saing dukung lingkungan		
Misi 5	Menata sistem pemerintahan yang profesional, baik, bersih, transparan, demokratis dan bertanggung jawab	Misi 2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif
Misi 3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan inetrnasional melalui peningkatan kualitas pendidkan, dilandasi oleh nilai-nilai keagaman, hukum dan sosial budaya	Misi 3	Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.

MISI RPJPD 2006 – 2025		MISI RPJMD 2021 – 2026	
Misi 1	Mengelola perekonomian daerah secara fokus, efisien dan efektif, dengan mengutamakan perhatian kepada sektor-sektor yang memberikan nilai tambah dan pertumbuhan tertinggi	Misi 4	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
Misi 3	Membangun sumberdaya manusia yang berdaya saing di lingkungan nasional dan inetrnasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, dilandasi oleh nilai-nilai keagaman, hukum dan sosial budaya	Misi 5	Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Sumber : RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Berikut ini tujuan dan sasaran Tahun 2023 sesuai misi Pembangunan Kota Depok 2021-2026.

Tabel 4.2. Realisasi dan Target Tujuan Sasaran Pembangunan Kota Depok

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	7	8	9		10
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan.	**1.1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan**	**Indeks Kota Layak Huni**	**poin**	**65.4**	**67,7**	**64**	**67,7**	**66**
		1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Tingkat Pelayanan Jalan (*Level of Service*)	poin	0.77	C (0,74)	C (0,72)	C (0,72)	C (0,70)
			Moda *Share* Transportasi Umum	persen	14,46	15,91	19,00	19,00	19,50
			Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun	persen	12.10	6,83	25,45	6,50	6,30
			Ketaatan terhadap RTRW	persen	99.24	99,24	78,5	85,00	90,00
		1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi	Indeks SPBE	poin	3.42	3,70	3,20	3,72	3,75
		1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman	Rasio Permukiman Layak	poin	0.9703	0,9992	0,9992	0,9995	0,9999
			Cakupan Akses Sanitasi Layak	persen	99.13	99,37	99,34	99,41	99,51
			Cakupan Akses Air Minum Layak	persen	85.99	85,22	90,24	90,24	91,31
		1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	58.61	57,85	53,97	57,86	57,87
			Cakupan Layanan Persampahan	persen	94.82	94,06	95,80	95,80	96,70

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	7	8	9		10
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif.	**2.1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**poin**	**64.78**	**82,14**	**64.90**	**82,15**	**82,15**
		2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP Kota	poin	67,10	67,32	69,78	69,78	70,28
			Opini BPK	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	83.25	84,25	78,89	84,26	84,50
			Indeks Inovasi Daerah	poin	48.74 (inovatif)	51,12 (inovatif)	40 (inovatif)	51,50 (inovatif)	52 (inovatif)
3	Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.	**3.1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.**	**Persentase Pemajuan Kebudayaan**	**persen**	**28**	**20**	**20**	**20**	**22**
			Indeks Pendidikan	**poin**	**76.89**	**77,38**	**77.82**	**77.82**	**78,29**
			Indeks Konflik Sosial	**poin**	**1,74**	**1,5**	**1,6**	**1,5**	**1,5**
			Indeks Pembangunan Keluarga	**poin**	**59,02**	**63,15**	**64.20**	**64.20**	**66,30**
		3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota	persen	37,50	37,30	72,50	72,50	80,00
			Persentase Ekspresi Budaya	persen	34.02	29,90	30,00	30,00	30,00
			Indeks Kegemaran Membaca	poin	59.08	60,23	60,53	60,53	61,63
		3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan yang Baik dalam Mewujudkan dan Mendorong Pembangunan yang Berkelanjutan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	persen	104.61	104,59	109,17	109,17	109,17
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	persen	94.06	94,84	93,64	94,84	95,50

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	7	8	9		10
		3.1.3.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan dan Kebhinekaan	Persentase PPKS yang tertangani	persen	41.89	74,08	93,74	93,74	95,74
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	poin	3.26	3,6	3,4	3,6	3,771
		3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	poin	91.06	90,17	88,7	90,17	90,17
4	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing.	**4.1.Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Maju, Berdaya Saing dan Mandiri**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)**	**persen**	**5.24**	**5,05**	**6.37**	**5,28**	**6,40**
			Gini Rasio	**poin**	**0.394**	**0.402**	**0,392**	**0,398**	**0,343**
		4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Konsumsi Rumah Tangga (adhb)	milyar rupiah	101,971 .97	111,087,56	113.714,39	113.714,39	122.811,54
			Nilai Investasi	milyar rupiah	7,483.51	8.459,07	8.208,16	8.208,16	8.290,24
		4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	7.82	6,97	7,51	6,47	6,15 – 6,7
		4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	persen	2.53	2,38	2.50	2,18	1,79 – 1,98
		4.2 Terciptanya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	**Persentase Pembangunan Pemuda Kota Depok**	**persen**	**32**	**34**	**36**	**36**	**38**
		4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	persen	42.70	42,80	48,00	48,00	49,00
			Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	persen	53	54,00	55,00	55,00	56,00
5	Mewujudkan Kota yang Sehat, Aman, Tertib dan Nyaman.	**5.1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok yang Sehat, Nyaman, Aman, dan Tertib**	**Indeks Kesehatan**	**poin**	**84.49**	**85,43**	**84.58**	**84.58**	**84,86**
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	**poin**	**74.67**	**74,56**	**76.00**	**76,00**	**76,67**
		5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah	56.14	66,40	58,25	58,25	58,2

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Perubahan Tahun 2024	Target Tahun 2025
1	2	3	4	5	7	8	9		10
			Persentase balita stunting	persen	3.48	3,24	4,75	3,46	3,45
		5.1.2. Meningkatnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Capaian SPM Trantibum	persen	86.47	89,38	75,20	89,38	89,38

Sumber : Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Depok Tahun 2024

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan.	1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan melalui penyediaan perlengkapan jalan baik statis maupun dinamis berbasis teknologi
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana jalan beserta fasilitas jalan yang berkualitas, aman, ramah serta nyaman	Meningkatkan konektivitas dalam kota dan konektivitas dengan wilayah perbatasan melalui pembangunan ruas jalan baru, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang, serta penyediaan fasillitas pejalan kaki dan pesepeda
			Mengembangkan layanan transportasi publik yang berkelanjutan melalui integrasi intra dan antar moda serta konektivitas antar wilayah	Meningkatkan aksesibilitas dan layanan prasarana angkutan umum melalui pengembangan jaringan trayek, pengembangan sistem informasi angkutan umum, penyediaan halte dan shelter, fasilitasi park and ride, serta peningkatan layanan dan simpul transportasi
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan infrastruktur pengendali banjir serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	Menjaga dan meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta memperkuat peran masyarakat dan badan usaha dalam konservasi sumber daya air dan tata kelola air yang berkelanjutan
			Mewujudkan tata ruang yang efisien dan berkelanjutan melalui perencanaan ruang yang berwawasan lingkungan, penguatan pengendalian serta optimalisasi peran TKPRD	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan dengan memperkuat kelembagaan penataan ruang dan partisipasi publik
		1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi	Membangun infrastruktur digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik	Menerapkan SPBE di semua perangkat daerah yang mengacu pada pedoman/standar dan melakukan pengintegrasian antar layanan SPBE.
		1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Mengurangi dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru dengan menyediakan dan memelihara PSU perumahan dan kawasan permukiman
			Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan septiktank individual, IPAL Komunal dan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta meningkatkan kualitas effluen
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih	Peningkatan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA, dan pemanfaatan mata air di wilayah yang rawan air

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan atribut kota hijau dan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mengurangi pencemaran serta kerusakan lingkungan
			Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi	Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R dan pemanfaatan teknologi
2	2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif.	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis Teknologi Informatika dan masyarakat	
			Mengembangkan ekosistem yang mendukung perkembangan inovasi di daerah	Mendorong tumbuhnya budaya inovasi dan apresiasi terhadap inovasi di perangkat daerah
3	3. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga.	3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Meningkatkan Tata Kelola Kebudayaan	Menggali, menetapkan dan melestarikan benda, situs dan kawasan cagar budaya
				Peningkatan kapasitas pelaku budaya
			Meningkatan budaya Literasi Masyarakat	Pengembangan Perpustakaan Daerah melalui e-llibrary dan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling.
		3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas, Kuantitas dan Kualitas Pendidikan serta menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal Kota Depok
				Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjangnya dengan pendekatan prioritas wilayah secara proporsional untuk mencapai mutu pendidikan sesuai 8 standar nasional.
		3.1.3.Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan	Meningkatkan Pelayanan PSKS dalam menangani PPKS	Penerapan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan Kesejahteraan Sosial
			Meningkatkan Kerukunan Sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan beragama	Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan, Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan, serta Partisipasi Politik
		3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga	Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif, multidimensi dan multisektor, untuk	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya keluarga serta peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga

No	Misi	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			meningkatkan ketahanan Keluarga	
			Meningkatkan kinerja RW ramah anak menuju kota layak anak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak anak serta pelayanan perlindungan anak berbasis digital
4	4.Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing.	4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha	Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru dibidang industri kreatif
			Peningkatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal	Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian perkotaan melalui teknologi dan digitalisasi
			Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi	Meningkatkan investasi daerah
		4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah kota dan masyarakat	Mendorong perusahaan/ industri untuk melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor
		4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin melalui optimalisasi penggunaan DTKS	Meningkatkan akses keluarga miskin/rentan dalam pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial
		4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga
			Meningkatkan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Meningkatkan Peran aktif Pemuda yang Mandiri dan Kreatif
5	5. Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman.	5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan penerapan Sistem Kesehatan Daerah berbasis teknologi informasi	Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar,cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan peran puskesmas melalui program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
			Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan aksi dalam pembudayaan gerakan masayarakat sehat berbasis teknologi informasi
		5.1.2. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Berdasarkan arah kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, tema atau fokus pembangunan RKPD Kota Depok Tahun 2024 adalah: "**Memantapkan Kehidupan Kota Depok Yang Maju Berbudaya Dan Sejahtera Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar**" Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Kota Depok Tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan pelayanan dasar dengan fokus pada peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan dan pemulihan ekonomi daerah. Peningkatan

pelayanan publik ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur serta inovasi) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas dengan tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan masyarkat yang maju, berbudaya dan sejahtera.

4.2 Prioritas Pembangunan

Pembangunan Kota Depok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Depok dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 selanjutnya dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pada dokumen Rancangan Awal RKP Tahun 2024 telah ditetapkan Tema RKP, sasaran pembangunan dan prioritas nasional. Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan ke dalam skenario pembangunan dalam RKP, dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi antara pembangunan tahun 2023-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2024 ditetapkan yaitu **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Sebagai suatu kebijakan yang sistematis dan

terarah, desain masing-masing PN memiliki arah sasaran yang perlu diwujudkan. Rincian sasaran dari masing-masing PN disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional Tahun 2024

Prioritas Nasional		Sasaran Nasional	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	SN 1	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan
		SN 2	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan pengutan daya saing usaha
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	SN 3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)
		SN 4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indoneisa (KBI)
PN 3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	SN 5	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
		SN 6	Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
		SN 7	Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan
		SN 8	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
		SN 9	Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan
		SN 10	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	SN 11	Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
		SN 12	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan
		SN 13	Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial
		SN 14	Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat
		SN 15	Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa
		SN 16	Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;

Prioritas Nasional		Sasaran Nasional	
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	SN 17	Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar
		SN 18	Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar
		SN 19	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan
		SN 20	Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan
		SN 21	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	SN 22	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		SN 23	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim
		SN 24	Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	SN 25	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas LembagaLembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
		SN 26	Optimalnya kebijakan luar negeri;
		SN 27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap
		SN 28	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		SN 29	Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan). Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;

Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;

Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;

Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;

Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;

Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026 untuk tahun 2024, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

1. Bidang Keamanan dan Ketertiban dan Kesatuan Bangsa serta Perlindungan Masyarakat

Bidang ini merupakan salah satu bidang dalam Komisi A yang paling penting. Sebab tanpa keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat maka program-program pembangunan lainnya tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, dalam bidang ini komisi A menyampaikan beberapa pokok pikiran, sebagai berikut:

a. Perumusan kegiatan untuk pembinaan politik para pemula. Anggota Komisi A merasa memiliki tanggung jawab untuk terlibat lebih aktif dalam kegiatan politik bagi para pemula sebagai bagian dari proses edukasi dan sosialisasi politik yang relevan bagi masyarakat terutamakaum pemuda dan pemudi di Kota Depok. Oleh karena itu, ada baiknya agar pihak terkait dapat mengundang anggota Komisi A untuk membantu edukasi politik tersebut.
b. Perlu dirumuskan dengan jelas mengenai kegiatan Kemah Pemuda lintas agama terutama mengenai tujuan dan maksud yang ingindiharapkan.
c. Selain itu juga perlu disediakan wadah diskusi bagi para pemuda untuk melahirkan gagasan yang inovatif dan membangun bagi kepentingan masyarakat dan pemerintahn. Pemerintah Kota Depok harus menyediakan program kolaboratif dan partisipatif untuk membuka ruang diskusi agar lahir pandangan dan gagasan politik yang bagus bagi pemerintah dan masyarakat.
d. Selanjutnya berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan,Komisi A berharap agar dilibatkan sebagai bagian dari kewajiban Komisi A DPRD Kota Depok dalam memberi edukasi politik dan pengetahuan serta pengalaman terkait dengan bagaimana menanamkan wawasan kebangsaan kepada para pemilih pemula.
e. Komisi A juga mendorong penguatan kepada Partai Politik dan KNPI dalam hal penguatan anggaran dan bentuk dukungan lainnya.
f. Hal yang tidak kalah penting adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tingkat Kecamatan Kota Depok. Komisi A mendorong agar Kesbangpol dapat mencari strategi dan program-program yang dapat meningkatkan kualitas IPM di tingkat kecamatan. Perlu dibuatkan kotak saran di setiap kelurahan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat.
g. Berkaitan dengan kebijakan dan program tanggap bencana, Komisi A masih melihat adanya polemik

mengenai kapasitas dan kecepatan pemerintah dalam merespon penanganan atau mitigasi bencana yang masih terbilang lambat. Sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali usulan dari Kecamatan mengenai penyediaan dana darurat sebagai bentuk antisipasi tanggap bencana. Pengawasan dan pengelolaan atas dana tersebut perlu dilakukan dengan sebaik mungkin.

2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam bidang ini Komisi A mengusulkan beberapa pokok pikiran yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu:

a. Memperbaharui kembali jumlah data pemilih tetap (DPT) dengan melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat yang terkaitdan KPU Pusat dan KPUD Kota Depok.
b. Memperbaharui data penduduk miskin di Kota Depok dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan terkait data anak kurang gizi.
c. Dukcapil hendaknya menyediakan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat Kota Depok melalui penyediaan pelayanan online.
d. Pembukaan akses yang lebih luas dan terbuka mengenai pembuatanakta kelahiran untuk warga yang berusia 18 tahun keatas dan segala usia. Hal itu penting sebagai pemenuhan hak warga negara di bidangpelayanan administratif.
e. Merumuskan program dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh Dukcapil dalam membantu mereka yang membutuhkan status akta cerai. Hal tersebut penting untuk mendukung ketahanan keluarga di Kota Depok.
f. Komisi A mengapresiasi dibentuknya layanan berupa pohon inovasi oleh Dukcapil. Namun gaung sosialisasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih mengenal layanan inovatif tersebut.
g. Selain itu, perlu ditingkatkan validasi data kependudukan oleh Dukcapil dan Komisi A mengharapkan agar dapat dilakukan koordinasi yang strategis dengan pemerintah pusat.

3. Bidang Hukum, Perundang-Undangan dan HAM

Dalam bidang ini beberapa persoalan yang menjadi pokok pikiran dari Komisi A adalah:

a. Menyetujui adanya penyediaan insentif bagi Satuan Tugas dan Tenaga Non PNS di Satpol PP dan besaran insentif tersebut diharapkan dapat disamakan dengan UMK.
b. Komisi A menyoroti program penertiban yang belum maksimal oleh Satpol PP terutama dalam beberapa isu pembangunan yang tidak semestinya dan tidak terawasi dengan baik. Misalnya, pembangunan masjid atau rumah makan di lokasi-lokasi yang tidak semestinya seperti di daerah bantaran sungai yang mana hal itu tidak bertentangan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang ada di Kota Depok.
c. Komisi A mengusulkan agar perijinan dan pengendalian yang lebih preventif agar dapat dilakukan sebelum pelaksanaan pembangunan di tempat-tempat tersebut.
d. Komisi A juga menyoroti mengenai sosialisasi dan implementasi dari Perda tentang Garasi yang sudah

disahkan oleh Pemerintah Kota Depok dan DPRD. Hal itu penting agar masyarakat mengetahui dan mentaati keberadaan perda tersebut.

4. Bidang Kepegawaian/Aparatur

Dalam bidang ini, beberapa pokok pikiran yang disampaikan adalah:

a. Berkenaan dengan tupoksi dari Sekretariat Daerah Kota Depok,Komisi A menyampaikan pandangan terkait penyediaan SDM Pembimbing Rohani (Bimroh) diharapkan ada penambahan formasi.Selain itu, Komisi A mengusulkan agar persyaratan "tidak memiliki penghasilan tetap" sebaiknya dihapuskan agar lebih mengedepankankebutuhan kualitas dan keilmuannya.

b. Berkaitan dengan Tupoksi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Komisi A menyampaikan sebagai berikut:
   - Diharapkan pemerintah Kota Depok dapat memberikan reward atau apresiasi kepada ASN yang memiliki kinerja yang baik.
   - Berkaitan dengan kebutuhan formasi P3K sebaiknya tetap diprioritaskan untuk kebutuhan tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Selain itu, diharapkan adanya pembukaan kesempatan bagi ketersediaan formasi bagi Guru Non Muslim.
   - Diperlukan program mengenai pengukuran kinerja dan pengawasan kinerja ASN dan Non-ASN yang lebih efektif untuk melihat kualitas dan kemajuan pengembangan kompetensi SDM di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Hal ini penting sebagai realisasi awal untuk membangun ASN unggul dan berdaya saing di Kota Depok.
   - Menurut Komisi A sebaiknya Badan Kepegawaian dan Inspektorat dapat menyusun tim perumus untuk menyusun indicator kinerja ASN di Pemerintah Kota Depok.

c. Berkenaan dengan Pengawasan dan Pembinaan terhadap ASN dalam hal Politik Praktis, Komisi A mengharapkan agar Inspektorat Daerah Kota Depok dapat melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Haltersebut penting untuk menjaga kondusifitas penyelenggaraanpemerintahan pada tahun ini dan 2024.

d. Selain itu, Komisi A juga menyampaikan usulan kenaikan kesejahteraan bagi ASN Kota Depok yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah KotaDepok.

5. Bidang Pelayanan Perijinan

Berkaitan dengan bidang pelayanan perijinan, Komisi A memandang perlunya penguatan dalam beberapa hal.

a. Komisi A mendorong agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dapat melakukan tindakan penertiban bagi bangunan yang tidak memiliki izin, serta melakukan langkah koordinasi dengan SATPOL PP dan Dinas PUPR untuk mengatasi persoalan tersebut.

Apabila diperlukan sebaiknya dinas yang berwenang dapat melakukan penertiban dan memberikan surat peringatan sebagaimana mestinya.

b. Segera membangun mal-mal pelayanan publik yang amat dibutuhkan oleh masyarakat.

c. Pengendalian dan pengawasan atas seluruh bangunan usaha jenis apapun dengan memastikan kepemilikan sertifikat laik fungsi (SLF) termasuk juga bagi sekolah-sekolah atau sarana pendidikan lainnya.

d. Selain itu, berkaitan dengan iklim investasi di Kota Depok, DPMPTSP perlu mengambil tindakan atas pengembang atau investor yang melakukan pelanggaran. Apabila dibutuhkan sebaiknya disediakan pelayanan perijinan yang proaktif misalnya dengan program jemput bola.

6. Bidang Komunikasi Informatika Kehumasan dan Pers SertaTelematika

a. Komisi A memandang perlunya pengawasan dan penyediaan fasilitas umum WIFI di setiap RW di Kota Depok. Selain itu, Komisi A juga mengusulkan disediakannya program CCTV secara gratis di setiap titik RW di Kota Depok yang terintegrasi.

b. Untuk menghindari tingkat kejahatan di jalan, Komisi A mengusulkan agar dilakukan penambahan penerangan jalan dan keberadaan CCTV di jalan-jalan utama atau protocol di Kota Depok.

c. Komisi A mengapresiasi dibangunnya Aplikasi Depok Single Window yang merupakan prestasi yang baik bagi Kota Depok. Komisi A mengharapkan agar program pelayanan online ini dapat terlaksana dengan lebih baik ke depannya

7. Bidang Statistik, Arsip, dan Perpustakaan

Untuk bidang ini Komisi A mengusulkan beberapa pokok pikiran yang dapat digunakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok sebagai program strategis, yaitu:

a. Pembinaan perpustakaan se-Kota Depok yang dapat dilaksanakan di 120 lokasi perpustakaan baik tingkat SD maupun SMP, serta dibangunnya 154 RW yang Ramah Anak dan optimalisasi TBM di Kota Depok. Program pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung dengan anggaran yang memadai agar dapat memberikan manfaat dengan maksimal bagi masyarakat.

b. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan program pembinaan, penataan dan digitalisasi arsip di setiap OPD dan Kelurahan di Kota Depok.

c. Program pemindahan arsip dari Kabupaten Bogor juga perlu diselesaikan mengingat kapasitas atau daya tampung *database* yangmasih belum memadai. Komisi A mengusulkan agar adanya peningkatan kapasitas penyimpanan data elektronik di setiap OPD.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.

a. Mewujudkan Dan Merealisasikan 5000 Umkm Dan 1000 Pengusaha Perempuan Di Kota Depok Sesuai Dengan Janji Wali Kota Depok Dan Melakukan Pendataan 5000 Umkm Dan 1000 Pengusaha

Perempuan Di Kota Depok.

b. Mengembangkan Sentra Ekonomi Di Kota Depok, Mendorong Para UMKM UntukMemiliki Produk Halal Dan Premium Untuk Mendorong Dalam Pergelaran Pameran Di Tingkat Nasional Dan Luar Negeri Pada Tahun 2024 Serta Memberikan Bantuan Dana Untuk Umkm Di Kota Depok.

c. Memberikan Hasil Output Dan Outcome Dari Pendidikan Dan Pelatihan Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Depok.

d. Penambahan Retribusi Jasa Usaha dikarenakan hal tersebut sebagai salah satu Potensi Peningkatan PAD Kota Depok.

e. Melakukan Penataan dan Penambahan Terkait Galeri UMKM Di Setiap Kecamatan, Kelurahan, Ditempat Wisata dan di Alun-Alun Kota Depok dan Depok Timur Dan Melakukan Penempatan Strategis Untuk UMKM Di Pusat Perbelanjaan

9. Urusan Pemerintahan Di Bidang Pangan

a. Penguatan Ketersediaan Pangan Dengan Peningkatan Produksi Pangan Beragam Melalui Urban Farming Dan Memaksimalkan Terkait Dengan Urban Farming Dan Urban Farming Sistem Di Kota Depok.

b. Membuat Regulasi Yang Mendukung Terkait Dengan Konsep Pertanian Masa Depan.

c. Bekerjasama dengan BJB Kota Depok Terkait Dengan Pengalokasian CSR Untuk Penambahan Alokasi Lahan Pertanian Berkelanjutan Untuk Menambah Lahan Terbuka Hijau dan Penguatan Ketahanan Pangan Di Kota Depok.

d. Melakukan Inovasi Terkait Dengan Upaya Ketahanan Pangan Di Kota Depok dan Menambahkan Program Alokasi Lahan Pertanian Berkelanjutan pada Program Kerja Tahun 2024.

e. Dalam Program Kerawanan Pangan Perlu Dilakukan Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Penanganan Kerawanan Pangan Daerah, dan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran CadanganPangan Pada Kerawanan Pangan Daerah Kota Depok.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

a. Membuat Mall Pelayanan Publik Berbentuk Seperti Mall Dan Diusulkan Untuk Memakai Tempat Mall yang Sepi Pengunjung Di Kota Depok Atau Membuat Mall Pelayanan Publik Menggunakan Fasilitas Aset Pemerintah Kota Depok.

b. Dalam rangka Meningkatkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, DPMPTSP dapat Melakukan Evaluasi Terkait Dengan Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bangunan-Bangunan Yang Tidak Berizin Di Kota Depok Serta Melakukan Pendataan Ulang Terkait Dengan Menara Telekomunikasi Di Kota Depok.

c. Melakukan Inovasi Terhadap Profil Investasi dan Mengoptimalkan Penyajian Data Informasi Potensi Dan Peluang Investasi dan Promosi Investasi Kepada Calon Investor Yang Terdiri Dari Penyusunan Profil Investasi dan Promosi Investasi Tahun 2024.

d. Meningkatkan Kualitas Iklim Usaha dan Investasi Yang Baik, Aman, Nyaman dan Berkelanjutan diantaranya Melalui Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Melakukan Inovasi Dalam Bidang Investasi Penanaman Modal Serta Membuat Peta Potensi Investasi Kota Depok Termasuk Melakukan Pembaharuan Terkait Profil Pariwisata Di Kota Depok Dengan Berkoordinasi Dengan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Depok.

e. Terkait Pelayanan Penanaman Modal Melakukan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Yang Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dengan Melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Peningkatan Sarana System Teknologi Informasi Dan Melakukan Kerjasama Pelayanan Penanaman Modal Melalui Optimalisasi Mall Pelayanan Publik Baik Secara Daring Maupun Nondaring.

f. Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Perlu Melakukan Revisi Peraturan Wali Kota Terkait Perijinan Periklanan Atau Peenyelenggaraan Reklame.

g. Terkait Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Perlu Melakukan Kegiatan Peningkatan Kualitas Penyajian Data Dan Informasi Potensi Dan Peluang Investasi Di Daerah Kepada Calon Investor.

11. Urusan Perdagangan

a. Membuat **Pasar Tematik Di Kota Depok** Dengan Berkolabarosasi Bersama Dinas Koperasi Dan Um Untuk Memasarkan Produk Umkm Pada Pasar Tematik Dalam Meningkatkan Umkm Di Kota Depok Dan Berkolabarosasi Dengan Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Untuk Memasukkan Destinasi Wisata Di Pasar Tematik Dalam Meningkatkan Destinasi Wisata Di Kota Depok.

b. Melakukan Kolaborasi Antara Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dengan Dinas Koperasi Dan Um Serta Dengan Dinas Pemuda Dan Olahraga, Pariwisata Untuk Pembuatan Pasar Tematik Di Kota Depok

c. Kolaborasi Pasar Tradisional Dengan Pengembangan Sentra Ekonomi Tematik Untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Umk Dengan Perbaikan Infrastruktur Ekonomi Kota Salah Satunya Modernisasi Pasar Tradisional Dan Pengembangan Sentra Ekonomi Tematik Khusus Umk (Sentra Kuliner, Sentra Niaga, Dan Sentra Industri Kreatif)

d. Mendorong Wirausaha Baru Melalui Intervensi Berbasis Pasar.

e. Perlu Adanya Pembelian Lahan Menuju Setu Pendongkelan Untuk Peningkatan Destinasi Wisata Dan Pengurangan Banjir.

f. Mengembangkan Pasar Tradisional Dan Pasar Tematik Di Kota Depok Berbasis Digitalisasi Dan Online

g. Melakukan Penataan Pkl Dan Melakukan Penempatan Pkl Di Pasar Sni.

h. Terkait Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Perlu Melakukan

Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok.

12. Urusan Perindustrian

a. Komisi B DPRD Kota Depok Mendorong terkait Dengan Penambahan Anggaran Untuk Program Promosi Pameran di Tingkat Nasional dan Luar Negeri di Tahun 2024.
b. Memaksimalkan Target Retribusi Kemeterologian dan Meningkatkan IKM di Kota Depok.
c. Terkait Dengan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, Komisi B Mendorong Pembangunan Kawasan Industri Terintegrasi, Yang Perlu Dilengkapi Berbagai Infrastruktur Penunjang Serta Selaras Dengan Pelestarian Lingkungan.

13. Urusan Pariwisata

a. Meningkatkan Target Retribusi Pariwisata Di Kota Depok dan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Destinasi Pariwisata Di Kota Depok.
b. Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pariwisata Di Wilayah Kota Depok, Dpmptsp Dapat Membentuk Pokdarwis Baru Untuk Menggantikan Pokdarwis Yang Sudah Tidak Berjalan.
c. Mengembangkan dan Memfokuskan Terkait Dengan Pengembangan Sentra Wisata Di Kota Depok.
d. Membangun Wisata Di Kota Depok Dengan Berkolaborasi Bersama Pihak Swasta Dalam Rangka Pengembangan Wisata Di Kota Depok Serta Mengoptimalkan Tempat-Tempat Wisata Di Kota Depok Dan Melakukan Penataan UMKM Di Tempat Wisata-Wisata Di Kota Depok.
e. Mengembangkan dan Mensosialisasikan Budaya Dan Pariwisata Di Kota Depok Melalui Festival/Event Di Kota Depok Serta Melakukan Penataan dan Pengelolaan Di Setu-Setu Di Kota Depok Sebagai Potensi Destinasi Wisata Di Kota Depok.
f. Membuat Program Roadmap Potensi Pariwisata Di Kota Depok Dan Melakukan Kajian Pengembangan dan Pendataan Potensi Pariwisata Di Kota Depok
g. Perlu Adanya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata;
h. Berkolaborasi dengan DPMPTSP untuk penyesuaian Perda Parawisata Alam danpengembangan Profil Parawisata.

14. Urusan Pertanian

a. Terkait Dengan Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Perlu Melakukan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.
b. Melakukan Inovasi Dalam Pelaksanaan Rumah Potong Hewan (RPH) Untuk Memaksimalkan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
c. Men-Support Program Eksistensi Pelatihan, Penganggaran, Pengembangan Dan Pemberdayaan Di Kota Depok Terkait Pertanian Pada Tahun 2024.
d. Terkait Program Perizinan Usaha Pertanian Perlu Melakukan Koordinasi Dengan DPMPTSP Dan

Pemerintah Pusat Terkait Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Secara Integrasi (OSS).

e. Terkait Program Penyuluhan Pertanian Perlu Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani,Penyediaan, Pemanfaatan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa, Pembentukan Badan Usaha Milik Petani, Pembentukan Dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

f. Melakukan Kerja Sama Dengan Perusahaan Swasta Di Kota Depok Dalam Bentuk Csr Terkait Fasilitasi Pelaksanaan Program Bidang Pertanian Di Kota Depok.

15. Urusan Kelautan Dan Perikanan

a. Terkait Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Perlu Melakukan Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

b. Men-Support Program Eksistensi Pelatihan, Penganggaran, Pengembangan Dan Pemberdayaan Di Kota Depok Terkait Perikanan Pada Tahun 2024.

c. Melakukan Kerja Sama Dengan Perusahaan Swasta Di Kota Depok Dalam Bentul Csr Terkait Fasilitasi Pengelolaan Perikanan Di Kota Depok.

d. Melakukan Inovasi Dan Membangkitkan Produk Unggulan Terhadap Kontak Tani Nelayan Andalan (Ktna) Terkait Kota Depok.

e. Meningkatkan Produksi Terkait Pembenihan Balai Benih Ikan (Bbi) Di Kota Depok.

f. Melakukan Pengembangan Dan Pemberdayaan Berkelanjutan Kepada Peserta Pelatihan Dari Hasil Kegiatan Pelatihan.

16. Urusan Penunjang Unsur Pemerintahan Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Depok

a. Dinas Kesehatan Dapat Meningkatkan Terkait Dengan Pelayanan DinasKesehatan Kota Depok.

b. Membuat Program Bimbingan Teknis Terkait Dengan Pelayanan DinasKesehatan Kota Depok.

17. Urusan Penunjang Unsur PemerintahanBidang Urusan Keuangan

Komisi B DPRD Kota Depok Menyampaikan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Komisi B DPRD Kota Depok Tahun 2024 Terhadap **Bidang Urusan Keuangan** Sebagai Berikut :

a. Menyiapkan Dan Membuat Raperda Pajak Dan Retribusi.

b. Terkait Dengan Program Pengelolaan Pendapataan Daerah Perlu Melakukan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dengan Mengoptimalkan Pendapatan Daerah Kota Depok Yang Berkaitan Dengan Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Terkait Sistem Operasional Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Intensifikasi Dan Ekstensifikasi.

c. Melakukan Pengelolaan Pajak Daerah dan Pendataan Ulang Wajib Pajak dalam Peningkatan Pajak Daerah.

d. Menjalin Kerja Sama dengan Pihak Swasta Di Kota Depok dalam rangka Pemungutan Pajak di Kota Depok.
e. Memperbanyak Pemasangan Tapping Box Di Kota Depok Dengan Menjalin Kerjasama bersama Bank BJB Kota Depok.
f. Terkait Dengan Menurunnya Pendapatan Pajak Pada Tahun 2024, Badan Keuangan Daerah Kota Depok Dapat Meningkatkan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024.
g. Terkait Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Perlu Melakukan Kegiatan Pengoptimalan Dengan Baik Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Memaksimalkan Inventarisasi Terkait Barang Milik Daerah (BMD) serta melakukan Inovasi Yang Relevan Dengan Adanya Sinergitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Melalui Satuan Tugas Aset Daerah dan Memperbaiki Tata Kelola Aset Daerah.
h. Memanfaatkan Tanah/Lahan Fasos Fasum Atau Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Pembuatan Fasilitas Sentra–Sentra Umkm Dalam Memaksimalkan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Komisi B DPRD Kota Depok Menyampaikan Usulan Pokok-Pokok Pikiran Komisi B DPRD Kota Depok Tahun 2024 **Terhadap Retribusi Daerah** Pada DinasPerhubungan Sebagai Berikut :

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
b. Melakukan Pendataan Dengan Detail Terkait Retribusi Pendapatan Titik-Titik Lokasi Parkir Di Kota Depok.
c. Dalam Memaksimalkan Pendapatan Retribusi Pendapatan Parkir Di Kota Depok, Dinas Perhubungan Melakukan Inovasi Dalam Hal Pembayaran Melakukan Penerapan Pembayaran Non Tunai.
d. Melakukan Peralihan Ke Pembayaran Digitalisasi Terkait Pajak Parkir Dan Parkir Retribusi Alun-Alun Kota Depok Dalam Meningkatkan Pendapatan Daerah.
e. Melaksanakan Terkait Penerangan Jalan Umum (Pju) Pada Awal Tahun.
f. Memaksimalkan Potensi-Potensi Yang Dapat Dikembangkan Untuk Menaikkan Pendapatan Dinas Perhubungan.

18. Urusan Pendukung Unsur Pemerintahan

Bidang Urusan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam SetdaKota Depok) Terkait Dengan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring DanEvaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Dan BLUD Menyampaikan Pokir Komisi B DPRD Kepada Bagian Perekonomian Setda, RSUD BLUD Sebagai Berikut:

Bidang Urusan Perencanaan (Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA)

a. Memastikan Dalam Dokumen Perencanaan Pada BKD Dan DKUM, Dan Perangkat Daerah Terkait

Lainnya Untuk Pemanfaatan Tanah/Lahan Fasos Fasum Atau Pendayagunaan Tanah Terlantar Untuk Pembuatan Fasilitas Sentra–Sentra Umkm.

b. Memastikan Dalam Dokumen Perencaanaan Sekretariat Daerah Bidang Ekonomi Dan Perangkat Daerah Lainnya Terkait Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Fasilitasi TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan) Dan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan).

Rumah Sakit Umum Daerah Ksa Dan Asa Kota Depok (BLUD):

Pokok-Pokok Pikiran Komisi B DPRD Kota Depok Tahun 2024 Kepada Rsud KsaDan Asa Kota Depok Dengan Rincian Sebagai Berikut:

a. Meningkatkan Terkait Dengan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok.
b. Membuat Program Bimbingan Teknis Terkait Dengan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Depok.
c. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Pelayanan Aman Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.
d. Meningkatkan Sistem Pelayanan Di RSUD Kota Depok Pada Tahun 2024.
e. Melakukan Perincian Terkait Pendapatan RSUD Kota Depok.
f. Menaikkan Target Pendapatan RSUD Kota Depok.

19. Perencanaan Pembangunan.

Tiga Persoalan Mendasar Di Kota Depok : Kemacetan, Banjir, Sampah.

Agar Menjadi Perhatian Khusus Pemerintah Kota Depok;

a. Fasilitas Wifi Agar Ada Evaluasi Karena Digunakan Secara Tidak Bijak Terutama Dikalangan Anak-Anak;
b. Pemerintah Kota Depok Harus Mempunyai Target Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Setiap Tahunnya Agar Pembangunannya Dapat Terukur.

20. Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, GedungDan Sumber Daya Air

Pada Bidang Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Ada Beberapa Permasalahan Terkait Dengan Infrastruktur Diantaranya:

a. Masih Adanya Jalan Yang Rusak Serta Pengelolaan Dan Manajemen Jalan Yang Belum Tertata Dengan Baik
b. Belum Memiliki Data Based Jalan Yang Aktif.
c. Masih Banyaknya Trotoar Yang Tidak Terawat Dengan Baik
d. Masih Banyaknya Bangunan Penahan Tanah (Turap) Yang Belum Dibangun Pada Sisi-Sisi Sungai

Dalam Menyikapi Hal Tersebut Komisi C Mengusulkan Hal-Hal Sebagai Berikut :

a. Pembangunan sumur resapan dan drainase
b. Pembangunan Infrastruktur Pencegah Banjir;

c. Revitalisasi jalan

Tata Ruang, Perumahan Dan Permukiman

Dalam Rangka Pembangunan Tata Ruang Dan Permukiman Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

a. Pembangunan Puskesmas
b. Rehabilitasi dan Penambahan Ruang Kelas Baru (Rkb) Sekolah Dasar / Sekolah Menengah
c. Pembangunan Sekolah Menengah Negeri Baru Dan Berada Di Wilayah Tengah;
d. Pembebasan Lahan Pada Tpa Cipayung
e. Agar Dibangun Gerbang-Gerbang Pembatas Pada Titik- Titik Perbatasan Di Kota Depok;
f. Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Perkantoran Kelurahan / Kecamatan
g. Pembangunan taman kelurahan
h. Pembangunan Gelanggang Olah Raga (Gor) Disetiap Kecamatan;
i. Pelebaran Jalan pada simpang untuk Memperlancar Arus Lalu Lintas Kendaraan Dan Para Pengguna Jalan;

21. Perhubungan

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Perhubungan Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

a. Mengurangi titik dan simpul kemacetan
b. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (Jpo);
c. Pada Sisi Jalan Dekat Superindo Sebagai Jalan Pendamping Tol Sering Terjadi Kemacetan Agar Dapat Dipantau Secara Berkala;
d. Penerangan Jalan Umum pemasangan LPJU baru dan pemeliharaan PJU, Penambahan Marka Jalan;
e. Agar Adanya kendaraan umum Trayek-Trayek Yang Beroperasi Pada Jam-Jam Tertentu Di Jam-Jam Sekolah;

22. Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Pertamanan Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

a. Ruang Bermain Berupa Taman Anak Sebagai Sarana Bermain Dan Menjadi Fasilitas Yang Sangat Vital Karena Banyak Lahan Yang Sudah Berlih Fungsi;
b. Sepanjang Sisi Barat Pada Tempat Pembuangan Sampah Akhir (Tpa) Cipayung Sudah Ada 2.000 M2 Lahan Yang Mengalami Pergeseran Dan Peralihan Fungsi Semula, Agar Adanya Ganti Rugi Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Oleh Pemerintah Kota Depok;
c. Pengadaan Lahan Untuk Revitalisasi Tpa Dan Taman Kota;
d. Menyusun Kebijakan Mengenai Upaya Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Termasuk

Dalam Pengelolaan Sampah;

e. Disusunnya Kebijakan Menganai Uji Di Laboratorium Dlhk;

f. Tersedianya Sarana Dalam Pengelolaan Sampah.

23. Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatann Di Kota Depok Yang Belum Optimal, Pemerintah Kota Depok Perlu:

a. Penyediaan Dan Penataan Terhadap Kendaraan Pemadam Kebakaran Yang Representatif Terhadap Kondisi Ketinggian Gedung Dan Jalan Kecil Di Wilayah Kota Depok;

b. Pembangunan Hydrand Di Beberapa Titik Wilayah Di Kota Depok;

c. Dilakukan Monitoring Dan Evaluasi Sebagai Tindak Lanjut Pengadaan Apar Di Wilayah;

d. Dilakukan Edukasi Dan Pelatihan Terhadap Satlarkar Setiap Tahunnya Terkait Mitigasi Bencana Dan Penggunaan.

24. Bidang Pendidikan

a. Pemberdayaan dan pelatihan dasar bahasa Isyarat dan pembacaan huruf braille bagi tenaga pengajar atau guru pada setiap sekolah di Kota Depok.

b. Peningkatan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada setiap sekolah.

c. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok untuk menjamin dan mengakomodir seluruh siswa miskin dapat diterima pendaftaran baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

d. Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB)

e. Renovasi gedung SMP

f. Perlunya kebijakan dan program yang sistematis oleh Dinas Pendidikan Kota Depok terkait penahanan ijazah oleh pihak sekolah.

g. Peningkatan isentif guru PAUD secara bertahap.

h. Perlunya Dinas Pendidikan Kota Depok melakukan pembinaan sekolah swasta secara intensif dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan agar setara dengan sekolah negeri.

i. Perlunya fasilitasi kebutuhan belajar Siswa SDN berprestasi bidang olahraga melalui Dinas Pendidikan Kota Depok.

j. Penambahan Lembaga Kursus dan Pelatihan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok.

k. Penganggaran sarana dan prasarana sekolah agar disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan tepat sasaran.

l. Peningkatan evaluasi dan pengawasan kinerja tenaga pengawas sekolah.

m. Penambahan tenaga pendidik pendidikan agama.

n. Perlunya perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendidikan Kota Depok terhadap siswa berprestasi.

o. Penyederhanaan prosedur perpanjangan ijin operasional dan Pimpinan sekolah swasta.
p. Peningkatan kesejahteraan guru swasta berdasarkan keadilan dan kelayakan pada sekolah swasta.
q. Perlunya pemerataan pembangunan SMA/SMK Negeri di Kota Depok.

25. Bidang Kesehatan

a. Penyediaan alat bantu pembuatan laporan berupa sarana perangkat berupa laptop yang diperuntukan dan digunakan untuk setiap Posyandu.
b. Diadakannya program Peningkatan kebugaran bagi masyarakat untuk setiap usia.
c. Melakukan Optimalisasi kesehatan dalam rangka penurunan angka kematian bagi ibu hamil.
d. Peningkatan kerjasama dengan Rumah Sakit Swasta dalam rangka memaksimalkan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
e. Memaksimalkan atas Sinkronisasi dan integrasi data dalam rangka Falidasi Data bagi masyarakat miskin sebagai penerima bantuan kesehatan baik bagi Masyarakat PBI APBN maupun bagi Masyarakat PBI APBD.
f. Optimalisasi Anggaran melalui Penganggaran dalam pemberian makan tambahan di setiap posyandu.
g. Penambahan jumlah waktu pemberian insentif kader posyandu dari 5 bulan menjadi 10 bulan.
h. Optimalisasi pengawasan pelatihan program stunting dan melakukan kajian lebih mendalam terkait faktor penyebab terjadinya stunting.
i. Peningkatan pengawasan pada setiap rumah sakit dalam pemenuhan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui Dinas Kesehatan Kota Depok
j. Peningkatan pengawasan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
k. Perlunya pemberitahuan prioritas program bidang kesehatan dalam rangka peningkatan IPM setiap kecamatan melalui Komisi D DPRD Kota Depok.
l. Perlunya atas ketersediaan puskesmas di Kelurahan Pancoran Mas
m. Peningkatan sosialiasi preventif dan promotif program stunting melalui Dinas Kesehatan Kota Depok yang pelaksanaannya dilakukan secara intensif.
n. Perlunya peningkatan pengawasan produk makanan yang halal dan aman pada setiap sekolah dalam rangka mencegah naiknya angka stunting.
o. Perlunya ketentuan pengaturan terkait tarif pelayanan ambulans oleh Pemerintah Kota Depok
p. Perlunya pemberitahuan atau notifikasi data aktif atau tidak bagi peserta PBI APBD dan PBI APBN
q. Mendorong bagi peserta mandiri yang tidak aktif akan pentingnya program jaminan kesehatan agar mengikuti program jaminan kesehatan.
r. Peningkatan sosialisasi dan edukasi atas manfaat penggunaan layanan BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok
s. Perlunya Peningkatan intensitas rapat koordinasi gabungan dalam memperkuat komitmen dan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Depok bersama dengan setiap direktur rumah sakit, BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok dan Dinas Kesehatan di kota Depok.

t. Optimalisasi pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga layanan kesehatan di RSUD ASA dan di RSUD KISA.

u. Pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam rangka peningkatan layanan kesehatan daerah di RSUD seperti tersedianya informasi terkait penyediaan tempat tidur, ruang rawat inap, dsb.

v. Peningkatan pelayanan sistem rujukan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis.

w. Perlunya Penambahan sarana ambulans yang lengkap pada setiap RSUD di Kota Depok

26. Bidang Ketenagakerjaan

a. Perlunya Support anggaran penyediaan bagi tenaga kerja magang yang diperuntukan bekerja ke negara Jepang dengan prioritas lulusan siswa SMK tidak mampu dan berprestasi.

b. Perlunya rapat koordinasi gabungan Komisi D DPRD Kota Depok bersama Dinas Tenaga Kerja Kota Depok dan SMK Se-Kota Depok terkait program penyediaan tenaga kerja magang ke Jepang.

c. Perlunya dilakukan peningkatan Rapat Koordinasi Komisi D DPRD Kota Depok bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Depok dan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.

d. Perlunya pelibatan Komisi D DPRD Kota Depok terkait program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Depok.

e. Perlunya Peningkatan kerjasama dengan perusahaan Swasta dalam rangka menyerap tenaga kerja lokal sesuai dengan kompetensi atau keahlian tenaga kerja.

f. Peningkatan pengawasan peserta pelatihan kerja disetiap kelurahan.

g. Penigkatan evaluasi dan pendampingan serta promosi peserta pelatihan kerja secara berkelanjutan.

h. Perlunya dilakukan Optimalisasi sosialisasi dan informasi bursa kerja sampai pada tingkat kelurahan.

i. Perlunya Optimalisasi penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelatihan kerja di Kota Depok.

j. Perlunya peningkatan dan optimalisasi banyaknya tenaga kerja dalam rangka mendukung program penurunan angka pengangguran.

27. Bidang Sosial

a. Optimalisasi tersedianya sarana dan prasarana sosial berupa Mobil TRC, Mobil Rescue dan Ambulans untuk peningkatan standar pelayanan minimal bagi masyarakat

b. Penambahan tenaga SDM berkualitas dalam melakukan verifikasi dan validasi pada setiap kelurahan

c. Peningkatan fasilitas Rumah Perlindungan Sosial (RPS)

d. Penyelarasan sistem informasi data terpadu masyarakat miskin yang terintegrasi dengan setiap

bidang terkait.

e. Peningkatan musyawarah kelurahan terkait pemutahiran data masyarakat miskin dengan melibatkan Komisi D DPRD Kota Depok.

28. Bidang Kepemudaan, Olah Raga, Seni dan Budaya.

a. Optimalisasi dan sinergitas program rutin kegiatan budaya, seni, wisata dan olahraga.
b. Perlunya kajian dan study kelayakan wilayah berpotensi wisata alam dan buatan.
c. Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana tempat wisata.
d. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Permuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok untuk mendukung kegiatan pelaku seni dan budaya yang berprestasi.
e. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana tempat kegiatan olahraga dan kepemudaan serta kebudayaan.
f. Perlunya Support anggaran program dan kegiatan pengembangan cabang olahraga prestasi
g. Peningkatan promosi atlet lokal berprestasi
h. Mengusulkan untuk diadakannya kegiatan Pekan Olahraga di Kota Depok.
i. Peningkatan rapat koordinasi Komisi D DPRD Kota Depok bersama Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok, Pelaku Seni dan Budaya dalam rangka upaya pergelaran dan pelestarian seni dan budaya.
j. Optimalisasi pelestarian bangunan di wilayah Kota Depok yang menjadi potensi sebagai cagar budaya.
k. Perlu pelibatan Komisi D DPRD Kota Depok dalam setiap pelaksanaan kegiatan kepemudaan, promosi budaya dan event olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota depok.

29. Bidang Agama

a. Pemerataan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual untuk semua unsur agama.
b. Pemutahiran data rumah ibadah di Kota Depok dilakukan secara bertahap tingkat kelurahan.
c. Pengkajian nomenklatur kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola rumah ibadah oleh Pemerintah Kota Depok.

30. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Perlu adanya Peningkatan dan pemberdayaan remaja pada setiap program dan kegiatan bagi remaja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Depok.
b. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Depok dilaksanakan pada setiap kelurahan.
c. Perlunya penekanan laju pertumbuhan pendudukan di Kota Depok melalui urbanisasi.

31. Pemberdayaan Perempuan

a. Peningkatan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Depok.

b. Optimalisasi program dan kegiatan pemberdayaan perempuan secara khusus dan tepat sasaran.

32. Perlindungan Anak dan Perempuan

a. Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan.

b. Melakukan Peningkatan kinerja setiap Rukun Warga di Kota Depok yang menjadi Kota Ramah Anak.

c. Penambahan UPTD perlindungan korban kekerasan anak dan perempuan secara merata.

4.2.4 Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2024

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD pada tahun ketiga. Selain pemenuhan target RPJMD Tahun 2024. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 akan difokuskan pada kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, penanggulangan dampak sosial dan peningkatan sistem kesehatan daerah di Kota Depok. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan Kota Depok pada tahun 2024, yaitu "Memantapkan Kehidupan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera melalui Peningkatan Pelayanan Dasar".

Pada Tahun 2024, prospek ekonomi Indonesia diharapkan terus membaik dan akan lebih baik dari Tahun 2022 dan Tahun 2023. Pemulihan dampak covid semakin membaik seiring dengan membaiknya perekonomian Nasional dan Dunia. Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2020-2024, dalam upaya mewujudkan ekonomi yang lebih mandiri dan mendorong bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju dan sejahtera, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, diupayakan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 dapat tumbuh mencapai 6,0-6,3 persen. Faktor pendorong pertumbuhan dari sisi produksi adalah pertumbuhan sektor pariwisata, industri dan perdagangan serta jasa keuangan menjadi fokus penataan pertumbuhan ekonomi disamping sektor kesehatan dan perlindungan sosial.

Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh konsumsi masyarakat yang merupakan komponen utama dari permintaan domestik, dan investasi dengan optimalisasi pada keunggulan kompetitif. Peningkatan konsumsi masyarakat tersebut akan terjadi apabila daya beli masyarakat meningkat, sehingga perlu diupayakan pengendalian inflasi dan menjaga ketersedian bahan pokok. Dampak dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia pada Tahun 2024 akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Depok, yang diharapkan selalu tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional dan Jawa Barat.

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Nasional dan Regional pasca Covid-19 diharapkan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Depok Tahun 2024 dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Lebih jauh lagi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial semakin meningkat.

Penetapan isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum

dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kota Depok serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis eksternal dan internal yang telah dibahas pada forum perencanaan dan mengacu kepada RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pertimbangan dan penelaahan di sub-bab sebelumnya, maka isu strategis pembangunan Kota Depok 2024 dapat dirumuskan dalam empat bidang utama, yaitu Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan ekonomi, bidang infrastruktur dan pelayanan publik, bidang lingkungan hidup dan permukiman, serta bidang sosial dan budaya. Empat isu strategis pembangunan Kota Depok yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1) Isu Strategis Bidang SDM dan Ekonomi Daya saing daerah yang dicirikan oleh tingginya kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditopang oleh kewirausahaan dan ekonomi kreatif.
2) Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Pelayanan Publik Infrastruktur fisik dan non fisik yang terintegrasi, efisien dan ramah lingkungan untuk menunjang kualitas layanan masyarakat yang optimal.
3) Isu Strategis Bidang Lingkungan hidup dan Permukiman Kualitas permukiman dan lingkungan hidup yang baik dan terjaga secara berkelanjutan.
4) Isu Strategis Bidang Sosial dan Budaya Kehidupan masyarakat yang ramah dan dinamis, bercirikan kuatnya nilai-nilai keluarga dan terpeliharanya kebhinnekaan

Dari isu strategis besar ini, dapat diturunkan beberapa isu strategis turunan Tahun 2024, yaitu :

1. Infrastruktur fisik terintegrasi dan berkelanjutan
    a. Kebutuhan pergerakan masyarakat di internal kota dan antar wilayah kota belum cukup terlayani dengan jaringan dan kapasitas jalan serta transportasi publik yang ada
    b. Perencanaan kawasan belum diintegrasikan dengan pengembangan transportasi publik
2. Kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan sejahtera
    a. Stunting : Indonesia dalam RPJMN menargetkan 14 % di tahun 2024; Presentase angka stunting di kota depok adalah 3,48% (3,637 anak); Intervensi belum sepenuhnya ditujukan pada kelompok sasaran prioritas, yaitu remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, anak bawah dua tahun (baduta), ibu menyusui, dan balita
    b. Kemiskinan: Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem 0% di tahun 2024; Pada Tahun 2022, angka kemiskinan Kota Depok menurun tetapi garis kemiskinan meningkat.
    c. Pembangunan SDM berkelanjutan untuk menangani percepatan pembangunan manusia dan penanganan masalah sosial.
3. Permukiman dan lingkungan hidup yang layak huni
    a. Meningkatnya luas kawasan kumuh Ringan akibat kurangnya upaya pencegahan kumuh baru
    b. Masih rendahnya akses aman air limbah

c. Kapasitas TPA Cipayung telah terlampaui, sementara volume timbulan sampah yang dapat dibuang ke TPPAS regional terbatas
d. Meningkatnya limpasan permukaan akibat meningkatnya lahan terbangun dan perubahan iklim belum diikuti dengan ketersediaan jaringan drainase dan pengendali banjir yang memadai

4. Penguatan daya saing daerah melalui ekonomi kreatif, urban farming dan pariwisata
   a. Peningkatan sarana dan prasarana, perluasan promosi serta akses pemasaran produk UMKM guna peningkatan daya serap tenaga kerja
   b. Transformasi digital bagi UMKM dengan pendekatan berbasis ekosistem, baik dari sisi produksi maupun pemasaran melalui kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder
   c. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berorientasi pada penciptaan wirausaha baru di bidang industri kreatif, standarisasi dan sertifikasi kompetensi
   d. Pengembangan urban farming yang berorientasi ekologi dan ekonomi berbasis teknologi dan kolaborasi komunitas
   e. Penciptaan iklim investasi yang terbuka dan efisien melalui kemudahan layanan perijinan dan non perijinan berbasis layanan digital, serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru khususnya industri non polutan
   f. Pengembangan ekonomi kreatif dan kawasan wisata terpadu perkotaan (urban tourism)
5. Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
   a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peralatan pendukung pelayanan publik
   b. Meningkatkan kemampuan merencanakan, memonitor dan mengevaluasi keterkaitan perencanaan Perangkat Daerah dengan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah melalui penerapan teknologi informasi (Digital Governance).

Tabel. 4.5. Keselarasan Arah Kebijakan Nasional dan Isu Strategis Pembangunan Kota Depok Tahun 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Isu Strategis Kota Depok Tahun 2024
Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan	Daya Saing Daerah yang Dicirikan oleh Tingginya Kualitas SDM dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Ditopang oleh Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif
Mendorong pemulihan dunia usaha	
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	Infrastruktur Fisik dan Non Fisik yang Terintegrasi, Efisien dan Ramah Lingkungan untuk Menunjang Kualitas Layanan Masyarakat yang Optimal
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	Kualitas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Terjaga secara Berkelanjutan
	Kehidupan Masyarakat yang Ramah dan Dinamis, Bercirikan Kuatnya Nilai-Nilai Keluarga dan Terpeliharanya Kebhinekaan

Sumber: Bappeda, Tahun 2023, diolah

Isu Strategis dari KLHS Kota Depok

Terdapat 5 isu yang ditetapkan sebagai isu prioritas dalam KLHS RPJMD sebagai berikut :

1. Air bersih dan sanitasi layak (TPB 6)
2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (TPB 8)
3. Kota dan permukiman yang berkelanjutan (TPB 11)
4. Kehidupan sehat dan sejahtera (TPB 3)
5. Kemitraan untuk mencapai tujuan (TPB 17)

Arahan kebijakan dan program untuk mencapai TPB prioritas tersebut dapat dijelaskan melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.6. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Pemerataan akses terhadap air minum layak dan berkelanjutan	Peningkatan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Peningkatan dan pengembangan infrastruktur terhadap akses air minum	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Penjaminan kemudahan akses terhadap air minum sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
		Program Perekonomian dan Pembangunan
	Peningkatan kuantitas dan kualitas air minum melalui kerjasama dan pengembangan teknologi	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Hubungan Industrial
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
Pemerataan akses terhadap layanan sanitasi aman dan dan kebersihan yang memadai	Pengelolaan dan pengendalian pencemaran air limbah domestik dan limbah industri	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	Pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana sanitasi dan pengelolaan limbah domestik dan limbah industri	Program pengembangan permukiman
		Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
	Pengembangan layanan kesehatan dan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hidup sehat dan menjaga kelestarian lingkungan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		Hidup untuk Masyarakat
	Penjaminan sanitasi layak sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Tabel 4.7. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Peningkatan PDRB dan laju pertumbuhan PDRB per kapita	Perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi serta pengembangan di bidang perekonomian secara strategis dan transparan.	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Peningkatan kapasitas dan produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, serta peningkatan keterbukaan akses terhadap informasi kesempatan kerja.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Hubungan Industrial
	Pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui kemitraan, kemudahan perizinan, dan penguatan kelembagaan, serta pengembangan iklim kewirausahaan terutama bagi usia muda.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Peningkatan iklim penanaman modal.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Program Promosi Penanaman Modal
		Program Pelayanan Penanaman Modal
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Regulasi dan promosi di bidang perdagangan lokal maupun ekspor.	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
		Program Pengembangan Ekspor
	Perencanaan, pengendalian, dan regulasi yang tertib di bidang perindustrian.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kota
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara (dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19)	Perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan promosi pariwisata yang berkelanjutan.	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas dan perlindungan SDM yang bekerja di dalamnya, serta penyediaan fasilitas pendukung.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Perencanaan Perekonomian dan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
		Sumber Daya Alam
	Pengembangan wisata olahraga rekreasi, kebudayaan, dan sejarah, serta pengelolaan objek-objek wisata yang terkait.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Pengembangan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021 – 2026

Tabel 4.8. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana	Penanggulangan dan penanganan bencana.	Program Penanggulangan Bencana
		Program Penanganan Bencana
		Program Penanggulangan Kebakaran
	Penyediaan infrastruktur untuk penanganan dan peningkatan kapasitas adaptasi dalam menghadapi bencana	Program Pengembangan Perumahan
		Program Penyelenggaraan Jalan
	Penyediaan fasilitas, layanan, dan SDM kesehatan untuk korban terdampak bencana.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya persentase sampah perkotaan yang tertangani	Pengelolaan sampah terpadu dari tingkat sumber hingga ke tingkat perkotaan dan regional.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan Persampahan
	Perencanaan, penataan, dan penyediaan infrastruktur untuk pengelolaan sampah di lingkungan permukiman.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
		Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Menurunnya kemacetan, dan meningkatnya jangkauan angkutan umum perkotaan	Penguatan regulasi, edukasi, pengadaan, dan pengelolaan sarana prasarana transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Tabel 4.9. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Penurunan angka kematian bayi dan balita	Peningkatan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak dan penurunan perkawinan usia anak	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan melalui peran posyandu dan penyuluhan imunisasi	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
	Peningkatan mutu gizi, ketahanan dan	Program pemenuhan upaya kesehatan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
	keamanan pangan bagi ibu hamil, bayi dan balita	perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
		Program Penanganan Kerawanan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan
Mengakhiri epidemi dan penyakit menular lainnya	Peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan, pencegahan, dan pengendalian penyakit menular, tidak menular, dan epidemi bagi semua gender dan kalangan masyarakat	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
	Peningkatan penelitian dan pengembangan terkait epidemi, penyakit menular dan tidak menular	Program penelitian dan pengembangan daerah
	Pembinaan dan pemantauan terkait pencegahan epidemi dan penyakit menular bagi semua gender dan kalangan masyarakat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
		Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
	Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Tabel 4.10. Arahan Kebijakan dan Program Terhadap Pencapaian TPB 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Outcomes	Arahan Kebijakan	Arahan Program
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik	Peningkatan perencanaan dan penyusunan anggaran terkait aturan mengenai pajak dan keuangan daerah	Pogram Pengelolaan Keuangan Daerah
	peningkatan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Evaluasi keuangan dan kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Depok Tahun 2024 merupakan implementasi pelaksanaan arah kebijakan dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2022, perkiraan capaian di tahun 2023 serta isu-isu strategis pembangunan di tahun 2024.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2024 adalah Memantapkan kehidupan Kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera melalui peningkatan pelayanan dasar dengan berdasarkan hasil isu strategis, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Depok Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
2. Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
4. Peningkatan Kualitas Permukiman
5. Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
6. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
7. Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
8. Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
9. Peningkatan Nilai-nilai Keluarga
10. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Secara ringkasnya, untuk melihat keterkaitan masalah, isu strategis dan program prioritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026

Masalah	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 (untuk Tahun 2024)	Prioritas Pembangunan
Kemacetan dan Penataan Kota	Infrastruktur fisik terintegrasi dan berkelanjutan	1. Mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan melalui penyediaan perlengkapan jalan baik statis maupun dinamis berbasis teknologi 2. Meningkatkan konektivitas dalam kota dan konektivitas dengan wilayah perbatasan melalui pembangunan ruas jalan baru, peningkatan kapasitas ruas jalan dan simpang, serta penyediaan fasillitas pejalan kaki dan pesepeda 3. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan prasarana angkutan umum melalui pengembangan jaringan trayek, pengembangan sistem informasi angkutan umum, penyediaan halte dan shelter, fasilitasi park and ride, serta peningkatan layanan dan simpul transportasi	**Prioritas 1** Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
Stunting	Kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan sejahtera	1. Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar,cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan peran puskesmas melalui program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 2. Peningkatan aksi dalam pembudayaan gerakan	**Prioritas 2** Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat

Masalah	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 (untuk Tahun 2024)	Prioritas Pembangunan
		masayarakat sehat berbasis teknologi informasi	
Sumber Daya Manusia berkelanjutan	Kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan sejahtera	1. Meningkatkan Aksesibilitas, Kuantitas dan Kualitas Pendidikan serta menanamkan Nilai-Nilai 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjangnya dengan pendekatan prioritas wilayah secara proporsional untuk mencapai mutu pendidikan sesuai 8 standar nasional.	**Prioritas 3** Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
Penataan Kawasan Kumuh, Sanitasi– Penuntasan ODF	Permukiman dan lingkungan hidup yang layak huni	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efisien dan berkelanjutan dengan memperkuat kelembagaan penataan ruang dan partisipasi publik 2. Mengurangi dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru dengan menyediakan dan memelihara PSU perumahan dan kawasan permukiman 3. Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan septiktank individual, IPAL Komunal dan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta meningkatkan kualitas effluen 4. Peningkatan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA, dan pemanfaatan mata air di wilayah yg rawan air	**Prioritas 4** Peningkatan Kualitas Permukiman
Rendahnya digital infrastruktur perkotaan	Infrastruktur fisik terintegrasi dan berkelanjutan	1. Menerapkan SPBE di semua perangkat daerah yang mengacu pada pedoman/standar dan melakukan pengintegrasian antar layanan SPBE.	**Prioritas 5** Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

Masalah	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 (untuk Tahun 2024)	Prioritas Pembangunan
Banjir	Kualitas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Terjaga secara Berkelanjutan	1. Menjaga dan meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta memperkuat peran masyarakat dan badan usaha dalam konservasi sumber daya air dan tata kelola air yang berkelanjutan	**Prioritas 6** Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
Persampahan	Kualitas Permukiman dan Lingkungan Hidup yang Baik dan Terjaga secara Berkelanjutan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mengurangi pencemaran serta kerusakan lingkungan 2. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R dan pemanfaatan teknologi	**Prioritas 7** Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
Kemiskinan, Masih rendahnya daya saing ekonomi	Penguatan daya saing daerah melalui ekonomi kreatif, urban farming dan pariwisata	1. Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru dibidang industri kreatif 2. Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian perkotaan melalui teknologi dan digitalisasi 3. Meningkatkan investasi daerah 4. Mendorong perusahaan/ industri untuk melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor 5. Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga 6. Peningkatan aksi dalam pembudayaan gerakan masayarakat sehat berbasis teknologi informasi	**Prioritas 8** Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
Sumber Daya Manusia berkelanjutan	Kehidupan sosial masyarakat yang sehat dan sejahtera	1. Penerapan SPM Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dan peningkatan kapasitas SDM pemberi layanan Kesejahteraan Sosial 2. Peningkatan pemahaman nilai-nilai keagamaan, Wawasan Kebangsaan dan Kebhinekaan, serta Partisipasi Politik 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya keluarga serta peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga 4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak anak serta pelayanan perlindungan anak berbasis digital 5. Meningkatkan akses keluarga miskin/rentan dalam pendidikan, perlindungan dan jaminan sosial	**Prioritas 9** Peningkatan Nilai-nilai Keluarga
Reformasi Birokrasi	Infrastruktur fisik terintegrasi	1. Mendorong tumbuhnya budaya	**Prioritas 10**

Masalah	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD 2021-2026 (untuk Tahun 2024)	Prioritas Pembangunan
	dan berkelanjutan	inovasi dan apresiasi terhadap inovasi di perangkat daerah 2. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta pengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif 3. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Bappeda 2023, diolah

Penjelasan tentang sasaran, strategi, arah kebijakan dalam setiap prioritas pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.12 sampai 4.21 berikut ini.

Tabel 4.12. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pembangunan Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik	1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)	C (0,72)	Meningkatkan manajemen lalu lintas dan prasarana transportasi yang berkeselamatan	Mewujudkan ruas jalan yang berkeselamatan melalui penyediaan perlengkapan jalan baik statis maupun dinamis berbasis teknologi	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata	26,5 km/jam	60.127.411.877	Dinas Perhubungan
							Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	68,68%	169.857.763.765	Dinas PUPR
TOTAL ANGGARAN										**229.985.175.642**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.13. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masayarakat	5.1.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	58,25	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) dengan penerapan Sistem Kesehatan Daerah berbasis teknologi informasi	Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar,cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan peran puskesmas melalui program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100,00%	321.964.189.700	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar	80,00%	2.883.626.900	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar	64,00%	516.797.900	Dinas Kesehatan
			Persentase balita stunting	3,24 %	Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan aksi dalam pembudayaan gerakan masyarakat sehat berbasis teknologi informasi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	3.948.481.227	Dinas Kesehatan
TOTAL ANGGARAN										**329.313.095.727**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.14. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	3.1.2. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A	109,17%	Meningkatkan Pengelolaan dan Pemerataan Aksesibilitas Layanan Pendidikan	Meningkatkan Aksesibilitas, Kuantitas dan Kualitas Pendidikan serta menanamkan Nilai-Nilai Budaya Kearifan Lokal Kota Depok dan Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan penunjangnya dengan pendekatan prioritas wilayah secara proporsional untuk mencapai mutu pendidikan sesuai 8 standar nasional.	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM	88,50%	613.574.198.700	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B	93,84%			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77,00%	132.980.900	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		3.1.1. Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila	Indeks Kegemaran Membaca	60,53	Meningkatan budaya Literasi Masyarakat	Pengembangan Perpustakaan Daerah melalui e library dan Peningkatan Layanan Perpustakaan Keliling.	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat	60,53 Poin	1.877.786.400	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
TOTAL ANGGARAN										**615.584.966.000**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.15. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	Peningkatan Kualitas Permukiman	1.1.3. Meningkatnya Kualitas Permukiman	Rasio Permukiman Layak	0,9995	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Mengurangi dan mencegah timbulnya kawasan kumuh baru dengan menyediakan dan memelihara PSU perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana	1,24%	1.138.988.000	Dinas Rumkim
							Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani	92,80%	3.404.346.200	Dinas Rumkim
							Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani	71,57%	35.864.632.335	Dinas Rumkim
			Cakupan Akses Sanitasi Layak	99,41%	Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan septiktank individual, IPAL Komunal dan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT), serta meningkatkan kualitas effluen	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99,17 %	7.619.523.600	Dinas PUPR
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	15,86%	3.017.941.250	Dinas PUPR
TOTAL ANGGARAN										**51.045.431.385**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.16. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	1.1.2. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi	Indeks SPBE	3,72	Membangun infrastruktur digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik	Menerapkan SPBE di semua perangkat daerah yang mengacu pada pedoman/standar dan melakukan pengintegrasian antar layanan SPBE.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika	100,00%	18.434.784.980	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	80,00%	1.522.993.500	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL ANGGARAN										**19.957.778.480**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.17. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	1.1.1. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman	Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahun	6,50%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan drainase dan infrastruktur pengendali banjir serta menjamin ketersediaan air yang berkelanjutan	Menjaga dan meningkatkan kapasitas saluran, sungai dan situ, serta memperkuat peran masyarakat dan badan usaha dalam konservasi sumber daya air dan tata kelola air yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani	74,55%	78.893.841.496	Dinas PUPR
							Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	89,40%	127.537.888.617	Dinas PUPR
TOTAL ANGGARAN										**206.431.730.113**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.18. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Penanganan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7	Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan	1.1.4. Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,86	Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan atribut kota hijau dan berbagai nstrument pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam upaya mengurangi pencemaran serta kerusakan lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu	IKA = 51,79 IKU = 65,88	2.203.868.480	Dinas LHK
							Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3	52,00%	381.909.640	Dinas LHK
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan	90,00%	267.248.000	Dinas LHK
							Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kasus yang tertangani	70,00%	479.933.000	Dinas LHK
			Cakupan Layanan Persampahan	95,80%	Meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemanfaatan teknologi	Meningkatkan pengelolaan sampah dengan pola 3R dan pemanfaatan teknologi	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase komunitas aktif	87,27%	763.509.600	Dinas LHK
							Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH	31,15%	390.500.000	Dinas LHK
							Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	76,10%	134.322.759.166,32	Dinas LHK
TOTAL ANGGARAN										**138.809.727.886,32**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.19. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
8.	Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi	4.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)	113.714,39	Meningkatkan pertumbuhan wirausaha	Mendorong tumbuhnya wirausaha rintisan baru di bidang industri kreatif	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	90,00%	641.032.750	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	100,00%	7.800.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase uji keamanan pangan	100,00%	66.439.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase penyediaan data	100,00%	10.016.900	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	2,00%	50913.142.100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP	100,00%	97.500.800	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian	1,00 %	715.284.700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Layanan RPH	100 %	1.792.744.400	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet	100 %	709.586.950	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
							Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang ber SNI	100 %	11.061.291.150	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Program Stabilisasi Harga Barang	cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga	100 %	667.779.150	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
							Program Pengembangan Ekspor	Persentase IKM yang siap ekspor	19,23 %	1.169.724.400	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelayanan Kemetrologian	100,00%	963.144.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran	60,00%	609.650.100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase industri kecil yang terbina	100,00%	1.268.654.200	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri	100%	119.369.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
							Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional	83,33%	49.999.700	Dinas KUKM
							Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi	65,45%	290.344.750	Dinas KUKM
							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi	28,79%	183.099.500	Dinas KUKM
							Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase peserta pelatihan	100%	488.249.100	Dinas KUKM
							Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi modern	9,09%	1.608.460.400	Dinas KUKM
							Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penambahan Jumlah Kelompok	62,96%	4.299.259.700	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
			Nilai Investasi (milyar rupiah)	8.208,16	Peningkatan daya saing ekonomi	Pengembangan UMKM, pariwisata dan ekonomi	Program Pengembangan Iklim	Persentase dokumen pengembangan iklim	100%	253.890.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					masyarakat berbasis potensi lokal	kreatif, pertanian perkotaan melalui teknologi dan digitalisasi	Penanaman Modal	penanaman modal yang terimplementasikan			Satu Pintu
					Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investas	Meningkatkan investasi daerah	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN	15 Investor	341.563.400	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
							Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi	100,00%	427.950.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan	100,00%	467.705.050	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
							Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase sistem pelayanan data dan sistem	100,00%	1.594.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu
		4.1.2 Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,47%	Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah kota dan masyarakat	Mendorong perusahaan/ industri untuk melaksanakan kolaborasi guna peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	100,00%	110.875.600	Dinas Tenaga Kerja
							Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	66,00%	7.992.461.800	Dinas Tenaga Kerja
							Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan	40,00%	968.269.800	Dinas Tenaga Kerja
							Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan	100,00%	1.843.738.150	Dinas Tenaga Kerja
							Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Jumlah calon Transmigran yang iberangkatkan	100,00%	51.255.000	Dinas Tenaga Kerja
							Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha	Persentase wirausaha baru	100,00%	10.252.714.600	Dinas KUKM

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Mikro (UMKM)				
							Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet	15,26%	9.157.120.900	Dinas KUKM
							Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100,00%	961.837.000	Dinas Sosial
		4.1.3 Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	2,18%	Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan bantuan jaminan sosial bagi masyarakat miskin melalui optimalisasi pengunaan DTKS	Meningkatkan akses keluarga miskin/rentan dalam endidikan, perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial	50,50%	14.934.703.700	Dinas Sosial
							Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial	100,00%	961.837.000	Dinas Sosial
		4.2.1. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Masyarakat Berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat Berolahraga	48%	Menumbuhkan budaya berolahraga di masyarakat	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan masyarakat olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraga an	Jumlah atlit berprestasi	5 orang	15.997.170.000	Disporyata
			Persentase Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	55%	Meningkatkan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Meningkatkan Peran aktif Pemuda yang Mandiri dan Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing	0.23%	891.047.096	Disporyata
TOTAL ANGGARAN										**100.024.828.346**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.20. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Nilai-nilai Keluarga

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	3.1.4. Penguatan Ketahanan Keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga	90,17	Melakukan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif,	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya keluarga serta peran perempuan dalam	Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	2,1	805.085.500	Dinas P3AP2KB

NO	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					multidimensi dan multisector, untuk meningkatkan ketahanan Keluarga	pembangunan ketahanan keluarga					
					Meningatkan kinerja RW ramah anak menuju kota layak anak	Meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan hak anak serta pelayanan perlindungan anak berbasis digital	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	75,3 %	4.090.097.200	Dinas P3AP2KB
							Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Angka Perceraian	3.000 kasus	13.438.304.400	Dinas P3AP2KB
							Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender	74,88 % 93,04 %	784.094.350	Dinas P3AP2KB
							Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan	100%	444.393.400	Dinas P3AP2KB
							Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak	100%	167.386.300	Dinas P3AP2KB
							Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencapaian Strata Kota Layak Anak	Nindya	1.200.249.600	Dinas P3AP2KB
							Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100,00%	1.286.976.250	Dinas P3AP2KB
TOTAL ANGGARAN										**22.216.587.000**	

Sumber: Bappeda, Tahun 2024, diolah

Tabel 4.21. Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Pada Prioritas Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

No	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
10	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	2.1.1. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP Kota	69,78	Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas pelayanan publik, pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data serta mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	63,15%	2.328.888.280	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
							Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	60,00%	81.219.350	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
							Program Kepegawaian Daerah	indeks kepuasan layanan kepegawaian	88,00%	5.939.100.750	BKPSDM
							Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis	100,00%	11.796.122.500	BKPSDM
							Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindak lanjuti Perangkat Daerah	91,80%	2.113.830.850	Inspektorat Daerah
							Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi	91,87%	3.136.489.250	Bappeda
							Program Koordinasi Dan	Persentase Implementasi Program	100,00%	1.999.415.450	Bappeda

No	PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERUBAHAN 2024	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET PERUBAHAN 2024	PAGU ANGGARAN	PD Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	RKPD kedalam APBD			
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,26	Mewujudkan birokrasi yang ramah dan responsif berbasis Teknologi Informatika dan masyarakat		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD	3,3	31.072.686.500	SETDA
							Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Identitas Kependudukan	89,70%	2.520.889.900	Disdukcapil
							Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang tersedia	40,00%	1.078.978.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Program Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil	100,00%	1.053.793.850	Disdukcapil
							Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase aksesibilitas informasi publik	100,00%	4.604.982.600	Dinas Komunikasi dan Informatika
TOTAL ANGGARAN										**69.588.992.480**	

Sumber : Bappeda Tahun 2024 diolah

Program Terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan beberapa program yang mempunyai tujuan menurunkan beban pengeluaran meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan. Untuk mendukung hal tersebut disusun program-program dan kegiatan yang mengacu pada dokumen RPJMD dan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) diantaranya :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Bantuan Pangan, melakukan Verval Data Penerima Bansos Lebih Tepat Sasaran dan penguatan Kelembagaan Puskesos SLRT
2. Program Rehabilitasi Sosial melalui bantuan untuk disabilitas dan Lansia, dan Penanganan PMKS yang lebih tepat dan Berkesinambungan
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat , melalui subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
4. Program Pengelolaan Pendidikan, melalui bantuan Pendidikan bagi siswa miskin SDS/MI Swasta, SMPS/MTs Swasta
5. Program Perbaikan RTLH untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Pemukiman Kumuh melalui Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Pelatihan Kerja

Depok Kota Kreatif

Kota Depok, Jawa Barat, dan Surakarta, Jawa Tengah, diusulkan menjadi perwakilan Indonesia untuk masuk dalam daftar Jaringan Kota-Kota Kreatif UNESCO (UCCN) tahun 2023. Kedua kota tersebut diusulkan sebagai kandidat UCCN 2023 karena dianggap paling memenuhi kriteria dari 19 indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Kota Surakarta dengan bidang kreatif kerajinan dan kesenian rakyat (crafts and folk art) serta Kota Depok di bidang seni (arts) media. Pemerintah Kota Depok memanfaatkan potensi media art sebagai kekuatan untuk membangun daerah. Media art mencakup wilayah yang luas, tidak hanya berupa aplikasi dan gim, tapi ada animasi, robotik, dan lain-lain. Komunitasnya mempunyai peran yang sangat penting dan juga sangat potensial di Depok. Organisasi masyarakat sipil profesional, industri, dan nonpemerintah berperan penting dalam mendorong dan mendukung pertumbuhan, melalui fasilitasi kemitraan inisiasi matchmaking pemerintah daerah dalam bentuk temu bisnis bagi para pelaku ekonomi kreatif. Di Kota Depok terdapat Forum Ekonomi Kota yang secara periodik melaksanakan pertemuan dan workshop.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang selama ini sudah dijalankan oleh pemerintah kota., antara lain program pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha dimulai tahun 2022, meliputi

pelatihan pengembangan aplikasi, digital marketing dan desain grafis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha, akses pasar dan promosi produk, serta meningkatkan omzet. Program pendampingan bagi para pelaku usaha dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota dengan jumlah pendamping sebanyak 80 orang dan tersedia Klinik Bisnis di tingkat kota dan setiap kecamatan. Program inkubasi bisnis bekerja sama dengan Universitas Indonesia sebagai tindak lanjut program unggulan penciptaan 5000 wirausaha baru/startup dan 1000 perempuan pengusaha dimulai tahun 2022 oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Pelatihan ketenagakerjaan yang ditujukan untuk pencari kerja dan pengangguran dengan materi pelatihan bidang digital marketing, gastronomi, dan fashion sejak tahun 2021 oleh Dinas Tenaga Kerja. Pembangunan ruang publik Alun-Alun Kota Depok.

Organisasi yang menjadi focal point dalam melaksanakan rencana kerja creative city, Kota Depok telah membentuk komite ekonomi kreatif. Ketua: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penilitian Pengembangan Daerah, Wakil Ketua: Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Sekretaris: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan Kode Creative Hub.

Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Di samping penjelasan visi dan misi, serta program unggulan, yang nantinya akan dijabarkan hingga program dan indikasi kegiatan, dokumen RPJMD Kota Depok 2021 – 2026 merupakan dokumen strategis yang tepat dalam mengawal janji-janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Terdapat 10 (sepuluh) janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang telah disampaikan secara publik. Kesepuluh janji tersebut merepresentasikan keinginan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mencapai Depok unggul, nyaman, dan religius. Adapun kesepuluh janji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.22. sebagai berikut :

Tabel 4.22. Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
1	DANA 5 MILYAR PER-KELURAHAN	Program alokasi 5 Milyar per Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan sarana prasarana masyarakat kelurahan yang dilaksanakan dengan mengedepankan prinsisp swadaya masyarakat yang dilakukan dan diusulakn oleh stakholders lingkup kelurahan dan dilaksanakan bersama antara pemerintah dan masyarakat serta kegiatan yang bersifat *top down* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai prioritas pembangunan.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dan Program sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	54 Kelurahan Kelurahan yang belum mencapai 5 M alokasi : 1. Kel. Bojongsari 2. Kel. Bojongsari Baru 3. Kel. Duren Mekar 4. Kel. Curug Kec. Bojongsari 5. Kel. Pangkalan Jati Baru 6. Kel. Pangkalan Jati 7. Kel. Beji Timur 8. Kel. Cipayung Jaya 9. Kel. Kalibaru	57 Kelurahan Kelurahan yg belum mencapai 5 M alokasi : 1. Kel. Bojongsari Baru 2. Kel.Sawangan Baru 3. Kel. Pangkalan Jati 4. Kel. Pangkalan Jati Baru 5. Kel. Beji Timur 6. Kel. Cilodong	Urusan Kewilayahan
2	5000 PENGUSAHA / STARTUP BARU DAN 1000 PEREMPUAN PENGUSAHA	Prioritas kegiatan untuk starup/Wira Usaha Baru dan perempuan kepala keluarga atau kurang mampu dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga melalui	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Program	2.110 orang	2.114 orang	Urusan KUKM, PPPA

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		kegiatan pelatihan dan fasilitasi oleh dinas terkait.	Pengembangan UMKM			
3	INSENTIF GURU HONORER DAN GURU SWASTA	Peningkatan kesejahteraan guru honorer dan guru swasta melalui pemberian honor setiap bulan kepada guru swasta dan honorer Sekolah Negeri yang merupakan kewenagan Pemda	Program Pengelolaan Pendidikan	Guru Honorer SD 1.596 Guru Honorer SMP 543 Gusu Swasta PAUD 5.828 Guru Kesetaraan 471 Guru SD/MI swasta 3.790 Guru SMP/MTs Swasta 3.269	Guru Honorer SD 1.571 Guru Honorer SMP 666 Gusu Swasta PAUD 6.034 Guru Kesetaraan 524 Guru SD/MI swasta 4.000 Guru SMP/MTs Swasta 3.269	Urusan Pendidikan
4	ALUN-ALUN DI WILAYAH BARAT & TAMAN HUTAN KOTA DI WILAYAH BARAT	Pembangunan alun-laun berkonsep penghijauan atau hutan kota yang dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, penelitian/observasi	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	FS, Site Topografi, DED & Dok. Lingkungan (UKL-UPL)	1 Unit Konstruksi , 1 Dokumen	Urusan Lingkungan Hidup
5	INSENTIF PEMBIMBING ROHANI	Peningkatan kesejahteraan bagi para pembimbing rohani secara proporsional diberikan setiap bulan dalam rangka meningkaykan kesejahteraan para pembimbing rohani di Kota Depok dan dalam upaya	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	1.500 orang	2.000 orang	Pendukung Urusan/ Setda

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
		mewujudkan nilai-nilai keagamaan di Kota Depok				
6	INSENTIF RT, RW DAN LPM	Peningkatan kesejahteraan dalam bentuk biaya operasional kepada RT, RW dan LPM SeKota Depok yang diberikan setiap bulan guna menunjang opersiaonal RT, RW dan LPM dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan kerja	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	RT 5.337 RW 927 LPM 63	RT 5.391 RW 930 LPM 63	Urusan Kewilayahan
7	PUSAT OLAHRAGA DAN PUSAT UMKM	Pembangunan pusat olahraga disetiap Kecamatan yang diinetgrasikan dengan sarana UMKM dengan meningkatkan fungsi sarana prasarana yang sudah tersedia serta mengintegrasikan dengan kegiatan ekonomi berupa sarana penunjang sarana olahraga yiitu sarana UMKM yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4 unit • (Lapangan Pusaka - Bojongsari) • Lapangan Godham Mampang - Pancoran Mas • (Lapangan Jembatan Serong - Cipayung) • (Lapangan Jembatan Serong - Cipayung)	3 unit • (Lapangan Irekap - Cilodong) • Lapangan Kukusan, Beji) • Lapangan Pemuda (Limo-Cinere)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Rumkim, KUKM

No	Janji Politik/ Kampanye	Kegiatan	Program/Sub Kegiatan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)
8	WIFI GRATIS UNTUK MASYARAKAT	Pemasangan WiFi gratis disetiap RW sesuai kebutuhan masing-masing wilayah secara proporsional	Program Aplikasi Informatika	1.586 titik	880 titik	Urusan Kominfo
9	SEKOLAH/ MADRASAH NEGERI PER-KECAMATAN (SMPN/MTsN)	Pembangunan Sekolah/Madrasah Negeri pada setiap Kecamatan dengan upaya membangun sekolah baru atau meningkatkan kapasitas dan daya tampung sarana prasana yangtersedian sesuai kewenangan Pemda	Program Pengelolaan Pendidikan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 area : (Pengadaan Tanah Untuk Gedung Pendidikan di Kec.Limo (untuk SMP 13) dan di Kec.Cilodong.)	1 area (Pengadaan Tanah Untuk Gedung Pendidikan)	Urusan Pendidikan dan Rumkim
10	POSYANDU DAN POSBINDU SETIAP RW	Pembangunan Posyandu disetiap RW difokuskan pada RW yang belum memiliki posyandu atau posyandu berlokasi di tempat tinggal Warga Masyarakat serta pemberian insentif kepada kader secara proporsional	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pembebasan lahan 49 titik Insentif kader Posyandu : 10.529 orang Insentif kader posbindu 4.505 orang	Pembebasan lahan 112 titik Insentif kader Posyandu : 10.470 orang Insentif kader posbindu 4.385 orang	Urusan Kewilayahan dan Rumkim

Sumber : Bappeda, Tahun 2024, diolah

4.2.5 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi

Sinkronisasi dan keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pembangunan Kota Depok dilihat dari data yang ada dalam dokumen Rancangan Awal RKP 2024, Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat 2024, dan Rancangan Awal RKPD Kota Depok 2024. Proritas pembangunan Kota Depok 2024 diadopsi dari RPJMD Kota Depok 2021-2026. Sinkronisasi Nasional-Jawa Bara-Kota Depok tersebut dilakukan dengan cara menyandingkan 3 (tiga) hal: prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan (Nasional, Provinsi, dan Kota), hasilnya disajikan pada tabel dan paragraf berikut ini.

Tabel 4.23. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Depok 2024 dengan Pembangunan Nasional 2024 dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024

Prioritas Nasional Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2024	
PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan Berkeadilan	P1	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata	P5	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
				P8	Daya Saing Dan Ketimpangan Ekonomi
PN 2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	P5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	P1	P1 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
				P4	Peningkatan Kualitas Permukiman
				P6	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
				P7	Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
PN 3	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	P2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	P2	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat
		P3	Penguatan Sistem Kesehatan Daerah	P3	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Prioritas Nasional Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2024		Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2024	
PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	P2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	P3	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat
		P6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P10	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	P5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	P1	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah Dan Optimalisasi Transportasi Publik
				P4	Peningkatan Kualitas Permukiman
				P6	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
				P7	Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
				P10	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	P4	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	P4	Peningkatan Kualitas Permukiman
		P5	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa	P6	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan
				P7	Penanganan Dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan
PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	P6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	P10	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Sumber : Rancangan RKP 2024, Rancangan Awal RKPD Jawa Barat 2024, RPJMD Kota Depok 2021-2026, Tahun 2023, diolah

Sinkronisasi Sasaran

Sinkronisasi sasaran pembangunan Daerah Kota Depok dilakukan dengan cara mencermati Tabel sandingan antara Sasaran Pembangunan Jawa Barat 2024 dengan Sasaran Pembangunan Nasional 2024 (Tabel ini diadopsi dari dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat 2024). Pada Tabel tersebut Kolom dengan judul "Sasaran RKP 2024", berdasarkan penelusuran dokumen yang ada, content "Sasaran RKP 2024" tersebut diadopsi dari dokumen RPJMN 2020-2024. Berdasarkan tabel tersebut, kemudian dilakukan identifikasi sasaran pembangunan Kota Depok 2024 (sasaran ini diadopsi dari RPJMD Kota Depok 2021-2026). Hasil identifikasi tersebut disandingkan, hasil penyandingan disajikan pada tabel berikut ini.Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Depok tahun 2024 dengan sasaran pembangunan nasional tahun 2024 dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.24. Persandingan antara Sasaran Prioritas Nasional pada RKP 2024, Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Jawa Barat 2024 dengan Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Depok 2024

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2024	
SN 1	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
SN 2	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan	S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2024	
	penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi		saing dan penempatan tenaga kerja		
		S3.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	1.1.1	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman
SN 4	Terjaganya pertumbuhan ekonomi di tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S2. 2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		S2. 3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	4.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
SN 5	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S1. 5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	3.1.4	Penguatan Ketahanan Keluarga
SN 6	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	3.1.3	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan
		S1. 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
SN 8	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S1. 4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	3.1.4	Penguatan Ketahanan Keluarga
		S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan	3.1.2	Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2024	
			menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi		Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan
SN 9	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S1. 3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	1.1.3 5.1.1 4.1.3 3.1.3	Meningkatnya Kualitas Permukiman Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Menurunkan Angka Kemiskinan Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan
SN 10	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	3.1.2	Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan
SN 11	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	3.1.1 3.1.3	Terwujudnya Pembangunan Kebudayaan yang Mengembangakan Potensi Lokal dan Nilai-nilai Pancasila Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan
SN 12	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan pembangunan	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	3.1.2	Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2024	
		S4. 3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi
SN 15	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa			3.1.4	Penguatan Ketahanan Keluarga
SN 16	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S1. 1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	3.1.2	Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan
		S4. 3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi
SN 17	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	1.1.1	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman
				1.1.2	Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi
				1.1.3	Meningkatnya Kualitas Permukiman
		S3. 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
SN 18	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	1.1.1	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2024	
SN 19	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	1.1.1	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman
SN 20	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S3. 1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	1.1.1	Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman
				1.1.3	Meningkatnya Kualitas Permukiman
		S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
SN 21	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	1.1.2	Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi
SN 22	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S3. 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
		S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
SN 23	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S3. 2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
		S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau
SN 24	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*	S3. 3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	1.1.4	Terwujudnya Penyelenggaraan Kota Hijau

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Depok Tahun 2024	
SN 25	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	3.1.3	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan
SN 26	Optimalnya kebijakan luar negeri	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi
SN 27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi
SN 28	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	S4. 2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	2.1.1	Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi
SN 29	Terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S4. 1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	3.1.3	Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2023, data diolah

Berdasarkan sinkronisasi sasaran pembangunan nasional-provinsi-kota, dapat dilihat bahwa beberapa sasaran pembangunan Daerah Kota Depok 2024 memiliki dukungan/kontribusi terhadap sasaran pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024 dan sasaran Pembangunan Nasional 2024. Terdapat beberapa sasaran Pembangunan Kota Depok yang memiliki kontribusi terhadap satu atau lebih sasaran di level provinsi dan nasional.

Adapun keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional dengan indikator prioritas pembangunan Kota Depok dapat dilihat dalam tabel berikut dimana iindikator sasaran prioritas Kota Depok terkait dengan indikator prioritas nasional.

Tabel 4.25. Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP 2024, Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Provinsi Jawa Barat 2024 dengan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah pada RKPD Kota Depok 2024

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024		Indikator Sasaran Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Depok Tahun 2024
SN 1	Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)
SN 2	Rasio kewirausahaan nasional (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)
	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	
	Pertumbuhan PDB perikanan (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	
	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor industri (%)	
	Kontribusi PDB industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor industri (%)	
	Nilai devisa pariwisata (miliar)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	
	Kontribusi PDB pariwisata (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	
	Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 2. Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	Nilai Investasi
	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	
	Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	
SN 4	Laju pertumbuhan PDRB KBI (%/tahun)	1. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024		Indikator Sasaran Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Depok Tahun 2024
		2. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%) 3. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	Nilai Investasi
	IPM KBI (nilai min–maks)	1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Persentase balita stunting
		2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B"
		3. Rata-rata lama sekolah (Tahun)	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B"
		4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp.000)	Konsumsi Rumah Tangga (adhb) (Milyar rupiah)
	Persentase penduduk miskin KBI (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Angka Kemiskinan
SN 5	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Ketahanan Keluarga
	Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Indeks Ketahanan Keluarga
SN 6	Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Persentase PPKS yang tertangani
SN 7	Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
	Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting (%)	Persentase balita stunting

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024		Indikator Sasaran Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Depok Tahun 2024
	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	Persentase merokok penduduk usia 10– 18 tahun (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	
	Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai) Membaca (nilai) Sains Nilai)	Rata–Rata Lama Sekolah (Tahun)	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket A 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata–Rata Lama Sekolah (Tahun)	
	Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
SN 8	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	Indeks Ketahanan Keluarga
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Poin)	
SN 9	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Rasio Permukiman Layak Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Persentase balita stunting Angka Kemiskinan Persentase PPKS yang tertangani
SN 10	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rata–Rata lama sekolah (Tahun)	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket
	Jumlah PT yang masuk ke dalam worldclass university (PT)	Rata–Rata lama sekolah (Tahun)	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024		Indikator Sasaran Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Depok Tahun 2024
	Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%) Peringkat Global Innovation Index	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	
SN 11	Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Jumlah warisan budaya yang ditetapkan oleh Walikota Persentase Ekpresi Budaya
	Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)		Indeks Kerukunan Umat Beragama
SN 12	Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/Paket Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B
SN 13	Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)		Indeks Kerukunan Umat Beragama Persentase Capaian SPM Trantibum
SN 14	Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)		Indeks Kerukunan Umat Beragama
SN 15	Indeks Pembangunan Keluarga (nilai)		Indeks Ketahanan Keluarga
SN 16	Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	Indeks Inovasi Daerah
SN 17	Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	1. Rasio Permukiman Layak 2. Cakupan Akses Sanitasi Layak 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 4. Cakupan Layanan Persampahan
	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	Tingkat Konektivitas (%)	1. Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) 2. Moda Share Transportasi Umum
	Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	Nilai Tukar Petani (Poin)	Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahu
		Indeks Penggunaan Air (Poin)	Persentase terjadinya genangan > 2 kali setahu

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024		Indikator Sasaran Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Depok Tahun 2024
	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif, %)		Cakupan Akses Air Minum
SN 18	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/100 km)	Tingkat Konektivitas (%)	1. Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) 2. Moda Share Transportasi Umum
	Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	Tingkat Konektivitas (%)	
	Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%) Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%)	Tingkat Konektivitas (%)	
SN 19	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Tingkat Konektivitas (%)	
	Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	Persentase rumah tangga hunian layak (%)	Rasio Permukiman Layak Cakupan Akses Sanitasi Layak Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Cakupan Layanan Persampahan
SN 20	Rasio elektrifikasi (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service)
	Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita) Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Pengeluaran per kapita (Rp. 000)	Rasio Permukiman Layak
	penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
SN 22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
SN 23	Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB (%)	Indeks Risiko bencana (Poin)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
SN 24	Persentase penurunan emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
SN 25	Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024		Indikator Sasaran Prioritas Daerah Prov Jawa Barat Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Depok Tahun 2024
	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	1. Nilai SAKIP Kota 2. Opini BPK 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Indeks Inovasi Daerah
SN 26	Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	1. Nilai SAKIP Kota 2. Opini BPK 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Indeks Inovasi Daerah
SN 27	Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Kepuasan Masyarakat
SN 28	Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Kepuasan Masyarakat
SN 29	Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Kerukunan Umat Beragama

Sumber:

1. RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026.
2. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Rancangan Awal).

4.2.6 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional (PN)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada Prioritas Nasional (PN) digambarkan dengan cara menyusun persandingan keterkaitan antara Program Prioritas Daerah Kota Depok tertentu (sebagaimana telah dijelaskan pada subab sebelumnya) dengan Nonmenklatur Kegiatan prioritas dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Persandingan keterkaitan tersebut disusun dengan cara:

a. Pertama, mencermati nomenklatur kegiatan prioritas pada PN,
b. Kedua, mengidentifikasi nomenklatur program daerah (beserta indikator program) yang diperkirakan berkesesuaian,
c. Ketiga, menyusun tabel/matrik yang memperlihatkan dua kolom nomenklatur tersebut dalam satu baris yang sama

4.2.6.1 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023 (PN 01)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2023 (PN 01) dapat dilihat pada tabel berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 01 adalah sebanyak 37 kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 96 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 01 adalah 259%

Tabel 4.26. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2024 (PN 01)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Infrastruktur Unggul : 1. Infrastruktur Konektivitas Wilayah 2. Infrastruktur Kawasan Permukiman 3. Energi Unggul	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati				
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kasus yang tertangani
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase komunitas aktif
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		4. Peningkatan pemenuhan energi domestik			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
		5. Pengembangan industri pendukung EBT			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri
2	Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Irigasi	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentasse dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase uji keamanan pangan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase penyediaan data
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Layanan RPH
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Veteriner	
					Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase dokumen yang tersusun
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang ber SNI
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase IKM yang siap ekspor
					Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelayanan Kemetrologian
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penambahan Jumlah Kelompok
		2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan DAS	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainasedalam kondisi baik
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai
		4.Pengembangan waduk multiguna	Pengembangan	1. Program Pengelolaan	Program Pengelolaan Sumber Daya	Persentase genangan

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
			Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sumber Daya Air	Air (SDA)	tertangani
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainasedalam kondisi baik
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelayanan Kemetrologian
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 6. Program Penyuluhan Pertanian	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase penyediaan data
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penambahan Jumlah Kelompok
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase penyediaan data
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Layanan RPH
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional				
4	Peningkatan pengelolaan	1. Peningkatan produksi,	Penguatan	1. Penyediaan dan	Program Pengelolaan Perikanan	Persentase penyediaan data

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
	kemaritiman, perikanan dan kelautan	produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Penyuluhan Pertanian	Tangkap	
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penambahan Jumlah Kelompok
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiyaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penambahan Jumlah Kelompok
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengan (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentasse dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase uji keamanan pangan
					Program Pengolahan Dan	Persentase Unit pengolahan

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Pemasaran Hasil Perikanan	ikan yang diberikan rekomendasi SKP
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi		1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 2. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Presentase peserta pelatihan
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi modern
		4. Peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru
		5. Peningkatan nilai tambah usaha sosial		1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				UMKM		Masyarakat
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase indutri kecil yang terbina
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata 4. Program Pengembangan Kebudayaan 5. Program Pelestariaan dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Promosi Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				Modal 5. Program Pelayanan Penanaman Modal 6. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja		terdaftar yg ditempatkan
					Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan
		4. Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase dokumen yang tersusun
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan
					Program Hubungan Industrial	Persentase Kasus yang diselesaikan
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				2. Program Pengembangan UMKM		
		5. Pengembangan industri halal	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor			Program Pengembangan Ekspor	Persentase IKM yang siap ekspor
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase IKM kecil yang mengikuti pameran
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pelayanan Kemetrologian
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase indutri kecil yang terbina

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 4. Program Pengembangan UMKM		
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pemasaran Pariwisata	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase indutri kecil yang terbina
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 4. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Presentase indutri kecil yang terbina
		3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	cakupan ketersediaan informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM 3. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri

Sumber:
1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023.

4.2.6.2 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan RKP 2024 (PN 02)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan RKP 2024 (PN 02) dapat dilihat pada Tabel 4.27 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 02 adalah sebanyak 6 kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 44 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 02 adalah 733%.

Tabel 4.27. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan RKP 2024 (PN 02)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Infrastruktur Unggul : 1. Infrastruktur Konektivitas Wilayah 2. Infrastruktur Kawasan Permukiman 3. Energi Unggul	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana
					Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase genangan tertangani Persentase drainasedalam kondisi baik

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kasus yang tertangani
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN
					Program Pelayanan penanaman modal	Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Prosentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase sistem pelayanan data dan sistem
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan
		2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
		3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penaatan Bangunan dan Lingkungannya		
		4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Gerakan membangun desa	1. Program Administrasi Pemerintahan Desa 2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Penataan Organisasi	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase genangan tertangani
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainasedalam kondisi baik
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan
					Program Perencanaan Tenaga Kerja	Presentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yg ditempatkan
					Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai
					Program Aplikasi dan Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	

Sumber:

1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.

2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023

4.2.6.3 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2024 (PN 03)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan RKP 2024 (PN 03) dapat dilihat pada Tabel 4.28 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 03 adalah sebanyak 26 kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 49 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 03 adalah 188%.

Tabel 4.28. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP 2024 (PN 03)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing						
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan	Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	Pemerintahan Unggul:	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Identitas Kependudukan
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan			Program Pencatatan Sipil	Layanan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil
		3. Pendampingan layanan terpadu	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi	1. Program Pelayanan Penanaman Modal	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
					Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
			kerakyatan berbasis inovasi			
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Inovasi Pelayanan Publik dan penataan daerah	Pemerintahan Unggul:	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran			Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial
		3. Perlindungan sosial adaptif			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD
		4. Kesejahteraan sosial			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Upaya Kesehatan Masyarakat	(SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik pemda sesuai standar
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		3. Peningkatan pengendalian penyakit			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
						standar
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV
					Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat
		2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun			Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV
					Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencapaian Strata Kota Layak Anak
		3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan			Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
		4. Penjaminan mutu pendidikan			Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
		5. Peningkatan tata kelola			Program Pengelolaan	Rata-rata capaian APM

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		pendidikan			Pendidikan	
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak	Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Resiko Bencana	Kesejahteraan Unggul: 1. Perempuan Unggul 2. Peningkatan Kesejahteraan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan
		3. Kualitas pemuda			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan
		3. Reformasi agraria	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Izin Lokasi 2. Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Program Pengelolaan Tanah Kosong Program Penatagunaan tanah	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
		4. Perhutanan sosial	Pengembangan Infrastruktur	1. Program Pengelolaan Hutan		

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
			Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3. Program Pengembangan Kurikulum	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV
					Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri
		2. Prestasi olahraga			Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV

Sumber:
1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023

4.2.6.4 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024 (PN 04)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024 (PN 04) dapat dilihat pada Tabel 4.29. berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 04 adalah sebanyak 13 kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 16 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 04 adalah 123%.

Tabel 4.29. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas

pada PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP 2024 (PN 04)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan						
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Pendidikan Unggul: 1. Perguruan Tinggi Unggul Sekolah Unggul 2. Budaya Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata capaian APM
		2. Revolusi mental dalam tata kelola			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Pendidikan Unggul: 1. Perguruan Tinggi Unggul Sekolah Unggul 2. Budaya Unggul	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan
		4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan Serta Pengembangan Pariwisata	Ekonomi Unggul:	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase wirausaha baru
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi
					Program Pendidikan Dan	Presentase peserta pelatihan

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Latihan Perkoperasian	
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi modern
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama	Pendidikan Unggul: 1. Perguruan Tinggi Unggul Sekolah Unggul 2. Budaya Unggul	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pencapaian Strata Kota Layak Anak
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	1. Program pengembangan kebudayaan 2. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya		
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat				
		3. Perlindungan hak kebudayaan dan eKSPresi budaya				

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif				
		4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan				
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Inovasi Daerah		
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat

Sumber:
1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023

4.2.6.5 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024 (PN 05)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024 (PN 05) dapat dilihat pada Tabel 4.30 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 05 adalah sebanyak 15 kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 36 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 05 adalah 240%.

Tabel 4.30. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar RKP 2024 (PN 05)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) 4. Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani
					Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana
		2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Cakupan akses air minum perpipaan dan non

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				pengembangan sistem penyediaan air minum	Penyediaan Air Minum	perpipaan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah
					Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
					Program Pengelolaan	Persentase genangan

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Sumber Daya Air (SDA)	tertangani
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainasedalam kondisi baik
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
		2. Konektivitas darat	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengelolaan Perkeretapian	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
3	Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	1. Transportasi perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Program Pengelolaan Perkeretapian	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	kecepatan rata-rata
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan	1. Program Kawasan Permukiman 2. Program Pengembangan Perumahan	Program Kawasan Permukiman	Persentase luasan Permukiman Kumuh tertangani

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		dan terjangkau di perkotaan	Hidup	3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU)	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Aplikasi Informatika	Cakupan layanan teknologi informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Sumber:
1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023

4.2.6.6 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2024 (PN 06)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RKP 2024 (PN 06) dapat dilihat pada Tabel 4.31 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 06 adalah sebanyak 10

kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 31 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 06 adalah 310%.

Tabel 4.31. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim RKP 2024 (PN 06)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase komunitas aktif

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH
				2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
				3. Program Pengelolaan DAS Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 4. Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan DAS 4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5. Program Pengelolaan Hutan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3. Program Pengelolaan DAS 4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				dan Ekosistemnya 5. Program Pengelolaan Hutan		
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah kasus yang tertangani
					2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	1. Program Penanggulangan Bencana	Program Penanganan Bencana	Presentase penanganan korban bencana alam dan sosial
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase genangan tertangani
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan	1. Program Penanggulangan Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase genangan tertangani
			Penanggulangan Risiko Bencana		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	kecepatan rata-rata
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan Hutan 2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya		
		3. Pengelolaan limbah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2. Program Pengelolaan DAS 3. Program Pengelolaan DAS	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase genangan tertangani
		4. Pengembangan industri hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Program Pengelolaan Hutan 3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemenuhan baku mutu
					2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
				4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 5. Program Pengelolaan DAS	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase pengelolaan informasi industri

Sumber:
1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023

4.2.6.7 Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RKP 2024 (PN 07)

Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RKP 2024 (PN 07) dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut ini. Memperhatikan tabel tersebut, diketahui jumlah kegiatan prioritas nasional pada PN 07 adalah sebanyak 19 kegiatan, dan jumlah program daerah yang mendukung kegiatan prioritas nasional tersebut adalah sebanyak 23 program, sehingga tingkat dukungan program daerah untuk kegiatan prioritas pada PN 07 adalah 121%.

Tabel 4.32. Tingkat dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas pada PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik RKP 2024 (PN 07)

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi				

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan Informasi Data Gender dan Anak
					Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender.
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri				
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional				
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global				
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
		2. Perbaikan Sistem Hukum dan Perdata			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti Perangkat Daerah
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Status Laporan
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan
					Program Pengelolaan Pendapatan	Persentase PAD terhadap

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
					Daerah	pendapatan daerah
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase aksesibilitas informasi publik
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD
					Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan kebutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegarauntuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD
					Program Kepegawaian Daerah	indeks kepuasan layanan kepegawaian
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai LPPD
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	1. Program Penataan Organisasi	Program Kepegawaian Daerah	indeks kepuasan layanan kepegawaian
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Teknis
		2. Transformasi Pelayanan			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik

NO	NASIONAL		PROVINSI JAWA BARAT		KOTA DEPOK	
	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri				
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi *Confidence Building Measures* (CBM)				
		3. Penguatan Keamanan Laut				
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber				

Sumber:
1. Lampiran 1 Matriks Pembangunan Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil analisis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.
2. Hasil analisis Bappeda Kota Depok 2023

4.3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) mengukuhkan Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang diarahkan sebagai pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, dan regional. Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur ini terbentuk dari kawasan perkotaan inti, yaitu DKI Jakarta, dan kawasan perkotaan sekitarnya yang memiliki keterkaitan fungsional termasuk di antaranya adalah kawasan perkotaan Depok dan kawasan perkotaan Cinere di Kota Depok, serta kawasan kawasan perkotaan lain di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Keterpaduan peran dan fungsi antar kota inti dan kota sekitarnya pada kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur perlu didukung dengan jaringan jalan dan sistem transportasi yang terpadu dan handal, infrastruktur yang terintegrasi, serta sistem prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimum perkotaan. Untuk menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan ekologis, pengembangan kawasan budidaya sebagai kawasan perkotaan diarahkan ke Barat-Timur kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Adapun pengembangan kawasan budidaya terbangun ke arah selatan dan pengembangan kawasan perkotaan pada daerah wilayah sungai dan resapan air dikendalikan.

Dalam konstelasi Kawasan Jabodetabekpunjur ini, Kota Depok berperan sebagai penyeimbang (counter magnet) perkembangan DKI Jakarta. Kawasan perkotaan Depok memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan perguruan tinggi, pelayanan kesehatan, sistem angkutan umum penumpang dan barang regional, dan pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan kawasan perkotaan Cinere memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa skala regional, pelayanan kesehatan, dan pertahanan dan keamanan negara.

Beberapa rencana jaringan transportasi penting Jabodetabek-Punjur yang terkait dengan Kota Depok adalah: (i) Jakarta Outer Ring Road II ruas Serpong – Cinere, Cinere – Cimanggis, Cimanggis – Cibitung; (ii) Jalan tol Depok-Antasari; (iii) jalur elevated untuk busway koridor Manggarai – Pasar Minggu – Lenteng Agung – Depok; (iv) jalur angkutan massal berbasis rel Cawang – Cibubur; (v) jalur angkutan massal berbasis rel Cibubur – Bogor; (vi) Stasiun LRT (light rapid transit) di Stasiun Cibubur, Kecamatan Cimanggis; (vii) stasiun Pondok Rajeg di Kecamatan Cilodong; (viii) stasiun kereta api Cinere di Kecamatan Limo.

Rencana Jaringan prasarana perkotaan lainnya yang terkait Kota Depok antara lain IPA Cikeas di Kecamatan Tapos, IPA Ciliwung di Kecamatan Cimanggis, serta IPA Pesanggrahan di Kecamatan Limo.

Kebijakan Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang RTRWP Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

1. Pengembangan wilayah melalui keterkaitan fungsional antar Wilayah Pengembangan (WP) dengan ketetapan kawasan yang dikendalikan perkembangannya, kawasan yang didorong perkembangannya, kawasan yang dibatasi perkembangannya, dan kawasan yang ditingkatkan perkembangannya;
2. Pemantapan peran perkotaan di Daerah Provinsi sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
3. Penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah serta mendukung sistem logistik nasional untuk mewujudkan sistem kota di Daerah Provinsi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan berfungsi lindung;.
5. Pengamanan lahan sawah serta peningkatan produktivitas pertanian, guna menjaga Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Nasional;
6. Pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumber daya dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
7. Optimalisasi potensi lahan budidaya dan sumber daya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
8. Pengamanan kepentingan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) pertahanan dan keamanan.

Kebijakan Penataan Ruang Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 - 2042

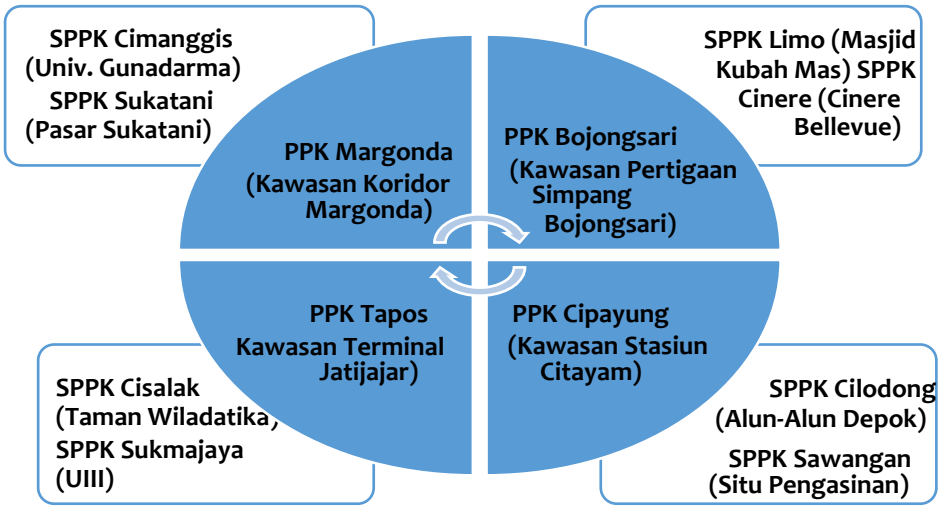
Sesuai arahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok 2022-2042, pengembangan wilayah Kota Depok direncanakan terdiri dari 4 (empat) PPK (Pusat Pelayanan Kota) yaitu (i) PPK Margonda yang diarahkan sebagai central business district (CBD) dengan pusat inti di kawasan koridor Margonda; (ii) PPK Bojongsari yang diarahkan sebagai tourism and recreation center dengan pusat inti di kawasan pertigaan simpang Bojongsari; (iii) PPK Tapos yang diarahkan sebagai

smart mobility (multi-mode system) dengan pusat inti di kawasan Terminal Jatijajar; dan (iv) PPK Cipayung yang diarahkan sebagai green economy center dengan pusat inti di kawasan Stasiun Citayam.

Adapun Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang secara geografis melayani satu subwilayah kota terdiri dari: (i) SPPK Cisalak; (ii) SPPK Cimanggis; (iii) SPPK Sukmajaya; (iv) SPPK Cilodong; (v) SPPK Sukatani; (vi) SPPK Limo; (vii) SPPK Cinere; dan (viii) SPPK Sawangan.

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang secara geografis melayani skala lingkungan dapat mencakup satu kelurahan atau beberapa kelurahan.

Gambar 4.3.
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota Depok 2022-2042



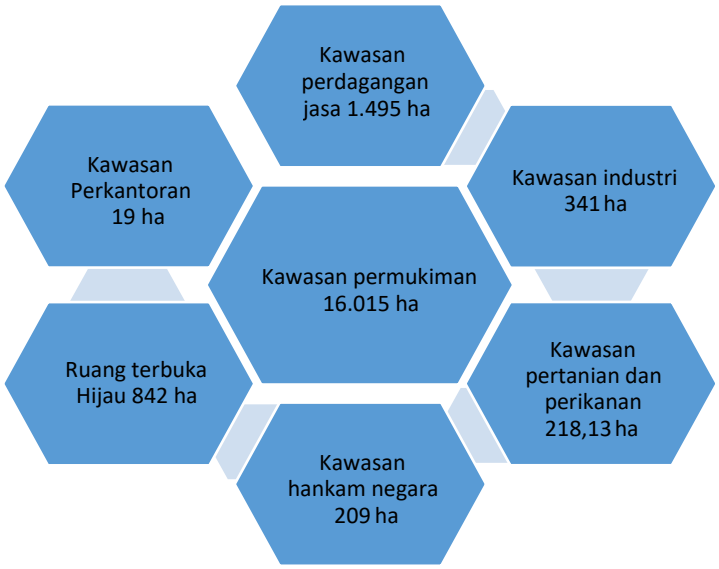
Sumber: RTRW Kota Depok 2022-2042

Distribusi peruntukan ruang wilayah Kota Depok dalam Depok dalam Perda No. 9 tahun 2022 tentang RTRW Kota Depok tahun 2022-2042 ini diarahkan untuk Kawasan lindung berupa badan air situ seluas kurang lebih 248 hektar, sempadan sungai dan situ seluas kurang lebih 553 hektar, kawasan konservasi Taman Hutan Raya di kelurahan Pancoran Mas seluas 7 hektar, ruang terbuka hijau seluas kurang lebih 842 hektar. Adapun untuk kawasan budidaya diarahkan berupa badan jalan seluas kurang lebih 170 hektar, kawasan pertanian seluas 71 hektar, kawasan perikanan budidaya seluas 15 hektar, kawasan industri seluas 341 hektar, kawasan permukiman seluas 16.012 hektar, kawasan perdagangan dan jasa seluas kurang lebih 1.495 hektar, kawasan perkantoran dengan luas 19 hektar, dan kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 209 hektar, dan kawasan transportasi seluas

kurang lebih 6 hektar.

Kawasan strategis kota berupa kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi: Kawasan Koridor Margonda berfungsi sebagai Center Business District, Kawasan Pertigaan Simpang Bojongsari dan sekitarnya berfungsi sebagai Tourism and Recreation Center, Kawasan Terminal Jatijajar berfungsi sebagai Smart Mobility (Multi-Mode System), Kawasan Stasiun Citayam berfungsi sebagai Green Economy Center,

Gambar 4.4.
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Depok, 2022-2042



Sumber: RTRW Kota Depok 2022-2042

Ketimpangan antar Kecamatan di Kota Depok

Salah satu unsur dalam pembangunan yang merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM kecamatan merupakan salah satu kompenen yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan di wilayah. Hasil analisis dapat di jadikan bahan dalam merumuskan kebijakan wilayah. Indeks Pembangunan Manusia per kecamatan dari tahun 2016 sampai tahun 2021, dengan Nilai IPM tertinggi ada di Kecamatan Sukmajaya sebesar 87.19 disusul Kecamatan Cinere yaitu 86.78 dan Kecamatan Cimanggis sebesar 84.90. Sementara itu nilai IPM terendah ada di Kecamatan Cipayung sebesar 75.65 dan Kecamatan Tapos sebesar 77.65.

Tabel 4.33. Indeks Pembangunan Manusia Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016-2022

No.	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Beji	80.77	81.15	81.51	81.71	81.81	81.85
2.	Bojongsari	76.27	76.93	77.56	77.76	77.86	77.87
3.	Cilodong	79.72	80.23	82.05	82.26	82.36	82.40
4.	Cimanggis	83.55	84.07	84.58	84.79	84.90	84.92
5.	Cinere	84.97	85.81	86.46	86.67	86.78	86.80
6.	Cipayung	74.17	74.77	75.36	75.55	75.65	75.66
7.	Limo	79.10	79.85	80.58	80.78	80.88	80.92
8.	Pancoran Mas	79.87	80.21	81.90	82.11	82.21	82.25
9.	Sawangan	76.85	77.28	77.79	77.99	78.09	78.10
10.	Sukmajaya	85.83	86.36	86.87	87.08	87.19	87.21
11.	Tapos	76.00	76.69	77.35	77.55	77.65	77.66

Berdasarkan hasil kajian dan analisis perkembangan pembangunan manusia di Kota Depok, setiap kecamatan di Kota Depok perlu memperbaiki kualitas dari setiap komponen IPM yang telah dicapai khususnya pada beberapa daerah prioritas yaitu Cipayung, Tapos dan Sawangan, dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi faktor- faktor dominan yang menyebabkan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan aktivitas ekonomi yang kurang maksimal. Di bidang kesehatan perlu lebih intensif menggalakkan Posyandu dan RW Siaga. Pada bidang pendidikan, upaya menaikkan rata-rata lama sekolah dapat ditempuh dengan mengaktifkan Kejar Paket A, Paket B maupun Paket C serta memastikan penduduk usia sekolah dapat bersekolah semuanya. Setelah mengikuti Kejar Paket A dan Paket B, apabila masih terkejar umurnya, perlu dimasukkan kembali ke pendidikan formal. Perlu pula dilakukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pembangunan manusia. Diantaranya adalah meningkatkan peran semua komponen masyarakat untuk bersinergi meningkatkan kualitas pembangunan manusia

4.4 Pemenuhan Standar Pelayanan Maksimal

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPD Kota Depok Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Secara definisi, pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, disebut dengan

SPM. Indikator kinerja daerah salah satu nya adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Penerapan SPM diwujudkan dalam program dan kegiatan. Program terkait penerapan SPM menjadi bagian dari program pembangunan daerah.

Tabel 4.34. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 th yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	40104 siswa	1 . Angka partisipasi sekolah	70.00%	1. Meningkatkan pengelolaan dan pemerataan aksesibilitas layanan pendidikan	1. Meningkatkan mutu Pendidikan dengan mengacu pada 8 SNP (Standar Nasional Pendidikan) 2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 3. Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa miskin 4. Melaksanakan pemenuhan SPM pendidikan	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata capaian APM	88,50%	613.574.198.700
				2 .Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	61.54%			Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase siswa mendapatkan perlengkapan dasar sesuai ketentuan SPM Pendidikan	100 %	49.549.609.650
				3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV (%)	62.00%			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	90 Unit	2.659.905.000
								1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	9 Paket	500.285.000
								1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	6056 Orang	11.159.880.000
								1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1960 Orang	995.108.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	900 Satuan Pendidikan	1.015.869.400
								1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	99.999.850
								1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	95.800.000
								1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	250 Orang	99.999.000
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	291.944 siswa	SD				1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	329.776.959.450
				1 . Angka partisipasi sekolah(%)	96,22%						
				2 . Kemampuan literasi (NILAI)	53,80			1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	625.000.000
					40,44					19 Paket	35.616.741.500

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional		3 .Kemampuan numerasi (NILAI)				1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia		
				4 . Indeks iklim keamanan(NILAI)	72,47						
				5 . Indeks iklim kebinekaan	59,54			1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	6135 Orang	77.374.160.000
				6. Indeks Iklim inklusivitas (%)	53,54			1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	845 Orang	209.988.000
								1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	420 Orang	76.000.000
								1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	76.500.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	79.999.750
								1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	90 Orang	81.492.000
				SMP				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan	100 %	206.308.855.800
				1 . Angka partisipasi sekolah(%)	97.72%						
				2 . Kemampuan literasi (NILAI)	62.92			1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	33 Paket	2.245.661.000
				3 .Kemampuan numerasi (NILAI)	55.76						
				4 . Indeks iklim keamanan(NILAI)	70.52			1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	6733 Peserta Didik	20.199.000.000
				5 . Indeks iklim kebinekaan	68.38						
				6. Indeks Iklim inklusivitas (%)	53.61			1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	25 Paket	9.116.282.050

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4351Orang	41.545.507.600
								1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2012 Orang	392.000.000
								1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	420 Orang	100.000.000
								1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen	100.000.000
								1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	100.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	110 Orang	110.000.000
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisispasi dalam pendidikan kesetaraan	16,122 siswa	1 . Angka partisipasi sekolah(%)	35,21			1.01.04. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV	77%	132.980.900
				2 . Kemampuan literasi (NILAI)	53,56			1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan terpetakan sesuai jenjang pendidikan	70 %	132.980.900
				3 .Kemampuan numerasi (NILAI)	44,95			1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	82.981.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	49.999.900

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

Tabel 4.35. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	48.588 Orang	1. Vaksin Tetasus Difetri (Td)	48588 ampul	1. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, dan	1. Optimalisasi kualitas layanan kesehatan sesuai standar, dan penyediaan sarana dan obat/perbekalan farmasi serta	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar	100 %	321.964.189.700
				2. Tablet Tambah Darah	4,372,920 tablet						
				3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	48588 paket						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	48588 paket	rehabilitatif) 2. Meningkatkan pengendalian penyakit	SDM kesehatan yang memadai 2. Peningkatan pencegahan dan surveilance penyakit serta deteksi dini penyakit	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	61%	243.366.990.695
				5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	48588 paket						
				6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	48588 paket						
				7. Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	48588 paket						
				8. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	48588 buku			1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33218 Orang	1.159.691.250
				9. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	218 orang						
				10. Tenaga kesehatan : Bidan	294 orang						
				11. Tenaga kesehatan : Perawat	445 orang						
				12. Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	48588 orang						
	2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan	46.867 orang	1. Formulir Partograf	46867 formulir			1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan	33218 Orang	495.632.400
				2. Kartu ibu (rekam medis)	46867 paket						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pelayanan kesehatan		3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	46867 buku			Kesehatan Ibu Bersalin	Kesehatan Sesuai Standar		
				4. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	200 orang						
				5. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				6. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
	3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	44.635 Orang	1. Vaksin Hepatitis BO	44635 vaksin			1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	31742 Orang	1.021.907.790
				2. Vitamin K1 Injeksi	44635 ampul						
				3. Salep/Tetes Mata Antibiotik	44635 orang						
				4. Formulir Bayi Baru Lahir	44635 formulir						
				5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	44635 orang						
				6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	44635 buku						
				7. Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	200 orang						
				8. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				9. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4. Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	170.093 Orang	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	170093 dokumen			1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167541 Orang)	49.060.000
				2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	170093 formulir						
				3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	170093 buku						
				4. Vitamin A Biru	170093 kapsul						
				5. Vitamin A Merah	170093 kapsul						
				6. Vaksin imunisasi dasar: HBO	170093 vaksin						
				7. Vaksin imunisasi dasar: BCG	56698 vaksin						
				8. Vaksin imunisasi dasar: Polio	28349 orang						
				9. Vaksin imunisasi dasar: IPV	42523 vaksin						
				10. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	42523 vaksin						
				11. Vaksin imunisasi dasar: Campak	42523 vaksin						
				12. Vaksin imunisasi dasar: Rubella	42523 vaksin						
				13. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	42523 vaksin						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				14. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	42523 vaksin						
				15. Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	42523 vaksin						
				16. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	170093 unit						
				17. Peralatan Anafilaktik	38 paket						
				18. Tenaga kesehatan : Dokter	200 orang						
				19. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				20. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				21. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	57 orang						
				22. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	13.634 orang						
				23. Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	5.645 orang						
	5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	289.320 Orang	1. Buku Raport Kesehatanku	289.320 buku			1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	290671 Orang	961.886.050
				2. Buku Pemantauan Kesehatan	289.320 buku						
				3. Kuesioner Skrining Kesehatan	289.320 dokumen						
				4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	289.320 dokumen						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	289.320 formulir						
				6. Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	200 orang						
				7. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				8. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				9. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	57 orag						
				10. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	117 orang						
				11. Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	13.634 orang						
				12. Tenaga Non kesehatan : Guru	14.152 orang						
	6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	571.688 Orang	1. Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 pedoman			1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	571688 Orang	411.677.550
				2. Alat: Alat ukur berat badan	38 unit						
				3. Alat : Alat ukur tinggi badan	38 unit						
				4. Alat : Alat ukur lingkar perut	38 unit						
				5. Alat : Tensimeter	38 unit						
				6. Alat : Glukometer	38 unit						
				7. Alat : Tes strip gula darah	571688 unit						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8. Alat : Lancet	571688 unit						
				9. Alat : Kapas alkohol	571688 unit						
				10. Alat : KIT IVA Tes	38 unit						
				11. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	571688 formulir						
				12. Tenaga kesehatan : Dokter	200 orang						
				13. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				14. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				15. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	57 orang						
				16. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	117 orang						
				17. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	38 orang						
	7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	145.041 Orang	1. Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	145041 paket			1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	175394 Orang	58.413.000
				2. Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	38 paket						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Buku Kesehatan Lansia	38 paket						
				4. Tenaga kesehatan : Dokter	200 orang						
				5. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				6. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				7. Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	57 orang						
				8. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	117 orang						
				9. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	38 orang						
	8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga negara penderita Hipertensi usia 15 th keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	379.903 Orang	1. Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	379.903 pedoman			1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	379903 Orang	27.821.000
				2. Tensimeter	38 unit						
				3. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	379.903 dokumen						
				4. Tenaga kesehatan : Dokter	200 orang						
				5. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				7. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	117 orang						
				8. Obat Hipertensi	138.664.595 paket						
	9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	Jumlah warga negara penderita DM usia 15 th keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	44.061 Orang	Alat : Glukometer	38 pedoman			1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	44061 Orang	2.753.541.350
				Alat : Strip Tes Gula Darah	44061 unit						
				Alat : Kapas Alkohol	44061 dokumen						
				Alat : Lancet	44061 orang						
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	44061 orang						
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 orang						
				Tenaga kesehatan : Dokter	200 orang						
				Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	57 orang						
				Tenaga Kesehatan : Masyarakat	117 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Obat Diabetes Melitus	16.082.265 paket						
	10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	Jumlah warga negara dengan ODGJ usia 15 th keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.017 Orang	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	38 buku			1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	2017 Orang	58.185.000
				2. Kit berisi 2 alat fiksasi	38 paket						
				3. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	2017 orang						
				Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	38 media						
				Tenaga kesehatan : Dokter Terlatih Jiwa	38 orang						
				Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	11 orang						
				Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	38 orang						
	11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	31.868 Orang	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	38 media			1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	31868 Orang	2.213.414.000
				Reagen Zn TB	38 paket						
				Masker jenis rumah tangga dan masker N95	31.868 paket						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	63.736 paket						
				Catridge tes cepat molekuler	22.266 paket						
				Formulir pencatatan dan pelaporan	31.868 dokumen						
				Pedoman/Standar Operasional Prosedur	1 dokumen						
				Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	200 orang						
				Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	109 orang						
				Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	21 orang						
				Tenaga kesehatan masyarakat	117 orang						
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	38 orang						
	12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi	39.630 Orang	1. Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	38 media			1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang	38063 Orang	430.302.200

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	7				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		2. Tes cepat HIV (RDT) pertama	39.630 paket			Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		
				3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai							
				4. Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	39.630 paket						
				5. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	200 orang						
				6. Tenaga kesehatan : Perawat	395 orang						
				7. Tenaga kesehatan : Bidan	290 orang						
				8.Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	109 orang						
				9. Tenaga Kesehatan : Masyarakat	117 orang						
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	38 orang						

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

Tabel 4.36. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan PUPR

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
III.	1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	330 SR	1. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	300 Sambungan Rumah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan jaringan air bersih. 2. Memperluas akses terhadap sarana dan prasarana air limbah permukiman melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta	1. Meningkatkan layanan jaringan air bersih perpipaan dan non perpipaan melalui perluasan jaringan perpipaan, pembangunan reservoir, peningkatan kapasitas IPA dan pemanfaatan mata air di wilayah yang rawan air 2. Memperluas cakupan layanan air limbah domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan swasta dalam membangun septitank individual, IPAL, komunal dan layanan lumpur tinja terjadwal	1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	15,85 %	3.017.941.250
				2. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	300 Sambungan Rumah			1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	15,86 %	3.017.941.250
				3. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	30 Rumah Tangga			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	15 SR	3.017.941.250

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	30 Rumah Tangga						
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	500 Rumah Tangga	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	500 Rumah Tangga			1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	95,15 %	7.619.523.600
				2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0 Rumah Tangga			1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	99,15 %	7.619.523.600
								1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa	4912 Rumah Tanggal	2.787.373.600

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	500 Rumah Tangga				Penyedotan Lumpur Tinja		
				4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	60 Rumah Tangga			1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	50 unit	2.917.653.000
				5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	60 Rumah Tangga						

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

Tabel 4.37. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perkim

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	**1. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (Rumah Tangga)	25 Unit Rumah	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	25 Unit Rumah	1. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana. 2. Memfasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana 3. Penataan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana. 2. Fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah yang terkena dampak bencana 3. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas	**1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana**	1,24 %	1.138.988.000
								1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah yang direhabilitasi	100 %	0,00
								1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	0 Unit Rumah	0,00
	2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (Rumah Tangga)	50 Unit Rumah	1. Penyediaan rumah layak huni	50 Unit Rumah			1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tersedia	100 %	327.498.000
								1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	27.498.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.04.02.2.01.0007 Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten	3 Dokumen	300.000.000
								1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Jumlah RTLH yang tertangani	62,54 %	38.406.090.000
								1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah RTLH yang tertangani	62,54 persen	38.406.090.000
								1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	1525 Unit Rumah	38.406.090.000

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

Tabel 4.38. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan TRANTIBUMLINMAS

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	**1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/kota	orang	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	2 Unit	1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan masyarakat	1. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat	1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	62,74 %	18.479.359.550
				2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	- Dokumen			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	74,88 %	17.087.258.050
				3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	255 orang			1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 laporan	53.860.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	1 Dokumen			Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
				5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	20 Laporan	363.709.700
				6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	28 orang			1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	52 Dokumen	388.174.300

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28 Dokumen	3.113.286.400
								1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	423 Orang	13.135.627.650
								1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 Dokumen	19.850.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	12.750.000
								1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda	90,14 %	1.305.860.200
								1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	458.763.950

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	55 Laporan	645.117.750
								1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	36 Laporan	201.978.500
								1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS	5 orang	86.241.300
								1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	86.241.300

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

Tabel 4.39. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan TRANTIBUMLINMAS (Damkar)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	**1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana**	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	250 orang	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1 Dokumen	1. Meningkatkan Kualitas SDM dan Sarana Prasarana Pendukung Operasional	1. Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Operasional	1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Penanggulangan Bencana	100%	2.850.317.950
								1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	96.871.000
				2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	266305 Orang			1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	180 Orang	96.871.000
				3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	250 Orang						
				4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	8419 unit						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				5. Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	266305 unit						
	2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, …. dll)	100 unit			1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	1.478.478.950
				2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	300 Orang			1.05.03.2.02.0014 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	196.197.000
	3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 orang	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan	3 Posko			1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	350 Kawasan	143.712.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)				1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	77 Unit	857.500.000
				2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	600 Orang						
				3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	30 Dokumen			1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	37.539.950
				4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	25 Layanan			1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	65 orang	41.190.000
				5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	600 Orang			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	1.199.968.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500 Orang	1.199.968.000
	4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	125 orang	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	125 Layanan			1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100 %	9.252.585.800
								1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan,pen gendalian,pemadaman, peny elamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	8.857.010.000
				2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.)	2 Dokumen			1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	8.857.010.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.)	38 Unit			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	100%	395.575.800
				4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	156 Orang			1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	63 Desa/ Kelurahan	395.575.800

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

Tabel 4.40. Rencana Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VI.	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	102 orang	1. Layanan data dan pengaduan	102 Orang	Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	1. Meningkatkan Kesejahteraan PPKS dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar 2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Miskin/Rentan	1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100 %	1.510.452.800
				2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	50 Orang						
				3. Penyediaan permakanan	58 Orang			1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis-gelandangan terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	641 Orang	1.038.362.900
				4. Penyediaan sandang	58 Orang						
				5. Penyediaan alat bantu	10 orang						
				6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	25 Orang						
				7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10 Orang						
				8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	35 Orang			1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	231 orang	146.432.000
				9. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1 Orang			1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	55.584.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	50 Orang			1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	31.200.000
				11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40 Orang			1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	280 Orang	78.270.000
				12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	35 Orang			1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	41.612.500
				13. Layanan rujukan	60 Orang			1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	64.843.000
	2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Anak Telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	64 orang	1. Layanan data dan pengaduan	64 orang			1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang	620.421.400
				2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	15 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3. Penyediaan permakanan	27 orang						
				4. Penyediaan sandang	27 orang						
				5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	5 orang						
				6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	12 orang						
				7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	40 orang						
				8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3 orang						
				9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2 orang						
				10.Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	45 orang						
				11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	40 orang						
				12. Layanan rujukan	25 orang						
	3. Rehabilitasi Sosial Dasar	Jumlah warga negara lanjut	131 orang	1. Layanan data dan pengaduan	131 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti		2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	45 orang						
				3. Penyediaan permakanan	61 orang						
				4. Penyediaan sandang	61 orang						
				5. Penyediaan alat bantu	10 orang						
				6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	15 orang						
				7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	25 orang						
				8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	60 orang						
				9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	2 orang						
				10. Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan	25 orang						
				11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	75 orang						
				12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	60 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13. Layanan rujukan	40 orang						
	4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah warga negara gela dangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di Luar Panti	284 orang	1. Layanan data dan pengaduan	284 orang						
				2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	40 orang						
				3. Penyediaan permakanan	54 orang						
				4. Penyediaan sandang	54 orang						
				5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyedia P3K)	10 orang						
				6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80 orang						
				7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	50 orang						
				8. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	2 orang						

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	2 orang						
				10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	149 orang						
				11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	149 orang						
				12. Layanan rujukan	80 orang						
	5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yg meperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setalah tanggap darurat bencan bagi korban bencana kab/kota	3000 orang	1. Penyediaan permakanan	3000 orang			1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana	100 %	961.837.000
				2. Penyediaan sandang	1000 orang			1 06 06 2.01 Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban bencana alam, non alam dan sosial yang mendapatkan bantuan	100 %	558.925.000
				3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0 orang			1 06 06 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x 1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian kewenangan kab/kota)	5000 orang	463.000.000

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU LAYANAN							
		INDIKATOR	TARGET 2024	INDIKATOR	TARGET 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan 5. Pelayanan dukungan psikososial	200 orang 0 orang			1 06 06 2.01 02 Sub Kegiatan : Penyediaan sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	95.925.000

Sumber : Rancangan Renaksi SPM Tahun 2023-2026

4.5 Kebijakan Inovasi Daerah

4.5.1 Kebijakan Inovasi Daerah

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.5.2 Inovasi Pembangunan Daerah Kota Depok

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan mengatasi permasalahan yang ada,Pemerintah Kota Depok terus berupaya untuk melakukan terobosanterobosan yang dituangkan dalam inovasi kebijakan pembangunan daerah. Sejalan dengan tema pembangunan Kota Depok Tahun 2024 yaitu “Memantapkan Kehidupan Kota Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera melalui Peningkatan Pelayanan Dasar”.

Dalam rangka mengembangkan inovasi daerah pada tahun 2024, selain melaksanakan kelitbangan utama yang menjadi dasar terciptanya inovasi yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, juga direncanakan penguatan kelitbangan pendukung dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembentukan forum pakar/tenaga ahli, penguatan ketatalaksanaan melalui penyusunan pedoman kelitbangan agar aktor kelitbangan/inovasi melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, fasilitasi inovasi daerah melalui beberapa aksi, pengembangan basis data kelitbangan melalui pengembangan sistem e-litbang dan penguatan kerjasama kelitbangan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnnya.

Fasilitasi inovasi daerah dilakukan melalui beberapa aksi sebagai berikut:

1. Menghimpun data inovasi baru maupun pengembangan dan pembaruan yang dilakukan perangkat daerah terhadap inovasi daerah yang telah dilaporkan tahun sebelumnya melalui sistem berbasis teknologi;
2. Melakukan sinergisasi dengan perangkat daerah terhadap data inovasi yang berada dalam program yang dikoordinatori oleh kementrian/instansi vertikal seperti Kemenkominfo, Kemenpan RB, Bappenas dan lain lain. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dengan perangkat daerah penggerak program tersebut;
3. Melaksanakan penilaian terhadap inovasi perangkat daerah yang layak menjadi inovasi tingkat kota dan melakukan pengembangan yang bersifat kolaboratif;
4. Melaksanakan pelaporan inovasi daerah melalui sistem inovasi daerah Kemendagri;
5. Mengembangkan klaster inovasi yang berbasis sektor unggulan kota;
6. Mendorong tumbuhnya inovasi yang berasal dari ASN, salah satunya yang berasal dari proyek perubahan.

Penciptaan inovasi perangkat daerah diarahkan agar selaras dan responsif dengan situasi pandemik Covid-19 dan tema pembangunan. Karena itu dibutuhkan terobosan baru dalam rangka pemulihan sektor ekonomi dan sosial yang diprioritaskan pada aspek peningkatan dan pemulihan usaha mikro melalui

pengembangan platform e-commerce, digitalisasi ekonomi daerah melalui pengembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan digitalisasi pembayaran, peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan dan kestabilan kesediaan pangan, pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan program ketenagakerjaan dan peningkatan investasi dan penanaman modal serta pelayanan perijinannya.

Pada tahun 2023 Kota Depok juga telah melaksanakan penilaian indeks inovasi perangkat daerah yaitu Anugerah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD) Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2021 tentang Penilaian Indeks Inovasi Perangkat Daerah. Penghargaan tersebut melibatkan seratus persen partisipasi dari 38 perangkat daerah dengan tujuan memberikan penilaian dan pemeringkatan terhadap inovasi yang dihasilkan oleh setiap perangkat daerah. Jumlah inovasi yang dilaporkan sebanyak 166 inovasi, dengan 100 inovasi dapat dilombakan dan 66 inovasi tidak dapat dilombakan.

Seluruh data inovasi daerah Kota Depok dapat diakses secara online melalui sistem aplikasi Teman Litbang pada alamat website https://elitbang.depok.go.id . Data yang dihimpun dalam basis data inovasi daerah tersebut terdiri dari basis data kelengkapan dokumen inovasi daerah dan kedalaman inovasi daerah. Kelengkapan dokumen inovasi daerah antara lain meliputi tentang keterkaitan inovasi dengan tema RKP 2024, kerangka logis yang mendukung inovasi, unsur kebaruan inovasi, input anggaran inovasi, input sumberdaya manusia inovasi, kerangka tahapan pelaksanaan inovasi, proses inovasi, output inovasi, outcome inovasi, stakeholders yang terlibat, pemantauan dan evaluasi, serta permasalahan pelaksanaan dan tindak lanjut inovasi. Berikut beberapa Inovasi yang sedang dikembangkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), berikut :

Tabel 4.41. Daftar Inovasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
1	Sistem Administrasi Kepegawaian dan Kompetensi Aparatur Kekinian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mengintegrasikan dan menyempurnakan sistem informasi kepegawaian yang sudah dimiliki BKPSDM Kota Depok Sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, mudah, terukur dan dapat termonitor proses pelayanan administrasi kepegawaian. Serta dapat memudahkan memberikan informasi serta peluang kepada seluruh aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dari berbagai sumber baik dalam negeri maupun luar negeri dengan lebih efektif dan efisien
2	Aplikasi Kinerja Mobile	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendekatan alat pengukur kehadiran dan kinerja pegawai dengan integrasi data base, kinerja, pelayanan kepegawaian manajemen kepegawaian, digital dokumen objektif dan terukur real time dengan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			sistem up date, efisien, *user friendly* dan sederhana
3	PENCATATAN OMSET TERINTEGRASI	Badan Keuangan Daerah Kota Depok	Pemasangan alat pencatatan omset terintegrasi ini diimplementasikan pada 100 objek pajak di Kota Depok terdiri dari objek pajak restoran, objek pajak hotel, objek pajak hiburan, dan objek pajak parkir. Harapan kedepan dengan pemasangan alat pencatatan omset terintegrasi atau sering disebut Tapping Box ini dapat meningkatkan PAD karena BKD dapat melihat realtime penerimaan omset wajib pajak yang objek pajaknya di pasang alat tersebut.
4	PENETAPAN PAJAK DAERAH ONLINE	Badan Keuangan Daerah Kota Depok	Terobosan yang akan dilakukan yaitu bekerjasama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia dalam teknis di bidang identifikasi, deteksi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, dan/atau serangan siber terkait Digital Signature selanjutnya bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok dalam teknis penyusunan perangkat sistem Digital Signature kedalam pelayanan pajak daerah Kota Depok yang diintegrasikan dengan Sistem Manajemen PAD (SIMPAD) Kota Depok.
5	SILONDO BERMULA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Manfaat SILONDO BERMULA adalah model layanan Dukcapil Depok dengan menggunakan aplikasi Form Silondo Bermula melalui teknologi AI system chatbot pada media sosial Whatsapp, sehingga pemohon tinggal memilih menu layanan dan mengisi form layanan yang selanjutnya akan diproses permohonannya oleh masing2 operator layanan
6	FASTARAGA (Fasilitas Akta Kelahiran Ke Rumah Warga)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dalam upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus untuk melakukan sosialisasi System Layanan Online Dukcapil Depok Bermula kepada masyarakat Depok, Maka muncullah Ide untuk melakukan pelayanan jemput bola melayani pembuatan Akta kelahiran bayi usia 0-1 tahun di Kota Depok yang dinamakan dengan program FASTARAGA (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga).
7	GLADIS TIKTOK (Gebyar Layanan Disdukcapil Tingkat Kecamatan Se-Kota Depok Tahun 2021)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dalam rangka memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat diperlukan pelayanan sehari jadi maka dilakukan pelayanan yang mendekatkan kepada masyarakat melalui program inovasi unggulan Gebyar Layanan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			Disdukcapil Tingkat Kecamatan Se Kota Depok (Gladis Tiktok); Layanan Inovasi GLADIS TIKTOK adalah pelayanan Administrasi kependudukan di gelar di setiap kecamatan secara bergiliran pada hari Jumat dan sabtu dimulai pada tanggal 12 November sampai dengan 4 Desember 2021.
8	Lawas Bucin (Layanan WA Komunitas Bukti Cinta)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Layanan WA Komunitas Bukti Cinta (Lawas Bucin) merupakan program percepatan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak sekolah dan bayi yang baru dilahirakan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah, rumah sakit, klinik, bidan, dan berbagai komunitas yang ada di Kota Depok untuk layanan pembuatan akta kelahiran yang terintegrasi dengan layanan KIA, berupa layanan yang dijamin bebas biaya dan pungli.
9	FASTAMARGA (Fasilitas Akta Kematian Ke Rumah Warga)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program fastamarga ini diharapkan warga yang keluarganya sudah meninggal tetapi belum membuat akta kematian, diharapkan akan segera mengurus akta kematiannya agar dapat memperbaharui data dalam kartu keluarga dan juga dalam database kependudukan Kota Depok. Program fastamarga akan memudahkan masyarakat dalam membuat dokumen akta kematian anggota keluarga yang sudah meninggal, untuk meningkatkan akan pentingnya dokumen kependudukan mulai dari lahir sampai meninggal dunia.
10	Surat Jaminan Pelayanan (SJP) Online	Dinas Kesehatan	SJP Online adalah Digitalisasi Pelayanan. Adanya pemanfaatan teknologi informasi, pemohon cukup memantau melalui Puskesmas saja tanpa harus bolak balik ke Dinas Kesehatan. Masing-masing faskes baik puskesmas yang mengajukan maupun rumah sakit yang melayani dapat memantau proses pengajuan pembiayaan jaminan Kesehatan di luar kuota JKN sehingga menjadi lebih efektif.
11	Aplikasi KSC (KAMPUNG SIAGA COVID-19)	Dinas Kesehatan	Dalam membantu fungsi KSC dan perwujudan digitalisasi, maka diluncurkan aplikasi kampung siaga Covid yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi, antara pemerintah dengan masyarakat . Aplikasi berkaitan dengan sebaran Data COVID-19 disekitar tempat tinggalnya

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			sehingga memudahkan bagi RT/RW dalam mengetahui jumlah warganya yang terinfeksi COVID-19 sehingga membantu KSC dalam melakukan monitoring isolasi dan karantina.
12	Aplikasi E-Rapor Kesehatan	Dinas Kesehatan	aplikasi E-Rapor Kesehatan berguna untuk meningkatkan mutu dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehinga memungkinkan pertumbuhan dan pekembangan yang harmonis dan opimal.
13	BIDADARI IDAMAN (Bidan Daring, Ibu Dekat, Aman dan Nyaman)	Dinas Kesehatan	dilaksanakan Inovasi 'BIDADARI IDAMAN' untuk meningkatkan pelayanan terhadap ibu hamil, baik yang mau periksa kehamilannya atau ibu hamil yang mau bersalin di UPTD Puskesmas Pancoran Mas. Hal ini dilakukan untuk mempermudah komunikasi antara ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Pemanfaatan aplikasi yang pada umumnya sudah ada di ponsel masing masing untuk account tersebut memudahkan pasien untuk tidak mendowload ulang atau memikirkan pembelian ruang khusus untuk menambah ketersedian aplikasi lain.
14	SISTA INE	Dinas Kesehatan	SISTA INE ini adalah sebuah inovasi yang dibuat dengan bantuan informasi berbasis internet yaitu dengan membuat link dengan bantuan google Formulir. Lalu link ini dibuat dengan alamat yang dipersingkat dengan menggunakan aplikasi bit.ly agar masyarakat pengguna bisa dengan mudah mengakses dengan alamat yang singkat.
15	Gabus Pucung'S (Gerakan Bersama Untuk Skrining Penyakit Utama Capaian Unggulan SPM)	Dinas Kesehatan	Gabus Pucung'S merupakan singkatan dari Gerakan Bersama Untuk Skrining Penyakit Utama Capaian Unggulan SPM, dilakukan pada sasaran Usia Produktif 15 tahun ke atas dan merupakan suatu upaya pencegahan dengan deteksi dini berbagai faktor resiko terjadinya penyakit tidak menular dan Penyakit Menular terutama yang termasuk dalam indikator SPM. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan sedini mungkin suatu penyakit tidak menular maupun menular dan dilanjutkan dengan pemantauan sehingga tidak berlanjut menjadi permasalahan di kemudian hari.
16	ALARM STUNTING	Dinas Kesehatan	Alarm stunting adalah serangkaian kegiatan deteksi dini neonatus atau bayi-bayi dengan resiko stunting oleh kader dan petugas kesehatan untuk

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			selanjutnya ditangani agar dapat mengejar tumbuh kembangnya dan tidak menjadi stunting di usia 2 tahun.
17	KESATRIA PANDEMI	Dinas Kesehatan	Inovasi “Kesatria Pandemi” untuk mempercepat penanganan kasus Covid 19 di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Baru secara menyeluruh. Inovasi ini muncul karena terjadinya lonjakan kasus di pertengahan tahun 2020 dan puskesmas mendapatkan bantuan tenaga PUSPA (Puskesmas Terpadu dan Juara) dari Propinsi Jawa Barat.
18	Pelayanan Poli Online (BEROBAT *TELEMEDICINE SIMPLE, IT'S MY DREAM*)	Dinas Kesehatan	Dengan adanya poli online, kerumunan di Puskesmas bisa dikendalikan namun masyarakat tetap terlayani. Pasien tidak perlu mengantri di pos skrining, pendaftaran, dan menunggu bertemu dokter. Pasien hanya perlu whats app ke hotline telemedicine, sehingga tidak perlu melalui pos skrining, tidak perlu antri di pendaftaran dan tidak perlu antri di poli yang dituju. Proses tersebut dilakukan oleh petugas Puskesmas
19	KetuPAt MaK SiTi : Ketuk Pintu Atasi Masalah Kesehatan di Pasir Putih	Dinas Kesehatan	KetuPAt MaK SiTi : Ketuk Pintu Atasi Masalah Kesehatan di Pasir Putih yang bertujuan memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk memberikan pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, menegakkan diagnosa, melakukan tindakan, memberikan terapi dan memberikan edukasi promotif preventif serta memberikan rujukan bagi masyarakat Kelurahan Pasir Putih yang tidak mampu mengakses pelayanan Puskesmas karena keterbatasannya serta memperkuat dukungan lintas sektor (kader, pengurus RT/RW, jejaring) terhadap pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan Pasir Putih.
20	JEDAR : Jendela Bunda Pintar	Dinas Kesehatan	inovasi JEDAR (Jendela Bunda Pintar) yang bertujuan meningkatkan pelayanan ibu hamil di Puskesmas Pasir Putih dan menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Kelurahan Pasir Putih. Jendela Bunda Pintar (JEDAR) merupakan serangkaian kegiatan memanfaatkan teknologi (media sosial) untuk memberikan pelayanan ibu hamil, mengedukasi ibu hamil tentang masalah kesehatan ibu dan anak serta memperkuat dukungan lintas sektor untuk mencapai tujuan di atas.
21	ELING SI PERI (Edukasi Lewat Daring Inovasi Puskesmas Kemirimuka)	Dinas Kesehatan	Eling Si Peri “ Edukasi Siswa Lewat Daring, Inovasi Puskesmas Kemirimuka Era Pandemi” merupakan sebuah sarana edukasi kesehatan untuk siswa di saat era pandemic wilayah kerja

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			Puskesmas Kemiri muka. Dari ketakutan orang tua untuk memeriksakan kesehatan anak dengan alasan takut terinfesi covid-19, Eling si peri merupakan sebuah inovasi yang bertujuan memberikan edukasi, konsultasi kepada anak sekolah, mengenai kesehatan.
22	Gema Hipertensi (Gerakan Mandiri Hipertensi)	Dinas Kesehatan	Masalah hipertensi yang paling banyak ditemukan di UPTD Puskesmas Cinere adalah rendahnya skrining terhadap penderita hipertensi dan masih sedikit pasien yang minum obat secara teratur. Pelaksanaan kegiatan program PTM dilaksanakan sesuai dengan tata nilai Puskesmas Cinere yaitu : Cekatan, Nyaman dan Ramah. Terutama nilai cekatan terhadap permasalahan kesehatan di wilayah Puskesmas Cinere.
23	Kue Lapis Prenagen (Konsultasi Edukasi Pelayanan Ispa dan Pemeriksaan Antigen)	Dinas Kesehatan	Inovasi "Kue Lapis Prenagen" sebagai upaya mencegah penularan kasus Covid-19 dari pasien ke petugas maupun ke pasien non Covid-19 lainnya. Kue Lapis Prenagen merupakan sistem pelayan Ispa di UPTD Puskesmas Cipayung dengan cara pemisahan pasien ISPA dan non ISPA mulai dari proses pendaftaran sampai dengan pemberian obat oleh petugas farmasi.
24	KARPET BASAH (KADER PEDULI TB BANTU SAMPAI SEMBUH)	Dinas Kesehatan	Menjalankan fungsi pendampingan di masyarakat, merupakan tugas kader TB. Ruang lingkup tanggung jawab kader menjelaskan dasar kontribusinya yang besardalam hubungannya dengan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), merupakan motor penggerak utama. Kemampuan kader menggerakkan masyarakat menjadi indikator keberhasilan penyampaian pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat. Keberhasilan kader mensugesti masyarakat dikarenakan merupakan bagian dari masyarakat dan tinggal di lingkungan yang sama
25	GERTAS TB (Gerakan Tanpa Batas Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan	GERTAS TB merupakan suatu program pengendalian penyakit TB melalui penemuan dan pelaporan kasus sUSPek TB oleh masyarakat dan petugas yang terpadu dan sistematis dengan memanfaatkan layanan digital berupa akses pelaporan keluhan sUSPek TB di formulir online sehingga dapat ditemukan kasus dan diobati dengan segera sampai sembuh.
26	BERSINAR	Dinas Kesehatan	Kegiatan Bersama Deteksi Penyakit Tidak Menular (Bersinar) merupakan program inovasi UPTD Puskesmas

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			Tapos dalam melakukan deteksi dini dan pemantauan Penyakit Tidak Menular (PTM) di wilayah kerja. Kegiatan ini dilakukan terintegrasi dengan kegiatan Posbindu PTM di wilayah, pelaksanaan skrining kesehatan secara berkala dan peningkatan kesehatan dengan melakukan senam bersama.
27	WASIMIL (WhatsApp Ibu Hamil)	Dinas Kesehatan	Wasimil (WhatsApp Ibu Hamil) adalah Kelompok Belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil dan ibu nifas melalui grup WA atau Telemedicine secara 24 jam. Beranggota Bidan, Kader, dan Ibu Hamil wilayah kerja dan ibu hamil luar wilayah kerja. Bidan UPTD Puskesmas Beji membuat inovasi Wasamil, guna tetap bisa mendapatkan laporan pasien dan pasien dengan keluhan atau masalah kesehatan segara di ketahui
28	API CINTA	Dinas Kesehatan	Program API CINTA merupakan singkatan yang bertujuan mengajak lapisan masyarakat untuk “Ayo Perangi dan Cegah Stunting Baduta” dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Duren Seribu.
29	Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) Kota Depok	Dinas Kesehatan	Dengan adanya suatu komunikasi antara masyarakat dengan lintas sektor dan Puskesmas dalam penanggulangan TB di Kota Depok maka perlu adanya suatu wadah atau forum agar terjalin koordinasi yang baiksehingga dibentuklah forum yang dinamakan Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU), sebagai langkah awal, pada tahun 2021 akan dibentuk di 2 kecamatandari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, yaitu Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Pancoran Mas, dilanjutkan pada tahun 2022 pembentukan seluruh Kecamatan se Kota Depok
30	ADIK LENTIK (Anak Cerdik, Peduli Jentik)	Dinas Kesehatan	Output yang diharapkan dari program ini adalah terbentuknya kader cilik Adik Lentik yang bekerja bersama kader Ganjen dan masyarakat hingga terwujud program pemerintah yakni Satu Rumah Satu Jumantik.
31	PICODEP (PUSAT INFORMASI COVID-19 KOTA DEPOK)	Dinas Kesehatan	Aplikasi informasi COVID-19 di Kota Depok, dengan penerapan teknologi untuk mempermudah publik mengetahui detail penyebran virus di Kota Depok dan mempermudah pemerintah Kota Depok dalam monitoring, adanya data COVID-19 untuk memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			keputusan strategis untuk menangani kasus COVID-19.
32	Portal Smart Healthy City	Dinas Kesehatan	Dengan dilaksanakannya kegiatan Pembangunan Portal Smart Healthy City, diharapkan kualitas pelayanan masyarakat dalam hal melakukan pencarian informasi dan pelayanan kesehatan di Kota Depok menjadi lebih optimal. Dinas Kesehatan Kota Depok bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
33	Portal Puskesmas	Dinas Kesehatan	Portal Puskesmas merupakan inovasi dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang layanan kesehatan di Puskesmas. Portal Puskesmas Inovasi dalam bentuk web service.
34	Med-in Si Kaca (Media Edukasi dan Informasi Di Pintu Kaca)	Dinas Kesehatan	Med-in Si Kaca adalah media informasi dan edukasi ditujukkan bagi pasien yang sedang menunggu pelayanan, harapannya pasien tidak bosan menunggu antrian dan dapat membaca edukasi dan informasi yang ada dan dapat meningkatkan pengetahuan pasien agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercapainya perubahan perilaku masyarakat. Media informasi yang sudah dibuat di pintu dan jendela kaca antara lain mengambil tema Imunisasi, Kesehatan Gigi dan Mulut, Keluarga Sehat, Etika Batuk dan Bersin, Penggunaan Masker, Hipertensi dan Diabetes.
35	RAS (Resirkulasi Akuakultur Sistem)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok	Kami menggunakan sistem RAS ini berdasarkan ketersediaan air yang ada di kota Depok, khususnya kecamatan bojong sari yang merupakan sentra atau kawasan budidaya ikan hias.
36	Kultur Jaringan Anggrek	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok	Kultur jaringan ini, dapat meningkatkan kapasitas produksi hingga skala besar, hasilnya seragam sesuai indukannya, dan bibit maupun benihnya dapat terjaga sepanjang waktu serta bebas terhadap hama penyakit karena proses pembibitannya dilakukan dalam kondisi Aseptic secara invitro.
37	Si EmpusKu Setia (Sterilisasi Membuat Populasi Kucing menjadi Sehat, Terkendali, dan Bahagia)	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Depok	Puskeswan Kota Depok berinisiatif untuk mengadakan program sterilisasi kucing dengan mengusung nama program “Si EmpusKu Setia” yang artinya Sterilisasi membuat Populasi Kucing menjadi Sehat, Terkendali dan Bahagia”. Saat ini program Si EmpusKu Setia

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			dikhususkan untuk kucing jantan domestik dengan kuota 16 ekor perbulannya.
38	SImora	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Program SIMORA. Mobil Keliling dengan Sistem Edukasi Anak dan orang tua memberikan edukasi langsung kepada anak-anak dan orang tua anak. SIMORA atau sistem edukasi mobil ramah anak adalah mobil keliling berbasis edukasi permainan tradisional dan literasi serta jasa konsultasi bagi para orang tua muda dalam mendukung tumbuh kembang si anak.
39	Konseling Edukasi Club (KECE)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Kece adalah sebuah inovasi konseling edukasi club yang tercipta sebagai suatu sarana pembelajaran bagi orang tua untuk melindungi anak dari kekerasan melihat kondisi kebutuhan masyarakat terhadap konseling dan edukasi yang dilakukan oleh pUSPaga, sehingga mampu membangun kemampuan Keluarga dalam mengelola Sumber daya keluarga dan meningkatkan pengetahuan keluarga ayah dan bunda dalam mendampingi anak dan memberi pengasuhan terbaik bagi anak sehingga tercipta generasi tangguh, kuat dan mampu melakukan pencegahan kekerasan dan menjaga dirinya.
40	Sekolah Ayah Bunda	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Sekolah ini hadir untuk membentuk duta-duta ketahanan keluarga yang menjadi mitra pemerintah Kota Depok dalam memberikan edukasi serta pendampingan masyarakat khususnya keluarga
41	Sekolah Pra NIkah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	SekolahPra-Nikah yang dicetuskan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana (DP3AP2KB) bersinergi dengan Pusat PembelajaranKeluarga (PUSPaga) merupakan salah satu cara yang dapat memberikan wawasan, dan keterampilan bagaimana membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
42	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak merupakan salah satu aspirasi Forum Anak. Diakomodir aspirasinya oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuandan PerlindunganAnak, Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Depok, sebagai upaya pemenuhan hak anak pada indicator Partisipasi Anak di klaster 1(satu) pemenuhan hak anak yaitu Hak

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			Sipil dan Kebebasan. Bahwa setiap anak memiliki hak dalam bentuk partisipasi termasuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.
43	Ngakak (Ngobrol Kecil Tapi Asik) Bareng Duta Genre Kota Depok	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Ngobrol Kecil Tapi Asik bareng Duta Genre Kota Depok merupakan salah satu inovasi yang digagas oleh Forum Genre Kota Depok. Program ini berisikan tentang kegiatan yang dilakukan oleh Duta Genre Kota Depok untuk menyebarkan informasi sekaligus edukasi kepada remaja kota Depok melalui pemanfaatan media sosial yang ada, yaitu Instagram.
44	Sistem Informasi Promosi Investasi Online (SIPION) Kota Depok	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem Informasi Promosi Investasi Online (SIPION) di Kota Depok kegiatan promosi investasi tidak hanya terbatas pada pelaksanaan forum investor dan pameran investasi saja, namun dapat juga dikembangkan melalui sarana media lain berbasis aplikasi yang dapat diakses secara online oleh Masyarakat atau Investor yang tertarik untuk mengetahui potensi investasi di Kota Depok sehingga dapat dengan mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di Kota Depok.
45	PENGGUNAAN LKS LIVEWORKSHEET UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS PEMBELAJARAN IPA	Dinas Pendidikan/Disdik	Kata ‘LKS LIVEWORKSHEET’ bermakna Lembar Kerja Siswa Smart, Inovatif dan Aktif dimana Lembar Kerja Digital ini membangkitkan semangat siswa untuk menyimak materi,mengerjakan soal serta tampilan menunya yang Smart sehingga mudah diakses oleh HP atau Gadget siswa. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah bersifat online/ tanpa diinstal, untuk mengerjakan soal tidak perlu registrasi, tampilan lembar kerja yg menarik dan kreatif, guru dapat membuat Lembar Kerja sendiri ataupun bisa memakai lembar kerja yg sudah tersedia dari berbagai macam pelajaran yang diinginkan.
46	"Penggunaan Aplikasi Live Worksheet dan Jamboard untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik dalam Pembelajaran” di SMP Negeri 12 Depok.	Dinas Pendidikan/Disdik	Penggunaan Aplikasi Live Worksheet dan Jamboard untuk Meningkatkan Keaktifan Peserta Didik dalam Pembelajaran” di SMP Negeri 12 Depok, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang dapat membuat aktif peserta didik dikarenakan rendahnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di sekolah magang 1
47	Inovasi Pembelajaran melalui Channel Youtube Disdik Kota	Dinas Pendidikan/Disdik	Channel Youtube Disdik Kota Depok ini dengan tema "Belajar Bersama Dinas

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
	Depok (BINTANG)		Pendidikan Depok Provinsi Jawa Barat" adalah salah satu inovasi Dinas Pendidikan dalam melayani kebutuhan masyarakat Kota Depok terkait informasi dan konten pendidikan. Materi tayangan di isi oleh hasil karya guru - guru yang mengajar di Kota Depok serta materi tayangan hasil kerjasama dengan lembaga lain. Manfaat dari channel ini adalah informasi terkait kebijakan Dinas Pendidikan Kota Depok, Jadwal dan Materi pembelajaran dapat diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat, baik guru, siswa dan orang tua.
48	Meningkatkan hasil belajar IPA materi induksi elektromagnetik melalui E-learning dengan media video pembelajaran pada siswa kelas IX SMPN 10 Depok Tahun ajaran 2020/ 2021	Dinas Pendidikan/Disdik	Video pembelajaran ini berisi tentang materi IPA yang dapat di tonton dan dipelajari secara berulang-ulang oleh peserta didik sehingga materi pembelajaran dapat dipahami oleh peserta didik.
49	PENINGKATAN MINAT BACA SISWA MELALUI PELATIHAN LITERASI BERCERITA GURU BERBASIS BLENDED LEARNING DI SDN SUKAMAJU 6	Dinas Pendidikan/Disdik	Memberikan pemahaman dan keterampilan yang menunjang mengenai strategi dan media pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran melalui media daring bagi seluruh guru di SDN Sukamaju 6
50	Peningkatan Motivasi Belajar Siswa dengan Media Pembelajaran Interaktif Melalui In House Training di SD Negeri Beji Timur 1	Dinas Pendidikan/Disdik	Motivasi adalah hal penting dalam kegiatan belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Setiap siswa juga memiliki motivasi akan memacu semangat bersaing dengan teman-temannya dan akan menumbuhkan iklim belajar yang baik sehingga tujuan pemebelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan dan kegiatan
51	Upaya peningkatan motivasi belajar siswa melalui GARAM (gambar instagram) di SD negeri gandul 2	Dinas Pendidikan/Disdik	Melaksanakan Rencana Proyek Kepemimpinan (RPK), Mengadakan kegiatan IHT Program GARAM, dan membuat pembelajaran melalui Instagram. Sedangkan materi OJT yang dilaksanakan di sekolah lain (sekolah magang) yaitu kegiatan upaya peningkatan Analisis Kebutuhan dan Pengembangan Keprofesian (AKPK) calon kepala sekolah/madrasah.
52	Meningkatkan Motivasi belajar Siswa dengan Video pembelajaran dengan Aplikasi canva	Dinas Pendidikan/Disdik	Meningkatkan kemampuan guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan video pembelajaran dengan aplikasi canva
53	Upaya Meningkatkan Minat Literasi Siswa Melalui Media Pembelajaran E-Learning Berbasis Vlogger Ceria	Dinas Pendidikan/Disdik	a. Meningkatkan Minat Literasi Siswa Lebih Menjadi Kreatif b. Meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah: 1) Kompetensi Kepribadian

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			2) Kompetensi Sosial 3) Kompetensi Kewirausahaan c. Menganalisis dampak peningkatan kualitas pembelajaran bagi murid
54	"Upaya Peningkatan Kreativitas Berfikir Siswa melalui Penggunaan alat Peraga Koordinasi Intens dengan Tema (KIT) dalam pembelajaran di SDN Cipayung".	Dinas Pendidikan/Disdik	1. Meningkatnya kompetensi kepribadiaan, kewirausahaan, dan sosial calon kepala sekolah melalui kegiatan Rencana Proyek Kepemimpinan (RPK) dengan tema "Kreativitas Berfikir Siswa melalui Penggunaan alat Peraga Koordinasi Intens dengan Tema (KIT) di SDN Cipayung " 2. Meningkatnya Standar Nasional Pendidikan khususnya pada Standar Kompetensi Lulusan Melalui In House Training bagi Guru SDN Cipayung. 3. Meningkatnya kompetensi terendah hasil AKPK calon kepala sekolah melalui Peningkatan Kompetensi di SD Magang kedua (SD Negeri Sukmajaya 1). 4. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di kelas sebagai dampak dari kegiatan In House Training Penggunaan alat peraga. 5. Meningkatnya kualitas proses belajar yang ditunjukkan dengan kebahagian siswa (Student Weelbeing) selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
55	Peningkatan Kompetensi Guru menggunakan PMP (Pengembangan Media Pembelajaran) Mewujudkan Student Wellbeing di UPTD SMP Negeri 1 Depok	Dinas Pendidikan/Disdik	1. Untuk penyelesaian masalah pembelajaran di sekolah 2. Untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah (kepribadian, sosial dan kewirausahaan), 3. Untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
56	Peningkatan Minat Siswa dalam Pembelajaran dengan Media Pembelajaran Audio Visual (Powerpoint) dan Penggunaan Google Meet Melaui IHT diSDN Beji 3.	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan kompetensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur, percaya diri, kerja sama dan kemandirian bagi siswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
57	Meningkatkankan Keterampilan Berpikir Dan Bertindak Kreatif Peserta Didik Melalui Media Canva Di SDN Sukmajaya 5 Kota Depok	Dinas Pendidikan/Disdik	Meningkatkan Keterampilan Berpikir Dan Bertindak Kreatif Peserta Didik Melalui Media Canva Di SDN Sukmajaya 5 Kota Depok
58	Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Membuat Media Pembelajaran Video dengan	Dinas Pendidikan/ Disdik	1. Meningkatnya 5 (lima) dimensi kompetensi calon kepala sekolah. Meningkatnya kemampuan guru dalam media pembelajaran Video 2. Meningkatnya guru dalam proses

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
	Aplikasi Power Point di SDN Depok Jaya 1		pembelajaran menggunakan aplikasi Power Point 3. Meningkatnya pengendalian diri calon kepala sekolah dalam menghadapi masalah -masalah pekerjaan. 4. Meningkatnya keteladanan calon kepala sekolah dalam berbicara, bersikap dan berprilaku 5. Meningkatnya pemahaman calon kepala sekolah dalam penyusunan program Kerjasama dengan pihak lain, baik perorangan maupun institusi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan. 6. Meningkatnya pemahaman calon kepala sekolah dalam melakukan cara evaluasi dan perbaikan terhadap program kegiatan Kerjasama dengan perorangan atau institusi pemerintah/swasta. 7. Meningkatnya kemampuan calon kepala sekolah dalam membuat alternatif pemecahan masalah yang relevan sehingga bisa menghasilkan kinerja yang efektif dan efesien. 8. Meningkatnya kualitas proses belajar yang ditunjukkan dengan kebahagian siswa (Student Weelbeing) selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
59	PEMBUATAN WEB MATA PELAJARAN DENGAN APLIKASI GOOGLE SITES UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI SISWA KELAS 8	Dinas Pendidikan/Disdik	Pembuatan web mata pelajaran ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam belajar terutama mempelajari materi yang sedang diajarkan.
60	MENINGKATNYA MINAT BELAJAR SISWA MELALUI PENERAPAN BELAJAR SECARA BERDIFERENSIASI	Dinas Pendidikan/Disdik	1. Meningkatnya kompetensi kepribadian, kewirausahan dan sosial calon kepala sekolah melalui penyusunan Rencana Proyek Kepemimpinan (RPK) dalam upaya peningkatan minat belajar siswa melalui penerapan belajar secara berdiferensiasi. 2. Meningkatknya standar proses khususnya pada peningkatan kompetensi guru dalam penerapan belajar secara berdiferensiasi melalui In House Training (IHT) 3. Meningkatknya kualitas proses pembelajaran yang berdampak pada student wellbeing di SD Negeri Sukatani 4. 4. Meningkatknya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial Calon Kepala Sekolah melalui Peningkatan Kompetensi di Sekolah Magang 2.

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
61	MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DAN KOLABORATIF SISWA MELALUI IMPLEMENTASI KADS-4C DI SDN TANAH BARU 2	Dinas Pendidikan/Disdik	Meningkatnya kompetensi guru dan kemampuan berpikir kritis dan kolaraboratif siswa melalui implementasi KADS-4C meningkat.
62	Meningkatkan Kemapuan Berpikir Kritis dan Bertidak Kaloboratif Siswa Melalui Implementasi Kecakapan Pembelajaran Abad 21	Dinas Pendidikan/Disdik	Meningkatnya kompetensi guru dan kemampuan berpikir kritis dan kolaraboratif siswa melalui implementasi KADS-4C meningkat.
63	Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun Instrumen Penilaian Yang Objektif dan Akuntabel Melalui Workshop di SMP Negeri 22 Depok	Dinas Pendidikan/Disdik	Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Instrument Penilaian Yang Objektif Dan Akuntabel Melalui Workshop Di SMP Negeri 22 Depok
64	Meningkatkan Minat Baca Siswa Dengan Media Belajar Literasi Di SD Negeri Sukamaju 3	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan kompetensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
65	PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA MELALUI KEGIATAN WORKSHOP PEMANFAATAN ZOOM MEET PADA GURU	Dinas Pendidikan/Disdik	untuk meningkatkan kemampuan guru memanfaatkan media pembelajaran dalam meningkatkan efesiensi dan efektivitas pembelajaran agar lebih aktif baik untuk peserta didik, orang tua ataupun tenaga pendidik.
66	Peningkatan Kompetensi Guru dalam Penyusunan RPP Kanyabi PJJ di SMP Negeri 7 Depok	Dinas Pendidikan/Disdik	Pada kegiatan On-the Job Training (OJT) 2, judul yang dituangkan calon kepala sekolah dalam Rencana Proyek Kepemimpinan (RPK) adalah “ Penyusunan RPP Kanyabi PJJ di SMPN 7 Depok”
67	SISTEM INFORMASI SMART EDUCATION DEPOK (SISEDEP)	Dinas Pendidikan/Disdik	SISEDEP adalah Sistem Informasi Smart Education Kota Depok yang merupakan tool (alat bantu) yang akan memberikan kemudahan dalam pencarian informasi terkait data pendidikan, layanan dan informasi seputar pendidikan dengan cepat dan mudah, pengumuman yang disampaikan dinas pendidikan, berita terbaru mengenai Dinas Pendidikan Kota Depok dan memberikan kemudahan pemerintah dan Dinas Kota Depok dalam memberikan informasi terkait pendidikan untuk semua pendidik dan pelajar di Kota Depok yang hanya akan bisa di akses oleh staff Dinas Pendidikan.
68	PENINGKATAN KEAKTIFAN SISWA DALAM BELAJAR DI KELAS MELALUI PENERAPAN COACHING	Dinas Pendidikan/Disdik	Pendekatan coaching dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pembelajaran. In House Training (IHT) peningkatan keaktifan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			siswa dalam belajar melalui penerapan coaching diharapkan mampu menjadikan siswa lebih terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran
69	MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA MELALUI KEGIATAN LITERASI DIGITAL REMBUK (RESUME BUKU ELEKTRONIK)	Dinas Pendidikan/Disdik	Kemampuan berpikir kreatif siswa SDN Pondok Petir 03 meningkat
70	Upaya Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa melalui Penyusunan Instrumen PMP (Penilaian Mata Pelajaran) yang berbasis literasi Numerasi di SMP Negeri 7 Depok	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan kompetensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
71	PENINGKATAN KOMPETENSI SIKAP SISWA MELALUI KEGIATAN PENGUATAN KARAKTER DENGAN MEDIA ZOOM DI SDN DEPOK JAYA	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan kompetensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
72	Inovasi Aplikasi Manajemen Permohonan Bantuan Hibah dan Bansos	Dinas Pendidikan/Disdik	Pembangunan Aplikasi E-Hisos merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan baik secara internal maupun pelayanan publik yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi. Penataan dan pengelolaan data yang baik akan menghasilkan banyak informasi yang dibutuhkan dalam sistem manajemen. Informasi yang didukung dengan teknologi pun akan mudah dikembangkan menjadi informasi statistik dan produk-produk yang baru. Melalui penataan system manajamen dan proses kerja dilingkungan pemerintahaan dengan mengoptimalkan pemaanfaatan teknologi informasi.
73	MENINGKATKATKAN MOTIVASI BELAJAR SISWA MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN POWER POINT INTERAKTIF DI SD NEGERI KEMIRIMUKA 1 DEPOK	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan kompetensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
74	Meningkatnya Kemampuan Berfikir Kritis Siswa Melalui	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
	Power Point dalam Pembelajaran di SDN Curug 01		kompetensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
75	PENINGKATAN PRESTASI SISWA MELALUI IHT PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM MELAKSANAKAN PROSES DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan komtensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
76	Meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir dan bertindak kritis melalui pembelajaran power point dengan metode diskusi	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan komtensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
77	Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui IHT Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis IT Bagi Guru SDN Cilangkap 8 Tapos Depok	Dinas Pendidikan/Disdik	Calon Kepala Sekolah dapat meningkatkan komtensi kepribadian sosial maupun kewirausahaan dengan perencanaan yang baik, Meningkatnya sikap jujur,percaya diri ,kerja sama dan kemandirian bagi isswa guru maupun Calon kepala sekolah dan Terwujudnya student wellbeing
78	Penerbitan Majalah RJB Ceria untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa	Dinas Pendidikan/Disdik	penerbitan sebuah majalah sekolah yang diberi nama MAJALAH RJB CERIA, adapun makna dari RJB CERIA sebagai berikut ; RJB adalah singkatan dari nama sekolah Rangkapan Jaya Baru dan CERIA merupakan singkatan CERDAS, ENERJIK, RIANG, INOVATIF, dan AHLAK MULIA.
79	E RETRIBUSI (profil pasar)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	E RETRIBUSI merupakan Program pengelolaan pasar rakyat berbasisi digital termasuk layanan di dalamnya Profil pasar rakyat (Data pasar rakyat, data sarana prasana pasar rakyat, data pedagang, data kios, data los) hingga ke transaksi pembayaran (TRANSAKSI ONLINE)
80	Pasar Rakyat Online	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Pasar rakyat online adalah sebuah program yang menawarkan kemudahan berbelanja dari rumah, membantu perluasan pangsa pasar terhadap pedagang pasar rakyat pada pasar digital Terlebih, di masa pandemi, mobilitas masyarakat sangat terbatas, kebutuhan ini dirasa sangat mendesak

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			dirasakan oleh masyarakat di kota-kota besar.
81	PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA TERINTEGRASI DAN UNGGUL (PANJI BIRU)	Dinas Perhubungan	Dengan adanya peralatan yang terintegrasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Depok dapat memberikan kepastian layanan kepada masyarakat terkait hasil pengujian kendaraan, karena hasil yang di keluarkan oleh alat uji langsung terhubung dengan Sistem Informasi Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUE) Kementerian Perhubungan. Sehingga pada 2 januari 2020 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Depok telah dapat memberikan layanan Bukti lulus Uji Elektronik kepada masyarakat di Kota Depok
82	PAGAR KOVI (PerwAl GrAtis Rusunawa dampaK cOVId-19)	Dinas Perumahan dan Permukiman	Membantu meringankan beban ekonomi dan memberikan stimulus kepada wajib retribusi yang terdampak Covid – 19.
83	Pengelolaan Makam BESTARI (Bersih, Tertata dan Asri) di UPTD Pemakaman Umum Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Depok	Dinas Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan Makam BESTARI (Bersih, Tertata dan Asri) ini mengusung konsep penataan dengan melarang penembokan pada badan makam dan menggantinya hanya dengan penempatan batu nisan yang dibuat seragam baik bentuk maupun ukuran, serta rumputisasi. Tata letak makam yang belum teratur diposisikan agar rapih dengan jarak antar makam dibuat sama.
84	S'DOGER (SOP Teknis Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Milik Pemerintah Kota Depok yang Responsif Gender)	Dinas Perumahan dan Permukiman	SOP Teknis Perencanaan Pembangunan Ruang Publik Milik Pemerintah Kota Depok yang Responsif Gender
85	Pengembangan Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial (SITPAS)	Dinas Sosial	- Management Knowledge terkait Bansos dan DTKS - Management Permohonan, verifikasi, validasi - Management Review, dan persetujuan permohonan - Pelaporan, Informasi Statistik dan Dashboard
86	SIMPEL KEPOK (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Kerja Depok)	Dinas Tenaga Kerja Kota Depok	Aplikasi SIMPEL KEPOK ini memungkinkan pengelola dapat melakukan evaluasi dan analisis setiap saat sebagai informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan.
87	Hai Depok	Diskominfo Depok	Aplikasi Hai Depok untuk kemudahan akses layanan untuk publik; menambah layanan strategis yang dibutuhkan untuk pelayanan publik; terbentuknya aplikasi Hai Depok yang handal dari segi kualitas data, fitur yang disediakan, dan penyajian informasi; dan juga percepatan penerapan E-Government di lingkup Pemerintah Kota Depok.

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
88	Aplikasi Hitung Suara	Diskominfo Depok	Pemerintah daerah mendapatkan amanat dimana diharuskan mengirimkan laporan pelaksanaan dan hasil pemungutan suara di wilayahnya masing-masing ke pemerintah provinsi, untuk itulah HITUNG SUARA memungkinkan laporan dapat dilakukan lebih cepat di hari yang sama tanpa menunggu hasil dari penyelenggara pemilihan daerah dengan memaksimalkan peran perangkat daerah wilayah.
89	Layanan Internet RW/ Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	Diskominfo Depok	Memberikan layanan WiFi gratis bagi masyarakat Kota Depok
90	Smart Portal OPD	Diskominfo Depok	Smart Portal Perangkat Daerah seseorang admin mudah memanajemen pengelolaan seluruh website Perangkat Daerah kota depok. Disamping itu, Smart Portal Perangkat Daerah dijadikan sebagai Branding publik untuk menanamkan image dan citra dari sebuah brand kepada masyarakat dimana telah terintegrasi dengan layanan lain yang ada di Pemerintah Kota Depok.
91	Sistem Layanan Online Kecamatan dan Kelurahan (SILO)	Diskominfo Depok	Membuat kinerja sistem pelayanan menjadi efektif dan efisien serta membuat adanya standarisasi dokumen pelayanan untuk seluruh Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Depok. Dibutuhkan peran dari Pemerintahan dalam mengambil keputusan, bisnis strategi aplikasi, standarisasi dan manajemen aplikasi secara detail.
92	Pustaka New Normal Kelurahan Tanah Baru - Kota Depok (PUNUK ONTA)	Kecamatan Beji	Dipelopori oleh Pustaka Entong RW 06 sebagai salah satu Pustaka yang dikelola secara mandiri oleh pemuda dan remaja, dalam hal ini Karang Taruna Unit 06, RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok, keberadaan pustaka memiliki peran yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kualitas sumberdaya masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di usia dini dalam penerapannya.
93	Antar Jemput Layanan Lansia (ANJELLA)	Kecamatan Beji	ANJELLA merupakan suatu inovasi yang berlandaskan Akhlak dan Adab yang menjadikan Lansia (seseorang yang telah mencapai usia enam puluh tahun atau lebih sebagai objek inovasi, yaitu suatu inovasi antar jemput layanan pemerintahan umum bagi lansia,
94	Pojok DEsign & PROMosi onLINE (PODESPROMLINE) Kelurahan Tanah Baru	Kecamatan Beji	PODESPROMLINE hadir sebagai inovasi yang memiliki konsep Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung untuk

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			UKM di wilayah Kelurahan Tanah Baru dalam pembuatan Design Kemasan dan Digitalisasi Pemasaran Secara Online dengan Pemanfaatan Tekhnologi Informasi.
95	Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan Barcode Google Form	Kecamatan Cimanggis	berupa Rekapitulasi Kuisioner Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Cimanggis dalam bentuk Diagram Lingkaran dan atau Spreadsheet/Excel.
96	Pondok Konsultasi Keluarga Kelurahan Depok Jaya (PONSEL DJ)	Kecamatan Pancoran Mas	Peningkatan kesadaran masyarakat Kelurahan Depok Jaya terhadap penanganan permasalahan didalam keluarga, Fungsi dari layanan ini adalah edukasi keluarga dan konsultasi permasalahan didalam keluarga untuk warga Kelurahan Depok Jaya, Pemberian konsultasi dilakukan dengan metode konseling secara psikologis yang memperhatikan juga kearifan lokal (Agama, sosial, dan budaya setempat), Metode konseling digunakan untuk membantu warga dalam mengenali, memahami, dan mencari solusi permasalahan didalam keluarga secara mandiri dan berdaya, Pemberian konsultasi dilakukan secara personal berdasarkan permintaan dengan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku di masyarakat.
97	pilahin.com cara mudah mengelola sampah	Kecamatan Sukmajaya	Mendigitalisasi data yang akurat sebagai informasi yang aktual dan transparan mengenai sampah anorganik yang tidak di buang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) mempermudah pengelolaan dan pencatatan jenis, jumlah sampah dari masyarakat
98	Telegram Channel “INFORMASI KECAMATAN TAPOS” demi menggalakkan sarana informasi satu pintu	Kecamatan Tapos	Menjadikan Telegram Channel “INFORMASI KECAMATAN TAPOS” sebagai sarana alternatif sosialisasi informasi pelayanan publik yang efektif dan efisien menjangkau seluruh masyarakat Kecamatan Tapos
99	SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN BERBASIS KINERJA	Rumah Sakit Umum Daerah	Melalui Si Kawat Baja masing masing perawat dapat memasukan setiap butir kegiatan yang telah dilaksanakan dalam sesuai dengan target yang ditetapkan didalam jenjang karir, pangkat/golongan dan kewenangan klinis masing masing perawat yang telah dilaksanakan kedalam menu loog book dalam sikawat baja.
100	Pengaduan Terpadu (GARUDA)	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok	Tim Garuda Satpol PP Kota Depok adalah Patroli khusus yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai

NO	JUDUL INOVASI	PERANGKAT DAERAH	DESKRIPSI
			tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan Daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok berupaya mendorong Perangkat Daerah untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun inovasi yang akan dikembangkan dan didorong dalam penilaian PPD adalah sebagai berikut :

1. Depok Single Window (DSW)

Pemerintah Kota Depok dalam rangka upaya peningkatan layanan kepada seluruh warga maka tercetus inovasi Pusat Layanan dan Informasi Kota yang mengintegrasikan semua layanan online ke dalam satu aplikasi smartphone. Inovasi ini dinamakan aplikasi Depok Single Window (DSW). Inovasi Depok Single Window turut mendukung 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan sebagai penjabaran RKP 2024. Dengan kemampuan DSW yang memiliki banyak fitur, inovasi ini mampu meningkatkan produktivitas warga Kota Depok dalam keterkaitannya dengan layanan yang diberikan oleh DSW. Pembangunan DSW tersebut membuat layanan Pemerintah Kota Depok kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan dapat menjadi alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja yang terukur serta masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan hanya bersumber dari satu aplikasi.

Namun seiring dengan berkembangnya sistem atau aplikasi serta beberapa yang dikembangkan stakeholder terkait maka data yang dihasilkan dari segi sektornya pun menjadi semakin banyak. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengembangan aplikasi Depok Single Window yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan sistem di setiap OPD dan kebutuhan akan datanya. Sistem utama yang ada dalam aplikasi DSW dapat direplikasi, karena sistem core yang ada sangat user friendly. Aplikasi ini juga disertai SOP dan manual book baik secara hard copy maupun soft copy yang bisa diunduh bagi pengguna dan pengelola.

Gambar 4.5 Aplikasi Depok Single Window



Tabel 4.42.. Kerangka Kerja Logis Inovasi DSW

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Dampak : Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan segala pelayanan hanya bersumber dari satu aplikasi	Meningkatnya user/pengguna aktif aplikasi DSW	Jumlah pendaftar user/pengguna aktif
Outcome Antara : Bertambahnya layanan yang digunakan	Kerjasama dengan Perangkat Daerah lain dalam layanan yang diberikan	Jumlah layanan yang tersedia
Outcome Langsung : Peningkatan capaian keterselesaian layanan	Naiknya angka penyelesaian layanan	Penyelesaian Layanan
Output : Aplikasi DSW	Terimplementasikannya aplikasi DSW	Jumlah pihak pengguna aplikasi DSW
Kegiatan/Proses : 1. Penjaringan ide dari calon pengguna dan pengelola aplikasi 2. Penyusunan penetapan prioritas ide 3. Pembangunan aplikasi DSW 4. Bimbingan Teknis aplikasi DSW kepada pengguna aplikasi 5. Sosialisasi DSW kepada masyarakat 6. Implementasi aplikasi DSW 7. Pemanfaatan data/laporan dari aplikasi DSW 8. Pemantauan dan evaluasi aplikasi DSW		
Input : 1. Regulasi :	1. Tersusunnya regulasi 2. Tersedainya anggaran 3. Tersedianya SDM	1. Jumlah regulasi yang tersusun 2. Jumlah anggaran

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
– Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas – Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Depok Nomor : 220/14/Kpts/Diskominfo/2021 Tentang Penetapan Aplikasi Depok Single Window – Kota Depok Anggaran : Rp. 85.000 per tahun 3. SDM : TIM PENGELOLA DEPOK SINGLE WINDOW KOTA DEPOK 4. Institusi/stakeholders yang terlibat Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan DSW 5. Pemanfaatan teknologi : aplikasi mobile pada android dan ios 6. Sarana dan prasarana : Server pada Diskominfo	4. bertambahnya institusi/ stakeholders yang terlibat 5. banyaknya pengguna aktif 6. Adanya server dangan domain resmi Pemerintah Kota Depok	3. Jumlah SDM yang terlibat 4. Jumlah institusi/ stakeholders yang terlibat 5. Jumlah pengguna aktif 6. Jenis sarana dan prasarana yang digunakan
Permasalahan : Pengembangan dan evaluasi. Penyebab Permasalahan : Kurang SDM.		

2. Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Kerja Depok (SIMPEL KEPOK)

Salah satu kebijakan pemulihan ekonomi Kota Depok adalah pengendalian pengangguran. Penyumbang TPT Kota Depok berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun ke tahun didominasi lulusan SMA/SMK. Hal ini disinyalir salah satu penyebabnya adalah lulusan SMK yang tidak dapat terserap di dunia kerja, akibat ketidaksesuaian apa yang diajarkan dengan ketrampilan/keahlian yang diperlukan di pasar kerja. Mismatch antara angkatan kerja dan kebutuhan dunia kerja diselesaikan melalui peningkatan mutu angkatan kerja dan pemagangan. Peningkatan mutu angkatan kerja dilakukan dengan strategi peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi atau sekolah kejuruan. Peningkatan pendidikan angkatan kerja guna peningkatan keterampilan kerja dilakukan dengan meningkatkan tingkat partisipasi pencari kerja dalam mengakses program pelatihan di Kota Depok yang dipermudah melalui inovasi Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Kerja Depok atau SIMPEL KEPOK.

Inovasi SIMPEL KEPOK turut mendukung Arah Kebijakan Prioritas Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan sebagai penjabaran RKP 2024, khususnya Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan pertama yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dimana RKP 2024 menetapkan target TPT nasional sebesar 5,0–5,7 persen sebagai sasaran pembangunan menuju transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui SIMPEL KEPOK maka pencari kerja di Kota Depok semakin mudah mengakses dan mengikuti program-program pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi, sehingga meningkatkan keterampilan kerja. Dengan meningkatnya daya saing angkatan kerja di Kota Depok turut menyelesaikan permasalahan *mismatch* sehingga angkatan kerja yang ada dapat lebih banyak terserap oleh dunia kerja dan dapat menekan angka pengangguran sebagai dampak pandemi Covid-19. Upaya penurunan angka pengangguran di Kota Depok turut mendukung capaian target nasional dalam Penanggulangan Pengangguran Disertai Peningkatan *Decent Job*.

Inovasi SIMPEL KEPOK secara tematik difokuskan pada pengendalian angka pengangguran Kota Depok dan secara holistik (technochratic planning) telah menjabarkan tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari level indikator makro, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan.

Hasil analisis holistik menjadi dasar dalam menentukan integrasi dan langkah tindak lanjut serta peran para pemangku kepentingan sesuai tingkat permasalahannya. SIMPEL KEPOK telah mengintegrasikan peran para pemangku kepentingan, antara lain Pemerintah Kota Depok, masyarakat (pencari kerja), dunia pendidikan yaitu Bursa Kerja Khusus (BKK), Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), pemberi kerja atau dunia usaha, akademisi yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Continuing Education Program - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (LPK CEP - FT UI) dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan, diantaranya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Program CSR dari perusahaan berupa bantuan peminjaman peralatan pelatihan dan bantuan peralatan usaha bagi alumni peserta pelatihan. Alumni peserta pelatihan juga terlibat dalam aksi sosial berupa bakti sosial potong rambut di lokasi marginal guna mendukung peningkatan keterampilan alumni peserta pelatihan.

Secara spasial inovasi SIMPEL KEPOK memetakan lokasi-lokasi yang menjadi prioritas kegiatan pelatihan dengan tersedianya informasi asal peserta dari setiap kecamatan. Hal ini untuk memperhatikan pemerataan distribusi calon peserta pelatihan. Melalui SIMPEL KEPOK, program pelatihan kerja juga memetakan wilayah- wilayah atau kecamatan-kecamatan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, termasuk kelurahan yang menjadi lokus program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Selain pemetaan wilayah, melalui SIMPEL KEPOK memetakan masyarakat miskin. Ada kuota pelatihan sebesar 25 persen untuk masyarakat miskin atau yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Depok.

SIMPEL KEPOK sebelumnya telah diimplementasikan selama 2 tahun, namun awalnya hanya digunakan untuk pelaporan LPK. Kebaruan atau novelty dari sistem ini adalah pengembangan fungsi, yaitu untuk pendaftaran pelatihan selain pelaporan LPK. Pengembangan ini dijadikan sebagai sarana sosialisasi dan promosi pelatihan dari berbagai lembaga/instansi baik Pemerintah maupun swasta. Sebelumnya pencari kerja di Kota Depok terbatas dalam mengakses program-program pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi, akibatnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan kerja juga terbatas. Padahal tersedia berbagai jenis pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Demikian halnya, kesulitan juga dialami

oleh pihak Pemerintah Kota Depok dalam menjaring sasaran yang tepat guna menyelesaikan permasalahan mismatch. Dengan dibangunnya SIMPEL KEPOK memudahkan pencari kerja dalam mengakses program-program pelatihan kerja/kompetensi;

Sebelumnya pelaporan dan monitoring evaluasi terhadap LPK yang ada di Kota Depok dilakukan secara konvensional dengan cara LPK menyampaikan laporannya ke Dinas Tenaga Kerja, demikian halnya Dinas Tenaga Kerja mengunjungi satu per satu LPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dengan adanya SIMPEL KEPOK maka seluruh LPK di Kota Depok melaporkan kinerjanya secara online. Pemerintah Kota Depok sebagai pengelola SIMPEL KEPOK mendapatkan data kegiatan seluruh LPK dengan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya baik anggaran, waktu maupun SDM;

Table 4.43. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Inovasi Simpel Kepok

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Dampak : Terbatasnya kesempatan pencari kerja di Kota Depok untuk meningkatkan keterampilan kerja	Meningkatnya kesempatan pencari kerja untuk meningkatkan keterampilan kerja	Jumlah pendaftar pelatihan kerja
Outcome Antara : 1. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pelatihan (training need analysis) yang didasarkan data 2. Pengambilan kebijakan dalam penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pendidikan berdasarkan hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan 3. Kerjasama dan kolaborasi dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIMPEL KEPOK dalam menurunkan angka pengangguran melalui peningkatan pendidikan	1. Digunakannnya Laporan atau report hasil SIMPEL KEPOK 2. Tersedianya bahan Analisis Kebutuhan Pelatihan 3. Terselenggaranya kerjasama dan kolaborasi dalam pengelolaan dan penggunaan aplikasi SIMPEL KEPOK yang dapat diakses secara terbuka oleh seluruh pihak	1. Jumlah data pelatihan dan data kegiatan di LPK secara real time 2. Jumlah hasil Analisis Kebutuhan Pelatihan 3. Jumlah pihak yang terlibat sebagai pengelola dan pengguna aplikasi SIMPEL KEPOK serta mitra terkait
Outcome Langsung : Menurunnya jumlah pengangguran di Kota Depok	Turunnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Output : Aplikasi SIMPEL KEPOK	Terimplementasikannya aplikasi SIMPEL KEPOK	Jumlah pihak pengguna aplikasi SIMPEL KEPOK
Kegiatan/Proses : 1. Penjaringan ide dari calon pengguna dan pengelola aplikasi 2. Penyusunan penetapan prioritas ide 3. Pembangunan aplikasi SIMPEL KEPOK	1. Terakomodirnya gagasan dan kebutuhan pengguna dan pengelola aplikasi 2. Didukungnya penetapan ide oleh pakar di bidang TI 3. Digunakannya aplikasi SIMPEL KEPOK	1. Jumlah pihak yang terlibat penjaringan ide 2. Jumlah penetapan ide yang tersusun 3. Adanya aplikasi SIMPEL KEPOK 4. Jumlah peserta Bimbingan Teknis

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
4. Bimbingan Teknis aplikasi SIMPEL KEPOK kepada pengguna aplikasi 5. Sosialisasi SIMPEL KEPOK kepada masyarakat 6. Implementasi aplikasi SIMPEL KEPOK 7. Pemanfaatan data/laporan dari aplikasi SIMPEL KEPOK 8. Pemantauan dan evaluasi aplikasi SIMPEL KEPOK	4. Terselenggaranya Bimbingan Teknis 5. Terselenggaranya Sosialisasi 6. Terimplementasikannya aplikasi SIMPEL KEPOK; 7. Dimanfaatkannya data/laporan dari aplikasi SIMPEL KEPOK sebagai bahan dalam menganalisis kebutuhan pelatihan (training need analysis) 8. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	5. Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi 6. Jumlah pencari kerja yang mengakses SIMPEL KEPOK; 7. Jumlah data/laporan dari aplikasi SIMPEL KEPOK yang dimanfaatkan sebagai bahan dalam menganalisis kebutuhan pelatihan 8. Jumlah pemantauan dan evaluasi
Input : 1. Regulasi : Keputusan Wali Kota Depok No.470/212/Kpts/Disnaker/Huk/2022 Keputusan Wali Kota Depok No.470/213/Kpts/Disnaker/Huk/2022 2. Anggaran : Rp. 40.000.000 s/d Rp. 50.000.000 per tahun 3. SDM : pengelola, penerima manfaat dan mitra 4. Institusi/stakeholders yang terlibat 5. Pemanfaatan teknologi simpel.depok.go.id 6. Sarana dan prasarana : Server pada Diskominfo Helpdesk SIMPEL KEPOK	1.Tersusunnya regulasi 2. Tersedainya anggaran 3. Tersedianya SDM 4. bertambahnya institusi/ stakeholders yang terlibat 5. banyaknya pengguna aktif 6. Adanya server dangan domain resmi Pemerintah Kota Depok	1. Jumlah regulasi yang tersususn 2. Jumlah anggaran 3. Jumlah SDM yang terlibat 4. Jumlah institusi/ stakeholders yang terlibat 5. Jumlah pengguna aktif 6. Jenis sarana dan prasarana yang digunakan
Permasalahan : Terbatasnya akses pencari kerja dalam mengakses program-program pelatihan kerja/kompetensi yang dilaksanakan oleh pemeritah Kota Depok. Penyebab Permasalahan : Pendaftaran program-program pelatihan kerja/kompetensi masih dilakukan secara konvensional.		

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026. Rencana Kerja tersebut disusun dalam rangka pencapaian target pembangunan RPJMD pada Tahun 2024, visi dan misi kepala daerah.

Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pergeseran program dan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Penyesuaian mencangkup kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta adanya perubahan dari segi anggaran baik bertambah ataupun berkurang dan tidak tertutup kemungkinan adanya kegiatan baru di perubahan RKPD. Selain kegiatan dan atau sub kegiatan baru pada perubahan RKPD mengakomodir juga untuk penambahan anggaran maupun pengurangan anggaran. Penambahan anggaran ini dikarenakan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan pelayanan publik, pemenuhan sasaran dan target kinerja perangkat daerah serta optimalisasi peningkatan layanan aparatur. Selanjutnya pengurangan anggaran dilakukan apabila terdapat hal hal yang mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan itu tidak berjalan sebagaimana rencana. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan-perubahan diluar prediksi sebelumnya, kelengkapan dokumen dan kesiapan Sumber Daya Manusia

Berikut ini akan disajikan tabel rekapitulasi rencana perubahan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2024 sedangkan rinciannya sebagaimana terlampir dalam buku 2 yang tidak terpisahkan dari dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024.

Tabel 5.1 Ringkasan Program, Kegiatan Berdasarkan Urusan

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	3	3	3	13	13	13	91	92	95	0	0	0	0	4	0	Dinas Pendidikan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	5	5	21	21	21	81	84	95	3	1	4	1	26	1	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	11	11	22	22	22	54	55	58	1	0	0	1	4	1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	5	5	13	13	12	25	25	26	0	0	0	0	1	1	Dinas Perumahan Dan Permukiman
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	2	2	9	9	9	27	27	28	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	3	3	12	12	12	27	28	26	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	6	6	14	14	14	44	44	40	1	0	1	0	1	0	Dinas Sosial
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	5	6	15	15	16	27	25	28	1	0	1	0	2	4	Dinas Tenaga Kerja
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	7	11	16	17	26	26	46	61	2	0	9	0	15	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	4	4	11	11	9	24	24	21	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
11	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan Dan Permukiman
12	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	10	10	18	18	16	38	38	36	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan
13	Urusan Pemerintahan Bidang	5	5	5	11	11	11	26	25	25	0	0	0	0	0	1	Dinas Kependudukan

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																Dan Pencatatan Sipil
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	3	5	8	8	5	20	33	37	2	0	0	3	5	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	3	3	17	17	15	38	38	37	1	1	1	3	1	3	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	3	3	7	7	7	27	27	28	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8	8	8	12	14	14	32	32	27	0	1	0	1	0	1	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	6	6	9	10	10	21	21	21	0	0	0	0	1	1	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	4	4	13	13	13	28	28	28	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	1	1	1	4	4	4	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	2	2	2	3	3	2	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	4	4	6	6	6	9	9	9	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1	1	1	2	2	2	9	9	9	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	3	3	12	12	12	28	28	28	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	3	3	5	5	5	8	8	8	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	3	3	4	4	4	6	6	6	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	4	4	8	7	7	13	13	13	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	6	5	13	12	11	32	32	30	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2	2	2	2	2	2	6	6	6	0	0	0	0	0	0	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Dinas Tenaga Kerja
31	Sekretariat Daerah	3	3	3	18	16	17	51	51	52	0	0	1	0	1	0	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat Dprd	2	2	3	15	15	17	61	61	61	1	0	2	0	0	0	Sekretariat Dprd
33	Perencanaan	3	3	3	11	11	11	41	41	41	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
34	Keuangan	4	4	4	11	11	12	51	50	52	0	0	1	0	0	1	Badan Keuangan Daerah
35	Kepegawaian	2	2	2	10	10	10	32	32	33	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Dan

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
																	Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Pendidikan Dan Pelatihan	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37	Penelitian Dan Pengembangan	1	1	1	4	4	4	9	8	8	0	0	0	0	0	1	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
38	Inspektorat Daerah	3	3	3	9	9	9	25	25	25	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Daerah
39	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	23	23	23	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pancoran Mas
40	Kecamatan	4	4	4	10	10	10	22	22	22	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Cilodong
41	Kecamatan	4	4	5	11	11	12	23	23	24	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Sawangan
42	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	22	22	22	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Cinere
43	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	23	23	23	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Sukmajaya
44	Kecamatan	4	4	4	10	10	9	21	21	21	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Limo
45	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	23	23	23	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Beji
46	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	23	23	23	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Tapos

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD Perubahan		Perangkat Daerah / Penanggung jawab
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	15	16	17	18	19	20	21
47	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	23	23	23	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Bojongsari
48	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	23	23	23	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Cimanggis
49	Kecamatan	4	4	4	11	11	11	22	22	22	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Cipayung
50	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	6	6	11	11	11	25	25	21	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL		**192**	**192**	**200**	**508**	**508**	**511**	**1321**	**1355**	**1378**	**12**	**3**	**20**	**9**	**61**	**15**	

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 Berdasarkan Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pagu			Selisih
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
1	Dinas Pendidikan	779.119.500.540	987.974.460.050	1.071.342.928.750	292.223.428.210
2	Dinas Kesehatan	660.547.670.230	677.416.946.272	799.370.288.257	138.822.618.027
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	425.368.770.391	439.803.442.813	451.692.059.142	26.323.288.751
4	Dinas Perumahan dan Permukiman	359.411.750.424	434.665.417.971	466.725.979.873	107.314.229.449
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35.442.455.121	35.665.845.183	34.895.088.489	(547.366.632)
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	34.802.301.011	36.510.976.684	36.166.817.334	1.364.516.323
7	Dinas Sosial	29.146.429.043	29.296.014.402	29.251.162.902	104.733.859
8	Dinas Tenaga Kerja	14.901.647.812	16.535.117.100	19.899.576.985	4.997.929.173
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.797.272.562	19.210.541.595	33.112.853.945	13.315.581.383
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	20.084.605.157	20.167.609.810	29.926.080.624	9.841.475.467
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	178.388.134.750	185.836.151.819	196.581.766.905,32	18.193.632.155,32
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.998.995.350	23.922.388.653	23.796.270.262	(202.725.088)
13	Dinas Perhubungan	87.192.414.800	85.781.952.989	84.640.067.737	(2.552.347.063)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.103.061.457	39.041.829.307	38.580.673.457	(1.522.388.000)
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	32.676.618.974	32.108.932.974	31.227.892.022	(1.448.726.952)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.937.303.897	19.021.056.235	17.648.283.135	(1.289.020.762)
17	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	30.729.014.187	30.783.030.682	29.885.055.878	(843.958.309)
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.283.932.704	16.366.466.816	16.040.435.546	(1.756.502.842)
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	33.707.911.722	32.765.502.572	32.532.942.686	(1.174.969.036)
20	Sekretariat Daerah	126.440.118.158	127.205.385.180	145.443.574.920	19.003.456.762
21	Sekretariat DPRD	117.031.318.591	149.635.009.756	149.332.735.756	32.301.417.165
22	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	20.034.474.398	19.430.704.323	19.810.464.323	(224.010.075)
23	Badan Keuangan Daerah	161.155.315.902	154.755.324.400	146.550.640.377	(14.604.675.525)
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41.687.612.689	38.589.685.360	32.183.045.251	(9.504.567.438)

No	Perangkat Daerah	Jumlah Pagu			Selisih
		RKPD 2024	APBD 2024	RKPD 2024 Perubahan	
1	2	3	4	5	6=(5-3)
25	Inspektorat Daerah	22.636.722.419	22.611.458.019	21.825.609.019	(811.113.400)
26	Kecamatan Pancoran Mas	40.141.025.497	39.308.991.167	37.774.896.647	(2.366.128.850)
27	Kecamatan Cilodong	31.840.438.854	30.665.365.552	29.203.379.231	(2.637.059.623)
28	Kecamatan Sawangan	41.405.373.000	41.063.552.850	39.497.452.114	(1.907.920.886)
29	Kecamatan Cinere	24.161.580.865	23.525.033.695	22.880.903.768	(1.280.677.097)
30	Kecamatan Sukmajaya	43.984.853.690	42.846.502.980	41.101.584.292	(2.883.269.398)
31	Kecamatan Limo	25.737.222.072	25.072.467.411	24.869.038.986	(868.183.086)
32	Kecamatan Beji	37.945.570.544	36.599.899.165	35.347.926.363	(2.597.644.181)
33	Kecamatan Tapos	43.840.915.798	42.134.363.181	41.033.274.331	(2.807.641.467)
34	Kecamatan Bojongsari	41.226.597.000	39.301.364.636	37.941.830.823	(3.284.766.177)
35	Kecamatan Cimanggis	43.132.403.066	41.416.013.866	39.639.191.468	(3.493.211.598)
36	Kecamatan Cipayung	31.312.098.920	29.979.263.200	28.708.068.000	(2.604.030.920)
37	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	110.917.628.092	91.572.212.458	91.836.572.633	(19.081.055.459)
	Total	**3.843.271.059.687**	**4.158.586.281.126**	**4.428.296.412.231,32**	**585.025.352.544,32**

Sumber: SIPD-RI

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2024, semua Perangkat Daerah di Kota Depok mengalami perubahan anggaran antara Pagu RKPD murni dan Pagu Perubahan RKPD. Secara rinci, sebanyak **12** Perangkat Daerah mengalami peningkatan pagu anggaran dan **25** Perangkat Daerah mengalami penurunan pagu anggaran.

Perubahan yang terjadi didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya adalah mengakomodir program, kegiatan, sub kegiatan strategis tahun 2024, serta pergeseran anggaran. Selain itu, Pemerintah Kota Depok perlu menyeimbangkan antar potensi rendahnya pertumbuhan pendapatan dengan tingginya kenaikan belanja daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada perubahan anggaran ini Pemerintah Kota Depok mengambil kebijakan untuk melakukan penambahan kegiatan secara terbatas yaitu :

1. Mengalokasikan kekurangan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
2. Membiayai rencana kerja penunjang yang bersifat tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin dalam mendukung operasional sesuai tugas pokok 33 dan fungsi Perangkat Daerah seperti kekurangan pembayaran listrik, telepon, air, internet; kekurangan pembayaran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan serta pembayaran kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan;
3. Mengalokasikan dana Bagi Hasil Sawit untuk pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi
4. Mengalokasikan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau untuk tiga bidang yaitu:
   a) Bidang kesejahteraan masyarakat pada program pembinaan lingkungan sosial untuk mendanai Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi;

sebagian alokasi anggaran pada bidang ini dialihkan untuk kebutuhan sesuai prioritas daerah yaitu untuk Bantuan Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja non Penerima upah yaitu pekerja P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim);

b) Bidang kesehatan; dan

c) Bidang penegakan hukum untuk program Sosial Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

5. Mengalokasikan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik, DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
6. Mengalokasikan belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2024. Selain itu, menjadi dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta sebagai acuan proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (P-RAPBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2024.

Dalam Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024, memuat program dan kegiatan tahun 2024, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan. Secara rinci disajikan kegiatan tahun 2024, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, pengurangan atau penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Perangkat Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 dengan berorientasi pada capaian kinerja dan peningkatan kualitas pembangunan serta budaya kinerja birokrasi.

Demikian dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 ini disusun sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya meningkatkan sinergitas pembangunan di Kota Depok. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan di Kota Depok hendaknya dapat berperan aktif dalam mensukseskan, mengawal dan mendukung implementasi Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2024 demi terwujudnya Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera.

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

BUKU II

PERUBAHAN RKPD KOTA DEPOK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA DEPOK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							**779.119.500.540,00**	**987.974.460.050,00**	**1.071.342.928.750,00**	**292.223.428.210,00**							**974.561.751.200,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**779.119.500.540,00**	**987.974.460.050,00**	**1.071.342.928.750,00**	**292.223.428.210,00**							**974.561.751.200,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**779.119.500.540,00**	**987.974.460.050,00**	**1.071.342.928.750,00**	**292.223.428.210,00**							**974.561.751.200,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**411.667.629.840,00**	**535.725.914.150,00**	**457.635.749.150,00**	**85.351.970.160,00**							**497.019.600.000,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi*				100 %	100 %	1.674.024.744,00	1.671.977.150,00	1.671.977.150,00	-2.047.594,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan		1.848.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	599.999.944,00	597.952.750,00	597.952.750,00	-2.047.194,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	375.000.000,00	374.999.900,00	374.999.900,00	-100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			412.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	9 Laporan	559.024.800,00	559.024.500,00	559.024.500,00	-300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			621.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan*				100 %	100 %	405.450.325.596,00	529.585.065.000,00	451.509.065.000,00	46.058.739.404,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pendidikan		490.110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				3150 Orang /bulan	3150 Orang /bulan	405.350.326.596,00	529.485.066.000,00	451.409.066.000,00	46.058.739.404,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			490.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				17 Laporan	27 Laporan	99.999.000,00	99.999.000,00	99.999.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Pendidikan*				100 %	100 %	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pendidikan		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	1.222.169.800,00	1.198.505.300,00	828.855.300,00	-393.314.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pendidikan		1.015.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	299.999.800,00	299.474.800,00	264.944.800,00	-35.055.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				700 Orang	190 Orang	349.990.500,00	334.285.000,00	305.165.000,00	-44.825.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	200 Orang	572.179.500,00	564.745.500,00	258.745.500,00	-313.434.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Dinas Pendidikan*				100 %	100 %	2.938.499.800,00	2.887.756.800,00	3.213.241.800,00	274.742.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Pendidikan		3.573.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	19 Paket	962.500.000,00	962.500.000,00	1.287.985.000,00	325.485.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	650.000.000,00	599.950.000,00	599.950.000,00	-50.050.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			715.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	3 Laporan	770.000.000,00	769.307.000,00	769.307.000,00	-693.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			847.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	34.999.800,00	34.999.800,00	34.999.800,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase tersedianya barang milik daerah*				85 Persen	85 Persen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			77.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase tersedianya barang milik daerah*				85 Persen	85 Persen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			88.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	192.610.000,00	192.610.000,00	222.610.000,00	30.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		253.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	11 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	55.000.000,00	30.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	9 Unit	74.640.000,00	74.640.000,00	74.640.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			82.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				131 Unit	105 Unit	92.970.000,00	92.970.000,00	92.970.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Rata-rata Capaian APM**				**88.50 %**	**88.50 %**	**367.318.889.800,00**	**452.115.565.000,00**	**613.574.198.700,00**	**110.077.261.400,00**							**477.396.151.200,00**	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan*				100 %	100 %	212.132.081.600,00	276.241.508.350,00	329.776.959.450,00	117.644.877.850,00			-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Satuan Pendidikan		269.297.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	17 Unit	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.275.000.000,00	225.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				6 Paket	17 Paket	1.857.297.750,00	29.971.128.650,00	29.971.128.650,00	28.113.830.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.690.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	900.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	-275.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			990.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				207 Unit	207 Unit	5.503.500.000,00	5.503.500.000,00	5.665.167.600,00	161.667.600,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			6.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				8500 Peserta Didik	5357 Peserta Didik	10.714.000.000,00	10.714.000.000,00	9.814.000.000,00	-900.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			10.700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				50 Paket	19 Paket	599.980.500,00	35.656.690.500,00	35.616.741.500,00	35.016.761.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			45.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	1.307.660.000,00	1.307.659.950,00	1.307.659.950,00	-50,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.410.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				6135 Orang	6135 Orang	77.438.150.000,00	77.374.160.000,00	77.374.160.000,00	-63.990.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			80.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				1194 Orang	845 Orang	300.000.000,00	209.988.000,00	209.988.000,00	-90.012.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				85 Satuan Pendidikan	433 Satuan Pendidikan	599.999.850,00	380.761.200,00	380.761.200,00	-219.238.650,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				207 Satuan Pendidikan	422 Satuan Pendidikan	106.524.380.000,00	108.493.420.000,00	158.112.850.000,00	51.588.470.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			108.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				635 Orang	645 Orang	150.000.000,00	99.085.000,00	99.085.000,00	-50.915.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				-	3 Ruang	0,00	0,00	185.100.000,00	185.100.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			242.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				420 Orang	420 Orang	100.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	76.500.000,00	76.500.000,00	-23.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	79.999.750,00	79.999.750,00	-20.000.250,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				100 Kegiatan	6 Kegiatan	1.787.120.000,00	1.637.119.800,00	1.637.119.800,00	-150.000.200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			660.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				3 Paket	5 Paket	2.699.993.500,00	2.699.993.500,00	6.984.196.000,00	4.284.202.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			10.540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	90 Orang	100.000.000,00	81.492.000,00	81.492.000,00	-18.508.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				207 Satuan Pendidikan	206 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	205.010.000,00	205.010.000,00	-94.990.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan*				100 %	100 %	121.068.078.700,00	142.692.608.600,00	206.308.855.800,00	85.240.777.100,00			-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Lembaga		170.743.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium																		
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				-	7 Ruang	0,00	0,00	416.240.000,00	416.240.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			483.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				15 Unit	7 Unit	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.810.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				8 Paket	36 Paket	1.416.000.000,00	13.715.879.000,00	22.477.185.000,00	21.061.185.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			24.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				2 Paket	33 Paket	600.000.000,00	600.000.000,00	2.245.661.000,00	1.645.661.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			2.460.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				81 Unit	62 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.208.763.500,00	208.763.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			3.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				9016 Peserta Didik	6733 Peserta Didik	21.999.000.000,00	21.999.000.000,00	20.199.000.000,00	-1.800.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			22.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				50 Paket	25 Paket	599.999.950,00	4.896.509.950,00	9.116.282.050,00	8.516.282.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBANGUNAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			10.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				260 Peserta Didik	325 Peserta Didik	1.763.035.000,00	1.689.850.000,00	1.689.850.000,00	-73.185.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.870.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1000 Orang	4351 Orang	41.107.400.000,00	41.343.610.000,00	41.545.507.600,00	438.107.600,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			45.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				900 Orang	2012 Orang	392.000.000,00	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			432.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				92 Satuan Pendidikan	265 Satuan Pendidikan	1.816.243.000,00	1.816.243.000,00	1.750.276.000,00	-65.967.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.820.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				33 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	40.867.858.000,00	45.314.400.000,00	92.287.060.000,00	51.419.202.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOS REGULER	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			45.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				265 Orang	840 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				265 Orang	420 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50 Kegiatan	4 Kegiatan	453.868.750,00	453.868.750,00	453.868.750,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			913.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				29531 Satuan Pendidikan	29531 Satuan Pendidikan	295.917.000,00	295.863.400,00	295.863.400,00	-53.600,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			385.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	110 Orang	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				13 Paket	5 Paket	5.121.757.000,00	5.540.384.500,00	8.596.298.500,00	3.474.541.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			8.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan*				100 %	100 %	25.159.726.700,00	24.586.456.250,00	49.549.609.650,00	24.389.882.950,00			-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pendidik, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik, Lembaga		28.257.041.200,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				63 Unit	90 Unit	2.430.000.000,00	2.430.000.000,00	2.659.905.000,00	229.905.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			2.720.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				8 Paket	3 Paket	197.959.000,00	98.759.000,00	98.759.000,00	-99.200.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			11.972.400,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				4 Paket	9 Paket	630.505.000,00	500.285.000,00	500.285.000,00	-130.220.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			895.904.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				-	9 Paket	0,00	0,00	553.558.400,00	553.558.400,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				550 Peserta Didik	462 Peserta Didik	111.898.000,00	111.898.000,00	111.898.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			96.083.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				6034 Orang	6056 Orang	11.157.600.000,00	11.157.600.000,00	11.159.880.000,00	2.280.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			12.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				995 Orang	1960 Orang	1.249.983.850,00	995.108.000,00	995.108.000,00	-254.875.850,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.370.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				150 Satuan Pendidikan	900 Satuan Pendidikan	1.049.988.500,00	1.015.869.400,00	1.015.869.400,00	-34.119.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				1188 Satuan Pendidikan	1192 Satuan Pendidikan	7.584.560.000,00	7.601.600.000,00	31.779.010.000,00	24.194.450.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			8.300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				1233 Orang	450 Orang	144.845.500,00	77.900.000,00	77.900.000,00	-66.945.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				180 Orang	180 Orang	99.961.000,00	99.961.000,00	99.961.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	99.999.850,00	99.999.850,00	99.999.850,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.750.000,00	95.800.000,00	95.800.000,00	-4.950.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				50 Kegiatan	3 Kegiatan	149.016.000,00	149.016.000,00	149.016.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			165.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				250 Orang	250 Orang	99.999.000,00	99.999.000,00	99.999.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	52.661.000,00	52.661.000,00	52.661.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			58.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Siswa Mendapatkan Perlengkapan Dasar Sesuai Ketentuan SPM Pendidikan*				100 %	100 %	8.959.002.800,00	8.594.991.800,00	27.938.773.800,00	18.979.771.000,00			-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Siswa, dan Lembaga Non Formal Di Kota Depok		9.099.110.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				47 Unit	9 Unit	908.900.000,00	908.900.000,00	908.900.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			110.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				524 Orang	527 Orang	1.000.610.000,00	1.000.610.000,00	998.390.000,00	-2.220.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.101.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				300 Orang	900 Orang	434.246.000,00	411.246.000,00	411.246.000,00	-23.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			480.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				150 Satuan Pendidikan	220 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00	-16.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			440.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				51 Satuan Pendidikan	81 Satuan Pendidikan	3.841.112.800,00	4.030.812.800,00	22.787.086.800,00	18.945.974.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			4.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				61 Orang	61 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	9 Paket	839.455.000,00	418.285.000,00	618.285.000,00	-221.170.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			930.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				61 Orang	898 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				550 Peserta Didik	633 Peserta Didik	1.000.000.000,00	924.139.000,00	1.003.109.000,00	3.109.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			1.100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	8 Paket	34.679.000,00	16.999.000,00	165.577.000,00	130.898.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			282.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				-	1 Unit	0,00	0,00	162.180.000,00	162.180.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			178.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Jumlah Guru PAUD; SD/MI; SMP/MTs Berkualifikasi SI/DIV**				**77 %**	**77 %**	**132.980.900,00**	**132.980.900,00**	**132.980.900,00**	**13.019.100,00**							**146.000.000,00**	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpetakan sesuai Jenjang Pendidikan*				70 %	70 %	132.980.900,00	132.980.900,00	132.980.900,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Kota Depok		146.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	82.981.000,00	82.981.000,00	82.981.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			91.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	318.578.100,00	304.960.550,00	304.960.550,00	-13.617.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		655.573.922,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	129.794.900,00	116.177.900,00	116.177.900,00	-13.617.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			301.404.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.700.300,00	31.700.050,00	31.700.050,00	-250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			48.417.787,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	36.778.000,00	36.777.850,00	36.777.850,00	-150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			54.407.287,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	36.912.900,00	36.912.750,00	36.912.750,00	-150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			54.593.627,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	83.392.000,00	83.392.000,00	83.392.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			196.750.321,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan*				100 %	100 %	206.959.039.421,00	208.147.126.129,00	193.019.660.684,00	-13.939.378.737,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		213.093.353.721,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1235 Orang /bulan	1235 Orang /bulan	206.772.122.721,00	207.960.209.429,00	192.832.743.984,00	-13.939.378.737,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			212.694.053.721,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	186.916.700,00	186.916.700,00	186.916.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			399.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentse penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	2.105.096.000,00	1.611.800.900,00	1.611.799.900,00	-493.296.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		3.072.180.152,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	6.895.000,00	6.895.000,00	6.895.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.593.010,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				31 Paket	23 Paket	1.115.493.950,00	622.198.950,00	622.197.950,00	-493.296.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.298.351.901,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	43.101.000,00	43.101.000,00	43.101.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			43.101.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	275.150.750,00	275.150.750,00	275.150.750,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			435.348.804,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	119.612.550,00	119.612.550,00	119.612.550,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			142.214.688,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1432 Laporan	1432 Laporan	544.842.750,00	544.842.650,00	544.842.650,00	-100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.141.570.749,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	209.473.150,00	214.773.150,00	237.773.150,00	28.300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		357.161.210,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	128.788.400,00	134.088.400,00	157.088.400,00	28.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			234.096.280,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	86 Unit	57.484.750,00	57.484.750,00	57.484.750,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			99.864.930,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar*				78 %	78 %	32.125.818.180,00	35.663.753.850,00	76.744.347.856,00	44.618.529.676,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	UPTD Puskesmas dan RSUD		172.658.096.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas																		
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	12 Unit	0,00	0,00	5.140.000.000,00	5.140.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				1 Unit	1 Unit	1.654.694.730,00	0,00	0,00	-1.654.694.730,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				-	1 Unit	0,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				74 Unit	143 Unit	3.476.931.000,00	2.934.591.000,00	6.651.482.700,00	3.174.551.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			135.747.131.008,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	17 0	0,00	0,00	44.098.000,00	44.098.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENURUNAN AKI DAN AKB	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				48588 Orang	33218 Orang	138.626.250,00	638.621.250,00	638.621.250,00	499.995.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.318.044.046,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				46867 Orang	33218 Orang	60.182.700,00	58.492.700,00	58.492.400,00	-1.690.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			287.461.394,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44635 Orang	31742 Orang	49.120.000,00	48.820.000,00	48.820.000,00	-300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			107.598.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				170093 Orang	167541 Orang	49.470.000,00	49.060.000,00	49.060.000,00	-410.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			171.648.422,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				289320 Orang	290671 Orang	67.235.050,00	60.386.050,00	60.386.050,00	-6.849.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			58.018.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																		
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				571688 Orang	571688 Orang	309.318.850,00	420.316.400,00	411.677.550,00	102.358.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.137.305.293,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																		
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				145041 Orang	175394 Orang	61.058.850,00	58.413.000,00	58.413.000,00	-2.645.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			35.391.290,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				379903 Orang	379903 Orang	27.821.000,00	27.821.000,00	27.821.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			151.294.770,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44061 Orang	44061 Orang	23.791.350,00	23.791.350,00	19.941.350,00	-3.850.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			73.435.263,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2017 Orang	2017 Orang	62.560.000,00	62.560.000,00	58.185.000,00	-4.375.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			115.922.114,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				31868 Orang	31868 Orang	76.434.000,00	76.434.000,00	76.434.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			424.340.103,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				39630 Orang	38063 Orang	380.156.400,00	320.002.400,00	320.002.200,00	-60.154.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			512.926.783,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				9 Dokumen	11 Dokumen	196.590.200,00	180.742.450,00	221.292.450,00	24.702.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			771.094.885,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4 Dokumen	63.003.200,00	63.003.200,00	56.568.200,00	-6.435.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			157.522.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8 Dokumen	395.441.550,00	358.881.550,00	358.732.100,00	-36.709.450,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.289.200.744,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	2 Dokumen	109.400.450,00	209.400.450,00	518.086.200,00	408.685.750,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			186.519.419,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				4 Dokumen	4 Dokumen	42.679.650,00	38.879.650,00	38.879.650,00	-3.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			481.571.772,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	15 Dokumen	298.889.000,00	289.867.000,00	441.243.100,00	142.354.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.203.293.212,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)																		
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				3486 Orang	3486 Orang	56.380.000,00	56.380.000,00	56.380.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			287.899.911,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																		
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				930 Orang	930 Orang	52.420.000,00	52.420.000,00	81.519.000,00	29.099.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			143.809.226,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				13 Dokumen	13 Dokumen	7.466.594.950,00	7.428.263.950,00	5.566.463.940,00	-1.900.131.010,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			623.311.293,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				35 Dokumen	10 Dokumen	95.638.000,00	62.848.000,00	2.296.138.400,00	2.200.500.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.308.726.008,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	97.229.992.930,00	97.229.992.930,00	127.290.795.160,00	30.060.802.230,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			108.022.301.574,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				1500 Orang	1500 Orang	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			77.863.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																		
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				30 Paket	5281 Paket	19.205.000,00	18.725.000,00	237.735.000,00	218.530.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			19.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	5 Dokumen	304.874.796,00	290.796.500,00	290.796.500,00	-14.078.296,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			598.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				38 Unit	38 Unit	12.544.500,00	12.544.500,00	12.544.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			332.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 0	0,00	0,00	15.150.000,00	15.150.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				21 Unit	38 Unit	331.450.000,00	331.450.000,00	331.450.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.647.543.744,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				2 Laporan	9 Laporan	272.068.950,00	270.376.000,00	277.176.000,00	5.107.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			827.332.297,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				2 Dokumen	4 Dokumen	26.479.750,00	24.379.750,00	24.379.750,00	-2.100.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			143.061.204,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)																		
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1 Unit	1.985.642.650,00	1.980.342.650,00	1.980.342.650,00	-5.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.901.567.915,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				4000 Orang	4000 Orang	29.991.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00	-7.291.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			29.999.925,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				2236 Orang	2236 Orang	28.101.750,00	28.101.750,00	28.101.750,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			28.101.855,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				209 Orang	100 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			12.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	111.281.700,00	281.606.700,00	281.606.700,00	170.325.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			111.282.120,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	2 Dokumen	0,00	0,00	76.150.000,00	76.150.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi*				4 sistem	4 sistem	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				7 Dokumen	4 Dokumen	248.249.500,00	269.577.500,00	269.577.500,00	21.328.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			554.941.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				68 %	68 %	1.088.880.859,00	1.048.895.859,00	1.048.892.859,00	-39.988.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Fasilitas Kesehatan		1.968.379.472,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				129 Unit	129 Unit	69.900.000,00	65.250.000,00	65.250.000,00	-4.650.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			79.860.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				80 Unit	80 Unit	498.247.459,00	498.247.459,00	498.247.459,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			243.013.980,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				38 Unit	38 Unit	342.286.600,00	306.951.600,00	306.948.600,00	-35.338.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.167.348.492,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik Pemda sesuai standar**				**80 %**	**80 %**	**729.047.600,00**	**729.047.600,00**	**2.883.626.900,00**	**1.129.659.391,00**							**1.858.706.991,00**	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan berizi*				100 %	100 %	117.033.350,00	117.033.350,00	117.033.350,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	SDM Kesehatan		178.261.895,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	62.956.050,00	62.956.050,00	62.956.050,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			63.393.933,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	54.077.300,00	54.077.300,00	54.077.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			114.867.962,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK tepat waktu*				100 %	100 %	89.141.650,00	89.141.650,00	208.584.650,00	119.443.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	SDM Kesehatan		197.779.679,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	38.636.700,00	38.636.700,00	38.636.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			91.738.909,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				646 Orang	646 Orang	17.326.700,00	17.326.700,00	15.526.700,00	-1.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.762.269,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	33.178.250,00	33.178.250,00	154.421.250,00	121.243.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			85.278.501,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih*				100 %	100 %	522.872.600,00	522.872.600,00	2.558.008.900,00	2.035.136.300,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	SDM Kesehatan		1.482.665.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				250 Orang	250 Orang	246.872.600,00	246.872.600,00	2.282.008.900,00	2.035.136.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			842.665.417,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Pembinaan sarana kefarmasian, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang sesuai standar**				**64 %**	**64 %**	**520.654.200,00**	**516.854.200,00**	**516.797.900,00**	**246.190.802,00**							**766.845.002,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Persentase pembinaan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) berizin*				80 %	80 %	125.435.300,00	125.435.300,00	125.435.300,00	0,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sarana Kefarmasian		51.657.441,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				202 Dokumen	14 Dokumen	125.435.300,00	125.435.300,00	125.435.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			51.657.441,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Persentase pembinaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berizin*				40 %	40 %	17.984.400,00	17.984.400,00	17.984.400,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sarana Kefarmasian		26.783.713,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				21 Dokumen	21 Dokumen	17.984.400,00	17.984.400,00	17.984.400,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			26.783.713,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Persentase Pembinaan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRTP) berizin*				65 %	65 %	100.313.400,00	100.313.400,00	100.313.400,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		119.816.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	100.313.400,00	100.313.400,00	100.313.400,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			119.816.620,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Persentase Pembinaan Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang berizin*				64 %	64 %	112.922.000,00	112.922.000,00	112.866.000,00	-56.000,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		297.891.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	4 Dokumen	112.922.000,00	112.922.000,00	112.866.000,00	-56.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			297.891.110,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Presentase Pembinaan Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang berizin*				70 %	70 %	83.208.800,00	79.408.800,00	79.408.500,00	-3.800.300,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		168.631.045,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	3 Dokumen	83.208.800,00	79.408.800,00	79.408.500,00	-3.800.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			168.631.045,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Sarana Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang berizin yang dilakukan Pembinaan*				80 sarana	80 sarana	80.790.300,00	80.790.300,00	80.790.300,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		102.065.073,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				52 Unit	52 Unit	80.790.300,00	80.790.300,00	80.790.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			102.065.073,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan**				**100 %**	**100 %**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Mitra Kesehatan yang dilakukan Pembinaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*				79 %	79 %	499.572.700,00	564.075.200,00	564.075.200,00	64.502.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		5.752.932.779,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	2 Dokumen	499.572.700,00	564.075.200,00	564.075.200,00	64.502.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			5.752.932.779,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Institusi yang dilakukan Pembinaan Germas*				65 %	65 %	409.953.650,00	409.953.650,00	409.929.350,00	-24.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		837.566.165,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	340.794.000,00	340.794.000,00	340.794.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			768.406.265,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				1100 Keluarga	1100 Keluarga	69.159.650,00	69.159.650,00	69.135.350,00	-24.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			69.159.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis Pembinaan UKBM yang dilakukan pembinaan*				5 jenis	5 jenis	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2 Dokumen	910.903.100,00	910.903.100,00	1.954.356.677,00	1.043.453.577,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.008.937.930,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.058.103.277,00	3.058.103.277,00	3.364.953.787,00	306.850.510,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.058.103.277,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	401 Orang	0,00	0,00	4.240.000,00	4.240.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	401 Orang	0,00	0,00	5.475.000,00	5.475.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3.160 Orang	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	750 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	444 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	37.620.000,00	80.164.000,00	80.164.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	15.115.000,00	15.115.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	0,00	0,00	89.900.000,00	89.900.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.440.074.950,00	1.440.074.950,00	1.557.877.850,00	117.802.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.800.093.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	3 Laporan	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	43 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 0	0,00	0,00	74.540.000,00	74.540.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	- -	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	714.000.000,00	714.000.000,00	1.115.006.864,00	401.006.864,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			714.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	504 Orang	0,00	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	504 Orang	0,00	0,00	14.460.000,00	14.460.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			14.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5635 Orang	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			14.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	264 Orang	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	523 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	32.396.000,00	115.471.000,00	115.471.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	- -	-			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	34.760.000,00	34.760.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	112.600.000,00	112.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	18 Dokumen	714.794.050,00	714.794.050,00	825.281.050,00	110.487.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			892.791.550,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.890.000,00	3.890.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	35 Orang	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 0	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	79.800.000,00	79.800.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MEKARSARI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	783.056.538,00	783.056.538,00	1.195.390.192,00	412.333.654,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			783.056.538,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	991 Orang	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	991 Orang	0,00	0,00	9.875.000,00	9.875.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22 Orang	22 Orang	39.600.000,00	0,00	0,00	-39.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6459 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	592 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	975 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	55.440.000,00	234.216.000,00	234.216.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	20.725.000,00	20.725.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	152.100.000,00	152.100.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	17 Dokumen	715.065.300,00	715.065.300,00	833.459.050,00	118.393.750,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			738.284.490,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	79 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	4 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	35.200.000,00	35.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	17.800.000,00	17.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	540.000.000,00	540.000.000,00	801.059.641,00	261.059.641,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			540.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	650 Orang	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	650 Orang	0,00	0,00	24.150.000,00	24.150.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2434 Orang	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	255 0	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	637 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	41.220.000,00	125.745.000,00	125.745.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			104.477.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	3 Dokumen	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	6 Dokumen	0,00	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	30 Dokumen	0,00	0,00	88.400.000,00	88.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	13 Dokumen	436.371.750,00	436.371.750,00	552.714.190,00	116.342.440,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			517.602.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	-	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	25 Dokumen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	20 Dokumen	0,00	0,00	95.300.000,00	95.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TUGU							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	2.658.000.000,00	838.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.820.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1691 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1691 Orang	0,00	0,00	12.700.000,00	12.700.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	11428 Orang	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	863 Orang	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1722 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	98.820.000,00	310.706.000,00	310.706.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	21.300.000,00	21.300.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	109.900.000,00	109.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	17 Dokumen	714.594.350,00	714.594.350,00	818.146.340,00	103.551.990,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			820.241.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			5.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	2 Laporan	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	84 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	101.200.000,00	101.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	743.362.268,00	743.362.268,00	835.719.998,00	92.357.730,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			743.362.268,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	451 0	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	451 Orang	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2649 Orang	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	325 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	481 Orang	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	23.220.000,00	120.962.000,00	120.962.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	6 Dokumen	0,00	0,00	103.700.000,00	103.700.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	783.086.250,00	783.086.250,00	898.960.170,00	115.873.920,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			859.020.150,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	6 Laporan	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	43 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	6 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			52.800.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	12.060.000,00	12.060.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TAPOS							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.516.216.331,00	2.516.216.331,00	2.971.935.996,00	455.719.665,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.516.216.331,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	512 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	512 Orang	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			7.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9 Orang	9 Orang	16.200.000,00	0,00	0,00	-16.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5347 Orang	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	741 Orang	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	531 0	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	32.400.000,00	153.071.000,00	153.071.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			154.671.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	4 Dokumen	0,00	0,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			19.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	11 Dokumen	0,00	0,00	28.120.000,00	28.120.000,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			28.120.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	7204 Dokumen	0,00	0,00	126.300.000,00	126.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			126.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.757.976.650,00	1.750.951.650,00	1.907.660.650,00	149.684.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.845.235.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	3 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	3 Laporan	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	85 Orang	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	3 Dokumen	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1316 Dokumen	0,00	0,00	138.300.000,00	138.300.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			138.300.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			70.475.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	6 Dokumen	0,00	0,00	20.970.000,00	20.970.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.970.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CILANGKAP							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.374.960.702,00	1.374.960.702,00	1.913.887.330,00	538.926.628,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.374.960.702,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	32.400.000,00	0,00	0,00	-32.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	849 Orang	0,00	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			14.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	849 Orang	0,00	0,00	9.090.000,00	9.090.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			9.090.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	37.800.000,00	0,00	0,00	-37.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	8376 Orang	0,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	902 Orang	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	900 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	70.200.000,00	214.285.000,00	214.285.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			215.185.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			36.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	133.600.000,00	133.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			133.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	5 Dokumen	676.731.100,00	675.381.100,00	795.855.540,00	119.124.440,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			747.845.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	35 Laporan	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	9 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			11.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	-	0,00	0,00	50.600.000,00	50.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			50.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.132.261.930,00	1.132.261.930,00	1.282.186.999,00	149.925.069,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.132.261.930,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13 Orang	13 Orang	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	364 Orang	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	364 Orang	0,00	0,00	7.180.000,00	7.180.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	48.600.000,00	0,00	0,00	-48.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3379 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	480 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	419 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	72.000.000,00	273.386.000,00	273.386.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			276.086.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	31.880.000,00	31.880.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	103.100.000,00	103.100.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	711.763.400,00	711.763.400,00	803.654.350,00	91.890.950,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			798.379.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	64 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	44.225.000,00	44.225.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	19.140.000,00	19.140.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS JATIJAJAR							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.058.655.407,00	1.058.655.407,00	1.498.637.816,00	439.982.409,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.058.655.407,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	675 Orang	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	675 Orang	0,00	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3340 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	462 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	705 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	30.420.000,00	184.726.000,00	184.726.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			188.196.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			18.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	35.875.000,00	35.875.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	73.800.000,00	73.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			73.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	521.456.300,00	521.456.300,00	625.724.610,00	104.268.310,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			591.824.300,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	45 Laporan	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	52 Orang	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	52.600.000,00	52.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	4 Dokumen	0,00	0,00	5.778.040,00	5.778.040,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	-	0,00	0,00	19.880.000,00	19.880.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SUKATANI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.300.805.567,00	1.300.805.567,00	1.694.454.888,00	393.649.321,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.300.805.567,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21 Orang	21 Orang	37.800.000,00	0,00	0,00	-37.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1009 Orang	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1009 Orang	0,00	0,00	17.275.000,00	17.275.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	48.600.000,00	0,00	0,00	-48.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	8199 Orang	0,00	0,00	33.000.000,00	33.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	732 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1045 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	86.400.000,00	139.635.000,00	139.635.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			187.535.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	-	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	34.825.000,00	34.825.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	9 Dokumen	0,00	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	17 Dokumen	777.189.150,00	777.189.000,00	885.992.900,00	108.803.750,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			836.343.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	98 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	4 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	95.600.000,00	95.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	804.672.768,00	804.672.768,00	1.419.713.436,00	615.040.668,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			804.672.768,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	716 Orang	0,00	0,00	11.410.000,00	11.410.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	716 Orang	0,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3985 Orang	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	456 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	743 Orang	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	44.820.000,00	103.046.000,00	103.046.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			105.516.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	116.900.000,00	116.900.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	18 Dokumen	404.794.800,00	404.794.800,00	510.390.120,00	105.595.320,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			460.960.800,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	61 Orang	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	8 Orang	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.425.000,00	7.425.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	0 0	0,00	0,00	101.200.000,00	101.200.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.098.000.000,00	4.098.000.000,00	4.389.931.278,00	291.931.278,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.987.841.936,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	43.200.000,00	0,00	0,00	-43.200.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1374 Orang	0,00	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1374 Orang	0,00	0,00	7.365.000,00	7.365.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				39 Orang	39 Orang	70.200.000,00	0,00	0,00	-70.200.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	11804 Orang	0,00	0,00	36.900.000,00	36.900.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1482 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1424 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				2 Dokumen	7 Dokumen	306.627.150,00	420.027.050,00	597.350.010,00	290.722.860,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			306.627.464,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	2 Dokumen	0,00	0,00	154.600.000,00	154.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	3 Dokumen	1.485.956.300,00	1.485.956.300,00	1.646.351.190,00	160.394.890,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.885.043.640,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	0 0	0,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	110 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	11 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	-	0,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	-	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 0	0,00	0,00	40.050.000,00	40.050.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS ABADIJAYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.037.225.200,00	2.037.225.200,00	2.404.348.932,00	367.123.732,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.037.225.200,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1428 Orang	0,00	0,00	11.520.000,00	11.520.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1428 Orang	0,00	0,00	11.425.000,00	11.425.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	41.400.000,00	0,00	0,00	-41.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7499 Orang	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1713 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1504 Orang	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	63.000.000,00	273.259.000,00	273.259.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	45.450.000,00	45.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	124.600.000,00	124.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	542.154.800,00	542.154.800,00	702.280.800,00	160.126.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			694.024.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	-	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	228 Orang	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	59.990.000,00	59.990.000,00	59.990.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			59.999.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	71.120.000,00	71.120.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	0 0	0,00	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.063.283.628,00	1.063.283.628,00	1.335.818.357,00	272.534.729,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.063.283.628,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25 Orang	25 Orang	45.000.000,00	0,00	0,00	-45.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	553 Orang	0,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	553 0	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6602 Orang	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	468 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	598 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	99.000.000,00	166.446.000,00	166.446.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	48.540.000,00	48.540.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	62.500.000,00	62.500.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	5 Dokumen	799.778.500,00	799.778.500,00	903.859.740,00	104.081.240,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			874.710.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	62 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	11 Orang	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	-	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	30.800.000,00	30.800.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BAKTIJAYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.328.186.592,00	1.328.186.592,00	1.826.903.674,00	498.717.082,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.328.186.592,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1098 Orang	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1098 Orang	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6 Orang	6 Orang	10.800.000,00	0,00	0,00	-10.800.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7475 Orang	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	592 Orang	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1144 Orang	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	24 Dokumen	0,00	23.220.000,00	180.588.000,00	180.588.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	15 Dokumen	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	27 Dokumen	0,00	0,00	55.400.000,00	55.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	66 Dokumen	0,00	0,00	110.100.000,00	110.100.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	477.477.900,00	477.477.900,00	605.042.190,00	127.564.290,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			805.803.014,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	5 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	22 Orang	0,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	3 Orang	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	25 Dokumen	0,00	0,00	39.400.000,00	39.400.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	-	0,00	0,00	41.500.000,00	41.500.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CILODONG							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.253.676.153,00	2.253.676.153,00	3.348.635.467,00	1.094.959.314,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.253.676.153,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	710 Orang	0,00	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			14.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	710 Orang	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			5.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				18 Orang	18 Orang	32.400.000,00	0,00	0,00	-32.400.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	10390 Orang	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			18.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	717 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	776 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	59.220.000,00	166.152.000,00	166.152.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			167.622.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			15.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	-	0,00	0,00	23.440.000,00	23.440.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			23.440.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	148.800.000,00	148.800.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			148.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.698.804.600,00	1.698.804.600,00	1.855.906.600,00	157.102.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.811.220.600,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	96 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	13 Orang	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			16.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	91.200.000,00	91.200.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			91.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru Kota Depok, Cilodong, Cilodong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	25.530.000,00	25.530.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			25.530.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KALIMULYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**NON URUSAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.036.204.720,00	0,00	0,00	-1.036.204.720,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	1.036.204.720,00	1.085.914.464,00	1.085.914.464,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	- -			1.036.204.720,00	DINAS KESEHATAN
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	494 Orang	0,00	0,00	6.160.000,00	6.160.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			6.160.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	494 Orang	0,00	0,00	5.475.000,00	5.475.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			5.475.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	9469 Orang	0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			60.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	723 0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	452 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	34.200.000,00	203.421.000,00	203.421.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			206.821.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			14.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	37.550.000,00	37.550.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			37.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	156.600.000,00	156.600.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			156.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	546.210.000,00	546.210.000,00	696.429.000,00	150.219.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			646.914.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	96 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	10 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			12.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	100.600.000,00	100.600.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			100.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	- -	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			49.515.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	18.960.000,00	18.960.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			18.960.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.553.328.459,00	1.553.328.459,00	1.783.950.985,00	230.622.526,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.553.328.459,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1112 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1112 Orang	0,00	0,00	6.665.000,00	6.665.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			6.665.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5187 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			9.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1024 Orang	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			3.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1297 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	54.000.000,00	219.682.000,00	219.682.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			219.782.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	25.505.000,00	25.505.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	119.600.000,00	119.600.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			113.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	17 Dokumen	522.944.700,00	522.944.700,00	657.803.080,00	134.858.380,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			615.256.700,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1024 Orang	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			5.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			6.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	111.800.000,00	111.800.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			111.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			49.520.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	-	0,00	0,00	17.745.000,00	17.745.000,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			17.745.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.665.667.185,00	4.665.667.185,00	4.992.873.874,00	327.206.689,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.935.667.185,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				23 Orang	23 Orang	41.400.000,00	0,00	0,00	-41.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1965 Orang	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1965 Orang	0,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14 Orang	14 Orang	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17415 Orang	0,00	0,00	51.500.000,00	51.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1756 Orang	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1991 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	66.470.000,00	430.028.000,00	430.028.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	63.970.000,00	63.970.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	212.500.000,00	212.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	933.877.900,00	933.877.900,00	1.115.635.910,00	181.758.010,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.156.772.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.535.000,00	5.535.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	234 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	176 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	129.300.000,00	129.300.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	5 Dokumen	0,00	0,00	63.950.000,00	63.950.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA BARU							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.852.457.184,00	1.852.457.184,00	2.006.298.164,00	153.840.980,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.852.457.184,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1293 Orang	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1293 0	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12388 Orang	0,00	0,00	33.800.000,00	33.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	614 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1360 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	143.988.000,00	323.742.000,00	323.742.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	-	0,00	0,00	19.850.000,00	19.850.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	189.300.000,00	189.300.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	447.223.000,00	441.493.000,00	542.891.960,00	95.668.960,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			447.226.040,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	15 Orang	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	-	0,00	0,00	110.400.000,00	110.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	66.479.000,00	66.479.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	- -	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	884.344.284,00	884.344.284,00	1.368.015.566,00	483.671.282,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			884.344.284,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3 Orang	3 Orang	5.400.000,00	0,00	0,00	-5.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	379 Orang	0,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	379 Orang	0,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5 Orang	5 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	8865 Orang	0,00	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	425 Orang	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	473 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	14.400.000,00	63.462.000,00	63.462.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	122 Dokumen	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	30.565.000,00	30.565.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	0,00	98.100.000,00	98.100.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	5 Dokumen	836.526.000,00	836.526.000,00	935.007.000,00	98.481.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.028.462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	20 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	425 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	473 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	6 Dokumen	0,00	0,00	12.900.000,00	12.900.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	42.200.000,00	42.200.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	8 Dokumen	0,00	0,00	37.380.000,00	37.380.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	893.249.743,00	893.249.743,00	1.304.690.004,00	411.440.261,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			893.249.743,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	821 Orang	0,00	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	821 Orang	0,00	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6104 Orang	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	440 Orang	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	968 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	14.400.000,00	89.522.000,00	89.522.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	31.625.000,00	31.625.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	5 Dokumen	0,00	0,00	153.300.000,00	153.300.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	967.722.350,00	953.862.350,00	1.026.215.710,00	58.493.360,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.028.462.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	-	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	522 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	- -	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	4 Dokumen	0,00	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	21.100.000,00	21.100.000,00	Kota Depok, Beji, Beji	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.162.957.780,00	3.162.957.780,00	3.727.893.780,00	564.936.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.162.957.780,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13 Orang	13 Orang	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1352 Orang	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			18.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1352 0	0,00	0,00	23.550.000,00	23.550.000,00	Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			23.550.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13 Orang	13 Orang	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	17463 Orang	0,00	0,00	30.500.000,00	30.500.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			30.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1,388 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1452 0	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	46.800.000,00	295.549.000,00	295.549.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			296.149.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			53.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	4 Dokumen	0,00	0,00	248.400.000,00	248.400.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			248.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.300.818.200,00	1.300.818.200,00	1.435.312.520,00	134.494.320,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.366.828.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	5 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	788 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1452 Orang	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	12 Dokumen	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	6 Dokumen	0,00	0,00	154.600.000,00	154.600.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			154.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			49.507.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	- -	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	35.600.000,00	35.600.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			35.600.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS RATU JAYA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.815.828.169,00	1.815.828.169,00	2.512.050.528,00	696.222.359,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.815.828.169,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1089 Orang	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			7.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1089 Orang	0,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			12.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				34 Orang	34 Orang	61.200.000,00	0,00	0,00	-61.200.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	7783 0	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1498 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			6.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1164 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	5 Dokumen	0,00	79.200.000,00	252.520.000,00	252.520.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			254.720.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			11.700.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	31.700.000,00	31.700.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			31.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	-	0,00	0,00	126.000.000,00	126.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			126.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	2.561.833.850,00	2.561.833.850,00	2.710.467.050,00	148.633.200,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.664.047.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	6 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	104 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			8.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			75.400.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	-	0,00	0,00	42.200.000,00	42.200.000,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			42.200.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KECAMATAN BEJI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.435.196.959,00	2.435.196.959,00	3.366.558.361,00	931.361.402,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.435.196.959,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7 Orang	7 Orang	12.600.000,00	0,00	0,00	-12.600.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	216 Orang	0,00	0,00	20.160.000,00	20.160.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	216 Orang	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13 Orang	13 Orang	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4223 0	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	690 Orang	0,00	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	220 0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	36.000.000,00	72.231.000,00	72.231.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	4 Dokumen	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	43.730.000,00	43.730.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.891.646.650,00	1.891.646.650,00	2.023.320.420,00	131.673.770,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.974.914.230,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	7 Laporan	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	92 Orang	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok																		
			Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok				7 Tatanan	7 Tatanan	59.998.900,00	59.998.900,00	59.998.700,00	-200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			59.999.100,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	48.600.000,00	48.600.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KEMIRIMUKA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.864.179,00	1.200.864.179,00	1.711.194.743,00	510.330.564,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.200.864.179,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	966 0	0,00	0,00	8.960.000,00	8.960.000,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	966 Orang	0,00	0,00	6.275.000,00	6.275.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4937 Orang	0,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	662 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1016 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	41.220.000,00	129.087.000,00	129.087.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	40.250.000,00	40.250.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	110.600.000,00	110.600.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	555.961.650,00	555.961.650,00	694.317.195,00	138.355.545,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			619.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	41 Orang	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	30 Orang	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	107.200.000,00	107.200.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka Kota Depok, Beji, Pondok Cina	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS TANAH BARU							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.661.400.646,00	1.661.400.646,00	1.854.366.145,00	192.965.499,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.661.400.646,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1103 Orang	0,00	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1103 Orang	0,00	0,00	20.950.000,00	20.950.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				40 Orang	40 Orang	72.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	5404 Orang	0,00	0,00	18.800.000,00	18.800.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	589 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1151 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	126.000.000,00	307.858.000,00	307.858.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	70.050.000,00	70.050.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	64.600.000,00	64.600.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	745.310.000,00	745.310.000,00	848.521.920,00	103.211.920,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			745.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	41 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	27 Orang	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	-	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	61.320.000,00	61.320.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	53.100.000,00	53.100.000,00	Kota Depok, Beji, Kukusan Kota Depok, Beji, Tanah Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS MAMPANG							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	631.160.000,00	631.160.000,00	922.560.000,00	291.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			631.160.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				13 Orang	13 Orang	23.400.000,00	0,00	0,00	-23.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	411 Orang	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	411 Orang	0,00	0,00	8.865.000,00	8.865.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11 Orang	11 Orang	19.800.000,00	0,00	0,00	-19.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	3620 Orang	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	301 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	443 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	43.200.000,00	107.724.000,00	107.724.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	34.750.000,00	34.750.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	0 0	0,00	0,00	85.600.000,00	85.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	14 Dokumen	967.594.350,00	967.594.250,00	1.079.778.130,00	112.183.780,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.075.822.650,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	5 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	40 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	9 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	- -	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	24.800.000,00	24.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS SAWANGAN							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.797.435.660,00	1.797.435.660,00	2.605.271.162,00	807.835.502,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.797.435.660,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12 Orang	12 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	-21.600.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	593 0	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	593 0	0,00	0,00	9.480.000,00	9.480.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27 Orang	27 Orang	48.600.000,00	0,00	0,00	-48.600.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	6629 Orang	0,00	0,00	54.200.000,00	54.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	591 0	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	646 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	70.182.000,00	244.688.000,00	244.688.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	54.320.000,00	54.320.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	83.800.000,00	83.800.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	5 Dokumen	797.375.000,00	797.375.000,00	897.609.060,00	100.234.060,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			848.801.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	5 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	50 Orang	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	106.800.000,00	106.800.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	24.360.000,00	24.360.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PENGASINAN							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.892.805,00	1.500.892.805,00	1.879.961.518,00	379.068.713,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.500.892.805,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	842 Orang	0,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	842 Orang	0,00	0,00	6.620.000,00	6.620.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20 Orang	20 Orang	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12345 Orang	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	690 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	903 0	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	72.000.000,00	249.738.000,00	249.738.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	34.900.000,00	34.900.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan Kota Depok, Sawangan, Bedahan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	18 Dokumen	670.375.000,00	670.375.000,00	792.133.000,00	121.758.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			751.228.850,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.940.000,00	3.940.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	92 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.600.000,00	7.600.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	162.720.000,00	162.720.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.034.309.592,00	1.034.309.592,00	1.422.484.816,00	388.175.224,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.034.309.592,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	357 Orang	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	357 Orang	0,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	4293 Orang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	565 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	387 0	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	36.000.000,00	126.053.000,00	126.053.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	110.080.000,00	110.080.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	10 Dokumen	0,00	0,00	104.100.000,00	104.100.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	18 Dokumen	674.155.100,00	658.315.100,00	785.313.550,00	111.158.450,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			821.409.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	-	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	1 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	29.280.000,00	29.280.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	- -	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	- -	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	26.950.000,00	26.950.000,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS KEDAUNG							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,5	81,5	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.057.166.554,00	1.057.166.554,00	1.456.221.288,00	399.054.734,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.057.166.554,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8 Orang	8 Orang	14.400.000,00	0,00	0,00	-14.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	305 0	0,00	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	305 Orang	0,00	0,00	7.325.000,00	7.325.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				14 Orang	14 Orang	25.200.000,00	0,00	0,00	-25.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2035 Orang	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	407 0	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	318 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	39.600.000,00	106.421.000,00	106.421.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	20.150.000,00	20.150.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	13 Dokumen	0,00	0,00	96.200.000,00	96.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	13 Dokumen	1.507.302.900,00	1.507.302.900,00	1.595.224.000,00	87.921.100,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.674.781.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	54 Orang	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	0 0	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	65.900.000,00	65.900.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			49.500.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 Dokumen	0,00	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CINANGKA							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	583.357.913,00	583.357.913,00	828.357.913,00	245.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			583.357.913,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Orang	4 Orang	7.200.000,00	0,00	0,00	-7.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	305 Orang	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	305 Orang	0,00	0,00	7.525.000,00	7.525.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				24 Orang	24 Orang	43.200.000,00	0,00	0,00	-43.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2837 Orang	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	213 0	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	335 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	50.400.000,00	156.281.000,00	156.281.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	0,00	96.400.000,00	96.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	13 Dokumen	1.047.181.000,00	1.047.181.000,00	1.142.797.000,00	95.616.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.047.181.676,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	20 Orang	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	5 Orang	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	42.310.000,00	42.310.000,00	Kota Depok, Sawangan, Cinangka	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.241.420.000,00	3.241.420.000,00	3.593.306.000,00	351.886.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.742.520.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				35 Orang	35 Orang	63.000.000,00	0,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1173 Orang	0,00	0,00	52.800.000,00	52.800.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1173 Orang	0,00	0,00	21.040.000,00	21.040.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	50 Orang	90.000.000,00	0,00	0,00	-90.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	13762 Orang	0,00	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	863 0	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1236 Orang	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	6 Dokumen	0,00	153.000.000,00	344.106.000,00	344.106.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	62.740.000,00	62.740.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	-	0,00	0,00	223.800.000,00	223.800.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	6 Dokumen	1.322.539.200,00	1.322.539.200,00	1.531.603.200,00	209.064.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.400.468.750,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	3 Laporan	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	15 Orang	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	6 Orang	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	83.800.000,00	83.800.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir Kota Depok, Bojongsari, Serua Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.538.164.500,00	1.538.164.500,00	1.695.855.329,00	157.690.829,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.538.164.500,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	696 Orang	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	696 Orang	0,00	0,00	21.075.000,00	21.075.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				70 Orang	70 Orang	126.000.000,00	0,00	0,00	-126.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	9860 0	0,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	535 0	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	780 Orang	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	8 Dokumen	0,00	180.000.000,00	246.023.000,00	246.023.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	149.000.000,00	149.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	660.167.050,00	660.166.900,00	750.423.150,00	90.256.100,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.129.498.598,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	71 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	780 Orang	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	3 0	0,00	0,00	26.455.000,00	26.455.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			26.455.000,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS LIMO							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.741.312.000,00	3.741.312.000,00	3.741.312.000,00	0,00	Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.742.520.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1706 0	0,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1706 Orang	0,00	0,00	11.550.000,00	11.550.000,00	Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	15623 Orang	0,00	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1258 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1740 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	106.920.000,00	338.206.000,00	338.206.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	4 Dokumen	0,00	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	31 Dokumen	0,00	0,00	40.300.000,00	40.300.000,00	Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 Dokumen	0,00	0,00	122.800.000,00	122.800.000,00	Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.476.404.400,00	1.476.404.400,00	1.653.745.970,00	177.341.570,00	Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.460.674.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Limo, Maruyung Kota Depok, Limo, Grogol Kota Depok, Limo, Krukut Kota Depok, Limo, Limo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	86 Orang	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	0 0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	2 Dokumen	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	41 Dokumen	0,00	0,00	149.200.000,00	149.200.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	4 Dokumen	0,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD PUSKESMAS CINERE							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.866.504.900,00	3.866.504.900,00	5.160.345.561,00	1.293.840.661,00	Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.866.504.900,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				15 Orang	15 Orang	27.000.000,00	0,00	0,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Cinere Kota Depok, Cinere, Gandul Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2064 Orang	0,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	2064 Orang	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																		
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				30 Orang	30 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	12268 Orang	0,00	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1215 0	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	2091 Orang	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	2 Dokumen	0,00	80.820.000,00	259.020.000,00	259.020.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	- -			262.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	2 Dokumen	0,00	0,00	27.800.000,00	27.800.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	5 Dokumen	0,00	0,00	41.100.000,00	41.100.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	8 0	0,00	0,00	188.600.000,00	188.600.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	1.339.134.000,00	1.339.134.000,00	1.528.110.920,00	188.976.920,00	Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.672.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	2 Dokumen	0,00	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																		
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	10 Laporan	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	-	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																		
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	2 Orang	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	-	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	3 Dokumen	0,00	0,00	136.400.000,00	136.400.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**				**-**	**-**	**1.820.429.450,00**	**1.884.931.950,00**	**3.948.481.227,00**	**5.978.667.424,00**							**7.799.096.874,00**	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	910.903.100,00	910.903.100,00	2.974.476.677,00	2.063.573.577,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.208.597.930,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**				**-**	**-**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	0,00	344.515.000,00	344.515.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.088.955.300,00	-11.044.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.548.071.036,00	DINAS KESEHATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS FARMASI							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar*				78 %	78 %	32.125.818.180,00	35.663.753.850,00	76.744.347.856,00	44.618.529.676,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		172.658.096.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	5 Paket	10.100.000.000,00	11.369.286.800,00	13.163.753.730,00	3.063.753.730,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			8.236.760.400,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				1 Paket	1 Paket	78.000.000,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			130.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	31742 0	0,00	0,00	973.087.790,00	973.087.790,00	-	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																		
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	44061 Orang	0,00	0,00	2.733.600.000,00	2.733.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																		
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	31868 Orang	0,00	0,00	1.911.480.000,00	1.911.480.000,00	-	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	532.240.000,00	532.240.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	10 Dokumen	0,00	0,00	2.965.658.260,00	2.965.658.260,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	488.800.500,00	524.820.500,00	521.695.500,00	32.895.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			3.802.460.562,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																		
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				-	60 Orang	0,00	0,00	25.015.000,00	25.015.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KABUPATEN/KOTA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KHIDMAT SEHAT AFIAT							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota**				**100 %**	**100 %**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	163.935.061.367,00	163.935.061.367,00	168.585.056.470,00	4.649.995.103,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			173.211.659.346,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**				**-**	**-**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar*				-	84 %	32.125.818.180,00	35.663.753.850,00	76.744.347.856,00	44.618.529.676,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		172.658.096.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	8.694.137.725,00	8.694.137.725,00	-	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				-	1 Paket	0,00	1.103.451.300,00	7.103.451.300,00	7.103.451.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.213.796.430,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.000,00	199.999.000,00	199.999.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	4.775.000.000,00	4.775.000.000,00	5.054.000.000,00	279.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			11.722.840.044,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi*				4 sistem	4 sistem	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.250,00	199.999.250,00	199.999.250,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				68 %	68 %	1.088.880.859,00	1.048.895.859,00	1.048.892.859,00	-39.988.000,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.968.379.472,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	49.999.700,00	49.999.700,00	49.999.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik Pemda sesuai standar**				**80 %**	**80 %**	**729.047.600,00**	**729.047.600,00**	**2.883.626.900,00**	**1.129.659.391,00**							**1.858.706.991,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih*				100 %	100 %	522.872.600,00	522.872.600,00	2.558.008.900,00	2.035.136.300,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.482.665.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				60 Orang	60 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUGERAH SEHAT AFIAT							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**660.547.670.230,00**	**677.416.946.272,00**	**799.370.288.257,00**	**138.822.618.027,00**							**882.740.276.676,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemenrintah daerah kab/kota Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota**				**100 undefined % undefined**	**100 undefined % undefined**	**444.256.189.015,00**	**457.249.613.683,00**	**470.057.192.530,00**	**35.335.578.865,00**							**479.591.767.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*IKM*				81,3	81,3	234.664.002.344,00	246.970.952.954,00	274.882.998.246,00	40.218.995.902,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		262.413.498.875,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.949.251.384,00	16.256.201.994,00	22.877.359.920,00	18.928.108.536,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			20.760.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar**				**100 %**	**100 %**	**213.221.349.965,00**	**217.036.498.839,00**	**321.964.189.700,00**	**179.502.509.964,00**							**392.723.859.929,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan serta Obat dan BMHP pada Fasyankes Milik Pemerintah sesuai Standar*				78 %	78 %	32.125.818.180,00	35.663.753.850,00	76.744.347.856,00	44.618.529.676,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		172.658.096.838,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	12 Unit	684.204.000,00	684.204.000,00	684.204.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			413.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				108 Unit	231 Unit	8.659.863.850,00	8.418.734.850,00	21.109.734.501,00	12.449.870.651,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUGASAN-PENGUATAN RS RUJUKAN NASIONAL/PROVINSI/REGIONAL/PARIWISATA	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			18.543.359.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				8 Unit	8 Unit	308.100.000,00	308.100.000,00	308.100.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			613.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				8 Paket	9 Paket	7.164.024.600,00	8.267.385.900,00	8.267.385.900,00	1.103.361.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			5.009.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan pembinaan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan*				61 %	61 %	179.346.442.676,00	179.693.522.880,00	243.366.990.695,00	64.020.548.019,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		216.501.505.776,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	121.446.300,00	121.446.300,00	121.446.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			404.821.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	51.210.000,00	51.210.000,00	51.210.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			170.700.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	12 Dokumen	21.801.853.900,00	21.518.147.900,00	21.518.147.900,00	-283.706.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			23.068.059.900,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Sistem yang dilakukan pengembangan SIK terintegrasi*				4 sistem	4 sistem	660.208.250,00	630.326.250,00	803.958.290,00	143.750.040,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.595.877.843,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	211.959.500,00	160.749.500,00	160.749.500,00	-51.210.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			423.919.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Fasyankes yang dilakukan Pembinaan Mutu Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				68 %	68 %	1.088.880.859,00	1.048.895.859,00	1.048.892.859,00	-39.988.000,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.968.379.472,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				1 Unit	1 Unit	128.447.100,00	128.447.100,00	128.447.100,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			428.157.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Fasyankes milik Pemda sesuai standar**				**80 %**	**80 %**	**729.047.600,00**	**729.047.600,00**	**2.883.626.900,00**	**1.129.659.391,00**							**1.858.706.991,00**	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDMK Dinas Kesehatan terlatih*				100 %	100 %	522.872.600,00	522.872.600,00	2.558.008.900,00	2.035.136.300,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	-		1.482.665.417,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				21 Orang	21 Orang	156.000.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			520.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**53.088.547.084,00**	**53.146.547.034,00**	**46.464.960.376,00**	**13.220.060.258,00**							**66.308.607.342,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	367.699.200,00	367.699.200,00	388.499.200,00	20.800.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		386.084.317,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	136.006.550,00	136.006.550,00	136.006.550,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			142.806.930,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	19 Laporan	231.692.650,00	231.692.650,00	252.492.650,00	20.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			243.277.387,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				80 %	80 %	27.888.273.184,00	27.888.273.184,00	20.429.786.526,00	-7.458.486.658,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		27.027.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				124/12 Orang/bulan	124/12 Orang/bulan	27.888.273.184,00	27.888.273.184,00	20.429.786.526,00	-7.458.486.658,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.027.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase tertib adminitrasi aset*				78 %	78 %	56.850.000,00	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	56.850.000,00	56.850.000,00	56.850.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentse penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.543.447.900,00	1.543.447.850,00	1.543.447.850,00	-50,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		1.611.104.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	556.979.050,00	556.979.050,00	556.979.050,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			584.850.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	196.705.000,00	196.705.000,00	196.705.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			197.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.999.350,00	74.999.350,00	74.999.350,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			78.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				56 Laporan	56 Laporan	418.950.250,00	418.950.200,00	418.950.200,00	-50,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			439.897.972,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				69 %	69 %	13.596.881.500,00	13.596.881.500,00	13.502.981.500,00	-93.900.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		26.866.752.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	408.613.500,00	408.613.500,00	408.613.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			429.044.175,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	3.463.569.000,00	3.521.569.000,00	3.521.569.000,00	58.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		3.874.247.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	600.000.000,00	658.000.000,00	658.000.000,00	58.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			605.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	2.623.569.000,00	2.623.569.000,00	2.623.569.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.017.247.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				80 %	80 %	6.171.826.300,00	6.171.826.300,00	7.021.826.300,00	850.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		6.480.418.023,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	310.959.750,00	310.959.750,00	335.959.750,00	25.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			326.507.738,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				194 Unit	301 Unit	299.414.900,00	299.414.900,00	299.414.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			314.386.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	395.984.000,00	395.984.000,00	395.984.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			415.783.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase genangan tertangani**				**74,55 %**	**74,55 %**	**75.936.996.202,00**	**71.814.088.194,00**	**78.893.841.496,00**	**-19.949.995.453,00**							**55.987.000.749,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDA yang terkelola*				74,55 %	74,55 %	43.706.133.838,00	41.560.727.538,00	48.748.483.109,00	5.042.349.271,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	Masyrakat Kota Depok		28.168.562.422,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				5 KM	5 KM	16.613.167.700,00	16.423.161.700,00	16.398.161.700,00	-215.006.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			17.443.826.085,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0086	Revitalisasi Danau																		
			Jumlah Danau yang Direvitalisasi				2 Danau	7 Danau	2.273.276.000,00	2.273.275.750,00	3.201.134.815,00	927.858.815,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			1.326.034.867,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air																		
			Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	1.686.600,00	1.686.600,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			1.486.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan				1.32 KM	1,44 KM	14.370.440.488,00	13.615.040.488,00	16.128.196.329,00	1.757.755.841,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			5.570.963.632,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0103	Peningkatan Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan				0.52 KM	0,96 KM	8.629.249.650,00	7.429.249.600,00	9.246.461.600,00	617.211.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			2.982.692.685,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				21 Dokumen	25 Dokumen	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	3.763.310.840,00	1.943.310.840,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			833.027.328,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	7.844.625,00	7.844.625,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			7.844.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun				-	1 Unit	0,00	0,00	1.686.600,00	1.686.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			2.686.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase SDA yang terkelola*				74,55 %	74,55 %	32.230.862.364,00	30.253.360.656,00	30.145.358.387,00	-2.085.503.977,00			-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	Masyrakat Kota Depok		27.818.438.327,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2.24 KM	3,3 KM	29.518.312.864,00	27.540.811.156,00	27.178.745.633,00	-2.339.567.231,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			26.205.196.120,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan				2 Bendung	3 Bendung	1.618.839.700,00	1.618.839.700,00	1.759.992.800,00	141.153.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			463.367.362,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																		
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 Bendung	50 Bendung	98.845.000,00	98.845.000,00	98.845.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			103.787.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				11 Dokumen	10 Dokumen	994.864.800,00	994.864.800,00	1.107.774.954,00	112.910.154,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			1.046.087.595,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan**				**15,86 %**	**15,85 %**	**490.655.750,00**	**490.655.750,00**	**3.017.941.250,00**	**2.239.612.840,00**							**2.730.268.590,00**	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan akses air minum perpipaan dan non perpipaan*				15,86 %	15,86 %	490.655.750,00	490.655.750,00	3.017.941.250,00	2.527.285.500,00			-	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyrakat Kota Depok		2.730.268.590,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				350 SR	15 SR	490.655.750,00	490.655.750,00	3.017.941.250,00	2.527.285.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			2.730.268.590,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**				**-**	**99,17 %**	**5.580.104.000,00**	**5.580.027.600,00**	**7.619.523.600,00**	**2.280.741.169,00**							**7.860.845.169,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar*				-	228 KK	5.580.104.000,00	5.580.027.600,00	7.619.523.600,00	2.039.419.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	Masyarakat Kota Depok		7.860.845.169,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				-	228 Rumah Tangga	0,00	0,00	1.914.497.000,00	1.914.497.000,00	-	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**				**89,40 %**	**89,40 %**	**110.815.818.550,00**	**123.430.821.900,00**	**127.537.888.617,00**	**-81.859.681.652,00**							**28.956.136.898,00**	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase drainase dalam kondisi baik*				89,40 %	89,40 %	110.815.818.550,00	123.430.821.900,00	127.537.888.617,00	16.722.070.067,00			-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	Masyrakat Kota Depok		28.956.136.898,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				64370 M	77232 M	92.682.323.550,00	106.396.621.900,00	103.239.363.090,00	10.557.039.540,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			20.550.571.650,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				3000 Sistem Drainase Perkotaan	3000 Sistem Drainase Perkotaan	16.002.510.000,00	14.903.215.000,00	17.162.676.544,00	1.160.166.544,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			7.172.771.798,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				23 Dokumen	24 Dokumen	2.130.985.000,00	2.130.985.000,00	7.135.848.983,00	5.004.863.983,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			1.232.793.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**				**99,15 %**	**99,15 %**	**13.267.316.750,00**	**13.295.716.750,00**	**13.229.987.750,00**	**3.579.006.100,00**							**16.846.322.850,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi*				99,15 %	99,15 %	13.267.316.750,00	13.295.716.750,00	13.229.987.750,00	-37.329.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyrakat Kota Depok		16.846.322.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar				1000 Rumah Tangga	1000 Rumah Tangga	13.267.316.750,00	13.295.716.750,00	13.229.987.750,00	-37.329.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			16.846.322.850,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan yang laik fungsi Persentase Bangunan Yang Laik Fungsi**				**64 %**	**68 68 % %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**-95.000.000,00**							**105.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan yang laik fungsi*				64 %	64 %	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			105.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan yang laik fungsi**				**60 %**	**64 %**	**465.000.000,00**	**465.000.000,00**	**465.000.000,00**	**23.250.000,00**							**488.250.000,00**	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Dokumen penataan bangunan yang dihasilkan*				60 %	60 %	465.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyrakat Kota Depok		488.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	465.000.000,00	465.000.000,00	465.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			488.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dalam kondisi baik**				**68,68 %**	**68,68 %**	**160.846.538.905,00**	**166.705.530.417,00**	**169.857.763.765,00**	**-15.377.080.125,00**							**145.469.458.780,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan dalam kondisi baik*				68,68 %	68,68 %	160.846.538.905,00	166.705.530.417,00	169.857.763.765,00	9.011.224.860,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Masyrakat Kota Depok		145.469.458.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				51 Dokumen	55 Dokumen	5.665.216.250,00	5.626.728.250,00	5.588.574.992,00	-76.641.258,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			3.043.190.535,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				44 Jembatan	7 Jembatan	7.655.834.000,00	7.126.274.000,00	5.040.085.836,00	-2.615.748.164,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			21.708.760.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				10 KM	5 KM	48.472.900.000,00	39.554.032.000,00	42.111.212.257,00	-6.361.687.743,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			82.701.977.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				11 KM	11 KM	1.145.921.000,00	1.145.921.000,00	1.145.921.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			553.470.015,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				20 KM	24 KM	79.582.874.505,00	90.368.080.017,00	93.087.474.530,00	13.504.600.025,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			18.562.110.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				12.57 KM	12.57 KM	15.638.339.950,00	20.199.041.950,00	20.199.041.950,00	4.560.702.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			16.080.224.155,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase badan usaha jasa konstruksi yang berkualitas baik**				**75 %**	**75 %**	**1.213.817.000,00**	**1.211.085.450,00**	**1.159.375.450,00**	**17.530.075,00**							**1.231.347.075,00**	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Persentase tenaga bersertifikat*				92,50 %	92,50 %	856.180.000,00	855.438.450,00	855.438.450,00	-741.550,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha jasa konstruksi		898.989.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				70 Orang	70 Orang	328.000.000,00	327.704.700,00	327.704.700,00	-295.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			344.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				100 Lembaga	100 Lembaga	174.165.000,00	173.986.200,00	173.986.200,00	-178.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			182.873.250,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				124 Orang	124 Orang	354.015.000,00	353.747.550,00	353.747.550,00	-267.450,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			371.715.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jenis data yang tersedia*				100 %	100 %	261.589.000,00	261.589.000,00	209.879.000,00	-51.710.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha jasa konstruksi		264.168.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				4 Perangkat Pendukung	4 Perangkat Pendukung	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	211.589.000,00	211.589.000,00	159.879.000,00	-51.710.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			222.168.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib*				98 %	98 %	96.048.000,00	94.058.000,00	94.058.000,00	-1.990.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha jasa konstruksi		68.189.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				1 Badan Usaha	1 Badan Usaha	96.048.000,00	94.058.000,00	94.058.000,00	-1.990.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			68.189.625,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**				**73.66 %**	**74,66 %**	**3.463.976.150,00**	**3.463.969.718,00**	**3.445.776.838,00**	**23.010.854.470,00**							**26.474.830.620,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*				73.66 %	73.66 %	1.395.416.150,00	1.395.409.718,00	1.394.509.638,00	-906.512,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha jasa konstruksi		24.302.841.570,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	227.046.500,00	227.040.068,00	226.139.988,00	-906.512,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.840.223.855,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	4 Dokumen	944.000.000,00	944.000.000,00	1.168.369.650,00	224.369.650,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			462.617.715,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				1 Orang	100 Orang	224.369.650,00	224.369.650,00	0,00	-224.369.650,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*				74,66 %	74,66 %	944.086.000,00	944.086.000,00	926.793.200,00	-17.292.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha jasa konstruksi		991.290.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				2 Layanan	1 Layanan	538.362.000,00	538.362.000,00	525.064.400,00	-13.297.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			565.280.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	3 Dokumen	405.724.000,00	405.724.000,00	401.728.800,00	-3.995.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			426.010.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang*				74,66 %	74,66 %	1.124.474.000,00	1.124.474.000,00	1.124.474.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Badan usaha jasa konstruksi		1.180.698.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR																		
			Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				4 Kasus	4 Kasus	1.124.474.000,00	1.124.474.000,00	1.124.474.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.180.698.750,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERALATAN DAN PERBENGKELAN							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**53.088.547.084,00**	**53.146.547.034,00**	**46.464.960.376,00**	**13.220.060.258,00**							**66.308.607.342,00**	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				69 %	69 %	13.596.881.500,00	13.596.881.500,00	13.502.981.500,00	-93.900.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Dinas PUPR		26.866.752.675,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	16 Unit	13.188.268.000,00	13.188.268.000,00	13.094.368.000,00	-93.900.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			26.437.708.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				80 %	80 %	6.171.826.300,00	6.171.826.300,00	7.021.826.300,00	850.000.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Dinas PUPR		6.480.418.023,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	103 Unit	5.165.467.650,00	5.165.467.650,00	5.990.467.650,00	825.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			5.423.741.085,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase jalan dalam kondisi baik**				**68,68 %**	**68,68 %**	**160.846.538.905,00**	**166.705.530.417,00**	**169.857.763.765,00**	**-15.377.080.125,00**							**145.469.458.780,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan dalam kondisi baik*				68,68 %	68,68 %	160.846.538.905,00	166.705.530.417,00	169.857.763.765,00	9.011.224.860,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Masyrakat Kota Depok		145.469.458.780,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				10 KM	12.57 KM	2.685.453.200,00	2.685.453.200,00	2.685.453.200,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			2.819.726.175,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI PENGELOLAAN LIMBAH TERPADU							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**425.368.770.391,00**	**439.803.442.813,00**	**451.692.059.142,00**	**26.323.288.751,00**							**352.458.068.073,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**53.088.547.084,00**	**53.146.547.034,00**	**46.464.960.376,00**	**13.220.060.258,00**							**66.308.607.342,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.543.447.900,00	1.543.447.850,00	1.543.447.850,00	-50,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Dinas PUPR		1.611.104.877,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23.948.000,00	23.948.000,00	23.948.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.146.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.495.900,00	14.495.900,00	14.495.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.220.800,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.498.500,00	24.498.500,00	24.498.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.724.055,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.022.000,00	37.022.000,00	37.022.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			38.873.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	22.849.850,00	22.849.850,00	22.849.850,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.992.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	3.463.569.000,00	3.521.569.000,00	3.521.569.000,00	58.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.874.247.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			252.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**				**99,15 %**	**95,15 %**	**5.580.104.000,00**	**5.580.027.600,00**	**7.619.523.600,00**	**2.280.741.169,00**							**7.860.845.169,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi*				99,15 %	99,15 %	5.580.104.000,00	5.580.027.600,00	7.619.523.600,00	2.039.419.600,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan	Masyrakat Kota Depok		7.860.845.169,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																		
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				4912 Rumah Tangga	4912 Rumah Tangga	2.787.450.000,00	2.787.373.600,00	2.787.373.600,00	-76.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			2.928.224.569,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				50 Unit	50 Unit	2.792.654.000,00	2.792.654.000,00	2.917.653.000,00	124.999.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan			2.932.620.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN							**359.411.750.424,00**	**434.665.417.971,00**	**466.725.979.873,00**	**107.314.229.449,00**							**243.132.171.052,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**311.138.250.639,00**	**330.909.335.557,00**	**330.170.337.459,00**	**19.032.086.820,00**							**54.632.171.052,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**311.138.250.639,00**	**330.909.335.557,00**	**330.170.337.459,00**	**19.032.086.820,00**							**54.632.171.052,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**285.466.397.004,00**	**358.964.790.441,00**	**387.911.923.338,00**	**-77.051.350.952,00**							**208.415.046.052,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 persen	100 persen	274.528.450,00	253.034.250,00	253.004.250,00	-21.524.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		326.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	99.528.600,00	99.528.600,00	99.528.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			151.250.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	174.999.850,00	153.505.650,00	153.475.650,00	-21.524.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			175.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangan tepat waktu*				100 persen	100 persen	14.538.822.038,00	14.538.822.038,00	14.538.822.038,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		14.975.413.742,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				75 Orang/bulan	75 Orang/bulan	14.475.581.838,00	14.475.581.838,00	14.475.581.838,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.909.849.293,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	63.240.200,00	63.240.200,00	63.240.200,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.564.449,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 persen	100 persen	2.538.323.492,00	2.438.291.500,00	2.476.386.400,00	-61.937.092,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		2.287.437.521,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.727.500,00	15.727.500,00	15.727.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.300.338,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	552.261.000,00	552.261.000,00	552.261.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			392.818.669,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.864.000,00	33.864.000,00	33.864.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			37.253.359,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	482.188.000,00	482.188.000,00	482.188.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			530.410.155,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	162.361.900,00	162.361.900,00	162.361.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			166.375.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55 Laporan	55 Laporan	757.228.992,00	657.197.000,00	657.197.000,00	-100.031.992,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			695.938.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 persen	100 persen	252.262.393.324,00	326.344.282.953,00	350.695.895.402,00	98.433.502.078,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		188.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				14 Unit	18 Unit	203.988.893.539,00	222.588.200.539,00	214.140.252.988,00	10.151.359.449,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	2.265.000.000,00	1.565.000.000,00	1.065.000.000,00	-1.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		2.116.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.815.000.000,00	1.115.000.000,00	615.000.000,00	-1.200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.996.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 persen	100 persen	13.587.329.700,00	13.825.359.700,00	18.882.815.248,00	5.295.485.548,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		209.444.789,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	15 Unit	141.020.000,00	141.020.000,00	141.020.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			132.634.150,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	32 Unit	22.444.000,00	22.444.000,00	22.444.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.810.639,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	19 Unit	12.989.465.700,00	13.227.495.700,00	17.584.951.248,00	4.595.485.548,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana**				**1,24 %**	**1,24 %**	**1.058.987.850,00**	**1.058.987.850,00**	**1.138.988.000,00**	**-766.987.850,00**							**292.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase dokumen tersedia*				100 %	100 %	27.498.000,00	27.498.000,00	327.498.000,00	300.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyarakat Kota Depok		50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana																		
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah				1 Dokumen	1 Dokumen	27.498.000,00	27.498.000,00	27.498.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				-	3 Dokumen	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Persentase rumah yang direhabilitasi*				100 %	100 %	219.999.850,00	219.999.850,00	0,00	-219.999.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Depok		242.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																		
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				25 Unit Rumah	0 Unit Rumah	219.999.850,00	219.999.850,00	0,00	-219.999.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			242.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luasan Permukiman Kumuh tertangani**				**92,80 %**	**92,80 %**	**3.791.178.100,00**	**3.290.491.200,00**	**3.404.346.200,00**	**662.061.900,00**							**4.453.240.000,00**	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase dokumen tersedia*				100 %	100 %	741.233.000,00	741.233.000,00	441.233.000,00	-300.000.000,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyarakat Kota Depok dan OPD/Stake Holder terkait		500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				5 Dokumen	2 Dokumen	492.648.000,00	492.648.000,00	192.648.000,00	-300.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	248.585.000,00	248.585.000,00	248.585.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha tertangani*				100 persen	80,33 persen	3.049.945.100,00	2.549.258.200,00	2.963.113.200,00	-86.831.900,00			-	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyarakat Kota Depok		3.953.240.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh																		
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar				2 Ha	20,67 Ha	3.049.945.100,00	2.549.258.200,00	2.963.113.200,00	-86.831.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			3.953.240.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase jumlah RTLH yang tertangani**				**62,54 %**	**62,54 %**	**38.406.090.000,00**	**38.406.090.000,00**	**38.406.090.000,00**	**-18.406.090.000,00**							**20.000.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*persentase jumlah RTLH yang tertangani*				62,54 persen	62,54 persen	38.406.090.000,00	38.406.090.000,00	38.406.090.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Masyarakat Kota Depok		20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																		
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				1525 Unit Rumah	1525 Unit Rumah	38.406.090.000,00	38.406.090.000,00	38.406.090.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			20.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani**				**71,57 %**	**71,57 %**	**30.689.097.470,00**	**32.945.058.480,00**	**35.864.632.335,00**	**-20.717.212.470,00**							**9.971.885.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani*				71,57 %	71,57 %	30.689.097.470,00	32.945.058.480,00	35.864.632.335,00	5.175.534.865,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Perumahan di Kota Depok		9.971.885.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	127.068.600,00	127.068.600,00	127.068.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				126 Lokasi	158 Lokasi	18.607.128.870,00	21.794.892.380,00	23.936.556.235,00	5.329.427.365,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			1.750.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**48.273.499.785,00**	**103.756.082.414,00**	**136.555.642.414,00**	**88.282.142.629,00**							**188.500.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**48.273.499.785,00**	**103.756.082.414,00**	**136.555.642.414,00**	**88.282.142.629,00**							**188.500.000.000,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**285.466.397.004,00**	**358.964.790.441,00**	**387.911.923.338,00**	**-77.051.350.952,00**							**208.415.046.052,00**	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 persen	100 persen	252.262.393.324,00	326.344.282.953,00	350.695.895.402,00	98.433.502.078,00			-	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		188.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				59 Unit	78 Unit	48.273.499.785,00	103.756.082.414,00	136.555.642.414,00	88.282.142.629,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			188.500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA							**359.411.750.424,00**	**434.665.417.971,00**	**466.725.979.873,00**	**107.314.229.449,00**							**243.132.171.052,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**311.138.250.639,00**	**330.909.335.557,00**	**330.170.337.459,00**	**19.032.086.820,00**							**54.632.171.052,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**311.138.250.639,00**	**330.909.335.557,00**	**330.170.337.459,00**	**19.032.086.820,00**							**54.632.171.052,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**285.466.397.004,00**	**358.964.790.441,00**	**387.911.923.338,00**	**-77.051.350.952,00**							**208.415.046.052,00**	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 persen	100 persen	2.538.323.492,00	2.438.291.500,00	2.476.386.400,00	-61.937.092,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		2.287.437.521,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				21 Paket	21 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				34 Paket	34 Paket	47.690.600,00	47.690.600,00	47.690.600,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	108.027.800,00	108.027.800,00	108.027.800,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	21.880.000,00	21.880.000,00	21.880.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				112 Laporan	112 Laporan	21.200.000,00	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	2.265.000.000,00	1.565.000.000,00	1.065.000.000,00	-1.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		2.116.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 persen	100 persen	13.587.329.700,00	13.825.359.700,00	18.882.815.248,00	5.295.485.548,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		209.444.789,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	7 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	1.100.000.000,00	700.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Perumahan Untuk MBR/Korban Bencana**				**1,71 %**	**1,24 %**	**1.058.987.850,00**	**1.058.987.850,00**	**1.138.988.000,00**	**-766.987.850,00**							**292.000.000,00**	
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	*persentase tower rumah susun yang dikelola*				100 persen	100 persen	811.490.000,00	811.490.000,00	811.490.000,00	0,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kota Depok		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	811.490.000,00	811.490.000,00	811.490.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMAKAMAN UMUM							**359.411.750.424,00**	**434.665.417.971,00**	**466.725.979.873,00**	**107.314.229.449,00**							**243.132.171.052,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**311.138.250.639,00**	**330.909.335.557,00**	**330.170.337.459,00**	**19.032.086.820,00**							**54.632.171.052,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**311.138.250.639,00**	**330.909.335.557,00**	**330.170.337.459,00**	**19.032.086.820,00**							**54.632.171.052,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**285.466.397.004,00**	**358.964.790.441,00**	**387.911.923.338,00**	**-77.051.350.952,00**							**208.415.046.052,00**	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 persen	100 persen	2.538.323.492,00	2.438.291.500,00	2.476.386.400,00	-61.937.092,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		2.287.437.521,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	8.077.000,00	8.077.000,00	8.077.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.536.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				44 Paket	44 Paket	24.162.800,00	24.162.800,00	24.162.800,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			48.334.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	128.978.000,00	128.978.000,00	128.978.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			203.986.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14.013.000,00	14.013.000,00	14.013.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			28.026.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	76.202.900,00	76.202.900,00	114.297.800,00	38.094.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				109 Laporan	109 Laporan	44.460.000,00	44.460.000,00	44.460.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.460.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 persen	100 persen	2.265.000.000,00	1.565.000.000,00	1.065.000.000,00	-1.200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		2.116.500.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 persen	100 persen	13.587.329.700,00	13.825.359.700,00	18.882.815.248,00	5.295.485.548,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		209.444.789,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	4 Unit	34.400.000,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			52.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase lingkungan Perumahan dengan PSU yang tertangani**				**71,57 %**	**71,57 %**	**30.689.097.470,00**	**32.945.058.480,00**	**35.864.632.335,00**	**-20.717.212.470,00**							**9.971.885.000,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*persentase lingkungan perumahan dengan PSU yang tertangani*				71,57 persen	71,57 persen	30.689.097.470,00	32.945.058.480,00	35.864.632.335,00	5.175.534.865,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman	Aparatur Pemerintah dan Masyrakat Kota Depok		9.971.885.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																		
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				13 Lokasi	13 Lokasi	11.954.900.000,00	11.023.097.500,00	11.801.007.500,00	-153.892.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Permukiman Peningkatan Kualitas Permukiman			8.071.885.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**35.442.455.121,00**	**35.665.845.183,00**	**34.895.088.489,00**	**-547.366.632,00**							**40.232.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.442.455.121,00**	**35.665.845.183,00**	**34.895.088.489,00**	**-547.366.632,00**							**40.232.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**35.442.455.121,00**	**35.665.845.183,00**	**34.895.088.489,00**	**-547.366.632,00**							**40.232.000.000,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**16.965.802.371,00**	**16.892.685.683,00**	**16.415.728.939,00**	**3.566.197.629,00**							**20.532.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 persen	240.579.000,00	240.579.000,00	217.179.000,00	-23.400.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		187.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	32.864.000,00	32.864.000,00	32.864.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	30.325.000,00	30.325.000,00	18.625.000,00	-11.700.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9 Laporan	9 Laporan	177.390.000,00	177.390.000,00	165.690.000,00	-11.700.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			99.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	14.821.645.133,00	14.821.645.133,00	14.368.088.389,00	-453.556.744,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		18.079.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	14.743.363.133,00	14.743.363.133,00	14.339.925.389,00	-403.437.744,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				32 Laporan	12 Laporan	78.282.000,00	78.282.000,00	28.163.000,00	-50.119.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			79.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian*				100 %	100 %	55.328.000,00	55.320.000,00	55.320.000,00	-8.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	55.328.000,00	55.320.000,00	55.320.000,00	-8.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	812.925.238,00	741.376.550,00	741.376.550,00	-71.548.688,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		919.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.996.500,00	18.278.000,00	18.278.000,00	-12.718.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			31.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	106.197.500,00	106.197.500,00	106.197.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			31.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.305.200,00	37.305.200,00	37.305.200,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	174.592.000,00	174.592.000,00	174.592.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	72.006.050,00	42.455.900,00	42.455.900,00	-29.550.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			69.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175 Laporan	175 Laporan	361.747.988,00	361.747.950,00	361.747.950,00	-38,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			490.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30.080.000,00	800.000,00	800.000,00	-29.280.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				70 %	100 %	92.435.000,00	92.435.000,00	92.435.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	92.435.000,00	92.435.000,00	92.435.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				70 %	100 %	942.890.000,00	941.330.000,00	941.330.000,00	-1.560.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		1.047.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	896.710.000,00	896.710.000,00	896.710.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				70 Unit	70 Unit	46.180.000,00	44.620.000,00	44.620.000,00	-1.560.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			47.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**				**62,74 %**	**62,74 %**	**18.476.652.750,00**	**18.773.159.500,00**	**18.479.359.550,00**	**1.223.347.250,00**							**19.700.000.000,00**	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat penyelesaian pelanggaran K3*				74,88 %	74,88 %	17.632.576.300,00	17.328.598.000,00	17.087.258.050,00	-545.318.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		19.047.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				52 Dokumen	52 Dokumen	412.832.500,00	388.174.300,00	388.174.300,00	-24.658.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			155.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				28 Dokumen	28 Dokumen	3.214.573.800,00	3.161.704.000,00	3.113.286.400,00	-101.287.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				425 Orang	423 Orang	13.534.430.000,00	13.328.550.000,00	13.135.627.650,00	-398.802.350,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.850.000,00	19.850.000,00	19.850.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	53.860.000,00	53.860.000,00	53.860.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			57.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																		
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				20 Laporan	20 Laporan	384.280.000,00	363.709.700,00	363.709.700,00	-20.570.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			399.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				1 Laporan	1 Laporan	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Penegakan Perda*				90,14 %	90,14 %	725.516.000,00	1.358.320.200,00	1.305.860.200,00	580.344.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		563.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	164.510.000,00	458.763.950,00	458.763.950,00	294.253.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				55 Laporan	55 Laporan	288.657.500,00	697.577.750,00	645.117.750,00	356.460.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				36 Laporan	36 Laporan	272.348.500,00	201.978.500,00	201.978.500,00	-70.370.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			133.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas PPNS*				90 orang	5 orang	118.560.450,00	86.241.300,00	86.241.300,00	-32.319.150,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	118.560.450,00	86.241.300,00	86.241.300,00	-32.319.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**22.159.795.411,00**	**24.183.432.134,00**	**24.063.913.584,00**	**3.640.758.032,00**							**25.800.553.443,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan anggaran dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	79.539.700,00	79.536.700,00	295.366.700,00	215.827.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		355.451.470,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	64.732.000,00	64.729.000,00	64.729.000,00	-3.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			101.750.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.807.700,00	14.807.700,00	230.637.700,00	215.830.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			253.701.470,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase adm keuangan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	17.164.004.761,00	19.394.661.734,00	18.146.502.184,00	982.497.423,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	ASN		19.961.152.403,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				99 Orang/bulan	114 Orang/bulan	17.164.004.761,00	19.394.661.734,00	18.146.502.184,00	982.497.423,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			19.961.152.403,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 Persen	100 Persen	1.415.689.900,00	1.208.674.900,00	1.352.555.900,00	-63.134.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.578.439.170,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	12.987.000,00	12.987.000,00	12.987.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				51 Paket	51 Paket	258.851.700,00	92.351.700,00	291.252.700,00	32.401.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			321.586.870,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	14.987.000,00	14.987.000,00	14.987.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	848.165.000,00	808.165.000,00	703.165.000,00	-145.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			773.481.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	30.756.200,00	30.756.200,00	30.756.200,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			82.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				520 Laporan	520 Laporan	249.943.000,00	249.428.000,00	299.408.000,00	49.465.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			329.370.800,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 Persen	100 Persen	263.999.950,00	263.999.800,00	602.929.800,00	338.929.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		971.597.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	263.999.950,00	263.999.800,00	263.659.800,00	-340.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			598.400.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				-	45 Unit	0,00	0,00	339.270.000,00	339.270.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			373.197.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa dalam pelayanan*				100 %	100 %	1.297.887.100,00	1.297.885.000,00	1.297.885.000,00	-2.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		1.922.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			217.800.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.118.887.100,00	1.118.885.000,00	1.118.885.000,00	-2.100,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.705.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	1.938.674.000,00	1.938.674.000,00	2.368.674.000,00	430.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		1.011.113.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	13 Unit	290.800.000,00	290.800.000,00	290.800.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			320.100.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	1.611.940.000,00	1.611.940.000,00	1.631.940.000,00	20.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			179.513.400,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				61 Unit	61 Unit	35.934.000,00	35.934.000,00	35.934.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	410.000.000,00	410.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			451.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Layanan Penanggulangan Bencana**				**100 %**	**100 %**	**2.977.312.000,00**	**2.709.120.950,00**	**2.850.317.950,00**	**-69.554.400,00**							**2.907.757.600,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan informasi rawan bencana*				100 Persen	100 Persen	49.211.000,00	46.871.000,00	96.871.000,00	47.660.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		106.558.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				180 Orang	180 Orang	49.211.000,00	46.871.000,00	96.871.000,00	47.660.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			106.558.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana*				100 Persen	100 Persen	1.633.133.000,00	1.367.281.950,00	1.478.478.950,00	-154.654.050,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.343.699.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan																		
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				1 Kawasan	1 Kawasan	68.950.000,00	37.539.950,00	37.539.950,00	-31.410.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			193.921.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				65 Orang	65 Orang	41.190.000,00	41.190.000,00	41.190.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			116.325.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			104.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																		
			Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				20 Orang	20 Orang	107.340.000,00	107.340.000,00	107.340.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	85.000.000,00	196.197.000,00	101.197.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			216.580.100,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																		
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				77 Unit	77 Unit	1.081.941.000,00	857.500.000,00	857.500.000,00	-224.441.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			272.373.200,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				350 Kawasan	350 Kawasan	143.712.000,00	143.712.000,00	143.712.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Persentase penyelamatan dan evakuasi korban bencana*				100 Persen	100 Persen	1.199.968.000,00	1.199.968.000,00	1.199.968.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.375.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				0 Orang	500 Orang	1.199.968.000,00	1.199.968.000,00	1.199.968.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.375.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana undefined*				100 % undefined undefined	100 % undefined undefined	95.000.000,00	95.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat	Masyarakat		82.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	95.000.000,00	75.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Peningkatan Infrastruktur Digital Untuk Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat			82.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**9.665.193.600,00**	**9.618.423.600,00**	**9.252.585.800,00**	**711.428.700,00**							**10.376.622.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	9.243.487.800,00	9.222.847.800,00	8.857.010.000,00	-386.477.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.743.082.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	8.263.487.800,00	8.242.847.800,00	7.782.510.000,00	-480.977.800,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.561.132.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran*				100 Persen	100 Persen	421.705.800,00	395.575.800,00	395.575.800,00	-26.130.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		633.539.720,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				63 Desa/Kelurahan	63 Desa/Kelurahan	421.705.800,00	395.575.800,00	395.575.800,00	-26.130.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			633.539.720,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN BOJONGSARI							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**9.665.193.600,00**	**9.618.423.600,00**	**9.252.585.800,00**	**711.428.700,00**							**10.376.622.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	9.243.487.800,00	9.222.847.800,00	8.857.010.000,00	-386.477.800,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.743.082.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	196.000.000,00	196.000.000,00	214.900.000,00	18.900.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			236.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIPAYUNG							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**9.665.193.600,00**	**9.618.423.600,00**	**9.252.585.800,00**	**711.428.700,00**							**10.376.622.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	9.243.487.800,00	9.222.847.800,00	8.857.010.000,00	-386.477.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.743.082.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	196.000.000,00	196.000.000,00	214.900.000,00	18.900.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			236.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CIMANGGIS							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**9.665.193.600,00**	**9.618.423.600,00**	**9.252.585.800,00**	**711.428.700,00**							**10.376.622.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	9.243.487.800,00	9.222.847.800,00	8.857.010.000,00	-386.477.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.743.082.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	196.000.000,00	196.000.000,00	214.900.000,00	18.900.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			236.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN CINERE							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**9.665.193.600,00**	**9.618.423.600,00**	**9.252.585.800,00**	**711.428.700,00**							**10.376.622.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	9.243.487.800,00	9.222.847.800,00	8.857.010.000,00	-386.477.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.743.082.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	196.000.000,00	196.000.000,00	214.900.000,00	18.900.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			236.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KECAMATAN TAPOS							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**34.802.301.011,00**	**36.510.976.684,00**	**36.166.817.334,00**	**1.364.516.323,00**							**39.084.933.343,00**	
1.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran**				**100 %**	**100 %**	**9.665.193.600,00**	**9.618.423.600,00**	**9.252.585.800,00**	**711.428.700,00**							**10.376.622.300,00**	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota*				100 Persen	100 Persen	9.243.487.800,00	9.222.847.800,00	8.857.010.000,00	-386.477.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		9.743.082.580,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	196.000.000,00	196.000.000,00	214.900.000,00	18.900.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			236.390.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL							**29.146.429.043,00**	**29.296.014.402,00**	**29.251.162.902,00**	**104.733.859,00**							**30.710.404.702,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.146.429.043,00**	**29.296.014.402,00**	**29.251.162.902,00**	**104.733.859,00**							**30.710.404.702,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**29.146.429.043,00**	**29.296.014.402,00**	**29.251.162.902,00**	**104.733.859,00**							**30.710.404.702,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**10.293.293.093,00**	**10.359.959.602,00**	**9.875.830.102,00**	**-291.384.341,00**							**10.001.908.752,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	64.180.000,00	57.279.000,00	57.279.000,00	-6.901.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Sosial dan Stake holder		355.791.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	35.048.000,00	34.047.000,00	34.047.000,00	-1.001.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.659.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	18 Laporan	29.132.000,00	23.232.000,00	23.232.000,00	-5.900.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			292.132.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	8.272.645.993,00	8.462.624.502,00	8.020.095.002,00	-252.550.991,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Sosial Kota Depok		7.497.355.352,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				43 Orang/bulan	41 Orang/bulan	8.246.146.293,00	8.440.524.802,00	7.997.995.302,00	-248.150.991,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.482.355.602,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	26.499.700,00	22.099.700,00	22.099.700,00	-4.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.999.750,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	133.778.300,00	131.382.300,00	131.382.300,00	-2.396.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Sosial Kota Depok		168.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				43 Paket	43 Paket	47.086.000,00	44.720.000,00	44.720.000,00	-2.366.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			48.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	86.692.300,00	86.662.300,00	86.662.300,00	-30.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	1.145.809.300,00	1.031.794.300,00	1.031.794.300,00	-114.015.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawwai Dinas Sosial Kota Depok		1.094.382.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	16.482.500,00	16.482.500,00	16.482.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.483.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				73 Paket	74 Paket	138.885.600,00	138.885.600,00	138.885.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			138.887.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				50 Paket	50 Paket	44.320.200,00	44.320.200,00	44.320.200,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7560 Paket	7560 Paket	292.501.000,00	273.601.000,00	273.601.000,00	-18.900.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			215.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				19 Paket	19 Paket	100.946.000,00	91.806.000,00	91.806.000,00	-9.140.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.925.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1300 Laporan	1300 Laporan	552.674.000,00	466.699.000,00	466.699.000,00	-85.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			595.607.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentse pengadaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	454.549.500,00	454.549.500,00	454.549.500,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Dinas Sosial		485.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	98.360.000,00	98.360.000,00	98.360.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				40 Unit	43 Unit	356.189.500,00	356.189.500,00	356.189.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			435.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	222.330.000,00	222.330.000,00	180.730.000,00	-41.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Penegelola BMD Dinas Sosial Kota Depok		400.380.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	41.200.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			49.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	139.740.000,00	139.740.000,00	98.140.000,00	-41.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			136.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	21.390.000,00	21.390.000,00	21.390.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.480.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			190.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif dalam peningkatan kesejahteraan sosial**				**94,2 %**	**94,2 %**	**1.810.299.550,00**	**1.708.688.500,00**	**1.705.069.500,00**	**54.169.450,00**							**1.864.469.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan ijin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang*				15 dok	15 dok	10.290.000,00	10.290.000,00	7.490.000,00	-2.800.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Dunia Usaha dan Dunia Industri		15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				15 Dokumen	15 Dokumen	10.290.000,00	10.290.000,00	7.490.000,00	-2.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS*				650 Orang	650 Orang	1.800.009.550,00	1.698.398.500,00	1.697.579.500,00	-102.430.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	PSKS		1.849.469.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				175 Orang	175 Orang	193.613.800,00	193.088.800,00	186.341.800,00	-7.272.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			196.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	213.942.000,00	213.742.000,00	198.670.000,00	-15.272.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			243.469.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				74 Lembaga	74 Lembaga	1.168.773.950,00	1.078.797.700,00	1.078.797.700,00	-89.976.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																		
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Sertifikat	11 Sertifikat	223.679.800,00	212.770.000,00	233.770.000,00	10.090.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			210.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar**				**100 %**	**100 %**	**1.585.472.100,00**	**1.517.587.800,00**	**1.510.452.800,00**	**188.714.050,00**							**1.774.186.150,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Jumlah anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar dan pengemis- gelandangan terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*				610 Orang	641 Orang	1.050.994.000,00	1.037.387.900,00	1.038.362.900,00	-12.631.100,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan pengemis di luar panti		1.158.668.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	231 Orang	139.457.000,00	139.457.000,00	146.432.000,00	6.975.000,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			208.416.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	55.584.000,00	55.584.000,00	55.584.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			57.102.150,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	31.200.000,00	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			41.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				280 Orang	280 Orang	86.195.000,00	78.270.000,00	78.270.000,00	-7.925.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			120.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	51.728.500,00	41.612.500,00	41.612.500,00	-10.116.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	64.970.000,00	64.843.000,00	64.843.000,00	-127.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			121.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan																		
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				130 Orang	130 Orang	621.859.500,00	626.421.400,00	620.421.400,00	-1.438.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			556.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Jumlah PPKS Lainnya mendapatkan pembinaan atau bimbingan*				341 orang	341 orang	534.478.100,00	480.199.900,00	472.089.900,00	-62.388.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	PPKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti		615.518.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	53.023.600,00	45.803.600,00	45.803.600,00	-7.220.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			61.929.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	25.816.000,00	25.816.000,00	27.916.000,00	2.100.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			32.280.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	70 Orang	25.620.000,00	25.620.000,00	16.410.000,00	-9.210.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			24.849.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				75 Orang	75 Orang	137.427.500,00	137.184.500,00	137.184.500,00	-243.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			105.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	160 Orang	251.116.000,00	206.500.800,00	205.500.800,00	-45.615.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			292.960.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	41.475.000,00	39.275.000,00	39.275.000,00	-2.200.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			98.500.000,00	DINAS SOSIAL
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Presentase masyarakat miskin/rentan yang menerima bantuan sosial**				**50,50 %**	**50,50 %**	**14.203.282.500,00**	**14.484.671.700,00**	**14.934.703.700,00**	**1.366.902.500,00**							**15.570.185.000,00**	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Data Fakir Miskin dan PPKS yang tervalidasi*				100 %	100 %	14.203.282.500,00	14.484.671.700,00	14.934.703.700,00	731.421.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Keluarga Miskin		15.570.185.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				10000 Orang	10000 Orang	192.814.650,00	184.914.650,00	184.914.650,00	-7.900.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			366.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				92258 Keluarga	92258 Keluarga	1.385.282.350,00	1.050.892.350,00	1.050.892.350,00	-334.390.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			2.579.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				92560 Keluarga	92560 Keluarga	12.625.185.500,00	13.248.864.700,00	13.698.896.700,00	1.073.711.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			12.625.185.000,00	DINAS SOSIAL
5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial**				**100 %**	**100 %**	**988.162.000,00**	**961.837.000,00**	**961.837.000,00**	**245.574.000,00**							**1.233.736.000,00**	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban bencana alam, non alam dan sosial yang mendapatkan bantuan*				100 %	100 %	582.850.000,00	558.925.000,00	558.925.000,00	-23.925.000,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Korban Bencana Alam dan Sosial		611.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				5000 Orang	5000 Orang	483.000.000,00	463.000.000,00	463.000.000,00	-20.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			512.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Orang	1000 Orang	99.850.000,00	95.925.000,00	95.925.000,00	-3.925.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			99.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan tugas penanganan bencana*				100 %	100 %	405.312.000,00	402.912.000,00	402.912.000,00	-2.400.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	TAGANA dan Masyarakat		621.886.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																		
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				74 Orang	74 Orang	405.312.000,00	402.912.000,00	402.912.000,00	-2.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			621.886.000,00	DINAS SOSIAL
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Cakupan TMP yang terpelihara**				**100 %**	**100 %**	**265.919.800,00**	**263.269.800,00**	**263.269.800,00**	**0,00**							**265.919.800,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Makam PahlawanTerpelihara*				100 %	100 %	265.919.800,00	263.269.800,00	263.269.800,00	-2.650.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Pengelola TMP		265.919.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				82 Makam	82 Makam	188.295.800,00	185.645.800,00	185.645.800,00	-2.650.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			188.295.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	77.624.000,00	77.624.000,00	77.624.000,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			77.624.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA							**14.901.647.812,00**	**16.535.117.100,00**	**19.899.576.985,00**	**4.997.929.173,00**							**18.744.362.170,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusana Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**8.980.179.712,00**	**9.615.196.450,00**	**8.932.976.635,00**	**900.141.931,00**							**9.880.321.643,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Nilai SAKIP*				71 Point	71 Point	116.138.850,00	101.444.450,00	61.461.200,00	-54.677.650,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		230.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	44.426.000,00	44.425.700,00	44.425.700,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	71.712.850,00	57.018.750,00	17.035.500,00	-54.677.350,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangann tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	7.139.561.012,00	7.935.516.150,00	7.334.666.585,00	195.105.573,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		8.117.029.243,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	7.139.561.012,00	7.935.516.150,00	7.334.666.585,00	195.105.573,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			8.117.029.243,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 Persen	100 Persen	1.125.699.850,00	1.125.697.850,00	1.084.310.850,00	-41.389.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		875.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.313.000,00	39.313.000,00	39.313.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			43.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	**NON URUSAN**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	128.997.800,00	0,00	0,00	-128.997.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	128.997.800,00	167.009.800,00	167.009.800,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			229.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	**NON URUSAN**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.396.000,00	0,00	0,00	-33.396.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**14.841.511.812,00**	**16.477.763.100,00**	**19.848.321.985,00**	**5.006.810.173,00**							**18.673.247.170,00**	
	2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				-	1 Paket	0,00	33.396.000,00	33.396.000,00	33.396.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	279.838.000,00	279.838.000,00	200.500.000,00	-79.338.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			415.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	134.451.050,00	134.451.050,00	134.451.050,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			143.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	3 Laporan	509.704.000,00	509.702.000,00	509.641.000,00	-63.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 Persen	100 Persen	424.258.000,00	280.616.000,00	280.616.000,00	-143.642.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		476.292.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	424.258.000,00	280.616.000,00	280.616.000,00	-143.642.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			476.292.400,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 Persen	100 Persen	174.522.000,00	171.922.000,00	171.922.000,00	-2.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Disnaker Kota Depok		181.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	76.520.000,00	76.520.000,00	76.520.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	98.002.000,00	95.402.000,00	95.402.000,00	-2.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			101.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja**				**100 Persen**	**100 Persen**	**110.875.750,00**	**110.875.600,00**	**110.875.600,00**	**10.102.750,00**							**120.978.500,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persen Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja*				100 Persen	100 Persen	110.875.750,00	110.875.600,00	110.875.600,00	-150,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	-		120.978.500,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro																		
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	10 Orang	110.875.750,00	110.875.600,00	110.875.600,00	-150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			120.978.500,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Presentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi**				**66 Persen**	**66 Persen**	**3.591.971.550,00**	**4.903.227.250,00**	**7.992.461.800,00**	**2.550.825.477,00**							**6.142.797.027,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Peserta Pelatihan*				200 Orang	500 Orang	3.241.039.300,00	4.552.295.000,00	7.641.529.550,00	4.400.490.250,00			-	- -	Pencari Kerja Kota Depok		5.741.864.427,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				300 Orang	780 Orang	3.241.039.300,00	4.552.295.000,00	7.641.529.550,00	4.400.490.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	- -			5.741.864.427,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Persentase LPK yang mempunyai rencana aksi*				100 Persen	100 Persen	150.932.500,00	150.932.500,00	150.932.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	LPK Kota Depok		160.932.600,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																		
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				60 Lembaga	60 Lembaga	150.932.500,00	150.932.500,00	150.932.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			160.932.600,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase rekomendasi yang disampaikan perusahaan kecil*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Perusahaan Kota Depok		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				5 Perusahaan	5 Perusahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah yang disampaikan*				100 Persen	100 Persen	99.999.750,00	99.999.750,00	99.999.750,00	0,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.750,00	99.999.750,00	99.999.750,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase pencari kerja yg ditempatkan**				**40 %**	**40 %**	**1.123.285.250,00**	**968.269.800,00**	**968.269.800,00**	**169.564.750,00**							**1.292.850.000,00**	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pencari Kerja yang disalurkan*				100 Persen	100 Persen	559.991.000,00	482.566.000,00	482.566.000,00	-77.425.000,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pencari Kerja		670.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan																		
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				10 Orang	0 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				40 Orang	40 Orang	499.991.000,00	482.566.000,00	482.566.000,00	-17.425.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase informasi pasar kerja yang dikelola*				100 Persen	100 Persen	442.670.950,00	407.670.750,00	407.670.750,00	-35.000.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pencari Kerja Kota Depok		472.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	161.999.950,00	151.999.950,00	151.999.950,00	-10.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			172.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				220 Orang	220 Orang	280.671.000,00	255.670.800,00	255.670.800,00	-25.000.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			300.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase PMI Yang ditempatkan*				80 Persen	80 Persen	120.623.300,00	78.033.050,00	78.033.050,00	-42.590.250,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	-		150.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)																		
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				80 Orang	80 Orang	120.623.300,00	78.033.050,00	78.033.050,00	-42.590.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			150.350.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Presentase Kasus yang diselesaikan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.035.199.550,00**	**880.194.000,00**	**1.843.738.150,00**	**201.100.450,00**							**1.236.300.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Laporan Sarana Hubungan Industrial*				100 Persen	100 Persen	553.699.750,00	488.699.300,00	1.460.743.450,00	907.043.700,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pemerintah, SP/SB dan Apindo		633.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan																		
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				2 Perusahaan	0 Perusahaan	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				5 Laporan	5 Laporan	533.699.750,00	488.699.300,00	1.460.743.450,00	927.043.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			633.700.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Presentase Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*				50 Persen	50 Persen	481.499.800,00	391.494.700,00	382.994.700,00	-98.505.100,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Sp/SB, Apindo dan Pemerintah		602.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	2 Perkara	199.999.950,00	174.849.800,00	166.349.800,00	-33.650.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				30 Perkara	30 Perkara	110.500.000,00	47.244.900,00	47.244.900,00	-63.255.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			120.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				3 Lembaga	3 Lembaga	170.999.850,00	169.400.000,00	169.400.000,00	-1.599.850,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			182.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**60.136.000,00**	**57.354.000,00**	**51.255.000,00**	**-8.881.000,00**							**71.115.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**60.136.000,00**	**57.354.000,00**	**51.255.000,00**	**-8.881.000,00**							**71.115.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**60.136.000,00**	**57.354.000,00**	**51.255.000,00**	**10.979.000,00**							**71.115.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Kerja Sama antar WIlayah undefined*				1 MOU undefined undefined	1 MOU undefined undefined	60.136.000,00	57.354.000,00	51.255.000,00	-8.881.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		71.115.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan				2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	60.136.000,00	57.354.000,00	51.255.000,00	-8.881.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			71.115.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							**19.797.272.562,00**	**19.210.541.595,00**	**33.112.853.945,00**	**13.315.581.383,00**							**35.040.769.205,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.797.272.562,00**	**19.210.541.595,00**	**33.112.853.945,00**	**13.315.581.383,00**							**35.040.769.205,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**14.566.883.862,00**	**14.473.664.195,00**	**14.779.366.845,00**	**212.482.983,00**							**15.765.060.205,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayananan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.367.291.600,00**	**10.502.072.845,00**	**10.431.037.795,00**	**443.268.605,00**							**10.810.560.205,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu*				100 %	100 %	121.315.000,00	121.315.000,00	121.315.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah		305.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	58.105.000,00	58.105.000,00	58.105.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	63.210.000,00	63.210.000,00	63.210.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	9.137.490.050,00	9.422.886.295,00	9.422.886.295,00	285.396.245,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah		9.257.080.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	9.137.490.050,00	9.422.886.295,00	9.422.886.295,00	285.396.245,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.257.080.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	847.139.550,00	696.524.550,00	625.589.500,00	-221.550.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah		962.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2.769.000,00	2.769.000,00	2.769.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	79.276.000,00	79.276.000,00	66.276.000,00	-13.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	12.842.000,00	12.842.000,00	12.842.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	50.698.000,00	50.698.000,00	50.698.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33.871.050,00	33.871.050,00	33.871.050,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			37.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				318 Laporan	278 Laporan	611.128.000,00	460.513.000,00	402.578.000,00	-208.550.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	56.555.500,00	56.555.500,00	56.555.450,00	-50,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah dalam pelayanan*				100 %	100 %	131.657.000,00	131.657.000,00	130.157.000,00	-1.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah		150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				19 Unit	18 Unit	131.657.000,00	131.657.000,00	130.157.000,00	-1.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 %	100 %	129.690.000,00	129.690.000,00	131.090.000,00	1.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah		136.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				33 Unit	33 Unit	118.480.000,00	118.480.000,00	119.880.000,00	1.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			122.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	11.210.000,00	11.210.000,00	11.210.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pembangunan Gender**				**74,88 93,04 % %**	**74,88 93,04 % %**	**735.652.400,00**	**734.094.400,00**	**784.094.350,00**	**232.347.600,00**							**968.000.000,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan PUG*				100 %	100 %	105.909.900,00	98.339.900,00	111.839.900,00	5.930.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Pemerintah Kota Depok, Masyarakat Kota Depok		118.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	24.232.250,00	20.007.250,00	20.007.250,00	-4.225.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	81.677.650,00	78.332.650,00	91.832.650,00	10.155.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			88.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Presentase organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan pemberdayaan perempuan*				17,1 %	17,1 %	74.228.550,00	57.795.550,00	94.295.500,00	20.066.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Organisasi	50 Organisasi	74.228.550,00	57.795.550,00	94.295.500,00	20.066.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	555.513.950,00	577.958.950,00	577.958.950,00	22.445.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan				1 Lembaga	1 Lembaga	555.513.950,00	577.958.950,00	577.958.950,00	22.445.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			750.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan**				**100 %**	**100 %**	**297.432.150,00**	**294.709.150,00**	**465.229.150,00**	**121.587.850,00**							**419.020.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kota*				100 %	100 %	297.432.150,00	294.709.150,00	396.209.150,00	98.777.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	297.432.150,00	294.709.150,00	396.209.150,00	98.777.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penigkatan Kapasitas*				-	100 %	0,00	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -	Masyarakat Kota Depok		69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas				-	70 Orang	0,00	0,00	69.020.000,00	69.020.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			69.020.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Cakupan Keluarga yang diberikan Pembinaan**				**100 %**	**100 %**	**482.805.400,00**	**452.155.400,00**	**444.393.400,00**	**17.194.600,00**							**500.000.000,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	482.805.400,00	452.155.400,00	444.393.400,00	-38.412.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	482.805.400,00	452.155.400,00	444.393.400,00	-38.412.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Cakupan Informasi Data Gender dan Anak**				**100 %**	**100 %**	**170.686.300,00**	**167.386.300,00**	**167.386.300,00**	**29.313.700,00**							**200.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	170.686.300,00	167.386.300,00	167.386.300,00	-3.300.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				2 Dokumen	2 Dokumen	170.686.300,00	167.386.300,00	167.386.300,00	-3.300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Pencapaian Strata Kota Layak Anak**				**Nindya Satuan**	**Nindya Satuan**	**1.418.703.762,00**	**1.271.749.850,00**	**1.200.249.600,00**	**113.296.238,00**							**1.532.000.000,00**	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak*				100 %	100 %	581.280.250,00	534.326.550,00	520.481.300,00	-60.798.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		632.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				1 Organisasi	1 Organisasi	161.654.350,00	161.475.250,00	161.475.250,00	-179.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			182.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	419.625.900,00	372.851.300,00	359.006.050,00	-60.619.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			450.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Cakupan Klien yang diberikan layanan konsultasi PUSPAGA*				100 %	100 %	837.423.512,00	737.423.300,00	679.768.300,00	-157.655.212,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				480 Orang	480 Orang	837.423.512,00	737.423.300,00	679.768.300,00	-157.655.212,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			900.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**				**100 %**	**100 %**	**1.094.312.250,00**	**1.051.496.250,00**	**1.286.976.250,00**	**301.167.750,00**							**1.395.480.000,00**	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*				100 %	100 %	69.079.650,00	69.079.650,00	69.079.650,00	0,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				126 Orang	126 Orang	69.079.650,00	69.079.650,00	69.079.650,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum*				100 %	100 %	390.113.400,00	370.113.400,00	370.113.400,00	-20.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		420.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota																		
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				7 Dokumen	7 Dokumen	390.113.400,00	370.113.400,00	370.113.400,00	-20.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			420.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.230.388.700,00**	**4.736.877.400,00**	**18.333.487.100,00**	**13.103.098.400,00**							**19.275.709.000,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayananan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 %**	**100 %**	**10.367.291.600,00**	**10.502.072.845,00**	**10.431.037.795,00**	**443.268.605,00**							**10.810.560.205,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu*				100 %	100 %	121.315.000,00	121.315.000,00	121.315.000,00	0,00			-	- -	Aparatur Pemerintah		305.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	4 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			60.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**				**2,1 undefined**	**2,1 undefined**	**537.415.100,00**	**477.335.500,00**	**805.085.500,00**	**373.984.900,00**							**911.400.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Persentase Dokumen Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk*				100 %	100 %	198.303.500,00	138.303.500,00	124.653.500,00	-73.650.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		245.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.900,00	14.999.900,00	14.999.900,00	-10.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	95.939.600,00	95.939.600,00	95.939.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Dokumen	1 Dokumen	77.364.000,00	27.364.000,00	13.714.000,00	-63.650.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk*				100 %	100 %	339.111.600,00	339.032.000,00	680.432.000,00	341.320.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		666.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga																		
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	1 Laporan	184.415.600,00	184.336.000,00	244.336.000,00	59.920.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				-	1 Laporan	0,00	0,00	149.400.000,00	149.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			149.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																		
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				-	1 Dokumen	0,00	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			132.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain																		
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				45 Unit	45 Unit	154.696.000,00	154.696.000,00	154.696.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**CPR (Contraceptive Prevalence Rate)**				**75,3 undefined**	**75,3 undefined**	**1.259.870.200,00**	**1.111.562.200,00**	**4.090.097.200,00**	**1.657.529.800,00**							**2.917.400.000,00**	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	*Cakupan Pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB*				100 %	100 %	214.236.000,00	152.450.000,00	917.450.000,00	703.214.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Depok		1.015.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	2 Laporan	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				48 Unit	48 Unit	214.236.000,00	152.450.000,00	152.450.000,00	-61.786.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	1 Laporan	0,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	1 Laporan	0,00	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				-	1 Dokumen	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	3 Organisasi	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan*				100 %	100 %	348.300.000,00	348.300.000,00	537.300.000,00	189.000.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Depok		539.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	189 Orang	0,00	0,00	189.000.000,00	189.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			189.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB				4 Organisasi	4 Organisasi	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat*				100 %	100 %	307.952.600,00	221.430.600,00	1.730.215.600,00	1.422.263.000,00			-	- -	Masyarakat Kota Depok		411.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				640 Orang	640 Orang	151.880.600,00	128.730.600,00	1.571.115.600,00	1.419.235.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			165.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				7 Unit	0 Unit	63.372.000,00	0,00	0,00	-63.372.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	1 Laporan	0,00	0,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			41.400.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria																		
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria				520 Orang	520 Orang	92.700.000,00	92.700.000,00	92.700.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	*Cakupan Pemberda yaan Kampung KB*				33 Kelurahan	100 %	389.381.600,00	389.381.600,00	905.131.600,00	515.750.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		952.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2 Organisasi	2 Organisasi	241.765.600,00	241.765.600,00	241.765.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																		
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	1 Dokumen	47.617.000,00	47.617.000,00	51.367.000,00	3.750.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB				1 Laporan	1 Laporan	99.999.000,00	99.999.000,00	99.999.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			120.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	16 Kampung	0,00	0,00	512.000.000,00	512.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			512.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Perceraian**				**3000 undefined**	**3000 undefined**	**3.433.103.400,00**	**3.147.979.700,00**	**13.438.304.400,00**	**11.953.805.600,00**							**15.386.909.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Aktif*				80 % Aktif	80 % Aktif	1.068.166.700,00	948.816.250,00	1.277.390.950,00	209.224.250,00			-	- -	Masyarakat Kota Depok		1.469.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)																		
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)				-	1 Laporan / Dokumen	0,00	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			9.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))																		
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	4 Laporan	278.759.500,00	278.489.250,00	318.538.950,00	39.779.450,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			290.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				5 Unit	5 Unit	58.185.000,00	57.130.000,00	352.610.000,00	294.425.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				3 Laporan	3 Laporan	433.524.700,00	344.039.500,00	329.239.500,00	-104.285.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			455.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				1 Laporan	1 Laporan	188.340.200,00	184.022.500,00	184.022.500,00	-4.317.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)																		
			Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				5 Kelompok	5 Kelompok	109.357.300,00	85.135.000,00	83.380.000,00	-25.977.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Cakupan Mitra Kerja Melaksanakan Pembinaan Poktan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*				100 %	100 %	2.364.936.700,00	2.199.163.450,00	12.160.913.450,00	9.795.976.750,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		13.917.309.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	1.288.271.700,00	1.264.498.450,00	1.217.048.450,00	-71.223.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			2.700.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.230.388.700,00**	**4.736.877.400,00**	**18.333.487.100,00**	**13.103.098.400,00**							**19.275.709.000,00**	
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	1 Organisasi	1.076.665.000,00	0,00	0,00	-1.076.665.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	- -			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**5.230.388.700,00**	**4.736.877.400,00**	**18.333.487.100,00**	**13.103.098.400,00**							**19.275.709.000,00**	
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	0,00	4.752.000.000,00	4.752.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			4.752.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																		
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	0,00	5.227.200.000,00	5.227.200.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			5.227.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							**19.797.272.562,00**	**19.210.541.595,00**	**33.112.853.945,00**	**13.315.581.383,00**							**35.040.769.205,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**19.797.272.562,00**	**19.210.541.595,00**	**33.112.853.945,00**	**13.315.581.383,00**							**35.040.769.205,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**14.566.883.862,00**	**14.473.664.195,00**	**14.779.366.845,00**	**212.482.983,00**							**15.765.060.205,00**	
1.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**				**100 %**	**-**	**1.094.312.250,00**	**1.051.496.250,00**	**1.286.976.250,00**	**301.167.750,00**							**1.395.480.000,00**	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	635.119.200,00	612.303.200,00	847.783.200,00	212.664.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat Kota Depok		885.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				120 Orang	120 Orang	635.119.200,00	612.303.200,00	612.303.200,00	-22.816.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			650.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	38 Orang	0,00	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	-	DAK NONFISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	- -			235.480.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN							**20.084.605.157,00**	**20.167.609.810,00**	**29.926.080.624,00**	**9.841.475.467,00**							**21.321.662.850,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**15.897.043.057,00**	**16.214.853.210,00**	**16.325.679.074,00**	**428.636.017,00**							**16.921.800.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**15.897.043.057,00**	**16.214.853.210,00**	**16.325.679.074,00**	**428.636.017,00**							**16.921.800.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**15.159.249.007,00**	**15.527.589.460,00**	**15.589.237.324,00**	**875.550.993,00**							**16.034.800.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	129.041.750,00	107.201.500,00	107.201.500,00	-21.840.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Perangkat Daerah		83.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	123.041.750,00	101.201.500,00	101.201.500,00	-21.840.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			76.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase adm keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	14.173.165.807,00	14.637.339.510,00	14.637.339.510,00	464.173.703,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Perangkat Daerah		15.011.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	14.163.165.857,00	14.628.339.710,00	14.628.339.710,00	465.173.853,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			15.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9.999.950,00	8.999.800,00	8.999.800,00	-1.000.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase adm Barang Milik Daerah yang tercatat*				100 %	100 %	56.200.000,00	18.334.000,00	18.334.000,00	-37.866.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	56.200.000,00	18.334.000,00	18.334.000,00	-37.866.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	523.401.450,00	383.854.450,00	435.089.450,00	-88.312.000,00			-	- -	Perangkat Daerah		560.300.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	6.763.000,00	6.763.000,00	6.763.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			7.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				47 Paket	49 Paket	81.508.350,00	81.508.350,00	117.743.350,00	36.235.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			82.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	23.083.100,00	23.083.100,00	23.083.100,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			25.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	76.034.000,00	66.534.000,00	81.534.000,00	5.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			76.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3 Paket	9.986.000,00	9.986.000,00	9.986.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			19.800.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				359 Laporan	139 Laporan	326.027.000,00	195.980.000,00	195.980.000,00	-130.047.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	277.440.000,00	380.860.000,00	391.272.864,00	113.832.864,00			-	- -	Perangkat Daerah		320.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	3 Unit	23.200.000,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	33 Unit	40.160.000,00	40.160.000,00	50.572.864,00	10.412.864,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	200.480.000,00	303.900.000,00	303.900.000,00	103.420.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			235.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	19 Unit	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat**				**90 %**	**90 %**	**637.532.200,00**	**587.018.750,00**	**641.032.750,00**	**192.467.800,00**							**830.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Konsumsi pangan pokok perkapita/tahun*				85,4 kg/kapita/tahun	85,4 kg/kapita/tahun	380.978.700,00	330.475.750,00	329.675.750,00	-51.302.950,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		528.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				3 Laporan	3 Laporan	236.995.300,00	186.492.600,00	186.492.600,00	-50.502.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			370.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia																		
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	114.980.750,00	114.980.750,00	114.180.750,00	-800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)																		
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				2 Dokumen	2 Dokumen	29.002.650,00	29.002.400,00	29.002.400,00	-250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			33.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota*				-	65 Ton	54.990.000,00	54.990.000,00	130.000.000,00	75.010.000,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Ton	10 Ton	54.990.000,00	54.990.000,00	130.000.000,00	75.010.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Konsumsi sayur dan buah kg/kapita/tahun*				82,6 kg/kapita/tahun	82,6 kg/kapita/tahun	201.563.500,00	201.553.000,00	181.357.000,00	-20.206.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		172.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	1 Laporan	201.563.500,00	201.553.000,00	181.357.000,00	-20.206.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			172.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan**				**100 %**	**100 %**	**33.822.850,00**	**33.806.000,00**	**28.970.000,00**	**4.677.150,00**							**38.500.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Persentase Dokumen Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan*				100 %	100 %	23.986.850,00	23.970.000,00	21.170.000,00	-2.816.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	23.986.850,00	23.970.000,00	21.170.000,00	-2.816.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			27.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Penyediaan cadangan pangan pokok*				65 Ton	100 %	9.836.000,00	9.836.000,00	7.800.000,00	-2.036.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	9.836.000,00	9.836.000,00	7.800.000,00	-2.036.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase uji keamanan pangan**				**100 %**	**100 %**	**66.439.000,00**	**66.439.000,00**	**66.439.000,00**	**-47.939.000,00**							**18.500.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase uji keamanan pangan*				100 %	100 %	66.439.000,00	66.439.000,00	66.439.000,00	0,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pangan Segar Asal Tumbuhan yang beredar di Kota Depok		18.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	10 Dokumen	5.048.500,00	5.048.500,00	5.048.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	61.390.500,00	61.390.500,00	61.390.500,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			18.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4.187.562.100,00**	**3.952.756.600,00**	**13.600.401.550,00**	**9.412.839.450,00**							**4.399.862.850,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**1.148.398.700,00**	**1.073.058.800,00**	**6.083.525.800,00**	**4.935.127.100,00**							**1.180.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase penyediaan data**				**100 %**	**100 %**	**10.016.900,00**	**10.016.900,00**	**10.016.900,00**	**983.100,00**							**11.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase penyediaan data*				100 %	100 %	10.016.900,00	10.016.900,00	10.016.900,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	10.016.900,00	10.016.900,00	10.016.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan**				**2 %**	**2 %**	**1.019.612.000,00**	**956.168.100,00**	**5.976.008.100,00**	**18.388.000,00**							**1.038.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Persentase pokdakan yang dibina*				100 %	100 %	313.062.000,00	289.754.100,00	276.954.100,00	-36.107.900,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)		248.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				11 Kelompok	11 Kelompok	62.866.000,00	62.866.000,00	62.866.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				0 Kelompok	30 Kelompok	110.820.000,00	110.820.000,00	110.820.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			23.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				10 Kelompok	10 Kelompok	139.376.000,00	116.068.100,00	103.268.100,00	-36.107.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Persentase peningkatan produksi benih*				16 %	16 %	706.550.000,00	666.414.000,00	5.699.054.000,00	4.992.504.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		790.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	192.668.000,00	165.467.000,00	5.198.107.000,00	5.005.439.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Unit	4 Unit	513.882.000,00	500.947.000,00	500.947.000,00	-12.935.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			390.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase Unit pengolahan ikan yang diberikan rekomendasi SKP**				**100 %**	**100 %**	**118.769.800,00**	**106.873.800,00**	**97.500.800,00**	**12.230.200,00**							**131.000.000,00**	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Persentase pelaku usaha hasil perikanan*				100 %	100 %	40.663.800,00	40.663.800,00	31.290.800,00	-9.373.000,00			-	- -	Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan		45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil																		
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				0 Unit Usaha	25 Unit Usaha	40.663.800,00	40.663.800,00	31.290.800,00	-9.373.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Angka konsumsi ikan*				23 kg/kapita/tahun	23 kg/kapita/tahun	78.106.000,00	66.210.000,00	66.210.000,00	-11.896.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2500 Ton	2500 Ton	78.106.000,00	66.210.000,00	66.210.000,00	-11.896.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			86.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**3.039.163.400,00**	**2.879.697.800,00**	**7.516.875.750,00**	**4.477.712.350,00**							**3.219.862.850,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produktivitas Pertanian**				**1 %**	**1 %**	**461.938.950,00**	**433.838.700,00**	**715.284.700,00**	**-26.938.950,00**							**435.000.000,00**	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Persentase sarana yang digunakan dan diawasi*				100 %	100 %	355.353.900,00	337.873.650,00	624.623.650,00	269.269.750,00			-	- -	Masyarakat		315.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi																		
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0 Laporan	3 Laporan	91.622.000,00	89.321.750,00	414.321.750,00	322.699.750,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	- -			100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																		
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				2 Laporan	2 Laporan	263.731.900,00	248.551.900,00	210.301.900,00	-53.430.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			215.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase SDG Hewan yang dimanfaatkan*				100 %	100 %	106.585.050,00	95.965.050,00	90.661.050,00	-15.924.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																		
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				3 Dokumen	3 Dokumen	106.585.050,00	95.965.050,00	90.661.050,00	-15.924.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Layanan RPH**				**100 %**	**100 %**	**1.561.398.400,00**	**1.523.094.400,00**	**1.792.744.400,00**	**158.601.600,00**							**1.720.000.000,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Persentase Pelayanan Jasa*				2 Jenis	100 persen	1.561.398.400,00	1.523.094.400,00	1.792.744.400,00	231.346.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		1.720.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan																		
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	1 Unit	1.561.398.400,00	1.523.094.400,00	1.792.744.400,00	231.346.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			1.720.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pelayanan Keswan dan Kesmavet**				**100 %**	**100 %**	**720.844.000,00**	**663.505.000,00**	**709.586.950,00**	**7.018.850,00**							**727.862.850,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan*				5 Jenis	100 persen	149.918.000,00	149.918.000,00	142.066.000,00	-7.852.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan																		
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				11 Wilayah	11 Wilayah	149.918.000,00	149.918.000,00	142.066.000,00	-7.852.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelayanan jasa*				100 %	100 %	401.190.000,00	376.331.000,00	441.875.250,00	40.685.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				2 Laporan	2 Laporan	401.190.000,00	376.331.000,00	441.875.250,00	40.685.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			450.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Persentase unit usaha produk hewan ber-NKV yang diawasi*				2 Jenis	100 persen	169.736.000,00	137.256.000,00	125.645.700,00	-44.090.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		127.862.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				2 Laporan	2 Laporan	81.896.000,00	73.860.000,00	73.860.000,00	-8.036.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			90.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)																		
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM				150 Dokumen	150 Dokumen	8.985.000,00	8.985.000,00	8.985.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			9.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan																		
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				15 Orang	12 Orang	50.090.000,00	33.871.000,00	22.260.700,00	-27.829.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan																		
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	28.765.000,00	20.540.000,00	20.540.000,00	-8.225.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			28.862.850,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase penambahan jumlah kelompok**				**62,96 %**	**62,96 %**	**294.982.050,00**	**259.259.700,00**	**4.299.259.700,00**	**42.017.950,00**							**337.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Persentase jumlah jenis fasilitasi penyuluhan pertanian*				100 %	100 %	294.982.050,00	259.259.700,00	4.299.259.700,00	4.004.277.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -	Masyarakat		337.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit	9.621.500,00	9.620.800,00	9.620.800,00	-700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			11.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				188 Unit	188 Unit	100.068.050,00	92.176.400,00	92.176.400,00	-7.891.650,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			110.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				2 Unit	2 Unit	185.292.500,00	157.462.500,00	4.197.462.500,00	4.012.170.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	- -			216.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**17.436.010.000,00**	**18.093.209.519,00**	**17.211.626.569,00**	**-13.896.010.000,00**							**3.540.000.000,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaa, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	407.330.000,00	158.080.000,00	158.760.050,00	-248.569.950,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		220.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	360.900.000,00	111.650.000,00	112.330.050,00	-248.569.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	46.430.000,00	46.430.000,00	46.430.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangann tepat waktu*				100 %	100 %	14.039.590.000,00	14.946.039.519,00	14.166.039.519,00	126.449.519,00			-	- -	Aparatur DLHK		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	14.000.000.000,00	14.906.449.519,00	14.126.449.519,00	126.449.519,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	39.590.000,00	39.590.000,00	39.590.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentse penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	2.135.000.000,00	2.135.000.000,00	2.032.737.000,00	-102.263.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Aparatur DLHK		2.320.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			90.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	497.737.000,00	-102.263.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			710.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	580.000.000,00	580.000.000,00	580.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Aparatur DLHK		670.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	274.090.000,00	274.090.000,00	274.090.000,00	0,00			-	- -	Aparatur DLHK		270.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				28 Unit	22 Unit	124.680.000,00	124.680.000,00	124.680.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	149.410.000,00	149.410.000,00	149.410.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			135.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan Perencanaan LH**				**100 %**	**100 %**	**1.149.198.300,00**	**974.061.750,00**	**1.344.489.050,00**	**380.801.700,00**							**1.530.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase implementasi RPPLH*				100 %	100 %	834.998.800,00	676.322.250,00	801.289.150,00	-33.709.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		720.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				3 Dokumen	4 Dokumen	549.999.450,00	476.322.300,00	526.322.300,00	-23.677.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokuman	2 Dokuman	284.999.350,00	199.999.950,00	274.966.850,00	-10.032.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan KLHS*				0 %	100 %	314.199.500,00	297.739.500,00	543.199.900,00	229.000.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		810.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	158.500.000,00	158.500.000,00	258.500.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang																		
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	155.699.500,00	139.239.500,00	284.699.900,00	129.000.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pemenuhan baku mutu**				**IKA =51,73 IKU=65,84**	**IKA= 51,79 IKU=65,88**	**2.497.738.000,00**	**2.203.865.000,00**	**2.203.868.480,00**	**1.142.262.000,00**							**3.640.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah dokumen dan Sampel yang di hasilkan*				100 %	100 %	2.272.737.700,00	2.087.802.700,00	2.087.806.180,00	-184.931.520,00			-	- -	Masyarakat		3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	5 Dokumen	1.122.737.700,00	1.029.802.700,00	1.029.806.180,00	-92.931.520,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian IKA dan IKU*				-	100 %	50.000.300,00	47.260.300,00	47.260.300,00	-2.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				4 Laporan	4 Laporan	50.000.300,00	47.260.300,00	47.260.300,00	-2.740.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Capaian IKA*				-	100 %	175.000.000,00	68.802.000,00	68.802.000,00	-106.198.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	175.000.000,00	68.802.000,00	68.802.000,00	-106.198.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Nilai IKTL (indeks kualitas tutupan lahan)**				**35,877**	**35,879**	**34.700.000.000,00**	**34.427.053.600,00**	**39.006.832.050,00**	**-12.050.000.000,00**							**22.650.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase taman yang terpelihara*				100 %	100 %	34.700.000.000,00	34.427.053.600,00	39.006.832.050,00	4.306.832.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		22.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				22,32 Ha	22,32 Ha	27.000.000.000,00	26.710.343.400,00	30.585.607.850,00	3.585.607.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			14.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																		
			Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	3.500.000.000,00	3.159.479.000,00	3.459.479.000,00	-40.521.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			4.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase pelaku usaha yang melakukan pengendalian Limbah B3**				**50 %**	**52,00 %**	**502.700.000,00**	**381.907.900,00**	**381.909.640,00**	**37.300.000,00**							**540.000.000,00**	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase pelaku usaha yang melakukan penyimpanan sementara LB3*				50 %	50 %	250.000.000,00	129.207.900,00	129.209.640,00	-120.790.360,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	129.207.900,00	129.209.640,00	-120.790.360,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah LB3*				11.5 %	11.5 %	252.700.000,00	252.700.000,00	252.700.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				1 Dokumen	1 Dokumen	252.700.000,00	252.700.000,00	252.700.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap Izin lingkungan**				**80 %**	**90,00 %**	**399.849.000,00**	**267.248.000,00**	**267.248.000,00**	**-138.849.000,00**							**261.000.000,00**	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha yang memiliki izin*				80 %	80 %	399.849.000,00	267.248.000,00	267.248.000,00	-132.601.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		261.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				200 Badan Usaha	200 Badan Usaha	349.983.000,00	217.418.000,00	217.418.000,00	-132.565.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			210.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																		
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				25 Orang	25 Orang	49.866.000,00	49.830.000,00	49.830.000,00	-36.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			51.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase komunitas aktif**				**86,23 %**	**87,27 %**	**1.143.999.250,00**	**972.600.950,00**	**972.600.950,00**	**226.000.750,00**							**1.370.000.000,00**	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase komunitas terlatih*				86,23 %	86,23 %	1.143.999.250,00	972.600.950,00	972.600.950,00	-171.398.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		1.370.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	124.999.950,00	109.091.850,00	109.091.850,00	-15.908.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			160.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				150 Orang	150 Orang	99.999.500,00	99.999.500,00	99.999.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			110.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	918.999.800,00	763.509.600,00	763.509.600,00	-155.490.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peran serta masyarakat dalam lomba bidang LH**				**27,87 %**	**31,15 %**	**400.000.000,00**	**390.500.000,00**	**390.500.000,00**	**210.000.000,00**							**610.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peran serta masarakat dalam lomba bidang LH*				27,87 %	27,87 %	400.000.000,00	390.500.000,00	390.500.000,00	-9.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				30 Entitas	30 Entitas	400.000.000,00	390.500.000,00	390.500.000,00	-9.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			610.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase jumlah kasus yang tertangani**				**66 %**	**70 %**	**495.383.000,00**	**479.933.000,00**	**479.933.000,00**	**-85.383.000,00**							**410.000.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah kasus yang tertangani*				66 %	66 %	495.383.000,00	479.933.000,00	479.933.000,00	-15.450.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				8 Pengaduan	8 Pengaduan	495.383.000,00	479.933.000,00	479.933.000,00	-15.450.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			410.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase penanganan sampah**				**76,30 %**	**76,10 %**	**119.663.257.200,00**	**127.645.772.100,00**	**134.322.759.166,32**	**31.336.742.800,00**							**151.000.000.000,00**	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sampah yang dikelola*				76,30 %	76,30 %	119.663.257.200,00	127.645.772.100,00	134.322.759.166,32	14.659.501.966,32			-	- -	Masyarakat		151.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				200 Unit	245 Unit	17.000.000.000,00	27.375.000.000,00	31.925.000.000,00	14.925.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			18.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				300.000 Ton	300.000 Ton	70.963.257.450,00	68.726.827.350,00	67.200.733.100,00	-3.762.524.350,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			100.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																		
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				70 Ton	70 Ton	14.700.000.000,00	14.543.945.000,00	13.752.205.500,00	-947.794.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			15.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM LINGKUNGAN							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
1.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Cakupan pemenuhan baku mutu**				**IKA=51,73 IKU=65,84**	**IKA= 51,79 IKU=65,88**	**2.497.738.000,00**	**2.203.865.000,00**	**2.203.868.480,00**	**1.142.262.000,00**							**3.640.000.000,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase jumlah dokumen dan Sampel yang di hasilkan*				100 %	100 %	2.272.737.700,00	2.087.802.700,00	2.087.806.180,00	-184.931.520,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		3.400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				100 Dokumen	100 Dokumen	1.150.000.000,00	1.058.000.000,00	1.058.000.000,00	-92.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			2.200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TEMPAT PEMROSESAN AKHIR							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
1.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase penanganan sampah**				**76,30 %**	**76,10 %**	**119.663.257.200,00**	**127.645.772.100,00**	**134.322.759.166,32**	**31.336.742.800,00**							**151.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase sampah yang dikelola*				76,30 %	76,30 %	119.663.257.200,00	127.645.772.100,00	134.322.759.166,32	14.659.501.966,32			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		151.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				300.000 Ton	300.000 Ton	16.999.999.750,00	16.999.999.750,00	21.444.820.566,32	4.444.820.816,32	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			18.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN HUTAN RAYA							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**178.388.134.750,00**	**185.836.151.819,00**	**196.581.766.905,32**	**18.193.632.155,32**							**185.551.000.000,00**	
1.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Nilai IKTL (indeks kualitas tutupan lahan)**				**35,877**	**35,879**	**34.700.000.000,00**	**34.427.053.600,00**	**39.006.832.050,00**	**-12.050.000.000,00**							**22.650.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase taman yang terpelihara*				100 %	100 %	34.700.000.000,00	34.427.053.600,00	39.006.832.050,00	4.306.832.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		22.650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	4.200.000.000,00	4.557.231.200,00	4.961.745.200,00	761.745.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			4.550.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**23.998.995.350,00**	**23.922.388.653,00**	**23.796.270.262,00**	**-202.725.088,00**							**36.856.790.294,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.998.995.350,00**	**23.922.388.653,00**	**23.796.270.262,00**	**-202.725.088,00**							**36.856.790.294,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**23.998.995.350,00**	**23.922.388.653,00**	**23.796.270.262,00**	**-202.725.088,00**							**36.856.790.294,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 Persen**	**100 Persen**	**18.521.141.200,00**	**18.585.643.953,00**	**18.659.025.562,00**	**9.351.592.845,00**							**27.872.734.045,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	218.000.000,00	217.707.500,00	217.707.500,00	-292.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		527.387.993,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	52.000.000,00	51.707.500,00	51.707.500,00	-292.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			129.267.035,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	166.000.000,00	166.000.000,00	166.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			398.120.958,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	16.345.249.000,00	16.463.599.253,00	16.456.494.862,00	111.245.862,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		23.548.041.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				103 Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	16.250.000.000,00	16.368.350.253,00	16.361.245.862,00	111.245.862,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.481.491.520,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				18 Laporan	18 Laporan	95.249.000,00	95.249.000,00	95.249.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			66.550.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	1.079.987.200,00	1.072.983.200,00	1.121.319.200,00	41.332.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		1.957.381.284,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32.997.600,00	32.997.600,00	32.997.600,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.896.035,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.037.453,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			64.381.906,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	180.000.000,00	173.000.000,00	196.336.000,00	16.336.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			254.139.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			319.526.290,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	160 Laporan	349.989.600,00	349.985.600,00	374.985.600,00	24.996.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			532.400.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan*				100 Persen	100 Persen	476.154.000,00	476.024.000,00	476.024.000,00	-130.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		1.017.210.138,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	16 Unit	49.667.000,00	49.557.000,00	49.557.000,00	-110.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			66.101.972,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				73 Unit	49 Unit	426.487.000,00	426.467.000,00	426.467.000,00	-20.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			951.108.166,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 Persen	100 Persen	401.751.000,00	355.330.000,00	387.480.000,00	-14.271.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		822.713.110,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				84 Unit	84 Unit	99.951.000,00	99.951.000,00	121.701.000,00	21.750.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			183.326.084,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	79.964.000,00	79.964.000,00	90.364.000,00	10.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	99 Unit	199.836.000,00	153.415.000,00	153.415.000,00	-46.421.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			339.387.026,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Cakupan Identitas Kependudukan**				**89,70 Persen**	**89,70 Persen**	**2.861.494.900,00**	**2.720.389.900,00**	**2.520.889.900,00**	**2.175.080.380,00**							**5.036.575.280,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase Layanan Kependudukan*				100 Persen	100 Persen	2.861.494.900,00	2.720.389.900,00	2.520.889.900,00	-340.605.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kota Depok		5.036.575.280,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	89.999.700,00	0,00	0,00	-89.999.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			190.195.275,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				300 Orang	300 Orang	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			79.541.005,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				8 Dokumen	8 Dokumen	2.721.495.300,00	2.670.390.000,00	2.470.890.000,00	-250.605.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.766.839.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Layanan Pencatatan Sipil**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.053.793.850,00**	**1.053.793.850,00**	**1.053.793.850,00**	**211.572.437,00**							**1.265.366.287,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Layanan Pencatatan Sipil*				100 Persen	100 Persen	1.053.793.850,00	1.053.793.850,00	1.053.793.850,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kota Depok		1.265.366.287,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				5 Dokumen	5 Dokumen	1.053.793.850,00	1.053.793.850,00	1.053.793.850,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.265.366.287,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Optimalisasi SIAK pada Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.462.565.400,00**	**1.462.560.950,00**	**1.462.560.950,00**	**1.068.521.910,00**							**2.531.087.310,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Persentase Sistem yang dikelola dan dipelihara untuk optimalisasi SIAK*				100 Persen	100 Persen	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kota Depok		1.485.449.553,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	710.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.485.449.553,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Persentase Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan untuk optimalisasi SIAK*				undefined undefined	undefined undefined	199.780.000,00	199.779.850,00	199.779.850,00	-150,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		186.450.065,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	199.780.000,00	199.779.850,00	199.779.850,00	-150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			186.450.065,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk Optimalisasi SIAK*				100 Persen	100 Persen	552.785.400,00	552.781.100,00	552.781.100,00	-4.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat Kota Depok		859.187.692,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	257.450.400,00	257.446.400,00	257.446.400,00	-4.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			206.305.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				11 Dokumen	11 Dokumen	193.335.000,00	193.334.700,00	193.334.700,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			289.882.692,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				2 Laporan	2 Laporan	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			363.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase Penyelesaian Profil Kependudukan berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kota Depok**				**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**51.027.372,00**							**151.027.372,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Tersedianya Profil Kependudukan*				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Disdukcapil Kota Depok		151.027.372,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			151.027.372,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PERHUBUNGAN							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**26.173.154.500,00**	**26.204.029.639,00**	**24.413.472.710,00**	**5.377.760.500,00**							**31.550.915.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 persen	100 persen	164.815.300,00	149.599.100,00	149.599.100,00	-15.216.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub dan Stakeholder		165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	109.848.000,00	99.659.600,00	99.659.600,00	-10.188.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	7 Laporan	54.967.300,00	49.939.500,00	49.939.500,00	-5.027.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 persen	100 persen	19.041.781.400,00	19.716.395.739,00	17.489.997.610,00	-1.551.783.790,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		26.156.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				125 Orang/ bulan	107 Orang/ bulan	19.000.000.000,00	19.674.614.339,00	17.448.216.210,00	-1.551.783.790,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			26.116.800.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	41.781.400,00	41.781.400,00	41.781.400,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian*				100 persen	100 persen	299.682.000,00	299.658.000,00	299.658.000,00	-24.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	99.684.000,00	99.684.000,00	99.684.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	130 Orang	199.998.000,00	199.974.000,00	199.974.000,00	-24.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.283.439.800,00	1.243.739.800,00	1.418.739.800,00	135.300.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		1.512.300.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.910.500,00	11.910.500,00	11.910.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			27.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	439.609.800,00	399.999.800,00	399.999.800,00	-39.610.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	1 Paket	11.998.500,00	11.998.500,00	11.998.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			33.275.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	349.952.000,00	349.952.000,00	449.952.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	24.992.000,00	24.992.000,00	24.992.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			135.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	444.977.000,00	444.887.000,00	519.887.000,00	74.910.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			487.025.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 %	100 %	3.562.598.000,00	2.973.799.000,00	2.835.000.200,00	-727.597.800,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	3 Unit	3.562.598.000,00	2.973.799.000,00	2.835.000.200,00	-727.597.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	1.388.728.000,00	1.388.728.000,00	1.388.728.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		1.397.550.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	670.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			519.090.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	718.728.000,00	718.728.000,00	718.728.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			878.460.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	432.110.000,00	432.110.000,00	831.750.000,00	399.640.000,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		419.265.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	60 Unit	204.840.000,00	204.840.000,00	289.840.000,00	85.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			186.340.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				41 Unit	20 Unit	29.620.000,00	29.620.000,00	44.260.000,00	14.640.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			33.275.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	3 Unit	197.650.000,00	197.650.000,00	497.650.000,00	300.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			199.650.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kecepatan rata-rata**				**26,5 km/jam**	**26,5 km/jam**	**60.919.525.300,00**	**59.478.740.200,00**	**60.127.411.877,00**	**16.093.940.950,00**							**77.013.466.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*cakupan integrasi perencanaan transportasi*				100 persen	100 persen	375.000.000,00	375.000.000,00	475.000.000,00	100.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub		600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				5 Dokumen	6 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	475.000.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*persentase ketersediaan prasarana dan perlengkapan jalan*				7,23 %	7,23 %	38.558.793.600,00	38.165.729.600,00	38.312.093.927,00	-246.699.673,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		47.417.131.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	213.700.000,00	213.700.000,00	213.700.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				250 Unit	200 Unit	2.399.999.600,00	1.121.784.600,00	1.121.784.600,00	-1.278.215.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			3.350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan																		
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				12 Unit	12 Unit	349.990.000,00	299.999.000,00	143.475.000,00	-206.515.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				100 Unit	66 Unit	2.400.000.000,00	3.090.542.000,00	2.955.407.000,00	555.407.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			2.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*persentase rekomendasi parkir yang dikeluarkan*				100 persen	100 persen	400.000.000,00	343.279.900,00	343.279.900,00	-56.720.100,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	343.279.900,00	343.279.900,00	-56.720.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase titik pengawasan kemacetan*				62,5 persen	62,5 persen	13.100.000.000,00	13.047.590.300,00	13.049.215.650,00	-50.784.350,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		15.400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	12.900.000.000,00	12.848.153.000,00	12.873.937.000,00	-26.063.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			15.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				11 Laporan	11 Laporan	200.000.000,00	199.437.300,00	175.278.650,00	-24.721.350,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Andalalin yang diterbitkan*				100 %	100 %	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*load factor*				31 %	31 %	705.992.000,00	644.684.000,00	794.684.000,00	88.692.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		1.140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				6 Unit	3500 Unit	605.992.000,00	544.684.000,00	694.684.000,00	88.692.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*rasio ijin trayek*				0.0022	0.0022	644.991.000,00	549.388.600,00	663.360.600,00	18.369.600,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		330.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	4 Laporan	479.991.000,00	384.388.600,00	498.360.600,00	18.369.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Unit	12 Unit	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			170.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian**				**100 %**	**100 %**	**99.735.000,00**	**99.183.150,00**	**99.183.150,00**	**265.000,00**							**100.000.000,00**	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	*persentase ketersediaan perencanaan dan kebijakan pengelolaan perkeretaapian*				100 %	100 %	99.735.000,00	99.183.150,00	99.183.150,00	-551.850,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	Aparatur Dishub dan Stakeholder		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian																		
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian				1 Dokumen	1 Dokumen	99.735.000,00	99.183.150,00	99.183.150,00	-551.850,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN TERMINAL							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kecepatan rata-rata**				**26,5 km/jam**	**26,5 km/jam**	**60.919.525.300,00**	**59.478.740.200,00**	**60.127.411.877,00**	**16.093.940.950,00**							**77.013.466.250,00**	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*jumlah orang yang melalui terminal setiap tahun*				5500000 orang	5500000 orang	5.150.000.000,00	4.603.222.800,00	4.719.122.800,00	-430.877.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)																		
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara				1 Unit	1 Unit	5.150.000.000,00	4.603.222.800,00	4.719.122.800,00	-430.877.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			5.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENERANGAN JALAN UMUM							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kecepatan rata-rata**				**26,5 km/jam**	**26,5 km/jam**	**60.919.525.300,00**	**59.478.740.200,00**	**60.127.411.877,00**	**16.093.940.950,00**							**77.013.466.250,00**	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*persentase ketersediaan perlengkapan jalan*				3,88 %	3,88 %	38.558.793.600,00	38.165.729.600,00	38.312.093.927,00	-246.699.673,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		47.417.131.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				700 Unit	703 Unit	31.095.104.000,00	31.339.704.000,00	31.278.312.327,00	183.208.327,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			39.417.131.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				5800 Unit	5800 Unit	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.599.415.000,00	499.415.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**87.192.414.800,00**	**85.781.952.989,00**	**84.640.067.737,00**	**-2.552.347.063,00**							**108.664.381.250,00**	
1.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Kecepatan rata-rata**				**26,5 km/jam**	**26,5 km/jam**	**60.919.525.300,00**	**59.478.740.200,00**	**60.127.411.877,00**	**16.093.940.950,00**							**77.013.466.250,00**	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum*				95 %	95 %	1.959.748.700,00	1.724.845.000,00	1.745.655.000,00	-214.093.700,00			-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik	aparatur Dishub dan Masyarakat Kota Depok		6.226.335.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				5 Unit	16 Unit	334.903.000,00	299.999.500,00	149.999.500,00	-184.903.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			4.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	25.810.000,00	-29.190.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			636.693.750,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				1 Unit	12 Unit	249.847.000,00	249.847.000,00	449.847.000,00	200.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			92.610.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	1.269.998.700,00	1.069.998.500,00	1.069.998.500,00	-200.000.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			1.447.031.250,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Optimalisasi Transportasi Publik			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**40.103.061.457,00**	**39.041.829.307,00**	**38.580.673.457,00**	**-1.522.388.000,00**							**77.780.003.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**40.103.061.457,00**	**39.041.829.307,00**	**38.580.673.457,00**	**-1.522.388.000,00**							**77.780.003.300,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**38.352.250.257,00**	**37.372.791.557,00**	**35.978.701.957,00**	**-2.373.548.300,00**							**74.012.003.300,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**12.775.781.677,00**	**13.152.692.377,00**	**12.938.934.377,00**	**8.101.593.623,00**							**20.877.375.300,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	83.906.400,00	83.906.100,00	83.906.100,00	-300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		140.340.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49.761.100,00	49.760.850,00	49.760.850,00	-250,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			77.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	34.145.300,00	34.145.250,00	34.145.250,00	-50,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.340.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	11.403.407.277,00	11.893.615.277,00	11.360.065.277,00	-43.342.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		18.540.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	57 Orang/bulan	11.383.909.877,00	11.874.117.877,00	11.340.567.877,00	-43.342.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.497.400,00	19.497.400,00	19.497.400,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.072.727.000,00	1.029.554.000,00	1.279.546.000,00	206.819.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		1.923.944.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.193.000,00	7.193.000,00	7.193.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.559.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	7 Paket	465.941.000,00	424.697.000,00	424.697.000,00	-41.244.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			888.140.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.478.000,00	16.478.000,00	16.478.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.890.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	143.807.000,00	143.807.000,00	143.807.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			265.980.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.638.000,00	34.778.000,00	34.778.000,00	-1.860.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			86.625.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	150 Laporan	402.670.000,00	402.601.000,00	652.593.000,00	249.923.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			651.750.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	215.741.000,00	145.617.000,00	215.417.000,00	-324.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok		273.091.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	141.000.000,00	112.600.000,00	182.400.000,00	41.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			179.591.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				36 Unit	46 Unit	74.741.000,00	33.017.000,00	33.017.000,00	-41.724.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			93.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase aksesibilitas informasi publik**				**100 %**	**100 %**	**5.257.810.500,00**	**4.732.014.200,00**	**4.604.982.600,00**	**13.667.689.500,00**							**18.925.500.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan informasi publik yang tersedia*				100 %	100 %	5.257.810.500,00	4.732.014.200,00	4.604.982.600,00	-652.827.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		18.925.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.046.399.700,00	842.718.900,00	687.458.900,00	-358.940.800,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	426.701.800,00	324.496.800,00	324.496.800,00	-102.205.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			451.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.438.649.950,00	1.318.840.000,00	1.318.840.000,00	-119.809.950,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.783.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.328.864.700,00	1.309.020.750,00	1.419.770.750,00	90.906.050,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.541.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis				1 Dokumen	1 Dokumen	878.039.950,00	805.814.400,00	760.870.800,00	-117.169.150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.955.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik																		
			Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				32 Orang	32 Orang	38.609.900,00	31.648.350,00	31.648.350,00	-6.961.550,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8 Unit	8 Unit	100.544.500,00	99.475.000,00	61.897.000,00	-38.647.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			650.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan layanan teknologi informatika**				**100 %**	**100 %**	**20.318.658.080,00**	**19.488.084.980,00**	**18.434.784.980,00**	**13.890.469.920,00**							**34.209.128.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase layanan tersedia*				100 %	100 %	17.331.575.030,00	17.145.422.830,00	16.364.322.830,00	-967.252.200,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		30.538.208.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	403.725.100,00	294.772.900,00	294.772.900,00	-108.952.200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			538.208.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	16.927.849.930,00	16.850.649.930,00	16.069.549.930,00	-858.300.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase perangkat daerah yang terlayani dalam bidang TIK*				100 %	100 %	2.987.083.050,00	2.342.662.150,00	2.070.462.150,00	-916.620.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah dan Masyarakat Kota Depok		3.670.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				2 Unit	2 Unit	1.105.086.000,00	1.027.886.000,00	1.027.886.000,00	-77.200.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			990.770.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				13 Perangkat Daerah	13 Perangkat Daerah	272.043.350,00	71.374.850,00	71.374.850,00	-200.668.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			369.050.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 Unit	3 Unit	428.073.550,00	244.121.250,00	244.121.250,00	-183.952.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			605.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																		
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	494.272.350,00	488.872.350,00	216.672.350,00	-277.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.306.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	157.635.950,00	157.635.950,00	157.635.950,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			217.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE				1 Dokumen	1 Dokumen	529.971.850,00	352.771.750,00	352.771.750,00	-177.200.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			181.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.177.177.350,00**	**1.096.044.250,00**	**1.078.978.000,00**	**-98.199.350,00**							**2.299.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase data sektoral yang tersedia**				**40 %**	**40 %**	**1.177.177.350,00**	**1.096.044.250,00**	**1.078.978.000,00**	**1.121.822.650,00**							**2.299.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data sektoral yang tersedia*				40 %	40 %	1.177.177.350,00	1.096.044.250,00	1.078.978.000,00	-98.199.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kota Depok		2.299.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Dokumen	5 Dokumen	952.357.950,00	950.407.950,00	950.150.000,00	-2.207.950,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.278.026.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi																		
			Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				38 Orang	38 Orang	47.650.750,00	35.366.950,00	34.951.500,00	-12.699.250,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			186.073.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral																		
			Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun				1 Dokumen	1 Dokumen	120.278.750,00	58.087.450,00	57.376.500,00	-62.902.250,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			532.400.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS				90 Orang	90 Orang	56.889.900,00	52.181.900,00	36.500.000,00	-20.389.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			302.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**573.633.850,00**	**572.993.500,00**	**1.522.993.500,00**	**949.359.650,00**							**1.469.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**				**80 %**	**80 %**	**573.633.850,00**	**572.993.500,00**	**1.522.993.500,00**	**895.366.150,00**							**1.469.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Aplikasi yang diamankan*				75 %	75 %	533.070.950,00	533.070.900,00	1.483.070.900,00	949.999.950,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kota Depok		1.106.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	82.991.850,00	82.991.850,00	182.991.850,00	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			242.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	450.079.100,00	450.079.050,00	1.300.079.050,00	849.999.950,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			864.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PD yang memiliki jaring komunikasi sandi*				18.42 %	18.42 %	40.562.900,00	39.922.600,00	39.922.600,00	-640.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pemerintah Kota Depok		363.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				38 Perangkat Daerah	38 Perangkat Daerah	40.562.900,00	39.922.600,00	39.922.600,00	-640.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			363.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO							**32.676.618.974,00**	**32.108.932.974,00**	**31.227.892.022,00**	**-1.448.726.952,00**							**32.104.570.224,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**32.676.618.974,00**	**32.108.932.974,00**	**31.227.892.022,00**	**-1.448.726.952,00**							**32.104.570.224,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**32.676.618.974,00**	**32.108.932.974,00**	**31.227.892.022,00**	**-1.448.726.952,00**							**32.104.570.224,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**10.145.556.874,00**	**10.074.952.724,00**	**9.197.903.072,00**	**-215.986.650,00**							**9.929.570.224,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	160.766.700,00	160.766.350,00	160.766.350,00	-350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		165.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	92.367.000,00	92.366.950,00	92.366.950,00	-50,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	68.399.700,00	68.399.400,00	68.399.400,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	7.933.686.024,00	7.933.686.024,00	6.670.723.372,00	-1.262.962.652,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		7.949.570.224,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	34 Orang/bulan	7.918.686.274,00	7.918.686.274,00	6.655.723.622,00	-1.262.962.652,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.929.570.224,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.999.750,00	14.999.750,00	14.999.750,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah*				100 %	100 %	26.999.750,00	26.999.750,00	26.999.750,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26.999.750,00	26.999.750,00	26.999.750,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase administrasi kepegawaian tepat waktu*				100 %	100 %	166.895.700,00	118.177.900,00	118.177.900,00	-48.717.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		30.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	35.896.000,00	35.896.000,00	35.896.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	22.999.900,00	22.999.900,00	22.999.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	107.999.800,00	59.282.000,00	59.282.000,00	-48.717.800,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentse penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.229.989.700,00	1.213.813.700,00	1.581.226.700,00	351.237.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		1.070.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.994.200,00	29.994.200,00	29.994.200,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	14 Paket	449.999.300,00	439.713.300,00	839.126.300,00	389.127.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			165.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.997.500,00	49.997.500,00	49.997.500,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	225.000.000,00	220.608.000,00	220.608.000,00	-4.392.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PAJAK DAERAH	-	- -			245.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	124.999.700,00	124.999.700,00	92.999.700,00	-32.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	349.999.000,00	348.501.000,00	348.501.000,00	-1.498.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			405.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	423.146.000,00	417.436.000,00	417.436.000,00	-5.710.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		460.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	146.274.000,00	142.724.000,00	142.724.000,00	-3.550.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	6 Laporan	276.872.000,00	274.712.000,00	274.712.000,00	-2.160.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah terpelihara*				100 %	100 %	204.073.000,00	204.073.000,00	222.573.000,00	18.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro		225.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	14 Unit	104.240.000,00	104.240.000,00	122.740.000,00	18.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			125.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	7 Unit	49.993.000,00	49.993.000,00	49.993.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49.840.000,00	49.840.000,00	49.840.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Presentase Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha dan Izin Operasional**				**83.33 %**	**83.33 %**	**49.999.800,00**	**49.999.700,00**	**49.999.700,00**	**200,00**							**50.000.000,00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelayanan IUSP (Ijin Usaha Simpan Pinjam)*				100 %	100 %	49.999.800,00	49.999.700,00	49.999.700,00	-100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Koperasi se-Kota Depok		50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	49.999.800,00	49.999.700,00	49.999.700,00	-100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Tingkat Kepatuhan Koperasi**				**65.45 %**	**65.45 %**	**345.344.800,00**	**290.344.800,00**	**290.344.750,00**	**154.655.200,00**							**500.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa*				100 %	100 %	345.344.800,00	290.344.800,00	290.344.750,00	-55.000.050,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Koperasi se-Kota Depok		500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi																		
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				165 Unit Usaha	165 Unit Usaha	249.941.500,00	249.941.500,00	249.941.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				110 Unit Usaha	165 Unit Usaha	95.403.300,00	40.403.300,00	40.403.250,00	-55.000.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase Tingkat Kesehatan Koperasi**				**28.79 %**	**28.79 %**	**243.099.700,00**	**183.099.500,00**	**183.099.500,00**	**31.900.300,00**							**275.000.000,00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan*				100 %	110 Unit Usaha	243.099.700,00	183.099.500,00	183.099.500,00	-60.000.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Koperasi se-Kota Depok		275.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	200.000.000,00	139.999.950,00	139.999.950,00	-60.000.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			225.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	43.099.700,00	43.099.550,00	43.099.550,00	-150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			50.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Presentase peserta pelatihan**				**100 %**	**100 %**	**1.049.999.950,00**	**549.999.350,00**	**488.249.100,00**	**-549.999.950,00**							**500.000.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi*				66.06 %	66.06 %	1.049.999.950,00	549.999.350,00	488.249.100,00	-561.750.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Koperasi se-Kota Depok		500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				1100 Orang	780 Orang	1.049.999.950,00	549.999.350,00	488.249.100,00	-561.750.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi modern**				**9.09 %**	**9.09 %**	**2.865.338.850,00**	**1.480.338.400,00**	**1.608.460.400,00**	**-1.315.338.850,00**							**1.550.000.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan*				100 %	100 %	2.865.338.850,00	1.480.338.400,00	1.608.460.400,00	-1.256.878.450,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Koperasi se-Kota Depok		1.550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				165 Unit Usaha	165 Unit Usaha	2.865.338.850,00	1.480.338.400,00	1.608.460.400,00	-1.256.878.450,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			1.550.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase wirausaha baru**				**100 %**	**100 %**	**11.070.652.950,00**	**10.870.652.950,00**	**10.252.714.600,00**	**-270.652.950,00**							**10.800.000.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Persentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan*				100 %	100 %	11.070.652.950,00	10.870.652.950,00	10.252.714.600,00	-817.938.350,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Usaha Mikro se-Kota Depok		10.800.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				225 Unit Usaha	225 Unit Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	185.650.000,00	-14.350.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 Unit Usaha	450 Unit Usaha	1.500.000.000,00	1.841.267.600,00	1.593.058.600,00	93.058.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1800 Unit Usaha	1800 Unit Usaha	8.470.652.950,00	8.029.385.350,00	7.719.006.000,00	-751.646.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			9.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																		
			Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				275 Orang	900 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	326.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				320 Unit Usaha	320 Unit Usaha	550.000.000,00	450.000.000,00	429.000.000,00	-121.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			450.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet**				**15.26 %**	**15.26 %**	**6.906.626.050,00**	**8.609.545.550,00**	**9.157.120.900,00**	**1.593.373.950,00**							**8.500.000.000,00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Persentase UMKM yang terbina*				20 %	20 %	6.906.626.050,00	8.609.545.550,00	9.157.120.900,00	2.250.494.850,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Usaha Mikro se-Kota Depok		8.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi																		
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				1000 Unit Usaha	2400 Unit Usaha	6.906.626.050,00	8.609.545.550,00	9.157.120.900,00	2.250.494.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			8.500.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							**18.937.303.897,00**	**19.021.056.235,00**	**17.648.283.135,00**	**-1.289.020.762,00**							**22.865.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**18.937.303.897,00**	**19.021.056.235,00**	**17.648.283.135,00**	**-1.289.020.762,00**							**22.865.000.000,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**18.937.303.897,00**	**19.021.056.235,00**	**17.648.283.135,00**	**-1.289.020.762,00**							**22.865.000.000,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**16.226.219.897,00**	**16.399.780.185,00**	**14.563.094.685,00**	**3.258.780.103,00**							**19.485.000.000,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	89.899.000,00	81.654.000,00	81.654.000,00	-8.245.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		125.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	64.904.000,00	56.659.000,00	56.659.000,00	-8.245.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	24.995.000,00	24.995.000,00	24.995.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangann tepat waktu*				100 %	100 %	14.817.653.997,00	15.149.358.285,00	13.157.358.285,00	-1.660.295.712,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		18.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				68 Orang/bulan	68 Orang/bulan	14.817.653.997,00	15.149.358.285,00	13.157.358.285,00	-1.660.295.712,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			18.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian*				100 0	100 0	128.919.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-98.919.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	98.919.000,00	0,00	0,00	-98.919.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	1.055.307.900,00	1.026.467.900,00	1.191.592.400,00	136.284.500,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		1.120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	7 Paket	14.683.000,00	14.683.000,00	14.683.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				73 Paket	15 Paket	341.165.000,00	319.223.000,00	450.165.000,00	109.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			320.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	16 Paket	24.965.400,00	24.965.400,00	44.425.900,00	19.460.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	124.861.000,00	121.605.000,00	121.605.000,00	-3.256.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	199.819.500,00	196.342.500,00	211.064.500,00	11.245.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				394 Laporan	394 Laporan	349.814.000,00	349.649.000,00	349.649.000,00	-165.000,00	-	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	134.440.000,00	112.300.000,00	102.490.000,00	-31.950.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	84.440.000,00	82.040.000,00	82.040.000,00	-2.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			110.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	30.260.000,00	20.450.000,00	-29.550.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase dokumen pengembangan iklim penanaman modal yang terimplementasikan**				**100 %**	**100 %**	**304.610.000,00**	**253.890.000,00**	**253.890.000,00**	**95.390.000,00**							**400.000.000,00**	
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Persentase ketersediaan dokumen pengembangan iklim penanaman modal*				100 %	100 %	304.610.000,00	253.890.000,00	253.890.000,00	-50.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	masyarakat dan stakeholder		400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	304.610.000,00	253.890.000,00	253.890.000,00	-50.720.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah investor PMDN**				**15 Investor**	**15 Investor**	**294.345.000,00**	**291.614.500,00**	**341.563.400,00**	**5.655.000,00**							**300.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah event*				3 Event	3 Event	294.345.000,00	291.614.500,00	341.563.400,00	47.218.400,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	masyarakat dan stakeholder		300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	294.345.000,00	291.614.500,00	341.563.400,00	47.218.400,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase jumlah pelayanan yang terintegrasi**				**100 %**	**100 %**	**468.150.000,00**	**431.950.000,00**	**427.950.000,00**	**181.850.000,00**							**650.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dalam tahun berkenaan*				100 %	100 %	468.150.000,00	431.950.000,00	427.950.000,00	-40.200.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	masyarakat dan stakeholder		650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				12 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	246.400.000,00	210.200.000,00	206.200.000,00	-40.200.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				1000 Kegiatan Usaha	1000 Kegiatan Usaha	121.750.000,00	121.750.000,00	121.750.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) terhadap perusahaan**				**100 %**	**100 %**	**49.899.000,00**	**49.741.550,00**	**467.705.050,00**	**80.101.000,00**							**130.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengendalian penanaman modal*				100 %	100 %	49.899.000,00	49.741.550,00	467.705.050,00	417.806.050,00			-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	masyarakat dan stakeholder		130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				-	35 Kegiatan Usaha.	0,00	0,00	62.693.950,00	62.693.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				45 Pelaku Usaha	410 Pelaku Usaha	29.899.000,00	29.741.550,00	259.622.250,00	229.723.250,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				12 Kegiatan Usaha	72 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	20.000.000,00	145.388.850,00	125.388.850,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**persentase sistem pelayanan data dan sistem**				**100 %**	**100 %**	**1.594.080.000,00**	**1.594.080.000,00**	**1.594.080.000,00**	**305.920.000,00**							**1.900.000.000,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen*				2 Dokumen	2 Dokumen	1.594.080.000,00	1.594.080.000,00	1.594.080.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	masyarakat dan stakeholder		1.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				14000 Dokumen	14000 Dokumen	1.594.080.000,00	1.594.080.000,00	1.594.080.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			1.900.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							**30.729.014.187,00**	**30.783.030.682,00**	**29.885.055.878,00**	**-843.958.309,00**							**15.288.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**29.413.016.087,00**	**29.558.637.432,00**	**28.622.702.628,00**	**-790.313.459,00**							**13.935.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**26.825.903.687,00**	**27.039.207.782,00**	**26.433.281.728,00**	**-392.621.959,00**							**12.391.000.000,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**8.212.728.487,00**	**8.370.446.632,00**	**7.845.064.632,00**	**300.271.513,00**							**8.513.000.000,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	73.940.850,00	73.940.850,00	73.940.850,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kota Depok		95.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	28.788.600,00	28.788.600,00	28.788.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			47.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	45.152.250,00	45.152.250,00	45.152.250,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			48.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase adm keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	7.157.157.937,00	7.365.860.082,00	6.623.860.082,00	-533.297.855,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		7.507.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	7.151.972.637,00	7.360.674.882,00	6.618.674.882,00	-533.297.755,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	14 Laporan	5.185.300,00	5.185.200,00	5.185.200,00	-100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			7.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentse penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	602.629.700,00	551.645.700,00	711.263.700,00	108.634.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		524.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.746.500,00	9.746.500,00	9.746.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2 Paket	165.000.000,00	114.071.000,00	188.693.000,00	23.693.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			178.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29.611.900,00	29.611.900,00	29.611.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	121.352.000,00	121.352.000,00	156.352.000,00	35.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			124.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.527.900,00	26.527.900,00	26.527.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			29.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				461 Laporan	353 Laporan	250.391.400,00	250.336.400,00	300.332.400,00	49.941.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		305.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			305.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam pelayanan*				100 %	100 %	79.000.000,00	79.000.000,00	86.000.000,00	7.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Pemerintah Kota Depok		82.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	12 Unit	64.000.000,00	64.000.000,00	71.000.000,00	7.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			66.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase pemuda yang menerima peningkatan daya saing**				**0,23 %**	**0,23 %**	**830.173.750,00**	**807.330.750,00**	**891.047.096,00**	**22.826.250,00**							**853.000.000,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase pemuda dan organisasi kepemudaan*				100 %	100 %	749.695.750,00	726.852.750,00	810.570.096,00	60.874.346,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		770.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				40 Orang	40 Orang	94.327.000,00	94.327.000,00	100.327.000,00	6.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			98.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	234.178.000,00	234.170.000,00	234.170.000,00	-8.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			240.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				70 Orang	70 Orang	169.526.500,00	169.375.500,00	169.375.500,00	-151.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			174.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan																		
			Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan				210 Orang	210 Orang	194.831.600,00	194.831.600,00	194.831.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			198.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				0 Orang	350 Orang	56.832.650,00	34.148.650,00	111.865.996,00	55.033.346,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			60.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*persentase pemuda dan organisasi kepemudaan*				100 %	100 %	80.478.000,00	80.478.000,00	80.477.000,00	-1.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		83.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	80.478.000,00	80.478.000,00	80.477.000,00	-1.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			83.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah atlit berprestasi**				**5 orang**	**5 orang**	**16.083.001.450,00**	**16.161.430.400,00**	**15.997.170.000,00**	**-13.084.001.450,00**							**2.999.000.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat*				28 Kelompok masyarakat	28 Kelompok masyarakat	710.000.000,00	710.000.000,00	370.000.000,00	-340.000.000,00			-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				43 Unit	25 Unit	710.000.000,00	710.000.000,00	370.000.000,00	-340.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cabang Olahraga*				9 cabor	9 cabor	1.704.909.600,00	1.748.534.600,00	1.798.534.200,00	93.624.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		1.871.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	374.972.200,00	418.597.200,00	418.597.200,00	43.625.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	323.199.000,00	323.199.000,00	259.057.500,00	-64.141.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			545.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																		
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				172 Orang	172 Orang	1.006.738.400,00	1.006.738.400,00	1.120.879.500,00	114.141.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			1.300.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase atlet berprestasi*				100 %	100 %	285.640.150,00	523.720.100,00	523.720.100,00	238.079.950,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		298.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				50 Orang	120 Orang	285.640.150,00	523.720.100,00	523.720.100,00	238.079.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			298.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Jumlah lembaga*				3 Lembaga	3 Lembaga	12.465.092.300,00	12.465.092.300,00	12.465.092.300,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	12.465.092.300,00	12.465.092.300,00	12.465.092.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi*				4 Lokasi; jenis	4 Lokasi; jenis	917.359.400,00	714.083.400,00	839.823.400,00	-77.536.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		778.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				4 Unit	4 Unit	775.189.900,00	696.913.900,00	747.653.900,00	-27.536.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			778.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Dokumen	2 Dokumen	142.169.500,00	17.169.500,00	92.169.500,00	-50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase kepramukaan yang ditingkatkan kapasitasnya**				**63 %**	**63 %**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**-1.674.000.000,00**							**26.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Persentase anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya*				63 %	63 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1000 Orang	1000 Orang	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2.587.112.400,00**	**2.519.429.650,00**	**2.189.420.900,00**	**-397.691.500,00**							**1.544.000.000,00**	
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Jumlah penyelenggaraan event kreatif budaya**				**57 event**	**57 event**	**2.396.880.900,00**	**2.344.198.200,00**	**2.014.189.450,00**	**-1.051.880.900,00**							**1.345.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah seni dan budaya*				2 Jenis	2 Jenis	1.600.507.700,00	1.567.425.650,00	1.389.225.650,00	-211.282.050,00			-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		466.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				152 Objek	98 Objek	1.165.000.000,00	1.165.000.000,00	965.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			26.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	435.507.700,00	402.425.650,00	424.225.650,00	-11.282.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			440.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis kesenian tradional*				2 Jenis	2 Jenis	796.373.200,00	776.772.550,00	624.963.800,00	-171.409.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		879.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				7 Objek	6 Objek	656.225.700,00	656.225.550,00	556.225.550,00	-100.000.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			734.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	1 Laporan	71.338.750,00	68.738.250,00	68.738.250,00	-2.600.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			74.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan				18 Sertifikat	0 Sertifikat	68.808.750,00	51.808.750,00	0,00	-68.808.750,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			71.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi**				**4 buah**	**4 buah**	**22.951.800,00**	**22.951.800,00**	**22.951.800,00**	**2.048.200,00**							**25.000.000,00**	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jenis kesenian yang dibina*				2 Jenis	2 Jenis	22.951.800,00	22.951.800,00	22.951.800,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				100 Orang	50 Orang	22.951.800,00	22.951.800,00	22.951.800,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			25.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase kegiatan pembinaan sejarah**				**100 %**	**100 %**	**59.810.000,00**	**59.809.950,00**	**59.809.950,00**	**2.190.000,00**							**62.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan pembinaan*				100 %	100 %	59.810.000,00	59.809.950,00	59.809.950,00	-50,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		62.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2 Dokumen	2 Dokumen	59.810.000,00	59.809.950,00	59.809.950,00	-50,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			62.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu**				**3 unit**	**3 unit**	**107.469.700,00**	**92.469.700,00**	**92.469.700,00**	**4.530.300,00**							**112.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Situs yang dilindungi*				3 unit	3 unit	67.469.700,00	67.469.700,00	67.469.700,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Kota Depok		70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				3 Objek	2 Objek	67.469.700,00	67.469.700,00	67.469.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara / direhabilitasi dan dilestarikan*				3 situs	3 situs	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat Kota Depok		42.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				3 Objek	1 Objek	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			42.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**1.315.998.100,00**	**1.224.393.250,00**	**1.262.353.250,00**	**-53.644.850,00**							**1.353.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**1.315.998.100,00**	**1.224.393.250,00**	**1.262.353.250,00**	**-53.644.850,00**							**1.353.000.000,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase objek wisata yang dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**412.533.300,00**	**361.241.050,00**	**324.201.050,00**	**10.466.700,00**							**423.000.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah objek wisata*				2 objek	2 objek	84.999.850,00	84.999.850,00	84.999.850,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		88.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	84.999.850,00	84.999.850,00	84.999.850,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			88.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah destinasi pariwisata*				2 objek	2 objek	327.533.450,00	276.241.200,00	239.201.200,00	-88.332.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		335.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	1 Lokasi	254.892.000,00	203.600.000,00	166.560.000,00	-88.332.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			258.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	21.641.700,00	21.641.700,00	21.641.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			24.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	50.999.750,00	50.999.500,00	50.999.500,00	-250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			53.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Jumlah kunjungan wisata**				**1.300.000 orang**	**1.300.000 orang**	**796.894.900,00**	**773.267.650,00**	**773.267.650,00**	**18.105.100,00**							**815.000.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah promosi wisata*				3 kali	3 kali	796.894.900,00	773.267.650,00	773.267.650,00	-23.627.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		815.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Kegiatan	8 Kegiatan	796.894.900,00	773.267.650,00	773.267.650,00	-23.627.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			815.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Kunjungan Wisata**				**80 %**	**80 %**	**106.569.900,00**	**89.884.550,00**	**164.884.550,00**	**8.430.100,00**							**115.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah pelaksanaan peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif*				2 kali	2 kali	106.569.900,00	89.884.550,00	164.884.550,00	58.314.650,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat Kota Depok		115.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata																		
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				35 Orang	35 Orang	106.569.900,00	89.884.550,00	164.884.550,00	58.314.650,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			115.000.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							**14.283.932.704,00**	**16.366.466.816,00**	**16.040.435.546,00**	**1.756.502.842,00**							**16.756.319.040,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**14.283.932.704,00**	**16.366.466.816,00**	**16.040.435.546,00**	**1.756.502.842,00**							**16.756.319.040,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**1.775.554.950,00**	**1.696.554.400,00**	**1.877.786.400,00**	**102.231.450,00**							**2.419.026.355,00**	
1.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**				**60,53 Poin**	**60,53 Poin**	**1.775.554.950,00**	**1.696.554.400,00**	**1.877.786.400,00**	**643.471.405,00**							**2.419.026.355,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	1.130.799.200,00	1.051.799.200,00	1.151.121.200,00	20.322.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat		1.405.111.530,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik																		
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	1 Layanan	29.108.000,00	29.108.000,00	180.000,00	-28.928.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			32.018.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	14.147.900,00	14.147.900,00	14.147.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			15.642.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																		
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	24.687.700,00	24.687.700,00	11.687.700,00	-13.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			27.156.580,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																		
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				3800 Eksemplar	3800 Eksemplar	364.350.600,00	285.350.600,00	285.350.600,00	-79.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			400.787.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	698.505.000,00	698.505.000,00	839.755.000,00	141.250.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			929.506.950,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Gemar Membaca Tingkat Daereah*				100 Persen	100 Persen	644.755.750,00	644.755.200,00	726.665.200,00	81.909.450,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Masyarakat		1.013.914.825,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																		
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				450 Lokus	450 Lokus	512.999.750,00	512.999.550,00	632.631.550,00	119.631.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			682.803.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				6 Orang	6 Orang	46.001.750,00	46.001.500,00	23.929.500,00	-22.072.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			257.681.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																		
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				5 Perpustakaan	2 Perpustakaan	60.499.800,00	60.499.800,00	44.849.800,00	-15.650.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			45.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				22 Orang	22 Orang	25.254.450,00	25.254.350,00	25.254.350,00	-100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			27.780.225,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**12.508.377.754,00**	**14.669.912.416,00**	**14.162.649.146,00**	**1.654.271.392,00**							**14.337.292.685,00**	
1.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**100 Persen**	**100 Persen**	**10.407.556.504,00**	**12.639.278.266,00**	**11.752.541.516,00**	**1.490.330.614,00**							**11.897.887.118,00**	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	192.879.000,00	152.794.000,00	61.896.250,00	-130.982.750,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Diskarpus		213.030.070,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	2 Dokumen	155.663.000,00	115.578.000,00	49.265.000,00	-106.398.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			171.230.125,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	37.216.000,00	37.216.000,00	12.631.250,00	-24.584.750,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			41.799.945,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 Persen	100 Persen	8.703.896.454,00	9.093.229.266,00	9.085.621.266,00	381.724.812,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Diskarpus		10.018.108.173,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	8.679.493.454,00	9.082.371.266,00	9.082.371.266,00	402.877.812,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			9.990.608.393,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	24.403.000,00	10.858.000,00	3.250.000,00	-21.153.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.499.780,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	53.712.850,00	53.712.200,00	38.062.800,00	-15.650.050,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Diskarpus		59.084.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.999.700,00	24.999.400,00	9.350.000,00	-15.649.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.499.780,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	28.713.150,00	28.712.800,00	28.712.800,00	-350,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			31.584.740,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Pengurusan Administrasi Kepegawaian*				100 Persen	100 Persen	126.490.800,00	126.490.600,00	114.635.000,00	-11.855.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Diskarpus		139.140.760,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	20.049.000,00	20.049.000,00	8.475.000,00	-11.574.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.054.780,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	60 Orang	106.441.800,00	106.441.600,00	106.160.000,00	-281.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			117.085.980,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 Persen	100 Persen	953.715.400,00	2.836.190.200,00	2.092.064.200,00	1.138.348.800,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Diskarpus		1.050.185.895,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	54.981.000,00	54.981.000,00	54.981.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.498.240,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 ; 4 Paket	1 ; 4 Paket	220.577.400,00	2.150.396.400,00	1.450.070.400,00	1.229.493.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			242.701.800,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	94.469.000,00	94.469.000,00	72.679.000,00	-21.790.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			104.500.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	146.240.000,00	128.740.000,00	128.740.000,00	-17.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			160.864.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	123.118.000,00	103.137.800,00	81.127.800,00	-41.990.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			135.858.855,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	350 Laporan	314.330.000,00	304.466.000,00	304.466.000,00	-9.864.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			345.763.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Yang Terpelihara*				100 Persen	100 Persen	376.862.000,00	376.862.000,00	360.262.000,00	-16.600.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Pegawai Diskarpus		418.337.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																		
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	144.820.000,00	144.820.000,00	128.220.000,00	-16.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			159.302.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	99.982.000,00	99.982.000,00	99.982.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			109.985.700,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	132.060.000,00	132.060.000,00	132.060.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			149.050.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku**				**63,15 Persen**	**63,15 Persen**	**1.980.090.650,00**	**1.948.589.800,00**	**2.328.888.280,00**	**319.321.382,00**							**2.299.412.032,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Arsip Aktif Yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip*				100 Persen	100 Persen	1.530.462.750,00	1.498.962.250,00	1.818.357.250,00	287.894.500,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.683.509.080,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				8 Berkas	82 Berkas	1.475.490.000,00	1.443.990.000,00	1.763.385.000,00	287.895.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.623.039.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis																		
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				4 Berkas	6 Berkas	24.973.000,00	24.972.700,00	24.972.700,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.470.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				38 Laporan	38 Laporan	29.999.750,00	29.999.550,00	29.999.550,00	-200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			32.999.780,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Arsip Statis*				100 Persen	100 Persen	237.359.000,00	237.358.850,00	282.358.850,00	44.999.850,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		376.611.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	55 Arsip	237.359.000,00	237.358.850,00	282.358.850,00	44.999.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			376.611.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Cakupan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipam Nasional*				100 Persen	100 Persen	212.268.900,00	212.268.700,00	228.172.180,00	15.903.280,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		239.291.852,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																		
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				140 Pengguna	140 Pengguna	179.129.250,00	179.129.250,00	207.832.730,00	28.703.480,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			202.838.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				46 Laporan	46 Laporan	33.139.650,00	33.139.450,00	20.339.450,00	-12.800.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			36.453.752,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara**				**60 Persen**	**60 Persen**	**120.730.600,00**	**82.044.350,00**	**81.219.350,00**	**19.262.935,00**							**139.993.535,00**	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Cakupan Arsip Yang Dimusnahkan Dibawah 10 Tahun*				100 Persen	100 Persen	40.231.000,00	40.230.750,00	40.230.750,00	-250,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		51.217.100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				7 Arsip	12 Arsip	25.889.000,00	25.888.750,00	25.888.750,00	-250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.440.900,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																		
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				7 Berkas	10 Berkas	14.342.000,00	14.342.000,00	14.342.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.776.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	*Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Akibat Bencana*				100 Persen	100 Persen	48.699.600,00	21.813.900,00	21.813.900,00	-26.885.700,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		53.569.835,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																		
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				20 Arsip	20 Arsip	48.699.600,00	21.813.900,00	21.813.900,00	-26.885.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			53.569.835,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Cakupan Arsip Yang Diselamatkan Yang Digabung dan/ atau Dibubarkan*				100 Persen	100 Persen	31.800.000,00	19.999.700,00	19.174.700,00	-12.625.300,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		35.206.600,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Daftar	3 Daftar	15.900.000,00	9.999.700,00	9.999.700,00	-5.900.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.603.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				2 Arsip	3 Arsip	15.900.000,00	10.000.000,00	9.175.000,00	-6.725.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.603.300,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**17.116.929.372,00**	**17.061.084.922,00**	**16.673.330.186,00**	**-466.748.820,00**							**16.650.180.552,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	131.513.400,00	117.623.150,00	111.473.150,00	-20.040.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian		90.533.336,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45.573.200,00	45.573.200,00	39.423.200,00	-6.150.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			73.909.378,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	85.940.200,00	72.049.950,00	72.049.950,00	-13.890.250,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.623.958,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	15.662.419.372,00	15.762.419.172,00	15.287.650.436,00	-374.768.936,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian		15.143.999.136,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				82 Orang/bulan	82 Orang/bulan	15.628.277.372,00	15.728.277.372,00	15.253.508.636,00	-374.768.736,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.120.499.136,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	34.142.000,00	34.141.800,00	34.141.800,00	-200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	880.028.600,00	879.988.600,00	944.788.600,00	64.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian		976.937.145,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	15.983.000,00	15.983.000,00	50.933.000,00	34.950.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.518.527,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			140.327.303,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.754.059,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	135.040.000,00	135.040.000,00	135.040.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			185.215.370,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	50.901.900,00	50.901.900,00	50.901.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			97.240.153,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				310 Laporan	370 Laporan	339.875.000,00	339.835.000,00	369.685.000,00	29.810.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			339.903.033,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	193.228.700,00	193.228.700,00	193.228.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			167.978.700,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Perkantoran*				100 %	100 %	232.816.000,00	90.902.000,00	90.902.000,00	-141.914.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian		221.730.335,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				28 Unit	9 Unit	232.816.000,00	90.902.000,00	90.902.000,00	-141.914.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			221.730.335,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara*				100 %	100 %	210.152.000,00	210.152.000,00	238.516.000,00	28.364.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Dinas Perdagangan dan Perindustrian		216.980.600,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	155.200.000,00	155.200.000,00	155.200.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			159.462.844,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	54.952.000,00	54.952.000,00	83.316.000,00	28.364.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			57.517.756,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang Ber SNI**				**100 %**	**100 %**	**11.736.856.700,00**	**11.314.083.150,00**	**11.061.291.150,00**	**-67.391.699,00**							**11.669.465.001,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang Dikelola*				100 %	100 %	11.300.645.900,00	10.877.872.600,00	10.625.080.600,00	-675.565.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		11.148.640.298,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	1.629.164.400,00	1.413.829.100,00	1.553.829.100,00	-75.335.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			1.378.125.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				5 Unit	5 Unit	8.149.445.200,00	7.942.007.200,00	7.593.815.200,00	-555.630.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			8.149.445.450,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang Dibina*				100 %	100 %	436.210.800,00	436.210.550,00	436.210.550,00	-250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		520.824.703,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	329.190.800,00	329.190.550,00	329.190.550,00	-250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			355.804.313,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	107.020.000,00	107.020.000,00	107.020.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			165.020.390,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Ketersediaan Informasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**				**100 %**	**100 %**	**705.208.150,00**	**643.780.150,00**	**667.779.150,00**	**184.400.323,00**							**889.608.473,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Prosentase Ketersediaan Informasi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*				100 %	100 %	175.641.000,00	175.641.000,00	175.641.000,00	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		240.126.825,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	48.944.700,00	48.944.700,00	48.944.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			86.821.875,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	52.499.700,00	52.499.700,00	52.499.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			55.125.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	74.196.600,00	74.196.600,00	74.196.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			98.179.950,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Persentase Ketersediaan Informasi Harga dan Stok Barang Penting yang Terpublikasi*				100 %	100 %	529.567.150,00	468.139.150,00	492.138.150,00	-37.429.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat		649.481.648,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	65.461.850,00	65.461.850,00	65.461.850,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			82.687.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	65.301.650,00	65.301.650,00	65.301.650,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			110.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				27 Laporan	25 Laporan	398.803.650,00	337.375.650,00	361.374.650,00	-37.429.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			456.544.148,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase IKM yang Siap Ekspor**				**19.23 %**	**19.23 %**	**1.268.838.650,00**	**1.068.838.400,00**	**1.169.724.400,00**	**-587.925.143,00**							**680.913.507,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase jenis promosi dagang yang dilakukan*				100 %	100 %	1.268.838.650,00	1.068.838.400,00	1.169.724.400,00	-99.114.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pelaku Usaha Industri		680.913.507,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				6 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	319.334.850,00	319.334.850,00	505.220.850,00	185.886.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			137.812.500,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	221.270.000,00	221.270.000,00	221.270.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			243.101.007,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				6 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	399.993.000,00	199.993.000,00	114.993.000,00	-285.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				26 Produk	56 Produk	328.240.800,00	328.240.550,00	328.240.550,00	-250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
5.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase IKM Kecil yang mengikuti pameran**				**60 %**	**60 %**	**684.553.100,00**	**684.547.100,00**	**609.650.100,00**	**30.878.790,00**							**715.431.890,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Persentase IKM Kecil yang mengikuti pameran*				100 %	100 %	684.553.100,00	684.547.100,00	609.650.100,00	-74.903.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Industri Kecil Menengah (IKM)		715.431.890,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				6 UMKM	6 UMKM	210.547.000,00	210.541.000,00	210.541.000,00	-6.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			520.931.250,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				50 UMKM	50 UMKM	474.006.100,00	474.006.100,00	399.109.100,00	-74.897.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			194.500.640,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.538.370.550,00**	**1.388.023.650,00**	**1.388.023.200,00**	**-150.347.350,00**							**2.021.658.125,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Industri Kecil yang Terbina**				**100 %**	**100 %**	**1.389.001.500,00**	**1.268.654.650,00**	**1.268.654.200,00**	**432.053.500,00**							**1.821.055.000,00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Persentase Cakupan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*				100 %	100 %	1.389.001.500,00	1.268.654.650,00	1.268.654.200,00	-120.347.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Industri Kecil Menengah (IKM)		1.821.055.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	697.999.000,00	600.427.250,00	600.427.050,00	-97.571.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			829.080.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	590.047.500,00	586.047.400,00	586.047.400,00	-4.000.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			870.975.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.955.000,00	82.180.000,00	82.179.750,00	-18.775.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			121.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Pengelolaan Informasi Industri**				**100 %**	**100 %**	**149.369.050,00**	**119.369.000,00**	**119.369.000,00**	**51.234.075,00**							**200.603.125,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase laporan evaluasi rencana pembangunan industri*				100 %	100 %	149.369.050,00	119.369.000,00	119.369.000,00	-30.000.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Perusahaan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM)		200.603.125,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	16.659.700,00	16.659.700,00	16.659.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			45.478.125,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	80.209.650,00	50.209.650,00	50.209.650,00	-30.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	52.499.700,00	52.499.650,00	52.499.650,00	-50,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			55.125.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Pelayanan Kemetrologian**				**100 %**	**100 %**	**657.155.200,00**	**605.145.200,00**	**963.144.500,00**	**246.504.529,00**							**903.659.729,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan Tera/Tera Ulang*				50 %	50 %	657.155.200,00	605.145.200,00	963.144.500,00	305.989.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Masyarakat dan Pelaku Usaha		903.659.729,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1500 Unit	5870 Unit	590.505.200,00	538.495.200,00	896.495.000,00	305.989.800,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			791.778.456,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				242 Orang	482 Orang	66.650.000,00	66.650.000,00	66.649.500,00	-500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			111.881.273,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR CISALAK							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang Ber SNI**				**100 %**	**100 %**	**11.736.856.700,00**	**11.314.083.150,00**	**11.061.291.150,00**	**-67.391.699,00**							**11.669.465.001,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang Dikelola*				100 %	100 %	11.300.645.900,00	10.877.872.600,00	10.625.080.600,00	-675.565.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		11.148.640.298,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	842.128.150,00	842.128.150,00	774.528.150,00	-67.600.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			872.000.800,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR TUGU							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang Ber SNI**				**100 %**	**100 %**	**11.736.856.700,00**	**11.314.083.150,00**	**11.061.291.150,00**	**-67.391.699,00**							**11.669.465.001,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang Dikelola*				100 %	100 %	11.300.645.900,00	10.877.872.600,00	10.625.080.600,00	-675.565.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		11.148.640.298,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	98.769.800,00	98.769.800,00	98.769.800,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			188.999.764,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR AGUNG							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang Ber SNI**				**100 %**	**100 %**	**11.736.856.700,00**	**11.314.083.150,00**	**11.061.291.150,00**	**-67.391.699,00**							**11.669.465.001,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang Dikelola*				100 %	100 %	11.300.645.900,00	10.877.872.600,00	10.625.080.600,00	-675.565.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		11.148.640.298,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	195.947.000,00	195.947.000,00	215.947.000,00	20.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			143.324.780,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR SUKATANI							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang Ber SNI**				**100 %**	**100 %**	**11.736.856.700,00**	**11.314.083.150,00**	**11.061.291.150,00**	**-67.391.699,00**							**11.669.465.001,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang Dikelola*				100 %	100 %	11.300.645.900,00	10.877.872.600,00	10.625.080.600,00	-675.565.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		11.148.640.298,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	129.698.450,00	129.698.450,00	132.698.450,00	3.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			143.324.780,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KEMIRI MUKA							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**33.707.911.722,00**	**32.765.502.572,00**	**32.532.942.686,00**	**-1.174.969.036,00**							**33.530.917.277,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**32.169.541.172,00**	**31.377.478.922,00**	**31.144.919.486,00**	**-1.024.621.686,00**							**31.509.259.152,00**	
1.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar yang Ber SNI**				**100 %**	**100 %**	**11.736.856.700,00**	**11.314.083.150,00**	**11.061.291.150,00**	**-67.391.699,00**							**11.669.465.001,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Jumlah Pasar yang Dikelola*				100 %	100 %	11.300.645.900,00	10.877.872.600,00	10.625.080.600,00	-675.565.300,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi	Pedagang, petugas pasar dan masyarakat		11.148.640.298,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	255.492.900,00	255.492.900,00	255.492.900,00	0,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi Daya Saing dan Ketimpangan Ekonomi			273.419.724,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH							**126.440.118.158,00**	**127.205.385.180,00**	**145.443.574.920,00**	**19.003.456.762,00**							**121.604.598.632,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**126.440.118.158,00**	**127.205.385.180,00**	**145.443.574.920,00**	**19.003.456.762,00**							**121.604.598.632,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**							**126.440.118.158,00**	**127.205.385.180,00**	**145.443.574.920,00**	**19.003.456.762,00**							**121.604.598.632,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**92.997.798.958,00**	**94.249.672.280,00**	**110.030.403.320,00**	**4.782.446.374,00**							**97.780.245.332,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Tepat Waktu*				100 %	100 %	164.146.800,00	149.488.750,00	127.275.700,00	-36.871.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		78.241.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	100.335.550,00	94.497.000,00	66.938.400,00	-33.397.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			57.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	63.811.250,00	54.991.750,00	60.337.300,00	-3.473.950,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.491.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	39.268.755.511,00	40.468.217.302,00	39.606.002.072,00	337.246.561,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		43.073.917.547,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				196 Orang/ bulan	196 Orang/ bulan	39.148.761.261,00	40.361.978.852,00	39.578.456.622,00	429.695.361,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			43.063.637.387,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	119.994.250,00	106.238.450,00	27.545.450,00	-92.448.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.280.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentse penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	10.718.987.750,00	10.394.886.975,00	16.233.962.975,00	5.514.975.225,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		8.062.963.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	9 Paket	332.500.000,00	296.500.000,00	396.500.000,00	64.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			365.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	28 Paket	5.478.271.000,00	5.283.045.000,00	6.682.994.000,00	1.204.723.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.847.649.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	332.463.000,00	327.711.000,00	731.126.000,00	398.663.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			365.701.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	70 Paket	2.177.673.000,00	2.089.558.000,00	4.236.785.000,00	2.059.112.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.845.440.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	10 Paket	692.321.750,00	692.321.750,00	1.992.314.750,00	1.299.993.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			761.554.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	204.528.000,00	204.528.000,00	393.020.000,00	188.492.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			225.511.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				450 Laporan	450 Laporan	1.501.231.000,00	1.501.223.225,00	1.801.223.225,00	299.992.225,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.651.357.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah dalam Pelayanan*				-	100 %	0,00	0,00	3.026.845.000,00	3.026.845.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	5 Unit	0,00	0,00	3.026.845.000,00	3.026.845.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	21.797.561.500,00	21.695.074.000,00	23.816.254.000,00	2.018.692.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		23.537.317.333,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	10.630.000.000,00	10.590.000.000,00	11.590.000.000,00	960.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.803.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.262.419.000,00	1.227.680.000,00	2.127.680.000,00	865.261.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			838.660.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.905.142.500,00	9.877.394.000,00	10.098.574.000,00	193.431.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.895.656.433,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	9.155.028.000,00	8.913.749.000,00	13.220.444.000,00	4.065.416.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		9.837.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	12 Unit	310.895.000,00	310.895.000,00	508.495.000,00	197.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			337.584.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				102 Unit	102 Unit	1.443.380.000,00	1.443.380.000,00	2.143.380.000,00	700.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.635.838.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				695 Unit	695 Unit	3.576.727.000,00	3.576.502.000,00	5.710.325.000,00	2.133.598.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.657.002.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				13 Unit	13 Unit	3.824.026.000,00	3.582.972.000,00	4.858.244.000,00	1.034.218.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.206.599.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*terpenuhinya administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*				100 %	100 %	2.399.371.047,00	3.385.806.983,00	3.385.806.983,00	986.435.936,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH		2.739.827.252,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	176.168.602,00	1.187.604.538,00	1.187.604.538,00	1.011.435.936,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			193.785.462,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	151.490.000,00	151.490.000,00	151.490.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			267.158.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	4 Orang	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	1.921.712.445,00	1.921.712.445,00	1.921.712.445,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.113.883.690,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Terpenuhuinya Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*				100 %	100 %	2.179.777.600,00	2.130.460.600,00	2.432.085.600,00	252.308.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	KDH dan WKDH		2.397.774.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	11 Paket	1.132.379.200,00	1.108.349.200,00	1.219.649.200,00	87.270.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.245.635.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				10 Paket	12 Paket	1.047.398.400,00	1.022.111.400,00	1.212.436.400,00	165.038.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.152.138.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Prosentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Budaya Kerja*				100 %	100 %	1.087.385.750,00	1.030.868.850,00	974.597.750,00	-112.788.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Perangkat Daerah		1.122.094.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	291.977.000,00	287.200.750,00	266.064.650,00	-25.912.350,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			280.144.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	1 Laporan	261.179.000,00	261.179.000,00	242.380.000,00	-18.799.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			254.296.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	181.015.850,00	175.045.700,00	172.209.700,00	-8.806.150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			199.117.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	129.598.000,00	89.797.800,00	89.797.800,00	-39.800.200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			142.557.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	223.615.900,00	217.645.600,00	204.145.600,00	-19.470.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			245.977.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi yang terlayani*				100 %	100 %	6.226.785.000,00	6.081.119.820,00	7.207.129.240,00	980.344.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur, KDH/WKDH dan Masyarakat		6.931.083.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	1.514.817.000,00	1.467.580.580,00	1.817.590.000,00	302.773.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.747.918.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	3.407.004.000,00	3.354.575.240,00	3.865.575.240,00	458.571.240,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.747.704.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	1.304.964.000,00	1.258.964.000,00	1.523.964.000,00	219.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.435.460.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Nilai LPPD**				**3.3**	**3.3**	**29.120.482.900,00**	**28.896.441.600,00**	**31.072.686.500,00**	**-10.179.933.800,00**							**18.940.549.100,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Prosentase Program Urusan yang memiliki Capaian Kinerja dengan Kriteria Tinggi*				82 %	80 %	1.363.567.050,00	1.535.645.500,00	1.606.072.500,00	242.505.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.501.151.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	83.012.500,00	83.012.350,00	83.012.350,00	-150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			92.508.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	836.657.550,00	748.951.150,00	815.438.150,00	-21.219.400,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			920.355.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	443.897.000,00	703.682.000,00	707.622.000,00	263.725.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			488.286.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Rasio tempat ibadah per satuan penduduk*				0.99 Rasio	0.94 Rasio	25.464.785.500,00	25.189.168.400,00	27.328.146.300,00	1.863.360.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		14.984.426.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				7 Dokumen	7 Dokumen	24.426.578.950,00	24.247.447.800,00	26.439.804.800,00	2.013.225.850,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.842.398.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	967.194.850,00	870.708.950,00	819.108.950,00	-148.085.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.063.914.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	71.011.700,00	71.011.650,00	69.232.550,00	-1.779.150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			78.113.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Prosentase Publikasi Produk Hukum yang Dihasilkan*				100 %	100 %	1.080.289.500,00	1.010.791.300,00	977.631.300,00	-102.658.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.097.684.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	500 Dokumen	257.838.500,00	257.838.500,00	257.838.500,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			241.492.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				20 Kasus	20 Kasus	462.351.000,00	429.763.000,00	396.603.000,00	-65.748.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			460.081.600,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	500 Dokumen	360.100.000,00	323.189.800,00	323.189.800,00	-36.910.200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			396.110.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah MoU (Kerjasama) yang Telah Dilaksanakan / Jumlah MoU (Kerjasama) yang Dihasilkan*				100 %	100 %	1.211.840.850,00	1.160.836.400,00	1.160.836.400,00	-51.004.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.357.286.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	1.211.840.850,00	1.160.836.400,00	1.160.836.400,00	-51.004.450,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.357.286.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Pembangunan yang Berkualitas**				**91 %**	**91 %**	**4.321.836.300,00**	**4.059.271.300,00**	**4.340.485.100,00**	**561.967.900,00**							**4.883.804.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Kebijakan yang telah Dilaksanakan / Jumlah Kebijakan yang Dihasilkan*				100 %	100 %	575.035.850,00	574.881.300,00	574.881.300,00	-154.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		503.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	184.549.850,00	184.549.750,00	184.549.750,00	-100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			160.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	273.126.000,00	272.980.850,00	272.980.850,00	-145.150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			233.222.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	117.360.000,00	117.350.700,00	117.350.700,00	-9.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Persentase PD yang Capaian Kinerjanya 76%*				100 %	93 %	2.304.305.000,00	2.187.099.600,00	2.346.158.550,00	41.853.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur		2.793.235.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	1.369.280.000,00	1.305.060.000,00	1.200.525.000,00	-168.755.000,00	-	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.764.708.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				6 Laporan	6 Laporan	802.285.000,00	758.964.600,00	1.003.973.900,00	201.688.900,00	-	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			882.513.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				23 Laporan	23 Laporan	132.740.000,00	123.075.000,00	141.659.650,00	8.919.650,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			146.014.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Tingkat Kematangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa*				100% Level 4	100 % Lv 3 (Proaktif)	1.442.495.450,00	1.297.290.400,00	1.419.445.250,00	-23.050.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur dan Masyarakat		1.586.746.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	410.254.450,00	369.229.400,00	505.789.250,00	95.534.800,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			451.280.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	802.912.000,00	722.912.000,00	722.912.000,00	-80.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			883.203.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				40 Orang	40 Orang	229.329.000,00	205.149.000,00	190.744.000,00	-38.585.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PAJAK DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			252.263.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD							**117.031.318.591,00**	**149.635.009.756,00**	**149.332.735.756,00**	**32.301.417.165,00**							**148.545.570.150,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**69.583.054.677,00**	**72.295.978.556,00**	**72.295.978.556,00**	**15.645.806.073,00**							**85.228.860.750,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan integrasi perencanaan*				12 Dokumen 40 Laporan 4 Laporan 8 Dokumen	100 %	950.244.300,00	1.057.047.750,00	1.057.047.750,00	106.803.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		1.069.999.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	349.999.700,00	456.803.150,00	456.803.150,00	106.803.450,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			399.999.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	1 laporan, 4 Dokumen	199.999.800,00	199.999.800,00	199.999.800,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			179.999.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	1 laporan 4 Dokumen	0,00	99.999.900,00	99.999.900,00	99.999.900,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	0,00	149.999.700,00	149.999.700,00	149.999.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Tertib Administrasi Keuangan*				14 Bulan 45 Orang	100 %	9.320.389.222,00	9.585.630.251,00	9.585.630.251,00	265.241.029,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		10.219.999.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	45 Orang, 14 Bulan Orang/bulan	0,00	9.335.630.351,00	9.335.630.351,00	9.335.630.351,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4	**NON URUSAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**72.270.661.691,00**	**104.396.812.856,00**	**104.094.538.856,00**	**31.823.877.165,00**							**93.435.570.150,00**	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	149.999.950,00	149.999.950,00	149.999.950,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			149.999.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	99.999.950,00	99.999.950,00	99.999.950,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			69.999.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Presentase Pengembangan Potensi Pegawai*				80 Orang	100 %	549.997.500,00	549.997.500,00	549.997.500,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		1.022.427.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	149.998.000,00	149.998.000,00	149.998.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	80 Orang	399.999.500,00	399.999.500,00	399.999.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			872.427.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum*				15 jenis 4 Laporan	100 %	2.576.766.800,00	3.890.106.200,00	3.890.106.200,00	1.313.339.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		3.966.433.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	249.996.400,00	249.996.400,00	249.996.400,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				11 Paket	11 Paket	399.999.800,00	1.213.339.200,00	1.213.339.200,00	813.339.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.697.783.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	399.995.000,00	399.995.000,00	399.995.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	800.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	500.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	300.000.600,00	300.000.600,00	300.000.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	26.775.000,00	26.775.000,00	26.775.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			468.650.400,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Layanan penunjang Urusan daerah*				100 100% 67 orang	100 %	7.261.316.455,00	7.661.316.455,00	7.661.316.455,00	400.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		7.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				11 Laporan	13 Laporan	5.961.316.455,00	6.361.316.455,00	6.361.316.455,00	400.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*				35 unit 7 jenis	100 %	2.169.951.700,00	2.169.951.700,00	2.169.951.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		3.450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	569.999.700,00	569.999.700,00	569.999.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	7 Unit	699.952.000,00	699.952.000,00	699.952.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			850.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD*				50 orang	50 0rang	45.710.411.700,00	46.337.951.700,00	46.337.951.700,00	627.540.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		56.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	800.000.000,00	950.000.000,00	950.000.000,00	150.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				50 Orang	50 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Persentase Layanan Cakupan Administrasi DPRD*				12 Laporan 1 Paket 4 Dokumen	100 %	1.043.977.000,00	1.043.977.000,00	1.043.977.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		1.900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	347.977.000,00	347.977.000,00	347.977.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	96.000.100,00	96.000.100,00	96.000.100,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	3 Laporan	599.999.900,00	599.999.900,00	599.999.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
1.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**				**100 %**	**100 %**	**47.448.263.914,00**	**77.339.031.200,00**	**77.036.757.200,00**	**15.868.445.486,00**							**63.316.709.400,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Presentase Raperda Yang Disetujui*				35 Dokumen	100 %	3.743.869.200,00	4.864.184.050,00	4.561.910.050,00	818.040.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		5.546.026.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	813.062.000,00	1.089.861.850,00	1.014.366.850,00	201.304.850,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.015.654.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				35 Dokumen	35 Dokumen	1.499.999.900,00	1.987.092.350,00	1.987.092.350,00	487.092.450,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.263.477.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				2 Dokumen	2 Dokumen	848.838.000,00	1.036.229.800,00	809.450.800,00	-39.387.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.166.893.950,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				7 Dokumen	12 Dokumen	281.969.300,00	351.000.000,00	351.000.000,00	69.030.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				3 Dokumen	5 Dokumen	300.000.000,00	400.000.050,00	400.000.050,00	100.000.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Presentase ketepatan waktu persetujuan APBD*				12 Dokumen	100 %	3.800.000.000,00	4.513.510.000,00	4.513.510.000,00	713.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		5.270.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	743.510.000,00	743.510.000,00	143.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			900.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				12 Dokumen	12 Dokumen	600.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			420.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	370.000.000,00	370.000.000,00	70.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase Rekomendasi*				12 Laporan 4 Laporan	100 %	10.435.875.000,00	12.806.126.000,00	12.806.126.000,00	2.370.251.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		20.120.120.450,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	4 Laporan	2.400.000.000,00	2.968.500.000,00	2.968.500.000,00	568.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.817.181.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	2 Laporan	2.400.000.000,00	2.968.500.000,00	2.968.500.000,00	568.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.817.181.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	2 Laporan	2.500.000.000,00	3.114.751.000,00	3.114.751.000,00	614.751.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.817.181.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	2 Laporan	2.400.000.000,00	2.968.500.000,00	2.968.500.000,00	568.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.817.181.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	35.875.000,00	35.875.000,00	35.875.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.974.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	700.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			800.420.750,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Presentase Layanan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD*				15 Dokumen	100 %	8.407.150.450,00	10.807.150.050,00	10.807.150.050,00	2.399.999.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		10.960.147.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				15 Dokumen	1 Dokumen	1.400.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	400.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				12 Orang	28 Orang	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	597.799.800,00	597.799.800,00	597.799.800,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	412.375.500,00	412.375.500,00	412.375.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	396.975.150,00	496.975.050,00	496.975.050,00	99.999.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	3.700.000.000,00	5.399.999.700,00	5.399.999.700,00	1.699.999.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.060.147.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Persentase Anggota DPRD yang melaksanakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat*				3 Dokumen	100 %	5.355.331.700,00	9.905.331.400,00	9.905.331.400,00	4.549.999.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		5.820.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	4 Laporan	299.999.900,00	299.999.900,00	299.999.900,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.800,00	99.999.800,00	99.999.800,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	4.955.332.000,00	9.505.331.700,00	9.505.331.700,00	4.549.999.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Jumlah Koordinasi dan Konsultasi BKD, Jumlah Laporan Monev*				1 Dokumen	100 %	1.704.058.000,00	2.197.069.850,00	2.197.069.850,00	493.011.850,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Seretariat DPRD Kota Depok		2.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	574.942.950,00	574.942.950,00	274.942.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				12 Laporan	12 Laporan	1.404.058.000,00	1.622.126.900,00	1.622.126.900,00	218.068.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Presentase Peningkatan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD*				40 Laporan 8 Dokumen	100 %	14.001.979.564,00	32.245.659.850,00	32.245.659.850,00	18.243.680.286,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Depok		13.100.415.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	6.293.268.164,00	16.493.268.200,00	16.493.268.200,00	10.200.000.036,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	1 Dokumen, 1 Laporan	479.030.100,00	529.030.100,00	529.030.100,00	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				3 Dokumen	3 Dokumen	2.600.000.000,00	2.593.680.000,00	2.593.680.000,00	-6.320.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.040.734.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				20 Dokumen	20 Dokumen	4.629.681.300,00	12.629.681.550,00	12.629.681.550,00	8.000.000.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.509.681.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**44.760.656.900,00**	**45.238.196.900,00**	**45.238.196.900,00**	**477.540.000,00**							**55.110.000.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**44.760.656.900,00**	**45.238.196.900,00**	**45.238.196.900,00**	**477.540.000,00**							**55.110.000.000,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**69.583.054.677,00**	**72.295.978.556,00**	**72.295.978.556,00**	**15.645.806.073,00**							**85.228.860.750,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan integrasi perencanaan*				12 Dokumen 40 Laporan 4 Laporan 8 Dokumen	100 %	950.244.300,00	1.057.047.750,00	1.057.047.750,00	106.803.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		1.069.999.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	150.245.200,00	150.245.200,00	150.245.200,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD*				50 orang	50 0rang	45.710.411.700,00	46.337.951.700,00	46.337.951.700,00	627.540.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD Kota Depok		56.400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				14 Orang/Bulan	13 Orang/Bulan	44.610.411.700,00	45.087.951.700,00	45.087.951.700,00	477.540.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH							**20.034.474.398,00**	**19.430.704.323,00**	**19.810.464.323,00**	**-224.010.075,00**							**20.530.002.929,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**20.034.474.398,00**	**19.430.704.323,00**	**19.810.464.323,00**	**-224.010.075,00**							**20.530.002.929,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**							**19.503.692.398,00**	**18.950.330.373,00**	**18.964.846.373,00**	**-538.846.025,00**							**19.000.154.309,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**13.557.917.698,00**	**13.434.250.573,00**	**13.828.941.673,00**	**-88.505.504,00**							**13.469.412.194,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	106.710.000,00	106.312.800,00	106.312.800,00	-397.200,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2 Dokumen	89.780.000,00	89.382.800,00	89.382.800,00	-397.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			95.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	16.930.000,00	16.930.000,00	16.930.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	11.193.502.248,00	11.193.502.248,00	10.980.502.248,00	-213.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, ASN Bappeda		11.446.477.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	53 Orang/bulan	11.172.502.248,00	11.172.502.248,00	10.959.502.248,00	-213.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.423.477.360,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	2.123.985.450,00	2.000.715.525,00	2.601.741.525,00	477.756.075,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, ASN Bappeda		1.781.194.834,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.789.500,00	13.789.500,00	13.789.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.989.376,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	7 Paket	572.498.400,00	572.498.400,00	847.598.400,00	275.100.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			330.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.778.600,00	13.778.600,00	13.778.600,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.989.375,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	349.999.000,00	349.999.000,00	469.989.000,00	119.990.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			340.074.735,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38.022.950,00	38.022.950,00	38.022.950,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.058.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	1100 Laporan	1.135.897.000,00	1.012.627.075,00	1.218.563.075,00	82.666.075,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			959.083.347,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	133.720.000,00	133.720.000,00	140.385.100,00	6.665.100,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah, ASN Bappeda		146.740.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	14 Unit	106.320.000,00	106.320.000,00	112.985.100,00	6.665.100,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			116.320.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	40 Unit	27.400.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.420.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase realisasi program berkinerja tinggi dan sangat tinggi**				**91,87 %**	**91,87 %**	**3.775.661.800,00**	**3.456.961.100,00**	**3.136.489.250,00**	**-274.967.650,00**							**3.500.694.150,00**	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Persentase tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	2.525.903.700,00	2.257.203.450,00	2.126.338.450,00	-399.565.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		2.320.065.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				1 Dokumen	1 Dokumen	565.371.000,00	515.370.950,00	515.370.950,00	-50.000.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			619.333.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																		
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	104.395.700,00	104.395.700,00	104.395.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	905.485.000,00	905.484.800,00	753.484.800,00	-152.000.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			687.842.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	950.652.000,00	731.952.000,00	753.087.000,00	-197.565.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			892.890.300,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase Data dan Informasi teranalisis*				100 %	100 %	390.043.500,00	365.043.150,00	330.693.150,00	-59.350.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		413.887.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	209.875.000,00	184.875.000,00	150.525.000,00	-59.350.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			222.987.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				111 Orang	111 Orang	79.050.300,00	79.049.950,00	79.049.950,00	-350,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.650.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	101.118.200,00	101.118.200,00	101.118.200,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.250.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Persentase tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*				100 %	100 %	672.513.650,00	647.513.650,00	626.349.650,00	-46.164.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		466.265.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	5 Laporan	200.325.000,00	200.325.000,00	330.561.000,00	130.236.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				5 Laporan	5 Laporan	472.188.650,00	447.188.650,00	295.788.650,00	-176.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.765.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	*Persentase Implementasi SIPD dalam Penyusunan Dokumen*				100 %	100 %	187.200.950,00	187.200.850,00	53.108.000,00	-134.092.950,00			-	- -	Perangkat Daerah		300.475.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	84.008.000,00	84.008.000,00	26.308.000,00	-57.700.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	103.192.950,00	103.192.850,00	26.800.000,00	-76.392.950,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			125.475.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Implementasi Program RKPD kedalam APBD**				**100 %**	**100 %**	**2.170.112.900,00**	**2.059.118.700,00**	**1.999.415.450,00**	**-140.064.935,00**							**2.030.047.965,00**	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir*				100 %	100 %	697.833.600,00	671.033.050,00	636.290.250,00	-61.543.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		599.770.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	63.499.050,00	63.499.050,00	63.499.050,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			69.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	211.727.700,00	211.727.450,00	176.984.650,00	-34.743.050,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			231.750.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	166.450.550,00	139.650.550,00	139.650.550,00	-26.800.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	78.345.800,00	78.345.800,00	78.345.800,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			80.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	14.961.300,00	14.961.300,00	14.961.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				0 Laporan	1 Laporan	162.849.200,00	162.848.900,00	162.848.900,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.520.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir*				100 %	100 %	604.816.150,00	575.399.500,00	600.361.050,00	-4.455.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		490.636.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.200,00	35.402.300,00	35.402.000,00	-3.098.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				2 Laporan	2 Laporan	21.589.700,00	15.642.700,00	15.642.700,00	-5.947.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.780.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				8 Laporan	8 Laporan	198.226.500,00	194.355.500,00	194.355.350,00	-3.871.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			235.980.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	10.536.950,00	10.536.950,00	10.536.950,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.176.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	5.947.000,00	5.947.000,00	5.947.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.920.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				4 Laporan	4 Laporan	330.015.800,00	313.515.050,00	338.477.050,00	8.461.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Persentase Dokumen Perencanaan yang terkoordinir*				100 %	100 %	867.463.150,00	812.686.150,00	762.764.150,00	-104.699.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Perangkat Daerah		939.641.065,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	70.597.600,00	70.597.600,00	70.711.600,00	114.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			77.663.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				6 Laporan	6 Laporan	225.000.000,00	300.000.000,00	275.000.000,00	50.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			247.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	60.707.000,00	60.707.000,00	60.671.000,00	-36.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			66.777.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				2 Laporan	2 Laporan	10.552.500,00	10.552.500,00	10.552.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.607.750,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				4 Laporan	4 Laporan	480.606.050,00	350.829.050,00	325.829.050,00	-154.777.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			514.091.655,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**530.782.000,00**	**480.373.950,00**	**845.617.950,00**	**314.835.950,00**							**1.529.848.620,00**	
1.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan**				**50 %**	**50 %**	**530.782.000,00**	**480.373.950,00**	**845.617.950,00**	**999.066.620,00**							**1.529.848.620,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan*				80 %	80 %	109.747.650,00	109.747.650,00	109.747.650,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		136.348.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00	49.999.950,00	49.999.950,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			73.848.225,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																		
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	59.747.700,00	59.747.700,00	59.747.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan*				80 %	80 %	99.999.400,00	49.999.700,00	49.999.700,00	-49.999.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		264.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	49.999.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.700,00	0,00	0,00	-49.999.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan*				80 %	80 %	99.999.400,00	99.999.400,00	289.999.400,00	190.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		572.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	49.999.700,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			132.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				2 Dokumen	3 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	239.999.700,00	190.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			440.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase jumlah kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan*				76 %	76 %	221.035.550,00	220.627.200,00	395.871.200,00	174.835.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		557.500.395,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				1 Dokumen	1 Dokumen	64.999.900,00	64.999.900,00	59.599.900,00	-5.400.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	109.785.800,00	109.377.450,00	290.021.450,00	180.235.650,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			220.659.615,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	46.249.850,00	46.249.850,00	46.249.850,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			269.840.780,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAERAH							**161.155.315.902,00**	**154.755.324.400,00**	**146.550.640.377,00**	**-14.604.675.525,00**							**151.877.262.473,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**161.155.315.902,00**	**154.755.324.400,00**	**146.550.640.377,00**	**-14.604.675.525,00**							**151.877.262.473,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**161.155.315.902,00**	**154.755.324.400,00**	**146.550.640.377,00**	**-14.604.675.525,00**							**151.877.262.473,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**93.491.071.809,00**	**92.917.588.344,00**	**94.025.448.827,00**	**-1.806.209.281,00**							**91.684.862.528,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	82.072.950,00	82.072.650,00	103.915.650,00	21.842.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		84.535.190,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	56.432.950,00	56.432.650,00	56.432.650,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			58.125.990,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	19 Laporan	25.640.000,00	25.640.000,00	47.483.000,00	21.843.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			26.409.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	89.970.687.059,00	89.213.745.319,00	89.653.451.802,00	-317.235.257,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		87.969.994.438,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	89.970.687.059,00	89.213.745.319,00	89.653.451.802,00	-317.235.257,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			87.969.994.438,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda*				100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran dan Sarana Prasarana Aparatur*				100 %	100 %	2.822.536.800,00	3.039.355.375,00	3.685.666.375,00	863.129.575,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		2.996.084.650,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.150.300,00	15.150.300,00	15.150.300,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.607.641,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.104.281.000,00	1.331.092.500,00	1.679.501.500,00	575.220.500,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			926.259.430,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.322.500,00	39.322.500,00	39.322.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.507.428,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	309.390.000,00	309.390.000,00	309.390.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			318.671.700,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	504.443.000,00	504.443.000,00	504.443.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			519.578.350,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	849.950.000,00	839.957.075,00	839.893.075,00	-10.056.925,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			875.460.101,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	1 Dokumen	0,00	0,00	297.966.000,00	297.966.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	515.775.000,00	482.415.000,00	482.415.000,00	-33.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		531.248.250,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	270.760.000,00	237.400.000,00	237.400.000,00	-33.360.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			278.882.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	130 Unit	245.015.000,00	245.015.000,00	245.015.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			252.365.450,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Status Laporan**				**WTP**	**WTP**	**52.955.324.850,00**	**47.877.536.013,00**	**39.140.715.500,00**	**-8.151.473.795,00**							**44.803.851.055,00**	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Status Laporan*				WTP	WTP	1.202.527.850,00	1.043.197.700,00	993.198.200,00	-209.329.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		1.239.090.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	149.999.000,00	145.823.000,00	145.823.000,00	-4.176.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			154.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	99.999.750,00	96.867.750,00	96.867.750,00	-3.132.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																		
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	149.999.500,00	149.999.500,00	149.999.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			154.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			56.650.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																		
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.700,00	24.999.700,00	0,00	-24.999.700,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																		
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	-24.999.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																		
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	263.999.700,00	193.999.550,00	193.999.550,00	-70.000.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			271.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	263.999.900,00	183.999.900,00	183.999.900,00	-80.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			271.920.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				137 Orang	38 Orang	169.530.500,00	167.508.500,00	167.508.500,00	-2.022.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			175.100.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Status Laporan*				WTP	WTP	770.960.000,00	620.528.000,00	620.528.000,00	-150.432.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		806.616.175,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	343.532.000,00	193.400.000,00	193.400.000,00	-150.132.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			355.382.445,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				4 Dokumen	4 Dokumen	121.877.000,00	121.877.000,00	121.877.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			125.902.050,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	305.551.000,00	305.251.000,00	305.251.000,00	-300.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			325.331.680,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Status Laporan*				WTP	WTP	408.727.000,00	285.191.800,00	269.742.800,00	-138.984.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		420.989.170,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	65.192.600,00	65.192.300,00	65.192.300,00	-300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.148.532,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	219.999.800,00	219.999.500,00	204.550.500,00	-15.449.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			226.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				45 Orang	45 Orang	123.534.600,00	0,00	0,00	-123.534.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			127.240.638,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Status Laporan*				WTP	WTP	50.000.000.000,00	45.356.750.763,00	36.685.378.750,00	-13.314.621.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		41.746.656.710,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	50.000.000.000,00	45.356.750.763,00	36.685.378.750,00	-13.314.621.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			41.746.656.710,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	*Status Laporan*				WTP	WTP	573.110.000,00	571.867.750,00	571.867.750,00	-1.242.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		590.499.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	573.110.000,00	571.867.750,00	571.867.750,00	-1.242.250,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			590.499.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan**				**100 %**	**100 %**	**4.114.382.800,00**	**3.904.442.800,00**	**4.066.266.720,00**	**342.602.300,00**							**4.456.985.100,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Persentase Kesesuaian Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan*				100 %	100 %	4.114.382.800,00	3.904.442.800,00	4.066.266.720,00	-48.116.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		4.456.985.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																		
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	156.058.000,00	155.980.000,00	155.980.000,00	-78.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			160.741.800,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	489.567.800,00	448.532.200,00	448.532.200,00	-41.035.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			504.411.600,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	526.462.000,00	523.030.000,00	623.030.000,00	96.568.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			542.346.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1.929.555.000,00	1.857.957.800,00	1.520.457.800,00	-409.097.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.201.462.260,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	144.064.000,00	143.586.400,00	354.586.400,00	210.522.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			153.109.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	12 Laporan	691.300.000,00	691.300.000,00	879.623.920,00	188.323.920,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			712.086.380,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.832.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	162.976.000,00	69.656.400,00	69.656.400,00	-93.319.600,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			167.995.060,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**				**39,77 %**	**39,77 %**	**10.594.536.443,00**	**10.055.757.243,00**	**9.318.209.330,00**	**337.027.347,00**							**10.931.563.790,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah*				39,77 %	39,77 %	10.594.536.443,00	10.055.757.243,00	9.318.209.330,00	-1.276.327.113,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan masyarakat		10.931.563.790,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	1 Dokumen	191.206.000,00	178.721.000,00	178.721.000,00	-12.485.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			196.942.180,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			103.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.971.421.993,00	1.971.421.993,00	620.110.000,00	-1.351.311.993,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.030.802.590,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				29 Unit	29 Unit	706.273.500,00	624.452.500,00	624.452.500,00	-81.821.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			727.464.280,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	1 Laporan	1.199.950.000,00	1.022.350.000,00	1.022.350.000,00	-177.600.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.236.772.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			275.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				660000 Obyek Pajak	660000 Obyek Pajak	1.200.693.000,00	1.085.533.000,00	1.206.654.540,00	5.961.540,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.236.772.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				4 Dokumen	1 Dokumen	1.275.439.000,00	1.170.179.000,00	1.170.179.000,00	-105.260.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.313.702.170,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				11 Layanan	11 Layanan	882.374.000,00	922.014.000,00	1.162.243.580,00	279.869.580,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			908.851.400,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																		
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				7200 Dokumen	1 Dokumen	685.169.950,00	685.169.950,00	745.811.690,00	60.641.740,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			705.725.100,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.462.035.000,00	1.419.375.000,00	1.610.746.220,00	148.711.220,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.505.896.050,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	108.000.000,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			111.240.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	100.300.000,00	57.400.000,00	57.800.000,00	-42.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			103.309.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	461.674.000,00	461.140.800,00	461.140.800,00	-533.200,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			475.586.020,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**41.687.612.689,00**	**38.589.685.360,00**	**32.183.045.251,00**	**-9.504.567.438,00**							**41.582.435.389,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**41.687.612.689,00**	**38.589.685.360,00**	**32.183.045.251,00**	**-9.504.567.438,00**							**41.582.435.389,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**26.564.172.689,00**	**25.912.381.960,00**	**20.386.922.751,00**	**-6.177.249.938,00**							**30.757.068.389,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**19.402.570.139,00**	**19.237.952.410,00**	**14.447.822.001,00**	**3.045.966.050,00**							**22.448.536.189,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	167.469.000,00	167.469.000,00	158.579.000,00	-8.890.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	BKPSDM Kota Depok		175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	91.410.000,00	91.410.000,00	82.520.000,00	-8.890.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	76.059.000,00	76.059.000,00	76.059.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase adm keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	17.469.677.939,00	17.305.120.710,00	12.665.949.801,00	-4.803.728.138,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Depok		20.397.820.189,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	17.441.160.939,00	17.276.603.710,00	12.637.432.801,00	-4.803.728.138,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.382.820.189,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	28.517.000,00	28.517.000,00	28.517.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian*				100 %	100 %	154.199.000,00	154.198.500,00	167.604.000,00	13.405.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		290.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	87.079.000,00	87.079.000,00	87.079.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	120 Orang	67.120.000,00	67.119.500,00	80.525.000,00	13.405.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentse penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	1.122.014.200,00	1.122.002.200,00	1.043.382.200,00	-78.632.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Depok		1.058.656.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	316.649.900,00	316.649.900,00	316.649.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			316.656.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	242.929.000,00	242.929.000,00	192.109.000,00	-50.820.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			198.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	64.751.300,00	64.751.300,00	64.751.300,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	463.684.000,00	463.672.000,00	435.872.000,00	-27.812.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			450.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur*				100 %	100 %	302.962.000,00	302.914.000,00	256.957.000,00	-46.005.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Depok		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				29 Unit	28 Unit	302.962.000,00	302.914.000,00	256.957.000,00	-46.005.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah yang terpelihara*				100 %	100 %	186.248.000,00	186.248.000,00	155.350.000,00	-30.898.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN BKPSDM Kota Depok		227.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	10 Unit	144.100.000,00	144.100.000,00	125.200.000,00	-18.900.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			167.060.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				55 Unit	38 Unit	42.148.000,00	42.148.000,00	30.150.000,00	-11.998.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian**				**87 %**	**88 %**	**7.161.602.550,00**	**6.674.429.550,00**	**5.939.100.750,00**	**1.146.929.650,00**							**8.308.532.200,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase kelengkapan dokumen Pengisian formasi ASN*				100 %	100 %	1.492.297.200,00	1.406.797.200,00	1.283.187.000,00	-209.110.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		2.405.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				2 Laporan	2 Laporan	857.104.200,00	857.104.200,00	783.504.200,00	-73.600.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.800.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	1 Dokumen	103.658.000,00	103.658.000,00	103.647.800,00	-10.200,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Dokumen	5 Dokumen	460.213.000,00	400.213.000,00	350.213.000,00	-110.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			445.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	71.322.000,00	45.822.000,00	45.822.000,00	-25.500.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase administrasi kepegawaian yang terselesaikan*				100 %	100 %	2.466.705.000,00	2.233.503.500,00	1.937.315.000,00	-529.390.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		2.526.210.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1.052.324.000,00	1.052.324.000,00	996.830.000,00	-55.494.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			982.110.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	422.606.000,00	418.606.000,00	393.059.000,00	-29.547.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	991.775.000,00	762.573.500,00	547.426.000,00	-444.349.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.144.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase layanan pengembangan kompetensi yang dipenuhi*				100 %	100 %	1.826.253.800,00	1.736.925.350,00	1.644.395.350,00	-181.858.450,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		1.996.127.200,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				80 Orang	80 Orang	734.870.000,00	734.870.000,00	734.870.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			663.995.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				8 Orang	8 Orang	468.000.000,00	464.000.000,00	464.000.000,00	-4.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	119.329.800,00	107.401.650,00	99.131.650,00	-20.198.150,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			116.180.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				100 Orang	100 Orang	77.514.000,00	77.513.700,00	74.453.700,00	-3.060.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			121.450.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				100 Orang	100 Orang	369.840.000,00	296.440.000,00	218.040.000,00	-151.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			427.325.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				1 Laporan	1 Laporan	56.700.000,00	56.700.000,00	53.900.000,00	-2.800.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			67.176.850,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Cakupan penilaian kinerja dan disiplin pegawai yang di evaluasi*				100 %	100 %	1.376.346.550,00	1.297.203.500,00	1.074.203.400,00	-302.143.150,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		1.381.195.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	2 Dokumen	459.874.000,00	459.874.000,00	509.873.900,00	49.999.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			448.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	231.352.050,00	152.209.000,00	152.209.000,00	-79.143.050,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			268.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				240 Orang	201 Orang	602.917.500,00	602.917.500,00	329.917.500,00	-273.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			534.735.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				2 Laporan	2 Laporan	82.203.000,00	82.203.000,00	82.203.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**15.123.440.000,00**	**12.677.303.400,00**	**11.796.122.500,00**	**-3.327.317.500,00**							**10.825.367.000,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajerial dan teknis**				**100 %**	**100 %**	**15.123.440.000,00**	**12.677.303.400,00**	**11.796.122.500,00**	**-4.298.073.000,00**							**10.825.367.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis*				100 %	100 %	5.517.082.000,00	5.517.082.000,00	5.004.389.100,00	-512.692.900,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		5.517.082.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				660 Orang	800 Orang	5.517.082.000,00	5.517.082.000,00	5.004.389.100,00	-512.692.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.517.082.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*				100 %	100 %	9.606.358.000,00	7.160.221.400,00	6.791.733.400,00	-2.814.624.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Pemerintah Kota Depok		5.308.285.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				5 Laporan	5 Laporan	9.606.358.000,00	7.160.221.400,00	6.791.733.400,00	-2.814.624.600,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.308.285.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT DAERAH							**22.636.722.419,00**	**22.611.458.019,00**	**21.825.609.019,00**	**-811.113.400,00**							**26.051.082.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**							**22.636.722.419,00**	**22.611.458.019,00**	**21.825.609.019,00**	**-811.113.400,00**							**26.051.082.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**							**22.636.722.419,00**	**22.611.458.019,00**	**21.825.609.019,00**	**-811.113.400,00**							**26.051.082.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**18.508.202.269,00**	**18.394.747.269,00**	**18.359.322.269,00**	**2.795.159.731,00**							**21.303.362.000,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	151.981.550,00	151.981.550,00	125.971.550,00	-26.010.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kota Depok		174.750.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	21.741.850,00	21.741.850,00	18.741.850,00	-3.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.089.900,00	21.089.900,00	14.459.900,00	-6.630.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				37 Laporan	37 Laporan	109.149.800,00	109.149.800,00	92.769.800,00	-16.380.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			125.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase dokumen administrasi keuangan selesai tepat waktu*				100 %	100 %	15.182.021.619,00	15.496.021.619,00	15.486.921.619,00	304.900.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Inspektorat Daerah Kota Depok		17.459.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	63 Orang/bulan	15.160.957.619,00	15.474.957.619,00	15.474.957.619,00	314.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.435.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	21.064.000,00	21.064.000,00	11.964.000,00	-9.100.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			24.300.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan kapabilitas ASN Inspektorat*				100 %	100 %	1.115.447.200,00	1.061.447.200,00	1.061.447.200,00	-54.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Inspektorat Daerah Kota Depok		1.300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	1.115.447.200,00	1.061.447.200,00	1.061.447.200,00	-54.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	1.840.239.900,00	1.466.784.900,00	1.466.469.900,00	-373.770.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kota Depok		2.118.022.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.499.900,00	14.499.900,00	14.499.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.675.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.020.208.000,00	659.282.000,00	658.967.000,00	-361.241.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.175.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	55.456.000,00	43.006.000,00	43.006.000,00	-12.450.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			63.780.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	157.698.000,00	157.698.000,00	157.698.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			181.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54.580.000,00	54.580.000,00	54.580.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.767.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	537.798.000,00	537.719.000,00	537.719.000,00	-79.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			618.450.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah Inspektorat yang mendapat pemeliharaan*				100 %	100 %	218.512.000,00	218.512.000,00	218.512.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kota Depok		251.290.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	16 Unit	158.800.000,00	158.800.000,00	158.800.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			182.620.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	59.712.000,00	59.712.000,00	59.712.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			68.670.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase Rekomendasi atas Temuan Hasil Pengawasan yang Selesai Ditindaklanjuti Perangkat Daerah**				**91,80 %**	**91,80 %**	**2.396.002.850,00**	**2.477.340.850,00**	**2.113.830.850,00**	**359.397.150,00**							**2.755.400.000,00**	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal sesuai PKPT*				100 %	100 %	2.215.297.950,00	2.296.689.950,00	1.933.179.950,00	-282.118.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok		2.547.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	188.029.400,00	188.029.400,00	188.029.400,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			216.250.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				33 Laporan	33 Laporan	1.043.716.900,00	1.043.716.900,00	1.043.716.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.280.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				9 Laporan	9 Laporan	452.283.500,00	452.283.500,00	370.383.500,00	-81.900.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			520.120.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	156.190.550,00	156.190.550,00	124.405.550,00	-31.785.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			179.600.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				39 Dokumen	20 Dokumen	375.077.600,00	456.469.600,00	206.644.600,00	-168.433.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			431.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu*				100 %	100 %	180.704.900,00	180.650.900,00	180.650.900,00	-54.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok		207.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	79.946.000,00	79.946.000,00	-54.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			92.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				6 Laporan	6 Laporan	100.704.900,00	100.704.900,00	100.704.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			115.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase capaian perumusan kebijakan teknis pengawasan dan capaian pendampingan dan asistensi**				**100 %**	**100 %**	**1.732.517.300,00**	**1.739.369.900,00**	**1.352.455.900,00**	**259.802.700,00**							**1.992.320.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*persentase perumusan kebijakan pengawasan*				100 %	100 %	29.999.700,00	27.802.300,00	27.802.300,00	-2.197.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Daerah Kota Depok		34.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan																		
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	29.999.700,00	27.802.300,00	27.802.300,00	-2.197.400,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			34.500.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi*				100 %	100 %	1.702.517.600,00	1.711.567.600,00	1.324.653.600,00	-377.864.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok		1.957.820.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				2 perangkat daerah	2 perangkat daerah	794.855.000,00	700.027.000,00	486.513.000,00	-308.342.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			914.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				37 perangkat daerah	37 perangkat daerah	500.408.700,00	500.408.700,00	338.708.700,00	-161.700.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			575.470.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				8 Kegiatan	8 Kegiatan	407.253.900,00	511.131.900,00	499.431.900,00	92.178.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			468.350.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN PANCORAN MAS							**40.141.025.497,00**	**18.009.314.617,00**	**17.598.848.747,00**	**-22.542.176.750,00**							**17.105.986.623,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**40.141.025.497,00**	**18.009.314.617,00**	**17.598.848.747,00**	**-22.542.176.750,00**							**17.105.986.623,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**40.141.025.497,00**	**18.009.314.617,00**	**17.598.848.747,00**	**-22.542.176.750,00**							**17.105.986.623,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemda**				**100 %**	**100 %**	**13.038.903.537,00**	**13.557.800.507,00**	**13.358.747.637,00**	**523.127.069,00**							**13.562.030.606,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah*				100 %	100 %	68.826.000,00	68.825.950,00	38.887.950,00	-29.938.050,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		60.500.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	49.998.000,00	49.997.950,00	36.307.950,00	-13.690.050,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	18.828.000,00	18.828.000,00	2.580.000,00	-16.248.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.500.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase administrasi keuangann tepat waktu*				100 %	100 %	11.451.905.541,00	11.870.806.557,00	11.847.556.557,00	395.651.016,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		12.004.430.606,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	11.416.583.541,00	11.835.484.557,00	11.835.484.557,00	418.901.016,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.964.830.606,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	35.322.000,00	35.322.000,00	12.072.000,00	-23.250.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			39.600.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentse penyediaan administrasi umum perkantoran*				100 %	100 %	696.824.496,00	696.820.500,00	596.423.500,00	-100.400.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		880.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	15.746.000,00	15.746.000,00	15.746.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	35 Paket	341.318.200,00	341.318.200,00	267.921.200,00	-73.397.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			330.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.268.000,00	9.268.000,00	9.268.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			27.500.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	150.275.000,00	150.275.000,00	123.275.000,00	-27.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	9 Paket	49.999.700,00	49.999.700,00	49.999.700,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	130.217.596,00	130.213.600,00	130.213.600,00	-3.996,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			137.500.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100% undefined	100% undefined	605.682.500,00	605.682.500,00	555.682.500,00	-50.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		374.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	415.000.000,00	415.000.000,00	365.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	190.682.500,00	190.682.500,00	190.682.500,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			209.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik*				100 %	100 %	215.665.000,00	315.665.000,00	320.197.130,00	104.532.130,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		243.100.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	60.940.000,00	60.940.000,00	65.472.130,00	4.532.130,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	70 Unit	47.925.000,00	47.925.000,00	47.925.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	106.800.000,00	206.800.000,00	206.800.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			133.100.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**4.213.151.610,00**	**4.163.272.610,00**	**3.851.859.610,00**	**-911.195.593,00**							**3.301.956.017,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	117.519.900,00	117.519.900,00	117.519.900,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat & ASN		121.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	117.519.900,00	117.519.900,00	117.519.900,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			121.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	1.205.771.400,00	1.205.769.400,00	1.012.731.400,00	-193.040.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		1.601.600.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.205.771.400,00	1.205.769.400,00	1.012.731.400,00	-193.040.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.601.600.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	2.889.860.310,00	2.839.983.310,00	2.721.608.310,00	-168.252.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat & ASN		1.579.356.017,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	2.889.860.310,00	2.839.983.310,00	2.721.608.310,00	-168.252.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.579.356.017,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**288.241.500,00**	**288.241.500,00**	**388.241.500,00**	**-46.241.500,00**							**242.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 Perda	100 %	211.846.000,00	211.846.000,00	311.846.000,00	100.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat & ASN		132.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	146.548.000,00	146.548.000,00	246.548.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	65.298.000,00	65.298.000,00	65.298.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			77.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 Perda	100 %	76.395.500,00	76.395.500,00	76.395.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat & ASN		110.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	76.395.500,00	76.395.500,00	76.395.500,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
		KELURAHAN MAMPANG							**0,00**	**3.035.291.600,00**	**2.787.837.100,00**	**2.787.837.100,00**							**3.924.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.035.291.600,00**	**2.787.837.100,00**	**2.787.837.100,00**							**3.924.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.035.291.600,00**	**2.787.837.100,00**	**2.787.837.100,00**							**3.924.800.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.035.291.600,00**	**2.787.837.100,00**	**3.924.800.000,00**							**3.924.800.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.035.291.600,00	2.787.837.100,00	2.787.837.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.924.800.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				45 Unit	45 Unit	0,00	999.935.700,00	999.935.700,00	999.935.700,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.099.929.270,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	2.035.355.900,00	1.787.901.400,00	1.787.901.400,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Mampang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.824.870.730,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU							**0,00**	**3.574.128.900,00**	**3.390.427.500,00**	**3.390.427.500,00**							**4.111.580.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.574.128.900,00**	**3.390.427.500,00**	**3.390.427.500,00**							**4.111.580.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.574.128.900,00**	**3.390.427.500,00**	**3.390.427.500,00**							**4.111.580.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.574.128.900,00**	**3.390.427.500,00**	**4.111.580.000,00**							**4.111.580.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.574.128.900,00	3.390.427.500,00	3.390.427.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		4.111.580.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				43 Unit	43 Unit	0,00	1.083.010.000,00	994.075.000,00	994.075.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.191.311.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	2.491.118.900,00	2.396.352.500,00	2.396.352.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.920.269.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN DEPOK							**0,00**	**3.724.381.850,00**	**3.573.573.000,00**	**3.573.573.000,00**							**4.382.840.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.724.381.850,00**	**3.573.573.000,00**	**3.573.573.000,00**							**4.382.840.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.724.381.850,00**	**3.573.573.000,00**	**3.573.573.000,00**							**4.382.840.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**3.724.381.850,00**	**3.573.573.000,00**	**4.382.840.000,00**							**4.382.840.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				-	100 %	0,00	3.724.381.850,00	3.573.573.000,00	3.573.573.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		4.382.840.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				54 Unit	54 Unit	0,00	1.218.148.000,00	1.218.148.000,00	1.218.148.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.339.962.800,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	2.506.233.850,00	2.355.425.000,00	2.355.425.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.042.877.200,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN DEPOK JAYA							**0,00**	**3.539.920.900,00**	**3.400.365.500,00**	**3.400.365.500,00**							**4.133.360.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.539.920.900,00**	**3.400.365.500,00**	**3.400.365.500,00**							**4.133.360.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.539.920.900,00**	**3.400.365.500,00**	**3.400.365.500,00**							**4.133.360.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.539.920.900,00**	**3.400.365.500,00**	**4.133.360.000,00**							**4.133.360.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.539.920.900,00	3.400.365.500,00	3.400.365.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		4.133.360.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				27 Unit	27 Unit	0,00	1.476.312.000,00	1.476.312.000,00	1.476.312.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.623.943.200,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	2.063.608.900,00	1.924.053.500,00	1.924.053.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.509.416.800,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN RANGKAPAN JAYA							**0,00**	**3.682.472.900,00**	**3.460.551.400,00**	**3.460.551.400,00**							**4.262.060.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.682.472.900,00**	**3.460.551.400,00**	**3.460.551.400,00**							**4.262.060.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.682.472.900,00**	**3.460.551.400,00**	**3.460.551.400,00**							**4.262.060.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.682.472.900,00**	**3.460.551.400,00**	**4.262.060.000,00**							**4.262.060.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.682.472.900,00	3.460.551.400,00	3.460.551.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		4.262.060.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				43 Unit	43 Unit	0,00	1.311.558.100,00	1.190.704.100,00	1.190.704.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.442.705.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	2.370.914.800,00	2.269.847.300,00	2.269.847.300,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Rangkapan Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.819.355.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PANCORAN MAS							**0,00**	**3.743.480.400,00**	**3.563.293.400,00**	**3.563.293.400,00**							**4.588.100.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.743.480.400,00**	**3.563.293.400,00**	**3.563.293.400,00**							**4.588.100.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.743.480.400,00**	**3.563.293.400,00**	**3.563.293.400,00**							**4.588.100.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.743.480.400,00**	**3.563.293.400,00**	**4.588.100.000,00**							**4.588.100.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.743.480.400,00	3.563.293.400,00	3.563.293.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		4.588.100.000,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				50 Unit	50 Unit	0,00	1.272.460.500,00	1.272.460.500,00	1.272.460.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.399.706.550,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	2.471.019.900,00	2.290.832.900,00	2.290.832.900,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Pancoran Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.188.393.450,00	KECAMATAN PANCORAN MAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN CILODONG							**31.840.438.854,00**	**14.647.963.502,00**	**14.451.106.506,00**	**-17.389.332.348,00**							**14.384.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**31.840.438.854,00**	**14.647.963.502,00**	**14.451.106.506,00**	**-17.389.332.348,00**							**14.384.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**31.840.438.854,00**	**14.647.963.502,00**	**14.451.106.506,00**	**-17.389.332.348,00**							**14.384.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**11.785.744.204,00**	**12.110.540.752,00**	**11.791.261.756,00**	**148.255.796,00**							**11.934.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen pendukung SAKIP.*				100 %	100 %	51.999.750,00	51.999.700,00	51.999.700,00	-50,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Perangkat Daerah		54.000.000,00	KECAMATAN CILODONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	31.999.900,00	31.999.900,00	31.999.900,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			33.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	19.999.850,00	19.999.800,00	19.999.800,00	-50,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangann tepat waktu*				100 %	100 %	10.618.455.454,00	10.943.252.052,00	10.228.482.056,00	-389.973.398,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Kecamatan Cilodong		10.821.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	10.598.455.604,00	10.923.252.252,00	10.208.482.256,00	-389.973.348,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.800.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.999.850,00	19.999.800,00	19.999.800,00	-50,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentse penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	561.204.600,00	561.204.600,00	601.825.600,00	40.621.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		484.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.619.000,00	10.619.000,00	10.619.000,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.500.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	261.935.000,00	261.935.000,00	302.556.000,00	40.621.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.251.900,00	10.251.900,00	10.251.900,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			11.500.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	109.059.000,00	109.059.000,00	109.059.000,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			115.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	19.999.700,00	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				485 Laporan	509 Laporan	149.340.000,00	149.340.000,00	149.340.000,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	373.835.400,00	373.835.400,00	403.835.400,00	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		382.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	313.835.400,00	313.835.400,00	313.835.400,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			320.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	180.249.000,00	180.249.000,00	505.119.000,00	324.870.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		193.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	19 Unit	35.380.000,00	35.380.000,00	44.980.000,00	9.600.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			37.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				53 Unit	53 Unit	44.869.000,00	44.869.000,00	44.869.000,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.000.000,00	KECAMATAN CILODONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	415.270.000,00	315.270.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**2.316.902.850,00**	**2.316.902.850,00**	**2.427.324.850,00**	**3.097.150,00**							**2.320.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	99.981.000,00	99.981.000,00	99.981.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat		120.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	99.981.000,00	99.981.000,00	99.981.000,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			120.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	1.100.026.900,00	1.100.026.900,00	1.115.526.900,00	15.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Kelurahan se-Kecamatan Cilodong		1.300.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.100.026.900,00	1.100.026.900,00	1.115.526.900,00	15.500.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.300.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	1.116.894.950,00	1.116.894.950,00	1.211.816.950,00	94.922.000,00			-	- -	Masyarakat		900.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				47 Laporan	48 Laporan	1.116.894.950,00	1.116.894.950,00	1.211.816.950,00	94.922.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			900.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**				**100 %**	**100 %**	**220.519.900,00**	**220.519.900,00**	**232.519.900,00**	**-90.519.900,00**							**130.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				2 jenis	2 jenis	220.519.900,00	220.519.900,00	232.519.900,00	12.000.000,00			-	- -	Masyarakat		130.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	139.986.000,00	139.986.000,00	151.986.000,00	12.000.000,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			45.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	80.533.900,00	80.533.900,00	80.533.900,00	0,00	Kota Depok, Cilodong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			85.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
		KELURAHAN CILODONG							**0,00**	**2.735.688.600,00**	**2.478.342.450,00**	**2.478.342.450,00**							**3.500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.735.688.600,00**	**2.478.342.450,00**	**2.478.342.450,00**							**3.500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.735.688.600,00**	**2.478.342.450,00**	**2.478.342.450,00**							**3.500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**% Pemberdayaan Masyarakat Yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.735.688.600,00**	**2.478.342.450,00**	**3.500.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cilodong*				100 %	100 %	0,00	2.735.688.600,00	2.478.342.450,00	2.478.342.450,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.500.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				42 Unit	42 Unit	0,00	1.310.573.000,00	1.242.173.000,00	1.242.173.000,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	0,00	1.425.115.600,00	1.236.169.450,00	1.236.169.450,00	Kota Depok, Cilodong, Cilodong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KALIMULYA							**0,00**	**3.109.540.000,00**	**2.880.813.500,00**	**2.880.813.500,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.109.540.000,00**	**2.880.813.500,00**	**2.880.813.500,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.109.540.000,00**	**2.880.813.500,00**	**2.880.813.500,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**% Pemberdayaan Masyarakat Yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.109.540.000,00**	**2.880.813.500,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalimulya*				100 %	100 %	0,00	3.109.540.000,00	2.880.813.500,00	2.880.813.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				17 Unit	17 Unit	0,00	1.475.313.000,00	1.335.913.000,00	1.335.913.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CILODONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				29 Pokmas / Ormas	29 Pokmas / Ormas	0,00	1.634.227.000,00	1.544.900.500,00	1.544.900.500,00	Kota Depok, Cilodong, Kalimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUKAMAJU							**0,00**	**4.340.294.400,00**	**4.093.388.800,00**	**4.093.388.800,00**							**5.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**4.340.294.400,00**	**4.093.388.800,00**	**4.093.388.800,00**							**5.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**4.340.294.400,00**	**4.093.388.800,00**	**4.093.388.800,00**							**5.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**% Pemberdayaan Masyarakat Yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**4.340.294.400,00**	**4.093.388.800,00**	**5.000.000.000,00**							**5.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukamaju*				100 %	100 %	0,00	4.340.294.400,00	4.093.388.800,00	4.093.388.800,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		5.000.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				68 Unit	49 Unit	0,00	1.309.525.000,00	1.136.872.900,00	1.136.872.900,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				35 Pokmas / Ormas	30 Pokmas / Ormas	0,00	3.030.769.400,00	2.956.515.900,00	2.956.515.900,00	Kota Depok, Cilodong, Sukamaju	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KALIBARU							**0,00**	**2.999.283.900,00**	**2.747.453.900,00**	**2.747.453.900,00**							**3.900.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.999.283.900,00**	**2.747.453.900,00**	**2.747.453.900,00**							**3.900.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.999.283.900,00**	**2.747.453.900,00**	**2.747.453.900,00**							**3.900.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**% Pemberdayaan Masyarakat Yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.999.283.900,00**	**2.747.453.900,00**	**3.900.000.000,00**							**3.900.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kalibaru*				100 %	100 %	0,00	2.999.283.900,00	2.747.453.900,00	2.747.453.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.900.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				54 Unit	39 Unit	0,00	1.302.620.000,00	1.051.190.000,00	1.051.190.000,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				40 Pokmas / Ormas	38 Pokmas / Ormas	0,00	1.696.663.900,00	1.696.263.900,00	1.696.263.900,00	Kota Depok, Cilodong, Kalibaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.300.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN JATIMULYA							**0,00**	**2.832.595.150,00**	**2.552.274.075,00**	**2.552.274.075,00**							**3.400.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.832.595.150,00**	**2.552.274.075,00**	**2.552.274.075,00**							**3.400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.832.595.150,00**	**2.552.274.075,00**	**2.552.274.075,00**							**3.400.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**% Pemberdayaan Masyarakat Yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.832.595.150,00**	**2.552.274.075,00**	**3.400.000.000,00**							**3.400.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jatimulya*				100 %	100 %	0,00	2.832.595.150,00	2.552.274.075,00	2.552.274.075,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.400.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				24 Unit	16 Unit	0,00	1.062.484.550,00	865.008.475,00	865.008.475,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				39 Pokmas / Ormas	35 Pokmas / Ormas	0,00	1.770.110.600,00	1.687.265.600,00	1.687.265.600,00	Kota Depok, Cilodong, Jatimulya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000.000,00	KECAMATAN CILODONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN SAWANGAN							**41.405.373.000,00**	**19.043.621.400,00**	**18.827.359.264,00**	**-22.578.013.736,00**							**20.041.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**41.405.373.000,00**	**19.043.621.400,00**	**18.827.359.264,00**	**-22.578.013.736,00**							**20.041.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**41.405.373.000,00**	**19.043.621.400,00**	**18.827.359.264,00**	**-22.578.013.736,00**							**20.041.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**13.280.836.250,00**	**14.284.619.400,00**	**14.371.697.764,00**	**1.644.163.750,00**							**14.925.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Pendukung SAKIP*				100 %	100 %	38.999.900,00	38.999.900,00	38.999.900,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan		45.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	9.999.900,00	9.999.900,00	9.999.900,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	12.032.000.000,00	13.014.746.400,00	13.092.174.764,00	1.060.174.764,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan		13.515.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	12.020.000.000,00	13.002.746.400,00	13.080.174.764,00	1.060.174.764,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.500.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	669.682.850,00	601.349.600,00	590.299.600,00	-79.383.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		730.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.999.600,00	11.101.600,00	11.101.600,00	-898.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	362.799.000,00	300.793.500,00	300.793.500,00	-62.005.500,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			390.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24.988.500,00	21.715.500,00	21.715.500,00	-3.273.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	99.960.000,00	99.960.000,00	99.960.000,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	39.999.750,00	37.843.000,00	26.793.000,00	-13.206.750,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				320 Laporan	320 Laporan	129.936.000,00	129.936.000,00	129.936.000,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			140.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	369.997.500,00	366.487.500,00	366.487.500,00	-3.510.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		450.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			150.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	249.997.500,00	246.487.500,00	246.487.500,00	-3.510.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			300.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 %	100 %	170.156.000,00	263.036.000,00	283.736.000,00	113.580.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Aparatur Kecamatan dan Kelurahan		185.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	73 Unit	60.240.000,00	53.120.000,00	73.820.000,00	13.580.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			65.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	29.960.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			35.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	79.956.000,00	179.956.000,00	179.956.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			85.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Capaian Penyelenggraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**4.512.542.700,00**	**4.469.655.500,00**	**4.236.009.000,00**	**297.457.300,00**							**4.810.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	199.852.750,00	199.852.750,00	199.852.750,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		210.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	8 Laporan	199.852.750,00	199.852.750,00	199.852.750,00	0,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			210.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	1.599.695.150,00	1.599.326.150,00	1.599.326.150,00	-369.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		1.700.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.599.695.150,00	1.599.326.150,00	1.599.326.150,00	-369.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.700.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	2.712.994.800,00	2.670.476.600,00	2.436.830.100,00	-276.164.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		2.900.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	10 Laporan	2.712.994.800,00	2.670.476.600,00	2.436.830.100,00	-276.164.700,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.900.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**289.346.500,00**	**289.346.500,00**	**219.652.500,00**	**16.653.500,00**							**306.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				2 Perda	2 Perda	244.535.950,00	244.535.950,00	174.841.950,00	-69.694.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		256.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	139.994.950,00	139.994.950,00	139.994.950,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			141.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	104.541.000,00	104.541.000,00	34.847.000,00	-69.694.000,00	Kota Depok, Sawangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			115.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				2 Perda	2 Perda	44.810.550,00	44.810.550,00	44.810.550,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN dan Masyarakat		50.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				3 Laporan	3 Laporan	44.810.550,00	44.810.550,00	44.810.550,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
		KELURAHAN SAWANGAN							**0,00**	**2.867.249.400,00**	**2.675.301.300,00**	**2.675.301.300,00**							**3.300.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.867.249.400,00**	**2.675.301.300,00**	**2.675.301.300,00**							**3.300.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.867.249.400,00**	**2.675.301.300,00**	**2.675.301.300,00**							**3.300.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.867.249.400,00**	**2.675.301.300,00**	**3.300.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas / Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.867.249.400,00	2.675.301.300,00	2.675.301.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.300.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.142.757.000,00	1.122.489.900,00	1.122.489.900,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.724.492.400,00	1.552.811.400,00	1.552.811.400,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BEDAHAN							**0,00**	**3.473.418.900,00**	**3.256.181.100,00**	**3.256.181.100,00**							**3.700.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.473.418.900,00**	**3.256.181.100,00**	**3.256.181.100,00**							**3.700.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.473.418.900,00**	**3.256.181.100,00**	**3.256.181.100,00**							**3.700.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.473.418.900,00**	**3.256.181.100,00**	**3.700.000.000,00**							**3.700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.473.418.900,00	3.256.181.100,00	3.256.181.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.700.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.534.915.000,00	1.379.792.200,00	1.379.792.200,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.938.503.900,00	1.876.388.900,00	1.876.388.900,00	Kota Depok, Sawangan, Bedahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.100.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KEDAUNG							**0,00**	**2.840.064.400,00**	**2.629.164.400,00**	**2.629.164.400,00**							**3.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.840.064.400,00**	**2.629.164.400,00**	**2.629.164.400,00**							**3.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.840.064.400,00**	**2.629.164.400,00**	**2.629.164.400,00**							**3.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.840.064.400,00**	**2.629.164.400,00**	**3.200.000.000,00**							**3.200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.840.064.400,00	2.629.164.400,00	2.629.164.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.200.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	4 Unit	0,00	1.516.433.000,00	1.340.333.000,00	1.340.333.000,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.323.631.400,00	1.288.831.400,00	1.288.831.400,00	Kota Depok, Sawangan, Kedaung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PASIR PUTIH							**0,00**	**3.310.890.850,00**	**3.132.173.850,00**	**3.132.173.850,00**							**3.550.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.310.890.850,00**	**3.132.173.850,00**	**3.132.173.850,00**							**3.550.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.310.890.850,00**	**3.132.173.850,00**	**3.132.173.850,00**							**3.550.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.310.890.850,00**	**3.132.173.850,00**	**3.550.000.000,00**							**3.550.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas / Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.310.890.850,00	3.132.173.850,00	3.132.173.850,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.550.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	5 Unit	0,00	1.488.975.400,00	1.388.975.400,00	1.388.975.400,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.550.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.821.915.450,00	1.743.198.450,00	1.743.198.450,00	Kota Depok, Sawangan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.000.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SAWANGAN BARU							**0,00**	**2.875.937.500,00**	**2.696.859.500,00**	**2.696.859.500,00**							**3.300.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.875.937.500,00**	**2.696.859.500,00**	**2.696.859.500,00**							**3.300.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.875.937.500,00**	**2.696.859.500,00**	**2.696.859.500,00**							**3.300.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.875.937.500,00**	**2.696.859.500,00**	**3.300.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas / Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.875.937.500,00	2.696.859.500,00	2.696.859.500,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.300.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.338.050.500,00	1.258.442.500,00	1.258.442.500,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	1.537.887.000,00	1.438.417.000,00	1.438.417.000,00	Kota Depok, Sawangan, Sawangan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.700.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CINANGKA							**0,00**	**3.304.450.000,00**	**3.095.939.800,00**	**3.095.939.800,00**							**3.400.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.304.450.000,00**	**3.095.939.800,00**	**3.095.939.800,00**							**3.400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.304.450.000,00**	**3.095.939.800,00**	**3.095.939.800,00**							**3.400.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.304.450.000,00**	**3.095.939.800,00**	**3.400.000.000,00**							**3.400.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas / Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.304.450.000,00	3.095.939.800,00	3.095.939.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.400.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.408.785.000,00	1.327.594.800,00	1.327.594.800,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.500.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.895.665.000,00	1.768.345.000,00	1.768.345.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.900.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PENGASINAN							**0,00**	**3.347.920.400,00**	**3.184.472.900,00**	**3.184.472.900,00**							**3.700.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.347.920.400,00**	**3.184.472.900,00**	**3.184.472.900,00**							**3.700.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.347.920.400,00**	**3.184.472.900,00**	**3.184.472.900,00**							**3.700.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.347.920.400,00**	**3.184.472.900,00**	**3.700.000.000,00**							**3.700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas / Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.347.920.400,00	3.184.472.900,00	3.184.472.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Umum		3.700.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.337.941.000,00	1.337.941.000,00	1.337.941.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.400.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	2.009.979.400,00	1.846.531.900,00	1.846.531.900,00	Kota Depok, Sawangan, Pengasinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.300.000.000,00	KECAMATAN SAWANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN CINERE							**24.161.580.865,00**	**11.848.826.095,00**	**11.979.901.668,00**	**-12.181.679.197,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**24.161.580.865,00**	**11.848.826.095,00**	**11.979.901.668,00**	**-12.181.679.197,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**24.161.580.865,00**	**11.848.826.095,00**	**11.979.901.668,00**	**-12.181.679.197,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan pemda**				**100 Persen**	**100 Persen**	**9.244.508.265,00**	**9.788.921.845,00**	**9.932.563.418,00**	**-9.244.508.265,00**							**0,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemda*				100 Persen	100 Persen	39.829.750,00	39.829.200,00	38.929.200,00	-900.550,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	24.689.750,00	24.689.600,00	23.789.600,00	-900.150,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	15.140.000,00	15.139.600,00	15.139.600,00	-400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	8.150.640.815,00	8.696.126.195,00	8.865.449.768,00	714.808.953,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	8.150.640.815,00	8.696.126.195,00	8.865.449.768,00	714.808.953,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	389.197.700,00	388.926.450,00	381.944.450,00	-7.253.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.945.000,00	14.945.000,00	14.945.000,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2 Paket	136.055.800,00	136.055.800,00	136.055.800,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.956.000,00	19.956.000,00	19.956.000,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	99.580.000,00	99.580.000,00	61.990.000,00	-37.590.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.684.900,00	27.684.650,00	27.684.650,00	-250,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	90.976.000,00	90.705.000,00	121.313.000,00	30.337.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	537.970.000,00	537.970.000,00	537.970.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	333.970.000,00	333.970.000,00	333.970.000,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*undefined*				undefined undefined	undefined undefined	126.870.000,00	126.070.000,00	108.270.000,00	-18.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				22 Unit	22 Unit	47.600.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	-800.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	14.910.000,00	14.910.000,00	14.910.000,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	1 Unit	64.360.000,00	64.360.000,00	46.560.000,00	-17.800.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.004.409.750,00**	**1.842.514.500,00**	**1.829.948.500,00**	**-2.004.409.750,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*				5 Laporan	5 Laporan	99.999.200,00	99.999.200,00	99.999.200,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	99.999.200,00	99.999.200,00	99.999.200,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*				4 Kelurahan	4 Kelurahan	797.347.300,00	796.872.900,00	796.872.900,00	-474.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Kelurahan Se Kecamatan Cinere		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	797.347.300,00	796.872.900,00	796.872.900,00	-474.400,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah peyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik*				7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.107.063.250,00	945.642.400,00	933.076.400,00	-173.986.850,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Cinere		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				7 Laporan	7 Laporan	1.107.063.250,00	945.642.400,00	933.076.400,00	-173.986.850,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase ketenteraman dan ketertiban umum**				**100 Persen**	**100 Persen**	**223.689.750,00**	**217.389.750,00**	**217.389.750,00**	**-223.689.750,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase ketenteraman dan ketertiban umum*				100 Persen	100 Persen	187.689.750,00	187.389.750,00	187.389.750,00	-300.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	139.834.950,00	139.534.950,00	139.534.950,00	-300.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	47.854.800,00	47.854.800,00	47.854.800,00	0,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan penegakan perda dan perwal*				100 Persen	100 Persen	36.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-6.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	36.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	-6.000.000,00	Kota Depok, Cinere, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
		KELURAHAN PANGKALAN JATI BARU							**0,00**	**2.637.702.900,00**	**2.410.070.900,00**	**2.410.070.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.637.702.900,00**	**2.410.070.900,00**	**2.410.070.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.637.702.900,00**	**2.410.070.900,00**	**2.410.070.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pencapaian Kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.637.702.900,00**	**2.410.070.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Pencapaian Kegiatan*				100 %	100 %	0,00	2.637.702.900,00	2.410.070.900,00	2.410.070.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Cinere		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	981.739.000,00	946.339.000,00	946.339.000,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				32 Pokmas / Ormas	32 Pokmas / Ormas	0,00	1.655.963.900,00	1.463.731.900,00	1.463.731.900,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PANGKALAN JATI							**0,00**	**2.774.046.400,00**	**2.538.474.900,00**	**2.538.474.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.774.046.400,00**	**2.538.474.900,00**	**2.538.474.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.774.046.400,00**	**2.538.474.900,00**	**2.538.474.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pencapaian Kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.774.046.400,00**	**2.538.474.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Pencapaian Kegiatan*				100 %	100 %	0,00	2.774.046.400,00	2.538.474.900,00	2.538.474.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Cinere		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.247.915.000,00	1.221.045.500,00	1.221.045.500,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				16 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	1.526.131.400,00	1.317.429.400,00	1.317.429.400,00	Kota Depok, Cinere, Pangkalan Jati	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CINERE							**0,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pencapaian Kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.396.092.900,00**	**3.396.092.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksananya Jumlah Kegiatan*				33 Kegiatan	33 Kegiatan	0,00	3.396.092.900,00	3.396.092.900,00	3.396.092.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Cinere		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.482.260.000,00	1.482.260.000,00	1.482.260.000,00	Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				18 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	0,00	1.913.832.900,00	1.913.832.900,00	1.913.832.900,00	Kota Depok, Cinere, Cinere	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN GANDUL							**0,00**	**2.868.365.400,00**	**2.556.363.400,00**	**2.556.363.400,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.868.365.400,00**	**2.556.363.400,00**	**2.556.363.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.868.365.400,00**	**2.556.363.400,00**	**2.556.363.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pencapaian Kegiatan**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.868.365.400,00**	**2.556.363.400,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terlaksanannya Jumlah Kegiatan*				100 %	100 %	0,00	2.868.365.400,00	2.556.363.400,00	2.556.363.400,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat Se Kecamatan Cinere		0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.402.872.500,00	1.367.472.500,00	1.367.472.500,00	Kota Depok, Cinere, Gandul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				29 Pokmas / Ormas	29 Pokmas / Ormas	0,00	1.465.492.900,00	1.188.890.900,00	1.188.890.900,00	Kota Depok, Cinere, Gandul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN CINERE
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN SUKMAJAYA							**43.984.853.690,00**	**18.654.651.330,00**	**17.770.933.392,00**	**-26.213.920.298,00**							**18.148.275.720,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**43.984.853.690,00**	**18.654.651.330,00**	**17.770.933.392,00**	**-26.213.920.298,00**							**18.148.275.720,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**43.984.853.690,00**	**18.654.651.330,00**	**17.770.933.392,00**	**-26.213.920.298,00**							**18.148.275.720,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**13.949.172.140,00**	**14.366.710.930,00**	**13.301.992.992,00**	**824.127.860,00**							**14.773.300.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen pendukung SAKIP.*				100 %	100 %	72.385.500,00	72.385.500,00	72.385.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		83.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	42.385.500,00	42.385.500,00	42.385.500,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			50.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase adm keuangann tepat waktu*				100 %	100 %	12.328.352.540,00	12.745.929.330,00	11.639.911.392,00	-688.441.148,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		13.152.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	12.308.352.840,00	12.725.929.630,00	11.619.911.692,00	-688.441.148,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.130.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	19.999.700,00	19.999.700,00	19.999.700,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			22.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 % 100 Jenis	100 % 100 Jenis	927.392.300,00	927.354.300,00	986.654.300,00	59.262.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		698.500.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	27.778.000,00	27.778.000,00	27.778.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			33.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				60 Paket	60 Paket	552.340.500,00	552.340.500,00	552.340.500,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			275.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	39.987.800,00	39.987.800,00	39.987.800,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	140.000.000,00	30.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			121.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			82.500.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	122.286.000,00	122.248.000,00	151.548.000,00	29.262.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			143.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	478.300.800,00	478.300.800,00	460.300.800,00	-18.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		665.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	162.000.000,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			165.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	298.300.800,00	298.300.800,00	298.300.800,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	142.741.000,00	142.741.000,00	142.741.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		174.800.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 Unit	30 Unit	60.800.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			75.800.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	29.965.000,00	29.965.000,00	29.965.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			44.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	51.976.000,00	51.976.000,00	51.976.000,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			55.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**4.045.348.600,00**	**3.968.042.300,00**	**4.149.042.300,00**	**-1.140.556.880,00**							**2.904.791.720,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	149.573.500,00	149.573.500,00	149.573.500,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		178.169.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	149.573.500,00	149.573.500,00	149.573.500,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			178.169.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	1.501.672.400,00	1.501.672.400,00	1.606.672.400,00	105.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.726.622.720,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				72 Laporan	72 Laporan	1.501.672.400,00	1.501.672.400,00	1.606.672.400,00	105.000.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.726.622.720,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	2.394.102.700,00	2.316.796.400,00	2.392.796.400,00	-1.306.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		1.000.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	2.394.102.700,00	2.316.796.400,00	2.392.796.400,00	-1.306.300,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**319.898.550,00**	**319.898.100,00**	**319.898.100,00**	**150.285.450,00**							**470.184.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 Perda	2 Perda	274.898.600,00	274.898.600,00	274.898.600,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		415.184.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan	154.999.400,00	154.999.400,00	154.999.400,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			111.918.400,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	119.899.200,00	119.899.200,00	119.899.200,00	0,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			303.265.600,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 Perda	2 Perda	44.999.950,00	44.999.500,00	44.999.500,00	-450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		55.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	44.999.950,00	44.999.500,00	44.999.500,00	-450,00	Kota Depok, Sukmajaya, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
		KELURAHAN MEKARJAYA							**0,00**	**5.247.460.900,00**	**5.171.361.900,00**	**5.171.361.900,00**							**5.400.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**5.247.460.900,00**	**5.171.361.900,00**	**5.171.361.900,00**							**5.400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**5.247.460.900,00**	**5.171.361.900,00**	**5.171.361.900,00**							**5.400.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**5.247.460.900,00**	**5.171.361.900,00**	**5.400.000.000,00**							**5.400.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	5.247.460.900,00	5.171.361.900,00	5.171.361.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		5.400.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	0,00	1.578.635.000,00	1.578.635.000,00	1.578.635.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				20 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	0,00	3.668.825.900,00	3.592.726.900,00	3.592.726.900,00	Kota Depok, Sukmajaya, Mekar Jaya	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.800.000.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CISALAK							**0,00**	**3.088.149.350,00**	**2.917.747.350,00**	**2.917.747.350,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.088.149.350,00**	**2.917.747.350,00**	**2.917.747.350,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.088.149.350,00**	**2.917.747.350,00**	**2.917.747.350,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.088.149.350,00**	**2.917.747.350,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.088.149.350,00	2.917.747.350,00	2.917.747.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.124.413.300,00	1.047.135.000,00	1.047.135.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	1.963.736.050,00	1.870.612.350,00	1.870.612.350,00	Kota Depok, Sukmajaya, Cisalak	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN ABADIJAYA							**0,00**	**4.548.921.900,00**	**4.366.788.900,00**	**4.366.788.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**4.548.921.900,00**	**4.366.788.900,00**	**4.366.788.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**4.548.921.900,00**	**4.366.788.900,00**	**4.366.788.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**4.548.921.900,00**	**4.366.788.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	4.548.921.900,00	4.366.788.900,00	4.366.788.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	0,00	1.001.491.000,00	996.010.000,00	996.010.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	0,00	3.547.430.900,00	3.370.778.900,00	3.370.778.900,00	Kota Depok, Sukmajaya, Abadi Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN TIRTAJAYA							**0,00**	**3.112.823.850,00**	**2.960.594.900,00**	**2.960.594.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.112.823.850,00**	**2.960.594.900,00**	**2.960.594.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.112.823.850,00**	**2.960.594.900,00**	**2.960.594.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.112.823.850,00**	**2.960.594.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.112.823.850,00	2.960.594.900,00	2.960.594.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	11 Unit	0,00	904.932.000,00	904.932.000,00	904.932.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	18 Pokmas / Ormas	0,00	2.207.891.850,00	2.055.662.900,00	2.055.662.900,00	Kota Depok, Sukmajaya, Tirtajaya	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUKMAJAYA							**0,00**	**3.372.302.750,00**	**3.255.285.250,00**	**3.255.285.250,00**							**3.364.780.250,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.372.302.750,00**	**3.255.285.250,00**	**3.255.285.250,00**							**3.364.780.250,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.372.302.750,00**	**3.255.285.250,00**	**3.255.285.250,00**							**3.364.780.250,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.372.302.750,00**	**3.255.285.250,00**	**3.364.780.250,00**							**3.364.780.250,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.372.302.750,00	3.255.285.250,00	3.255.285.250,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.364.780.250,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	0,00	1.305.307.000,00	1.305.307.000,00	1.305.307.000,00	Kota Depok, Sukmajaya, Sukmajaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.414.801.000,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	0,00	2.066.995.750,00	1.949.978.250,00	1.949.978.250,00	-	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.949.979.250,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BAKTIJAYA							**0,00**	**4.822.192.900,00**	**4.658.872.600,00**	**4.658.872.600,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**4.822.192.900,00**	**4.658.872.600,00**	**4.658.872.600,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**4.822.192.900,00**	**4.658.872.600,00**	**4.658.872.600,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**4.822.192.900,00**	**4.658.872.600,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	4.822.192.900,00	4.658.872.600,00	4.658.872.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				33 Unit	15 Unit	0,00	1.177.746.300,00	1.177.746.300,00	1.177.746.300,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	3.644.446.600,00	3.481.126.300,00	3.481.126.300,00	Kota Depok, Sukmajaya, Baktijaya	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN SUKMAJAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN LIMO							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**70 %**	**70 %**	**9.192.928.772,00**	**9.421.115.361,00**	**9.834.778.336,00**	**4.363.571.228,00**							**13.556.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Pendukung SAKIP*				100 %	100 %	31.603.000,00	31.211.000,00	31.211.000,00	-392.000,00			-	- -	-		38.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	23.368.000,00	23.136.000,00	23.136.000,00	-232.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			28.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				19 Laporan	19 Laporan	8.235.000,00	8.075.000,00	8.075.000,00	-160.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			10.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	7.917.598.872,00	8.146.177.461,00	8.533.340.446,00	615.741.574,00			-	- -	-		12.000.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	0,00	8.146.177.461,00	8.533.340.446,00	8.533.340.446,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			12.000.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7	**NON URUSAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	283.896.900,00	283.896.900,00	283.896.900,00	0,00			-	- -	-		241.500.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	7.243.000,00	7.243.000,00	7.243.000,00	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			8.500.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	24 Paket	97.285.200,00	97.285.200,00	97.285.200,00	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			26.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	22.323.500,00	22.323.500,00	22.323.500,00	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			30.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.420.000,00	54.420.000,00	54.420.000,00	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			60.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7	**NON URUSAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	10.225.200,00	0,00	0,00	-10.225.200,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LIMO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	2 Paket	0,00	10.225.200,00	10.225.200,00	10.225.200,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			17.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	92.400.000,00	92.400.000,00	92.400.000,00	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			100.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	762.990.000,00	762.990.000,00	766.490.000,00	3.500.000,00			-	- -	-		912.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54.000.000,00	54.000.000,00	57.500.000,00	3.500.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			62.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	3 Laporan	708.990.000,00	708.990.000,00	708.990.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			850.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 %	100 %	196.840.000,00	196.840.000,00	219.839.990,00	22.999.990,00			-	- -	-		365.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	12 Unit	74.080.000,00	74.080.000,00	97.079.990,00	22.999.990,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			80.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7	**NON URUSAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	22.760.000,00	0,00	0,00	-22.760.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			0,00	KECAMATAN LIMO
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**25.737.222.072,00**	**12.683.830.161,00**	**12.886.282.536,00**	**-12.850.939.536,00**							**16.466.500.000,00**	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				-	1 Unit	0,00	22.760.000,00	22.760.000,00	22.760.000,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			25.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			260.000.000,00	KECAMATAN LIMO
1.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**80 %**	**80 %**	**2.932.508.800,00**	**2.925.525.100,00**	**2.727.165.000,00**	**-452.508.800,00**							**2.480.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	137.346.000,00	131.376.600,00	131.376.600,00	-5.969.400,00			-	- -	-		260.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				19 Laporan	19 Laporan	137.346.000,00	131.376.600,00	131.376.600,00	-5.969.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			260.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	533.272.000,00	533.272.000,00	533.272.000,00	0,00			-	- -	-		720.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	533.272.000,00	533.272.000,00	533.272.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			720.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	2.261.890.800,00	2.260.876.500,00	2.062.516.400,00	-199.374.400,00			-	- -	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				6 Laporan	6 Laporan	2.261.890.800,00	2.260.876.500,00	2.062.516.400,00	-199.374.400,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN LIMO
2.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**337.528.000,00**	**337.189.700,00**	**324.339.200,00**	**92.472.000,00**							**430.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penegakan Perda / Perwal*				2 Perda	2 Perda	337.528.000,00	337.189.700,00	324.339.200,00	-13.188.800,00			-	- -	-		430.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	188.800.000,00	188.800.000,00	188.800.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			180.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	148.728.000,00	148.389.700,00	135.539.200,00	-13.188.800,00	Kota Depok, Limo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			250.000.000,00	KECAMATAN LIMO
		KELURAHAN LIMO							**0,00**	**3.467.340.700,00**	**3.338.154.300,00**	**3.338.154.300,00**							**4.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.467.340.700,00**	**3.338.154.300,00**	**3.338.154.300,00**							**4.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.467.340.700,00**	**3.338.154.300,00**	**3.338.154.300,00**							**4.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**78 %**	**78 %**	**0,00**	**3.467.340.700,00**	**3.338.154.300,00**	**4.000.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/ pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.467.340.700,00	3.338.154.300,00	3.338.154.300,00			-	- -	-		4.000.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	1.275.605.900,00	1.275.605.900,00	1.275.605.900,00	Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.500.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	2.191.734.800,00	2.062.548.400,00	2.062.548.400,00	Kota Depok, Limo, Limo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.500.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN GROGOL							**0,00**	**3.167.754.400,00**	**3.041.709.400,00**	**3.041.709.400,00**							**3.700.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.167.754.400,00**	**3.041.709.400,00**	**3.041.709.400,00**							**3.700.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.167.754.400,00**	**3.041.709.400,00**	**3.041.709.400,00**							**3.700.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercepai**				**78 %**	**78 %**	**0,00**	**3.167.754.400,00**	**3.041.709.400,00**	**3.700.000.000,00**							**3.700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase ormas/ pokmas yang dberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.167.754.400,00	3.041.709.400,00	3.041.709.400,00			-	- -	-		3.700.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.001.510.000,00	1.001.510.000,00	1.001.510.000,00	Kota Depok, Limo, Grogol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.100.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	2.166.244.400,00	2.040.199.400,00	2.040.199.400,00	Kota Depok, Limo, Grogol	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.600.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KRUKUT							**0,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**							**3.400.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**							**3.400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**							**3.400.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercepai**				**78 %**	**78 %**	**0,00**	**2.681.140.400,00**	**2.681.140.400,00**	**3.400.000.000,00**							**3.400.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase ormas/ pokmas yang dberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.681.140.400,00	2.681.140.400,00	2.681.140.400,00			-	- -	-		3.400.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	1.270.159.000,00	1.270.159.000,00	1.270.159.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.400.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.410.981.400,00	1.410.981.400,00	1.410.981.400,00	Kota Depok, Limo, Krukut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.000.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MERUYUNG							**0,00**	**3.072.401.750,00**	**2.921.752.350,00**	**2.921.752.350,00**							**3.500.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.072.401.750,00**	**2.921.752.350,00**	**2.921.752.350,00**							**3.500.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.072.401.750,00**	**2.921.752.350,00**	**2.921.752.350,00**							**3.500.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat yang tercepai**				**78 %**	**78 %**	**0,00**	**3.072.401.750,00**	**2.921.752.350,00**	**3.500.000.000,00**							**3.500.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*persentase ormas/ pokmas yang dberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.072.401.750,00	2.921.752.350,00	2.921.752.350,00			-	- -	-		3.500.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.075.775.000,00	1.075.775.000,00	1.075.775.000,00	Kota Depok, Limo, Maruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.200.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.996.626.750,00	1.845.977.350,00	1.845.977.350,00	Kota Depok, Limo, Maruyung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			2.300.000.000,00	KECAMATAN LIMO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN BEJI							**37.945.570.544,00**	**18.454.782.165,00**	**18.780.910.613,00**	**-19.164.659.931,00**							**15.268.016.884,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.945.570.544,00**	**18.454.782.165,00**	**18.780.910.613,00**	**-19.164.659.931,00**							**15.268.016.884,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.945.570.544,00**	**18.454.782.165,00**	**18.780.910.613,00**	**-19.164.659.931,00**							**15.268.016.884,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**12.211.401.344,00**	**12.495.426.165,00**	**12.675.160.613,00**	**-121.710.200,00**							**12.089.691.144,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Pendukung SAKIP*				100 %	100 %	50.991.000,00	50.991.000,00	50.991.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		51.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	44.991.000,00	44.991.000,00	44.991.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangann Tepat Waktu*				100 %	100 %	10.477.151.144,00	10.761.311.965,00	10.958.062.413,00	480.911.269,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		10.477.151.144,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	10.471.151.144,00	10.755.311.965,00	10.952.062.413,00	480.911.269,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			10.471.151.144,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			6.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	957.623.200,00	957.487.200,00	955.831.200,00	-1.792.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		835.500.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	11.957.000,00	11.899.000,00	11.899.000,00	-58.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	622.393.200,00	622.315.200,00	620.659.200,00	-1.734.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			500.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	17.484.000,00	17.484.000,00	17.484.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			17.500.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	54.876.000,00	54.876.000,00	54.876.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			55.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	51.000.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			51.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				540 Laporan	540 Laporan	199.913.000,00	199.913.000,00	199.913.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	408.300.000,00	408.300.000,00	392.560.000,00	-15.740.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		408.400.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	132.000.000,00	32.000.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	308.300.000,00	308.300.000,00	260.560.000,00	-47.740.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			308.400.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 %	100 %	317.336.000,00	317.336.000,00	317.716.000,00	380.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN		317.640.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	82.640.000,00	82.640.000,00	83.020.000,00	380.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			82.640.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	24.870.000,00	24.870.000,00	24.870.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	209.826.000,00	209.826.000,00	209.826.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			210.000.000,00	KECAMATAN BEJI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**				**100 %**	**100 %**	**5.662.543.500,00**	**5.648.869.500,00**	**5.695.363.500,00**	**-2.694.717.760,00**							**2.967.825.740,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	144.978.000,00	144.978.000,00	144.978.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		145.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	144.978.000,00	144.978.000,00	144.978.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			145.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	1.199.937.400,00	1.199.937.400,00	1.246.431.400,00	46.494.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.200.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	12 Laporan	1.199.937.400,00	1.199.937.400,00	1.246.431.400,00	46.494.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.200.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	4.317.628.100,00	4.303.954.100,00	4.303.954.100,00	-13.674.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.622.825.740,00	KECAMATAN BEJI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				5 Laporan	5 Laporan	4.317.628.100,00	4.303.954.100,00	4.303.954.100,00	-13.674.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.622.825.740,00	KECAMATAN BEJI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**310.486.500,00**	**310.486.500,00**	**410.386.500,00**	**-99.986.500,00**							**210.500.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				2 Perda	2 Perda	278.987.500,00	278.987.500,00	378.887.500,00	99.900.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		179.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	181.987.500,00	181.987.500,00	281.887.500,00	99.900.000,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			82.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			97.000.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				2 Perda	2 Perda	31.499.000,00	31.499.000,00	31.499.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		31.500.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	31.499.000,00	31.499.000,00	31.499.000,00	0,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			31.500.000,00	KECAMATAN BEJI
		KELURAHAN KUKUSAN							**0,00**	**2.811.853.750,00**	**2.581.502.650,00**	**2.581.502.650,00**							**3.087.400.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.811.853.750,00**	**2.581.502.650,00**	**2.581.502.650,00**							**3.087.400.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.811.853.750,00**	**2.581.502.650,00**	**2.581.502.650,00**							**3.087.400.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.811.853.750,00**	**2.581.502.650,00**	**3.087.400.000,00**							**3.087.400.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.811.853.750,00	2.581.502.650,00	2.581.502.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.087.400.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.259.785.200,00	1.171.969.100,00	1.171.969.100,00	Kota Depok, Beji, Kukusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.259.785.200,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.552.068.550,00	1.409.533.550,00	1.409.533.550,00	Kota Depok, Beji, Kukusan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.827.614.800,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN TANAH BARU							**0,00**	**3.377.423.400,00**	**3.202.472.450,00**	**3.202.472.450,00**							**3.643.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.377.423.400,00**	**3.202.472.450,00**	**3.202.472.450,00**							**3.643.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.377.423.400,00**	**3.202.472.450,00**	**3.202.472.450,00**							**3.643.600.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.377.423.400,00**	**3.202.472.450,00**	**3.643.600.000,00**							**3.643.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.377.423.400,00	3.202.472.450,00	3.202.472.450,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.643.600.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.194.670.000,00	1.194.670.000,00	1.194.670.000,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.194.670.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	2.182.753.400,00	2.007.802.450,00	2.007.802.450,00	Kota Depok, Beji, Tanah Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.448.930.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN KEMIRI MUKA							**0,00**	**3.339.402.250,00**	**2.916.829.100,00**	**2.916.829.100,00**							**3.614.800.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.339.402.250,00**	**2.916.829.100,00**	**2.916.829.100,00**							**3.614.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.339.402.250,00**	**2.916.829.100,00**	**2.916.829.100,00**							**3.614.800.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.339.402.250,00**	**2.916.829.100,00**	**3.614.800.000,00**							**3.614.800.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.339.402.250,00	2.916.829.100,00	2.916.829.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.614.800.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.248.840.700,00	1.001.334.400,00	1.001.334.400,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.248.840.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	2.090.561.550,00	1.915.494.700,00	1.915.494.700,00	Kota Depok, Beji, Kemiri Muka	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.365.960.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BEJI							**0,00**	**3.627.519.000,00**	**3.400.519.100,00**	**3.400.519.100,00**							**3.896.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.627.519.000,00**	**3.400.519.100,00**	**3.400.519.100,00**							**3.896.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.627.519.000,00**	**3.400.519.100,00**	**3.400.519.100,00**							**3.896.200.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.627.519.000,00**	**3.400.519.100,00**	**3.896.200.000,00**							**3.896.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.627.519.000,00	3.400.519.100,00	3.400.519.100,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		3.896.200.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.053.263.300,00	998.003.900,00	998.003.900,00	Kota Depok, Beji, Beji	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.053.263.300,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	2.574.255.700,00	2.402.515.200,00	2.402.515.200,00	Kota Depok, Beji, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.842.936.700,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PONDOK CINA							**0,00**	**2.319.808.600,00**	**2.117.025.900,00**	**2.117.025.900,00**							**2.998.600.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.319.808.600,00**	**2.117.025.900,00**	**2.117.025.900,00**							**2.998.600.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.319.808.600,00**	**2.117.025.900,00**	**2.117.025.900,00**							**2.998.600.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.319.808.600,00**	**2.117.025.900,00**	**2.998.600.000,00**							**2.998.600.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.319.808.600,00	2.117.025.900,00	2.117.025.900,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		2.998.600.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	994.499.100,00	901.309.100,00	901.309.100,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.422.141.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.325.309.500,00	1.215.716.800,00	1.215.716.800,00	Kota Depok, Beji, Pondok Cina	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.576.459.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BEJI TIMUR							**0,00**	**2.669.110.000,00**	**2.348.666.550,00**	**2.348.666.550,00**							**2.942.200.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.669.110.000,00**	**2.348.666.550,00**	**2.348.666.550,00**							**2.942.200.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.669.110.000,00**	**2.348.666.550,00**	**2.348.666.550,00**							**2.942.200.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.669.110.000,00**	**2.348.666.550,00**	**2.942.200.000,00**							**2.942.200.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang Diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.669.110.000,00	2.348.666.550,00	2.348.666.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		2.942.200.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	753.780.000,00	698.873.900,00	698.873.900,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			753.780.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.915.330.000,00	1.649.792.650,00	1.649.792.650,00	Kota Depok, Beji, Beji Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.188.420.000,00	KECAMATAN BEJI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN TAPOS							**43.840.915.798,00**	**18.042.859.632,00**	**17.887.283.932,00**	**-25.953.631.866,00**							**17.373.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**43.840.915.798,00**	**18.042.859.632,00**	**17.887.283.932,00**	**-25.953.631.866,00**							**17.373.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**43.840.915.798,00**	**18.042.859.632,00**	**17.887.283.932,00**	**-25.953.631.866,00**							**17.373.000.000,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**14.110.561.199,00**	**14.506.600.482,00**	**14.512.673.482,00**	**344.438.801,00**							**14.455.000.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen pendukung SAKIP.*				100 %	100 %	58.749.800,00	58.749.800,00	58.749.800,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		20.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	19.149.800,00	19.149.800,00	19.149.800,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			20.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	39.600.000,00	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	12.392.894.849,00	12.688.934.132,00	12.768.934.132,00	376.039.283,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		13.012.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	12.382.892.149,00	12.678.931.482,00	12.758.931.482,00	376.039.333,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			13.000.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	10.002.700,00	10.002.650,00	10.002.650,00	-50,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			12.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	585.486.950,00	585.486.950,00	570.211.950,00	-15.275.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		483.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	19.998.200,00	19.998.200,00	19.998.200,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			21.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Paket	33 Paket	252.800.000,00	252.800.000,00	252.800.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			120.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	13.046.000,00	13.046.000,00	13.046.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			14.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	112.504.000,00	112.504.000,00	97.229.000,00	-15.275.000,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	37.138.750,00	37.138.750,00	37.138.750,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			38.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Laporan	250 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			160.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	883.579.600,00	883.579.600,00	883.579.600,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		650.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	358.000.000,00	358.000.000,00	358.000.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	525.579.600,00	525.579.600,00	525.579.600,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			550.000.000,00	KECAMATAN TAPOS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 %	100 %	189.850.000,00	289.850.000,00	231.198.000,00	41.348.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		290.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	90.140.000,00	90.140.000,00	49.340.000,00	-40.800.000,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			100.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	48.100.000,00	48.100.000,00	30.248.000,00	-17.852.000,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			60.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	51.610.000,00	151.610.000,00	151.610.000,00	100.000.000,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**3.469.543.550,00**	**3.349.556.800,00**	**3.169.328.800,00**	**-669.543.550,00**							**2.800.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	185.490.650,00	185.490.650,00	185.490.650,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		200.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				8 Laporan	8 Laporan	185.490.650,00	185.490.650,00	185.490.650,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			200.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	1.358.536.150,00	1.356.098.150,00	1.356.098.150,00	-2.438.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.600.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.358.536.150,00	1.356.098.150,00	1.356.098.150,00	-2.438.000,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	1.925.516.750,00	1.807.968.000,00	1.627.740.000,00	-297.776.750,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		1.000.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				20 Laporan	20 Laporan	1.925.516.750,00	1.807.968.000,00	1.627.740.000,00	-297.776.750,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.000.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**186.702.350,00**	**186.702.350,00**	**205.281.650,00**	**-68.702.350,00**							**118.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				100 %	100 %	156.702.350,00	156.702.350,00	175.281.650,00	18.579.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		93.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	5 Laporan	133.754.600,00	133.754.600,00	163.807.600,00	30.053.000,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			70.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	22.947.750,00	22.947.750,00	11.474.050,00	-11.473.700,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			23.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan Penegakan Perda/Perwal*				-	100 %	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat		25.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				10 Laporan	10 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Depok, Tapos, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			25.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
		KELURAHAN TAPOS							**0,00**	**3.036.356.900,00**	**2.900.068.900,00**	**2.900.068.900,00**							**2.700.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.036.356.900,00**	**2.900.068.900,00**	**2.900.068.900,00**							**2.700.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.036.356.900,00**	**2.900.068.900,00**	**2.900.068.900,00**							**2.700.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.036.356.900,00**	**2.900.068.900,00**	**2.700.000.000,00**							**2.700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	3.036.356.900,00	2.900.068.900,00	2.900.068.900,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		2.700.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.445.804.000,00	1.328.645.000,00	1.328.645.000,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.500.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	1.590.552.900,00	1.571.423.900,00	1.571.423.900,00	Kota Depok, Tapos, Tapos	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.200.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN JATIJAJAR							**0,00**	**3.316.103.050,00**	**3.183.738.400,00**	**3.183.738.400,00**							**1.430.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.316.103.050,00**	**3.183.738.400,00**	**3.183.738.400,00**							**1.430.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.316.103.050,00**	**3.183.738.400,00**	**3.183.738.400,00**							**1.430.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.316.103.050,00**	**3.183.738.400,00**	**1.430.000.000,00**							**1.430.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	3.316.103.050,00	3.183.738.400,00	3.183.738.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		1.430.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.282.688.000,00	1.282.688.000,00	1.282.688.000,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.300.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	2.033.415.050,00	1.901.050.400,00	1.901.050.400,00	Kota Depok, Tapos, Jatijajar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			130.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CILANGKAP							**0,00**	**3.655.146.850,00**	**3.515.521.250,00**	**3.515.521.250,00**							**2.600.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.655.146.850,00**	**3.515.521.250,00**	**3.515.521.250,00**							**2.600.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.655.146.850,00**	**3.515.521.250,00**	**3.515.521.250,00**							**2.600.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.655.146.850,00**	**3.515.521.250,00**	**2.600.000.000,00**							**2.600.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	3.655.146.850,00	3.515.521.250,00	3.515.521.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		2.600.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.159.829.000,00	1.159.829.000,00	1.159.829.000,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.200.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	2.495.317.850,00	2.355.692.250,00	2.355.692.250,00	Kota Depok, Tapos, Cilangkap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.400.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUKAMAJU BARU							**0,00**	**3.289.481.049,00**	**3.177.706.049,00**	**3.177.706.049,00**							**2.700.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.289.481.049,00**	**3.177.706.049,00**	**3.177.706.049,00**							**2.700.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.289.481.049,00**	**3.177.706.049,00**	**3.177.706.049,00**							**2.700.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.289.481.049,00**	**3.177.706.049,00**	**2.700.000.000,00**							**2.700.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	3.289.481.049,00	3.177.706.049,00	3.177.706.049,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		2.700.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.601.995.999,00	1.563.095.999,00	1.563.095.999,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.700.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	1.687.485.050,00	1.614.610.050,00	1.614.610.050,00	Kota Depok, Tapos, Sukamaju Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.000.000.000,00	KECAMATAN TAPOS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SUKATANI							**0,00**	**4.364.592.350,00**	**4.222.968.600,00**	**4.222.968.600,00**							**3.300.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**4.364.592.350,00**	**4.222.968.600,00**	**4.222.968.600,00**							**3.300.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**4.364.592.350,00**	**4.222.968.600,00**	**4.222.968.600,00**							**3.300.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**4.364.592.350,00**	**4.222.968.600,00**	**3.300.000.000,00**							**3.300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	4.364.592.350,00	4.222.968.600,00	4.222.968.600,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		3.300.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.252.122.000,00	1.252.122.000,00	1.252.122.000,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.300.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	3.112.470.350,00	2.970.846.600,00	2.970.846.600,00	Kota Depok, Tapos, Sukatani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			2.000.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN LEUWINANGGUNG							**0,00**	**2.896.896.500,00**	**2.757.096.750,00**	**2.757.096.750,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.896.896.500,00**	**2.757.096.750,00**	**2.757.096.750,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.896.896.500,00**	**2.757.096.750,00**	**2.757.096.750,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.896.896.500,00**	**2.757.096.750,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	2.896.896.500,00	2.757.096.750,00	2.757.096.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.547.315.000,00	1.447.315.000,00	1.447.315.000,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	1.349.581.500,00	1.309.781.750,00	1.309.781.750,00	Kota Depok, Tapos, Leuwinanggung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			0,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CIMPAEUN							**0,00**	**3.532.926.850,00**	**3.388.890.450,00**	**3.388.890.450,00**							**2.400.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.532.926.850,00**	**3.388.890.450,00**	**3.388.890.450,00**							**2.400.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.532.926.850,00**	**3.388.890.450,00**	**3.388.890.450,00**							**2.400.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.532.926.850,00**	**3.388.890.450,00**	**2.400.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai*				100 %	100 %	0,00	3.532.926.850,00	3.388.890.450,00	3.388.890.450,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat	Masyarakat		2.400.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.316.410.000,00	1.316.410.000,00	1.316.410.000,00	Kota Depok, Tapos, Cimpaeun	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat Pemenuhan Derajat Kesehatan Masyarakat			1.200.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	2.216.516.850,00	2.072.480.450,00	2.072.480.450,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penanganan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan Penanganan dan Pengelolaan Sampah Berbasis Kemasyarakatan			1.200.000.000,00	KECAMATAN TAPOS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN BOJONGSARI							**37.468.998.600,00**	**18.553.008.686,00**	**18.545.646.073,00**	**-18.923.352.527,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**37.468.998.600,00**	**18.553.008.686,00**	**18.545.646.073,00**	**-18.923.352.527,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**37.468.998.600,00**	**18.553.008.686,00**	**18.545.646.073,00**	**-18.923.352.527,00**							**0,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**13.483.031.350,00**	**13.729.588.236,00**	**13.932.225.623,00**	**-13.483.031.350,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen pendukung SAKIP*				100 %	100 %	37.499.900,00	37.499.900,00	37.499.900,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	23.499.900,00	23.499.900,00	23.499.900,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*persentase adm keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	12.202.500.000,00	12.349.056.886,00	12.431.888.773,00	229.388.773,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	12.190.000.000,00	12.336.556.886,00	12.419.388.773,00	229.388.773,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	523.345.050,00	523.345.050,00	616.945.050,00	93.600.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	219.172.500,00	219.172.500,00	219.172.500,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	21.899.000,00	21.899.000,00	21.899.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	84.500.000,00	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	53.499.950,00	53.499.950,00	53.499.950,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	300 Laporan	123.273.600,00	123.273.600,00	216.873.600,00	93.600.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*				100 %	100 %	544.236.400,00	544.236.400,00	557.236.400,00	13.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	97.000.000,00	97.000.000,00	110.000.000,00	13.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	447.236.400,00	447.236.400,00	447.236.400,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	175.450.000,00	275.450.000,00	288.655.500,00	113.205.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	55.180.000,00	55.180.000,00	84.385.500,00	29.205.500,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	75 Unit	62.520.000,00	62.520.000,00	62.520.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	57.750.000,00	157.750.000,00	141.750.000,00	84.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**4.590.937.550,00**	**4.500.420.550,00**	**4.290.420.550,00**	**-4.590.937.550,00**							**0,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	270.504.000,00	270.504.000,00	270.504.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				9 Laporan	9 Laporan	270.504.000,00	270.504.000,00	270.504.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	1.669.999.450,00	1.669.999.450,00	1.651.999.450,00	-18.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1.669.999.450,00	1.669.999.450,00	1.651.999.450,00	-18.000.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	2.650.434.100,00	2.559.917.100,00	2.367.917.100,00	-282.517.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	12 Laporan	2.650.434.100,00	2.559.917.100,00	2.367.917.100,00	-282.517.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**322.999.900,00**	**322.999.900,00**	**322.999.900,00**	**-322.999.900,00**							**0,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 Perda	2 Perda	238.999.950,00	238.999.950,00	238.999.950,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	154.999.950,00	154.999.950,00	154.999.950,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 Perda	2 Perda	83.999.950,00	83.999.950,00	83.999.950,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	83.999.950,00	83.999.950,00	83.999.950,00	0,00	Kota Depok, Bojongsari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
		KELURAHAN DUREN MEKAR							**0,00**	**2.948.687.400,00**	**2.739.044.400,00**	**2.739.044.400,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.948.687.400,00**	**2.739.044.400,00**	**2.739.044.400,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.948.687.400,00**	**2.739.044.400,00**	**2.739.044.400,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.948.687.400,00**	**2.739.044.400,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.948.687.400,00	2.739.044.400,00	2.739.044.400,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.351.970.000,00	1.351.970.000,00	1.351.970.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.596.717.400,00	1.387.074.400,00	1.387.074.400,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Mekar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CURUG							**0,00**	**3.011.909.800,00**	**2.773.733.300,00**	**2.773.733.300,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.011.909.800,00**	**2.773.733.300,00**	**2.773.733.300,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.011.909.800,00**	**2.773.733.300,00**	**2.773.733.300,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.011.909.800,00**	**2.773.733.300,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.011.909.800,00	2.773.733.300,00	2.773.733.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.047.982.900,00	957.582.900,00	957.582.900,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.963.926.900,00	1.816.150.400,00	1.816.150.400,00	Kota Depok, Bojongsari, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BOJONGSARI BARU							**0,00**	**2.729.689.600,00**	**2.608.021.800,00**	**2.608.021.800,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.729.689.600,00**	**2.608.021.800,00**	**2.608.021.800,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.729.689.600,00**	**2.608.021.800,00**	**2.608.021.800,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.729.689.600,00**	**2.608.021.800,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.729.689.600,00	2.608.021.800,00	2.608.021.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.045.000.000,00	1.009.999.100,00	1.009.999.100,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.684.689.600,00	1.598.022.700,00	1.598.022.700,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BOJONGSARI							**0,00**	**2.616.127.000,00**	**2.438.453.000,00**	**2.438.453.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.616.127.000,00**	**2.438.453.000,00**	**2.438.453.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.616.127.000,00**	**2.438.453.000,00**	**2.438.453.000,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.616.127.000,00**	**2.438.453.000,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.616.127.000,00	2.438.453.000,00	2.438.453.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.246.288.000,00	1.125.688.000,00	1.125.688.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.369.839.000,00	1.312.765.000,00	1.312.765.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Bojongsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN DUREN SERIBU							**0,00**	**2.698.671.850,00**	**2.546.711.850,00**	**2.546.711.850,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.698.671.850,00**	**2.546.711.850,00**	**2.546.711.850,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.698.671.850,00**	**2.546.711.850,00**	**2.546.711.850,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.698.671.850,00**	**2.546.711.850,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.698.671.850,00	2.546.711.850,00	2.546.711.850,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.281.645.000,00	1.210.645.000,00	1.210.645.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.417.026.850,00	1.336.066.850,00	1.336.066.850,00	Kota Depok, Bojongsari, Duren Seribu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN SERUA							**0,00**	**3.208.546.400,00**	**2.984.827.900,00**	**2.984.827.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.208.546.400,00**	**2.984.827.900,00**	**2.984.827.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.208.546.400,00**	**2.984.827.900,00**	**2.984.827.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.208.546.400,00**	**2.984.827.900,00**	**0,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.208.546.400,00	2.984.827.900,00	2.984.827.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	1.658.115.000,00	1.622.715.000,00	1.622.715.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Serua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	0,00	1.550.431.400,00	1.362.112.900,00	1.362.112.900,00	Kota Depok, Bojongsari, Serua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PONDOK PETIR							**3.757.598.400,00**	**3.534.723.900,00**	**3.305.392.500,00**	**-452.205.900,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**3.757.598.400,00**	**3.534.723.900,00**	**3.305.392.500,00**	**-452.205.900,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**3.757.598.400,00**	**3.534.723.900,00**	**3.305.392.500,00**	**-452.205.900,00**							**0,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**3.757.598.400,00**	**3.534.723.900,00**	**3.305.392.500,00**	**-3.757.598.400,00**							**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	3.757.598.400,00	3.534.723.900,00	3.305.392.500,00	-452.205.900,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	1.564.656.000,00	1.564.656.000,00	1.496.256.000,00	-68.400.000,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2.192.942.400,00	1.970.067.900,00	1.809.136.500,00	-383.805.900,00	Kota Depok, Bojongsari, Pondok Petir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	KECAMATAN BOJONGSARI
		KECAMATAN CIMANGGIS							**43.132.403.066,00**	**20.186.248.255,00**	**20.686.165.255,00**	**-22.446.237.811,00**							**19.744.580.812,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**43.132.403.066,00**	**20.186.248.255,00**	**20.686.165.255,00**	**-22.446.237.811,00**							**19.744.580.812,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**43.132.403.066,00**	**20.186.248.255,00**	**20.686.165.255,00**	**-22.446.237.811,00**							**19.744.580.812,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**14.061.370.205,00**	**14.060.292.205,00**	**14.510.809.205,00**	**1.944.984.669,00**							**16.006.354.874,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dokumen Pendukung SAKIP*				100 %	100 %	72.607.000,00	72.607.000,00	71.239.000,00	-1.368.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Kecamatan Cimanggis		83.498.625,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	48.232.700,00	48.232.700,00	48.232.700,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			55.467.835,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				17 Laporan	17 Laporan	24.374.300,00	24.374.300,00	23.006.300,00	-1.368.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	- -			28.030.790,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi Keuangan Tepat Waktu*				100 %	100 %	12.581.685.155,00	12.581.685.155,00	12.880.032.155,00	298.347.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Aparatur dan Pegawai Kecamatan dan Kelurahan		14.468.943.046,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	12.556.681.155,00	12.556.681.155,00	12.856.681.155,00	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			14.440.183.328,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	25.004.000,00	25.004.000,00	23.351.000,00	-1.653.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			28.759.718,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	548.985.450,00	547.937.450,00	622.875.450,00	73.890.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat dan ASN		464.934.248,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.734.000,00	9.734.000,00	9.722.000,00	-12.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.196.400,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	310.279.000,00	309.255.000,00	309.255.000,00	-1.024.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			192.600.850,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.540.000,00	9.540.000,00	9.540.000,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			10.969.850,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	61.281.000,00	61.281.000,00	61.281.000,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			70.473.150,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	31.173.450,00	31.173.450,00	31.173.450,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			35.849.698,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				254 Laporan	651 Laporan	126.978.000,00	126.954.000,00	201.904.000,00	74.926.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			143.844.300,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*				100 %	100 %	445.597.600,00	445.597.600,00	495.597.600,00	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Kecamatan Cimanggis		500.648.705,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	176.500.000,00	176.500.000,00	226.500.000,00	50.000.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			191.221.195,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	269.097.600,00	269.097.600,00	269.097.600,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			309.427.510,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik*				100 %	100 %	412.495.000,00	412.465.000,00	441.065.000,00	28.570.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Kecamatan Cimanggis		488.330.250,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	77.200.000,00	77.200.000,00	99.700.000,00	22.500.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			102.741.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	29.020.000,00	28.990.000,00	35.090.000,00	6.070.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			33.373.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	306.275.000,00	306.275.000,00	306.275.000,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			352.216.250,00	KECAMATAN CIMANGGIS
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Capaian penyelenggraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**5.614.455.400,00**	**5.613.852.000,00**	**5.663.252.000,00**	**-2.350.153.087,00**							**3.264.302.313,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	166.996.950,00	166.996.950,00	166.996.950,00	0,00			-	- -	Masyarakat dan ASN		192.046.838,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	166.996.950,00	166.996.950,00	166.996.950,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	- -			192.046.838,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Pemenuhan Kebutuhan Koordinasi*				100 %	100 %	4.611.664.000,00	4.611.060.600,00	4.660.460.600,00	48.796.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Masyarakat dan ASN		2.012.500.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	4.611.664.000,00	4.611.060.600,00	4.660.460.600,00	48.796.600,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.012.500.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Usulan Pemerintahan yang Dilimpahkan*				100 %	100 %	835.794.450,00	835.794.450,00	835.794.450,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat dan ASN		1.059.755.475,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	835.794.450,00	835.794.450,00	835.794.450,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.059.755.475,00	KECAMATAN CIMANGGIS
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**512.104.050,00**	**512.104.050,00**	**512.104.050,00**	**-38.180.425,00**							**473.923.625,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan penegakan perda/perwal*				-	2 Perda	213.912.350,00	213.912.350,00	213.912.350,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat dan ASN		131.002.825,00	KECAMATAN CIMANGGIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	155.360.000,00	155.360.000,00	155.360.000,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			63.667.450,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	58.552.350,00	58.552.350,00	58.552.350,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	- -			67.335.375,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan penegakan perda/perwal*				40 Orang	2 perda	298.191.700,00	298.191.700,00	298.191.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Masyarakat dan ASN		342.920.800,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	298.191.700,00	298.191.700,00	298.191.700,00	0,00	Kota Depok, Cimanggis, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			342.920.800,00	KECAMATAN CIMANGGIS
		KELURAHAN CISALAK PASAR							**0,00**	**2.953.160.500,00**	**2.608.036.650,00**	**2.608.036.650,00**							**3.693.340.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.953.160.500,00**	**2.608.036.650,00**	**2.608.036.650,00**							**3.693.340.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.953.160.500,00**	**2.608.036.650,00**	**2.608.036.650,00**							**3.693.340.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.953.160.500,00**	**2.608.036.650,00**	**3.693.340.000,00**							**3.693.340.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.953.160.500,00	2.608.036.650,00	2.608.036.650,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.693.340.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.095.505.000,00	1.025.758.050,00	1.025.758.050,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.259.830.750,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	1.857.655.500,00	1.582.278.600,00	1.582.278.600,00	Kota Depok, Cimanggis, Cisalak Pasar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.433.509.250,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN TUGU							**0,00**	**4.222.808.750,00**	**3.849.934.350,00**	**3.849.934.350,00**							**4.800.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**4.222.808.750,00**	**3.849.934.350,00**	**3.849.934.350,00**							**4.800.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**4.222.808.750,00**	**3.849.934.350,00**	**3.849.934.350,00**							**4.800.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**4.222.808.750,00**	**3.849.934.350,00**	**4.800.000.000,00**							**4.800.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	4.222.808.750,00	3.849.934.350,00	3.849.934.350,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.800.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.288.142.500,00	1.142.742.500,00	1.142.742.500,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.300.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	2.934.666.250,00	2.707.191.850,00	2.707.191.850,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.500.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CURUG							**0,00**	**2.993.781.211,00**	**2.635.889.863,00**	**2.635.889.863,00**							**3.790.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.993.781.211,00**	**2.635.889.863,00**	**2.635.889.863,00**							**3.790.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.993.781.211,00**	**2.635.889.863,00**	**2.635.889.863,00**							**3.790.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.993.781.211,00**	**2.635.889.863,00**	**3.790.000.000,00**							**3.790.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.993.781.211,00	2.635.889.863,00	2.635.889.863,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.790.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	999.606.211,00	887.640.363,00	887.640.363,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.150.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	1.994.175.000,00	1.748.249.500,00	1.748.249.500,00	Kota Depok, Cimanggis, Curug	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.640.000.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PASIR GUNUNG SELATAN							**0,00**	**3.756.391.200,00**	**3.370.329.500,00**	**3.370.329.500,00**							**4.615.870.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.756.391.200,00**	**3.370.329.500,00**	**3.370.329.500,00**							**4.615.870.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.756.391.200,00**	**3.370.329.500,00**	**3.370.329.500,00**							**4.615.870.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.756.391.200,00**	**3.370.329.500,00**	**4.615.870.000,00**							**4.615.870.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.756.391.200,00	3.370.329.500,00	3.370.329.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.615.870.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.110.926.500,00	965.526.500,00	965.526.500,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.277.565.475,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	2.645.464.700,00	2.404.803.000,00	2.404.803.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Pasir Gunung Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.338.304.525,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN HARJAMUKTI							**0,00**	**3.275.884.800,00**	**2.900.771.300,00**	**2.900.771.300,00**							**4.127.350.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.275.884.800,00**	**2.900.771.300,00**	**2.900.771.300,00**							**4.127.350.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.275.884.800,00**	**2.900.771.300,00**	**2.900.771.300,00**							**4.127.350.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.275.884.800,00**	**2.900.771.300,00**	**4.127.350.000,00**							**4.127.350.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.275.884.800,00	2.900.771.300,00	2.900.771.300,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.127.350.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.565.836.000,00	1.425.850.000,00	1.425.850.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.801.122.525,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	1.710.048.800,00	1.474.921.300,00	1.474.921.300,00	Kota Depok, Cimanggis, Harjamukti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.326.227.475,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN MEKARSARI							**0,00**	**4.027.739.150,00**	**3.588.064.550,00**	**3.588.064.550,00**							**4.973.980.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**4.027.739.150,00**	**3.588.064.550,00**	**3.588.064.550,00**							**4.973.980.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**4.027.739.150,00**	**3.588.064.550,00**	**3.588.064.550,00**							**4.973.980.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**persentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**4.027.739.150,00**	**3.588.064.550,00**	**4.973.980.000,00**							**4.973.980.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	4.027.739.150,00	3.588.064.550,00	3.588.064.550,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		4.973.980.000,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	0,00	1.308.148.000,00	877.028.150,00	877.028.150,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.504.370.200,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	2.719.591.150,00	2.711.036.400,00	2.711.036.400,00	Kota Depok, Cimanggis, Mekarsari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			3.469.609.800,00	KECAMATAN CIMANGGIS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KECAMATAN CIPAYUNG							**31.312.098.920,00**	**14.430.079.800,00**	**14.845.328.000,00**	**-16.466.770.920,00**							**16.749.001.947,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**31.312.098.920,00**	**14.430.079.800,00**	**14.845.328.000,00**	**-16.466.770.920,00**							**16.749.001.947,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**31.312.098.920,00**	**14.430.079.800,00**	**14.845.328.000,00**	**-16.466.770.920,00**							**16.749.001.947,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**10.803.793.570,00**	**11.108.654.650,00**	**11.658.654.650,00**	**2.128.848.377,00**							**12.932.641.947,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen pendukung SAKIP*				100 %	100 %	34.999.550,00	34.699.550,00	34.699.550,00	-300.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		42.350.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	34.999.550,00	34.699.550,00	34.699.550,00	-300.000,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENARIKAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			42.350.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dokumen pendukung SAKIP*				100 %	100 %	9.435.203.820,00	9.740.384.900,00	10.290.384.900,00	855.181.080,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Perangkat Daerah		11.416.568.429,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	9.419.984.820,00	9.725.173.900,00	10.275.173.900,00	855.189.080,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			11.398.181.632,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	19 Laporan	15.219.000,00	15.211.000,00	15.211.000,00	-8.000,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			18.386.797,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*persentase penyediaan adm umum perkantoran*				100 %	100 %	731.692.200,00	731.672.200,00	731.672.200,00	-20.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		713.929.718,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28.045.000,00	28.045.000,00	28.045.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			30.005.580,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				53 Paket	53 Paket	331.056.100,00	331.056.100,00	331.056.100,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			257.279.880,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	33.116.100,00	33.116.100,00	33.116.100,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	162.620.000,00	162.620.000,00	162.620.000,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			192.500.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	44.999.000,00	44.999.000,00	44.999.000,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			51.165.818,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	131.856.000,00	131.836.000,00	131.836.000,00	-20.000,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			142.978.440,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah*				100 %	100 %	434.620.000,00	434.620.000,00	434.620.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		513.543.800,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			137.500.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				18 Laporan	6 Laporan	314.620.000,00	314.620.000,00	314.620.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			376.043.800,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	167.278.000,00	167.278.000,00	167.278.000,00	0,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		246.250.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	5 Unit	38.080.000,00	38.080.000,00	38.080.000,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			96.250.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	49 Unit	34.698.000,00	34.698.000,00	34.698.000,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			40.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	94.500.000,00	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**capaian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**				**100 %**	**100 %**	**3.267.998.750,00**	**2.994.628.450,00**	**2.895.366.500,00**	**141.501.250,00**							**3.409.500.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	144.999.850,00	144.999.850,00	144.999.850,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		159.500.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				6 Laporan	6 Laporan	144.999.850,00	144.999.850,00	144.999.850,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			159.500.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase pemenuhan kebutuhan koordinasi*				100 %	100 %	1.469.209.500,00	1.469.209.500,00	1.521.409.500,00	52.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		1.600.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	1.469.209.500,00	1.469.209.500,00	1.521.409.500,00	52.200.000,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.600.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase usulan pemerintahan yang dilimpahkan*				100 %	100 %	1.653.789.400,00	1.380.419.100,00	1.228.957.150,00	-424.832.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -	Perangkat Daerah		1.650.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Laporan	10 Laporan	1.653.789.400,00	1.380.419.100,00	1.228.957.150,00	-424.832.250,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) HIBAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	- -			1.650.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
3.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi ketentraman dan ketertiban**				**100 %**	**100 %**	**421.999.400,00**	**326.796.700,00**	**291.306.850,00**	**-15.139.400,00**							**406.860.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 perda	2 perda	374.999.400,00	279.796.700,00	244.306.850,00	-130.692.550,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		360.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				48 Laporan	48 Laporan	199.999.700,00	199.999.700,00	165.463.850,00	-34.535.850,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			110.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				5 Laporan	5 Laporan	174.999.700,00	79.797.000,00	78.843.000,00	-96.156.700,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			250.000.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Cakupan penegakan perda/perwal*				2 perda	2 perda	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Perangkat Daerah		46.860.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	Kota Depok, Cipayung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			46.860.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
		KELURAHAN RATU JAYA							**0,00**	**3.267.303.850,00**	**2.958.770.700,00**	**2.958.770.700,00**							**3.899.170.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.267.303.850,00**	**2.958.770.700,00**	**2.958.770.700,00**							**3.899.170.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.267.303.850,00**	**2.958.770.700,00**	**2.958.770.700,00**							**3.899.170.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang Tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.267.303.850,00**	**2.958.770.700,00**	**3.899.170.000,00**							**3.899.170.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terselenggaranya pemberdayaan masyarakat*				100 %	100 %	0,00	3.267.303.850,00	2.958.770.700,00	2.958.770.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.899.170.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	1.065.152.500,00	1.065.152.500,00	1.065.152.500,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.187.617.750,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	0,00	2.202.151.350,00	1.893.618.200,00	1.893.618.200,00	Kota Depok, Cipayung, Ratu Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.711.552.250,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG							**0,00**	**3.335.039.200,00**	**2.994.989.800,00**	**2.994.989.800,00**							**2.153.215.196,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.335.039.200,00**	**2.994.989.800,00**	**2.994.989.800,00**							**2.153.215.196,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.335.039.200,00**	**2.994.989.800,00**	**2.994.989.800,00**							**2.153.215.196,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase pemberdayaan masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.335.039.200,00**	**2.994.989.800,00**	**2.153.215.196,00**							**2.153.215.196,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	3.335.039.200,00	2.994.989.800,00	2.994.989.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		2.153.215.196,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	0,00	1.249.260.000,00	1.038.560.000,00	1.038.560.000,00	Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.142.416,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	2.085.779.200,00	1.956.429.800,00	1.956.429.800,00	Kota Depok, Cipayung, Bojong Pondok Terong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.152.072.780,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CIPAYUNG JAYA							**0,00**	**2.888.437.700,00**	**2.550.016.300,00**	**2.550.016.300,00**							**3.365.780.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.888.437.700,00**	**2.550.016.300,00**	**2.550.016.300,00**							**3.365.780.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.888.437.700,00**	**2.550.016.300,00**	**2.550.016.300,00**							**3.365.780.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang tercapai**				**100%**	**100%**	**0,00**	**2.888.437.700,00**	**2.550.016.300,00**	**3.365.780.000,00**							**3.365.780.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				100%	100%	0,00	2.888.437.700,00	2.550.016.300,00	2.550.016.300,00			-	- -	-		3.365.780.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	1.406.582.000,00	1.371.182.000,00	1.371.182.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.547.240.200,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	1.481.855.700,00	1.178.834.300,00	1.178.834.300,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	- -			1.818.539.800,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN CIPAYUNG							**0,00**	**3.172.093.900,00**	**2.856.981.500,00**	**2.856.981.500,00**							**3.439.987.900,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**3.172.093.900,00**	**2.856.981.500,00**	**2.856.981.500,00**							**3.439.987.900,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**3.172.093.900,00**	**2.856.981.500,00**	**2.856.981.500,00**							**3.439.987.900,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**3.172.093.900,00**	**2.856.981.500,00**	**3.439.987.900,00**							**3.439.987.900,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase ormas/pokmas yang diberdayakan*				14 Pokmas / Ormas	100 %	0,00	3.172.093.900,00	2.856.981.500,00	2.856.981.500,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.439.987.900,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				100 Unit	13 Unit	0,00	1.379.356.000,00	1.168.956.000,00	1.168.956.000,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.523.500.000,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	1.792.737.900,00	1.688.025.500,00	1.688.025.500,00	Kota Depok, Cipayung, Cipayung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.916.487.900,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		KELURAHAN PONDOK JAYA							**0,00**	**2.886.308.750,00**	**2.501.981.700,00**	**2.501.981.700,00**							**3.487.341.880,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**0,00**	**2.886.308.750,00**	**2.501.981.700,00**	**2.501.981.700,00**							**3.487.341.880,00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**0,00**	**2.886.308.750,00**	**2.501.981.700,00**	**2.501.981.700,00**							**3.487.341.880,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat yang tercapai**				**100 %**	**100 %**	**0,00**	**2.886.308.750,00**	**2.501.981.700,00**	**3.487.341.880,00**							**3.487.341.880,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Presentase Ormas/Pokmas yang diberdayakan*				100 %	100 %	0,00	2.886.308.750,00	2.501.981.700,00	2.501.981.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	-		3.487.341.880,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Unit	20 Unit	0,00	1.042.261.000,00	1.042.261.000,00	1.042.261.000,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			1.146.487.100,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	0,00	1.844.047.750,00	1.459.720.700,00	1.459.720.700,00	Kota Depok, Cipayung, Pondok Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			2.340.854.780,00	KECAMATAN CIPAYUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda**				**100 %**	**100 %**	**6.440.410.192,00**	**6.410.918.868,00**	**5.868.601.943,00**	**992.332.711,00**							**7.432.742.903,00**	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu*				100 %	100 %	260.135.000,00	206.499.000,00	206.499.000,00	-53.636.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Masyarakat		149.775.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	147.302.000,00	135.292.000,00	135.292.000,00	-12.010.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			104.134.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	112.833.000,00	71.207.000,00	71.207.000,00	-41.626.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			45.641.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase administrasi keuangan tepat waktu*				100 %	100 %	4.612.676.492,00	4.735.933.168,00	4.430.981.243,00	-181.695.249,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bakesbangpol		5.661.023.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	4.612.676.492,00	4.735.933.168,00	4.430.981.243,00	-181.695.249,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			5.661.023.403,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**NON URUSAN**							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
	8.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi*				100 %	100 %	185.342.000,00	185.342.000,00	0,00	-185.342.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bakesbangpol		203.876.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	185.342.000,00	0,00	0,00	-185.342.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**110.917.628.092,00**	**91.572.212.458,00**	**91.836.572.633,00**	**-19.081.055.459,00**							**16.237.092.003,00**	
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				-	26 Orang	0,00	185.342.000,00	0,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			203.876.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perkantoran*				100 %	100 %	950.640.700,00	919.836.700,00	869.086.700,00	-81.554.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bakesbangpol		1.009.724.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14.955.000,00	14.955.000,00	14.955.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			15.946.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	129.194.500,00	129.194.500,00	129.194.500,00	0,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			130.728.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.889.200,00	26.889.200,00	26.889.200,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			29.660.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	155.689.000,00	153.625.000,00	143.825.000,00	-11.864.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			126.522.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	74.095.000,00	74.095.000,00	74.095.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			101.984.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				500 Laporan	500 Laporan	549.818.000,00	521.078.000,00	480.128.000,00	-69.690.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			604.883.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah*				100 %	100 %	344.601.000,00	276.293.000,00	256.620.000,00	-87.981.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bakesbangpol		329.049.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	54 Unit	344.601.000,00	276.293.000,00	256.620.000,00	-87.981.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			329.049.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase barang milik daerah kondisi baik*				100 %	100 %	87.015.000,00	87.015.000,00	105.415.000,00	18.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN Bakesbangpol		79.293.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	9 Unit	56.160.000,00	56.160.000,00	74.560.000,00	18.400.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			62.964.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	30.855.000,00	30.855.000,00	30.855.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			16.329.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya**				**100 %**	**100 %**	**2.303.563.200,00**	**2.475.785.950,00**	**2.340.874.900,00**	**125.738.400,00**							**2.429.301.600,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Persentase anggota masyarakat sasaran dan ASN yang dikuatkan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaannya*				100 %	100 %	2.303.563.200,00	2.475.785.950,00	2.340.874.900,00	37.311.700,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	ASN, Pelajar, Massyarakat		2.429.301.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1650 Orang	2200 Orang	1.000.137.000,00	1.255.413.150,00	1.140.434.500,00	140.297.500,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan			994.437.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				42 Orang	42 Orang	1.129.164.600,00	1.123.628.600,00	1.112.438.600,00	-16.726.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			1.134.864.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	147.761.600,00	70.244.200,00	68.001.800,00	-79.759.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				42 Orang	42 Orang	26.500.000,00	26.500.000,00	20.000.000,00	-6.500.000,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**				**100 %**	**100 %**	**95.173.022.200,00**	**75.661.158.590,00**	**76.317.484.190,00**	**-91.273.986.350,00**							**3.899.035.850,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Persentase meningkatnya peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik*				100 %	100 %	95.173.022.200,00	75.661.158.590,00	76.317.484.190,00	-18.855.538.010,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Partai Politik, Pelajar, Masyarakat		3.899.035.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	2.796.414.000,00	2.796.414.000,00	2.796.414.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			2.796.414.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1345 Orang	1755 Orang	92.376.608.200,00	72.864.744.590,00	73.521.070.190,00	-18.855.538.010,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			1.102.621.850,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Sosial dan Politik yang Aktif dan berkinerja**				**75 %**	**75 %**	**450.423.000,00**	**577.871.950,00**	**868.039.000,00**	**-9.957.700,00**							**440.465.300,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Persentase Organisasi Sosial dan Politik yang Aktif dan berkinerja*				75 %	75 %	450.423.000,00	577.871.950,00	868.039.000,00	417.616.000,00			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Organisasi Masyarakat		440.465.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	375.000.000,00	325.000.000,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	400.423.000,00	527.871.950,00	493.039.000,00	92.616.000,00	Kota Depok, Cimanggis, Tugu	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			440.465.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Indeks Kerukunan Umat Beragama**				**3.4 Poin**	**3.4 Poin**	**1.454.217.000,00**	**1.419.961.850,00**	**1.419.961.850,00**	**-313.401.300,00**							**1.140.815.700,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Indeks Kerukunan Umat Beragama*				3.4 Poin	3.4 Poin	1.454.217.000,00	1.419.961.850,00	1.419.961.850,00	-34.255.150,00			-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	ASN, Pelajar, Massyarakat		1.140.815.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				2 Dokumen	3 Dokumen	1.118.844.000,00	1.118.844.000,00	1.118.844.000,00	0,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				550 Orang	250 Orang	335.373.000,00	301.117.850,00	301.117.850,00	-34.255.150,00	Kota Depok, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			390.815.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Indeks Konflik Sosial**				**1.6 Poin**	**1.6 Poin**	**5.095.992.500,00**	**5.026.515.250,00**	**5.021.610.750,00**	**-4.201.261.850,00**							**894.730.650,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Persentase Penyelesaian Konflik Sosial*				100 %	100 %	5.095.992.500,00	5.026.515.250,00	5.021.610.750,00	-74.381.750,00			-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga	Masyarakat		894.730.650,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100 Orang	150 Orang	4.551.491.500,00	4.422.370.400,00	4.422.370.400,00	-129.121.100,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Depok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			384.564.950,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				250 Orang	350 Orang	544.501.000,00	604.144.850,00	599.240.350,00	54.739.350,00	Kota Depok, Pancoran Mas, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Nilai-nilai Keluarga Peningkatan Nilai-nilai Keluarga			510.165.700,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								**3.843.271.059.687,00**	**4.158.586.281.126,00**	**4.428.296.412.231,32**	**585.025.352.544,32**							**4.015.508.141.444,00**	